

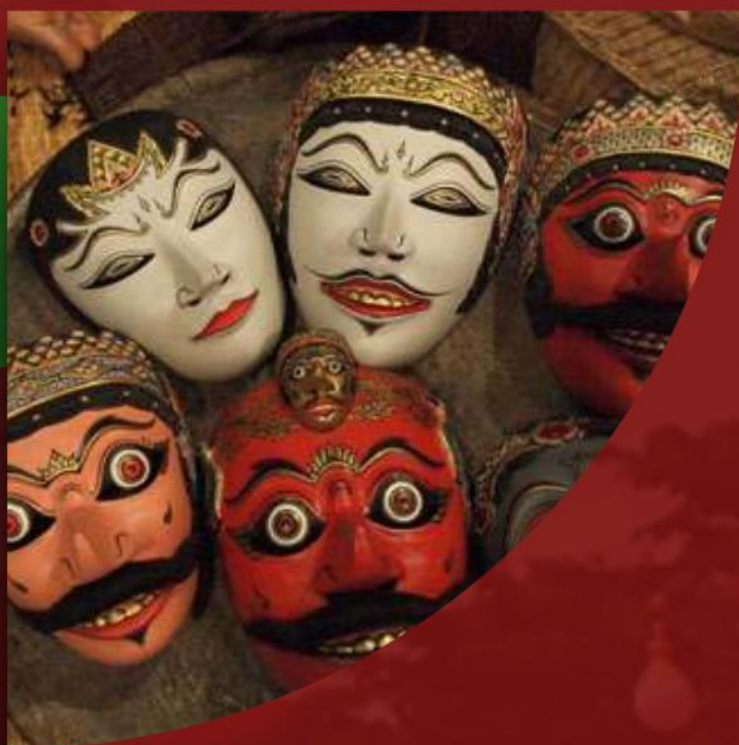


PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

TAHUN

2026



BAPPERIDA Kabupaten Cirebon

 bapperida.cirebonkab.go.id

 [bapperida.kabcirebon](https://www.instagram.com/bapperida.kabcirebon)

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 24 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

14. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pemerintah yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
17. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.
18. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
19. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa program.
20. Kinerja adalah capaian Keluaran/Hasil/Dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, hasil, dan dampak.
22. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.

23. Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
24. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran RPD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2026.
- (3) RKPD Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, Program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan RKPD provinsi.
- (4) RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

BAB III SISTEMATIKA RKPD Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen;
 - b. Bab II gambaran umum kondisi daerah, memuat kondisi umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD tahun sebelumnya dan realisasi RPD, serta permasalahan pembangunan daerah;
 - c. Bab III rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
 - d. Bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah, memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2026;

- e. Bab V rencana kerja dan pendanaan daerah, memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2026 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD;
 - f. Bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, memuat indikator Kinerja Tahun 2026;
 - g. Bab VII penutup.
- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN RKPD Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Rencana kerja yang terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta pendanaannya dapat bersumber dari:
- a. APBD;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Dunia Usaha.

BAB V PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RKPD Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebijakan perencanaan Renja;
 - b. pelaksanaan Renja; dan
 - c. Hasil capaian Renja.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Program dan/atau kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. target dan capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;

- c. target dan capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan dan/atau Sub Kegiatan Pembangunan Daerah;
 - d. target dan capaian Indikator SPM;
 - e. target dan capaian IKK; dan
 - f. target dan capaian Indikator TPB.
- (5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja untuk monitoring dan evaluasi capaian Indikator Kinerja Hasil, Dampak dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan Kinerja daerah.
- (6) Perangkat Daerah membuat laporan Kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang Keluaran kegiatan dan indikator Hasil masing-masing Program, indikator capaian sasaran Perangkat Daerah.
- (7) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (8) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

BAB VI
PERUBAHAN RKPD
Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila Hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana Program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - d. pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target Kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada RKPD Tahun 2026 merupakan Hasil penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri khususnya yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhir RPD Tahun 2025-2026 dan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juli 2025

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 9 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



FILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan baik dan tepat waktu. Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun atau disebut dengan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Secara substansi Dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 serta merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting. Oleh karena itu, RKPD ini harus mampu mewujudkan tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 berfokus pada **“Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik”**. Dengan harapan Dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mampu menjawab tantangan dan isu strategis yang bergulir sebelum tahun 2026.

Dalam proses penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang telah berkontribusi dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri. Semoga dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ini dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk Kabupaten Cirebon. Walhamdulillahirobbilalamin.

Cirebon, 9 Juli 2025
BUPATI CIREBON,

TTD

Drs. H. IMRON, M.Ag

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABEL..... xi

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-2

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-5

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-10

1.4 Maksud dan Tujuan I-12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1. Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1. Aspek Georafi dan Demografi II-1

2.1.1.1 Kondisi Geografis Daerah..... II-1

2.1.1.2 Kondisi Demografi Daerah..... II-38

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-50

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi II-50

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-63

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah II-75

2.1.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-75

2.1.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-85

2.1.3.3. Daya Saing Iklim Investasi..... II-89

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum II-93

2.1.4.1. Reformasi Birokrasi II-94

2.1.4.2. Pelayanan Publik..... II-97

2.1.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik..... II-98

2.1.4.4. Layanan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah II-100

2.1.5 Penerapan Standar Pelayanan Minimal II-178

2.1.5.1 Urusan Pendidikan II-179

2.1.5.2 Urusan Kesehatan II-191

2.1.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-238

2.1.5.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-248

2.1.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat II-254

2.1.5.6. Urusan Sosial	II-277
2.1.5.7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-325
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun 2025 dan Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2019-2024	II-347
2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2025	II-347
2.2.2. Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2019-2024	II-357
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-369
2.3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon	II-369
2.3.2 Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .	II-381
2.3.3. Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis.....	II-398
2.4. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-409
2.4.1. Kondisi Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II-412
2.4.2. Capaian Target Indikator TPB Berdasarkan Pilar	II-417
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1. Kondisi Eksisting Kerangka Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon Hingga Tahun 2024	III-1
3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	III-4
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sisi Pengeluaran	III-9
3.1.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-11
3.1.3. Ekspor dan Impor Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-13
3.1.4. Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	III-14
3.1.5. Inflasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-14
3.1.6. Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	III-16
3.1.6.1. Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja.....	III-16
3.1.6.2. Karakteristik Penduduk Bekerja di Kabupaten Cirebon	III-17
3.1.6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon.....	III-19
3.1.7. Indeks Gini.....	III-22
3.1.8. Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-23
3.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	III-27
3.1.10. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan Tahun 2026	III-32
3.1.11. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi	III-55
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-72
3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	III-75

3.2.2.	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-80
3.2.3.	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	III-84
3.2.4.	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-90
3.3.	Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah	III-94
3.3.1.	APBN.....	III-94
3.3.2.	Dana Masyarakat/Umat.....	III-95
3.3.3.	Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))	III-95
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		IV-1
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-3
4.1.1.	Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya	IV-4
4.1.2.	Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat.....	IV-5
4.1.3.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon	IV-8
4.1.4.	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon	IV-20
4.2.	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	IV-38
4.2.1.	Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026	IV-38
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026	IV-40
4.2.2.1	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Permasalahan, Isu Strategis, dan Arah Kebijakan.....	IV-40
4.2.2.2.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	IV-46
4.2.2.3.	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Prioritas Nasional pada RKP 2026	IV-48
4.2.2.4.	Program Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2026.....	IV-63
4.3.	Inovasi yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan dan Isu Strategis	IV-106
4.4.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	IV-108
4.4.1.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.....	IV-109
4.4.2.	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon.....	IV-113
4.5.	Program Kolaborasi.....	IV-115
4.5.1.	Program Kolaborasi Ketahanan Pangan	IV-115
4.5.2.	Program Kolaborasi Penurunan Stunting	IV-126
4.5.3.	Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan	IV-133

4.6.	Program Prioritas Kepala Daerah	IV-143
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		V-1
5.1.	Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Program Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Pada RKPD 2025	V-2
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025	V-16
5.2.1.	Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.....	V-17
5.2.2.	Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) (Usulan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan) dan Hasil Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	V-24
5.2.3.	Pagu Indikatif Hibah Bansos Tahun 2026.....	V-34
5.2.4.	Pagu Indikatif Proyek Strategis / Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026	V-34
5.2.5.	Pagu Indikatif Program Kolaborasi Tahun 2026	V-38
5.2.6.	Pagu Indikatif Inovasi Daerah (PIID) Tahun 2026	V-50
5.3	Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026	V-52
5.4	Rencana Pendukung Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2025	V-57
5.4.1	Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2025	V-57
5.4.2	Rencana Usulan Kegiatan Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat.....	V-67
5.4.3	Rencana Usulan Kegiatan yang Bersumber dari <i>Corporate Social Responsibility</i> (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) Tahun 2026	V-68
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		VI-1
6.1.	Penetapan Indikator Kinerja Makro	VI-1
6.2.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	VI-2
6.3.	Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah.....	VI-3
BAB VII PENUTUP		VII-1
7.1.	Kaidah Pelaksanaan	VII-2
7.2.	Kaidah Pendanaan	VII-4
7.3	Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko	VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026	I-5
Gambar 1.2	Hubungan RKPD Tahun 2026 Terhadap Dokumen Lainnya	I-11
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Cirebon	II-3
Gambar 2.2	Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-6
Gambar 2.3	Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-7
Gambar 2.4	Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon	II-8
Gambar 2.5	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon	II-16
Gambar 2.6	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Cirebon	II-19
Gambar 2.7	Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Cirebon	II-20
Gambar 2.8	Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2019-2024	II-21
Gambar 2.9	Cut off point Indeks Ketahanan Pangan.....	II-23
Gambar 2.10	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-24
Gambar 2.11	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023	II-25
Gambar 2.12	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023	II-26
Gambar 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-28
Gambar 2.14	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-31
Gambar 2.15	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.16	Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon	II-38
Gambar 2.17	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-41
Gambar 2.18	Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-42
Gambar 2.19	Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa)	II-48
Gambar 2.20	Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Jiwa)	II-48
Gambar 2.21	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-51

Gambar 2.22	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)	II-51
Gambar 2.23	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	II-52
Gambar 2.24	Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Persen)	II-54
Gambar 2.25	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2024	II-56
Gambar 2.26	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-60
Gambar 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Persen)	II-61
Gambar 2.28	Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024	II-64
Gambar 2.29	Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-68
Gambar 2.30	Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar 2.31	Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-69
Gambar 2.32	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-70
Gambar 2.33	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun).....	II-71
Gambar 2.34	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2022.....	II-72
Gambar 2.35	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2023.....	II-74
Gambar 2.36	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2023	II-74
Gambar 2.37	Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-75
Gambar 2.38	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024	II-76
Gambar 2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-77
Gambar 2.40	Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-78
Gambar 2.41	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024	II-79
Gambar 2.42	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024	II-80
Gambar 2.43	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita.....	II-83
Gambar 2.44	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	II-84

Gambar 2.45	Rasio ekspor dan impor terhadap PDB.....	II-85
Gambar 2.46	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-86
Gambar 2.47	Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-89
Gambar 2.48	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-92
Gambar 2.49	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2024.....	II-92
Gambar 2.50	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-94
Gambar 2.51	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2019-2022.....	II-95
Gambar 2.52	Capaian IRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023	II-96
Gambar 2.53	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024.....	II-97
Gambar 2.54	Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-98
Gambar 2.55	Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024.....	II-99
Gambar 2.56	Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-127
Gambar 2.57	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2018- 2024.....	II-134
Gambar 2.58	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-147
Gambar 2.59	Persentase Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Cirebon, 2024.....	II-155
Gambar 2.60	Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-176
Gambar 2.61	Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB.....	II-169
Gambar 2.62	Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).....	II-414
Gambar 2.63	Persentase Capaian Indikator Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Cirebon.....	II-414
Gambar 2.64	Capaian Target indikator TPB Per Pilar di Kabupaten Cirebon.....	II-418
Gambar 2.65	Capaian Target Indikator TPB Pilar Sosial.....	II-419
Gambar 2.66	Capaian Target indikator TPB Pilar Ekonomi.....	II-420

Gambar 2.67	Capaian Target Indikator TPB Pilar Lingkungan	II-422
Gambar 2.68	Capaian Target Indikator TPB Pilar Tata Kelola dan Hukum	II-423
Gambar 3.1	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-2
Gambar 3.2	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024	III-3
Gambar 3.3	LPE dan Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon, 2020-2024...	III-11
Gambar 3.4	Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	III-13
Gambar 3.5	Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Persen).....	III-15
Gambar 3.6	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2021-2024	III-17
Gambar 3.7	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Cirebon (persen), 2021 - 2024	III-18
Gambar 3.8	Perbandingan TPT dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-19
Gambar 3.9	Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-Rata Pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	III-20
Gambar 3.10	Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 .	III-23
Gambar 3.11	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024.....	III-24
Gambar 3.12	Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024	III-28
Gambar 3.13	Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024.....	III-30
Gambar 3.14	Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon , Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024.....	III-31
Gambar 3.15	Realisasi Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024.....	III-31
Gambar 3.16	Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)	III-33
Gambar 3.17	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara Lain Tahun 2024 (Persen)	III-34
Gambar 3.18	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	III-56

Gambar 3.19 Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Cirebon III-74

Gambar 3.20 Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon,
2020-2024 III-76

Gambar 3.21 Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2022-2024 III-100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon	II-4
Tabel 2.2	Unsur Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-10
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon	II-14
Tabel 2.4	Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon.....	II-17
Tabel 2.5	Cut off point Indeks Ketahanan Pangan	II-25
Tabel 2.6	Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)	II-32
Tabel 2.7	Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon	II-34
Tabel 2.8	Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II-36
Tabel 2.9	Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon	II-36
Tabel 2.10	Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon.....	II-37
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024.....	II-39
Tabel 2.12	Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-43
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2024	II-44
Tabel 2.14	Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-47
Tabel 2.15	Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-50
Tabel 2.16	PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-53
Tabel 2.17	Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024.....	II-55
Tabel 2.18	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024	II-57
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.....	II-58
Tabel 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.21	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024.....	II-65
Tabel 2.22	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022	II-73

Tabel 2.23	Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon.....	II-81
Tabel 2.24	Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023	II-86
Tabel 2.25	Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023.....	II-87
Tabel 2.26	Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023	II-87
Tabel 2.27	Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-88
Tabel 2.28	Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon	II-89
Tabel 2.29	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024	II-90
Tabel 2.30	Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-100
Tabel 2.31	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-103
Tabel 2.32	Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024.....	II-104
Tabel 2.33	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit), Tahun 2018-2024.....	II-105
Tabel 2.34	Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2019-2024.....	II-105
Tabel 2.35	Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2018-2024	II-106
Tabel 2.36	Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024.....	II-111
Tabel 2.37	Panjang Jalan Kabupaten (km) Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2024.....	II-114
Tabel 2.38	Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2024.....	II-114
Tabel 2.39	Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2023....	II-115
Tabel 2.40	Realisasi Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2024.....	II-117
Tabel 2.41	Kinerja Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024....	II-117
Tabel 2.42	Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2024	II-118

Tabel 2.43	Kinerja Urusan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024.....	II-119
Tabel 2.44	Capaian Bidang Sosial Tahun 2018-2024.....	II-121
Tabel 2.45	Kinerja Urusan Bidang Sosial Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020-2024	II-122
Tabel 2.46	Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2024.....	II-123
Tabel 2.47	Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024	II-124
Tabel 2.48	Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024	II-126
Tabel 2.49	Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2018-2024.....	II-127
Tabel 2.50	Kinerja Urusan Bidang Pangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024	II-129
Tabel 2.51	Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024	II-130
Tabel 2.52	Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024	II-131
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024.....	II-132
Tabel 2.54	Kinerja Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024	II-133
Tabel 2.55	Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024	II-134
Tabel 2.56	Kinerja Urusan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024	II-135
Tabel 2.57	Jumlah Kendaraan Angkutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024	II-135
Tabel 2.58	Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	II-137
Tabel 2.59	Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024.....	II-137
Tabel 2.60	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2018 s.d. 2024.....	II-138

Tabel 2.61	Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024	II-138
Tabel 2.62	Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024	II-140
Tabel 2.63	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024	II-140
Tabel 2.64	Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024	II-141
Tabel 2.65	Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024	II-143
Tabel 2.66	Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024	II-144
Tabel 2.67	Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024	II-145
Tabel 2.68	Jumlah Publikasi yang Diterbitkan BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.....	II-145
Tabel 2.69	Kinerja Urusan Bidang Statistik dan Persandian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024	II-146
Tabel 2.70	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-148
Tabel 2.71	Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024.....	II-149
Tabel 2.72	Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024.....	II-150
Tabel 2.73	Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan Tahun 2024	II-151
Tabel 2.74	Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024	II-153
Tabel 2.75	Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024	II-154
Tabel 2.76	Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024	II-156
Tabel 2.77	Jumlah Rumah Makan/Kuliner Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2018-2024	II-156
Tabel 2.78	Kinerja Urusan Bidang Pariwisata Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024.....	II-160
Tabel 2.79	Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2024	II-162

Tabel 2.80	Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Kw)	II-163
Tabel 2.81	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Tahun 2019 - 2024	II-164
Tabel 2.82	Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Cirebon, 2021 – 2024	II-167
Tabel 2.83	Kinerja Urusan Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024	II-168
Tabel 2.84	Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024	II-169
Tabel 2.85	Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024	II-170
Tabel 2.86	Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024	II-171
Tabel 2.87	Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-173
Tabel 2.88	Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024	II-174
Tabel 2.89	Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.....	II-175
Tabel 2.90	Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2018 s.d. 2024	II-176
Tabel 2.91	Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-180
Tabel 2.92	Pencapaian Target SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-185
Tabel 2.93	Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-190
Tabel 2.94	Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-191
Tabel 2.95	Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-194
Tabel 2.96	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-214
Tabel 2.97	Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-236
Tabel 2.98	Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-237

Tabel 2.99	Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-239
Tabel 2.100	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-242
Tabel 2.101	Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-246
Tabel 2.102	Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-247
Tabel 2.103	Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-249
Tabel 2.104	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-250
Tabel 2.105	Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-252
Tabel 2.106	Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024.....	II-253
Tabel 2.107	Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024	II-255
Tabel 2.108	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024.....	II-265
Tabel 2.109	Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-273
Tabel 2.110	Dukungan Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-274
Tabel 2.111	Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-276
Tabel 2.112	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-296
Tabel 2.113	Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-321
Tabel 2.114	Dukungan Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024	II-322
Tabel 2.115	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ..	II-323
Tabel 2.116	Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II	II-346

Tabel 2.117	Realisasi dan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2024.....	II-360
Tabel 2.118	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.....	II-368
Tabel 2.119	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II-379
Tabel 2.120	Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 dan Penjelasannya Sebagai Dasar Identifikasi Isu Strategis	II-397
Tabel 2.121	Rangkuman Capaian TPB Kabupaten Cirebon	II-410
Tabel 2.122	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional di Kabupaten Cirebon	II-413
Tabel 2.123	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional di Kabupaten Cirebon.....	II-414
Tabel 2.124	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Tidak Memiliki Data (NA) di Kabupaten Cirebon	II-415
Tabel 3.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024.....	III-4
Tabel 3.2	PDRB dan LPE Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2023-2024.....	III-5
Tabel 3.3	Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-7
Tabel 3.4	PDRB ADHK (Milyar Rupiah) dan Peranannya (Persen) Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-8
Tabel 3.5	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-9
Tabel 3.6	Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-11
Tabel 3.7	PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024.....	III-12
Tabel 3.8	Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-13
Tabel 3.9	Perbandingan Perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar, 2020-2024.....	III-21
Tabel 3.10	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2020-2024	III-24

Tabel 3.11	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-26
Tabel 3.12	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020-2024	III-27
Tabel 3.13	Capaian IPM Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten-Kabupaten di Sekitarnya, 2020–2024	III-28
Tabel 3.14	<i>Outlook</i> Produk Domestik Bruto Tahun 2025 Sisi Pengeluaran (Persen)	III-36
Tabel 3.15	<i>Outlook</i> Produk Domestik Bruto Tahun 2025 Sisi Lapangan Usaha (Persen)	III-37
Tabel 3.16	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026	III-39
Tabel 3.17	Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026	III-42
Tabel 3.18	Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen)	III-44
Tabel 3.19	Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026 (Persen)	III-45
Tabel 3.20	Realisasi Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha untuk 4 (Empat) Sektor Dominan Kabupaten Cirebon, 2025-2026	III-54
Tabel 3.21	Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 .	III-54
Tabel 3.22	Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026	III-55
Tabel 3.23	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2026 (Persen)	III-57
Tabel 3.24	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2026 (Persen)	III-59
Tabel 3.25	Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2026	III-61
Tabel 3.26	Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2026	III-63
Tabel 3.27	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027	III-78
Tabel 3.28	Realisasi Belanja Tahun 2023 - 2024, dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2025-2027	III-87
Tabel 3.29	Realisasi Pembiayaan Tahun 2023-2024, dan Proyeksi/Target Pembiayaan Tahun 2025-2027	III-92
Tabel 3.30	Alokasi APBN-TP Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024	III-94
Tabel 3.31	Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024...	III-99
Tabel 3.32	Laporan Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2024	III-99
Tabel 4.1	Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026	IV-2
Tabel 4.2	Target Sasaran Pembangunan Nasional	IV-5

Tabel 4.3	Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2026	IV-6
Tabel 4.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon 2025–2029	IV-9
Tabel 4.5	Indikator Tujuan dan Sasaran dan Target 2025-2029.....	IV-11
Tabel 4.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026	IV-23
Tabel 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Permasalahan Daerah	IV-43
Tabel 4.8	Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Prioritas Daerah.....	IV-47
Tabel 4.9	Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap Program Prioritas Nasional	IV-50
Tabel 4.10	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026	IV-57
Tabel 4.11	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026	IV-66
Tabel 4.12	Keterkaitan Antara Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon	IV-67
Tabel 4.13	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Tahun Anggaran 2026	IV-86
Tabel 4.14	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2026	IV-104
Tabel 4.15	Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat....	IV-109
Tabel 4.16	Indikasi Proyek Strategis Kewilayahan Jawa Barat di Kabupaten Cirebon Tahun 2026	IV-111
Tabel 4.17	Dukungan Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten Cirebon	IV-112
Tabel 4.18	Isu, Strategi dan Kebijakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044	IV-114
Tabel 4.19	Program Kolaborasi Ketahanan Pangan.....	IV-117
Tabel 4.20	Tagging Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kolaborasi Penurunan Stunting Tahun 2026.....	IV-128
Tabel 4.21	Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan	IV-135
Tabel 4.22	Integrasi Program Prioritas Kepala Daerah dengan Program Nomenklatur dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-144
Table.4.23	Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026	IV-149

Tabel 5.1	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan RKPD 2026 Dan Dukungan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026	V-3
Tabel 5.2	Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 dan Dukungan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Tahun 2026.....	V-9
Tabel 5.3	Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada RKPD Kabupate Cirebon Tahun 2026.....	V-16
Tabel 5.4	Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	V-17
Tabel 5.5	Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026	V-21
Tabel 5.6	Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan Tahun 2026 .	V-25
Tabel 5.7	Rincian Pelaksanaan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026	V-26
Tabel 5.8	Rekapitulasi Rincian Pagu PIK Per Perangkat Daerah Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026.....	V-29
Tabel 5.9	Hasil Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026	V-31
Tabel 5.10	Rekapitulasi Per Perangkat Daerah Terhadap Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.....	V-33
Tabel 5.11	Pagu Anggaran Indikatif Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2026	V-34
Tabel 5.12	Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2026	V-34
Tabel 5.13	Program Kolaboratif Pengentasan Kemiskinan.....	V-38
Tabel 5.14	Program Kolaboratif Penurunan Stunting Tahun 2026.....	V-41
Tabel 5.15	Program Kolaboratif Pengendalian Inflasi Tahun 2026	V-44
Tabel 5.16	Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2026	V-46
Tabel 5.17	Program Kolaborasi Kampung Sehat Tahun 2026.....	V-49
Tabel 5.18	Program Kolaborasi Kampung Literasi Tahun 2026.....	V-50
Tabel 5.19	Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2026	V-51
Tabel 5.20	Alokasi Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026.....	V-52
Tabel 5.21	Pagu Anggaran Indikatif DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2026	V-59
Tabel 5.22	Rencana Dukungan APBD Terhadap Pembiayaan Bersumber Pada DAK	V-59

Tabel 5.23	Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026	V-67
Tabel 6.1	Target Indikator Makro kabupaten Cirebon Tahun 2026.....	VI-2
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon Tahun 2026	VI-3
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Kunci) Terhadap capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2026	VI-4

BAB I

PENDAHULUAN



Pembangunan merupakan proses transformasi menuju tatanan kehidupan yang lebih baik dengan melibatkan atau memanfaatkan seluruh sumber daya daerah. Pembangunan daerah diselenggarakan melalui implementasi berbagai kebijakan menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai tujuan yang multi dimensi, kesejahteraan diwujudkan dalam aspek ekonomi yang bersejajaran dengan aspek sosial, budaya, kemanusiaan, dan lingkungan hidup secara keberlanjutan. Untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih baik secara efektif dan efisien maka pembangunan direncanakan dengan memerhatikan berbagai kaidah, baik dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan ini merupakan awal dari proses siklus pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
3. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
4. Perencanaan pembangunan Daerah mengintegrasikan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;
6. Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*achievable*), memperhatikan ketersediaan

sumber daya (*resources availability*) dan memperhatikan fungsi waktu (*times*), yang disingkat SMART.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD/RPD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD/RPD, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi Jawa Barat. Dalam kerangka materi RKPD Tahun 2026 disebutkan bahwa perencanaan bersifat dinamis, disamping harus mematuhi norma konsistensi kebijakan, RKPD tetap harus mampu menjawab permasalahan atau isu strategis dan kebutuhan masyarakat paling mendesak. Meskipun, di dalam RPJMD/RPD belum mengantisipasi suatu masalah atau isu pembangunan (baru).

RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan rencana tahunan dari rangkaian kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 yang telah mengakomodir visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 mempunyai kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, RKPD memuat prioritas pembangunan yang konsisten terhadap arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RPD) namun tetap dapat menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan terkini;
2. Secara normatif, RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 didasarkan atas hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang dimulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Perumusan kebijakan pembangunan dalam RKPD juga dilakukan dengan memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan kebijakan daerah yang telah diselaraskan dengan prioritas nasional/provinsi tahun 2026. Dengan demikian, RKPD juga disusun melalui proses integrasi dan harmonisasi kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD/RPD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini.

Di tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Cirebon memfokuskan tema pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu **“Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik”** dimana diarahkan untuk melanjutkan fokus pembangunan tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan inovasi dan tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah terus menjadi perhatian pemerintah pada tahun ini, dan diharapkan berdampak positif bagi investasi daerah. Hal itu diimplementasikan dengan penetapan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon tahun 2026 yaitu:

1. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial;
4. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien;
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.

Selain tantangan ekonomi, sosial dan kesehatan, secara administrasi pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa kebijakan baru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah terutama pada saat penyusunan RKPD Tahun 2026. Kebijakan nasional dimaksud berupa peraturan perundang-undangan yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perencanaan dan keuangan daerah serta penyelenggaraan pemerintahan daerah, di antaranya:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini berimplikasi terhadap berubahnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik pada komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, maupun Pembiayaan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun dengan menggunakan beberapa pendekatan perencanaan sebagai berikut:

1. **Pendekatan Teknokratik** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2. **Pendekatan Partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. **Pendekatan Politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. **Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ini dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstitusional dengan landasan operasionalnya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/No.41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023/Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6866);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan;
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah supaya disempumakan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
40. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Serie E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 Seri E.4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6);
49. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan yang berdimensi jangka panjang yakni 20 (dua puluh) tahun, perencanaan jangka menengah yakni 5 (lima) tahun, dan dokumen perencanaan jangka pendek (operasional) yang berdimensi tahunan yakni 1 (satu) tahun.

Sedangkan berdasarkan struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah.

Sebagaimana amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

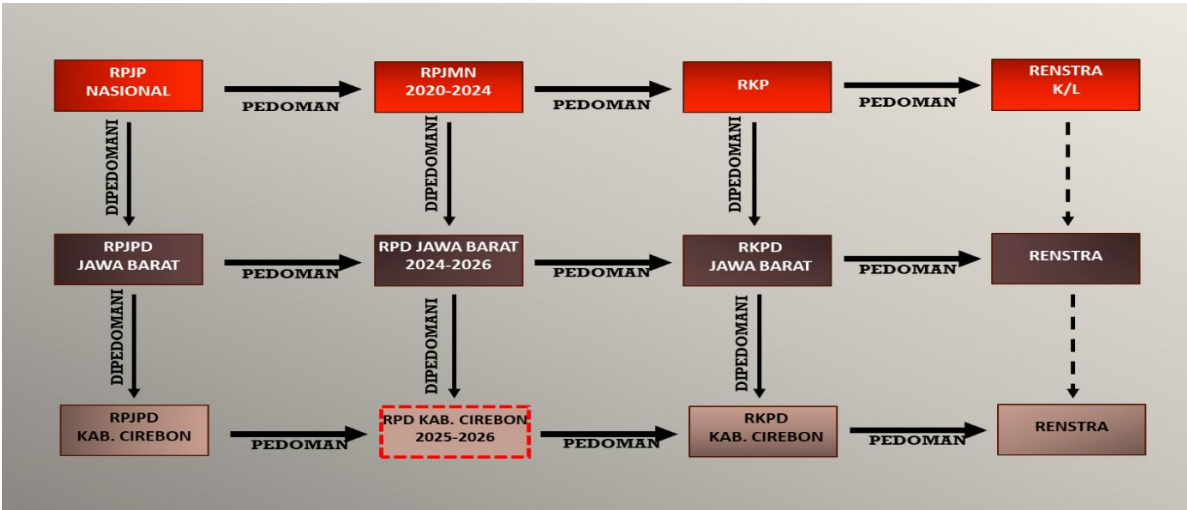
- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- 3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga;
- 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP); dan
- 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi:

- 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
- 3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
- 5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dua landasan hukum yang menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan pembangunan pusat dan daerah adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:

Gambar 1.2
Hubungan RKPD Tahun 2026 Terhadap Dokumen Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas, RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029; tema, arah

kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2026, RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024–2044 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Program dan kegiatan RKPD Tahun 2026, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD 2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun dengan maksud memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menyelaraskan aktivitas yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026, yaitu:

- a. Menyelaraskan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam RKP Tahun 2026 dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dalam upaya menjawab kebutuhan riil masyarakat;
- b. Operasionalisasi RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026;
- d. Merupakan landasan evaluasi untuk menetapkan program dan kegiatan daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan tahun anggaran berikutnya;
- e. Menjadi acuan bagi seluruh OPD Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD);
- f. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah;
- g. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan; serta
- h. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;** memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum/publik, dan aspek daya saing daerah), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD/RPD, serta permasalahan pembangunan daerah yang mencakup permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;** menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;** mengemukakan pernyataan tentang tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;** mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat dan disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun perencanaan pembangunan (RKPD), dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD/RPD.
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;** mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.
- BAB VII Penutup;** mengemukakan kaidah pelaksanaan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah**2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi****2.1.1.1 Kondisi Geografi Daerah****2.1.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah**

Kawasan industri Rebana, akronim dari Cirebon–Patimban–Kertajati, diproyeksikan sebagai masa depan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat. Kawasan ini dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, didukung oleh kehadiran infrastruktur strategis seperti jalan tol, pelabuhan laut internasional, dan bandar udara bertaraf internasional. Letaknya yang strategis membentuk segitiga pertumbuhan yang menghubungkan wilayah Cirebon, Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, dan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati di Majalengka, menjadikan kawasan ini sangat potensial dalam mendukung konektivitas logistik dan rantai pasok industri regional maupun nasional.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, kawasan Rebana telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Penetapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan menarik investasi, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai episentrum baru perekonomian Jawa Barat. Dengan cakupan wilayah yang meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, dan Sumedang, kawasan ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan wilayah berbasis industri, logistik, dan jasa.

Kabupaten Cirebon sendiri memiliki peran strategis dalam pengembangan kawasan ini, dengan fokus pada pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman, furnitur dan produk kayu, industri perkapalan, pakan ternak, bahan galian non-logam, bahan bangunan, pengolahan garam konsumsi, serta pengolahan hotmix dan beton. Spesialisasi ini memberikan peluang besar bagi peningkatan nilai tambah ekonomi lokal serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ke depan, potensi Kabupaten Cirebon dalam mendukung kawasan Rebana dapat terus diperluas melalui beberapa strategi pengembangan. Pertama, penguatan ekosistem industri berbasis digital dan teknologi hijau untuk mendorong industrialisasi berkelanjutan. Kedua,

optimalisasi konektivitas antar moda transportasi untuk mendukung efisiensi distribusi logistik. Ketiga, pengembangan kawasan permukiman dan pusat layanan publik terpadu yang ramah investasi dan ramah lingkungan untuk mendukung kawasan industri sebagai bagian dari kota baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, potensi wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Cirebon juga dapat dikembangkan secara sinergis dengan sektor industri kreatif, sebagai penopang ekonomi alternatif dan daya tarik tambahan bagi investor dan wisatawan. Melalui pendekatan pengembangan yang holistik dan berkelanjutan, kawasan Rebana, khususnya di Kabupaten Cirebon, diharapkan mampu menjadi model transformasi wilayah yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Selain termasuk kedalam Kawasan industri Rebana, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis (*geo-strategic*) dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Cirebon telah ditetapkan menjadi pendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Metropolitan Cirebon Raya (MCR);
- 2) Kabupaten Cirebon berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah sehingga menjadi pintu gerbang masuk ke Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berpotensi terjadi interaksi sumber daya dari dua provinsi dan berpeluang untuk pengembangan Kabupaten Cirebon;
- 3) Kabupaten Cirebon berada di pantai Utara Jawa yang membentang jalan arteri primer dan jalan kolektor primer sebagai penghubung antara Jakarta dengan kota-kota besar di wilayah Jawa dan kota-kota di sekitar Cirebon. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruas jalan bebas hambatan (jalan tol) Cikampek-Palimanan (Cipali), Palimanan-Kanci (Palikanci), dan Kanci-Pejagan;
- 4) Kabupaten Cirebon berada di jalur utama lintasan kereta api yakni jalur kereta api Cirebon-Jakarta, jalur kereta api Cirebon-Bandung, jalur kereta api lintas Utara Jawa (Cirebon-Semarang-Surabaya), dan jalur kereta api lintas Selatan Jawa (Cirebon-Yogyakarta-Surabaya);
- 5) Kabupaten Cirebon menjadi lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang merupakan salah satu pemasok Listrik nasional jalur transmisi Sumatera-Jawa-Bali.
- 6) Kabupaten Cirebon sebagai Pusat Pengembangan Edu-Heritage (Budaya dan Sejarah)

Secara geografis, Kabupaten Cirebon terletak pada posisi 6° 30' 58" – 7° 00' 24" Lintang Selatan dan 108° 19' 30" – 108° 50' 03" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Cirebon, adalah berupa daratan seluas 1.070,29 km². Wilayah Kabupaten Cirebon memiliki ketinggian bervariasi. Secara umum, daerah Pantura ini didominasi oleh dataran rendah. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon dan Laut Jawa

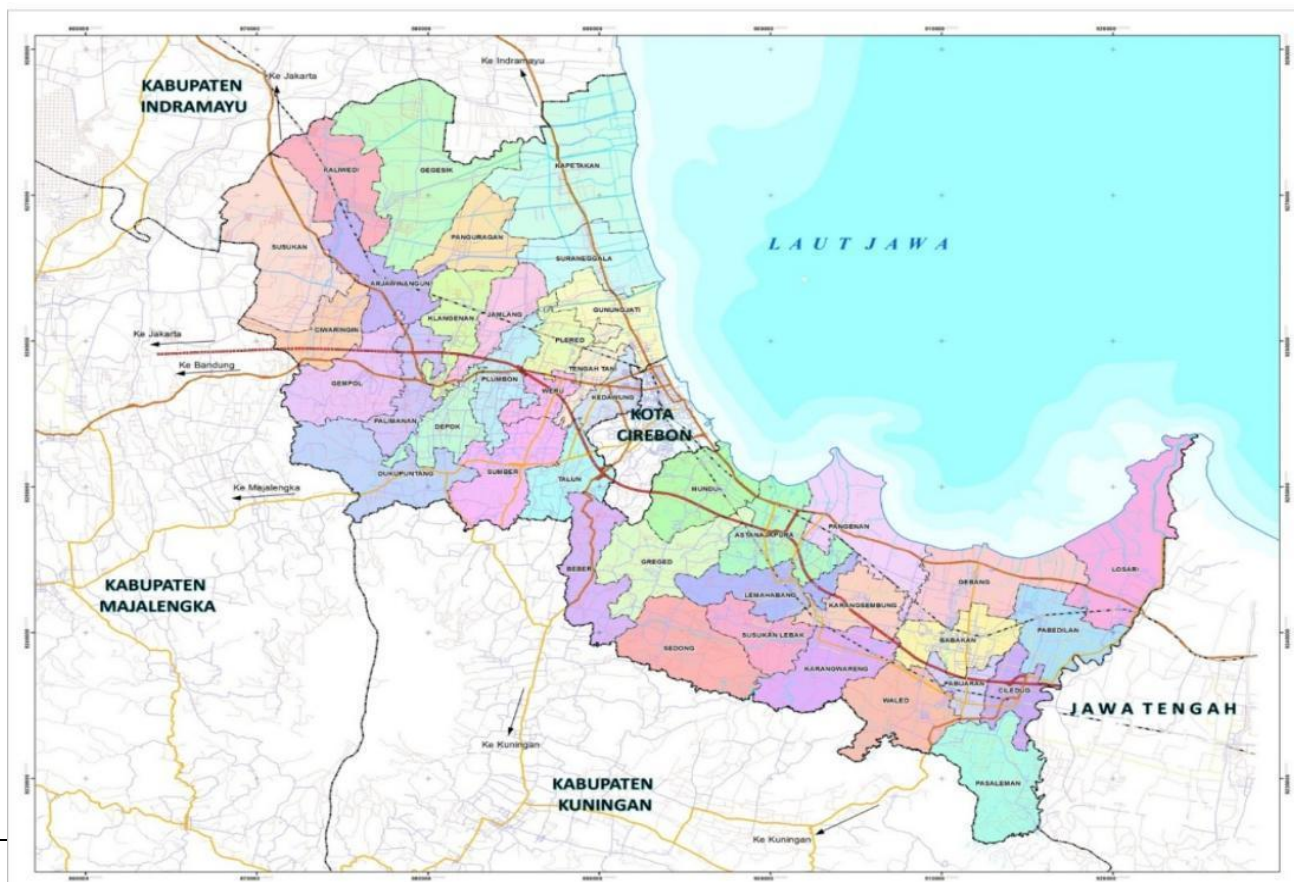
Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan¹

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi dan Jawa Tengah

Tahun 2023, wilayah administrasi Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dengan 424 Desa/Kelurahan. Luas wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Kapetakan (67,04 km²) diikuti Kecamatan Gegesik (63,83 km²), sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Weru (9,11 km²).

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima peran penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang konsumtif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki potensi sektor pertanian cukup tinggi. Kabupaten Cirebon memiliki potensi kawasan pertanian seluas 54.815 ha, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Potensi Kawasan Pertanian Kabupaten Cirebon

NO.	KAWASAN PERTANIAN	LUAS (HA)	LOKASI
1	Kawasan Tanaman Pangan	48.683	40 Kecamatan
2	Kawasan Hortikultura	6.050	Kecamatan :
			1. Astanajapura, 2. Babakan, 3. Beber, 4. Ciledug, 5. Depok, 6. Dukupuntang, 7. Gegesik, 8. Gempol, 9. Greged, 10. Jamblang, 11. Kaliwedi, 12. Karangsembung, 13. Karangwareng, 14. Klangeran, 15. Lemahabang, 16. Mundu, 17. Pabedilan, 18. Pabuaran, 19. Palimanan, 20. Pasaleman, 21. Sedong, 22. Sumber, 23. Susukan, 24. Susukan Lebak, 25. Talun, 26. Waled
3	Kawasan Peternakan	82	Kecamatan : 1. Kecamatan Ciledug, 2. Karangwareng, 3. Pasaleman, 4. Waled
Jumlah		54.815	

Sumber Data : Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024 - 2044, data yang dikelola dalam SIPD

dari total luas potensi kawasan pertanian Kabupaten Cirebon, seluas 44.093 ha ditetapkan sebagai **Kawasan Pertanian, Pangan Berkelanjutan (KP2B)**. KP2B dimaksud tersebar di 39 (*tiga puluh sembilan*) kecamatan selain Kecamatan Kedawung.

Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan baik oleh gubernur juga presiden. Pada tahun 2024, luas tanam padi di Kabupaten Cirebon mencapai 91.395 ha, dengan luas panen 90.587 ha dan total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 683.880 Ton (GKP).

Tanaman pangan yang dikembangkan di Kabupaten Cirebon selain padi adalah jagung. Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain : bawang merah, cabai rawit, petai, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam sayur dan buah-buahan lain. Diantara berbagai tanaman sayuran tersebut, Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada tahun 2024 produksi mencapai 320.944 kuintal.

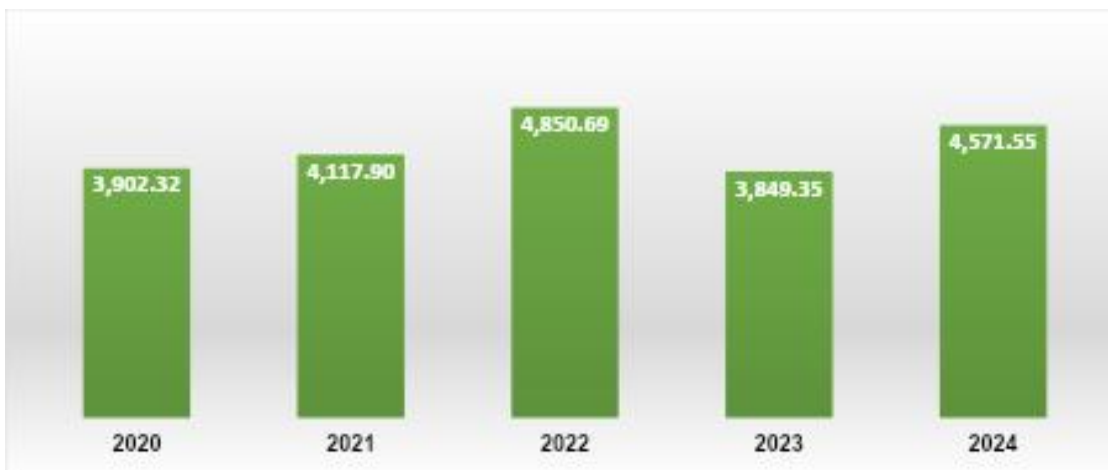
Sektor perkebunan di Kabupaten Cirebon merupakan salah satu sektor strategis yang mendukung ketahanan ekonomi lokal, terutama di wilayah perdesaan. Namun, selama periode lima tahun terakhir (2020–2024), luas lahan produksi perkebunan menunjukkan tren yang fluktuatif seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pemanfaatan lahan perkebunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal daerah. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain:

1. Alih fungsi lahan akibat tekanan pembangunan infrastruktur, permukiman, dan kawasan industri, khususnya di wilayah barat dan tengah Kabupaten Cirebon yang berada pada koridor strategis Pantura.
2. Fluktuasi harga komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa, dan mangga, yang memengaruhi minat dan kemampuan petani dalam mengelola lahan secara berkelanjutan.
3. Kondisi iklim ekstrem, seperti kemarau panjang maupun banjir musiman, yang menyebabkan sebagian lahan tidak dapat digunakan secara optimal pada tahun-tahun tertentu.
4. Keterbatasan dukungan sarana prasarana pertanian dan modal usaha, yang menyebabkan pengelolaan lahan menjadi tidak maksimal pada periode tertentu.

Kenaikan kembali luas lahan pada tahun 2024 diperkirakan merupakan hasil dari intervensi Pemerintah Daerah melalui program rehabilitasi perkebunan, pemberian bantuan bibit, pelatihan teknis kepada petani, serta peningkatan akses pasar dan teknologi. Meski demikian, data ini juga menunjukkan bahwa sektor perkebunan masih memiliki kerentanan struktural, sehingga dibutuhkan upaya penguatan tata kelola dan perencanaan jangka menengah secara lebih komprehensif.

Gambar 2.2
Luas Lahan Produksi Perkebunan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

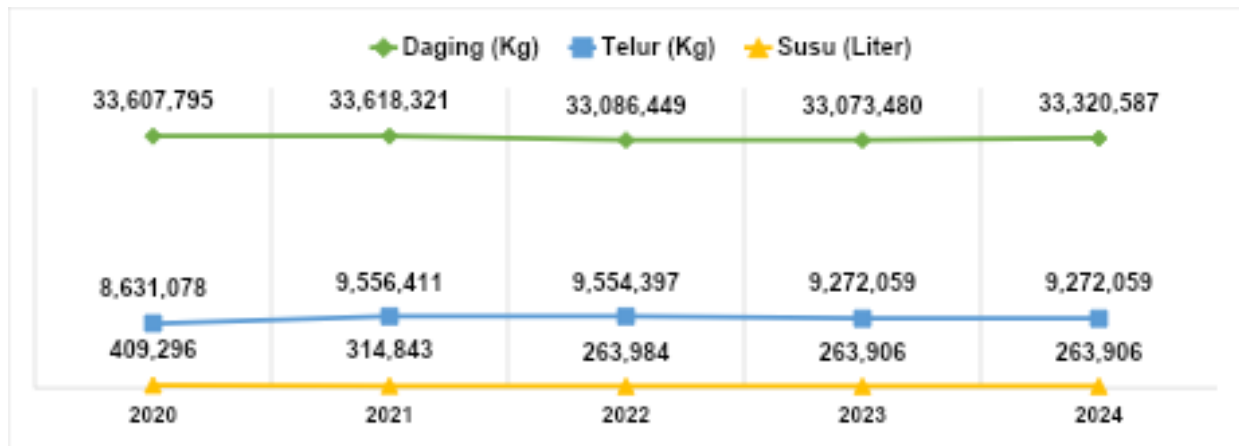


Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon, antara lain meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan daging, telur dan susu sebagaimana terlihat pada Gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.3

Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar 2.3, produksi komoditas peternakan di Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang relatif stabil. Produksi daging menunjukkan fluktuasi ringan namun stabil, dimulai dari 33.607.795 kg pada tahun 2020 dan berakhir di angka 33.320.587 kg pada tahun 2024. Sementara itu, produksi telur mengalami sedikit variasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 9.556.411 kg dan menurun secara bertahap menjadi 9.272.059 kg pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cirebon masih mampu menjaga kestabilan pasokan protein hewani utama, khususnya daging dan telur, meski tetap dibayangi tantangan produktivitas.

Namun demikian, perhatian perlu diarahkan pada produksi susu yang menunjukkan tren penurunan cukup tajam, dari 409.296 liter pada tahun 2020 menjadi hanya 263.906 liter pada tahun 2024. Penurunan ini dapat diindikasikan sebagai akibat dari:

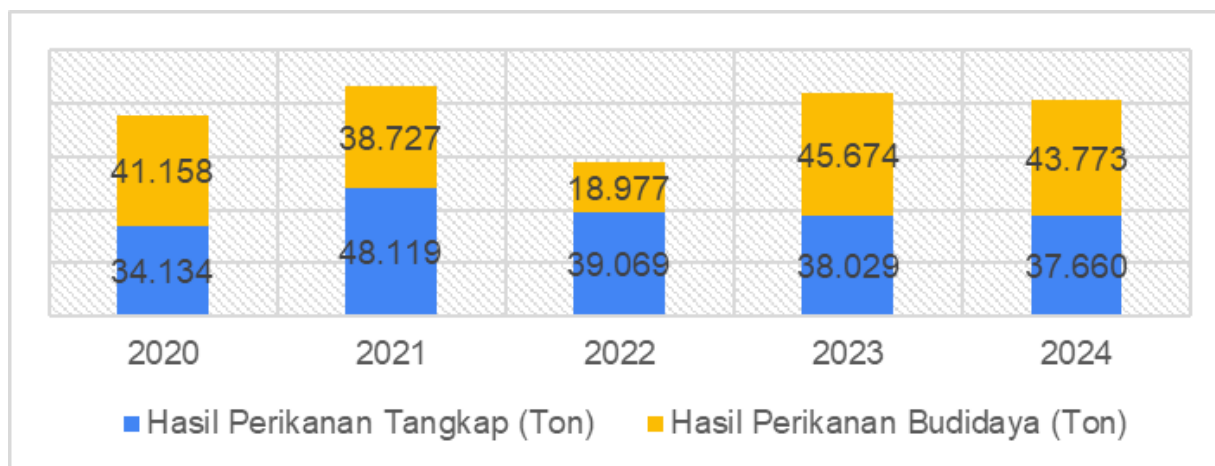
1. Penurunan jumlah peternak sapi perah, terutama di wilayah yang semula menjadi sentra produksi susu.
2. Tingginya biaya operasional dan pakan ternak, yang tidak sebanding dengan harga jual susu segar di tingkat produsen.
3. Kurangnya akses teknologi peternakan dan pendampingan teknis, sehingga produktivitas per ekor sapi perah menurun.
4. Minimnya skema kemitraan atau industri pengolahan susu lokal, yang menyebabkan ketidakpastian pasar bagi peternak kecil.

Penurunan produksi susu ini penting untuk menjadi perhatian dalam perumusan program jangka menengah daerah, mengingat potensi subsektor susu cukup strategis dalam mendukung gizi anak dan keluarga, serta pengembangan ekonomi berbasis peternakan rakyat.

B. Kelautan dan Perikanan

Potensi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Cirebon pada masa mendatang perlu menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan sumber daya ikan (SDI) merupakan salah satu sumber protein konsumsi masyarakat. Tingkat konsumsi ikan Kabupaten Cirebon pada tahun 2023 sebesar 37,48 kg/kapita/tahun, sementara produksi perikanan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 mencapai 83.702,89 Ton sehingga terdapat ketimpangan antara konsumsi dengan produksi yang menyebabkan Kabupaten Cirebon belum swasembada ikan. Adapun faktor yang berpengaruh dalam capaian produksi perikanan Kabupaten Cirebon diantaranya karena telah diterapkannya penggunaan teknologi baik pada perikanan tangkap maupun budidaya yang efektif dalam meningkatkan produksi perikanan. Kegiatan yang mendukung ketercapaian kinerja jumlah produksi perikanan diantaranya pemberian *smart fishing* kepada nelayan, pembudidaya ikan millennial, pembinaan dan pendampingan pembudidaya ikan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, revitalisasi tambak di pantai utara, dan penebaran benih di perairan umum.

Gambar 2.4
Produksi hasil perikanan Kabupaten Cirebon



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, baik dari sisi perikanan tangkap maupun budidaya. Selama periode 2020–2024,

kinerja sektor perikanan menunjukkan pola fluktuatif yang berbeda antara subsektor tangkap dan budidaya, sebagaimana tergambar pada Gambar 2.4.

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Cirebon relatif stabil, dengan fluktuasi moderat. Produksi terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 34.134 ton, sedangkan puncaknya terjadi pada 2021 mencapai 48.119 ton. Setelah itu, jumlah produksi cenderung mempertahankan kisaran tersebut. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya laut dan aktivitas nelayan masih terjaga, meskipun kemungkinan terdapat variasi musiman atau dampak kebijakan penangkapan yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, subsektor perikanan budidaya menunjukkan volatilitas tinggi, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi 18.977 ton dari kisaran di atas 40 ribu ton pada tahun sebelumnya. Meskipun produksi kembali meningkat pada 2023 (45.674 ton), terjadi sedikit penurunan lagi pada 2024 menjadi 43.773 ton. Fluktuasi tajam ini menunjukkan bahwa subsektor budidaya masih sangat rentan terhadap gangguan eksternal dan internal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun perikanan budidaya menyimpan potensi peningkatan produksi yang tinggi, namun diperlukan kebijakan intervensi yang lebih terstruktur dari Pemerintah Daerah

C. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.6 Tahun 2024, luas total Kawasan Pariwisata ini adalah sebesar 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) hektare. Adapun Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Cirebon meliputi:

- 1) Wisata Bukit Golf Ciperna yang berada di Kecamatan Beber dan Kecamatan Talun;
- 2) Agrowisata Sedong yang berada di Kecamatan Sedong;
- 3) Wisata Batik Trusmi yang berada di Kecamatan Plered dan Kecamatan Weru;
- 4) Wisata Pantai Baro yang berada di Kecamatan Gebang;
- 5) Wisata Setu Patok yang berada di Kecamatan Mundu; dan
- 6) Lokasi Pariwisata lainnya.

D. Kebudayaan

Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang berakar kuat pada sejarah panjang Kesultanan Cirebon dan perkembangan sosial masyarakatnya. Unsur-unsur kebudayaan yang ada tidak hanya mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat, tetapi juga menjadi aset penting dalam pengembangan wilayah berbasis kearifan lokal. Berdasarkan Tabel 2.2, terdapat delapan unsur kebudayaan utama yang tersebar di berbagai kecamatan dan mencakup kategori cagar budaya, kampung adat, kesenian tradisional, tradisi lisan, serta tradisi dan upacara.

Tabel 2.2
Unsur Kebudayaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Unsur Kebudayaan	Nama/ Deskripsi	Lokasi	Status/Keterangan
1	Cagar Budaya	Situs Batu Tulis Huludayeuh	Kecamatan Dukupuntang	Masuk dalam kawasan lindung
2	Cagar Budaya	Masjid Gamel	Kecamatan Plered	Salah Satu Masjid tertua
3	Cagar Budaya	Kantor Kawedanan Lemahabang	Kecamatan Lemahabang	Masuk dalam kawasan lindung
4	Kampung Adat	Kampung Trusmi	Kecamatan Plered	Sentra batik tradisional
5	Kesenian Tradisional	Tari Topeng Cirebon	Berbagai Kecamatan	Masih dipentaskan, perlu pelestarian
6	Kesenian Tradisional	Wayang Golek Cirebon	Kecamatan Sumber	Masih berkembang secara lokal
7	Tradisi Lisan	Babad Cirebon (Sejarah Lisan)	Keraton-keraton Cirebon	Dituturkan dalam acara adat
8	Tradisi dan Upacara	Ngirab	Berbagai Kecamatan	Perayaan Rebo Wekasan di Petilasan Sunan Kalijaga

Beberapa cagar budaya penting antara lain Situs Batu Tulis Huludayeuh di Kecamatan Dukupuntang yang merupakan peninggalan masa lampau dengan nilai sejarah tinggi. Situs ini menjadi bukti eksistensi peradaban awal masyarakat Cirebon. Selanjutnya, Masjid Gamel di Kecamatan Plered merupakan salah satu masjid tertua yang menampilkan perpaduan arsitektur Islam, Hindu-Buddha, dan Tionghoa, sebagai cerminan akulturasi budaya dalam proses penyebaran agama Islam. Kantor Kawedanan Lemahabang, peninggalan era kolonial, juga menjadi bagian dari kawasan cagar budaya yang mencerminkan sejarah pemerintahan administratif pada masa penjajahan Belanda.

Di bidang ekonomi kreatif berbasis budaya, Kampung Trusmi di Kecamatan Plered merupakan pusat kerajinan batik Cirebon yang terkenal dengan motif khas seperti Mega Mendung. Kampung ini tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga destinasi wisata budaya yang menggerakkan perekonomian masyarakat lokal.

Kesenian tradisional juga masih tumbuh dan berkembang. Tari Topeng Cirebon, yang ditampilkan dalam berbagai upacara adat dan pertunjukan budaya, memiliki nilai filosofi mendalam terkait watak manusia dan spiritualitas. Demikian pula Wayang Golek Cirebon, yang memiliki karakteristik khas berbeda dari wilayah lain, berperan sebagai media penyampaian nilai-nilai moral dan sejarah lokal yang masih dipertunjukkan di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Sumber.

Dalam ranah tradisi lisan, Babad Cirebon menjadi sumber penting pengetahuan sejarah dan identitas masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, utamanya melalui kegiatan adat. Tradisi ini memperkuat rasa memiliki terhadap sejarah daerah di tengah masyarakat. Adapun Tradisi Ngirab yang dilaksanakan di Petilasan Sunan Kalijaga merupakan bentuk pelestarian spiritualitas lokal melalui upacara adat yang rutin dilaksanakan, sekaligus sarana mempererat hubungan masyarakat dengan warisan leluhur.

Keberadaan dan keberlangsungan unsur-unsur budaya ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Daerah dalam merancang kebijakan pelestarian budaya yang adaptif terhadap perubahan zaman. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan budaya lokal, antara lain melalui perlindungan hukum, revitalisasi situs, fasilitasi seniman dan budayawan lokal, serta integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah.

E. Iklim

Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Cirebon menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, termasuk iklim tipe C dan D. Daerah Kabupaten Cirebon ini merupakan daerah beriklim tropis, dengan suhu minimum 19,2°C, suhu maksimum 38,1°C dan suhu rata-rata 28°C. Kabupaten Cirebon memiliki jumlah curah hujan sebesar 2.182,80 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Kapetakan (6.660 mm), sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Weru (911 mm). Sebagian besar dataran rendah di wilayah Kabupaten Cirebon berada di sepanjang pantai utara pulau Jawa, yang sangat rawan akan terjadinya air pasang. Begitu pula dengan wilayah Kabupaten Cirebon yang berada di sebelah selatan yang sebagian

besar berada pada dataran tinggi juga berpotensi untuk menimbulkan permasalahan seperti tanah longsor. Tanah longsor itu sendiri dapat terjadi dikarenakan tingginya curah hujan yang mengikis lereng terutama terjadi di wilayah bagian selatan dengan wilayah yang rata-rata berada pada kemiringan $> 40\%$.

F. Hidrologi

Kondisi hidrologis di Kabupaten Cirebon meliputi air tanah dan air permukaan, air tanah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis dan air permukaan menjadi 3 (tiga) jenis. Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam sedangkan air permukaan terdiri dari sungai, danau/situ dan mata air.

1) Sungai

Kabupaten Cirebon memiliki satu Wilayah Sungai (WS) yaitu Cimanuk- Cisanggarung dengan lima belas Daerah Aliran Sungai (DAS) meliputi DAS Cisanggarung, DAS Ciberes, DAS Bangkaderes, DAS Situnggak, DAS Kanci, DAS Kedungpane, DAS Cipager, DAS Jamblang, DAS Winong, DAS Ciwaringin, DAS Kumpul Kwista, DAS Pamengkang, DAS Kalijaga, DAS Suba dan DAS Cimanis. Kabupaten Cirebon memiliki empat belas Daerah Pengaliran Sungai (DPS).

Kabupaten Cirebon memiliki cakupan wilayah yang dilewati oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) besar yang tersebar di seluruh kecamatan. Keberadaan DAS memegang peranan penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi hidrologi, pelestarian lingkungan, serta mendukung berbagai sektor ekonomi, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi bagian vital dari kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.

Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, tercatat bahwa terdapat empat DAS utama yang mencakup wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu:

- a. DAS Bangkaderes seluas kurang lebih 20.214,84 Ha.
- b. DAS Cisanggarung seluas kurang lebih 20.035,29 Ha;
- c. DAS Ciwaringin seluas kurang lebih 32.739,43 Ha; dan
- d. DAS Kalibunder seluas kurang lebih 24.524,62 Ha.

Keempat sistem aliran air ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ketahanan sumber daya air di daerah tersebut.

DAS Cisanggarung memiliki Daerah Irigasi (DI) yang terbagi dalam kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Pembagian pengelolaan kewenangan DI tersebut sebagai berikut:

- a. DI dengan kewenangan pusat, Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Cirebon meliputi Sungai Condong, Sungai Kalijaga, Sungai Kanci, Sungai Ciberes dan Sungai Cimanis;
- b. DI kewenangan Pemerintah Pusat seluas 32.593 Ha, meliputi:
 - DI Rentang seluas kurang lebih 20.632 Ha;
 - DI Ciwaringin seluas kurang lebih 1.103 Ha;
 - DI Seuseupan seluas kurang lebih 3.865 Ha dan
 - DI Cikeusik seluas kurang lebih 6.903 Ha.
- c. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat seluas kurang lebih 8.988 Ha meliputi:
 - DI Walahar seluas kurang lebih 1.292 Ha;
 - DI Jamblang seluas kurang lebih 2.164 Ha;
 - DI Cipager seluas kurang lebih 1.056 Ha;
 - DI Setupatok seluas kurang lebih 1.408 Ha;
 - DI Paniis Lebak seluas kurang lebih 332 Ha;
 - DI Cibacang seluas kurang lebih 259 Ha;
 - DI Cipurut seluas kurang lebih 134 Ha;
 - DI Jawa seluas kurang lebih 111 Ha;
 - DI Mungkal Gajah seluas kurang lebih 27 Ha;
 - DI Katiga seluas kurang lebih 662 Ha; dan
 - DI Ambit seluas kurang lebih 1.543 Ha.
- d. DI kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon:
 - DI Jatisawit seluas kurang lebih 690 Ha;
 - DI Soka seluas kurang lebih 282 Ha;
 - DI Rajadana seluas kurang lebih 170 Ha;
 - DI Ciparigi seluas 467 Ha;
 - DI Keputon seluas kurang lebih 446 Ha;
 - DI W. Sedong seluas kurang lebih 168 Ha;
 - DI Ciwado seluas kurang lebih 833 Ha;

- DI Agung seluas kurang lebih 711 Ha;
- DI Kecepat seluas kurang lebih 477 Ha;
- DI Panongan seluas kurang lebih 952 Ha dan
- DI Cangkuang seluas kurang lebih 806 Ha.

Secara keseluruhan, luas cakupan keempat DAS tersebut di wilayah Kabupaten Cirebon mencapai 107.028,69 hektar. Di antara keempat nya, DAS Ciwaringin memiliki cakupan wilayah terluas yakni 32.739,43 hektar, diikuti oleh DAS Cisanggarung seluas 29.035,29 hektar, DAS Kalibunder dengan luas 24.524,62 hektar, serta DAS Bangkaderes yang mencakup 20.214,83 hektar. Melihat luas cakupan tersebut, DAS Ciwaringin menjadi sistem aliran air paling dominan dan strategis, terutama dalam konteks konservasi lingkungan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangka deres	Cisang garung	Ciwa ringin	Kali bunder	
1.	Arjawinangun	0,00	0,00	1.827,45	601,58	2.429,03
2.	Astanajapura	2.714,00	177,09	0,00	0,00	2.891,09
3.	Babakan	0,00	2.218,15	0,00	0,00	2.218,15
4.	Beber	2.551,37	0,00	0,00	0,76	2.552,13
5.	Ciledug	0,00	1.460,93	0,00	0,00	1.460,93
6.	Ciwaringin	0,00	0,00	1.921,54	0,00	1.921,54
7.	Depok	0,00	0,00	2,76	1.635,52	1.638,28
8.	Dukupuntang	0,00	0,00	1.801,58	1.780,61	3.582,19
9.	Gebang	0,00	3.544,21	0,00	0,00	3.544,21
10.	Gegesik	0,00	0,00	6.409,91	0,00	6.409,91
11.	Gempol	0,00	0,00	2.518,17	578,81	3.096,99
12.	Greged	3.220,55	0,00	0,00	0,00	3.220,55
13.	Gunung Jati	0,00	0,00	0,00	2.245,54	2.245,54
14.	Jamblang	0,00	0,00	0,00	1.658,89	1.658,89
15.	Kaliwedi	0,00	0,00	2.871,13	0,00	2.871,13
16.	Kapetakan	0,00	0,00	6.660,36	0,00	6.660,36
17.	Karangsembung	162,55	1.719,26	0,00	0,00	1.881,81

No.	Kecamatan	Daerah Aliran Sungai (DAS)				Jumlah
		Bangka deres	Cisang garung	Ciwa ringin	Kali bunder	
18.	Karangwareng	15,43	2.718,13	0,00	0,00	2.733,56
19.	Kedawung	0,00	0,00	0,00	1.117,37	1.117,37
20.	Klangenan	0,00	0,00	0,00	2.042,44	2.042,44
21.	Lemahabang	2.048,83	216,08	0,00	0,00	2.264,91
22.	Losari	0,00	4.582,04	0,00	0,00	4.582,04
23.	Mundu	2.739,45	0,00	0,00	0,00	2.739,45
24.	Pabedilan	0,00	2.533,43	0,00	0,00	2.533,43
25.	Pabuaran	0,00	957,24	0,00	0,00	957,24
26.	Palimanan	0,00	0,00	441,06	1.470,82	1.911,88
27.	Pangenan	1.133,96	2.442,12	0,00	0,00	3.576,08
28.	Panguragan	0,00	0,00	1.846,88	353,02	2.199,90
29.	Pasaleman	0,00	3.484,45	0,00	0,00	3.484,45
30.	Plered	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.322,90
31.	Plumbon	0,00	0,00	0,00	1.903,34	1.903,34
32.	Sedong	3.433,09	10,23	0,00	0,00	3.443,32
33.	Sumber	0,00	0,00	0,00	2.974,60	2.974,60
34.	Suranenggala	0,00	0,00	1.150,79	1.423,97	2.574,76
35.	Susukan	0,00	0,00	5.287,80	0,00	5.287,80
36.	Susukan Lebak	1.794,55	10,28	0,00	0,00	1.804,83
37.	Talun	401,05	0,00	0,00	1.527,22	1.928,27
38.	Tengah Tani	0,00	0,00	0,00	976,20	976,20
39.	Waled	0,00	2.961,65	0,00	0,00	2.961,65
40.	Weru	0,00	0,00	0,00	911,03	911,03
		20.214,8 3	29.035,29	32.739,43	24.524,62	107.028,6 9

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

Pemeliharaan dan perbaikan fungsi hidrologi di suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat daerah. Keberadaan perangkat serta indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas fungsi hidrologi DAS sangatlah krusial. Salah satu metode yang dapat

diterapkan untuk menilai kondisi suatu DAS adalah melalui penggunaan model hidrologi. Terdapat empat kelompok utama yang mempengaruhi respons fungsi hidrologi, yaitu kondisi iklim, karakteristik fisik bentang lahan, indikator kewilayahan, dan pola penggunaan lahan. Di antara keempat kelompok tersebut, indikator kewilayahan dan iklim diketahui sebagai parameter yang memberikan pengaruh paling signifikan.

Gambar 2.5
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

2) Danau/Situ

Kabupaten Cirebon memiliki dua danau/situ yaitu Setu Patok di Desa PenPen Kecamatan Mundu, luas ± 175 Ha dengan kapasitas tampung sebanyak $\pm 13.790,000$ m², dan Setu Sedong di Desa Karangwuni Kecamatan Sedong, luas $\pm 19,67$ Ha dengan kapasitas tampung sebanyak $\pm 1,850,000$ m³.

3) Mata Air

Kegiatan inventarisasi potensi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, serta pengumpulan data dan evaluasi potensi. Data yang biasa diambil di antaranya adalah sebaran lokasi mata air, jenis mata air dan lapisan akuifer, daerah resapan (*recharge area*), daerah pelepasan (*discharge area*), debit dan kualitas air, debit penurunan dan jenis pemanfaatannya.

Jumlah mata air di Kabupaten Cirebon sebanyak empat puluh empat titik yang tersebar di dua belas kecamatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Jumlah Nama dan Lokasi Mata Air di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air
1	Dukupuntang	5	1 Mata air Citangkurak di Desa Cipanas
			2 Mata air Cidahu di Desa Cipanas
			3 Mata air Cibuyut di Desa Cipanas
			4 Mata air Cilingga di Desa Cangkoak
			5 Mata air Ciseureuh di Desa Cisaat
2	Palimanan	1	1 Mata air Pancuran Daris di Desa Balerante
3	Beber	3	1 Mata air Cimara di Desa Sindang Kempeng
			2 Mata air Balonggede di Desa Cipinang
			3 Mata air Ciwaru di Desa Beber
4	Greged	7	1 Mata air Bakam di Desa Greged
			2 Mata air Umbar di Desa Nanggela
			3 Mata air Cilengceng di Desa Nanggela
			4 Mata air Mandiingin di Desa Durajaya
			5 Mata air Cikarang di Desa Gumulunglebak
			6 Mata air Pakuwon di Desa Gumulung
			7 Mata air Pagadungan di Desa Lebak Mekar
5	Lemahabang	14	1 Mata air Cikubang Daris di Desa Belawa
			2 Mata air Cidahu di Desa Belawa
			3 Mata air Ciloa di Desa Belawa
			4 Mata air Kegambulan di Desa Belawa
			5 Mata air Cikondang di Desa Wangkelang
			6 Mata air Ciseureuh di Desa Wangkelang
			7 Mata air Pesantren di Desa Pasawahan
			8 Mata air Cibirung di Desa Pasawahan
			9 Mata air Sumurgandung di Desa Pasawahan
			10 Mata air Sindangpancuran di Desa Sindanglaut

No.	Kecamatan	Jumlah Titik	Nama Mata Air	
			11	Mata air Pamuruyan di Desa Sindanglaut
			12	Mata air Cibanbansari di Desa Cipeujeuh
			13	Mata air Karacak di Desa Cipeujeuh Kulon
			14	Mata air Cibuyut di Desa Cipeujeuh Kulon
6	Sedong	1	1	Mata air Ciwado di Desa Panongan
7	Astanajapura	1	1	Mata air Pesantren di Desa Munjul
8	Waled	5	1	Mata air Gunung Tukung di Desa Waled Asem
			2	Mata air Cudus Gintung di Desa Waled Asem
			3	Mata air Gunung Cibulut di Desa Ciuyah
			4	Mata air Balong di Desa Ciuyah
			5	Mata air Bulak Canggih di Desa Ciuyah
9	Pasaleman	2	1	Mata air Jambe Racak di Desa Cigobang
			2	Mata air Cikondang di Desa Cigobang Wangi
10	Karangsembung	1	1	Mata air Kondangsari di Desa Sumur Kondang
11	Talun	2	1	Mata air Krandon di Desa Krandon
			2	Mata air Sumur Waluh di Desa Kemantren
12	Sumber	2	1	Mata air Seureuh Beureum Sidawangi
			2	Mata air Sipedang di Desa Sidawangi
	Jumlah	44		

Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2038, data yang dikelola dalam SIPD

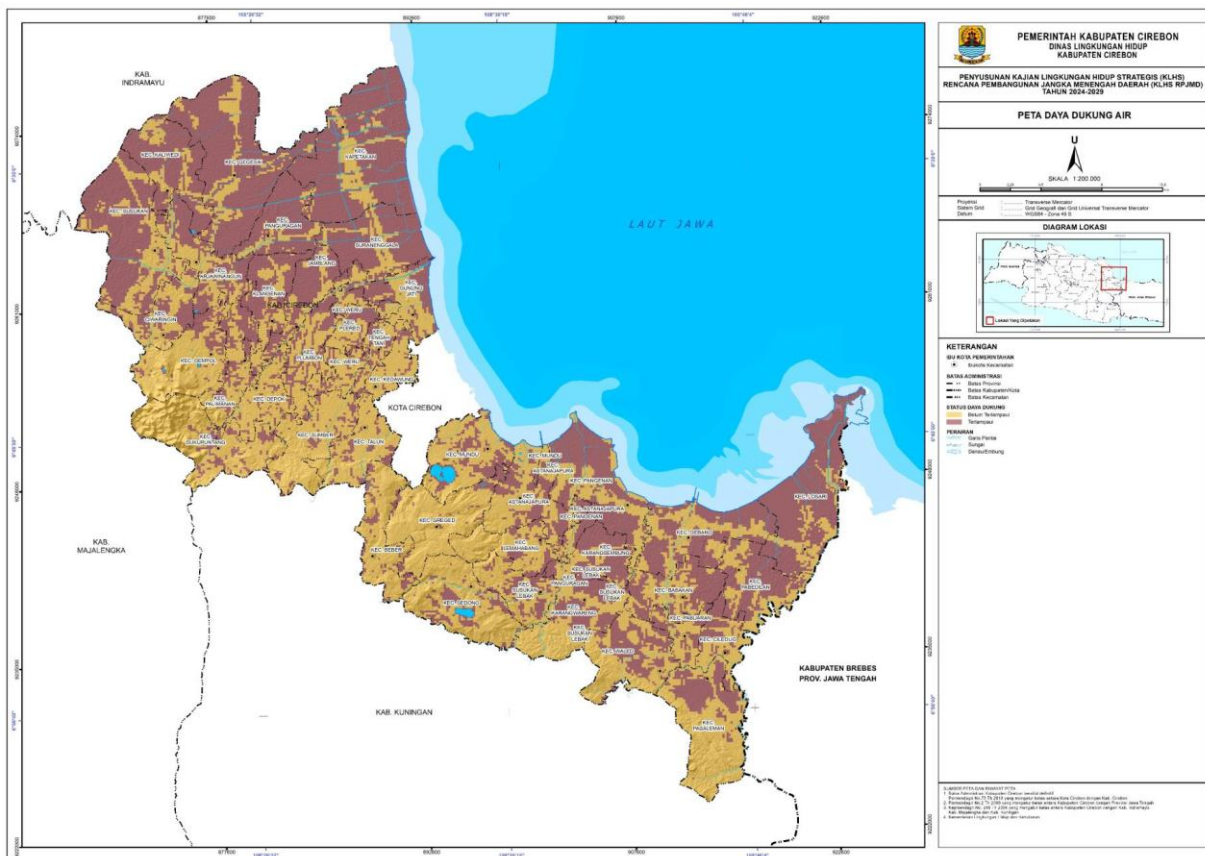
2.1.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Status daya dukung air di Kabupaten Cirebon sebesar 55.418,86 ha atau 51,47% belum terlampaui dan sebesar 52.062,65 ha atau 48,35% terlampaui. Sedangkan status daya dukung pangan di Kabupaten Cirebon sebesar 67.869,87 ha atau 63,21% belum terlampaui dan sebesar 39.496,20 ha atau 36,79% telah terlampaui.

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Cirebon berada pada kelas JE penyedia air sedang, dengan luasan sebesar 83.574,47 ha (78,00%). Sedangkan dominasi JE penyedia pangan

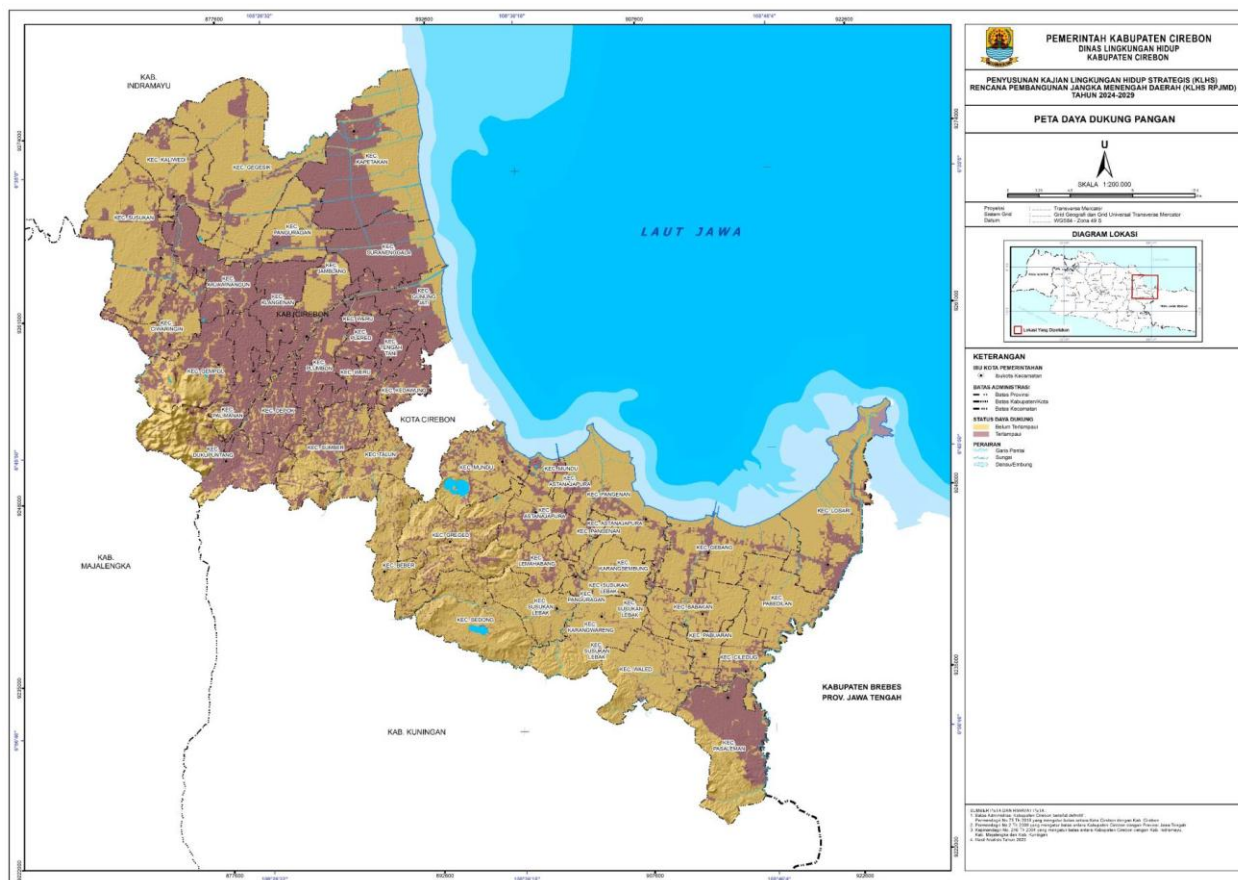
Untuk JE pengatur banjir di Kabupaten Cirebon dominan berada pada kelas JE pengatur banjir rendah, dengan luasan sebesar 85.742,72 ha (79,63 %). Sedangkan dominasi JE pengatur mitigasi bencana kebakaran berada pada kelas JE pengatur mitigasi bencana kebakaran sangat tinggi, dengan luasan sebesar 84.844,94 ha (78,79 %). Sedangkan dominasi JE pengatur longsor berada pada kelas JE pengatur longsor sedang, dengan luasan sebesar 97.986,82 ha (92,00%).

Gambar 2.6



Sumber: KLHS Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.7
Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Cirebon



Sumber: KLHS Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2030, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.1.4 Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

A. Indeks Ketahanan Energi (IKE)

Indeks Ketahanan Energi di Indonesia mencakup energy system performance, kesiapan lingkungan makro untuk transisi ke sistem energi masa depan yang aman, berkelanjutan dan inklusif. Berdasarkan buku ketahanan energi tahun 2019 dijelaskan bahwa pada tahun 2018 Energy Transition Index (ETI) Indonesia berada pada peringkat 53 dengan nilai 55,5. World Economic Forum (WEF) mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan potensial challenges.

Penilaian ketahanan energi di Indonesia menggunakan aspek 4A, metode pembobotan menggunakan AHP dan penilaian oleh expert. Aspek 4A terdiri dari, Availability (ketersediaan energi), Accessibility (kemampuan akses), Affordability (harga terjangkau), Acceptability

(ramah lingkungan). Skala hasil penilaian Ketahanan Energi Indonesia terbentang dari 0 sampai 10 yang terbagi menjadi lima tingkatan kondisi, yaitu:

- 1) “Sangat Tahan” (Nilai 8 - 10) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek semakin membaik secara signifikan dalam 2 tahun terakhir.
- 2) “Tahan” (Nilai 6 - 7,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek membaik dalam 2 tahun terakhir.
- 3) “Kurang Tahan” (Nilai 4 - 5,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek agak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- 4) “Rentan” (Nilai 2 - 3,99) dengan pertimbangan nilai indikator masing-masing aspek tidak membaik dalam 2 tahun terakhir.
- 5) “Sangat Rentan” (Nilai 0 - 1,99) dengan pertimbangan belum ada regulasi atau kebijakan yang mendukung dalam 2 tahun terakhir

Kondisi perkembangan ketahanan energi di Indonesia menunjukkan nilai ketahanan yang terus meningkat sejak tahun 2019 yang terkategori dengan kondisi tahan. Berikut adalah perkembangan ketahanan energi Indonesia.

Gambar 2.8
Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia Tahun 2019-2024



Sumber: Dewan Energi Nasional (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar 2.8, Indeks Ketahanan Energi (IKE) Indonesia menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dari tahun 2019 hingga 2024. Nilai IKE naik dari 6,57 pada tahun 2019 menjadi 6,69 pada tahun 2024, yang seluruhnya berada dalam kategori "Tahan". Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam sejumlah aspek ketahanan energi nasional, seperti sistem ketersediaan energi, aksesibilitas masyarakat terhadap energi, keterjangkauan biaya energi, serta kesinambungan dalam pengelolaan dan distribusi energi yang didukung oleh kebijakan-kebijakan strategis dari pemerintah pusat.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor energi yang mendukung agenda transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan. Potensi ini

mencakup berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan yang tersebar di sejumlah wilayah, mulai dari panas bumi, energi bayu (angin), persampahan, hingga cadangan gas alam. Keberagaman ini menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu wilayah strategis dalam peta ketahanan dan kemandirian energi daerah di Provinsi Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon memiliki potensi panas bumi yang cukup besar, khususnya di kawasan selatan seperti Kecamatan Pasaleman dan sekitarnya, yang merupakan bagian dari jalur vulkanik Jawa. Berdasarkan data Kementerian ESDM melalui Peta Potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), potensi panas bumi di wilayah ini diperkirakan mencapai puluhan megawatt. Pemanfaatannya masih dalam tahap eksplorasi dan studi kelayakan, namun menyimpan potensi menjadi sumber energi base-load yang bersih dan berkelanjutan.

Beberapa titik di wilayah utara dan pesisir Kabupaten Cirebon, seperti Kecamatan Gebang dan Losari, memiliki kecepatan angin yang cukup stabil dengan rerata di atas 4 m/s, yang memenuhi ambang batas minimum untuk pengembangan turbin angin skala kecil hingga menengah. Ini membuka peluang bagi pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) berbasis komunitas dan industri kecil-menengah.

Sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat, Kabupaten Cirebon juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan sampah. Namun, hal ini sekaligus menjadi peluang untuk konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy/WtE). Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kubang deleg dan TPA lainnya memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) skala mikro. Teknologi ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan listrik dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Dengan potensi yang ada, Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki peluang besar untuk berkontribusi pada ketahanan energi daerah maupun nasional. Namun demikian, pemanfaatan potensi energi ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, investasi, dan sinergi lintas sektor. Oleh karena itu, peningkatan nilai IKE tidak hanya menjadi indikator keberhasilan nasional, tetapi juga menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengembangkan kebijakan energi berbasis potensi lokal yang berkelanjutan.

B. Indeks Ketahanan Pangan

Hasil perhitungan IKP 2023 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan

memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Berikut adalah *cut off point* IKP.

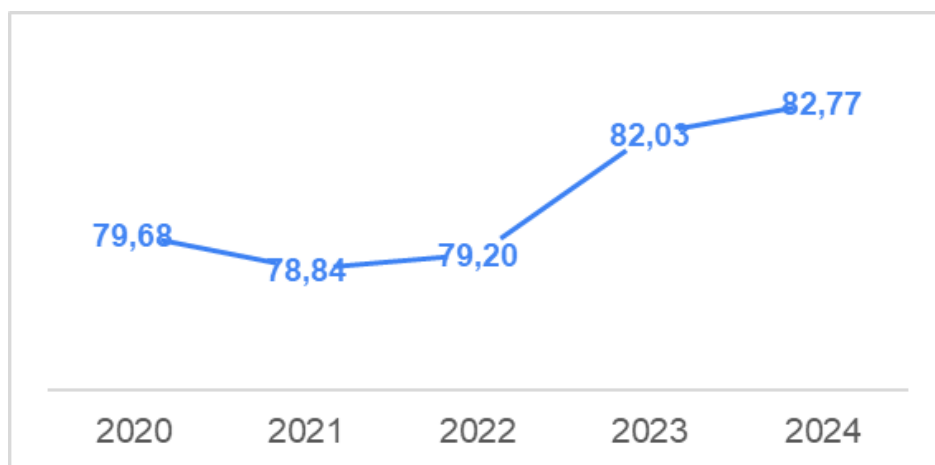
Tabel 2.9
Cut off point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	$\leq 41,52$	$\leq 28,84$	$\leq 37,61$
2	$> 41,52 - 51,42$	$> 28,84 - 41,44$	$> 37,61 - 48,27$
3	$> 51,42 - 59,58$	$> 41,44 - 51,29$	$> 48,27 - 57,11$
4	$> 59,58 - 67,75$	$> 51,29 - 61,13$	$> 57,11 - 65,96$
5	$> 67,75 - 75,68$	$> 61,13 - 70,64$	$> 65,96 - 74,40$
6	$> 75,68$	$> 70,64$	$> 74,40$

Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Tahun 2024 Kabupaten Cirebon memiliki IKP sebesar 82,77, angka ini menempatkan Kabupaten Cirebon pada urutan ke-167 diantara kabupaten/kota di Indonesia. Point IKP Kabupaten Cirebon meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 poin IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,03 dan meningkat menjadi 82,77 pada tahun 2024. Kondisi ini sinkron dengan skor PPH Kabupaten Cirebon yang juga meningkat/positif, skor PPH Kabupaten Cirebon sebesar 78,06. Kondisi IKP Kabupaten Cirebon sebesar 82,77 secara relatif berada sedikit di bawah Provinsi Jawa Barat yang memiliki skor IKP sebesar 82,97. Hal ini menandakan bahwa Kabupaten Cirebon masih memiliki ruang perbaikan.

Gambar 2.10
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



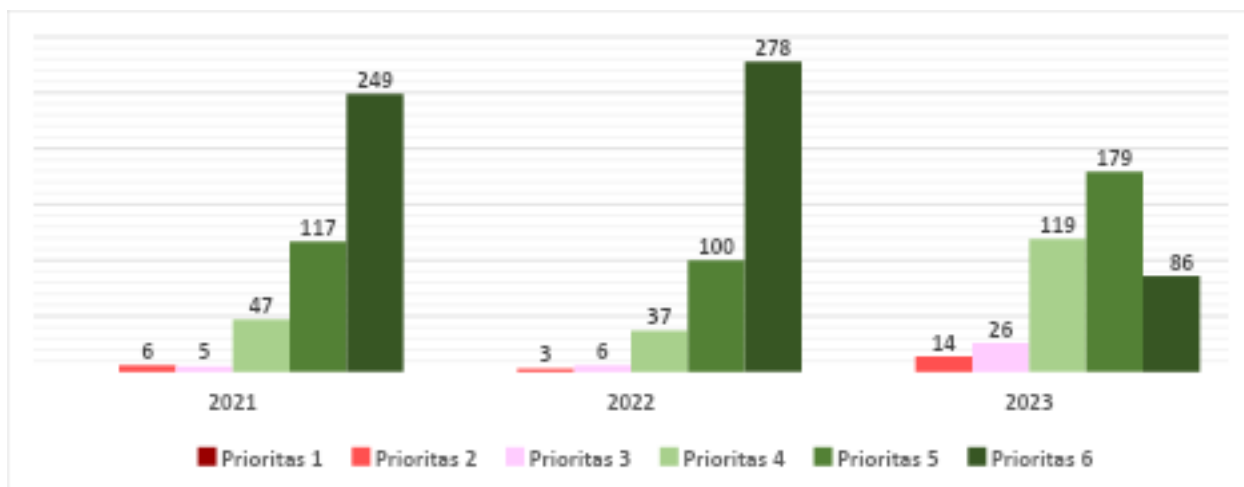
Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD

Kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi.

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah desa yang masuk prioritas 2 dan 3. Kemudian, jumlah desa yang masuk pada prioritas 6 dan 5 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebaran jumlah desa berdasarkan prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023 ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 2.11
Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas Kabupaten Cirebon
Tahun 2021-2023

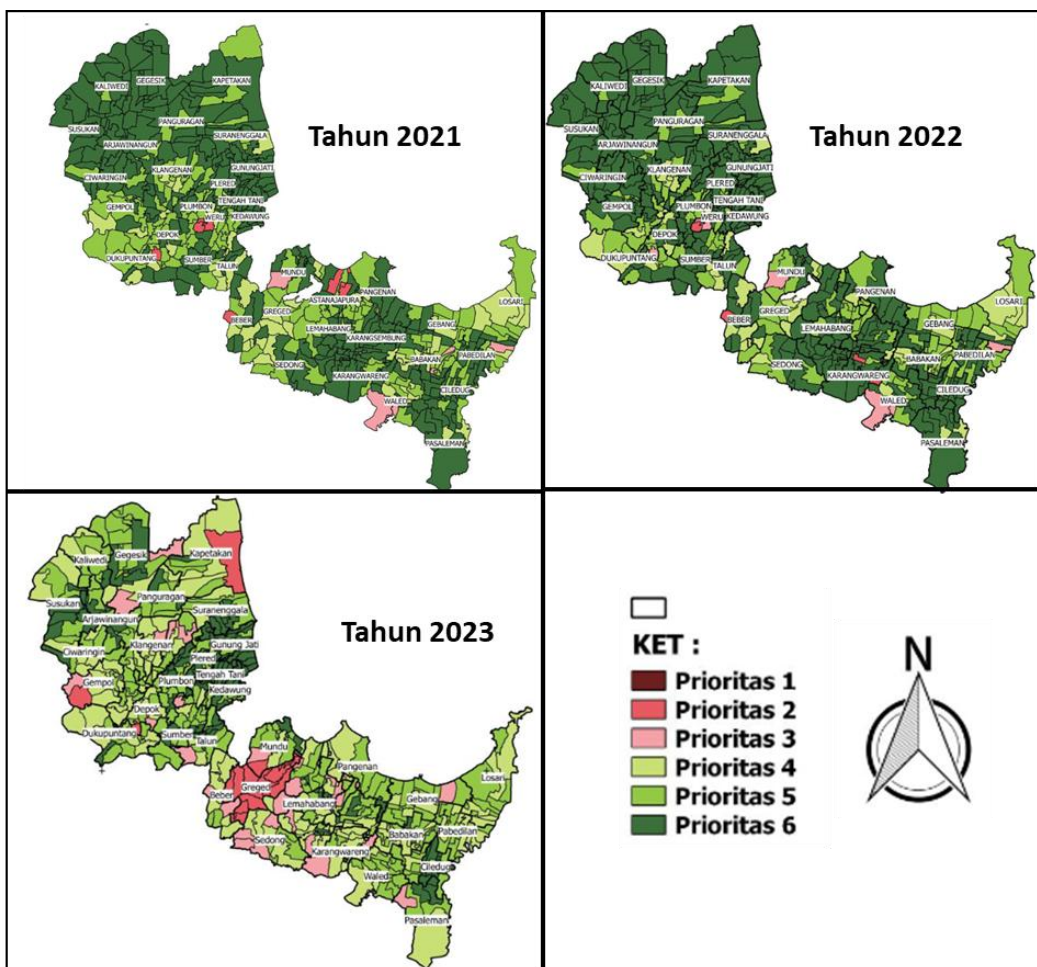


Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Pada tahun 2023, sebagian besar desa/kelurahan di Kabupaten Cirebon berada pada kondisi tahan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 5), yaitu sebanyak 179 desa (42,22%). Jumlah desa yang masuk prioritas 4 (cukup tahan terhadap rawan pangan) juga cukup tinggi, yaitu sebanyak 119 desa (28,07%). Jika dilihat dari kondisi ketahanan dan kerentanan pangan, maka desa yang berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6) sebanyak 384 desa (90,57%), sedangkan desa yang berada pada kondisi rentan terhadap kerawanan pangan (Prioritas 1-3) sebanyak 40 desa (9,43%).

Gambar 2.12

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Komposit) Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon, sebagian besar kecamatan (21 kecamatan), semua desanya berada pada kondisi tahan pangan (Prioritas 4-6). Ada 6 Kecamatan yang desanya masuk kedalam prioritas 5 dan 6 yaitu Kecamatan Ciledug, Kecamatan Plumbon, Kecamatan Kedawung, Kecamatan Gunungjati, Kecamatan Tengahtani dan Kecamatan Plered. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Wilayah Kabupaten Cirebon sudah baik, meskipun jika dilihat masing-masing indikatornya masih membutuhkan penanganan yang lebih optimal.

Desa rentan terhadap kerawanan pangan secara umum disebabkan oleh: (1) Semakin berkurangnya lahan pertanian; (2) Belum meratanya penyebaran pembangunan sarana prasarana penyedia pangan; (3) Masih tingginya jumlah masyarakat miskin; (4) Masih

rendahnya akses air bersih dan (5) Minimnya tenaga kesehatan. Adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau usaha lainnya berdampak pada kondisi ketersediaan pangan dari produksi pangan suatu daerah. Meskipun bias mengandalkan pasokan dari luar, namun ketersediaan pangan dari produksi menunjukkan kemandirian pangan suatu daerah.

Dari hasil analisis FSVA Tahun 2023, kondisi sarana prasarana penyedia pangan di wilayah Kabupaten Cirebon banyak terpenuhi terutama di daerah-daerah perkotaan, namun untuk daerah-daerah pedesaan, jumlahnya belum sebanding dengan jumlah penduduk. Terdapat beberapa desa dimana jumlah sarana prasarana penyedia pangannya menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

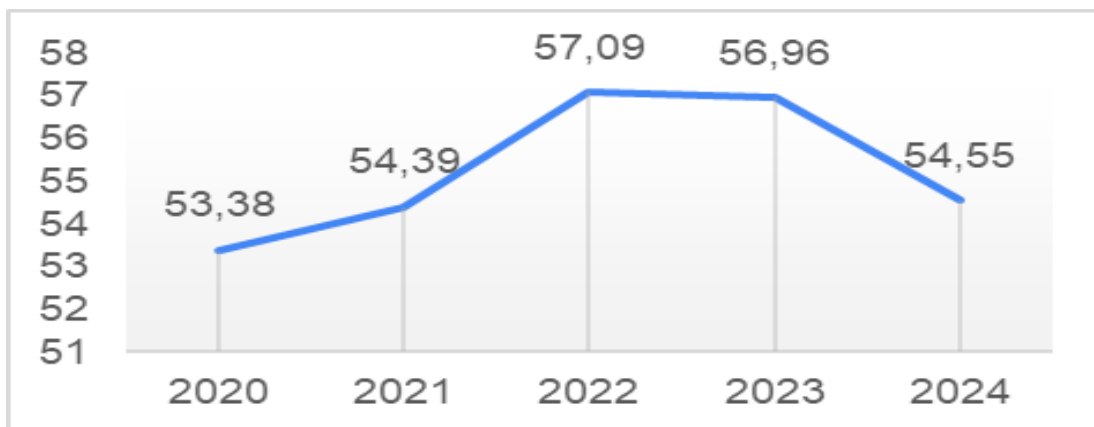
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran menyeluruh terhadap kondisi lingkungan yang menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, khususnya dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH sendiri disusun dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). IKA diukur melalui tujuh parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal coli, dan total coliform. Sementara itu, IKU dihitung berdasarkan parameter konsentrasi SO_2 dan NO_2 , dan IKL dihitung dari luas tutupan lahan yang masih tersisa. Berdasarkan hasil penghitungan terkini, nilai IKLH Kabupaten Cirebon berada pada angka 54,55, yang mengindikasikan kualitas lingkungan hidup berada pada kategori sedang ($50 < \text{IKLH} < 70$).

Nilai IKLH sebesar 54,55 menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan yang cukup serius dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Indeks yang masih berada pada kategori sedang ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam pengelolaan lingkungan, namun dampaknya belum mampu mendorong perbaikan yang signifikan. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya nilai ini adalah pencemaran air dan udara yang masih tinggi, serta menurunnya kualitas tutupan lahan akibat alih fungsi lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam hal ini, rendahnya nilai IKA bisa disebabkan oleh tingginya kadar BOD dan coliform dalam badan air, yang mencerminkan pencemaran akibat limbah domestik yang belum terkelola dengan baik. Sementara itu, kualitas udara yang menurun di beberapa wilayah padat penduduk, serta

degradasi tutupan lahan di kawasan perbukitan dan pesisir juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap skor IKLH tersebut.

Gambar 2.13

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD

Salah satu tantangan utama yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup di daerah ini adalah persoalan pengelolaan sampah. Permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon didominasi oleh limbah rumah tangga yang volumenya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Gunung Santri yang terletak di Kecamatan Palimanan saat ini sudah sangat terbatas untuk menampung sampah dari wilayah barat Kabupaten Cirebon maka perlu dilakukan pembukaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) di wilayah barat yang sebelumnya telah dilakukan study kelayakan, walaupun wilayah timur Kabupaten Cirebon telah dilayani oleh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg di Kecamatan Karangwareng perlu diupayakan peningkatan pengelolaan sampah dengan opsi penerapan teknologi. Menyikapi hal tersebut, selain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memprakarsai pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kubang Deleg juga didorong untuk menerapkan teknologi pengelolaan sampah melalui metode refuse derived fuel (RDF) seiring telah adanya MoU dengan PT. Indocement terkait pemanfaatan hasil dari pengelolaan dengan metode refuse derived fuel (RDF) yang direncanakan menyerap sampah 500 ton/hari dengan menghasilkan briket RDF 150 ton/hari. Fasilitas ini dirancang dengan pendekatan *waste to energy*, yakni mengubah sampah menjadi sumber energi

alternatif, yang diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi persoalan persampahan sekaligus mendukung upaya peningkatan nilai IKLH.

Dalam pengelolaan sampah tidak luput juga upaya penanganan dengan pelibatan masyarakat melalui program unggulan kampung bersih di mana pemerintah desa dapat berperan penuh dalam pengelolaan sampah di tingkat desa, hal ini dilakukan penguatan melalui penetapan peraturan desa tentang pengelolaan sampah di seluruh desa dengan mengoptimalkan peran masyarakat baik individu, rumah tangga dan kelembagaan serta dilakukan pendampingan secara berkala. Selaras dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah proses komposting yang dihasilkan dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk memanfaatkan pupuk organik guna menunjang kebutuhan pupuk untuk keperluan pertanian.

Selain tantangan lingkungan akibat sampah, Kabupaten Cirebon juga menghadapi berbagai persoalan yang bersumber dari kerentanan terhadap bencana alam. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem menjadi kejadian yang cukup sering melanda sejumlah wilayah, terutama pada musim hujan atau kemarau panjang. Selain itu, potensi bencana lainnya seperti banjir rob di wilayah pesisir dan abrasi pantai juga semakin mengkhawatirkan akibat perubahan iklim dan tekanan pembangunan. Situasi ini menuntut adanya langkah-langkah mitigasi yang lebih terencana dan menyeluruh, agar risiko bencana dapat ditekan seminimal mungkin. Pendekatan yang berbasis pada pengelolaan lingkungan hidup terpadu serta pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim menjadi semakin mendesak untuk diimplementasikan demi menjamin keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Cirebon.

2.1.1.1.6 Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif)

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang kian nyata dampaknya di tingkat nasional dan daerah. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer, yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, limbah, dan kegiatan industri. GRK yang paling dominan meliputi karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan dinitrogen oksida (N₂O), yang seluruhnya berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global.

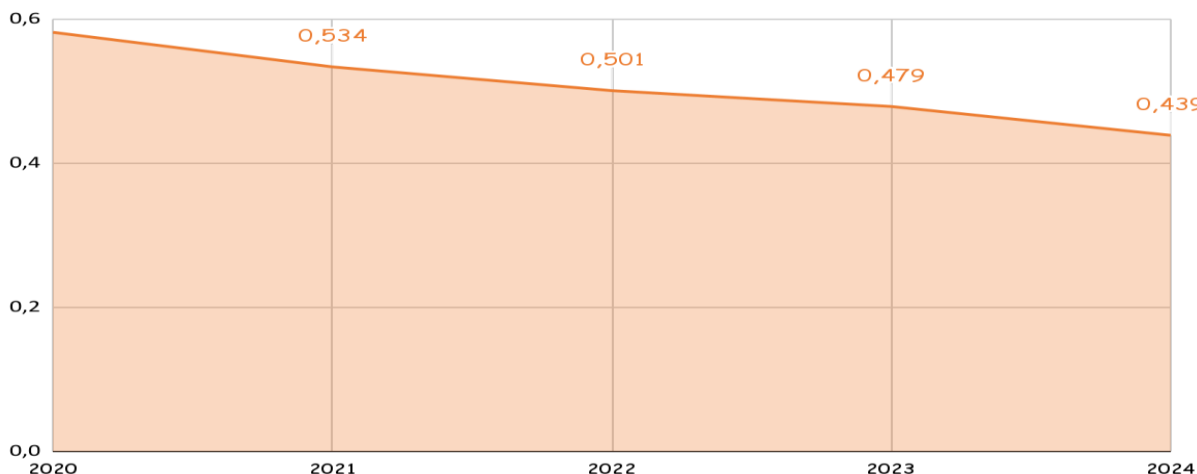
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi GRK sesuai dengan target *Nationally Determined Contribution* (NDC), yakni pengurangan emisi sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan hingga 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen ini dituangkan dalam berbagai kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), serta Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK), yang secara teknis diperkuat melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).

Di tingkat daerah, penurunan emisi GRK menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Daerah didorong untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK) dan memasukkan indikator lingkungan ke dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penurunan intensitas emisi GRK yakni jumlah emisi GRK yang dihasilkan per satuan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas pembangunan rendah karbon di suatu wilayah.

Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu wilayah strategis di Jawa Barat, menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, termasuk tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan energi. Oleh karena itu, upaya pengendalian emisi GRK di daerah ini tidak hanya menjadi kewajiban dalam kerangka kebijakan nasional, tetapi juga menjadi bagian dari strategi daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Berdasarkan data Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Cirebon selama periode tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang positif. Pada tahun 2020, intensitas emisi tercatat sebesar 0,582 ton CO₂e/1 juta rupiah PDRB, kemudian menurun menjadi 0,534 ton CO₂e pada 2021. Penurunan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan angka 0,501 ton CO₂e, lalu mencapai 0,479 ton CO₂e pada 2023, dan akhirnya turun ke level 0,439 ton CO₂e pada tahun 2024.

Gambar 2.14
Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif) Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024



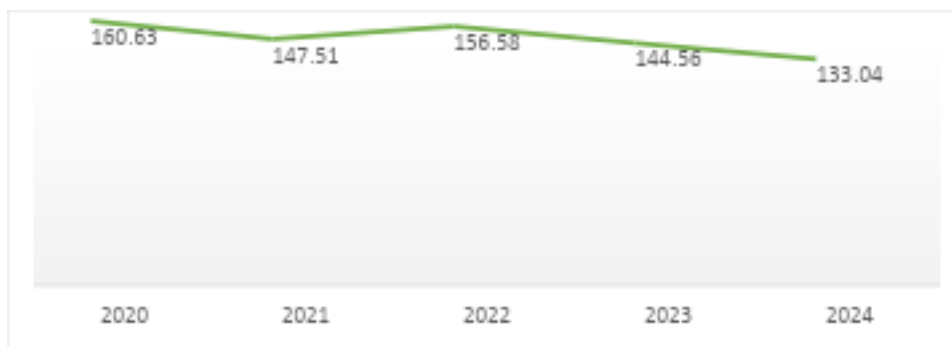
Sumber: Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) KLHK; diolah dalam SIPD

Tren penurunan intensitas emisi ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pertumbuhan tersebut tidak diikuti oleh peningkatan emisi GRK secara proporsional. Dengan kata lain, Kabupaten Cirebon telah mengarah pada pembangunan yang lebih efisien secara karbon (*carbon-efficient development*). Fenomena ini mencerminkan bahwa Kabupaten Cirebon mulai berhasil menekan emisi dari sektor-sektor utama penyumbang GRK, seperti energi, transportasi, limbah, dan pertanian. Penurunan intensitas juga menunjukkan adanya perbaikan dalam praktik penggunaan energi, pengelolaan limbah, serta adopsi teknologi dan kebijakan yang lebih ramah lingkungan.

Namun demikian, meskipun capaian ini positif, perlu diwaspadai bahwa keberhasilan penurunan emisi GRK bersifat dinamis dan memerlukan konsistensi dalam implementasi kebijakan, pendanaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

2.1.1.1.7 Indeks Resiko Bencana

Gambar 2.15
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon (2020-2024), data yang dikelola dalam SIPD

Kondisi risiko bencana merupakan gambaran terkini dari berbagai macam bencana yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Cirebon tahun 2024 sebesar 133,04 masuk dalam kategori sedang. Potensi bencana di Kabupaten Cirebon dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran). Berdasarkan pengolahan data digital spasial, dapat diketahui bahwa luas potensi rawan bencana mencapai 68.203,33 Ha, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas dan Tingkat Kerawanan Bencana di Kabupaten Cirebon (Ha)

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
1.	Arjawinangun	0	115,24	0	1.695,55	1.810,79
2.	Astanajapura	505,41	1.639,35	65,91	0	2.210,67
3.	Babakan	120,16	1.578,83	0	0	1.698,99
4.	Beber	0	1.105,39	0	0	1.105,39
5.	Ciledug	0	1.097,66	0	0	1.097,66
6.	Ciwaringin	0	0	0	1.388,99	1.388,99
7.	Depok	0	1.027,11	0	402,51	1.429,62
8.	Dukuhpuntang	0	448,38	0	1.614,64	2.063,02
9.	Gebang	0	1.097,66	1.607,74	0	2.705,40
10.	Gegesik	0	0	0	5.498,50	5.498,50
11.	Gempol	0	0	0	1.386,41	1.386,41
12.	Greged	785,86	656,15	0	0	1.442,01
13.	Gunungjati	0	602,12	0	0	602,12
14.	Jamblang	126,84	1.247,82	0	0	1.374,66
15.	Kaliwedi	0	0	0	2.597,23	2.597,23

No.	Kecamatan	Tingkat Kerawanan Bencana				Jumlah
		Kurang Rawan	Rawan	Sangat Rawan	Tidak Rawan	
16.	Kapetakan	0	187,87	0	3.710,01	3.897,88
17.	Karangsembung	11,85	1.612,62	0	0	1.624,47
18.	Karangwareng	340,15	1.217,88	0	0	1.558,03
19.	Kedawung	0	134,16	0	0	134,16
20.	Klangenan	232,25	1.301,99	0	65,45	1.599,69
21.	Lemahabang	682,56	598,19	8,73	0	1.289,48
22.	Losari	0	1270,7	548,82	0	1.819,52
23.	Mundu	928,75	1221,1	0	0	2.149,85
24.	Pabedilan	0	1.770,38	368,15	0	2.138,53
25.	Pabuaran	156,42	618,84	0	0	775,26
26.	Palimanan	11,83	409,55	0	1.011,41	1.432,79
27.	Pangenan	219,83	544,83	1.560,84	0	2.325,50
28.	Panguragan	0	1.032,35	0	1.004,21	2.036,56
29.	Pasaleman	28,47	1.067,86	0	904,19	2.000,52
30.	Plered	0	116,19	0	0	116,19
31.	Plumbon	0	523,42	0	0	523,42
32.	Sedong	1.276,84	0	0	0	1.276,84
33.	Sumber	0	1.982,45	0	0	1.982,45
34.	Suranenggala	0	1.366,82	0	379,38	1.746,20
35.	Susukan	0	666,52	0	3.374,50	4.041,02
36.	Susukan Lebak	1.320,58	39,15	0	0	1.359,73
37.	Talun	273,04	1.204,54	0	0	1.477,58
38.	Tengah Tani	0	107,03	0	0	107,03
39.	Waled	710,42	1.431,05	0	0	2.141,47
4.	Weru	0	237,7	0	0	237,70
Kabupaten Cirebon		7.731,26	31.278,90	4.160,19	25.032,98	68.203,33

Sumber: Hasil Pengolahan Data BPBD (2018), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data di atas, tingkat kerawanan bencana yang paling tinggi di Kabupaten Cirebon adalah golongan Rawan Bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 31.278,9 Ha dan tingkat kerawanan bencana paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah golongan sangat rawan bencana dengan luas kerawanan bencana sebesar 4.160,1 Ha.

Adapun potensi bencana di Kabupaten Cirebon yang dapat dikelompokkan berdasarkan bencana alam dan bencana non alam (kebakaran) sebagai berikut.

a. Bencana Alam

Potensi rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Cirebon dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis bencana alam, berikut di bawah ini merupakan data jenis potensi rawan bencana alam berdasarkan kecamatan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.7
Jenis Potensi Rawan Bencana Alam Berdasarkan Jenis Bencana Alam dan Kecamatan di Kabupaten Cirebon

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
1.	Waled	v	-	v	-
2.	Pasaleman	-	v	-	-
3.	Ciledug	v	v	-	-
4.	Pabuaran	-	-	-	v
5.	Losari	v	v	-	v
6.	Pabedilan	v	v	-	-
7.	Babakan	-	v	-	-
8.	Gebang	v	v	-	-
9.	Karangsembung	v	-	-	v
10.	Karangwareng	-	-	-	-
11.	Lemahabang	v	v	-	-
12.	Susukan Lebak	v	-	-	-
13.	Sedong	v	-	v	-
14.	Astanajapura	v	v	-	v
15.	Pangenan	v	v	-	-
16.	Mundu	v	v	-	-
17.	Beber	v	-	v	-
18.	Greged	-	-	v	-
19.	Talun	-	-	-	-
20.	Sumber	v	-	v	-
21.	Dukupuntang	-	-	v	-
22.	Palimanan	v	-	-	v
23.	Plumbon	v	v	-	-
24.	Depok	v	-	-	-
25.	Weru	v	-	-	-
26.	Plered	v	v	-	-
27.	Tengah Tani	v	v	-	-
28.	Kedawung	v	-	-	-
29.	Gunungjati	-	v	-	-
30.	Kapetakan	v	v	-	-

No.	Kecamatan	Rawan Bencana			
		Kekeringan	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung
31.	Suranenggala	v	v	-	-
32.	Klangenan	v	-	-	-
33.	Jamblang	-	-	-	v
34.	Arjawinangun	v	v	-	-
35.	Pangurungan	v	v	-	-
36.	Ciwaringin	v	-	-	-
37.	Gempol	-	-	-	-
38.	Susukan	v	v	-	-
39.	Gegesik	v	v	-	v
40.	Kaliwedi	v	v	-	-

Sumber: BPBD Kabupaten Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data di atas, jenis bencana alam yang sering melanda setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah kekeringan, hal tersebut dikarenakan dari 40 (empat puluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kecamatan di Kabupaten Cirebon memiliki rawan bencana kekeringan. Sedangkan, jenis bencana alam yang paling sedikit melanda kecamatan di Kabupaten Cirebon adalah jenis bencana alam longsor dan angin puting.

Upaya penanganan bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) termasuk OPD terkait sesuai tupoksinya yang dibantu oleh: TNI, Polri, Basarnas, Orari dan PMI. Upaya perbaikan infrastruktur dalam rangka meminimalisir resiko yang diakibatkan bencana, dilakukan oleh:

- 1) BPBD dan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melakukan sosialisasi di daerah rawan bencana;
- 2) BBWS Cimanuk dan Cisanggarung melakukan normalisasi sepanjang aliran sungai Cisanggarung, normalisasi sodetan, peninggian tanggul dan perbaikan pentil-pentil saluran air sepanjang Sungai Cisanggarung.

b. Bencana Kebakaran

Selain bencana alam, potensi lainnya adalah bencana kebakaran. Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Cirebon, dapat diketahui kondisi sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran seperti ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.8

**Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
di Kabupaten Cirebon**

No.	Pos Jaga	Anggota (Orang)	Mobil Pemadam (Unit)	Tandon Air (Unit)	Cakupan Wilayah Pelayanan (Kecamatan)
1.	Arjawinangun	19	1	1	5
2.	Palimanan	18	1	1	5
3.	Weru	21	2	1	5
4.	Gunung Jati	17	2	1	3
5.	Lemah Abang	14	2	1	5
6.	Ciledug	14	2	1	3
7.	Losari	14	2	1	3
8.	Sumber	19	3	1	5
9.	Pangenan	17	1	1	3
10.	Cikulak	12	1	1	3
11.	Dinas	44	1	-	-
Jumlah		209	18	10	40

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kab Cirebon (2023), data yang dikelola dalam SIPD

Tabel 2.9

Cakupan Pelayanan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Pos Jaga	Tandon Air (liter)	Sumber Air	Cakupan Pelayanan
1.	Arjawinangun	6.000	Irigasi	Arjawinangun, Ciwaringin, Panguragan, Gegesik, Susukan dan Kaliwedi
2.	Palimanan	90.000	Sumur Bor	Palimanan, Gempol, Klangeran, Jamblang, Depok dan Dukupuntang
3.	Weru	9.000	Sumur Bor	Plumbon, Plered, Weru, Tengah Tani, Kedawung, Talun dan Sumber
4.	Gunung Jati	6.000	PDAM	Kapetakan, Suranenggala dan Gunung Jati
5.	Lemah Abang	6.000	Sumur Bor	Beber, Greeged, Mundu, Astanajapura, Pangenan, Lemahabang, Sedong, Susukan Lebak dan Karangsambung
6.	Ciledug	8.000	Sumur Bor	Karangwareng, Waled, Pabuaran, Ciledug dan Pasaleman
7.	Losari	6.000	Sumur Bor	Losari, Pabedilan, Babakan dan Gebang

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran perlu dihindari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran seperti tidak meninggalkan kompor yang menyala, tidak menggunakan sumber listrik dengan beban yang berat, tidak meletakkan bahan yang mudah terbakar di dekat api, memeriksa kabel listrik yang terkelupas dan mengganti dengan yang baru, memeriksa secara rutin pipa gas, dan menyediakan media pemadam kebakaran seperti pasir, tandon air, dan alat pemadam kebakaran sesuai dengan tipe kebakaran.

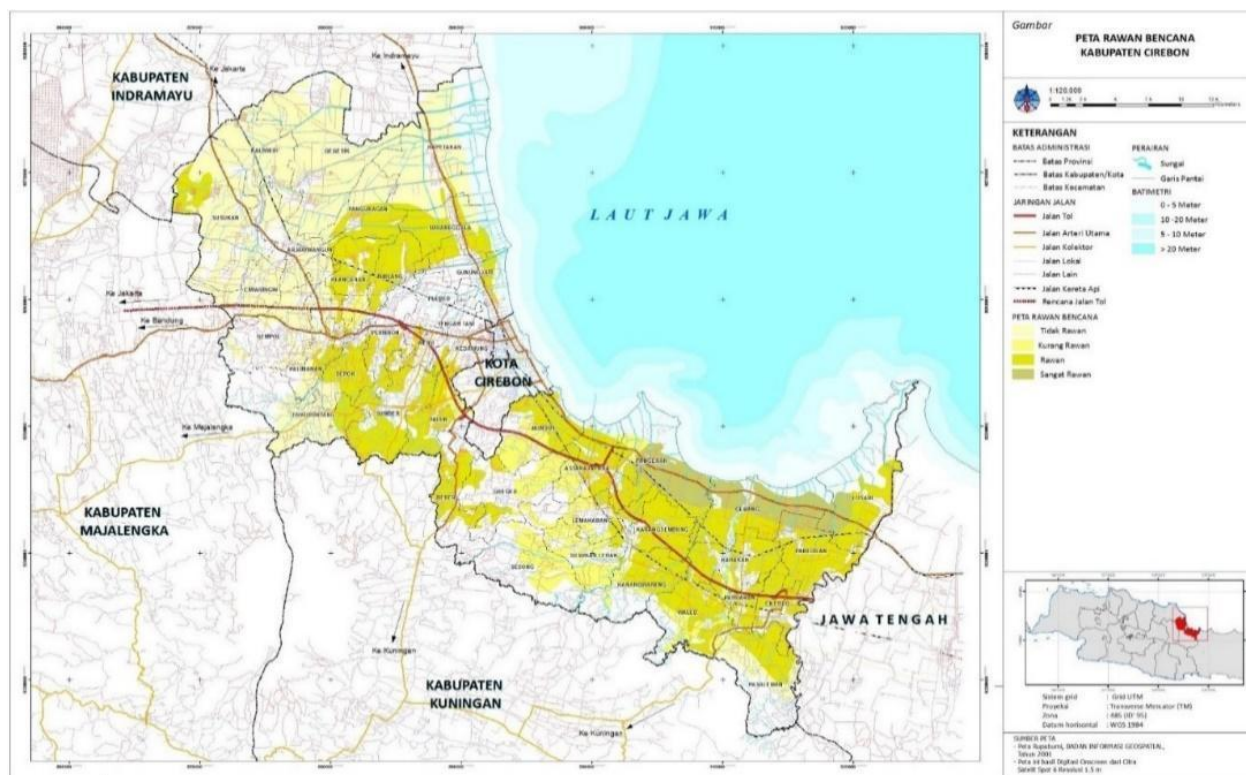
Tingkatan resiko bencana kebakaran terbagi menjadi 3 (tiga) tingkat resiko, yaitu: resiko rendah, resiko sedang dan resiko tinggi. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Risiko Tingkat Kebakaran di Kabupaten Cirebon

No.	Tingkat Resiko	Kecamatan
1.	Rendah	Kaliwedi, Kapetakan, Panguragan, Suranenggala, Jamblang, Ciwaringin, Gempol, Tengah Tani, Susukan Lebak, Karangsembung, Karangwareng, Pabuaran, Ciledug, Pasaleman dan Losari
2.	Sedang	Gegesik, Susukan, Klangeran, Palimanan, Dukupuntang, Talun, Plered, Kedawung, Pangenan, Beber, Sedong, Waled, Pabedilan
3.	Tinggi	Arjawinangun, Plumbon, Depok, Weru, Sumber, Mundu, Greged, Astanajapura, Lemahabang, Gebang dan Babakan

Sumber: Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kab Cirebon, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.16
Peta Rawan Bencana Kabupaten Cirebon



Sumber: RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.2 Kondisi Demografi Daerah

2.1.1.2.1 Jumlah Penduduk

Pembangunan berwawasan trend adalah pembangunan yang menempatkan isu perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Kesadaran pembangunan berwawasan kependudukan dilandasi oleh permasalahan kependudukan (demografi) yang mendasar di Indonesia. Permasalahan kependudukan antara lain jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi. Masalah kependudukan ini berdampak kepada bidang sosial, ekonomi, politik dan pertahanan serta keamanan. Masalah kependudukan juga dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas, jumlah penduduk yang besar berarti permasalahan dalam kemampuan menyediakan

sandang, pangan, dan papan. Sedangkan dari segi kualitas melihat dari kemampuan daya saing.

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Persentase Penduduk 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Waled	56.013	56.329	56.742	57.652	58.129	2,43
2	Pasaleman	26.528	26.675	26.867	27.295	27.518	1,15
3	Ciledug	45.601	45.931	46.341	47.159	47.625	1,99
4	Pabuaran	36.760	37.058	37.421	38.115	38.524	1,61
5	Losari	62.351	63.191	64.150	65.687	66.746	2,80
6	Pabedilan	58.198	58.873	59.655	60.972	61.840	2,59
7	Babakan	71.288	72.197	73.240	74.942	76.096	3,19
8	Gebang	67.861	68.921	70.116	71.948	73.264	3,07
9	Karangsembung	36.491	36.682	36.936	37.513	37.808	1,58
10	Karangwareng	28.547	28.737	28.976	29.470	29.744	1,25
11	Lemahabang	55.569	56.039	56.608	57.678	58.318	2,44
12	Susukan Lebak	41.147	41.557	42.040	42.898	43.438	1,82
13	Sedong	42.302	42.576	42.923	43.649	44.046	1,84
14	Astanajapura	79.884	80.269	80.791	82.021	82.631	3,46
15	Pangenan	46.870	47.246	47.704	48.585	49.102	2,06
16	Mundu	81.221	81.971	82.867	84.498	85.502	3,58
17	Beber	44.203	45.011	45.911	47.235	48.224	2,02
18	Greged	56.812	57.380	58.052	59.239	59.988	2,51
19	Talun	71.464	72.336	73.341	75.004	76.118	3,19
20	Sumber	96.725	98.371	100.212	102.973	104.997	4,40
21	Dukupuntang	64.980	65.423	65.979	67.116	67.750	2,84
22	Palimanan	61.933	62.560	63.299	64.602	65.426	2,74
23	Plumbon	82.323	83.211	84.250	86.040	87.195	3,65
24	Depok	66.246	67.185	68.252	69.936	71.112	2,98
25	Weru	69.942	70.498	71.178	72.486	73.253	3,07
26	Plered	55.102	55.487	55.968	56.942	57.490	2,41

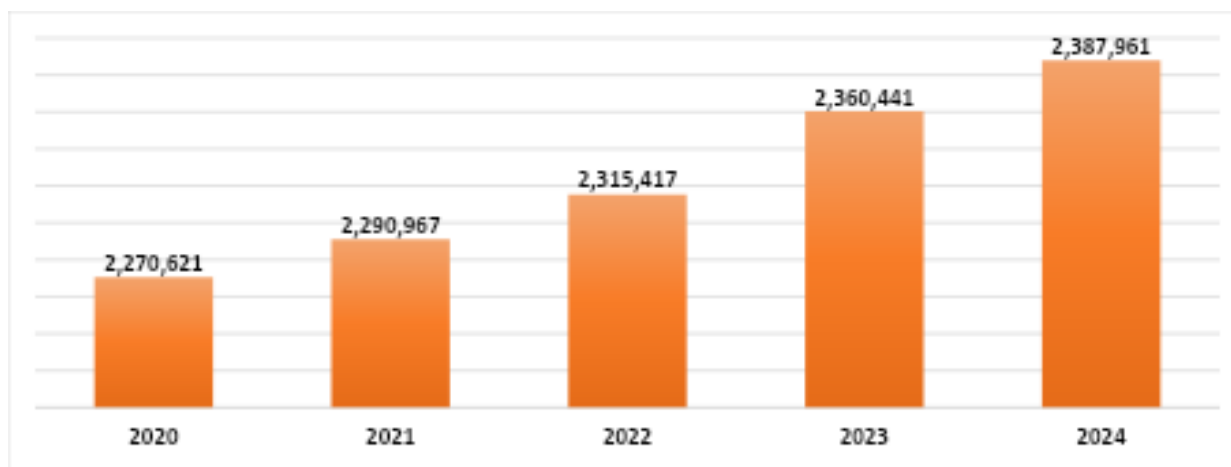
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					Persentase Penduduk 2024
		2020	2021	2022	2023	2024	
27	Tengahtani	45.435	45.940	46.529	47.534	48.188	2,02
28	Kedawung	60.933	60.912	60.992	61.602	61.741	2,59
29	Gunungjati	82.442	82.864	83.429	84.724	85.380	3,58
30	Kapetakan	60.975	61.946	63.038	64.705	65.908	2,76
31	Suranenggala	46.081	46.546	47.095	48.063	48.675	2,04
32	Klangenan	52.948	53.119	53.380	54.106	54.423	2,28
33	Jamblang	38.236	38.526	38.882	39.582	39.986	1,67
34	Arjawinangun	70.730	71.522	72.444	74.014	75.038	3,14
35	Panguragan	43.208	43.248	43.362	43.851	44.007	1,84
36	Ciwaringin	38.381	38.394	38.472	38.883	38.998	1,63
37	Gempol	46.230	46.511	46.872	47.645	48.060	2,01
38	Susukan	68.394	68.987	69.702	71.034	71.837	3,01
39	Gegesik	69.355	69.331	69.422	70.116	70.275	2,94
40	Kaliwedi	40.912	41.407	41.979	42.927	43.561	1,82
Kabupaten Cirebon		2.270.621	2.290.967	2.315.417	2.360.441	2.387.961	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2020 – 2025), data yang dikelola dalam SIPD

Perkembangan penduduk, mulai dari proses kelahiran, kematian, dan pindah (migrasi), merupakan salah satu dari karakteristik demografi. Pada tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.387.961 jiwa atau terjadi pertumbuhan sebesar 1,35 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 2.360.441 jiwa. Kecamatan Sumber merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi hingga mencapai 104.997 jiwa, di mana hal ini dapat dimaklumi mengingat Kecamatan Sumber merupakan ibukota dari Kabupaten Cirebon dengan pusat-pusat pemerintahan dan perekonomian yang tentunya berada di kecamatan ini.

Gambar 2.17

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.15 menampilkan Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024, yang memperlihatkan tren peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menggambarkan dinamika demografi yang stabil, didorong oleh faktor kelahiran serta migrasi masuk. Peningkatan dari 2023 ke 2024 sebesar 27.520 jiwa menunjukkan pertumbuhan yang masih berlanjut meski tidak terlalu tajam.

2.1.1.2.2 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon adalah sebesar 2.387.961 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.360.441 jiwa. Apabila dibanding tahun 2023, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cirebon naik yakni sebesar 1,35%.

Mencermati dinamika penduduk Kabupaten Cirebon yang cenderung bertambah dan dalam rangka menangkap peluang bonus demografi. Artinya, struktur penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih banyak, maka perlu perubahan paradigma tentang bonus demografi yang tidak hanya menekankan perubahan struktur penduduk tetapi lebih menekankan pada upaya meningkatkan kualitas penduduk melalui intervensi Kecukupan Pangan, Kesehatan, Pendidikan serta pengelolaan jumlah angka pengangguran. Karena itu, perhatian yang sangat besar pada kesehatan dan pendidikan vokasi atau keterampilan manusia sangat diperlukan.

Selain itu, terdapat 4 (empat) aspek yang harus diantisipasi dalam menghadapi bonus demografi yaitu:

1. Keberlanjutan ekonomi, melalui peningkatan pertumbuhan LPE dengan menekan rasio gini serta menurunkan TPT dengan penguatan akses ketenagakerjaan di sektor formal dan informal;
2. Keberlanjutan sosial budaya, melalui peningkatan serta efektivitas sistem perlindungan sosial yang inklusif, dan pemajuan kebudayaan;
3. Keberlanjutan ekologi, melalui efektivitas pemenuhan standar lingkungan yang tinggi serta penggunaan energi baru dan terbarukan dalam menopang aktivitas pembangunan; dan
4. Investasi SDM untuk menjawab daya saing Kabupaten Cirebon agar bisa unggul atau setidaknya kompetitif di berbagai aspek di level nasional maupun internasional, memaksimalkan era industri 4.0 menuju society 5.0 yang ditandai dengan masyarakat telah mencapai *comfort, vitality and high quality life*.

Gambar 2.18
Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.2.3 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi

biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon pada akhir tahun 2023 adalah 2.360.441 jiwa, jumlah tersebut kemudian mengalami kenaikan sebesar 27.520 jiwa menjadi 2.387.961 jiwa pada tahun 2024. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sumber dengan jumlah penduduk sebanyak 104.997 jiwa atau sekitar 4,40% dari total jumlah penduduk Kabupaten Cirebon. Kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon akhir tahun 2024 adalah sebesar 2.218 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan terpadat terdapat ada di Kecamatan Weru sebesar 8.050 jiwa/km². Kabupaten Cirebon perlu mempersiapkannya dengan membuat kebijakan pengendalian penduduk dan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung laju pertumbuhan penduduk sebagai implikasi pertambahan jumlah penduduk di wilayah Cirebon. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memprioritaskan pembangunan pusat pertumbuhan Sumber, pengembangan wisata lokal berdasarkan potensi wilayah, pengembangan industri di bagian Cirebon Timur. Berikut tabel kepadatan penduduk Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.12
Kepadatan Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Waled	58.129	30,76	1.890
2	Pasaleman	27.518	41,28	667
3	Ciledug	47.625	14,62	3.258
4	Pabuaran	38.524	9,57	4.025
5	Losari	66.746	47,91	1.393
6	Pabedilan	61.840	25,80	2.397
7	Babakan	76.096	22,16	3.434
8	Gebang	73.264	35,30	2.075
9	Karangsembung	37.808	18,80	2.011
10	Karangwareng	29.744	27,16	1.095
11	Lemahabang	58.318	22,63	2.577
12	Susukan Lebak	43.438	18,03	2.409
13	Sedong	44.046	34,40	1.280
14	Astanajapura	82.631	29,15	2.835
15	Pangenan	49.102	36,81	1.334

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
16	Mundu	85.502	27,49	3.110
17	Beber	48.224	25,62	1.882
18	Greged	59.988	32,20	1.863
19	Talun	76.118	19,53	3.897
20	Sumber	104.997	29,50	3.559
21	Dukupuntang	67.750	37,39	1.812
22	Palimanan	65.426	19,10	3.425
23	Plumbon	87.195	19,01	4.587
24	Depok	71.112	16,36	4.347
25	Weru	73.253	9,10	8.050
26	Plered	57.490	13,22	4.349
27	Tengahtani	48.188	9,75	4.942
28	Kedawung	61.741	10,77	5.733
29	Gunungjati	85.380	22,61	3.776
30	Kapetakan	65.908	67,47	977
31	Suranenggala	48.675	25,92	1.878
32	Klangenan	54.423	20,40	2.668
33	Jamblang	39.986	16,57	2.413
34	Arjawinangun	75.038	24,26	3.093
35	Panguragan	44.007	21,97	2.003
36	Ciwaringin	38.998	19,01	2.051
37	Gempol	48.060	30,70	1.565
38	Susukan	71.837	51,96	1.383
39	Gegesik	70.275	63,74	1.103
40	Kaliwedi	43.561	28,73	1.516
		2.387.961	1.076,76	2.218

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

2.1.1.2.4 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut:

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Cirebon 2024

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1.	Waled	29.494	28.635	58.129	103

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
2.	Pasaleman	14.243	13.828	27.518	99
3.	Ciledug	24.164	23.461	47.625	103
4.	Pabuaran	19.547	18.977	38.524	103
5.	Losari	34.203	33.207	66.746	101
6.	Pabedilan	31.848	30.920	61.840	100
7.	Babakan	39.585	38.432	76.096	98
8.	Gebang	37.731	36.632	73.264	100
9.	Karangsembung	19.374	18.810	37.808	101
10.	Karangwareng	15.018	14.580	29.744	104
11.	Lemahabang	29.445	28.587	58.318	104
12.	Susukan Lebak	21.719	21.086	43.438	106
13.	Sedong	22.239	21.591	44.046	104
14.	Astanajapura	41.316	40.112	82.631	106
15.	Pangenan	25.037	24.308	49.102	102
16.	Mundu	42.960	41.708	85.502	105
17.	Beber	23.653	22.964	48.224	110
18.	Greged	29.849	28.980	59.988	107
19.	Talun	38.432	37.313	76.118	104
20.	Sumber	53.013	51.469	104.997	104
21.	Dukupuntang	34.546	33.540	67.750	102
22.	Palimanan	33.527	32.550	65.426	101
23.	Plumbon	44.025	42.743	87.195	104
24.	Depok	35.905	34.859	71.112	104
25.	Weru	36.274	35.218	73.253	108
26.	Plered	28.885	28.044	57.490	105
27.	Tengahtani	24.212	23.506	48.188	105
28.	Kedawung	31.482	30.565	61.741	102
29.	Gunungjati	43.971	42.690	85.380	100
30.	Kapetakan	33.943	32.954	65.908	100
31.	Suranenggala	25.194	24.460	48.675	99
32.	Klangenan	27.750	26.942	54.423	102

No.	Kecamatan	Laki – Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
33.	Jamblang	20.389	19.795	39.986	102
34.	Arjawinangun	38.645	37.519	75.038	100
35.	Panguragan	22.551	21.894	44.007	101
36.	Ciwaringin	20.084	19.499	38.998	100
37.	Gempol	24.385	23.675	48.060	103
38.	Susukan	37.370	36.281	71.837	98
39.	Gegesik	35.833	34.790	70.275	102
40.	Kaliwedi	22.661	22.001	43.561	98
Kab. Cirebon		1.211.626	1.176.335	2.387.961	103

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat dari rasio jenis kelamin (sex ratio), bahwa hampir semua kecamatan, penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Rasio Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah 103. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki. Sedangkan untuk rasio jenis kelamin di tiap kecamatan rata rata diatas 100.

2.1.1.2.5 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Cirebon masih didominasi oleh penduduk dengan usia produktif yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas yaitu sekitar 0,76% dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 0,24%. Berdasarkan kategori umur, jumlah penduduk paling banyak berada di kategori umur 5-9 tahun. Berikut menampilkan data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sampai dengan kondisi akhir tahun 2024.

Tabel 2.14

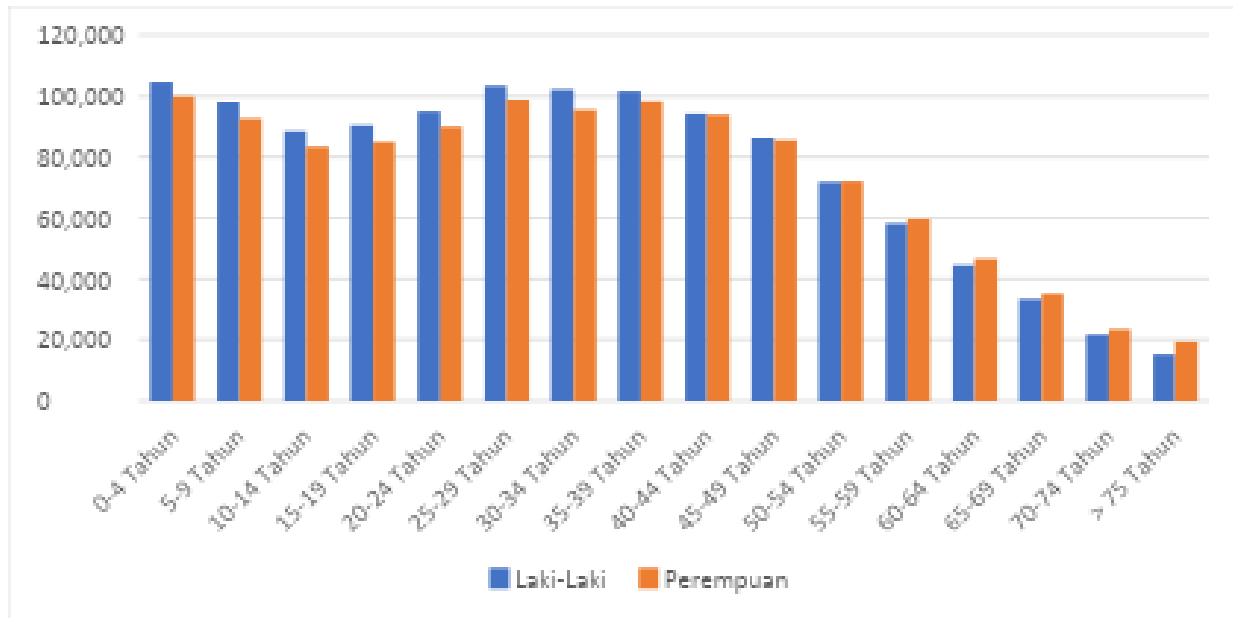
Data Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah			Persentase
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
0-4 Tahun	104.598	100.118	204.716	0,09
5-9 Tahun	97.932	92.695	190.267	0,08
10-14 Tahun	88.490	83.268	171.758	0,07
15-19 Tahun	90.360	84.991	175.351	0,07
20-24 Tahun	94.915	89.909	184.842	0,08
25-29 Tahun	103.496	98.976	202.472	0,08
30-34 Tahun	102.193	95.447	197.640	0,08
35-39 Tahun	101.662	98.083	199.745	0,08
40-44 Tahun	94.168	93.921	188.089	0,08
45-49 Tahun	86.422	85.733	172.155	0,07
50-54 Tahun	71.686	71.914	143.600	0,06
55-59 Tahun	58.109	59.612	117.721	0,05
60-64 Tahun	44.442	46.463	90.905	0,04
65-69 Tahun	33.259	35.155	68.414	0,03
70-74 Tahun	21.782	23.582	45.364	0,02
> 75 Tahun	15.244	19.336	34.580	0,01
JUMLAH	1.208.758	1.179.203	2.387.961	100

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

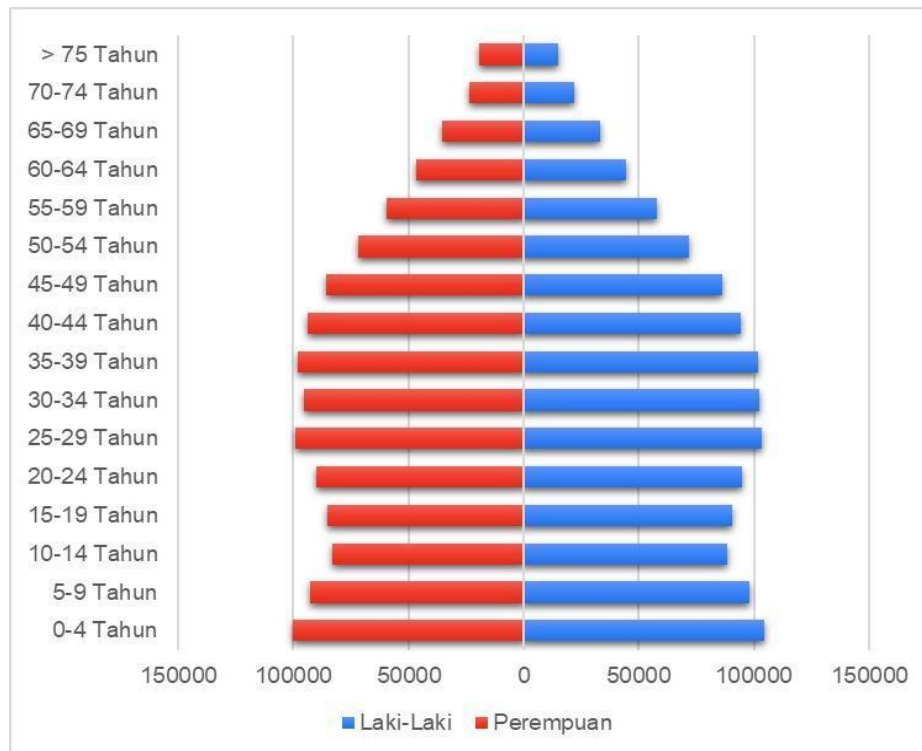
Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini merupakan piramida penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Gambar 2.19
Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa)



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.20
Piramida Penduduk Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Jiwa)



Sumber : BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.17 dan Gambar 2.18 menampilkan Grafik Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024 (Jiwa) di Kabupaten Cirebon, yang disajikan dalam bentuk batang ganda (laki-laki dan perempuan). Berikut beberapa poin penting dari grafik tersebut:

1. Distribusi Penduduk Merata di Usia Produktif Kelompok umur 20-34 tahun menunjukkan jumlah penduduk yang tinggi, baik laki-laki maupun perempuan, menandakan dominasi usia produktif. Ini menjadi modal penting bagi pembangunan ekonomi daerah.
2. Proporsi Laki-Laki dan Perempuan Relatif Seimbang Hampir di semua kelompok umur, selisih antara jumlah laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan, menandakan struktur gender yang cukup seimbang.
3. Penurunan Bertahap di Usia Lanjut Jumlah penduduk menurun secara konsisten mulai dari usia 50 tahun ke atas, terutama signifikan pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Ini menunjukkan pola umum piramida penduduk yang mengarah ke bentuk stasioner atau mulai menua.
4. Kelompok Usia Dini Masih Cukup Tinggi Kelompok usia 0-4 dan 5-9 tahun juga cukup besar, menunjukkan potensi kebutuhan jangka panjang untuk pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak.

Secara keseluruhan, grafik ini memberikan gambaran struktur demografi yang cukup sehat, dengan basis usia muda yang kuat dan proporsi usia produktif yang besar, sangat strategis untuk perencanaan pembangunan jangka menengah RPJMD 2025-2029.

2.1.1.2.6 Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Mata pencarian di Kabupaten Cirebon didapat berdasarkan penduduk usia kerja, jenis kelamin, dan lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Cirebon. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur di atas 15 tahun ke atas. Berikut Tabel 2.15 yang menunjukkan data jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Cirebon dalam angka 2025, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 didominasi oleh sektor jasa sebanyak 691.692 orang, disusul sektor industri pengolahan 355.721 orang, dan sektor pertanian 129.370 orang. Secara keseluruhan, terdapat 1.176.783 pekerja yang terdiri dari 733.518 laki-laki dan 443.265 perempuan. Dominasi sektor jasa mencerminkan pergeseran struktur ekonomi daerah dari

sektor primer ke tersier, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi berbasis pelayanan dan perdagangan. Ketimpangan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan juga menunjukkan perlunya kebijakan afirmatif untuk mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	99.253	30.117	129.370
2	Industri Pengolahan	252.059	103.662	355.721
3	Jasa	382.206	309.486	691.692
Jumlah		733.518	443.265	1.176.783

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.1.2.1.1 Kesejahteraan Ekonomi

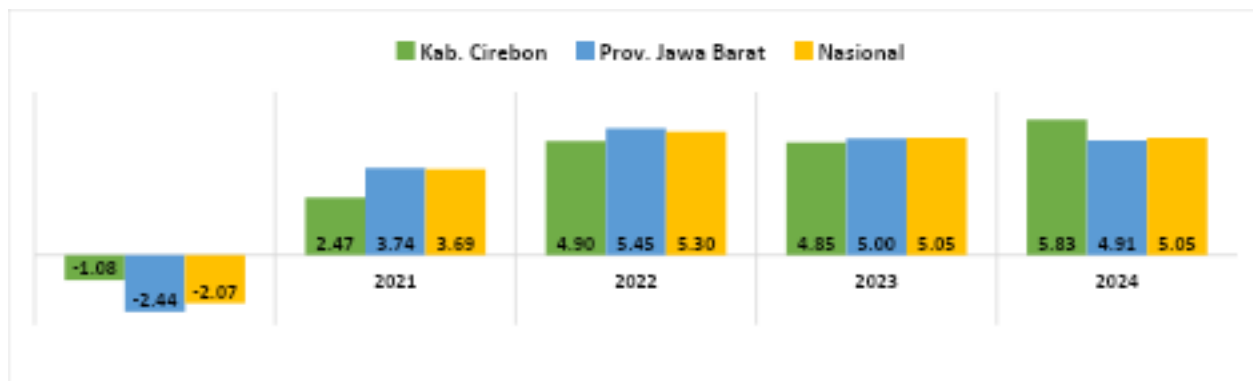
A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, hingga mencapai angka minus akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Namun, mulai tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren positif dengan pemulihan yang bertahap seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai stimulus ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2020-2024 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Nasional, meskipun menunjukkan tren perbaikan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait. Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan adalah mendorong promosi investasi, menjaga kinerja

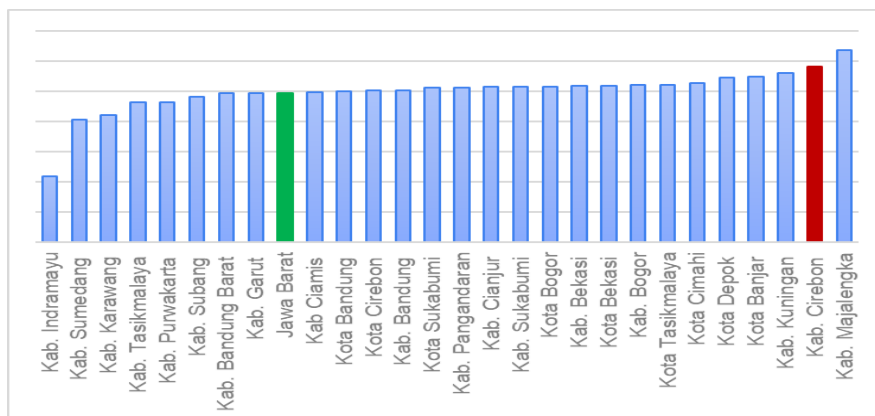
industri, khususnya yang padat karya sehingga mampu mendorong penciptaan tenaga kerja, serta menjaga tingkat inflasi guna mendukung daya beli masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 2.21
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025, BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS; Statistik Indonesia 2025, BPS, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.22
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)



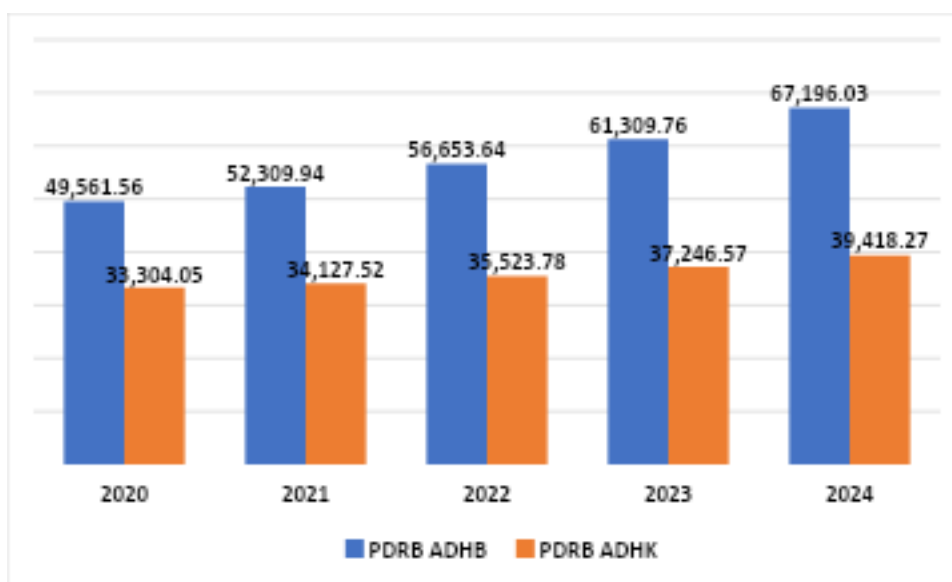
Sumber: BPS; Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada pada pertumbuhan ekonomi positif. Ada 19 kabupaten/kota yang berada di atas angka Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Majalengka dengan pertumbuhan paling tinggi di Provinsi Jawa Barat yakni 6,38 persen

sedangkan Kabupaten Indramayu adalah Kabupaten dengan pertumbuhan terendah yakni 2,18 persen. Sedangkan Kabupaten Cirebon berada pada posisi kedua dari atas.

Nilai tambah produksi yang dihasilkan di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, terlebih pada tahun 2024 yang meningkat cukup signifikan. Nilai PDRB ADHB Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 67.196,03 milyar rupiah, jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, sektor industri pengolahan masih menjadi andalan. Penyumbang perekonomian terbesar kedua adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sektor yang paling sedikit berkontribusi dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Cirebon adalah sektor sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,14 persen.

Gambar 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024
(Milyar Rupiah)



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

PDRB Per Kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata secara pertumbuhan nyata per Kapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Adapun PDRB per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024

PDRB per kapita:	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
ADHB (ribu)	Rp	20.130,04	22.833,82	24.468,01	25.148,61	28.193,50
ADHK (ribu)	Rp	12.853,14	14.896,79	15.342,28	15.278,14	16.507,08

Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran (2025), data yang dikelola dalam SIPD

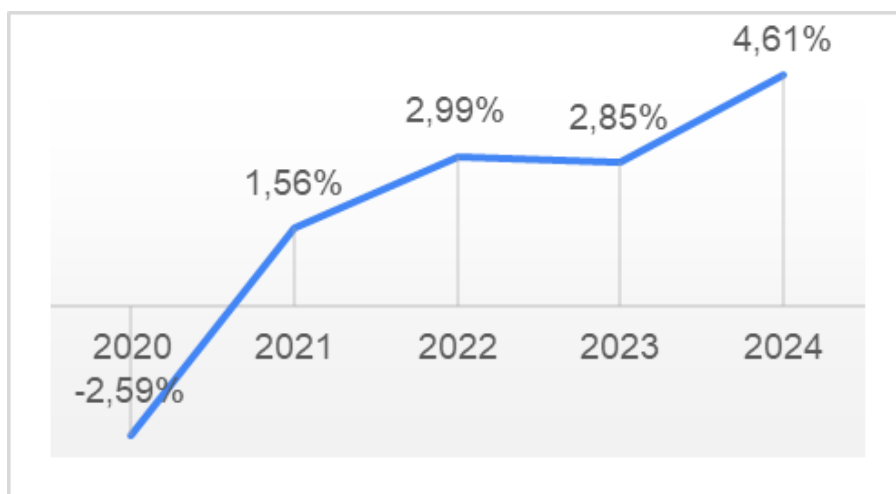
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) mengalami kenaikan setiap tahun selama 2020–2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan nominal pendapatan masyarakat, meskipun belum tentu mencerminkan daya beli yang meningkat (karena belum memperhitungkan inflasi). Kenaikan paling signifikan terjadi antara 2023 ke 2024 (naik sekitar Rp 3,045 juta atau hampir 12,1%), yang bisa mencerminkan akselerasi ekonomi pada tahun terakhir, mungkin akibat pemulihan pasca pandemi, peningkatan investasi, atau pengaruh inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami pertumbuhan, meskipun sempat stagnan pada 2023. Penurunan tipis dari 2022 ke 2023 (dari 15.342,28 ke 15.278,14 ribu) dapat mengindikasikan: Perlambatan ekonomi riil; Gangguan pada sektor produktif utama; Tekanan inflasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Namun, pemulihan cukup kuat pada 2024, dengan lonjakan ke 16.507,08 ribu atau tumbuh sekitar 8% dibanding tahun sebelumnya, menandakan adanya pemulihan ekonomi yang substansial secara riil, bukan hanya nominal.

Meski demikian, Laju PDRB Perkapita di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhannya mencapai -2,59 persen dan terus mengalami percepatan hingga 4,61 persen pada 2024, walaupun sempat mengalami perlambatan laju PDRB pada 2023. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2020 yakni -2,59 persen. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.24

Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber: PDRB Kabupaten Cirebon Menurut Pengeluaran (2025), data yang dikelola dalam SIPD

B. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan

1. Kemiskinan

Angka kemiskinan di suatu wilayah merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kesejahteraan masyarakat, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran, baik untuk kebutuhan pangan maupun non-pangan, di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin merujuk pada individu yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan garis kemiskinan sebagai jumlah rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum yang layak. Standar ini didasarkan pada 20% kelompok penduduk tidak miskin terbawah yang disebut sebagai **kelompok acuan**.

Definisi Operasional Garis Kemiskinan adalah pengeluaran kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal per kapita per hari, serta kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2021 adalah sekitar 12,30 persen (atau setara dengan 271.020 jiwa) dan 2022 sebesar 12,01 persen (atau setara dengan 266.100 jiwa). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon

tahun 2021 dan 2022 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka Provinsi yang hanya mencapai 8,40 persen di tahun 2021 dan 8,06 persen di tahun 2022, dan Nasional yang juga hanya mencapai 10,14 persen di tahun 2021 dan 9,50 persen di tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi.

Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mencapai 11,00 persen atau setara dengan 245,92 ribu jiwa menurun 3,26 ribu jiwa dibanding penduduk miskin tahun sebelumnya yang sebesar 249,18 ribu jiwa (11,20 persen). Di sisi lain, garis kemiskinan mengalami peningkatan, sehingga tekanan ekonomi bagi kelompok rentan semakin besar. Kondisi ini disebabkan oleh Kondisi ekonomi makro yang cenderung positif menjadi faktor penurunan angka kemiskinan. Selain itu, inflasi yang cukup terkendali dan laju pertumbuhan ekonomi dengan tren yang konsisten meningkat menjadi indikator turunnya kemiskinan.

Tabel 2.17
Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribu)	Persentase
2020	393.452	247,94	11,24
2021	404.635	271,02	12,30
2022	416.914	266,10	12,01
2023	451.853	249,18	11,20
2024	475.046	245,90	11.00

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

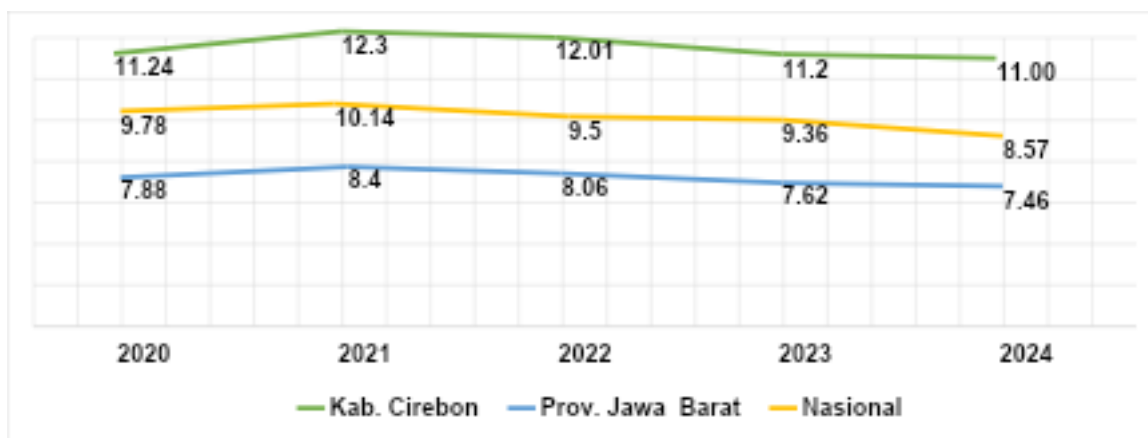
Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 271,02 ribu jiwa atau 12,30 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini meningkat dibanding dengan tahun 2020 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 247,94 ribu jiwa atau 11,24 persen. Pandemi COVID-19 menjadi alasan logis atas tingginya angka kemiskinan dimana semakin meningkatnya pengangguran dan penurunan omset dan keuntungan pada pekerjaan non formal memberi dampak negatif bagi perekonomian daerah.

Garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Meskipun demikian, jumlah total dan persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, namun tren positif mulai terlihat dengan penurunan angka kemiskinan pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat

meskipun biaya hidup yang diperlukan untuk memenuhi standar garis kemiskinan terus meningkat.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.25
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2014-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021, yang mencerminkan dampak kondisi ekonomi saat itu terhadap kelompok masyarakat rentan. Peningkatan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya aktivitas ekonomi dan terbatasnya peluang kerja, yang berdampak pada daya beli masyarakat. Namun, sejak tahun 2022 hingga tahun-tahun berikutnya, persentase penduduk miskin menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Hal ini menandakan adanya perbaikan kondisi ekonomi dan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan pemerintah daerah. Penurunan ini juga mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, peluang kerja, serta dukungan sosial yang lebih baik.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yang menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Namun, di tahun 2023, indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2023 angkanya turun menjadi 1,98 dan kembali menurun menjadi 1,69 pada tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya perbaikan ekonomi, peningkatan efektivitas program pengentasan kemiskinan, serta membaiknya akses masyarakat miskin terhadap sumber daya ekonomi. Semakin kecilnya indeks kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa jarak pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin dekat, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,30	0,24
2021	1,94	0,47
2022	2,27	0,59
2023	1,98	0,53
2024	1,69	0,36

Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka (2025), data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai tingkat ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kesenjangan pengeluaran di dalam kelompok masyarakat miskin. Berdasarkan data tabel 2.18, indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, yang mencerminkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin pada periode tersebut. Namun, mulai tahun 2023, indeks ini menunjukkan tren penurunan secara bertahap, di mana pada tahun 2023 nilainya turun menjadi 0,53 dan kembali menurun menjadi 0,36 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil, yang mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon.

Lebih lanjut, data tahun 2024 menunjukkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun sebelumnya. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2.	Kabupaten Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
3.	Kabupaten Cianjur	10,36	11,18	10,53	10,22	10,14
4.	Kabupaten. Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19
5.	Kabupaten Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6.	Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7.	Kabupaten Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8.	Kabupaten Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
9.	Kabupaten Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20	11,00
10.	Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11.	Kabupaten Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10
12.	Kabupaten Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
13.	Kabupaten Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14.	Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41
15.	Kabupaten Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16.	Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,80

No.	Kabupaten/ Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
17.	Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
18.	Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19.	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
20.	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20
21.	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22.	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23.	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
24.	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25.	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26.	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
27.	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
	Provinsi Jawa Barat	7,88	8,40	8,06	7,62	7,64

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan tabel di atas, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 11,00%, hanya mengalami penurunan sebesar 0,20% dibandingkan tahun 2023. Meskipun terjadi sedikit perbaikan, Kabupaten Cirebon justru mengalami penurunan peringkat dalam tingkat kesejahteraan, naik ke posisi keempat sebagai kabupaten termiskin dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, lebih buruk dibandingkan tahun 2023 yang berada di peringkat kelima. Kondisi ini menjadi permasalahan yang mendesak dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, serta filantropi, untuk bersama-sama menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menurunkan kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan penanganan langsung dilakukan pada kegiatan aspek kesejahteraan masyarakat yang mencakup upaya dalam bidang ekonomi non pertanian, ekonomi pertanian, pendidikan, kesehatan, dan program keluarga berencana, serta prasarana pendukungnya.

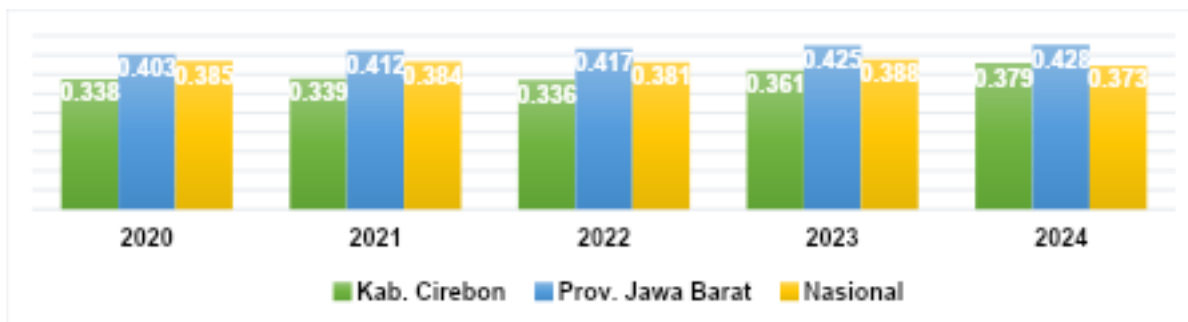
Kegiatan koordinasi penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon juga dilakukan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon, upaya yang dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).

2. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dianalisis melalui Indeks Gini. Berdasarkan data pada gambar di bawah, terlihat bahwa tren Indeks Gini di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan secara bertahap dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022 yang menunjukkan penurunan sementara. Peningkatan yang berkelanjutan ini mengindikasikan bahwa kesenjangan pendapatan antar penduduk semakin melebar, sehingga diperlukan intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 mencapai 0,379 bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional, maka indeks gini Kabupaten Cirebon lebih baik dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat namun masih diatas indeks gini Nasional, sebagaimana pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2.26
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja

tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 (Persen)



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025; Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon mengalami tren penurunan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, sejalan dengan tren yang terjadi di tingkat Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Cirebon mencapai 11,52 persen sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan perlambatan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran. Namun, sejak tahun 2021, TPT mulai menunjukkan penurunan bertahap, yaitu sebesar 10,38 persen pada 2021, 8,11 persen pada 2022, dan 7,65 persen pada 2023. Tren penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang terus berlanjut serta upaya penciptaan lapangan kerja yang semakin membaik.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi di tahun 2022 dan 2024 berada di bawah TPT Provinsi Jawa Barat dan diatas TPT Nasional, dimana pada tahun 2022 dan 2024 TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen dan 6,75 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,86 persen dan 4,91 persen, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya mencapai 8,11 persen dan 6,74 persen.

Tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di Jawa Barat pada Tahun 2024 menunjukkan angka yang bervariasi antara 1,58 persen sampai dengan 8,97 persen.

Tabel 2.20
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	14,2 9	12,2 2	10,6 4	8,47	7,34
2.	Kabupaten Sukabumi	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
3.	Kabupaten Cianjur	11,0 5	9,32	8,41	7,71	5,99
4.	Kabupaten Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36
5.	Kabupaten Garut	8,95	8,68	7,60	7,33	6,96
6.	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
8.	Kabupaten Kuningan	11,2 2	11,6 8	9,81	9,49	7,78
9.	Kabupaten Cirebon	11,5 2	10,3 8	8,11	7,65	6,74
10.	Kabupaten Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11.	Kabupaten Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12.	Kabupaten Indramayu	9,21	8,30	6,49	6,46	6,25
13.	Kabupaten Subang	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14.	Kabupaten Purwakarta	11,0 7	10,7 0	8,75	7,72	7,34
15.	Kabupaten Karawang	11,5 2	11,8 3	9,87	8,95	8,04
16.	Kabupaten Bekasi	11,5 4	10,0 9	10,3 1	8,87	8,82
17.	Kabupaten Bandung Barat	12,2 5	11,6 5	9,63	8,11	6,70
18.	Kabupaten Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19.	Kota Bogor	12,6 8	11,7 9	10,7 8	9,39	8,13
20.	Kota Sukabumi	12,1 7	10,7 8	8,83	8,53	8,34

No.	Kabupaten/ Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
21.	Kota Bandung	11,1 9	11,4 6	9,55	8,83	7,40
22.	Kota Cirebon	10,9 7	10,5 3	8,42	7,66	6,29
23.	Kota Bekasi	10,6 8	10,8 8	8,81	7,90	7,82
24.	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25.	Kota Cimahi	13,3 0	13,0 7	10,7 7	10,5 2	8,97
26.	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27.	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
	Provinsi Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75

Sumber: BPS Jawa Barat Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

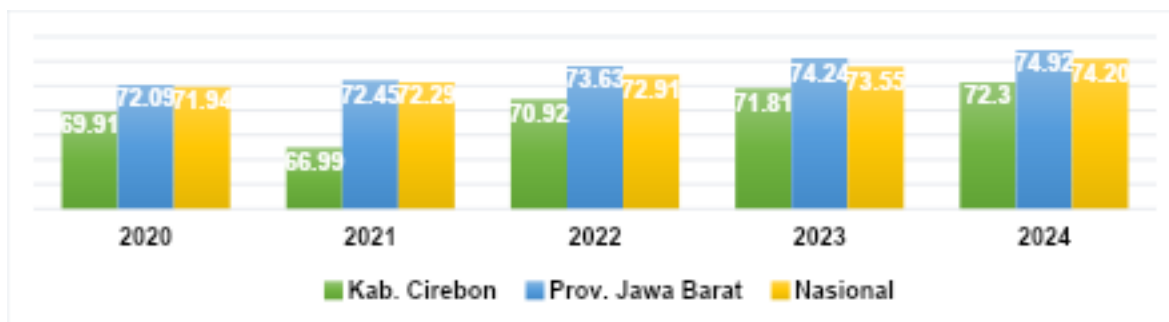
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM adalah tolak ukur utama evaluasi pelaksanaan otonomi daerah, khususnya indikator kinerja makro daerah.

Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi). Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2020 - 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 2.28
Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2020–2024



Sumber: BPS, Cirebon dalam angka Tahun 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025; Indonesia dalam Angka 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, mencapai 69,91 pada tahun 2020 dan terus meningkat menjadi 72,30 pada tahun 2024. Namun, meskipun mengalami tren positif, angka IPM Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional yang mencapai 74,20 dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,92. Kenaikan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Namun, untuk mengejar ketertinggalan dengan provinsi dan nasional, diperlukan upaya lebih lanjut, seperti peningkatan kualitas pendidikan, akses layanan kesehatan yang lebih merata, serta penguatan ekonomi masyarakat agar pembangunan manusia di Kabupaten Cirebon semakin optimal.

Data IPM selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan. Terdapat 10 daerah yang memiliki IPM diatas nilai provinsi, yaitu: Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Kualitas Pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mana capaian kedua indikator tersebut perlu ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai, Pembentukan SATGAS untuk sinkronisasi keakuratan data pendidikan secara sistematis, Melakukan sosialisasi informasi Paket B dan C lebih massive dalam rangka optimalisasi program belajar 12 tahun kepada masyarakat khususnya bagi usia produktif, Pengusulan peninjauan ulang kebijakan tahapan PPDB dan batas usia agar dapat

meningkatkan jumlah partisipasi sekolah di Kabupaten Cirebon, Melakukan pemanfaatan sekolah-sekolah dasar dan Menengah untuk dimanfaatkan oleh PKBM yang terkendala Sarana dan Prasarana, Melakukan kerjasama antara Pemda Kabupaten Cirebon dengan pihak swasta (perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon) untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian di Kabupaten Cirebon. Selain itu, perlu melaksanakan optimalisasi pusat kegiatan belajar masyarakat, peningkatan dan optimalisasi program beasiswa serta optimalisasi manajemen sekolah untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah. Kualitas kesehatan ditunjukkan dengan capaian indikator Usia Harapan Hidup dimana indikator tersebut dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah. Dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat perlu adanya peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang memadai dalam memberikan pelayanan. Selain itu, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) di masyarakat juga perlu diterapkan dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat bergantung pada pendapatan yang diperoleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga hal tersebut berbanding lurus dengan tersedianya lapangan pekerjaan terhadap tenaga kerja. Dalam hal ini, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja maka dibutuhkan pengembangan wilayah sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing daerah.

Dari data 5 tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Cirebon yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024 tidak banyak berubah yaitu peringkat 18 tahun 2020, sampai tahun 2024, sebagaimana data tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.21
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2024

No.	Kab/Kota	IPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
NASIONAL		71,94	72,29	72,91	73,55	74,20
JAWA BARAT		72,09	72,45	73,63	74,24	74,92
1.	Kabupaten Bogor	70,40	70,60	72,45	73,02	73,36
2.	Kabupaten Sukabumi	66,88	67,07	68,87	69,71	70,18
3.	Kabupaten Cianjur	65,36	65,56	67,55	68,18	68,89

No.	Kab/Kota	IPM				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Kabupaten Bandung	72,39	72,73	73,46	74,03	74,59
5.	Kabupaten Garut	66,12	66,45	68,51	69,22	69,91
6.	Kabupaten Tasikmalaya	65,67	65,90	68,45	69,38	69,98
7.	Kabupaten Ciamis	70,49	70,93	72,52	73,12	73,64
8.	Kabupaten Kuningan	69,38	69,71	70,44	70,99	71,56
9.	Kabupaten Cirebon	69,91	69,99	70,92	71,81	72,30
10.	Kabupaten Majalengka	67,59	67,81	70,18	70,76	71,37
11.	Kabupaten Sumedang	71,64	71,80	73,53	74,02	74,57
12.	Kabupaten Indramayu	67,29	67,64	69,52	70,19	70,72
13.	Kabupaten Subang	68,95	69,13	70,54	71,42	72,05
14.	Kabupaten Purwakarta	70,82	70,98	72,89	73,43	73,99
15.	Kabupaten Karawang	70,66	70,94	72,64	73,25	73,82
16.	Kabupaten Bekasi	74,07	74,45	75,60	76,13	76,80
17.	Kabupaten Bandung Barat	68,08	68,29	69,82	70,33	70,77
18.	Kabupaten Pangandaran	68,06	68,28	70,21	70,57	71,03
19.	Kota Bogor	76,11	76,59	77,68	78,36	79,03
20.	Kota Sukabumi	74,21	74,60	76,24	77,16	77,69
21.	Kota Bandung	81,51	81,96	82,75	83,29	83,75
22.	Kota Cirebon	74,89	75,25	76,89	77,45	78,09
23.	Kota Bekasi	81,50	81,95	82,52	83,06	83,55
24.	Kota Depok	80,97	81,37	82,02	82,53	83,05
25.	Kota Cimahi	77,83	78,06	79,01	79,69	80,30
26.	Kota Tasikmalaya	73,04	73,31	74,84	75,47	76,03
27.	Kota Banjar	71,70	71,92	73,93	74,45	75,01

Sumber: BPS, Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025; Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025.
Data yang dikelola dalam SIPD

2.1.2.2.2 Kesehatan untuk Semua

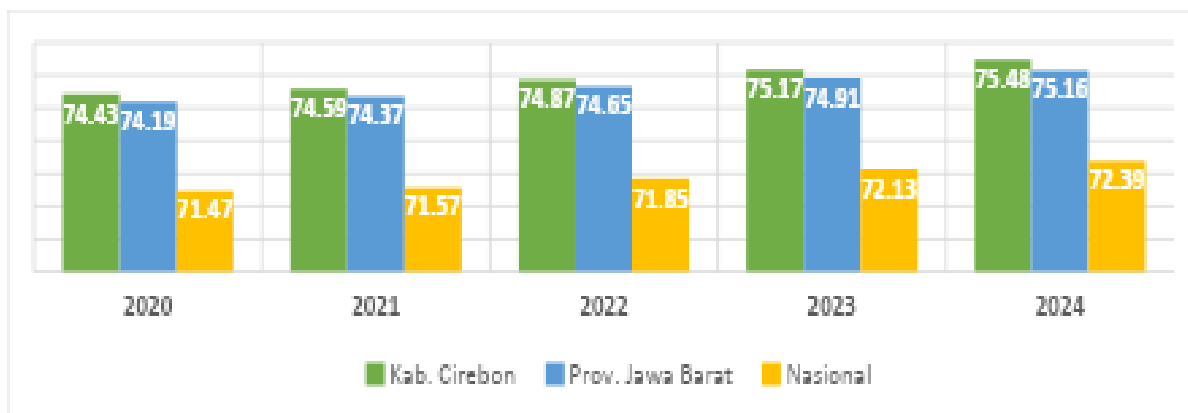
A. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun IPM dalam bidang kesehatan. Representasi dari dimensi umur yang panjang adalah angka harapan hidup. Angka tersebut menggambarkan seberapa lama peluang seseorang untuk bertahan hidup. Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan. Semakin tinggi indikator harapan hidup mencerminkan semakin baiknya status kesehatan di suatu daerah karena seseorang yang hidupnya panjang cenderung didukung dengan kondisi kesehatan yang baik. AHH Kabupaten Cirebon semakin lama semakin meningkat yang mengindikasikan keberhasilan program dan kegiatan di bidang kesehatan.

Berdasarkan gambar dibawah, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dan Nasional mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2024, AHH Kabupaten Cirebon mencapai 75,48 tahun, yang berarti setiap bayi yang lahir pada tahun tersebut memiliki harapan hidup hingga usia 75-76 tahun. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas layanan kesehatan, akses terhadap fasilitas medis, serta kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat. Untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperluas akses layanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat, serta memperkuat sistem kesehatan daerah guna memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Gambar 2.29

Angka Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)

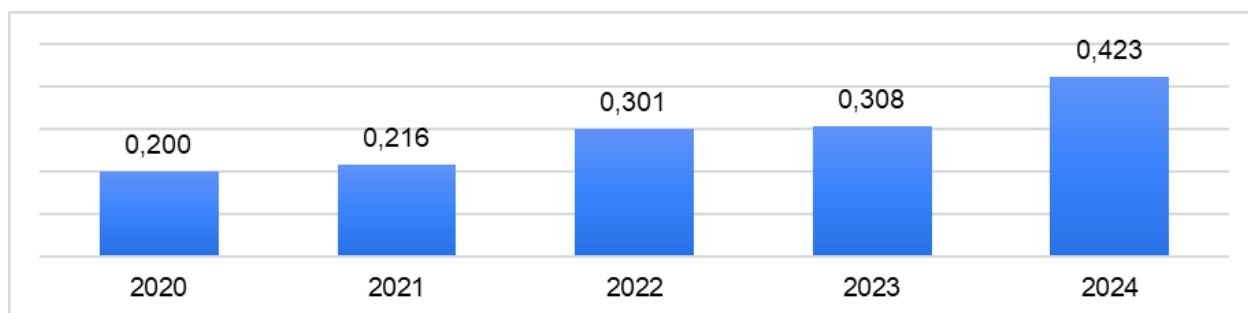


Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jabar 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

B. Indeks Keluarga Sehat

Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50 - 0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

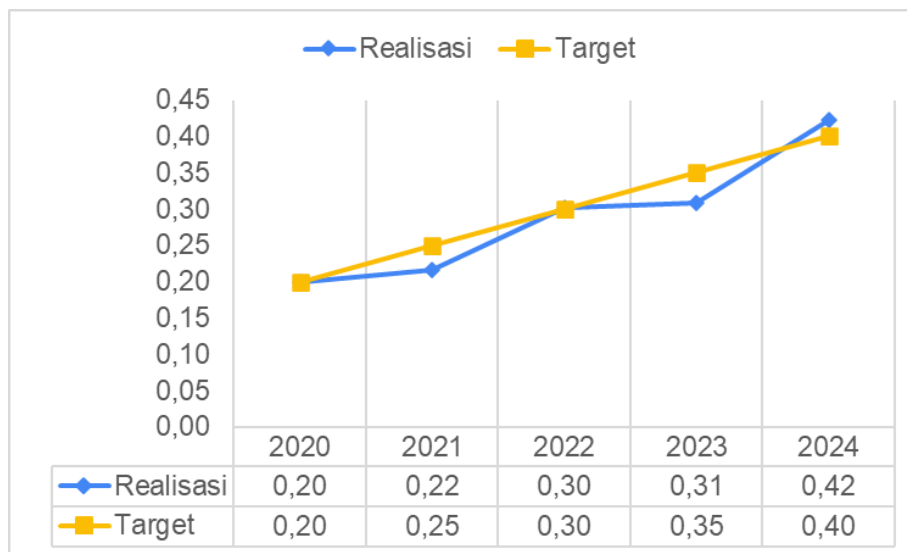
Gambar 2.30
Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan Gambar 2.28 Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022 dengan capaian 0,301, kemudian naik tipis menjadi 0,308 pada 2023. Pada tahun 2024, IKS mencapai angka tertinggi yaitu 0,42. Hal ini menunjukkan tren positif dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga selama lima tahun terakhir.

Gambar 2.31
Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Grafik di atas menggambarkan perkembangan Realisasi Indeks Keluarga Sehat (IKS) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun.

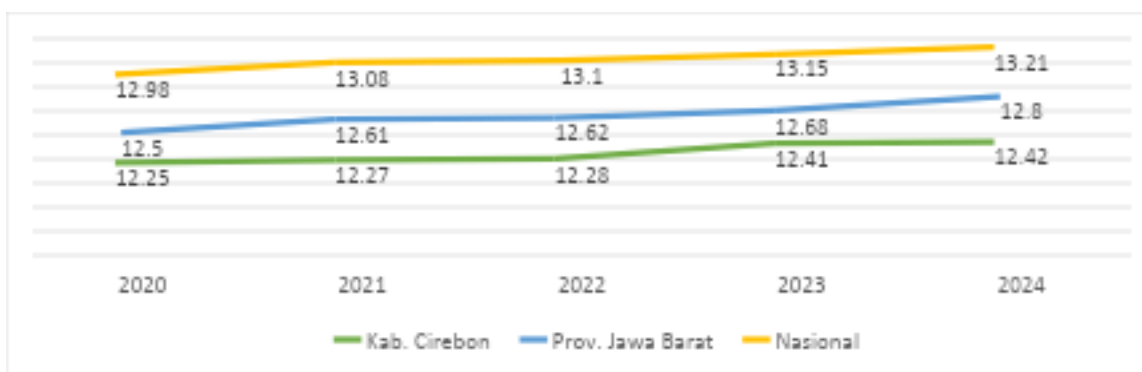
Pada tahun 2020, realisasi IKS tercatat sebesar 0,20, sesuai dengan target yang ditetapkan. Meskipun pada tahun 2021 realisasi sedikit lebih rendah dibandingkan target (0,22 dibandingkan 0,25), capaian tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, realisasi IKS berhasil mencapai target sebesar 0,30. Sementara pada tahun 2023, realisasi sedikit berada di bawah target (0,31 dibandingkan 0,35). Pencapaian yang paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana realisasi IKS mencapai angka 0,42, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,40. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam upaya peningkatan status kesehatan keluarga di Indonesia, dengan kinerja realisasi yang secara umum mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

2.1.2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

A. Harapan Lama Sekolah

Nilai HLS Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 12,42 yang berarti bahwa seseorang yang berumur 7 tahun ke atas memiliki harapan bersekolah selama 12-13 tahun atau sampai dengan tamat SMA dan memasuki perguruan tinggi (semester I). Cukup tingginya harapan lama sekolah ini mengindikasikan semakin meningkatnya berbagai fasilitas pendidikan di Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.32
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Provinsi Jawa Barat Dalam Angka 2025; Statistik Indonesia 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

Meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun nilai HLS Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 apabila dibandingkan

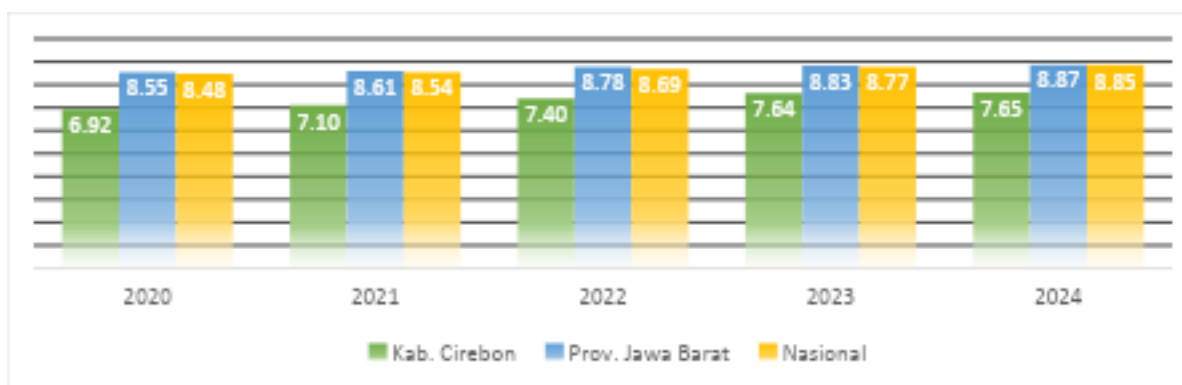
dengan nilai HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional, maka HLS Kabupaten Cirebon selalu dibawah HLS Provinsi Jawa Barat dan HLS Nasional.

B. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk untuk menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. RLS dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. RLS ini juga dapat digunakan sebagai indikator kualitas pendidikan masyarakat.

Nilai RLS Kabupaten Cirebon juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,65 tahun pada tahun 2024 yang berarti bahwa penduduk Kabupaten Cirebon rata-rata mengenyam pendidikan sekolah selama 7,65 tahun atau Kelas 2 SMP semester pertama. Meskipun demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon masih berada di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Barat dan rata-rata lama sekolah Nasional. Dengan nilai RLS 7,65 tahun Kabupaten Cirebon menempati peringkat 4 terendah dari 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat, hal ini menjadi permasalahan serius di Kabupaten Cirebon yang perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif antara pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Gambar 2.33
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025; Badan Pusat Statistik Nasional Tahun 2025; BPS Provinsi Jabar 2025. Data yang dikelola dalam SIPD

2.1.2.2.4 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

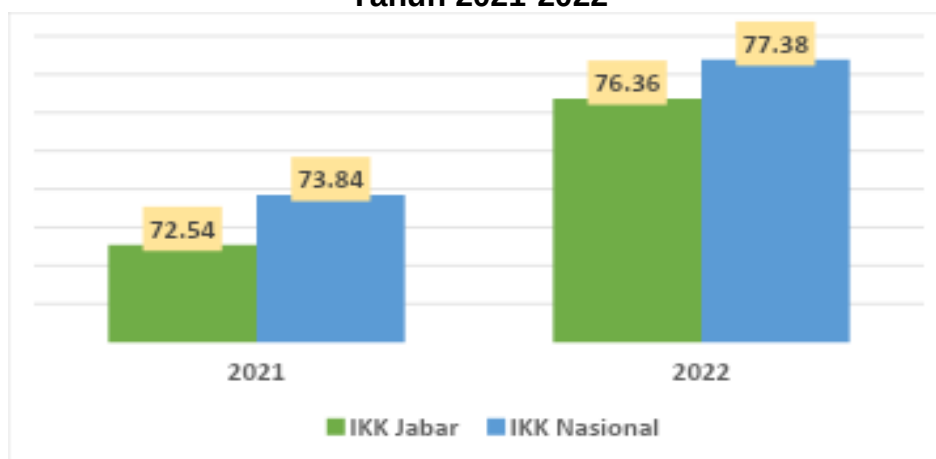
A. Indeks Kualitas Keluarga

Menurut Permen PPPA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Indeks Kualitas

Keluarga (IKK) merupakan suatu pengukuran pencapaian Kualitas Keluarga. IKK menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak di tingkat pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota dengan kategori indeks antara 0,00 sampai 100 dengan kategori indeks IKK < 50 (Kurang Responsif Gender dan Hak Anak), IKK 50 – 75 (Cukup Responsif Gender dan Hak Anak), dan IKK > 75 (Responsif Gender dan Hak Anak). IKK dibentuk dari 5 pilar atau dimensi yaitu kualitas Legalisasi dan Struktur, Kualitas Ketahanan Fisik, Kualitas Ketahanan Ekonomi, Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi, dan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya. Data IKK untuk Kabupaten Cirebon tidak tersedia, sehingga data yang dianalisis adalah IKK Provinsi Jawa Barat dan Nasional.

Nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat tahun 2021-2022 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021 nilai IKK Provinsi Jawa Barat sebesar 72,54 yang kemudian mengalami pertumbuhan sebesar 5,27% menjadi 76,36. Kondisi tersebut kemudian menyebabkan perubahan kategori IKK Provinsi Jawa Barat, yang awalnya Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah cukup responsif gender dan hak anak menjadi wilayah yang responsif terhadap gender dan hak anak. Peningkatan nilai IKK juga terjadi pada skala nasional, dimana nilai IKK Nasional mengalami pertumbuhan sebesar 4,79% dari 73,84 pada tahun 2021 menjadi 77,38 pada tahun 2022. Berdasarkan nilai IKK tersebut, Indonesia masuk kedalam kategori negara yang cukup responsif terhadap gender dan hak anak.

Gambar 2.34
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2021-2022



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), data yang dikelola dalam SIPD

B. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Capaian Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon tahun 2022 (65,64) sedikit lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat (65,74) namun lebih tinggi daripada IPA Nasional (63,30).

Tabel 2.22

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2022

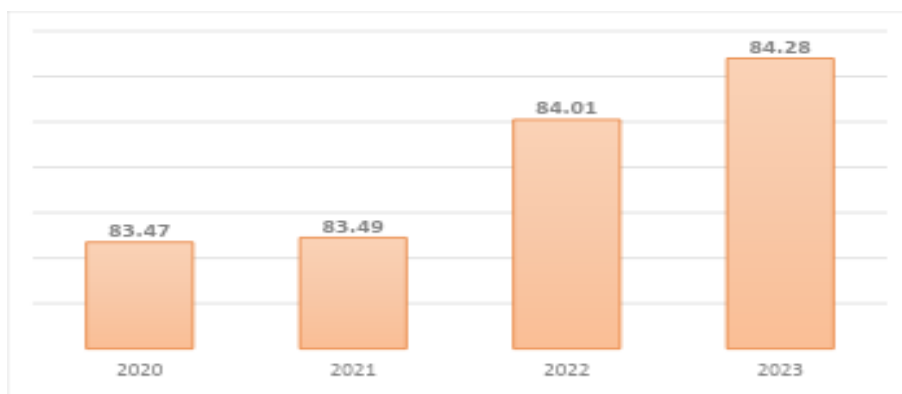
	Tahun 2022		
	IPA	IPHA	IPKA
Kab. Cirebon	65.64	61.77	78.45
Jawa Barat	65.74	62.04	80.13
Nasional	63.30	60.33	75.21

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2023), data yang dikelola dalam SIPD

C. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cirebon yang dibandingkan dengan tingkat Provinsi dan Nasional.

Gambar 2.35
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2023



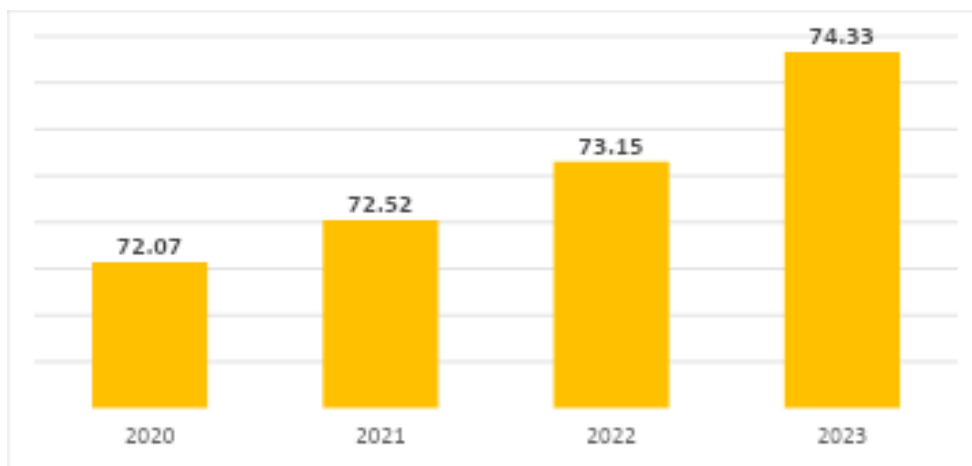
Sumber: BPS Nasional 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan data diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Cirebon selama tahun 2020-2023 mengalami fluktuasi dimana dari tahun tahun 2019 sebesar 83,50. Namun, pada tahun 2020 nilai dari Indeks Pembangunan Gender mengalami sedikit penurunan sebesar 00,03. Selepas mengalami penurunan tersebut nilai Indeks Pembangunan Gender kembali naik dengan signifikan dari tahun 2021 yang mencapai nilai 83,49 dan di tahun 2023 menjadi nilai indeks pembangunan gender tertinggi dengan nilai 84,28.

D. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan berbasis gender.

Gambar 2.36
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Nasional 2023, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Dari data diatas menunjukkan capaian IDG di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019-2022 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 capaian IDG di Kabupaten Cirebon sebesar 75,61 dan merupakan capaian tertinggi dari tahun 2019-2023. Nilai indeks pemberdayaan gender pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Namun, pada tahun 2021-2023 capaian indeks pemberdayaan gender di Kabupaten Cirebon kembali naik dengan nilai 73,15 dan 74,33.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

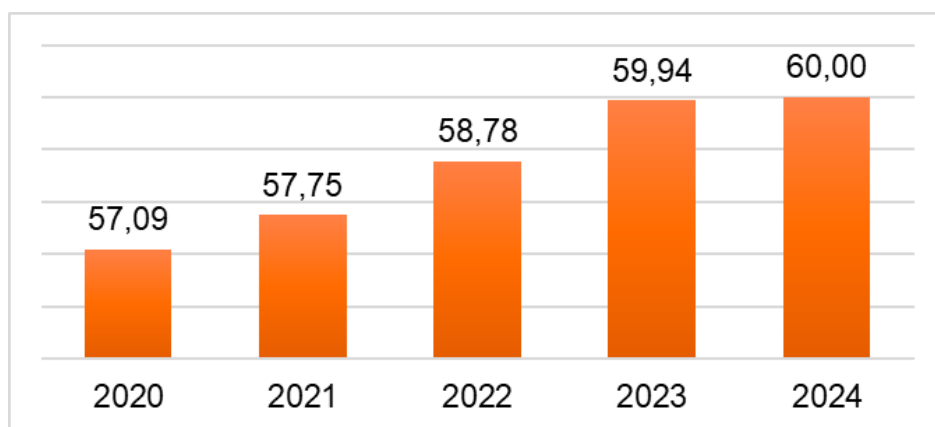
2.1.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.1.3.1.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipresentasikan oleh indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). tujuan dilakukan pengukuran Indeks Pendidikan ialah untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dasar.

Gambar 2.37
Indeks Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pendidikan kabupaten Cirebon setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 indeks Pendidikan kabupaten Cirebon 57,09 kemudian nilai tersebut pada tahun 2024 meningkat menjadi 60,00. Kenaikan tersebut dinilai cukup baik namun nilai tersebut masih

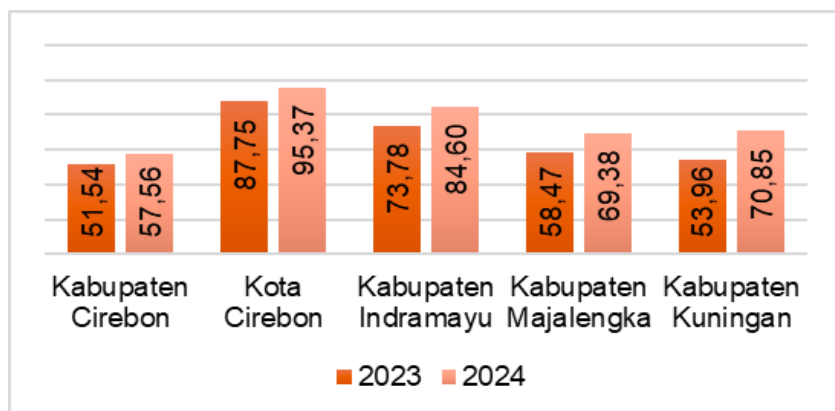
cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Perlu adanya beberapa strategi yang dapat meningkatkan HLS dan RLS Kabupaten Cirebon antara lain : (1) upaya peningkatan, pemerataan serta akses Pendidikan setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kesehatan; (2) menerapkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kehidupan sehari-hari; (3) memberikan bantuan keuangan kepada siswa yang membutuhkannya untuk mengatasi hambatan ekonomi; (4) memberikan dukungan sosial dan psikologis berupa dukungan emosional dan psikologis kepada siswa, termasuk konseling dan mentorship; (5) dan lainnya.

B. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi Masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

- Pemerataan layanan perpustakaan
- Ketercukupan koleksi
- Ketercukupan tenaga perpustakaan
- Tingkat kunjungan masyarakat per hari
- Jumlah perpustakaan ber-SNP
- Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
- Anggota perpustakaan

Gambar 2.38
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2023-2024



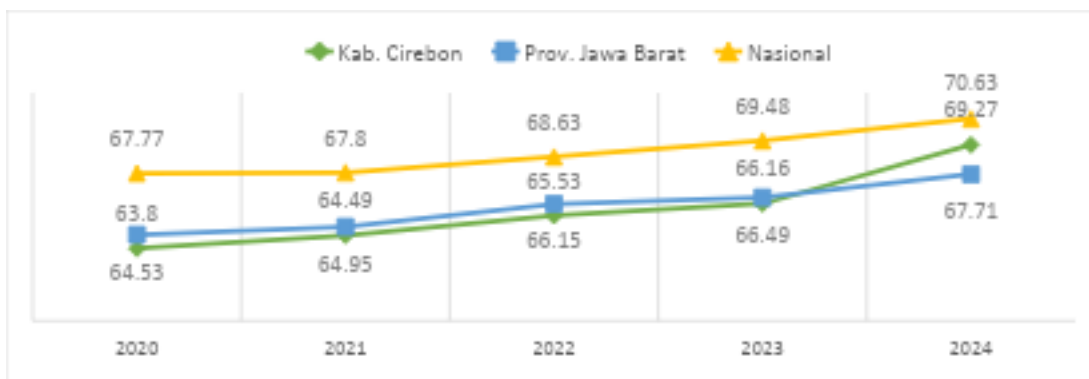
Sumber: Disarsipus Kabupaten Cirebon, Tahun 2024; Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Cirebon dan daerah sekitarnya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 ke 2024. Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari 51,54 pada tahun 2023 menjadi 57,56 pada tahun 2024. Kota Cirebon mencatat IPLM tertinggi di wilayah ini, meningkat dari 87,75 menjadi 95,37. Peningkatan IPLM ini mencerminkan adanya upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan akses literasi dan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Berbagai program penguatan budaya baca, penyediaan fasilitas literasi, serta peningkatan peran komunitas dan lembaga pendidikan menjadi faktor pendorong utama dalam mendorong pertumbuhan indeks literasi di daerah ini.

C. Angkatan Kerja

Jumlah penduduk yang makin besar berkorelasi pada jumlah angkatan kerja yang makin besar pula. Ini berarti makin besar pula jumlah orang yang mencari pekerjaan atau menganggur. Agar dapat dicapai keadaan yang seimbang maka seyogyanya mereka semua dapat tertampung dalam suatu pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keterampilan mereka. Ini akan membawa konsekuensi bahwa perekonomian harus selalu menyediakan lapangan-lapangan pekerjaan bagi angkatan baru.

Gambar 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD

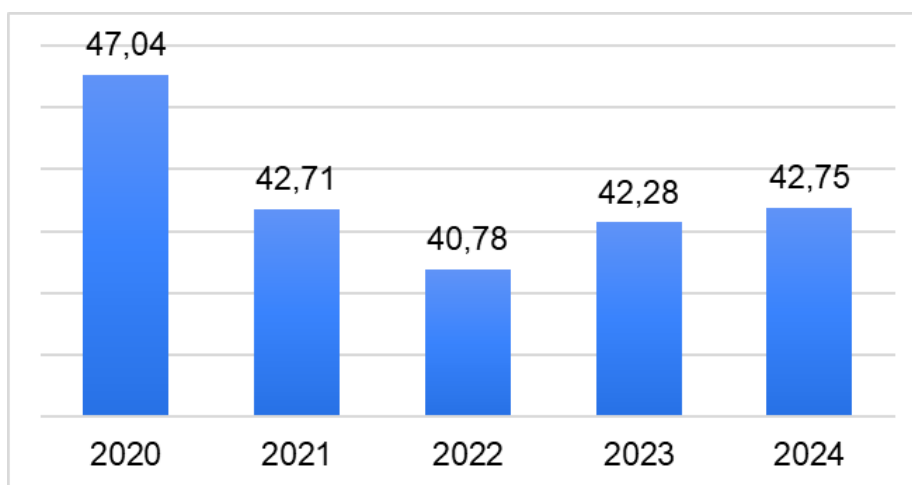
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Cirebon secara umum konsisten meningkat. TPAK pada 2024 mencapai 69,27 persen atau meningkat sebesar 3,11 persen dibandingkan 2023 sebesar 66,16 persen. Peningkatan TPAK Kabupaten Cirebon ini didorong oleh adanya peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berbasis digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar, adanya pengembangan inkubator bisnis, dan pemberian pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Namun TPAK Kabupaten Cirebon tersebut masih berada dibawah TPAK nasional dan TPAK Provinsi Jawa Barat. Hal ini diakibatkan masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian, kurangnya lembaga balai pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, terbatasnya anggaran pelatihan dan uji sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, belum meratanya lapangan kerja, dan masih minimnya akses lapangan kerja di setiap kabupaten/kota.

D. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

Gambar 2.40
Angka Ketergantungan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, data yang dikelola dalam SIPD

Dari grafik di atas, terlihat bahwa angka ketergantungan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2023, angka ketergantungan tercatat sebesar **42,28**, kemudian pada tahun 2024 sedikit meningkat menjadi **42,75**. Artinya, setiap

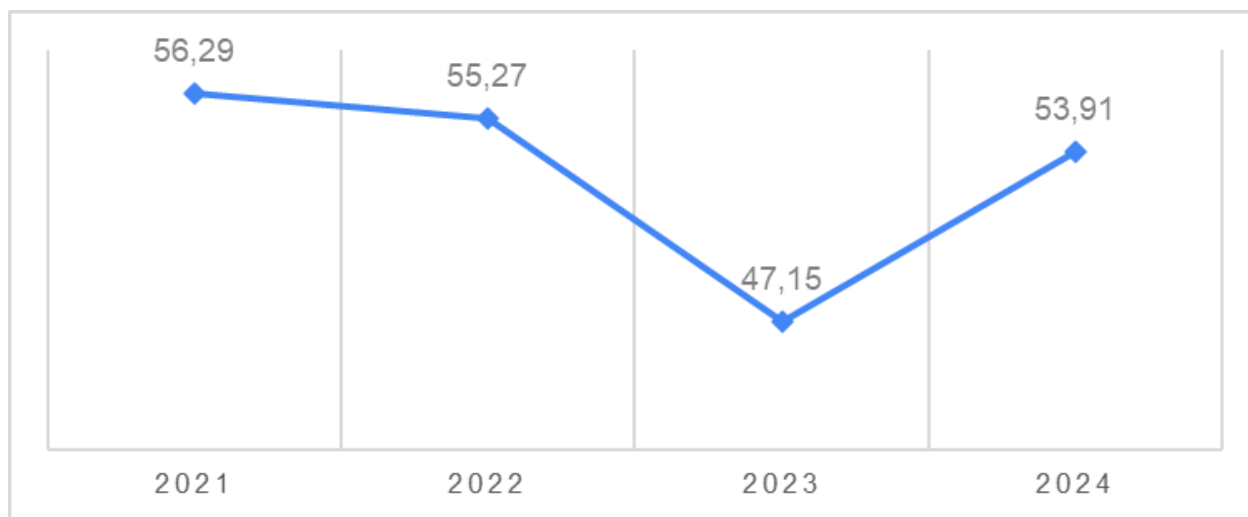
100 penduduk usia produktif menanggung sekitar **42 hingga 43 penduduk usia non-produktif**.

Penurunan angka ketergantungan ini sejalan dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) dan angka kematian, yang merupakan dampak dari kemajuan pembangunan sosial ekonomi. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan meningkatnya akses pendidikan, khususnya bagi perempuan, yang berkontribusi pada penurunan angka kelahiran dan angka kematian.

2.1.3.1.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan gambar dibawah, Kabupaten Cirebon memiliki indeks inovasi daerah sebesar 53,91 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 81,27 dengan kategori sangat inovatif.

Gambar 2.41
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024

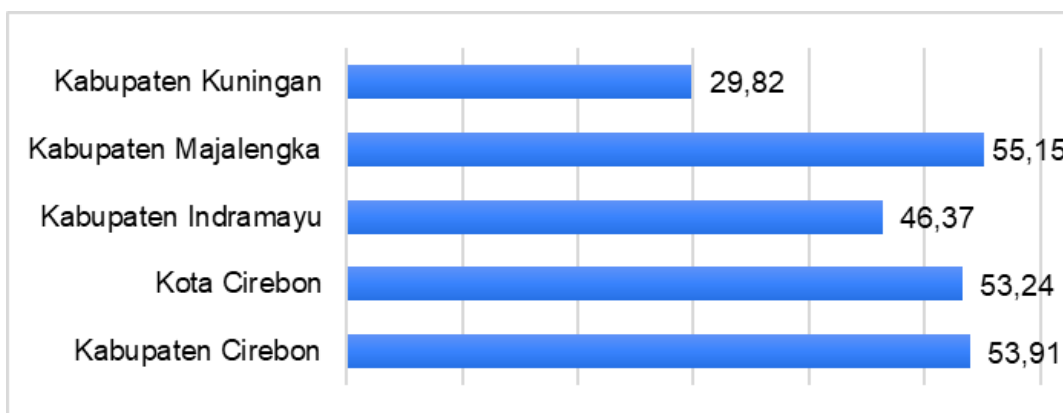


Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Bentuk inovasi daerah yang dilakukan diantaranya adalah inovasi tata publik pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Nilai indeks inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat khususnya wilayah Ciayumajakuning yang tertinggi adalah Kabupaten Majalengka dengan nilai sebesar 55,15.

Gambar 2.42

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2024), data yang dikelola dalam SIPD

Capaian inovasi di tingkat Kabupaten Cirebon sejauh ini sudah cukup baik. Namun perlu terus mengupayakan perubahan ke arah yang lebih baik dan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasinya. Selain itu, pelaksanaan inovasi tidak hanya berfokus pada ide-ide baru dan kreatif, serta regulasi dan tatanan kelembagaan semata namun harus terdapat peran budaya inovasi di dalamnya. Budaya inovasi yang kuat memungkinkan sebuah inovasi dapat dibangun secara berkesinambungan. Karena itu, budaya inovasi harus menjadi sesuatu kebiasaan dalam birokrasi sehingga dapat meningkatkan kinerja.

2.1.3.1.3. Sektor Basis dan Non Basis

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis atau leading sektor.

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang menjadi acuan. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien LQ tersebut nantinya dapat berupa jumlah produksi atau satuan lain yang dapat digunakan sebagai kriteria sektor basis. Pada analisis LQ ini yang dianalisis adalah pada jumlah produksi per sektor di Kabupaten Cirebon dibandingkan dengan Jawa Barat, sehingga terlihat keunggulan komparatif masing-masing sektor di tingkat Jawa Barat.

Tabel 2.23
Analisis Location Quotient (LQ) Kabupaten Cirebon

Kategori	Uraian	2022	2023	2024	Rata-rata	Ket
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,816	1,770		1,793	BASIS
B	Pertambangan dan Penggalan	0,932	1,026		0,979	NON BASIS
C	Industri Pengolahan	0,487	0,485		0,486	NON BASIS
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,389	0,407		0,398	NON BASIS
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,096	1,258		1,177	BASIS
F	Konstruksi	1,338	1,268		1,303	BASIS
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,986	0,942		0,964	NON BASIS
H	Transportasi dan Pergudangan	1,640	1,728		1,684	BASIS
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,130	1,119		1,125	BASIS
J	Informasi dan Komunikasi	0,698	0,683		0,691	NON BASIS
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,440	1,496		1,468	BASIS
L	Real Estate	2,079	2,031		2,055	BASIS
M,N	Jasa Perusahaan	2,044	2,078		2,061	BASIS
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,490	1,543		1,517	BASIS
P	Jasa Pendidikan	1,870	1,945		1,908	BASIS
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,634	2,615		2,624	BASIS
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,773	1,872		1,822	BASIS

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon, Data Diolah, Data yang dikelola dalam SIPD

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sektor Basis
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
 - b. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang.

- c. Konstruksi.
- d. Transportasi dan Pergudangan.
- e. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
- f. Jasa Keuangan dan Asuransi.
- g. Real Estate.
- h. Jasa Perusahaan.
- i. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial.
- j. Jasa Pendidikan.
- k. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
- l. Jasa Lainnya.

2. Sektor Non Basis

- a. Pertambangan dan Penggalian.
- b. Industri Pengolahan.
- c. Pengadaan Listrik dan Gas.
- d. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.
- e. Informasi dan Komunikasi.

2.1.3.1.4 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Dalam hal ini rumah tangga berfungsi sebagai pengguna akhir (*final demand*) dari berbagai jenis barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Gambar 2.43
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

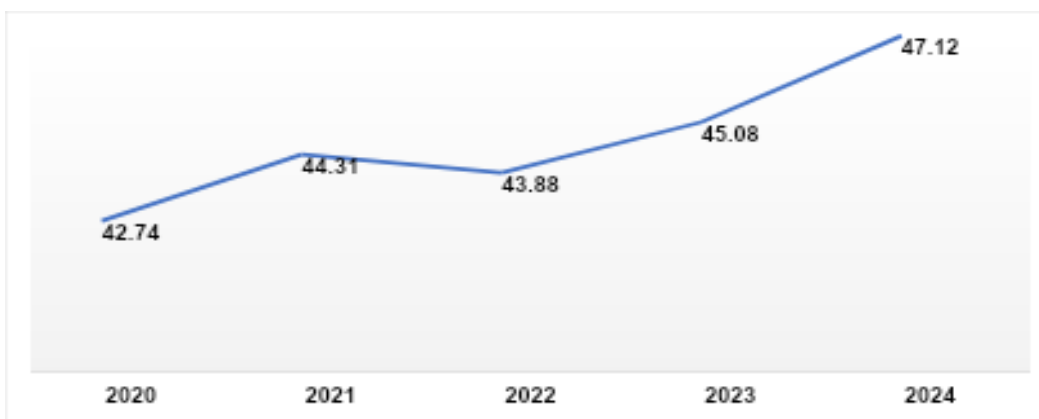
Berdasarkan data yang disajikan, pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan yang signifikan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, pengeluaran konsumsi tercatat sebesar Rp985.859 per kapita, kemudian meningkat menjadi Rp1.016.767 pada tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut dengan pengeluaran sebesar Rp1.135.006 pada tahun 2022, hingga mencapai angka tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp1.338.096 per kapita.

Kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita setiap tahunnya mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya beli masyarakat. Tren positif ini menunjukkan perbaikan kesejahteraan masyarakat dan dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon. Namun, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memastikan bahwa peningkatan ini merata di seluruh lapisan masyarakat dan tidak hanya terjadi pada kelompok ekonomi tertentu.

2.1.3.1.5 Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita adalah proporsi dari total pengeluaran per individu dalam suatu populasi yang digunakan untuk membeli barang dan layanan non pangan. Ini mencakup segala sesuatu selain bahan makanan, seperti transportasi, hiburan, pakaian, dan barang-barang lainnya.

Gambar 2.44
Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

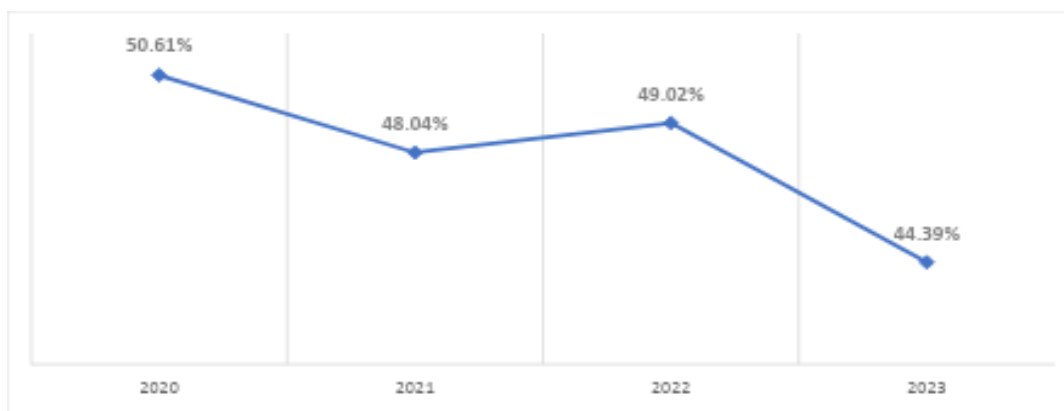
Dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, data menunjukkan adanya fluktuasi dalam persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita di Kabupaten Cirebon. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, serta dinamika tren konsumsi masyarakat. Pada tahun 2020, persentase pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita tercatat sebesar 42,74%. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 44,31%, namun kembali menurun menjadi 43,88% pada tahun 2022. Tren kenaikan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan persentase sebesar 45,08%, hingga mencapai 47,12% pada tahun 2024.

Peningkatan pengeluaran konsumsi non-pangan ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Cirebon semakin mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan selain pangan, seperti pendidikan, transportasi, kesehatan, dan rekreasi. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli serta peningkatan kesejahteraan, meskipun tetap perlu dianalisis lebih lanjut apakah pertumbuhan ini merata di seluruh kelompok sosial ekonomi.

2.1.3.1.6 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDB

Rasio ekspor dan impor terhadap PDB mengukur seberapa besar nilai ekspor dan impor berkontribusi terhadap ekonomi suatu wilayah. Tingkat rasio ini memberikan gambaran tentang sejauh mana perdagangan internasional mempengaruhi kegiatan ekonomi regional. Jika nilai rasio tinggi, itu menunjukkan bahwa perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan ekonomi wilayah tersebut.

Gambar 2.45
Rasio ekspor dan impor terhadap PDB



Sumber: BPS Kabupaten Cirebon dalam Angka Tahun 2024, Data Diolah, data yang dikelola dalam SIPD

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rasio impor dan ekspor terhadap PDB memiliki nilai cukup besar yaitu sebesar 56,93 % di awal tahun. Hal ini berarti nilai gabungan dari ekspor dan impor tersebut setara dengan 56 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) mereka. Ditahun selanjutnya rasio ini mengalami penurunan menjadi sebesar 50,61% dan turun kembali sebesar 48,04% di tahun ketiga. Namun, ditahun selanjutnya rasio ekspor impor terhadap PDB kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 49,02%. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi 44,39%.

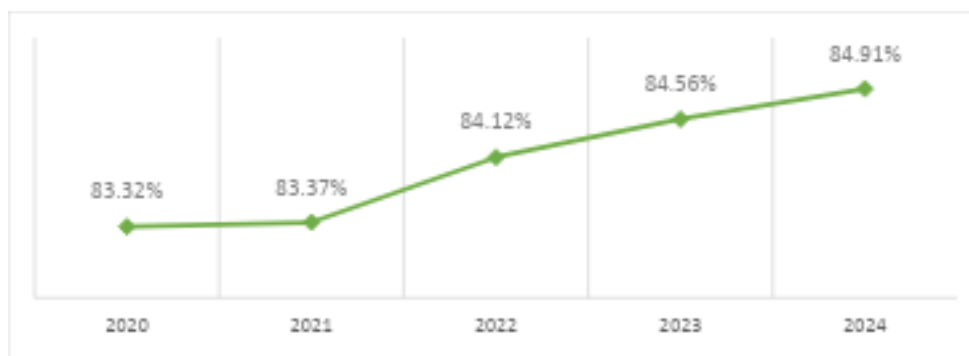
2.1.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.1.3.2.1 Tingkat Kemantapan Jalan

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat Kemantapan Jalan. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan dalam keadaan sedang berdasarkan pelaksanaan survey kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan Analisis Perhitungan *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga.

Gambar 2.46

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Kabupaten Cirebon Dalam Angka Tahun 2025, data diolah, yang dikelola dalam SIPD

Tingkat kemantapan jaringan jalan dalam kondisi baik dan sedang menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sebesar 83,32 persen menjadi 84,91 persen di tahun 2024. Peningkatan kemantapan jalan terjadi berkat adanya dukungan pendanaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pembiayaan pembangunan berangsur pulih sehingga capaian kemantapan jalan juga meningkat secara signifikan selama lima tahun terakhir.

2.1.3.2.2 Fasilitas Perlengkapan Jalan

Kabupaten Cirebon tidak memiliki terminal tipe C namun memiliki 3 sub terminal. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cirebon terbilang mencukupi untuk melayani aktivitas Masyarakat Kabupaten Cirebon

Tabel 2.24

Sarana Prasarana/ Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

Sarana Prasarana/Fasilitas	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terminal Tipe C	0	0	0	0	0
Jumlah Sub Terminal	3	3	3	0	
Jumlah Rambu Lalin	150	168	25	0	
Jumlah Traffic Light	0	0	0	0	0
Jumlah Warning Light	0	8	7	0	
Pembangunan Lampu PJU	4	633	1170	1525	
Pagar Pengaman Jalan	173	226	100	28	
Shelter	4	4	3	0	
Jumlah Trayek Layanan	48	48	48	0	

Sumber: Dinas Perhubungan Tahun 2023, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.3 Rasio Konektivitas Kabupaten

Rasio konektivitas kabupaten merupakan perbandingan layanan transportasi pada kawasan kabupaten terhadap jumlah total kawasan kabupaten. Rasio konektivitas kabupaten Cirebon tetap sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023 yaitu sebesar 63%.

Tabel 2.25
Rasio Konektivitas Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023

No	Indikator	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio konektivitas Kabupaten	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.4 Jaringan Irigasi

Jaringan irigasi adalah unit saluran dan struktur yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, administrasi dan penggunaan. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2001 tentang irigasi, pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan yang diperlukan mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan.

Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi, diperlukan inklusif dan merata, terutama di mana sumber daya air terbatas. Pada musim kekeringan, misalnya, banyak daerah pertanian tidak ditanami karena air diperlukan tidak cukup. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan air irigasi, perlu diterapkan langkah-langkah pengelolaan yang tepat didukung oleh teknologi dan perangkat hukum yang baik. Penggunaan sumber daya tenaga hidrolik disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit.

Tabel 2.26
Kondisi Saluran Irigasi Kabupaten Cirebon Tahun 2023

Saluran Irigasi	Panjang (meter)	
	Primer	Sekunder
Kondisi Baik	79.204,0	14.821,0
Belum Ada Senderan	10.271,0	4.531,5
Kondisi Rusak Ringan	35.769,0	4.774,0
Kondisi Rusak Berat	18.708,5	3.305,0

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.5 Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan dengan sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) serta RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga menjadi Akses Air Minum layak, Akses Sanitasi Layak dan Akses Penanganan Sampah di Perkotaan.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m² per orang; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

Tabel 2.27
Indikator Sektor Perumahan dan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

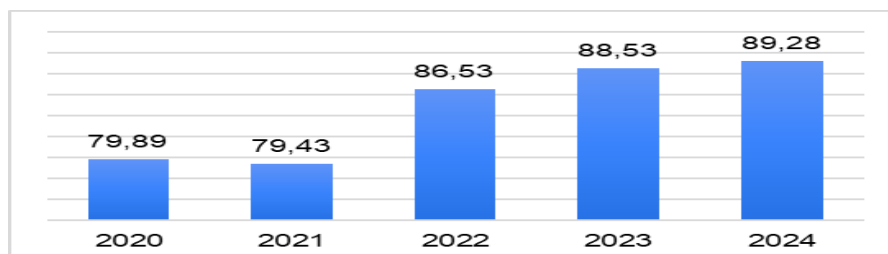
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,13%	98,34%	98,73%	99,74%	80,39%
2	Rumah Tangga Bersanitasi	74,9%	72,4%	76,6%	89,42%	89,62%
3	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	65,1%	76,3%	76,4%	94,89%	98,52%

Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.2.6 Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik)

Indeks pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen City Development Index (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Pada tahun 2023, indeks Pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Cirebon meningkat tinggi dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2023 sebesar 88,53 menjadi 89,28 di tahun 2024.

Gambar 2.47
Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Mantap (Baik)
Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.3 Daya Saing Iklim Investasi

2.1.3.3.1 Kemudahan Perizinan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang prima menjadi hal mutlak yang harus segera diwujudkan. Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dalam satu pintu dengan prinsip kepastian waktu, biaya, cepat, mudah, efisien dan transparan guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Tabel 2.28
Indikator Kemudahan Investasi di Kabupaten Cirebon

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perda Perizinan	1	-	-	1	-
2.	Lama proses perizinan	5	5	5	5	
3.	Penerbitan Perizinan	1.322	1.393	982	158	468
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	88,68	88,90	89,14	92,46	91,27
5.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	3	3	3	1	-
6.	Retribusi perizinan (jutaan)	3.763,88	2.382,23	14.837,76	13.863,30	-

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Perda perizinan Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 mengeluarkan dokumen perizinan dengan jumlah 9 dokumen serta pada tahun 2020 hanya mengeluarkan 1 dokumen saja. Lama proses perizinan dari tahun 2019-2022 selama 5 hari. Penerbitan perizinan pada tahun 2018

mendapat nilai sebesar 5.870 dan tahun 2022 menjadi 982 yang dimana penerbitan perizinan mengalami penurunan di Kabupaten Cirebon.

Untuk tingkat pelayanan perizinan di DPM-PTSP dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2018 mendapat nilai 81,30 dan tahun 2022 menjadi 89.14 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor.

2.1.3.3.2 Investasi di Kabupaten Cirebon

Tabel 2.29
Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah investor (Perusahaan)	237	383	2.300	28.866	51.304
2.	Nilai Investasi (Rp Milyar)	1.313,27	1.382,34	3.029,23	3.022,47	3.116,26
3.	Laju Investasi (%)	-22,97	5,26	119,14	102,15	96,20
4.	Nilai Investasi (Jutaan)	1.313.272	1.382.344	3.029.228	3.022.466	3.116.260
5.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)					
	Pertanian	30.513	15.049	58.190	39.844	27.379
	Pertambangan	-	-	-	1.201	955.400
	Industri Pengolahan	815.120	830.582	841.455	1.246.095	1.836.322
	Pengadaan Listrik dan Gas	4.150	9.640	1.909.897	933.747	5.638.527
	Pengadaan Air	300	-	-	60.005	23.111
	Bangunan/Konstruksi	10.942	8.564	21.998	56.418	79.931
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	231.302	42.123	67.762	209.277	294.898
	Transportasi dan Pergudangan	47.595	9.475	9.148	66.798	112.148
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.235	3.421	38.391	5.953	29.257
	Informasi dan Komunikasi	11.883	6.116	-	16.306	4.658

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Jasa Keuangan	3.784	-	-	24	36.000
	Real Estate	63.908	260.430	21.424	97.147	322.818
	Jasa Perusahaan	4.875	14.393	-	55.328	49.414
	Jasa Pendidikan	60.503	8.805	-	336	329.796
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17.985	169.894	-	223.146	275.771
	Jasa Lainnya	3.175	3.850	60.963	9.831	58.281

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

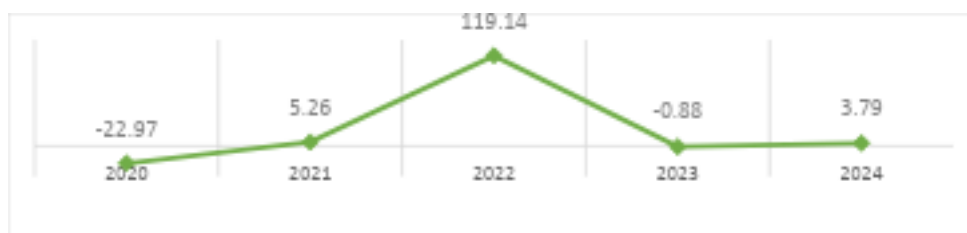
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sebanyak 237 investor dan terus mengalami kenaikan yaitu tahun 2023 sebanyak 28.866 investor dan tahun 2024 sebanyak 51.304 investor.

Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 1.313,27 Milyar, dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 menjadi Rp. 3.029,23 Milyar, namun sedikit mengalami penurunan pada 2023 menjadi Rp. 3.022,47 Miliar dan naik kembali menjadi Rp 3.116,26 pada 2024. Nilai investasi tahun 2020-2024 didominasi oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan rata-rata persentase investasi per tahunnya mencapai 45,14% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor Industri Pengolahan sebesar 29,59% dan diikuti oleh sektor Pertambangan sebesar 5,08%, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,49%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020-2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Gambar 2.48

Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



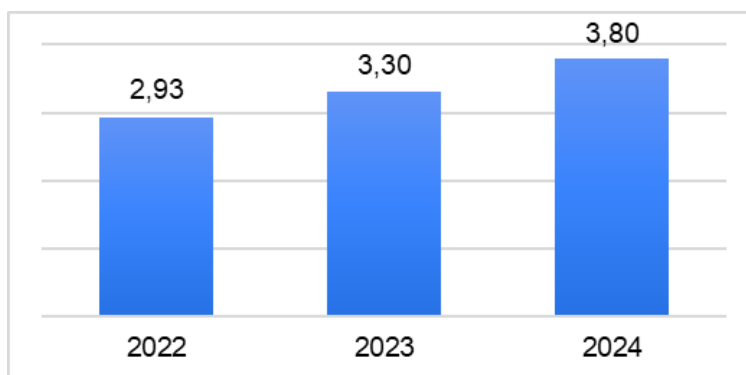
Sumber: Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2025, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.3.3.3 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat produktivitas dan daya saing suatu daerah. Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan dari 2,93 pada tahun 2022 menjadi 3,80 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur, inovasi, sumber daya manusia, serta kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Gambar 2.49

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan 2024



Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional Tahun 2024, data yang dikelola dalam SIPD

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu unsur penting dalam keberlangsungan tata Kelola yang baik di Kabupaten Cirebon. Aspek pelayanan umum difokuskan untuk melayani berbagai kepentingan publik yang dapat didekati melalui reformasi birokrasi, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan inovasi daerah.

Pertama, reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Tujuan lainnya dalam reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kedua, pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan memperkuat ikatan sosial antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pelayanan public adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.

Ketiga, sistem pemerintahan berbasis elektronik ditujukan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Keempat, inovasi daerah dinilai berdasarkan indeks inovasi daerah yang berlandaskan pada Pasal 373 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menetapkan bahwa “dalam rangka pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berprestasi”. Landasan hukum lain dalam mendukung pengukuran indeks inovasi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah dan Permendagri Nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah. Oleh karena itu, masing-masing bagian dalam pelayanan umum akan dijelaskan lebih lanjut pada narasi di bawah ini.

2.1.4.1. Reformasi Birokrasi

Aspek pelayanan umum merupakan salah satu fondasi utama dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Cirebon. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan umum menjadi salah satu prioritas utama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Dalam RPJPN 2025-2045, terdapat delapan (8) agenda pembangunan yang kemudian dijabarkan menjadi 17 arah pembangunan, salah satunya terkait pelayanan publik yakni “Mewujudkan Transformasi Tata Kelola” yang mencakup berbagai aspek pelayanan umum.

Reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik yang dicerminkan melalui nilai dan peringkat indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan gambar di bawah, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 hanya sebesar 56,18 dengan predikat CC dan pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon meningkat menjadi 81,14 dengan Kategori A- predikat **“Sangat Baik”** yang merupakan capaian terbaik selama rentang waktu 2020-2024.

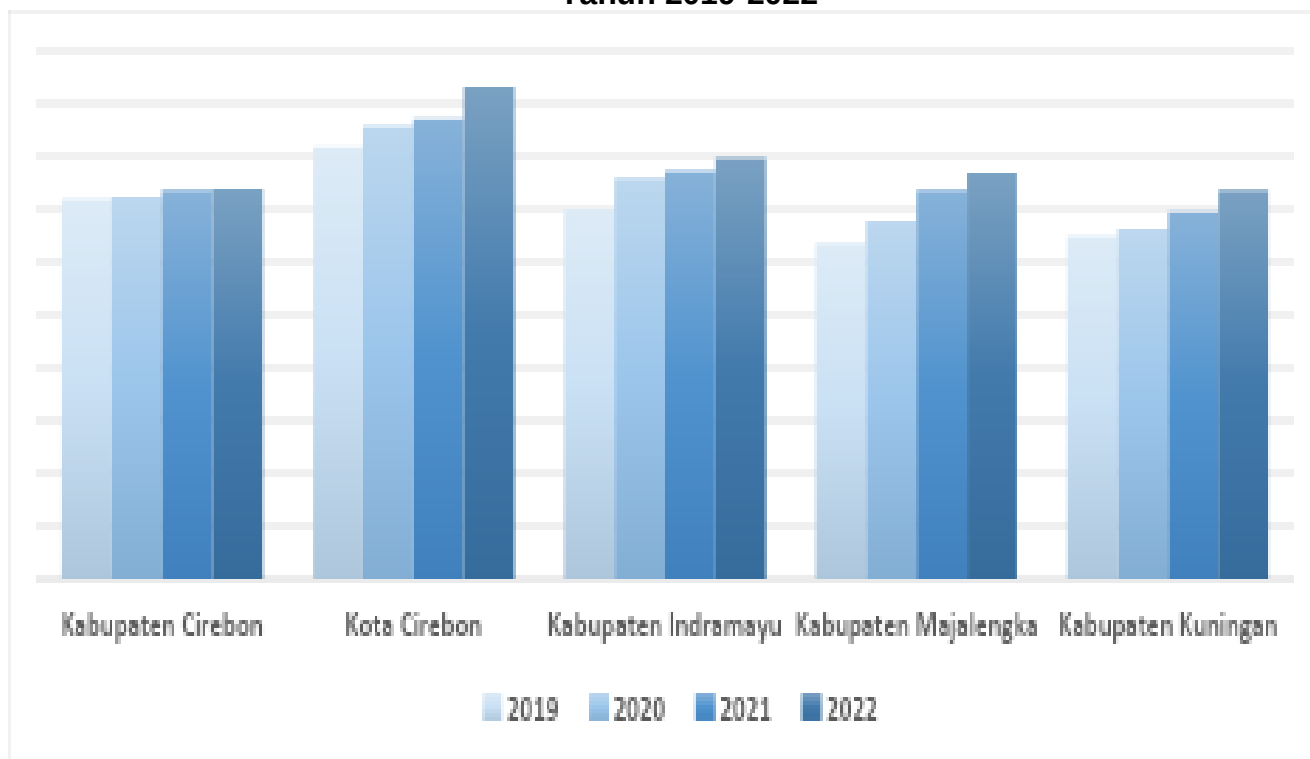
Gambar 2.50
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Indeks reformasi birokrasi yang semakin baik untuk Kabupaten Cirebon mengindikasikan bahwa Masyarakat telah secara langsung merasakan adanya manfaat dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan dapat terus berfokus pada efisiensi, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat yang salah satu upayanya dilakukan lewat transformasi berbasis digital agar dapat mempertahankan capaian indeks reformasi birokrasi.

Gambar 2.51
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2019-2022



Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Gambar 2.52

Capaian IRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2020-2023

PROGRES CAPAIAN IRB KAB/KOTA DI JABAR

NO	NAMA INSTANSI PEMERINTAH	CAPAIAN INDEKS RB PEMDA DI JAWA BARAT				
		2020	2021	2022	2023	PREDIKAT
1	KABUPATEN BANDUNG	64,33	63,25	63,32	83,67	A -
2	KOTA BANDUNG	71,75	72,66	75,18	83,58	A -
3	KOTA DEPOK	62,90	63,13	64,78	82,14	A -
4	KABUPATEN SUMEDANG	66,74	68,75	71,81	81,98	A -
5	KABUPATEN KARAWANG	62,20	60,16	63,36	81,50	A -
6	KOTA CIMAHI	59,22	60,01	62,96	81,26	A -
7	KOTA BOGOR	67,01	67,67	70,76	80,97	A -
8	KOTA BANJAR	55,93	57,07	58,76	80,74	A -
9	KOTA BEKASI	66,65	64,75	66,32	78,94	BB
10	KOTA TASIKMALAYA	57,58	60,04	61,70	78,14	BB
11	KABUPATEN SUKABUMI	61,11	62,45	63,00	78,08	BB
12	KABUPATEN BOGOR	67,03	67,97	67,76	78,02	BB
13	KABUPATEN CIAMIS	57,47	59,26	63,59	77,05	BB
14	KOTA SUKABUMI	68,25	67,91	71,05	74,78	BB
15	KABUPATEN PURWAKARTA	60,06	61,41	62,42	74,10	BB
16	KOTA CIREBON	62,84	63,53	66,57	73,91	BB
17	KABUPATEN PANGANDARAN	52,06	53,64	56,48	73,72	BB
18	KABUPATEN MAJALENGKA	53,88	56,84	58,46	73,52	BB
19	KABUPATEN BEKASI	59,66	58,33	59,83	72,96	BB
20	KABUPATEN BANDUNG BARAT	57,60	57,81	60,97	72,27	BB
21	KABUPATEN TASIKMALAYA	54,05	53,86	58,95	71,22	BB
22	KABUPATEN SUBANG	57,20	58,33	58,03	70,86	BB
23	KABUPATEN INDRAMAYU	57,99	58,70	59,84	68,73	B
24	KABUPATEN GARUT	66,25	66,65	68,89	68,50	B
25	KABUPATEN KUNINGAN	53,03	54,75	56,78	68,22	B
26	KABUPATEN CIREBON	56,18	56,81	56,95	67,83	B
27	KABUPATEN CIANJUR	59,65	60,25	62,39	64,86	B
RATA-RATA		60,69	61,33	63,36	75,61	

Sumber : Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi 2020-2023 dari Biro Organisasi Provinsi Jawa Barat, data yang dikelola dalam SIPD

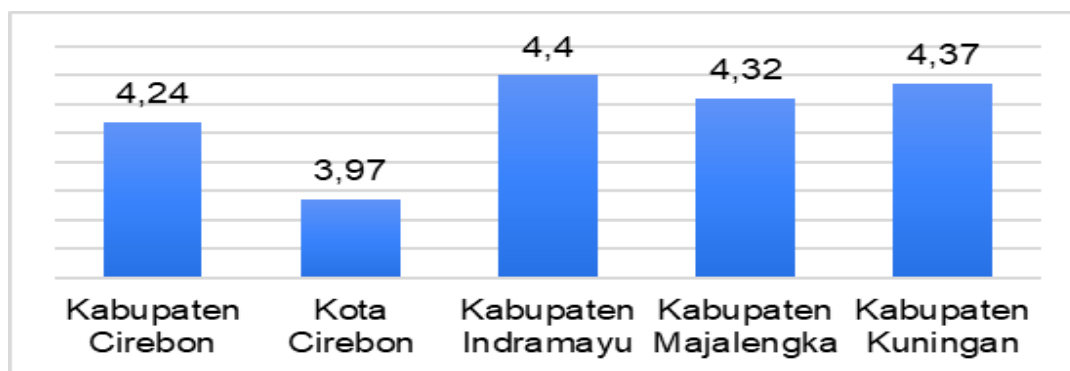
Apabila dibandingkan dengan kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat, maka indeks reformasi birokrasi Kabupaten Cirebon tahun 2021 (56,81) dan 2022 (56,95) relatif rendah dibandingkan dengan kota atau kabupaten lainnya yaitu peringkat terendah ketiga dari 27 Kabupaten/kota Di Jawa Barat. Pada tahun 2023 nilai indeks reformasi .birokrasi Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan menjadi 67,83 naik 11 poin. Namun dengan nilai tersebut, justru mengalami penurunan peringkat menjadi peringkat terendah kedua dari 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat. Hal yang membuat lemah adalah nilai indeks reformasi birokrasi tematik yang poinnya 5 dari total nilai 20. Hal ini menjadi permasalahan serius dan menjadi tantangan bagi

Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk lebih meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik dan general.

2.1.4.2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu aspek yang kerap kali menjadi perhatian bagi para pimpinan daerah. Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme sdm, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan).

Gambar 2.53
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya
Tahun 2024



Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

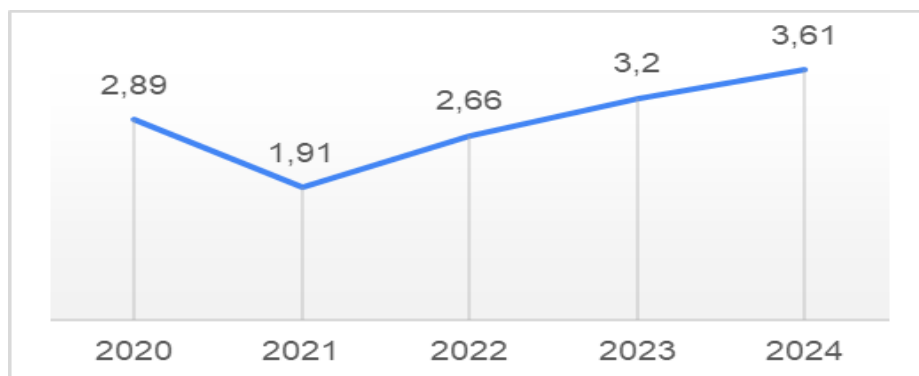
Indeks pelayanan publik Kabupaten Cirebon berada pada peringkat A- begitu pula dengan daerah di sekitar di Jawa Barat yang berdekatan dengan Kabupaten Cirebon juga memperoleh peringkat A- pada tahun 2024 kecuali Kota Cirebon yang memperoleh peringkat B berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 659 Tahun 2024 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada lingkup pemerintah daerah tahun 2024.

Pelayanan publik di Kabupaten Cirebon memerlukan penguatan pada seluruh aspek agar dapat menjadi lebih baik dan mendapatkan peringkat A. Penguatan yang dapat dilakukan berupa penguatan pelayanan publik dengan mengandalkan teknologi informasi. Hal tersebut diharapkan dapat menjadikan pelayanan publik semakin efisien dan efektif.

2.1.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan ke pengguna. Nilai SPBE Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 mengalami penurunan nilai sebesar 0,98 poin menjadi hanya 1,91 dengan predikat cukup. Nilai SPBE meningkat kembali pada tahun 2022, nilai SPBE meningkat menjadi 2,66 dengan predikat baik dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 3,61 dengan predikat **“Sangat Baik”**. Nilai SPBE yang semakin meningkat mencerminkan bahwa layanan pemerintah Kabupaten Cirebon telah banyak memanfaatkan teknologi digital dan big data sehingga sistem pemerintahan telah banyak yang terintegrasi. Hal inilah yang diharapkan dari adanya penilaian SPBE di setiap kementerian, lembaga dan pemerintah daerah.

Gambar 2.54
Indeks SPBE Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



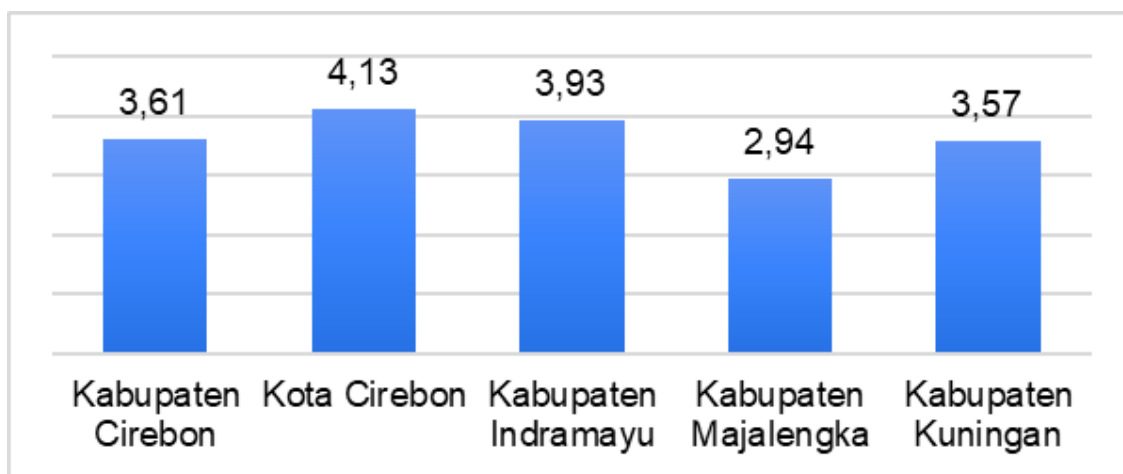
Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu memperoleh predikat sangat baik.

Daerah yang memiliki nilai SPBE cukup kecil perlu untuk mendorong transformasi digital agar tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Dampak yang dapat timbul apabila SPBE kurang

diterapkan adalah pengambilan keputusan oleh stakeholder menjadi kurang akurat, tidak adanya kesinambungan antara instansi pusat dan daerah, kualitas layanan publik yang kurang serta timbulnya kesenjangan karena minimnya perhatian akan pentingnya SPBE. Untuk meningkatkan nilai SPBE, maka dapat dilakukan dengan mewujudkan tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien, mewujudkan layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna, penyelenggaraan infrastruktur SPBE yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia SPBE.

Gambar 2.55
Indeks SPBE Kabupaten Cirebon dan Daerah Sekitarnya Tahun 2024



Sumber: Kemenpan-RB 2024, data yang dikelola dalam SIPD

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon tahun 2024 mencapai 3,61, menempatkannya di posisi ketiga dibandingkan daerah sekitarnya. Kota Cirebon mencatat nilai tertinggi sebesar 4,13, diikuti Kabupaten Indramayu dengan 3,93. Sementara itu, Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 3,57, sedikit di bawah Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka mencatat nilai terendah, yaitu 2,94. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Cirebon cukup baik, meskipun masih tertinggal dari Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu. Perlu adanya penguatan lebih lanjut dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar Kabupaten Cirebon mampu bersaing dan mencapai indeks yang lebih tinggi.

2.1.4.4. Layanan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Dalam kerangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyelenggarakan berbagai pelayanan umum yang meliputi layanan urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Untuk mengukur capaian tingkat pelayanan tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan indikator-indikator sesuai dengan bidang pelayanan yang diselenggarakan.

A. Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban kearah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Selanjutnya untuk melihat kinerja pada bidang pendidikan di Kabupaten Cirebon, berikut disajikan capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dan sumber lainnya.

Tabel 2.30
Capaian Bidang Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Pendidikan								
	Pendidikan Anak Usia Dini								
	- APK PAUD	%	49,39	65,80	42,03	30,4	52,71	56,18	37,13
	Angka Partisipasi Kasar SD/SMP/SMA								
	- APK SD/MI	%	120,90	116,52	104,64	103,99	103,58	104,31	102,15
	- APK SMP/MTs	%	114,41	122,27	88,04	97,78	93,52	94,87	91,00
	- APK SMA/K	%	112,45	95,86	82,30	80,78	83,13	82,02	84,98
	Angka Partisipasi								

NO .	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Murni SD/SMP/SMA								
	- APM SD/MI	%	106,52	103,32	95,84	95,80	96,59	97,08	97,75
	- APM SMP/MTs	%	95,54	97,88	79,71	81,44	80,81	83,08	83,77
	- APM SMA/K	%	86,40	66,95	59,30	60,31	60,40	60,62	62,69
	Angka Kelulusan								
	- Angka Lulusan SD/MI sederajat	%	95,8	97,47	98,96	99,30	100	110,8	106,90
	- Angka Lulusan SMP sederajat	%	82,06	81,04	95,53	98,20	99,23	96,72	94,57
	Angka Melanjutkan								
	- Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	109,35	110,66	82,99	113,32	106,52	100,73	96,07
	- Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	108,99	118,20	117,07	99,17	97,83	89,19	93,45
	Fasilitas Pendidikan								
	- Ruang Kelas Baik SD/MI	%	65,82	64,60	59,27	64,58	62,46	62,30	67,44
	- Ruang Kelas Baik SMP/MTs	%	79,38	80,36	75,54	70,79	76,36	74,48	76,09
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan								
	- SD	Siswa/ Guru	21	20	21	21	21	22	21
	- SMP	Siswa/ Guru	18	15	15	16	16	16	18
	- SMA	Siswa/ Guru	15	14	14	15	15	16	18
	- SMK	Siswa/ Guru	14	15	15	15	15	15	19
	Angka Melek Huruf penduduk usia 15 - 24 tahun	%	98,97	99,73	99,87	100	99,82	99,94	100

Sumber: 1. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- a. APK PAUD tahun 2018-2024 mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 49,39% naik menjadi 65,80% di tahun 2019. Pandemi Covid-19 ikut mendorong penurunan angka APK PAUD menjadi 42,03% tahun 2020 dan turun lagi menjadi 30,4% tahun 2021. Penurunan ini lebih disebabkan karena adanya pembatasan mobilitas orang melalui PPKM level 4 sampai dengan level 2. Alasan ini berlaku umum untuk seluruh aspek partisipasi pendidikan. Memasuki kondisi new normal di tahun 2022, APK PAUD di tahun 2022 mulai mengalami kenaikan menjadi 52,71%. Pada tahun 2023 meningkat menjadi 56,18% dan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 37,13%.
- b. Angka APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/K mengalami tren penurunan dalam 6 tahun terakhir sejak 2018 sampai 2024. APK SD/MI dari 120,90% di tahun 2018 menjadi 102,15% di tahun 2024. APK SMP/MTs dari 114,41% di tahun 2018 menjadi 91,00% di tahun 2024 dan APK SMA/K dari 112,45% di tahun 2018 menjadi 84,98% di tahun 2024.
- c. Angka APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK mengalami tren penurunan dalam 7 tahun terakhir sejak 2018 sampai 2024. APM SD/MI dari 106,52% menjadi 97,75% di tahun 2024. APM SMP/MTs turun dari 95,54% menjadi 83,77% pada tahun 2024. APM SMA/K turun dari tahun 2018, yakni 86,40% menjadi 62,69% pada tahun 2024.
- d. Angka kelulusan SD cenderung naik bila dibandingkan antara tahun 2018 sebesar 95,8% dan tahun 2024 sebesar 106,90%. Kecenderungan naik ini juga terjadi pada tingkatan SMP. Masing-masing diangka 82,06% tahun 2018 menjadi 94,57% tahun 2024 untuk tingkat SMP.
- e. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2018-2024 semula mengalami penurunan sampai dengan tahun 2024, dari 109,35% pada tahun 2018 turun menjadi 96,07% pada tahun 2024. Untuk Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA yang mulanya naik dari 108,99% tahun 2018 menjadi 117,07% tahun 2020 kemudian turun menjadi 99,17% tahun 2021 dan kembali turun menjadi 93,45% tahun 2024.
- f. Fasilitas ruang kelas Baik SD/MI dan SMP/MTs pada tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi perubahan presentase, walaupun perubahannya tidak terlalu signifikan.
- g. Rasio guru/murid pada semua tingkatan pendidikan secara statistik relatif ideal.
- h. Angka Melek Huruf untuk penduduk usia 15 - 24 tahun selama kurun waktu tahun 2018

sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif, tahun 2018 sebesar 98,97% dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 sebesar 100%, namun tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 99,82%. Pada tahun 2023 dan 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 99,94% dan 100%.

Selain itu, sebagai modal dasar pelaksanaan pendidikan yang berkualitas, tentu saja harus diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang bermutu dan berkualitas, minimal sesuai standar nasional. Berikut sarana penunjang utama pendidikan, yakni jumlah guru, sekolah beserta murid pada setiap tingkatan di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.31
Jumlah Sekolah, Murid dan Guru Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Murid		Jumlah Guru	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sekolah Dasar (SD)	745	80	188.193	13.708	9.023	890
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	80	141	58.842	23.829	3.129	1.574
Sekolah Menengah Atas (SMA)	23	30	22.186	5.666	1.215	335
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	8	101	11.932	37.875	660	2.033

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pendidikan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020-2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.32

Kinerja Urusan Bidang Pendidikan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,28%	43,19%	62,68%	56,18%	81,0457%
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	98,90%	85,36%	96,90%	93,3293%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100%	105,86%	74,55%	95,01%	97,1571%
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,51%	18,27%	30,98%	30,98%	63,8936%

Sumber: Laporan LPPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2020 - 2024

2. Kesehatan

Peningkatan kesehatan masyarakat menjadi salah satu tujuan pokok pemerintah daerah dalam kerangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat jasmani dan rohani. Kabupaten Cirebon memiliki dua rumah sakit umum daerah, yakni Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled. Setiap kecamatan di Kabupaten Cirebon juga telah memiliki puskesmas induk yang merupakan fasilitas kesehatan utama yang berada di pusat kecamatan. Selain itu, unit pembantu pengembangan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) juga telah tersedia di setiap kecamatan. Adapun Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit) Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Cirebon (Unit),
Tahun 2018-2024

Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	11	11	12	12	12	12	13
Rumah Sakit Bersalin	0	0	0	0	0	0	0
Poliklinik	67	83	98	112	110	89	111
Puskesmas	60	60	60	60	60	60	60
Puskesmas Pembantu	71	71	69	69	71	69	69
Apotek	188	240	273	273	284	333	333

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025

Dari fasilitas kesehatan yang tersedia di atas, dalam satu bulan di tahun 2024 telah melakukan pelayanan kesehatan baik itu dalam perawatan jalan maupun inap sebagaimana tercermin pada data presentase berikut.

Tabel 2.34
Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2019-2024

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	32,72	29,11	35,71	23,23	35,12
Perempuan	39,36	32,59	42,44	29,82	44,63
Jumlah	35,95	30,80	39,02	26,44	39,75

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2019-2024, penduduk Kabupaten Cirebon yang mengalami keluhan kesehatan cenderung fluktuatif, yakni terjadi penurunan dari 35,95% di tahun 2020 menjadi 30,80% pada tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali menjadi 39,02%. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi 26,44% dan terjadi peningkatan kembali menjadi 39,75% pada tahun 2024.

Lebih lanjut untuk Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Capaian Bidang Kesehatan Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	2,97	2,62	2,82	2,24	1,73	6,45	6,73
2.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 kelahiran hidup	3,18	2,8	2,9	2,6	0,02	0,02	0,05
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Per 100.000 kelahiran hidup	73,26	70,23	84,16	112,21	67,03	80,36	94,60
4.	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 balita	13,50	15,3	14,4	14,4	14,30	14,81	17,47
5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,09	0,084	0,097	0,097	0,097	0,09	0,10
6.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,005	0,004	0,01	0,0052	0,0050	0,49	0,52
7.	Rasio dokter per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,261	0,151	0,151	4,5	0,278	0,44	0,59
8.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,261	0,151	0,151	0,358	0,363	0,44	0,59
9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	139,8	135,0	158,6	137,3	132,9	154,5	169,1
10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	101	95,5	98,6	97,2	93,3	97,30	92,70
11.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	83,49	87,03	87,03	66,3	67,69	80,4	80,19
12.	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100
13.	Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	97,12	97,12	88,27	92,1	106,3	96,5	95,72
14.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	3,6	3,6	0,36	1,7	5,3	8,30	9,90

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
15.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	108,7	90	92	52,62	64,74	68,8	64,16
16.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)	%	100	106	65	54,60	46,2	100,12	100,00
17.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	1,6	4,75	4,74	4,01	1,29	2,2	7,7
18.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	106	65	100	100	100	103,01
19.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	82	84	83	86,40	91,0	90	54,50
20.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	91,60	90,16	86,82	49,10	84,96	82,97	91,43
21.	Penderita diare yang ditangani	%	75,46	66,7	52,1	51,60	95,25	71,49	98,21
22.	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,01	0,23	0,99	0,00	0,13	0	0,0001
23.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,01	0,42	0,43	0,64	0,60	0,0154	0,0186
24.	Cakupan kunjungan bayi	%	102,04	100	101,9	101,86	107,1	103,9	100,00
25.	Cakupan puskesmas	%	150	150	150	150	150	150	150
26.	Cakupan puskesmas pembantu	%	16,75	16,75	16,75	16,27	16,27	2,83	2,77
27.	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	100,41	96,8	98,2	96,6	95,5	110,4	96,20
28.	Cakupan pelayanan nifas	%	47,04	95,5	99	96,7	92,5	121,4	93,70
29.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	40,17	112,7	100,8	105,52	120,78	74,4	97,56
30.	Cakupan pelayanan anak balita	%	49,25	100,8	87,19	84,48	101,6	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
31.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	95,99	93,75	80,35	100	100	100	100
32.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa:

- 1) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup dari tahun 2018 – 2024 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 mencapai 2,97 dan pada tahun 2024 naik menjadi 6,73;
- 2) Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2018-2024 mengalami penurunan, pada tahun 2018 mencapai 3,18, dan pada tahun 2024 turun menjadi 0,05;
- 3) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2018-2024 mengalami kecenderungan fluktuatif, pada tahun 2018 mencapai 73,26 dan mengalami kenaikan tahun 2021 mencapai 112,21. Kenaikan di tahun 2020 sebesar 84,16 dan tahun 2021 sebesar 112,21 sangat dipengaruhi pandemic Covid-19, karena tingkat Kesehatan ibu hamil dan melahirkan menjadi rentan terhadap penularan Covid-19 akibatnya resiko kematian menjadi lebih tinggi. Walaupun demikian, di tahun 2022 mengalami penurunan mencapai 67,03 dikarenakan pandemic Covid-19 telah memasuki new normal dan tingkat resiko kematian menjadi lebih rendah. Akan tetapi pada tahun 2023 dan 2024 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan menjadi 80,36 dan 94,60.
- 4) Rasio Posyandu per satuan balita dari 2018-2024 mengalami kenaikan dari 13,50 menjadi 17,47 per 1000 balita;
- 5) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk dari 2018-2024 cenderung stagnan di angka 0,097 per 1000 penduduk;
- 6) Rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2018-2024 mengalami peningkatan, pada tahun 2018 mencapai 0,005 dan pada tahun 2024 naik menjadi 0,52;
- 7) Rasio dokter per satuan penduduk mengalami kenaikan dari 0,261 pada tahun 2018

menjadi 0,59 per 1000 penduduk di tahun 2024;

- 8) Rasio tenaga medis per satuan penduduk mengalami kenaikan dari 0,261 pada tahun 2018 menjadi 0,59 per 1000 penduduk di tahun 2024;
- 9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2018-2024 dari 139,8% menjadi 169,1%;
- 10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan mengalami penurunan dari 101% pada tahun 2018 menjadi 92,70% di tahun 2024;
- 11) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi, dari 83,49% di tahun 2018 menjadi 80,19% pada tahun 2024;
- 12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan stabil dalam angka 100%;
- 13) Presentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 sebesar 97,12% dan pada tahun 2024 turun menjadi 95,72%;
- 14) Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk mengalami fluktuasi dan cenderung naik, dimana pada tahun 2018 mencapai 3,60 namun pada tahun 2024 naik menjadi 9,90;
- 15) Cakupan balita pneumonia yang ditangani mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 mencapai 108,7% dan pada tahun 2024 turun menjadi 64,16%;
- 16) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 mencapai 100%, naik menjadi 106% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 turun menjadi 65% dan kembali turun menjadi 46,2% pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 100% pada tahun 2024;
- 17) Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) mengalami peningkatan, pada tahun 2018 mencapai 1,6 menjadi 7,7 per 100.000 penduduk di tahun 2024;
- 18) Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS cenderung stagnan di angka 100%.
- 19) Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS mengalami penurunan dari 82% di tahun 2018 menjadi 54,50% di tahun 2024;
- 20) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD mengalami penurunan dari 91,60% di tahun 2018 menjadi 91,43% di tahun 2024;
- 21) Penderita diare yang ditangani mengalami kenaikan dari 75,46% di tahun 2018 menjadi

98,21% di tahun 2024;

- 22) Angka kejadian Malaria turun dari 0,01 menjadi 0,0001 per 100.000 penduduk;
- 23) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi naik, dari 0,01% menjadi 0,0186% di tahun 2024;
- 24) Cakupan kunjungan bayi dari tahun 2018-2024 mengalami penurunan, dari 102,04% menjadi 100,00%;
- 25) Cakupan puskesmas pada tahun 2018-2024 masih sama yaitu 150%;
- 26) Cakupan puskesmas pembantu pada tahun 2018-2024 mengalami penurunan dari 16,75% menjadi 2,77%;
- 27) Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dari 100,41% pada tahun 2018 menjadi 96,20% di tahun 2024;
- 28) Cakupan pelayanan nifas mengalami kenaikan dari 47,04% di tahun 2018 menjadi 93,70 % di tahun 2024;
- 29) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dari 40,17% menjadi 97,56%;
- 30) Cakupan pelayanan anak balita mengalami kenaikan, dari 49,25% pada tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2024;
- 31) Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat mengalami kenaikan, dari 95,99% pada tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2024;
- 32) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam stabil diangka 100%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.36

**Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2020 s.d. 2024**

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,11%	0,09%	0,10%	0,11%	0,10%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	91,67%	66,67%	66,67%	100,00%	100,00%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	98,24%	96,59%	95,54 %	98,18 %	95,99%
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,65%	96,57%	93,21 %	97,24 %	92,70%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,03%	92,60%	93,45 %	96,79 %	95,76%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,19%	84,48%	99,61 %	100,00 %	100,00 %
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	71,43%	82,30%	97,33 %	98,66 %	93,80%
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	14,60%	19,44%	87,05 %	58,78 %	58,01%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	72,42%	73,31%	81,33 %	81,34 %	92,75%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	27,08%	11,29%	70,02 %	90,31 %	100,00%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	78,94%	83,94%	91,19 %	95,20 %	100,00%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	43,48%	59,20%	91,30 %	91,42 %	100,00%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar					
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32,17%	36,64%	93,54 %	99,15 %	77,38%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	62,31%	62,13%	89,88 %	92,35%	99,49%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, 2024

Berdasarkan data tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Capaian rasio daya tampung rumah sakit rujukan selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung stagnan yaitu sebesar 0,1%;
- Capaian persentase Rumah Sakit Rujukan tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan dari 91,67% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2024.
- Capaian persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya menurun dari tahun 2020 capaiannya 98,24% menjadi 95,99% pada tahun 2024;
- Capaian persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya menurun dari tahun 2020 capaiannya 98,65% menjadi 92,70% pada tahun 2024. Hal ini bisa terjadi kemungkinan ada ibu bersalin yang mendapat persalinan ke klinik swasta atau rumah sakit swasta dan tidak ada tembusan laporan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan sehingga belum tercatat.
- Capaian persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya menurun dari tahun 2020 capaiannya 98,03% menjadi 95,76% pada tahun 2024. Hal ini bisa terjadi kemungkinan ada bayi baru lahir yang mendapat pelayanan neonatal esensial ke klinik swasta atau rumah sakit swasta dan tidak ada tembusan laporan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan, sehingga belum tercatat.

- f. Capaian cakupan pelayanan kesehatan bagi balita yang sesuai standar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya meningkat dari tahun 2020 capaiannya 87,19% menjadi 100% pada tahun 2024;
- g. Capaian persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 capaiannya 71,43% menjadi 93,80% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ada koordinasi yang baik antara Dinas pendidikan atau kepala sekolah SD dan SMP dengan Dinas kesehatan atau Puskesmas terkait pemeriksaan kesehatan bagi anak sekolah.
- h. Capaian persentase penduduk usia produktif usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 capaiannya 14,60% naik menjadi 58,01% pada tahun 2024. Hal ini antara lain karena pada tahun 2020 dan 2021 masih terjadi pandemi kasus Covid 19 atau ada PPKM skala 3, atau 2 sehingga pelaksanaan skrining kesehatan tidak optimal.
- i. Capaian kinerja pelayanan bagi lansia, penderita hipertensi, penderita TBC, diabetes melitus, ODGJ berat, HIV AIDS dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 progres capaiannya rata rata meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Hal ini antara lain karena pada tahun 2020 dan 2021 masih terjadi pandemi kasus Covid 19 dengan PPKM skala 3 atau 2 sehingga pelaksanaan skrining kesehatan tidak optimal.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Keberadaan sarana penghubung di Kabupaten Cirebon relatif cukup baik dilihat dari kondisi jalan Kabupaten, jalan Provinsi maupun jalan Negara. Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018 sampai 2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 pemeliharaan jalan mengalami sedikit kendala akibat adanya Covid 19 sehingga terjadi refocussing anggaran yang salah satunya berakibat berkurangnya anggaran pemeliharaan jalan. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Cirebon kembali berupaya meningkatkan kembali jalan dengan kondisi baik yang sempat terbengkalai akibat *refocussing* anggaran pada tahun sebelumnya.

Adapun Panjang Jalan Kabupaten (km) di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2024 disajikan lengkap pada tabel berikut ini:

Tabel 2.37
Panjang Jalan Kabupaten (km) Berdasarkan Kondisi Tahun 2018-2024

Uraian	Satuan	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kondisi Baik	Km	568,51	679,68	694,21	645,68	690,96	710,06	758,68
Kondisi Sedang	Km	441,12	337,62	339,18	392,8	352,34	338,78	294,42
Kondisi Rusak Ringan/Sedang	Km	152,37	121,72	137,51	99,37	96,14	99,12	91,32
Kondisi Rusak Berat	Km	78,3	101,28	69,4	102,45	100,86	92,35	95,88
Jumlah	Km	1.240,30	1.240,30	1.240,30	1.240,30	1.240,30	1.240,30	1.240,30

Sumber: 1. Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

2. Kabupaten Cirebon dalam angka, BPS, 2025

Lebih lanjut mengenai Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.38
Indikator Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2024

NO.	INDIKATOR DAERAH	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Proporsi jaringan jalan kondisi baik	Persen	45,84	54,80	55,97	52,06	55,71	57,25	61,17
2.	Presentase jalan drainase/saluran pembuangan air	Persen	3,03	3,55	3,70	4,08	4,21	5,98	6,19
3.	Presentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Persen	62,22	71,08	72,54	72,15	72,74	73,91	71,60
4.	Persentase Rasio jaringan irigasi antara ketersediaan terhadap kebutuhan	Persen	16,84	17,44	17,44	71,35	77,81	77,81	77,81
5.	Presentase Jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 meter)	Persen	0,66	0,85	0,87	0,92	0,95	1,11	1,11

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Proporsi panjang jaringan jalan kondisi baik mengalami kenaikan pada tahun 2018-2020 dari 45,84% menjadi 55,97% dan turun menjadi 52,06% pada tahun 2021, kemudian naik kembali dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 menjadi 61,17%;
- 2) Persentase jalan drainase/saluran pembuangan air dari 2018-2024 juga mengalami kenaikan, dari 3,03% menjadi 6,19%;
- 3) Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami kenaikan dari 62,22% di tahun 2018 menjadi 71,60% di tahun 2024;
- 4) Persentase Rasio jaringan irigasi antara ketersediaan terhadap kebutuhan pada tahun 2018-2024 mengalami kenaikan dari 16,84% menjadi 77,81%;
- 5) Persentase jalan yang memiliki trotoar (minimal 1,5 m) sedikit meningkat jumlahnya walau masih sangat rendah, dari 0,66% tahun 2018 menjadi 1,11% di tahun 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.39

Kinerja Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2023

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang (mantap)	82,02%	83,32%	83,73%	84,12%	84,56%	84,91%
2.	Presentase Panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/ direkontruksi/ditingkatkan	29,21%	4,93%	20,70%	5,26%	5,39%	9,02%
3.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian	100,00 %	4,72%	6,77%	100%	100%	100%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	banjir di WS Kewenangan Kab/Kota						
4.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100,00 %	0,00%	6,77%	0,00%	0,00%	0,00%
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	67,87%	65,07%	70,79%	94,68%	92,96%	92,31%
6.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,24%	74,86%	79,60%	89,22%	89,42%	89,62%
7.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20,00%	20,00%	22,31%	37,69%	83,92%	77,52%
8.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Rasio luas irigasi kewenangan Kabupaten yang dilayani / ditangani oleh jaringan irigasi.	9,96%	72,15%	63,18%	33,11%	19,94%	21,44%

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Cirebon, Tahun 2024

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni dari tahun 2019-2024 mengalami Peningkatan, dimana pada tahun 2019 mencapai 97,96% meningkat menjadi 99,96 % di tahun 2024. Adapun data Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.40
Realisasi Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2019-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	97,96	98,13	98,34	98,73	99,74	99,96

Sumber: DPKPP Kabupaten Cirebon, 2019-2024

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.41
Kinerja Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

No.	IKK	Capaian Kinerja					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	0%	0%	0%	0%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program	100%	0%	0%	0%	0%	0%

No.	IKK	Capaian Kinerja					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Pemerintah Kabupaten						
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	94,09%	5,91%	12,03%	49,98%	13,13%	31,1401%
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni)	2,04%	1,87%	1,66%	1,27%	0,26%	0,0351%
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	11,13%	7,35%	0,63%	1,69%	8,83%	1,5590%

Sumber: DPKPP Kabupaten Cirebon, 2024

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, capaian Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon dari tahun 2018-2024 stabil sebesar 100% per tahun. Begitu pula Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) sebesar 100% selama 5 tahun. Adapun secara keseluruhan capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Capaian Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat								
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/Cirebon	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah wilayah manajemen kebakaran (WMK) minimal 15 menit	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	%	n.a	68,44	85,64	76,27	65,50	65,33	76,19
5.	Prosentase Penegakan Perda	%	10,79	10,79	10,79	11,43	100	64,86	80,16

Sumber: Disdamkarmat, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2024

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.43

Kinerja Urusan Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	68,44%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	10,79%	10,79%	11,43%	100%	100%	100%
3.	Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	300	102.405	82.519	1.050	2.464	100%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Jumlah Warga yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	207.04 5	84.147	82.519	1.050	2.464	0,1995%
5.	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	194.49 2	84.147	82.519	76.771	134.687	100%
6.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	86,36%	89,45%	88,57%	89,94%	92,62%
7.	Persentase kebakaran yang tertangani dengan rata-rata waktu tanggap (response time rate) 15 menit	97,08%	98%	98,40%	100%	100%	100%
8.	Jumlah personil Satpol PP berkualitas PPNS	5	5	5	4	2	2

Sumber: 1. Disdamkarmat, Satpol PP dan BPBD Kabupaten Cirebon, Tahun 2024
2. Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

6. Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Adapun Capaian Bidang Sosial Tahun 2018-2024 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.44
Capaian Bidang Sosial Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6	Sosial								
1.	Prosentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	48,96	67,06	28	97,18	92,35	100	100
2.	Prosentase PPKS yang tertangani	%	48,96	67,06	100	98,46	100	100	100
3.	Prosentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar	%	28,02	18,59	80	83,90	100	100	100
4.	Prosentase Panti Sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	%	8,61	2,53	80	100	100	0	0
5.	Prosentase Panti Sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100	100	80	100	100	100	100
6.	Prosentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	94,32	62,47	100	100
7.	Prosentase korban bencana yang di evakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial selama kurun waktu tahun 2018-2024 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2018 mencapai 48,96% dan naik menjadi 100% di tahun 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Sosial dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.45
Kinerja Urusan Bidang Sosial Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2020-2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	5,27%	5,51%	94,95%	100%	100%
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	11,51%	8,82%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

7. Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2024 disajikan secara lengkap sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.46
Capaian Bidang Tenaga Kerja Tahun 2018-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7	Ketenagakerjaan								
1.	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja pertahun	Kasus	26	19	17	13	24	34	21
2.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi	%	82	61,1 4	66,6 6	65,17	73,11	65,38 %	85,57
3.	Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis kewirausahaan	%	78	76,6 6	12,7 3	13,33	12	34,62 %	14,43
4.	Besaran Pencari Kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	n.a	47,9 6	31,4 3	37,86	52,84	70,28 %	89,73
5.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	n.a	52,7 8	47,2 2	65	27,78	79,41 %	58,33
6.	Kepesertaan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	%	55	59,3 5	67,6 9	76,89	44,18	55,62 %	-

Sumber: Disnaker Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Tenaga Kerja dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.47

Kinerja Urusan Bidang Tenaga Kerja Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	26,32%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0%	81,08%	65,17%	1,77%	37,69%	67,74
3.	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja (PDRB ADHK per tenaga kerja)	35.235,89 (000 rupiah/org)	35.497,17 (000 rupiah/org)	35.173,51 (000 rupiah/org)	34.813,21 (000 rupiah/org)	33.826,88 (000 rupiah/org)	33.827 (000 rupiah/org)
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP / PKB,LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	6,70%	100%	100%	43,66%	1,84%	2,59
5.	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	47,96%	31,44%	25,55%	72,52%	72,28%	89,73

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	52,78%	47,22%	33,33%	85,71%	79,41%	58,33
7.	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	62,50%	88,89%	94,44%	85,71%	40%	67,74
8.	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja yang memiliki perizinan	95,61%	100%	100%	100%	100%	58,16

Sumber: 1. Disnaker Kabupaten Cirebon, Tahun 2024
2. LPPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Guna mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Lebih lanjut indikator pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.48

Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja Langsung APBD	0%	0%	0,072%	0,40%	13,13%
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait Kabupaten	0,01%	0,01%	0,01%	100%	100%
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak pidana perdagangan orang/manusia) per 100.000 Penduduk Perempuan	0,66	0,60	0,09	0,0075	3,61
4.	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Partisipasi angkatan kerja Perempuan	46,77%	48,48%	48,20%	47,86%	40,04%

Sumber :1. DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, 2024.

2. Kabupaten Cirebon dalam Angka, BPS, 2025

9. Pangan

Ketahanan pangan merupakan kondisi di mana suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan menyeluruh. Kabupaten Cirebon telah mampu mengeluarkan Produk Domestik Regional Bruto demi mencukupi kebutuhan pangan di daerahnya. Beberapa sektor untuk memenuhi kebutuhan pangan meliputi produk tanaman pangan berupa padi dan palawija, tanaman hortikultura musiman dan tahunan berupa sayur dan buah-buahan, peternakan berupa unggas, sapi, kambing, babi dan lain-lain, serta sektor perikanan dimana sebagian wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan daerah pesisir pantai.

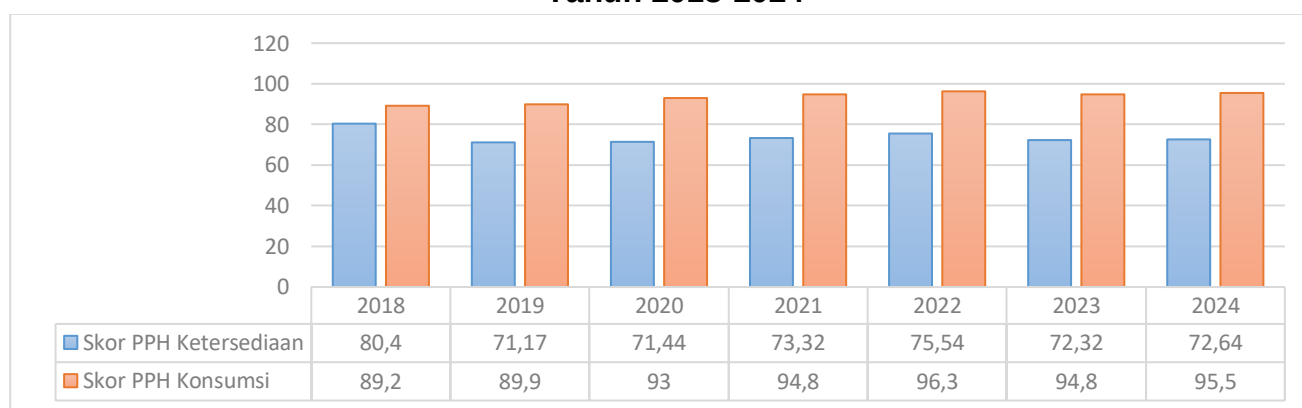
a. Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi

Skor PPH ketersediaan selama kurun waktu tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi. Selama periode 2018-2022 cenderung stagnan, pada tahun 2018 di angka 80,5%, selanjutnya

mengalami penurunan di tahun 2019 sebesar 71,17%, dan kembali naik di kurun 2020 – 2022, yaitu di tahun 2020 sebesar 71,44% naik menjadi 75,54% di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 72,32% dan naik kembali menjadi 72,64% di tahun 2024.

Untuk Skor PPH Konsumsi pada tahun 2018-2024 nilainya cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 89,2% dan pada tahun 2024 naik menjadi 95,5%. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.56
Skor PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2024



Sumber: DKPP Kab.Cirebon, Tahun 2024

Lebih lanjut Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2018-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.49
Capaian Indikator Urusan Pangan Tahun 2018-2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.9	Ketahanan Pangan								
1.	Skor PPH ketersediaan	%	80,4	71,17	71,44	73,32	75,54	72,32	72,64
2.	Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi	Desa	6	7	0	8	7	13	1
3.	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)	Ton	86	90,719	267,36	143,13	0	0	17,266

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV)	Koefisien	9,75	4	2,80	1	1	1	0,15
5.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan	Buah	-	1	-	-	-	-	1
6.	Skor PPH Konsumsi	%	89,2	89,9	93,0	94,8	96,3	94,8	95,5
7.	Tingkat Keamanan Pangan	%	92	67	88	96,20	97,45	96,80	100

Sumber: DKPP Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Jumlah Desa Rawan Pangan yang diintervensi mengalami penurunan dari 2018 -2024 dari sebanyak 6 Desa di tahun 2018 menjadi 1 desa di tahun 2024;
- 2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CCPD) dari 2018-2024 mengalami penurunan dari 86 ton pada tahun 2020 menjadi 17,266 ton pada tahun 2024. Pada tahun 2018-2020 terjadi peningkatan, yakni Akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 143,13 ton bahkan di tahun 2023 tidak ada pengadaan CPPD. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan dari tahun 2023 menjadi sebesar 17,266.
- 3) Stabilitas Harga Pangan Tingkat Konsumen (CV) 2018-2024 mengalami penurunan dari 9,75 menjadi 0,15;
- 4) Tingkat Keamanan Pangan dari tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, dimana pada tahun 2018 sebesar 92% dan tahun 2024 naik menjadi 100%.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pangan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.50

Kinerja Urusan Bidang Pangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024

N O	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	171,30%	152,07%	145.81%	143,67 %	0%	0%
2.	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1 unit Gudang CPPD	1 unit Gudang CPPD	1 unit Gudang CPPD	1 unit Gudang CPPD	1 unit Gudang CPPD	1 unit Gudang CPPD

Sumber: DKPP Kabupaten Cirebon, Tahun 2024

10. Pertanian

Capaian indikator pada bidang pertanian di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pertanian dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.51

Kinerja Urusan Bidang Pertanahan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	2,33%	0%	0%	0%	0%	0%
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	2,33%	0%	0%	0%	0%	0%
4.	Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0%	0%	0%	0%	0%	0%
5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0%	0%	0%	0%	0%	0%
6.	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	40%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan LPPD Kabupaten Cirebon, 2024.

11. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan isu strategis dan hal penting dalam pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan mengandung implikasi perubahan yang direncanakan. Perubahan yang terjadi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk, tetapi tidak mengganggu aspek lingkungan hidup. Implikasi lainnya yaitu adanya eksploitasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan/atau pertumbuhan ekonomi wilayah yang acapkali bersinggungan dengan aspek lingkungan hidup. Oleh karenanya, harus dapat dipastikan pembangunan daerah berada dalam bingkai atau koridor pembangunan berkelanjutan.

Adapun Indikator yang dapat merepresentasikan capaian pada bidang lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon adalah diantaranya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Terlaksananya Pengelolaan sampah dan Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian beberapa indikator tersebut disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Lingkungan Hidup dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.52
Kinerja Urusan Bidang Lingkungan Hidup Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2019-2024

No.	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	51,78%	53,38%	54,39%	57,09%	56,96%	54,55%
	a. Indeks Kualitas Air (IKA)	45,24%	35,24%	41,43%	48,52%	53,20%	45,93%
	b. Indeks Kualitas Udara (IKU)	82,28%	78,48%	81,12%	81,03%	76,13%	76,86%
	c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	33,81%	38,10%	27,2%	27,56%	27,96%	28,09%
2.	Terlaksananya Pengelolaan Sampah	6,09%	23,26%	28,67%	30,32%	11,54%	37,5681 %
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100%	59,06%	57,83%	46,91%	47,87%	45,6410 %

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, 2024.

12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pula bagi Kabupaten Cirebon. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai penduduk dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk menjadi salah satu tantangan pembangunan di bidang kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berikut disajikan data Capaian Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020-2024.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	Dokumen	6.852	7.551	7.743	6.512	6.981
2.	Jumlah akta cerai yang diterbitkan	Dokumen	20.605	20.788	20.539	18.696	16.934

Sumber: Kab.Cirebon dalam Angka, Tahun 2021-2025.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Jumlah pernikahan yang tercatat pada Kementerian Agama Republik Indonesia yang diterbitkan dari tahun 2020 ke tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 13,00 % dari 6.852 dokumen di tahun 2020 menjadi 7.743 dokumen di tahun 2022 tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan akibat pandemic Covid-19 yang mewajibkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebesar 15,90% dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2024 sebesar 7,20%.
- 2) Jumlah akta cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon dari tahun 2020 ke tahun 2024 terus mengalami penurunan menjadi 17,82 % dari 20.605 dokumen di tahun 2020 menjadi 16.934 dokumen di tahun 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.54

Kinerja Urusan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kepemilikan akta kelahiran	106,90%	88,38%	93,06 %	94,65%	95,0130%
2.	Perekaman KTP Elektronik	108,18%	103,87%	98,99 %	98,79%	99,7529%
3.	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	28,92%	23,51%	31,32 %	27,83%	36,2913%
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	27,40%	27,40%	5,63 %	12,90%	100%

Sumber: Disdukcapil Kab.Cirebon, Tahun 2024.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat. Ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarahkan haluan pembangunan dunia menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), stakeholders dalam bidang pembangunan berlomba-lomba menyasar satu atau beberapa dari tujuh belas tujuan pembangunan yang ada sebagai capaian. Banalitas proyeksi program ini tak terlepas berimbas pada program-program pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.55

Kinerja Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	500%	100%	0%	0%	0,0000%
2.	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	250%	37,07%	1,08 %	1,02 %	54,5454%

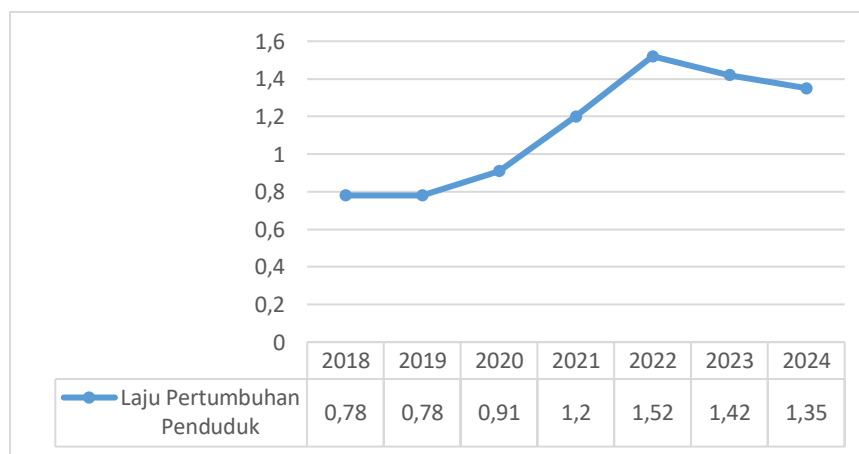
Sumber: Laporan LPPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

14. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 LPP di Kabupaten Cirebon mencapai 0,78 persen dan pada tahun 2024 naik menjadi 1,35 persen. Hal tersebut sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2.57

Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025.

Selain Laju pertumbuhan penduduk tersebut di atas, indikator lainnya pada bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari

keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.56
Kinerja Urusan Bidang Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,4 poin	2,36 poin	2,24 poin	2,19 poin	2,12
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	75,90%	74,00%	72,57%	85,03%	64,6865%
3.	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	13,30%	17,90%	26,36%	14,97%	8,6091%

Sumber : DPPKBP3A Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

15. Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu aspek pendukung demi percepatan pembangunan dan penguatan ekonomi. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon harus mampu melaksanakan hal-hal terkait perhubungan seperti Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian. Bukan hanya di kota besar, akan tetapi transportasi yang memadai harus tersedia sampai ke pelosok desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Cirebon. Berikut adalah tabel jumlah kendaraan Angkutan Pedesaan di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.57
Jumlah Kendaraan Angkutan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024

No.	Kecamatan	Moda Angkutan Barang dan Orang				Moda Angkutan Umum			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Waled	237	272	245	184	27	48	28	19
2.	Pasaleman	114	151	92	138	66	95	59	16
3.	Ciledug	286	346	320	329	37	40	27	15
4.	Pabuaran	553	280	276	211	2	13	4	11
5.	Losari	359	434	391	245	25	43	43	11
6.	Pabedilan	230	269	232	166	33	72	8	8
7.	Babakan	189	242	234	136	1	25	8	0
8.	Gebang	584	701	618	245	27	242	83	39

No.	Kecamatan	Moda Angkutan Barang dan Orang				Moda Angkutan Umum			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
9.	Karangsembung	119	151	143	174	5	3	9	6
10.	Karangwareng	221	218	135	186	103	126	83	24
11.	Lemahabang	373	436	421	208	11	30	15	15
12.	Susukan Lebak	234	251	191	298	6	2	60	26
13.	Sedong	440	494	443	300	47	115	51	14
14.	Astanajapura	351	568	543	356	26	51	25	14
15.	Pangenan	452	495	487	338	5	64	8	35
16.	Mundu	631	819	812	480	1	116	7	13
17.	Beber	276	309	309	112	0	32	0	1
18.	Greged	837	614	614	490	2	1	0	23
19.	Talun	749	911	796	571	98	225	115	109
20.	Sumber	1 024	1 225	1092	433	125	139	133	32
21.	Dukupuntang	207	708	700	302	2	62	8	5
22.	Palimanan	535	794	764	406	33	32 0	30	8
23.	Plumbon	1 322	1 476	962	735	552	63 0	514	108
24.	Depok	738	801	790	598	4	24	12	12
25.	Weru	689	830	783	335	20	32	47	3
26.	Plered	1 048	1 113	782	425	335	52 5	331	33
27.	Tengahatani	304	364	357	256	2	5	7	11
28.	Kedawung	1 514	1 908	1636	1006	188	70 1	272	170
29.	Gunungjati	795	1 047	979	376	63	11 3	68	8
30.	Kapetakan	273	331	311	200	14	28	20	42
31.	Suranenggala	180	228	222	197	1	3	12	11
32.	Klangenan	358	404	392	256	4	7	12	12
33.	Jamblang	372	415	390	316	15	40	25	2
34.	Arjawinangun	719	854	815	398	12	64	35	23
35.	Panguragan	566	635	633	480	1	21	2	209
36.	Ciwaringin	445	625	567	207	43	29 5	58	12
37.	Gempol	403	462	457	260	2	57	5	13
38.	Susukan	666	847	814	228	31	80	33	4
39.	Gegesik	491	587	541	360	2	11 1	46	28
40.	Kaliwedi	200	243	241	188	1	8	2	16
	Kab. Cirebon	20 084	23 858	21530	1312 9	1 972	4 60 8	230 5	116 1

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka, BPS, 2025.

Adapun fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.58
Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Sarana Prasarana/Fasilitas	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Terminal Tipe C	0	0	0	0	0	0
Jumlah Sub Terminal	3	3	3	3	0	0
Jumlah Rambu Lalin	55	150	168	25	0	24
Jumlah Traffic Light	0	0	0	0	0	0
Jumlah Warning Light	0	0	8	7	0	8
Pembangunan Lampu PJU	1770	4	633	1170	1525	723
Pagar Pengaman Jalan	220	173	226	100	28	0
Shelter	4	4	4	3	0	0
Jumlah Trayek Layanan	48	48	48	48	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perhubungan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.59
Kinerja Urusan Bidang Perhubungan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio konektivitas Kabupaten	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%	0,63%
2.	Kinerja lalu lintas Kabupaten (Volume per Capacity)	0,76 V/C	0,75 V/C	0,48 V/C	0,78 V/C	0,25 V/C	0,18 V/C

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, 2024.

16. Komunikasi dan Informatika

Pada era teknologi informasi sekarang ini, komunikasi dan informatika menjadi hal yang umum dalam keseharian masyarakat. Meskipun begitu, perihal ini belum menjadi domain utama masyarakat Cirebon dalam mengembangkan berbagai bidang kehidupannya sehari-hari.

Untuk cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat, persentasenya stabil di angka 100% dari tahun 2018-2024. Begitu juga dengan cakupan layanan telekomunikasi persentasenya stabil dari tahun 2018-2022 yaitu sebesar 100%. Hal tersebut sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.60
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan dan Cakupan Layanan Telekomunikasi Tahun 2018 s.d. 2024

No	Indikator	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kab.Cirebon, Tahun 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.61
Kinerja Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pesentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang	100%	100%	100%	100%	100 %	100 %

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	terhubung dengan akses internet yang disediakan						
2.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	25%	100%	100%	100%	89,47%	52.6315%
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	3,19%	100%	74,01%	75,31%	75,84 %	80,5029%
4.	Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait Implementasi e-government	1	2	2	2	1	0
5.	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	100 %	100%	0%	0 %	0%

Sumber: Diskominfo Kab.Cirebon, Tahun 2024.

17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kabupaten Cirebon memiliki koperasi usaha yang bergerak dalam banyak bidang usaha seperti peternakan, perikanan, perkebunan/pertanian, angkutan darat dan lain-lain. Total jumlah koperasi di Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun banyak diantara koperasi-koperasi tersebut yang tidak aktif. Menurut data yang tersedia Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan persentase koperasi yang berkualitas, dimana pada tahun 2018 sebesar 18,04% dan terakhir di 2024 meningkat sebesar 50%.

Selain Koperasi, Kabupaten Cirebon juga memiliki Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam banyak bidang usaha baik industri, jasa dan perdagangan yang tersebar di 40 Kecamatan. Saat ini mulai diupayakan adanya sentra-sentra usaha berdasarkan komoditas yang menjadi ciri khas wilayah tersebut. Ada beberapa sentra usaha seperti pindang, kerupuk,

manisan, emping melinjo, rotan, batik, gerabah, kulit, batu alam, sandal, meubel, konveksi dan usaha lainnya. Jumlah Usaha Mikro ada 31.054 pelaku usaha. Dalam upaya untuk meningkatkan omset pelaku usaha mikro, Pemerintah Kabupaten Cirebon menyediakan sarana pemasaran baik yang berupa offline yaitu Galeri UMKM Kabupaten Cirebon dan yang berupa online yaitu marketplace Galeri Caruban serta fasilitasi legalisasi NIB, HAKI dan halal.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.62

Kinerja Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	18,04%	46,90%	15,66 %	16,97%	39,67%	50%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100%	100%	0,17 %	0,18%	0,27%	0,8050%

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Tahun 2024

18. Penanaman Modal

Penanaman modal oleh investor dapat berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah secara langsung. Selain itu, pembukaan lapangan usaha oleh investor yang diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja secara langsung akan menurunkan tingkat pengangguran. Iklim investasi di Kabupaten Cirebon cukup fluktuatif baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Tabel 2.63

Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Laju Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

No.	Indikator Daerah	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah investor	Perusahaan	542	373	237	383	2.300	28.866	51.304

No.	Indikator Daerah	Satuan	Tahun						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Nilai Investasi	Milyar Rupiah	2.007,5	1.704,93	1313,27	1.382,34	3.029,23	3.002,46	3.116,26
3	Laju Investasi	Persen	137,25	-15,07	-22,97	5,26	119,14	102,15	96,20

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Jumlah investor yang menanamkan investasinya di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sebanyak 542 investor dan terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 237 investor. Namun, tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yaitu 2021 sebanyak 383 investor, tahun 2022 sebanyak 2.300 investor, tahun 2023 sebanyak 28.866 investor, dan pada tahun 2024 sebanyak 51.304 investor.

Nilai total investasi di Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional sebesar Rp. 2.007,5 Milyar dan mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi Rp. 1.313,27 Milyar, dan mulai mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi Rp. 1.382,34 Milyar, tahun 2022 menjadi Rp. 3.029,23 Milyar, tahun 2023 menjadi Rp. 3.002,46 Milyar, dan pada tahun 2024 menjadi Rp. 3.116,26 Milyar.

Selanjutnya, disajikan juga Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.64
Indikator Iklim Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

No.	Indikator Iklim Investasi	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Perda Perizinan	9	-	1	-	-	1	-
2.	Penerbitan Perizinan	5.870	9.984	1.322	1.393	982	158	468
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perizinan)	81,30	87,69	88,68	88,90	89,14	92,46	91,27
4.	Jumlah perizinan yang dikenakan retribusi	3	3	3	3	3	1	-
5.	Retribusi perizinan (jutaan)	6.537,60	4.071,86	3.763,88	2.382,23	14.837,76	13.863,30	-
6.	Nilai Investasi (Jutaan)	2.007.508	1.704.927	1.313.272	1.382.344	3.029.228	3.022.466	3.116.260

No.	Indikator Iklim Investasi	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Realisasi Investasi per sektor (Jutaan)							
	Pertanian	6.210	98.190	30.513	15.049	58.190	39.844	27.379
	Pertambangan	-	-	-	-	-	1.201	955.400
	Industri Pengolahan	1.612.808	128.427	815.120	830.582	841.455	1.246.095	1.836.322
	Pengadaan Listrik dan Gas	400	1.150	4.150	9.640	1.909.897	933.747	5.638.527
	Pengadaan Air	-	300	300	-	-	60.005	23.111
	Bangunan/ Konstruksi	19.590	6.162	10.942	8.564	21.998	56.418	79.931
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	26.117	1.340.066	231.302	42.123	67.762	209.277	294.898
	Transportasi dan Pergudangan	38.190	24.004	47.595	9.475	9.148	66.798	112.148
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.550	1.875	7.235	3.421	38.391	5.953	29.257
	Informasi dan Komunikasi	7.658	4.270	11.883	6.116	-	16.306	4.658
	Jasa Keuangan	100	-	3.784	-	-	24	36.000
	Real Estate	50.201	43.370	63.908	260.430	21.424	97.147	322.818
	Jasa Perusahaan	25.600	6.500	4.875	14.393	-	55.328	49.414
	Jasa Pendidikan	12.199	3.463	60.503	8.805	-	336	329.796
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156.525	41.978	17.985	169.894	-	223.146	275.771
	Jasa Lainnya	44.359	5.170	3.175	3.850	60.963	9.831	58.281

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa:

- 1) Untuk tingkat pelayanan perizinan di DPM-PTSP dapat diukur dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tahun 2018 mendapat nilai 81,30 dan tahun 2024 menjadi 91,27 yang berarti bahwa pelayanan perizinan di Kabupaten Cirebon sudah cukup baik dinilai oleh para investor;
- 2) Nilai investasi tahun 2018-2024 didominasi oleh sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata persentase investasi per tahunnya yang mencapai 44,81% dari total investasi keseluruhan. Setelah itu, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 20,40% dan diikuti oleh

sektor perdagangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,09%;

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Penanaman Modal dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.65
Kinerja Urusan Bidang Penanaman Modal Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	-15,07%	-22,97%	5,26%	119,14%	-0,88%	3,1032 %

Sumber: DPMPTSP Kab.Cirebon, Tahun 2024.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Namun dalam pembinaannya masih memerlukan peningkatan mutu dan kualitas.

Sementara, untuk fasilitas prasarana olahraga semakin bertambah. Pada tahun 2018, tambahan sarana prasarana yang dibangun sebanyak 6 sarana olahraga dan yang terpelihara 5 unit. Fasilitas ini digunakan untuk mendorong budaya masyarakat berolahraga. Gedung olahraga tersebut digunakan untuk pembinaan berbagai cabang olahraga terutama cabang olahraga unggulan. Beberapa cabang olahraga unggulan diantaranya adalah pencak silat, atletik, gulat, tenis meja, tenis lapang, bulutangkis, bola basket, sepak bola, bola voli, sepak takraw, karate, taekwondo, dan renang dengan jumlah cabor yang masuk dalam program pembibitan olahraga prestasi 18 cabor. Adapun jenis olahraga tradisional yang terdapat di Kabupaten Cirebon dan sedang dikembangkan adalah egrang, hadang, terompah panjang, dan dagongan. Prestasi olahraga dari tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi dari perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional, yakni pada tahun 2019 sebanyak 8

medali, mengalami penurunan menjadi 0 medali di tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 dan 2022, yakni menjadi 10 dan 62 medali. Namun, mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 0 medali dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 11 medali.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.66
Kinerja Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,30%	0,01%	0,2%	0,01%	0,38%	0,5890%
2.	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,33%	4,124 %	3,48%	3,73%	4,77%	23,1821 %
3.	Peningkatan prestasi olahraga	8 medali	0 medali	10 medali	62 medali	0 medali	11

Sumber : Dispora Kabupaten Cirebon, tahun 2024.

20. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kabupaten Cirebon memiliki kekayaan budaya yang harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang menggambarkan pemajuan kebudayaan adalah persentase seni dan budaya yang dilestarikan.

Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa indikator pada bidang kebudayaan di Kabupaten Cirebon yaitu Terlestarikannya Cagar Budaya dan

Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya, dimana tingkat capaiannya disajikan pada tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kebudayaan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.67
Kinerja Urusan Bidang Kebudayaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019-2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	12,83%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyelenggaraan Festival seni dan Budaya	10	11	2	2	6	7

Sumber : Disbudpar Kabupaten Cirebon, tahun 2024.

21. Statistik dan Persandian

Di Kabupaten Cirebon terdapat instansi vertikal yang khusus menangani penyediaan data dan informasi pembangunan, yakni Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon. Setiap tahun, Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon mempublikasikan buku Kabupaten Cirebon Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Cirebon sebagai bagian tak terpisahkan dalam upaya perwujudan pembangunan daerah.

Tabel 2.68
Jumlah Publikasi yang Diterbitkan BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

Publikasi	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Kabupaten Cirebon dalam Angka	1	1	1	1	1	1
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1	1	1	1	1	1

Sumber: Statistik Kabupaten Cirebon Tahun 2024, BPS.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Statistik dan Persandian dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.69

Kinerja Urusan Bidang Statistik dan Persandian Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan Data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	43,66%	100 %	100 %
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	9,09%	100%	100%	43,66%	100 %	100 %
3.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	56,40 %	100%	33,33%	44, 96 %	74.7286 %

Sumber: 1. Statistik Kabupaten Cirebon Tahun 2024, BPS.

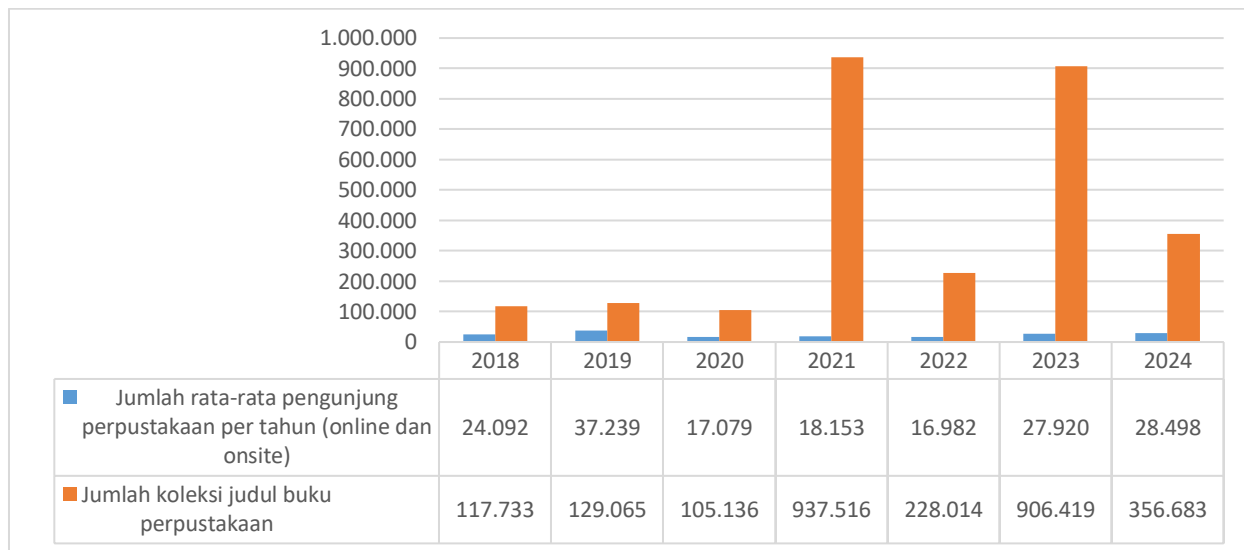
2. Diskominfo Kabupaten Cirebon, 2024

22. Perpustakaan

Sebagai bagian dari peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki perangkat daerah khusus yang menangani urusan perpustakaan, yakni Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Perpustakaan daerah merupakan salah satu program kegiatan dari perangkat daerah yang berfungsi sebagai penyebarluasan data dan informasi sekaligus sosialisasi untuk lebih mengetahui berbagai capaian pembangunan di Kabupaten Cirebon. Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran, dan kemitraan. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kabupaten Cirebon memiliki perpustakaan daerah dengan ketersediaan buku dan jumlah pengunjung seperti dalam gambar berikut:

Gambar 2.58

Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Koleksi Buku yang Tersedia di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024



Sumber: Disarsipus Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun (*online* dan *onsite*) tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 24.092 pengunjung dan tahun 2019 naik menjadi 37.239 pengunjung, namun tahun 2020 turun menjadi 17.079 pengunjung yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, di tahun 2021 angkanya kembali mengalami kenaikan menjadi 18.153 pengunjung dan tahun 2022 mengalami penurunan sedikit menjadi 16.982 pengunjung, tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 27.920, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 28.498 pengunjung. Untuk koleksi buku tahun 2018-2024 cenderung mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 117.733 buku, tahun 2023 naik menjadi 906.419 buku, dan tahun 2024 turun menjadi 356.683 buku.

Selanjutnya, gambaran Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024 pada table berikut.

Tabel 2.70

Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.23	Perpustakaan								
1.	Prosentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	%	27,01	40,97	22,63	0,77	0,86	1,388	2,47
2.	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan	eksemplar per orang	1,32	1,42	1,39	0,40	0,12	0,45	2,61
3.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	Per 1000 penduduk	0,041	0,898	0,90	0,419	1,08	0,96	1,001
4.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	3	11	10	10	8	10	12

Sumber: Disarsipus Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa Prosentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat tahun 2018-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 27,01% dan tahun 2019 naik menjadi 40,97%, namun tahun 2020 turun menjadi 22,63% yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun, di tahun 2021 angkanya menurun tajam sebesar 0,77% dan pada tahun 2023-2024 mengalami kenaikan menjadi 1,388% dan 2,47%. Adanya penurunan tajam di tahun 2021-2022 karena jumlah pembagiya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya pembagi itu jumlah masyarakat di Kecamatan Sumber saja, sedangkan pada tahun 2021-2024 pembagiya jumlah masyarakat Kabupaten Cirebon secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan tahun 2021-2024 sudah mulai terkoneksi dalam 1 (satu) database untuk seluruh perpustakaan di Kabupaten Cirebon. Begitu juga Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan, rasio untuk tahun 2018-2020 cenderung stabil diatas 1,30 dan ada penurunan tajam di tahun 2021-2024 dikarenakan jumlah pembagiya berbeda. Untuk tahun 2018 – 2020 jumlah pembagiya masyarakat di Kecamatan Sumber saja, sedangkan untuk tahun 2021-2024 pembagiya masyarakat di Kabupaten Cirebon secara keseluruhan.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat

capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perpustakaan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.71
Kinerja Urusan Bidang Perpustakaan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Budaya Baca	57 (Cukup)	50-75 (Cukup)	50-75 (Cukup)	44,63 (sedang)	n.a	68,97 (sedang)
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0,183	0,183	5,695	2,417	7,116	57,56

Sumber: 1. Disarsipus Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

2. Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

23. Kearsipan

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, urusan kearsipan memiliki posisi penting guna menyusun setiap database pembangunan, baik berupa dokumen, bukti fisik, hingga dalam bentuk softcopy untuk menjadi bahan rujukan berbagai implementasi pembangunan.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kearsipan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.72

**Kinerja Urusan Bidang Kearsipan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2019 s.d. 2024**

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	38,34%	62,63%	66,65%	68,49	70,90	97,72
2.	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	80%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	26,67%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	30%	32,5%	55%	60%	65%	90,90
5.	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	16,67%	23%	11,62%	13,95%	18,60 %	100%
6.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	36,31%	50%	52,77%	75%	83,33 %	83,33%
7.	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	42,85%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	50%	50%	50%	50%	100%	100%
9.	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Kab/Kota	50%	50%	66,66%	100%	100%	100%
10.	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih	75%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/Kota yang sesuai NSPK						
11.	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12.	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kab/Kota yang sesuai NSPK	0%	0%	0%	100%	100%	100%

Sumber: 1. Disarsipus Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

2. Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

B. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Berikut analisis singkat data dan informasi pada setiap urusan pemerintahan pilihan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

1. Kelautan dan Perikanan

Perikanan merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Cirebon. Bahkan beberapa kecamatan yang memiliki daerah perairan menjadikan sektor perikanan sebagai sumber mata pencaharian utama.

Adapun jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai nelayan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.73
Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap
Menurut Kecamatan dan Jenis Nelayan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan Utama	Jumlah
1.	Waled	—	—	-
2.	Pasaleman	—	—	-
3.	Ciledug	—	—	-
4.	Pabuaran	—	—	-
5.	Losari	1227	—	1227
6.	Pabedilan	—	—	-
7.	Babakan	—	—	-
8.	Gebang	6393	-	6393
9.	Karangsembung	—	—	-
10.	Karangwareng	—	—	-
11.	Lemahabang	—	—	-
12.	Susukan Lebak	—	—	-
13.	Sedong	—	—	-
14.	Astanajapura	—	81	81
15.	Pangenan	1529	—	1529
16.	Mundu	3607	-	3607
17.	Beber	—	—	—
18.	Greged	—	—	—
19.	Talun	—	—	—
20.	Sumber	—	—	—
21.	Dukupuntang	—	—	-
22.	Palimanan	—	—	-
23.	Plumbon	—	—	-
24.	Depok	—	—	-
25.	Weru	—	—	-
26.	Plered	—	—	-
27.	Tengahtani	—	—	-
28.	Kedawung	—	—	-
29.	Gunungjati	2313	—	2313
30.	Kapetakan	1125	—	1125
31.	Suranenggala	1160	—	1160
32.	Klangenan	—	—	—
33.	Jamblang	—	—	—
34.	Arjawinangun	—	—	—
35.	Panguragan	—	—	—
36.	Ciwaringin	—	—	—
37.	Gempol	—	—	—
38.	Susukan	—	—	—
39.	Gegesik	—	—	—
40.	Kaliwedi	—	—	—
Kab. Cirebon		17354	81	17 435

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025.

Selanjutnya, berikut disajikan Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024.

Tabel 2.74
Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Tahun 2018-2024

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tercapainya hasil perikanan tangkap (Ton)	Ton	33.645,65	36.056,91	34.134,34	48.119,39	39.069,29	38.028,89	37.660
2.	Tercapainya hasil perikanan budidaya (Ton)	Ton	45.607,19	48.410,22	41.157,93	38.727,27	18.976,85	45.674	43.773
3.	Terpenuhinya kebutuhan benih ikan air tawar berkualitas (Ton)	Ton	101,42	112,61	290,29	443,28	464,85	498,34	452
4.	Hasil garam rakyat (Ton)	Ton	404.512	136.179	2.671	1.203,50	908,20	748,40	91.459
5.	Hasil Olahan dan pemasaran perikanan (Ton)	Ton	10.447,00	10.790,84	12.564,59	6.467,94	14.601,10	11.711	11.420
6.	Peningkatan konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun (Kg/kapita)	Kg/Kapita	5,75	26,89	27,88	27,30	31,75	37,48	35,53

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2024.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Hasil produksi perikanan tangkap (ton) besarnya fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 produksinya mencapai 33.546,64 ton dan pada tahun 2024 produksinya mencapai 37.660 ton;
- 2) Hasil budidaya perikanan juga produksinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya dampak perubahan iklim yang berakibat penurunan produksi terutama pada budidaya air payau akibat adanya rob atau pasang air laut tertinggi. Pada tahun 2018 mencapai 45.607 ton dan pada tahun 2024 produksinya menurun hingga mencapai 43.773 ton.

- 3) Hasil produksi benih ikan tahun 2018-2024 mengalami kenaikan dari 101,42 ton di tahun 2018 menjadi 452 ton di tahun 2024.
- 4) Hasil produksi garam rakyat tahun 2018-2024 mengalami penurunan dari 404.512 ton di tahun 2018 menjadi 91.459 ton di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya kemarau basah sepanjang tahun sehingga berakibat pada penurunan produksi garam rakyat secara signifikan.
- 5) Produksi hasil olahan dan pemasaran perikanan tahun 2018-2024 berfluktuatif dan cenderung meningkat dari 10.447 ton di tahun 2018 menjadi 11.420 ton di tahun 2024.
- 6) Tingkat konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun dalam kurun waktu tahun 2018-2024 mengalami peningkatan dari 25,75 kg/kapita di tahun 2018 menjadi 35,53 kg/kapita di tahun 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Kelautan dan Perikanan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.75

Kinerja Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) Kabupaten	84.467,13 ton	75.292,27 ton	87.316,43 ton	58.046,14 ton	96.660,63 ton	93.306 ton
2.	Persentase tempat pelelangan ikan yang operasional	35%	35%	35%	35%	35%	35%

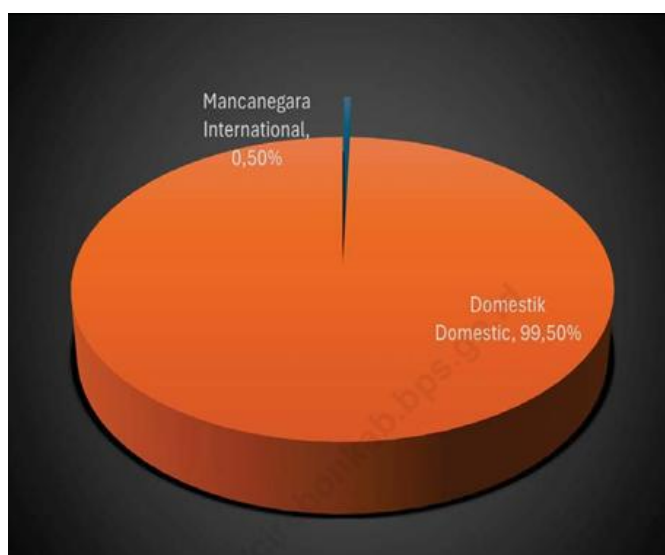
Sumber: 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, 2024.

2. Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

2. Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya). Berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon, jumlah persentase wisatawan domestik jauh lebih besar dari wisatawan mancanegara seperti dalam gambar berikut.

Gambar 2.59
Persentase Wisatawan Mancanegara dan Domestik
di Kabupaten Cirebon, 2024



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS

Jumlah Wisatawan Asing yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dan menurun tajam di tahun 2020, dimana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai 63.414 wisatawan, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5.178 wisatawan dan tahun 2020 menurun tajam menjadi 2.357 wisatawan. Namun kembali mulai meningkat di tahun 2021 menjadi 5.200 wisatawan, tahun 2023 kembali meningkat menjadi 14.227 wisatawan, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 5.454 wisatawan.

Sama halnya dengan jumlah wisatawan asing, kondisi jumlah wisatawan domestik juga mengalami hal serupa, dimana pada tahun 2020 jumlahnya turun cukup tajam menjadi 511.497

wisatawan dan 448.082 di tahun 2021 kunjungan masih turun dibanding kondisi pada tahun 2019 yang mencapai 1.481.048 wisatawan dan tahun 2018 yang mencapai 1.379.655. Baru pada tahun 2023-2024 kunjungan wisatawan domestik mulai mengalami peningkatan, yaitu mencapai 956.827 wisatawan dan 1.091.575 wisatawan.

Penurunan Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon pada tahun 2021 disebabkan oleh pandemi covid 19 yang masih melanda dunia dan Indonesia pada awal tahun 2020 yang mengakibatkan terbitnya beberapa kebijakan seperti PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) dan penutupan beberapa obyek wisata di Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.76
Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik
di Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

Jenis Wisatawan	Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Wisatawan Asing	63.414	5.193	2.357	5.200	9.031	14.227	5.454
Jumlah Wisatawan Domestik	1.379.655	1.481.048	511.497	448.082	682.944	956.827	1.091.575
Jumlah	1.443.069	1.486.241	513.854	453.282	691.975	971.054	1.097.029

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka, BPS, 2025

Fluktuasinya Jumlah Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik berdampak kepada Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, dimana terjadi peningkatan jumlah rumah makan pada tahun 2018-2024, yaitu dari 261 rumah makan pada tahun 2018 menjadi 350 rumah makan pada tahun 2024.

Tabel 2.77
Jumlah Rumah Makan/Kuliner Menurut Kecamatan
di Kabupaten Cirebon, 2018-2024

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Waled	3	3	3	3	3	3	3
2.	Pasaleman	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ciledug	20	22	22	26	28	30	30
4.	Pabuaran	20	22	23	26	22	24	24
5.	Losari	3	3	3	3	3	3	3
6.	Pabedilan	0	0	0	0	0	0	0
7.	Babakan	5	5	5	6	5	6	6

No.	Kecamatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Gebang	6	7	7	8	7	7	7
9.	Karangsembung	2	2	2	3	2	2	2
10.	Karangwareng	0	0	0	0	0	0	0
11.	Lemahabang	11	12	12	14	12	14	14
12.	Susukan Lebak	4	4	4	4	4	4	4
13.	Sedong	2	2	2	2	3	3	3
14.	Astanajapura	1	1	1	1	1	1	1
15.	Pangenan	3	3	3	3	3	3	3
16.	Mundu	3	3	3	5	5	5	6
17.	Beber	18	19	19	21	27	27	30
18.	Greged	0	0	0	0	0	0	0
19.	Talun	11	11	11	16	17	17	17
20.	Sumber	30	33	33	37	36	36	36
21.	Dukupuntang	10	12	12	13	13	13	13
22.	Palimanan	9	9	10	12	10	12	12
23.	Plumbon	12	12	12	12	12	12	13
24.	Depok	3	3	3	3	3	3	3
25.	Weru	11	11	12	16	15	16	18
26.	Plered	3	4	4	4	5	5	5
27.	Tengahtani	4	4	4	4	4	0	4
28.	Kedawung	38	41	41	50	56	57	60
29.	Gunungjati	4	5	5	5	5	5	5
30.	Kapetakan	2	2	2	2	2	2	2
31.	Suranenggala	0	0	0	0	0	0	0
32.	Klangenan	1	1	1	2	1	1	1
33.	Jamblang	1	1	1	2	1	1	1
34.	Arjawinangun	9	9	9	10	10	10	10
35.	Panguragan	3	3	3	3	3	3	3
36.	Ciwaringin	0	0	0	1	0	1	1
37.	Gempol	1	1	1	1	1	1	1
38.	Susukan	5	6	6	7	6	6	6
39.	Gegesik	3	3	3	3	3	3	3
40.	Kaliwedi	0	0	0	0	0	0	0
Kab. Cirebon		261	279	282	328	328	336	350

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka, BPS, 2025.

Kabupaten Cirebon memiliki 39 usaha akomodasi yaitu 8 hotel berbintang dan 31 hotel non bintang dengan 1.386 kamar dan 2.127 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi tersebut, 685 kamar atau 49,42 persen tersedia di hotel berbintang, sedangkan sekitar 701 kamar terdapat pada hotel non bintang/melati.

Adapun tempat-tempat objek wisata unggulan yang ada di Kabupaten Cirebon berupa

wisata religi dan cagar budaya, wisata alam, wisata kuliner, wisata belanja batik, dan wisata kearifan lokal.

a. Wisata Ziarah

Kabupaten Cirebon ditetapkan sebagai destinasi wisata pilgrimage (ziarah) dan cagar budaya sesuai dengan kesepakatan bersama antara gubernur dengan Bupati/Walikota Nomor 912/05/BAPP tentang Prioritas Pembangunan Ekonomi WKPP di Jawa Barat. Lokasi wisata ziarah yang berada di Kabupaten Cirebon adalah:

1. Wisata Ziarah Makam Sunan Gunung Jati.

Obyek wisata ini berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati. Makam Sunan Gunung Jati tidak hanya menjadi obyek wisata, tetapi obyek ini juga sudah ditetapkan menjadi cagar budaya yang harus dilindungi. Obyek wisata ini tidak hanya menjadi aset Kabupaten Cirebon tetapi juga aset Propinsi Jawa Barat. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, regional Jawa dan seluruh Indonesia.

2. Wisata Ziarah Kramat Talun.

Obyek wisata ini merupakan tempat peristirahatan sesepuh Cirebon, Mbah Kuwu Cirebon Girang. Obyek wisata ini berada di Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun. Obyek wisata ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya yang dilindungi. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal, dan regional Jawa.

3. Wisata Ziarah Makam Syech Magelung Sakti.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Karangkendal Kecamatan Kapetakan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

4. Wisata ziarah makam Nyi Mas Gandasari.

Obyek wisata ziarah ini berada di Desa Panguragan Kecamatan Panguragan. Pengunjung obyek wisata ini berasal dari lokal dan regional Jawa Barat.

b. Wisata Alam

Kabupaten Cirebon memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata alam. Lokasi wisata alam adalah:

1. Wisata alam Gronggong dan Ciperna.

Gronggong memiliki ketinggian sekitar 50 meter dpl dengan suasana alam yang menarik. Pada ketinggian ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan suasana kota Cirebon

dan pesisir Cirebon. Obyek wisata ini berada di jalur Cirebon-Kuningan. Secara administratif berada di Desa Patapan Kecamatan Beber. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung obyek wisata ini adalah hotel, losmen, restoran, rumah makan, pusat kesegaran jasmani, padang golf, dan areal lesehan alam terbuka.

2. Wisata alam Setu Patok.

Obyek wisata ini berada di Desa Setu Patok Kecamatan Mundu. Wisata alam ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai areal pemancingan, pemandian, dan outbond.

3. Wisata alam Plangon.

Obyek wisata ini berada di Kelurahan Babakan Kecamatan Sumber. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa monyet dan petilasan Pangeran Kejaksan dan Pangeran Panjunan. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

4. Wisata Alam Belawa.

Obyek wisata ini berada di Desa Belawa Kecamatan Sedong. Obyek wisata ini memiliki sumber daya alam satwa unik berupa labi-labi. Lokasi ini telah ditetapkan sebagai cagar alam yang dilindungi.

5. Wisata Banyu Panas.

Obyek wisata ini berada di Desa Palimanan Barat, Kecamatan Gempol berupa wisata pemandian air panas yang kaya akan kandungan belerang. Obyek wisata Banyu Panas ini merupakan daya tarik yang berkembang seiring pengembangan sarana prasarana wisata di lokasi dan promosi wisata yang memadai.

c. Wisata Kuliner

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kuliner berbagai macam makanan khas. Jenis wisata kuliner di Kabupaten Cirebon adalah:

1. Wisata kuliner ikan bakar.

Obyek wisata ini berada di kaki Gunung Ciremai, tepatnya di Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.

2. Wisata kuliner nasi Jamblang/Sega Jamblang.

Obyek wisata ini berada tersebar di Kecamatan Jamblang, Plered, Kedawung, dan Sumber.

3. Wisata kuliner Empal Gentong.

Obyek wisata ini berada tersebar di 40 kecamatan.

d. Wisata Belanja Batik

Kabupaten Cirebon mempunyai wisata belanja batik. Lokasinya berada di Desa Trusmi Wetan, Trusmi Kulon, Panembahan, dan Kalitengah Kecamatan Plered.

e. Wisata Kearifan Lokal

Kabupaten Cirebon memiliki wisata kearifan lokal berupa perayaan tradisional atau pesta rakyat. Wisata jenis ini dilaksanakan berkaitan dengan tradisi dan adat istiadat masyarakat. Obyek wisata kearifan lokal yang ada di Kabupaten Cirebon adalah:

1. Wisata Kearifan Lokal Nadran.

Obyek wisata ini dilaksanakan di wilayah pesisir Cirebon.

2. Wisata Kearifan Lokal Mauludan.

Obyek wisata ini berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Obyek wisata ini berada di Kecamatan Gegesik, Kecamatan Gunungjati, dan Kecamatan Plered.

3. Wisata Kearifan Lokal Mapag Sri.

Obyek wisata ini berkaitan dengan tradisi masyarakat untuk menyambut datangnya panen raya.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pariwisata dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2019 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.78
Kinerja Urusan Bidang Pariwisata Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD
Tahun 2019 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-91,83%	-54,48%	120,62%	73,67%	57,54%	-61,6644%
2.	Persentase peningkatan perjalanan perjalanan wisatawan	7,19%	-65,89%	-12,40%	55,39%	40,69%	13,6090%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
	nusantara yang dating						
3.	Tingkat Hunian akomodasi	30,59%	19,652%	24,16%	29,83%	65,78%	32,1020%
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB ADHB	3,48%	3,16%	3,06%	3,25%	3,39%	3,2614%
5.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	4,29%	3,36%	4,24%	5,45%	5,31%	6,1601%

Sumber : 1. Disbudparpora Kabupaten Cirebon, 2024.

2. Laporan LPPD Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

4. Pertanian, Peternakan dan Kehutanan

Sektor pertanian berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Paling tidak ada lima yang berperan penting yaitu: berperan secara langsung dalam menyediakan kebutuhan pangan masyarakat, berperan dalam pembentukan pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB), menyerap tenaga kerja di pedesaan, berperan dalam penghasilan devisa dan atau penghematan devisa, dan berperan dalam pengendalian inflasi. Dengan demikian sektor pertanian secara tidak langsung berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan sektor ekonomi lainnya, tidak kalah penting sebagai pendukung penyediaan kebutuhan masyarakat yaitu sub sektor peternakan dan kehutanan yang juga andil terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon tahun 2024 memiliki total luas lahan pertanian basah dan pertanian kering mencapai 91.395 Ha. Kabupaten Cirebon memiliki tugas untuk mendukung program swasembada beras yang dicanangkan oleh gubernur. Pada tahun 2024 total produksi Padi di Kabupaten Cirebon mencapai 683.880 Ton (GKP). Adapun hasil produksi tanaman pangan lain termasuk Padi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.79

Produksi Tanaman Pangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Cirebon, 2024

Kecamatan	Produksi (Ton)						
	Padi (GKP)	Jagung (Ontongan basah dan pipilan)	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Waled	16.194	152	-	-	-	-	-
Pasaleman	401	1.226	-	-	-	-	-
Ciledug	5.323	7.940	-	-	-	-	-
Pabuaran	5.072	6.570	-	-	-	-	-
Losari	11.191	440	-	-	-	-	-
Pabedilan	13.377	12.720	-	-	-	-	-
Babakan	15.885	9.940	-	-	-	-	-
Gebang	14.652	2.358	-	-	-	-	-
Karangsembung	8.800	126	-	-	-	-	-
Karangwareng	12.857	401	-	-	-	-	-
Lemahabang	9.229	231	1,5	4		40	80
Susukan Lebak	16.522	100	1,4	14	2,5	125	21
Sedong	18.288	124	-	-	-	12	10
Astanajapura	10.897	-	-	-	-	-	-
Pangenan	8.407	1.029	-	-	-	-	-
Mundu	11.407	-	-	-	-	-	-
Beber	11.040	14	-	-	-	2.310	169
Greged	10.845	-	-	-	-	-	-
Talun	9.654	-	10	-	-	198	75
Sumber	10.976	-	-	-	-	45	140
Dukupuntang	25.842	594	-	-	-	-	-
Palimanan	17.064	-	-	225	-	-	-
Plumbon	10.101	-	-	-	-	-	38
Depok	11.967	-	-	-	-	-	-
Weru	2.747	-	-	-	-	-	256
Plered	9.857	25	-	1	-	-	-
Tengahtani	7.351	216	-	-	-	-	-
Kedawung	1.800	24	-	-	-	-	2
Gunungjati	11.472	-	-	-	-	-	-
Kapetakan	45.037	-	-	-	-	-	-
Suranenggala	22.063	-	-	-	-	-	-
Klangenan	25.431	-	-	20	-	-	-
Jamblang	20.335	-	-		-	-	-
Arjawinangun	22.991	-	-	140	-	-	-
Panguragan	28.045	-	-		-	-	-
Ciwaringin	18.582	-	-	711	-	-	-
Gempol	14.665	352	36	20	8,2	-	178
Susukan	59.489	-	-	404	-	-	-
Gegesik	75.842	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Produksi (Ton)						
	Padi (GKP)	Jagung (Ontongan basah dan pipilan)	Kedelai	Kacang Hijau	Kacang Tanah	Ubi Jalar	Ubi Kayu
Kaliwedi	32.182	-	-	-	3	-	13
Cirebon	683.880	44.582	48,9	1.539	13,7	2.730	982

Sumber: Kabupaten Cirebon dalam Angka, BPS, 2025

Selain padi, tanah di Kabupaten Cirebon dapat juga ditanami berbagai macam tanaman sayuran dan buah-buahan antara lain: bawang merah, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, jamur merang, kacang panjang, kangkung, ketimun, terung, tomat, bawang daun, melon, semangka, alpukat, salak, rambutan dan berbagai macam sayur dan buah-buahan lain. Di antara berbagai tanaman sayuran tersebut. Bawang merah merupakan tanaman sayuran yang memiliki hasil panen terbesar di Kabupaten Cirebon di mana pada tahun 2024 produksi mencapai 320.944 Ton. Adapun Hasil produksi buah dan sayur di Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2.80
Hasil Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Kw)

Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Jamur Merang	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Terung	Tomat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Waled	22.310	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pasaleman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciledug	8.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pabuaran	43.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Losari	82.600	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pabedilan	87.230	450	-	-	-	-	-	-	-	-
Babakan	16.320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gebang	41.640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karangsembung	3.840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karangwareng	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lemahabang	1.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Susukan Lebak	-	-	-	400	-	-	-	-	240	-
Sedong	822	15	-	-	-	-	-	120	-	10
Astanajapura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pangenan	11.702	6.384	-	-	-	-	1.126	-	-	-
Mundu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kecamatan	Bawang Merah	Cabai Besar	Cabai Keriting	Cabai Rawit	Jamur Merang	Kacang Panjang	Kangkung	Ketimun	Terung	Tomat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Greged	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dukupuntang	-	-	-	-	-	510	-	920	-	-
Palimanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plumbon	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Weru	-	-	-	5	-	-	-	-	50	-
Plered	-	-	-	-	-	-	200	100	-	-
Tengahatani	-	-	-	-	-	-	68	-	-	-
Kedawung	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
Gunungjati	-	-	87	37	-	-	194	-	-	-
Kapetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Suranenggala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Klangenan	-	-	-	-	414	-	-	-	-	-
Jamblang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arjawinangun	-	-	-	-	307	-	-	-	-	-
Panguragan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ciwaringin	-	-	-	-	8.000	-	-	-	-	-
Gempol	-	2.119	-	-	82	-	-	-	-	-
Susukan	-	40	-	-	7.699	-	-	-	-	-
Gegesik	-	1.467	-	305	-	392	1.219	1.293	757	-
Kaliwedi	-	62	-	196	-	242	-	204	72	-
Cirebon	320.944	41.537	87	943	16.502	1144	2.807	2.702	1.119	10

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025

Tabel 2.81
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Tahun 2019 - 2024

No.	Jenis Tanaman	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sayuran							
1.	Bawang Daun	Kw	-	-	-	-	-	-
2.	Bawang Merah	Kw	334 715	346 360	334 636	400 244	343.019	320.944
3.	Bawang Putih	Kw	-	-	-	-	-	-
4.	Bayam	Kw	65	-	-	528	901	417
5.	Buncis	Kw	-	-	-	-	-	-
6.	Cabai Besar	Kw	-	-	56 439	58 828	28.845	41.537
7.	Cabai Keriting	Kw	-	-	-	150	278	87
8.	Cabai Rawit	Kw	230	377	319	173	223	944

No.	Jenis Tanaman	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sayuran							
9.	Jamur Tiram	Kg	-	-	-	70	106	218
10.	Jamur Merang	Kg	-	-	3 837	21 259	22.788	16.502
11.	Jamur Lainnya	Kg	-	-	15	-	-	-
12.	Kacang Merah	Kw	-	-	-	-	-	-
13.	Kacang Panjang	Kw	2 703	2 695	2 762	603	779	1.144
14.	Kangkung	Kw	825	1 690	615	3 895	1.564	2.806
15.	Kembang Kol	Kw	-	140	-	-	-	-
16.	Kentang	Kw	-	-	-	-	-	-
17.	Ketimun	kw	5 285	3 701	4 900	1 432	2.538	2.702
18.	Kubis	kw	-	-	-	-	-	-
19.	Labu Siam	kw	-	-	-	-	-	-
20.	Lobak	kw	-	-	-	-	-	-
21.	Petsai	kw	-	-	-	-	270	1.836
22.	Terung	kw	7 767	10 692	6 974	4 248	1.435	1.119
23.	Tomat	kw	-	-	-	425	100	10
24.	Wortel	kw	-	-	-	-	-	-
25.	Melinjo	kw	10 873	11 437	8 234	5 974	8.956	9.233
26.	Petai	kw	9 264	7 188	3 652	3 749	4.904	9.668
	Buah-Buahan							
1	Blewah	kw	-	-	-	-	-	-
2	Melon	kw	560	760	80	5 262	3.475	2.020
3	Semangka	kw	15 590	22 016	17 495	17 585	11.145	1.730
4	Alpukat	kw	1 535	1 626	1 267	414	315	384
5	Belimbing	kw	1 504	1 491	1 671	817	637	963
6	Duku	kw	-	-	41	79	1.123	743
7	Durian	kw	1 855	2 406	2 175	895	11.016	6.738
8	Jambu Biji	kw	20 525	29 063	28 023	17 679	12.208	9.179
9	Jambu Air	kw	14 359	7 632	5 586	4 331	6.966	16.944
10	Jeruk Siam	kw	555	324	306	176	67	87
11	Jeruk Besar	kw	31	6	-	-	-	-
12	Mangga	kw	467 971	536 250	494 262	433 515	430.997	422.801
13	Manggis	kw	-	-	-	-	688	6
14	Nangka	kw	18 453	15 096	7 284	7 851	9.773	5.543
15	Nenas	kw	-	-	-	-	-	-
16	Pepaya	kw	84 168	80 156	67 003	41 866	30.094	10.313
17	Pisang	kw	153 824	152 080	112 652	144 513	70.266	58.485
18	Rambutan	kw	4 608	3 254	2 826	1 080	2.450	2.624
19	Salak	kw	922	543	788	272	327	248
20	Sawo	kw	5 673	2 943	1 565	1 140	1.541	4.421
21	Sirsak	kw	1 398	1 097	1 269	311	341	938

No.	Jenis Tanaman	Satuan	Tahun					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Sayuran							
22	Sukun	kw	2 786	2 764	3 804	1 626	2.831	1.713
23	Anggur	kw	-	-	-	20	28	34
24	Apel	kw	-	-	-	-	-	-
25	Buah Naga	kw	-	-	-	8	44	13
26	Jeruk Lemon	kw	-	-	-	-	273	155
27	Lengkeng	kw	-	-	107	64	298	591

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka, BPS, 2025

Adapun jenis ternak yang telah dikembangkan di wilayah Kabupaten Cirebon, antara lain meliputi ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kelinci, ayam buras, ayam pedaging, dan ayam petelur. Dari beberapa jenis ternak di Kabupaten Cirebon tersebut telah menghasilkan Daging, telur dan susu sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2.82

Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Cirebon, 2021 – 2024

Jenis Ternak	Daging				Telur				Susu			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong/Beef Cattle	4.364.539	3.614.515	3.878.426	3.739.706	–	–	–	-	–	–	–	-
Sapi Perah/Dairy Cattle	–	–	17.685	3.025	–	–	–	-	314.843	263.984	263.906	263.906
Kerbau/Buffalo	4.989	5.405	7.691	2.287	–	–	–	-	–	–	–	-
Kuda/Horse	–	–	-	-	–	–	–	-	–	–	–	-
Kambing/Goat	50.700	18.944	18.171	16.249	–	–	–	-	–	–	–	-
Domba/Sheep	1.682.858	2.134.385	1.901.982	1.930.152	–	–	–	-	–	–	–	-
Kelinci/Rabbit	3.884	2.913	1.827	1.827	–	–	–	-	–	–	–	-
Ayam Buras/Native Chicken	1.416.513	1.416.513	1.423.220	1.335.689	2.958.433	2.958.434	2.972.441	2.972.441	–	–	–	-
Ayam Ras Petelur/Laying hens	81.165	81.165	71.800	71.800	996.680	996.681	881.684	881.684	–	–	–	-
Ayam Ras Pedaging/ Broilers	25.341.106	25.139.736	25.097.787	26.090.311	–	–	1.187.869	-	–	–	–	-
Itik/Itik Manila/Duck	672.567	672.873	654.891	129.541	5.601.298	5.599.282	4.230.065	1.187.869	–	–	–	-

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, 2025

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.83
Kinerja Urusan Bidang Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

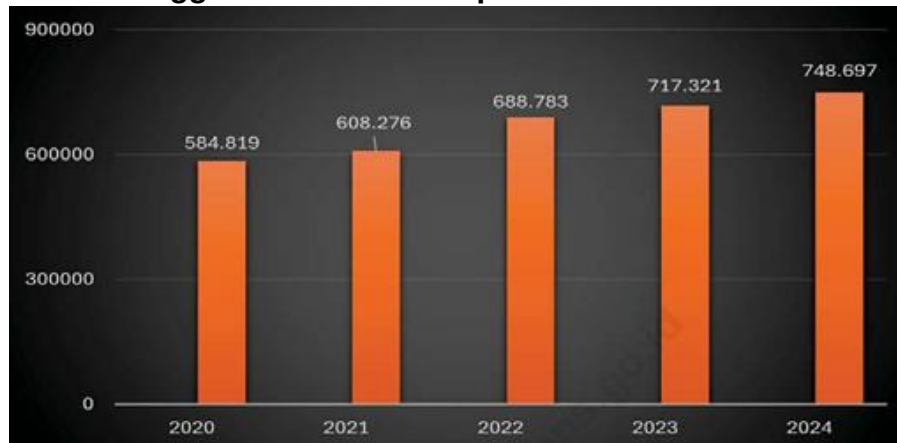
NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produktivitas Pertanian per hektar (kw/ha)	64,19	62,38	76,43	62,29	612,1004%
2.	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB	15,93%	15,20%	15,57%	14,94%	14,76%
3.	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (hewan ke manusia)	-3,26%	-90,85%	-83,33%	-37,02%	61,4396%

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, 2024

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 584.819 pelanggan dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 748.697 pelanggan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.60
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS 2025

Sementara terkait pemenuhan air bersih, jumlah pelanggan dan area desa yang terlayani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jati dalam periode tahun 2019-2024 cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk detail informasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Jumlah Desa Terlayani dan Pelanggan PDAM di Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

No.	Layanan PDAM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Desa Terlayani	146	157	161	158	157	157
2	Jumlah Pelanggan PDAM	38.513	40.110	40.417	43.603	42.002	42.026

Sumber: Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS, 2025

6. Perindustrian dan Perdagangan

Pada urusan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 mencapai 20,96% dan mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 20,50%. Selanjutnya pada tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan menjadi 20,55% sampai

pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan 20,67% dan di tahun 2022-2023 kembali mengalami penurunan akibat pandemic Covid-19 menjadi 20,59% di tahun 2022 dan 20,31% di tahun 2023. Kemudian di tahun 2024 kembali mengalami trend peningkatan sebesar 20,49%.

Pertumbuhan industri juga mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 mencapai 1,68% kemudian di tahun 2019 meningkat menjadi 2,19% dan tahun 2020-2024 menurun terutama akibat dari pandemic Covid-19 yaitu 1,15% di tahun 2020 dan posisi terakhir meningkat kembali menjadi 1,32% di tahun 2024.

Untuk urusan perdagangan, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dari tahun 2018-2024 mengalami fluktuatif dari 5.805 pedagang di tahun 2018, kemudian menaik selama tahun 2019-2020 menjadi 5.992 pedagang di tahun 2020. Akan tetapi selama kurun waktu 2021-2023 cenderung mengalami penurunan terutama akibat pandemic Covid-19 menjadi 5.523 pedagang di tahun 2023 dan posisi terakhir mulai mengalami peningkatan kembali menjadi 5.684 pedagang di tahun 2024. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami penurunan dari 2018-2024 yaitu dari 15,53% di tahun 2018, sebesar 15,42% di tahun 2019 dan 14,48% di tahun 2020. Pada tahun 2021 naik kembali sebesar 14,79 % akan tetapi di tahun 2023 kembali menurun menjadi 13,59% dan posisi terakhir menurun kembali menjadi 13,06% di tahun 2024.

Tabel 2.85
Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon
Tahun 2019-2024

No .	Indikator Daerah	Sat	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.3	Perindustrian								
1.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHB	%	20,96	20,50	20,55	20,67	20,59	20,31	20,49

No	Indikator Daerah	Sat	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Pertumbuhan Industri	%	1,68	2,19	1,15	1,50	1,17	1,56	1,32
2.4	Perdagangan								
1.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	orang	5.805	6.129	5.992	5.726	5.533	5.523	5.684
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	15,53	15,42	14,48	14,79	14,21	13,59	13,06

Sumber: Kab. Cirebon dalam Angka tahun 2019-2025.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.86
Kinerja Urusan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2020 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	1,15%	1,50%	1,50%	1,56%	7,2959%
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50%	60%	0%	0%	103,73%
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri	78,57 %	10,98%	1,89%	0,39%	0,2128%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
	menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait					
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	0%	0%	0%	0%	0,0000%
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	100%	100%	0%	0%	0,0000%
6.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	14,48 %	14,79%	14,21%	13,59%	13,06%
7.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase Kinerja realisasi pupuk	45,18 %	66,74%	86,92%	52,81%	83,4165 %
9.	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	52,28 %	68,07%	59,40%	67,45%	61,5405 %

Sumber: Laporan LPPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2024

C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk urusan perencanaan, seluruh indikator menunjukkan tingkat capaian yang 100%. Hal ini tercermin dari indikator capaian yang tiap tahun selama periode 2018-2024 mencapai 100% dari target, seperti indikator tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA, Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD, Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Tabel 2.87
Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.1	Perencanaan								
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA;	Buah	-	-	-	-	-	-	1
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA;	Buah	-	1	-	1	-	-	-
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;	Buah	1	1	1	1	1	1	1
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA;	Buah	1	-	-	-	-	-	1
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD;	Program	212	205	205	135	143	146	145

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD; dan	Program	212	205	205	135	143	146	145
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

2. Keuangan

Dalam hal urusan Keuangan, dari tahun 2018-2024 mendapatkan predikat WTP. Selain itu persentase SILPA terhadap APBD dari tahun 2018-2024 tergolong cukup kecil karena berada di bawah 10%. Persentase belanja untuk urusan pendidikan juga masih cukup besar di atas 30% dari tahun 2018-2024. Kemudian, prosentase belanja kesehatan juga masih diatas 20% dari tahun 2018-2024. Untuk penetapan APBD, dari tahun 2018-2024 selalu ditetapkan secara tepat waktu.

Tabel 2.88
Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

No.	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.2	Keuangan								
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Persentase SILPA terhadap APBD	%	7,61%	7,19%	9,69%	9,78%	8,72%	7,69%	4,04%
3	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	32%	32%	34%	34%	32,14%	31,52%	34,13%
4	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	19%	20%	23%	25%	31,28%	22,09%	29,56%

No	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja						
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	0,55%	0,51%	0,73%	0,60%	0,67%	0,64%	0,87%
6	Penetapan APBD	Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

Sumber: BKAD Kabupaten Cirebon, Tahun 2024.

3. Pengawasan

Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Tabel 2.89
Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2024

No	Indikator Daerah	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.3	Pengawasan							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	%	50,58	55,00	56,81	56,18	67,83	81,14
2.	Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	%	60	65	73	92	89	86
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	n.a	98,75	97,28	87,03	88	85,45

Sumber: IKU dan LPPD Inspektorat 2024.

Selain itu, berikut disajikan juga capaian tabel tataran pelaksana kebijakan aspek tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2018 s.d. 2024. Tabel dimaksud disajikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah

berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.90
Kinerja Urusan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Rangka
EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2018 s.d. 2024

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan tenaga kesehatan	19,96%	4,89%	6,24%	13,8%	15,62%	3,66%	25,19%
2.	Rasio PAD	0,13%	0,12%	0,13%	1,3%	20,08%	18,53%	17,30%
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditure)	43,03%	81,04 %	81,04%	64,52%	72,13	69,59%	48,42%
4.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 1,6	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3
6.	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang di tanda tangani pada	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	kuartal pertama							
7.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	15,86%	7,07%	7,08%	10,04%	17,62%	19,27%	16,40%
8.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30,87%	17,87 %	15,70%	15,24%	10,13%	10,95%	35,08%
9.	Budget Execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	92,29%	10,60 %	10,60%	7,43%	16,50%	15,43%	13,82%
10.	Assets Management	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
11.	Cash management : Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	8,15%	7,17%	7,17%	8,81%	9,59%	4,46%	1,95%
12.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline	99,85%	100%	109,55 %	105,07 %	97,09%	92,20%	97,38%

NO	IKK	CAPAIAN KINERJA						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	service delivery units)							
13.	Akses Publik terhadap informasi keuangan Daerah (Public Acces to Fiscal Information)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2018-2024.

2.1.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang diikuti aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan yang ditetapkan Standar Pelayanan Minimal dilakukan pada 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib tersebut adalah:

1. Urusan Pendidikan
2. Urusan Kesehatan
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Urusan Sosial

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menindaklanjuti ketentuan terkait Standar Pelayanan Minimal dengan membentuk Tim Penerapan Standar Minimal Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 069/Kep.324-Pem/2022 tanggal 20 Juni 2022, serta menetapkan Peraturan Bupati Nomor 174 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027. Berikut penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

2.15.1. Urusan Pendidikan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Pendidikan ialah sebagai berikut:

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

2) Pendidikan Dasar

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs).

3) Pendidikan Kesetaraan

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

B. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berikut merupakan target pencapaian SPM Urusan Pendidikan Pada Kabupaten Cirebon Tahun 2024:

Tabel 2.91.

Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100.00% (86.648 Orang)	Tahun 2024	1. Angka partisipasi sekolah	100	%	100.00 %	Tahun 2024	
					2. Angka partisipasi murni	0	%			
					3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	67,3	%			
					4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	75,15	%			
					5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	10	%			
					6. Kecukupan formasi guru ASN	100	%			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian									
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					7. Indeks distribusi guru	0,9	%				
					8. Proporsi PTK bersertifikat	90	%				
					9. Proporsi PTK penggerak	20	%				
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100.00 % (371.626 Orang)	Tahun 2024	SD			100.00%	Tahun 2024		
					1. Angka partisipasi kasar	100	%				
					2. Angka partisipasi sekolah	90	%				
					3. Kemampuan literasi	56,96	Nilai				
					4. Kemampuan numerasi	42,09	Nilai				
					5. Perbedaan Skor Literasi	5	Nilai				
					6. Perbedaan Skor numerasi	5	Nilai				
					7. Indeks iklim keamanan	73,6	Nilai				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8. Indeks iklim kebhinekaan	72,02	Nilai			
					9. Indeks iklim inklusivitas	60,99	Nilai			
					10. Kecukupan formasi guru ASN	90	%			
					11. Indeks distribusi guru	0,5	%			
					12. Proporsi PTK bersertifikat	90	%			
					13. Proporsi PTK penggerak	70	%			
					SMP					
					1. Angka partisipasi kasar	100	%			
					2. Angka partisipasi sekolah	100	%			
					3. Kemampuan literasi	67,12	Nilai			
					4. Kemampuan numerasi	65,9	Nilai			
					5. Perbedaan Skor Literasi	5	Nilai			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6. Perbedaan Skor numerasi	5	Nilai			
					7. Indeks iklim keamanan	71,26	Nilai			
					8. Indeks iklim kebhinekaan	69,66	Nilai			
					9. Indeks iklim inklusivitas	59,63	Nilai			
					10. Kecukupan formasi guru ASN	90	%			
					11. Indeks distribusi guru	0,5	%			
					12. Proporsi PTK bersertifikat	90	%			
					13. Proporsi PTK penggerak	80	%			
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan	100%	Tahun 2024	1. Angka partisipasi kasar	60	%	100 %	Tahun 2024	
			(18.057 Orang)		2. Angka partisipasi sekolah	60	%			
					3. Kemampuan literasi	30	Nilai			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan			4. Kemampuan numerasi	30	Nilai			
					5. Perbedaan Skor Literasi	2	Nilai			
					6. Perbedaan Skor numerasi	2	Nilai			
					7. Indeks iklim keamanan	50	Nilai			
					8. Indeks iklim kebhinekaan	30	Nilai			
					9. Indeks iklim inklusivitas	25	Nilai			
					10. Kecukupan formasi guru ASN	0	%			
					11. Indeks distribusi guru	0	%			
					12. Proporsi PTK bersertifikat	0	%			
					13. Proporsi PTK penggerak	0	%			

C. Realisasi

Berikut realisasi hasil pencapaian SPM Urusan Pendidikan pada Kabupaten Cirebon Tahun 2024:

Tabel 2.92. Pencapaian Target SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No .	Jenis Layanan Dasar	Satua n	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaia n	Target	Realisas i	Capaia n		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kategori Indeks Pencapaian SPM								84,41	Tuntas Madya
1	Pendidikan Dasar Usia Dini								77,16	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				65,18					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	86.648	70.603	81,48					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							11,98		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							59,89		
	1. Angka partisipasi sekolah	%				100	37,13	37,13		
	2. Angka partisipasi murni	%				0	0	0		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%				67,3	51,58	76,64		
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%				75,15	77,28	100		
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%				10	6,52	65,2		
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%				100	100	100.00		
	7. Indeks distribusi guru	%				0,9	0,85	94,44		
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%				90	51,9	57,67		
	9. Proporsi PTK penggerak	%				20	1,58	7,9		
2	Pendidikan Dasar								86,44	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				76,39					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	371.626	354.854	95,49					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							10.05		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							50.25		
	SD									
	1. Angka partisipasi kasar	%				100	94,61	94,61		
	2. Angka partisipasi sekolah	%				90	94	100.00		
	3. Kemampuan literasi	Nilai				56,96	75,31	100		
	4. Kemampuan numerasi	Nilai				42,09	67,67	100		
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai				5	4,45	89		
	6. Perbedaan Skor numerasi	Nilai				5	2,37	47,4		
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai				73,6	71,6	97,28		
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				72,02	72,6	100		
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai				60,99	54.92	90,05		
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%				90	69,87	77,63		
	11. Indeks distribusi guru	%				0,5	0.31	62		
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%				90	50,16	55,73		
	13. Proporsi PTK penggerak	%				70	15	21,43		
	SMP							78,67		
	1. Angka partisipasi kasar	%				100	101,6	100.00		
	2. Angka partisipasi sekolah	%				100	91,57	91,57		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Kemampuan literasi	Nilai				67,12	68,34	100		
	4. Kemampuan numerasi	Nilai				65,9	63,89	96,95		
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai				5	4,45	89		
	6. Perbedaan Skor numerasi	Nilai				5	2,37	47,4		
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai				71,26	67,06	94,11		
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				69,66	70,89	100		
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai				59,63	54,78	91,87		
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%				90	57,28	63,64		
	11. Indeks distribusi guru	%				0,5	0,36	72		
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%				90	51,64	57,38		
	13. Proporsi PTK penggerak	%				100	15	18,75		
3	Pendidikan Kesetaraan								83,83	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				66,47					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	18.057	15.004	83,09					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							17,36		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							86,8		
	1. Angka partisipasi kasar	%				60	17,05	28,42		
	2. Angka partisipasi sekolah	%				60	0	0		
	3. Kemampuan literasi	Nilai				30	34,87	100		
	4. Kemampuan numerasi	Nilai				30	33,67	100		
	5. Perbedaan Skor Literasi	Nilai				2	2,14	100		
	6. Perbedaan Skor numerasi	Nilai				2	2,31	100		
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai				50	62,3	100		
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai				30	56,2	100		
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai				25	51,89	100		
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%				0	0	100		
	11. Indeks distribusi guru	%				0	0	100		
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%				0	0	100		
	13. Proporsi PTK penggerak	%				0	0	100		

D. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Pada Tahun 2024 anggaran untuk pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan ada yang bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon yang terdiri dari APBD Murni Rp.3.568.340.068,- APBD DAU Rp.49.599.172.800,- APBD DAK Fisik sebesar Rp.78.430.783.600,- dan APBD

DAK Non Fisik sebesar Rp.314.277.160.000,-, Dana Bagi Hasil Rp. 10.585.660.232,- dan Kerjasama sebesar 33.875.200.000,-. Berikut merupakan rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan pendidikan.

Tabel 2.93.
Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sumber Dana / OPD	Anggaran (Rp)		Jumlah Total
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	APBD Kabupaten Cirebon Dinas Pendidikan			
	Target	64.683.348.223,00	0,00	64.683.348.223,00
	Realisasi	61.044.177.895,00	0,00	61.044.177.895,00
	%	94,37	0,00	94,37
2	APBD Provinsi			
	Target	0,00	33.875.200.000,00	33.875.200.000,00
	Realisasi	0,00	32.156.796.000,00	32.156.796.000,00
	%	0,00	94,93	94,93
3	APBN			
	Target	313.800.940.000,00	77.976.828.474,00	391.777.768.474,00
	Realisasi	313.748.497.437,00	76.632.195.871,00	390.380.693.308,00
	%	99,98	98,28	99,64
Jumlah Total (1+2+3)				
Total Target		378.484.288.223,00	111.852.028.474,00	490.336.316.697,00
Total Realisasi		374.792.675.332,00	108.788.991.871,00	483.581.667.203,00
%		99,02	97,26	98,62

E. Dukungan Personil

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Pendidikan.

Tabel 2.94.
Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	Rincian ASN		
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan
1	Dinas Pendidikan	10.703	15	10.540	148
TOTAL		10.703	15	10.540	148

F. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan yang dihadapi dalam Pelaksanaan dan Penerapan SPM Urusan Pendidikan pada Tahun 2024, masih bisa teratasi dengan baik sehingga tidak dianggap sebagai kendala atau permasalahan.

2.1.5.2. Urusan Kesehatan

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Kesehatan ialah sebagai berikut:

1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dengan indikator pencapaian Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.

2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Dengan indikator pencapaian Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.

3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Dengan indikator pencapaian Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan

kesehatan.

4) Pelayanan kesehatan balita

Dengan indikator pencapaian Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan.

5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.

6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.

7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut

Dengan indikator pencapaian Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.

8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.

9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.

10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.

11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan.

12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

B. Target dan Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut merupakan target dan indikator pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Tabel 2.95. Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (41.098 Orang)	Tahun 2024	1. Vaksin Tetanus Difteri (TD)	41.098	Vaksin	100%	Tahun 2024	
					2. Tablet tambah darah 180 tablet x jumlah ibu hamil)	7.397.640	Tablet			
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	41.098	Orang			
					4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	41.098	Paket			
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	41.098	Paket			
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	6.189	Paket			
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat hepatitisbB dan Sifilis dan HIV	41.098	Paket			
					8. Kartu ibu/rekam medis ibu	41.098	Paket			
					9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	41.098	Buku			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	120	Paket			
					11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	2.751	Botol			
					12.Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	975				
					13.Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 Penduduk)	2.754	Buku			
					14.Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 Penduduk)	2.437	Orang			
					15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	365	Orang			
					16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					17.Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	41.098	Orang			
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (41.098 Orang)	Tahun 2024	1. Formulir Partograf	41,098	Formulir	100%	Tahun 2024	
					2. Kartu ibu/rekam medis ibu	41,098	Paket			
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	41,098	Buku			
					4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	41,098	Paket			
					5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	975	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					6. Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 Penduduk)	2.437	Orang			
					7. Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 Penduduk)	2.754	Orang			
					8. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	365	Orang			
					9. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (39.522 Orang)	Tahun 2024	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	39.522	Vaksin	100%	Tahun 2024	
					2. Vitamin K1 injeksi	39.522	Ampul			
					3. Salep/tetes mata antibiotik	39.522	Orang			
					4. Formulir bayi baru lahir	118.566	Formulir			
					5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	39.522	Formulir			
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	39.522	Buku			
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	60	Paket			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	975	Orang			
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	365	Buku			
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	134	Orang			
					13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					14. Kader Kesehatan	13.530	Orang			
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (155.269 Orang)	Tahun 2024	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	155.269	Dokumen	100%	Tahun 2024	
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	155.269	Formulir			
					3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	155.269	Orang			
					4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	29.736	Kapsul			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	129.563	Kapsul			
					6. Vaksin imunisasi dasar : BCG	42.165	Vaksin			
					7. Vaksin imunisasi dasar : Polio Tetes	42.165	Vaksin			
					8. Vaksin imunisasi dasar : IPV	42.165	Vaksin			
					9. Vaksin imunisasi dasar : DPT - HB -Hib	42.165	Vaksin			
					10. Vaksin imunisasi dasar : Campak - Rubella	42.165	Vaksin			
					11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	42.165	Vaksin			
					12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	42.165	Vaksin			
					13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	162.551	Unit			
					14. Peralatan Anafilaktik	496	Paket			
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	88	Paket			
					16. Tenaga Kesehatan : Dokter	975	Orang			
					17. Tenaga Kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					18. Tenaga Kesehatan : Perawat	2.754	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					19. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					20. Guru PAUD	0	Orang			
					21. Kader Kesehatan	13.530	Orang			
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (353.478 Orang)	Tahun 2024	1. Form pencatatan/buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	353.478	Buku	100%	Tahun 2024	
					2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	353.478	Buku			
					3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	353.478	Dokumen			
					4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1.376	Formulir			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)					
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	424	Formulir			
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	92.047	Tablet			
					7. Alat Pemeriksaan Hb	60	Alat			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					(Hemotologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)					
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7					
					(Hemotologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	15.787	Strip			
					9. Media promosi Kesehatan (Media khusus remaja sehat)	1.376	Paket			
					10. Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)					
					(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	39.999	Vaksin			
					11. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter gigi	88	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					12. Tenaga Kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					13. Tenaga Kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					14. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	365	Orang			
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	Orang			
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Guru	1.502	Orang			
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	0	Orang			
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (976.316 Orang)	Tahun 2024	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	60	Paket	100%	Tahun 2024	
					2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	424	Unit			
					3. Alat : Tensimeter	60	Unit			
					4. Alat : Glukometer	60	Unit			
					5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	60	Unit			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	976.316	Unit			
					7. Alat : KIT IVA Tes	60	Unit			
					8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	60	Unit			
					9. Kit Ophthalmologi Komunitas	60	Unit			
					10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	976.316	Dokumen			
					11. Alat Pelayanan KB	120	Unit			
					12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	60	Dokumen			
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	6.441	Ampul			
					14. Tenaga medis : Dokter	975	Orang			
					15. Tenaga kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					16. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2.100	Orang			
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (239.263 Orang)	Tahun 2024	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	60	Paket	100%	Tahun 2024	
					2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	60	Paket			
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	60	Paket			
					4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	239.263	Paket			
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	239.263	Paket			
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	239.263	Buku			
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	60	Paket			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					8. Tenaga medis : Dokter	975	Orang			
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	Orang			
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	13.530	Orang			
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (91.709 Orang)	Tahun 2024	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	120	Paket	100%	Tahun 2024	
					2. Obat Hipertensi)	91.709	Paket			
					3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	60	Unit			
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	60	Aplikasi			
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	60	Paket			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					(peningkatan pengetahuan masyarakat)					
					6. Tenaga medis : Dokter	975	Orang			
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	134	Orang			
					11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	365	Orang			
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	Orang			
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (21.087 Orang)	Tahun 2024	1. Obat Diabetes Melitus	21.087	Paket			
					2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	60	Unit	100%	Tahun 2024	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	21.087	Unit			
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	60	Formulir			
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	120	Paket			
					6. Tenaga medis : Dokter	975	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	365	Orang			
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	Orang			
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	203	Orang			
					12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	285	Orang			
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100% (3.200 Orang)	Tahun 2024	1. Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) (bentuk fisik atau elektronik)	60	Buku	100%	Tahun 2024	
					2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	8	Jenis			
					3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	366.385	Formulir			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					(instrumen untuk skrining masalah Kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)					
					4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	60	Formulir			
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	120	Media			
					6. Tenaga kesehatan : Dokter	975	Orang			
					7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	60	Orang			
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	848	Orang			
					9. Tenaga profesional lainnya	2	Orang			
11	Pelayanan kesehatan orang	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang	100% (50.282	Tahun 2024	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	73	Paket	100%	Tahun 2024	
					2. Reagen Zn TB	1.112	Kit			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
	terduga tuberkulosis	mendapatkan layanan kesehatan	Orang)		3. Masker bedah dan Masker N95	53.290	Paket			
			4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering		11.437	Paket				
			5. Katrid tes cepat molekuler		72.422	Test				
			6. Formulir pencatatan dan pelaporan		88	Dokumen				
					7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	88	Dokumen			
					8. Tuberkulin	3.875	Vial			
					9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	975	Orang			
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	365	Orang			
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	134	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					13. Tenaga kesehatan : Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	285	Orang			
					14. Tenaga kesehatan : Radiografer	93	Orang			
					15. Kader Kesehatan	120	Orang			
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100% (51.541 Orang)	Tahun 2024	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	73	Paket	100%	Tahun 2024	
					2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	51.541	Test			
					3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sputum yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	51.541	Paket			
					4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	51.541	Paket			
					5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	975	Orang			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					6. Tenaga kesehatan : Bidan	2.437	Orang			
					7. Tenaga kesehatan : Perawat	2.754	Orang			
					8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	285	Orang			
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	134	Orang			
					10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	13	Orang			

C. Realisasi

Berikut pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Tabel 2.96. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kategori Indeks Pencapaian SPM								92,91	Tuntas Utama
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil								95,64	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				76,79					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	41.098	39.451	95,99					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							18.85		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							94.23		
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin				41.098	41.263	100		
	2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Orang				7.397.640	7.397.640	100		
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	Paket				41.098	39.451	95.99		
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	Paket				41.098	39.451	95.99		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				41.098	39.451	95.99		
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket				6.189	5.921	95,67		
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat hepatitisB dan Sifilis dan HIV	Paket				41.098	39.451	95.99		
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				41.098	39.451	95.99		
	9. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				41.098	39.451	95.99		
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				120	120	100		
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol				2.751	2.632	95,67		
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan	Orang				975	725	74,36		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)									
	13.Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 Penduduk)	Orang				2.754	3.446	100		
	14.Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 Penduduk)	Orang				2.437	2.045	83,91		
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				365	438	100		
	16. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	17.Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang				41.098	39.451	95,99		
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin								92,22	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				74,16					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	41.098	38.096	92,7					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							18.06		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							90,3		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1 . Formulir Partograf	Formulir				41.098	38.096	92,7		
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket				41.098	38.096	92,7		
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku				41.098	39.474	96,05		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				41.098	38.096	92,7		
	5 Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				975	725	74,36		
	6 Tenaga Kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 Penduduk)	Orang				2.437	2.045	83,91		
	7 Tenaga Kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 Penduduk)	Orang				2.754	3.446	100		
	8 Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				365	438	100		
	9 Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir								94,56	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				76,61					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	39.522	37.847	95,76					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							17,95		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							89,76		
	1. Vaksin Hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin				39.522	37.847	95,76		
	2. Vitamin K1 injeksi	Ampul				39.522	37.847	95,76		
	3. Salep/tetes mata antibiotic	Orang				39.522	37.847	95,76		
	4. Formulir bayi baru lahir	Formulir				118.566	113.880	96,05		
	5. Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir				39.522	37.847	95,76		
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				39.522	37.847	95,76		
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				60	60	100		
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				975	695	71,28		
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				2.754	3.446	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11.Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				365	438	100		
	12.Tenaga Kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				134	62	46,27		
	13.Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	14.Kader Kesehatan	Orang				13.530	13.530	100		
4	Pelayanan kesehatan balita								98,57	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80.00					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	155.269	155.269	100.00					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							18,57		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							92,86		
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen				155.269	155.269	100.00		
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir				155.269	155.269	100.00		
	3. Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Orang				155.269	155.269	100.00		
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	Kapsul				29.736	28.565	96,06		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	Kapsul				129.563	128.710	99,34		
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				42.165	39.423	93,5		
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				42.165	39.728	94,22		
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				42.165	39.712	94,18		
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB - Hib	Vaksin				42.165	35.374	83,89		
	10. Vaksin imunisasi dasar : Campak – Rubella	Vaksin				42.165	40.613	96,32		
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB –Hib	Vaksin				42.165	29.254	69,38		
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak -	Vaksin				42.165	36.945	87,62		
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				162.551	162.551	100		
	14. Peralatan Anafilaktik	Paket				496	496	100		
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	Paket				88	88	100		
	16. Tenaga medis : Dokter	Orang				975	695	71,28		
	17. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	18. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				2.754	3.446	100		
	19. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	20. Guru PAUD	Orang				0	0	100.00		
	21. Kader Kesehatan	Orang				13.530	13.530	100.00		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar								92,71	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				79,2					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	353.478	349.949	99					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							13,51		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							67,53		
	1. Form pencatatan/buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	Buku				353.478	1	0		
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	Buku				353.478	1	0		
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen				353.478	1	0		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir				1.376	1.376	100		
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir				424	424	100		
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok obat yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	Tablet				92.047	52.848	57,41		
	7. Alat Pemeriksaan Hb	Alat				60	60	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Hemotologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)									
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hemotologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip				15.787	1	0,01		
	9. Media promosi Kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket				1.376	1.376	100		
	10. Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin				39.999	38.654	96,64		
	11. Tenaga Kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang				88	114	100		
	12. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	13. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				2.754	3.446	100		
	14. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	15. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				365	438	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16.Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				134	56	41,79		
	17.Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Guru	Orang				1.502	834	55,53		
	18.Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	Orang				0	0	100		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif								95,37	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				77,64					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	976.316	947.515	97,05					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							17,73		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							88,66		
	1. Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket				60	60	100		
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (ULA)	Unit				424	424	100		
	3. Alat : Tensimeter	Unit				60	60	100		
	4. Alat : Glukometer	Unit				60	60	100		
	5. Alat : Alat Pemeriksa Hb	Unit				60	60	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Alat : Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol	Unit				976.316	947.515	97,05		
	7. Alat : KIT IVA Tes	Unit				60	60	100		
	8. Strip dan Reagen Pemeriksaan Hb	Unit				60	60	100		
	9. KIT Ophthalmologi Komunitas	Unit				60	60	100		
	10.Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/ PPOK)	Dokumen				976.316	947.515	97,05		
	11.Alat Pelayanan KB	Unit				120	120	100		
	12.Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				60	60	100		
	13.Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul				6.441	2.500	38,81		
	14.Tenaga Medis : Dokter	Orang				975	695	71,28		
	15.Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	16.Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				2.754	2.045	74,26		
	17.Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80.30		
	18.Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				134	56	41,79		
	19.Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				2.100	2.100	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut								89,53	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				78,29					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	239.263	234.157	97,87					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							11,24		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							56,19		
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket				60	60	100		
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket				60	60	100		
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				60	60	100		
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alcohol	Paket				239.263	10.150	4,24		
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket				239.263	1	0		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku				239.263	138.914	58,06		
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				60	1	1,67		
	8. Tenaga Medis : Dokter	Orang				975	695	71,28		
	9. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	10. Tenaga Kesehatan : Perawat	Orang				2.754	2.045	74,26		
	11. Tenaga Kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	12. Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				134	56	41,79		
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang				13.530	2.026	14,97		
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi								96,84	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	91.709	91.709	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							16,84		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							84,21		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket				120	120	100		
	2. Obat Hipertensi)	Paket				91.709	91.709	100		
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit				60	60	100		
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi				60	60	100		
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket				60	60	100		
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang				975	695	71,28		
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				2.754	2.045	74,26		
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi	Orang				134	79	58,96		
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	Orang				365	438	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				134	56	41,79		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus								97,53	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	21.087	21.087	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							17,53		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							87,63		
	1. Obat Diabetes Melitus	Paket				21.087	21.087	100		
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit				60	60	100		
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				21.087	21.087	100		
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi	Formulir				60	60	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi									
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket				120	120	100		
	6. Tenaga medis : Dokter	Orang				975	695	71,28		
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				2.754	2.045	74,26		
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				365	438	100		
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				134	56	41,79		
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				203	163	80,3		
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				285	315	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat								94,58	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	3.200	3.200	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							14,58		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							72,92		
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	Buku				60	60	100		
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	Jenis				8	7	87,5		
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	Formulir				366.385	6.770	1,85		
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir				60	60	100		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(pencatatan dan pelaporan)									
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				120	120	100		
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	Orang				975	695	71,28		
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang				60	60	100		
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang				848	387	45,64		
	9. Tenaga profesional lainnya	Orang				2	1	50		
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis								72,37	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				61,91					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	50.282	38.909	77,38					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							10,46		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							52,32		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				73	20	27,4		
	2. Reagen Zn TB	KIT				1.112	252	22,66		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Masker bedah dan Masker N95	Paket				53.290	10.000	18,77		
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket				11.437	8.145	71,22		
	5. Katrid tes cepat molekuler	Test				72.422	15.200	20,99		
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen				88	1	1,14		
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen				88	61	69,32		
	8. Tuberkulin	Vial				3.875	252	6,5		
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				975	706	72,41		
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				2.754	2.045	74,26		
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga	Orang				365	438	100		
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan	Orang				134	56	41,79		
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik	Orang				285	315	100		
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				93	110	100		
	15. Kader Kesehatan	Orang				120	70	58,33		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%))				79,59				95,02	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	51.541	51.280	99,49					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							15,42		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							77,11		
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				73	1	1,37		
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test				51.541	51.280	99,49		
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket				51.541	51.280	99,49		
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket				51.541	51.280	99,49		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				975	695	71,28		
	6. Tenaga Kesehatan : Bidan	Orang				2.437	2.045	83,91		
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				2.754	2.045	74,26		
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				285	315	100		
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				134	56	41,79		
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang				13	13	100		

D. Alokasi Anggaran

Anggaran yang mendukung Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97.
Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sumber Dana / OPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	APBD Kabupaten Cirebon Dinas Kesehatan			
	Target	472.969.913.654,00	0,00	472.969.913.654,00
	Realisasi	389.775.961.905,00	0,00	389.775.961.905,00
	%	82,41	0.00	82,41
2	APBD Provinsi			
	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00
3	APBN			
	Target	10.022.404.800,00	0,00	10.022.404.800,00
	Realisasi	9.587.872.882,00	0,00	9.587.872.882,00
	%	95,66	0.00	95,66
Jumlah Total (1+2+3)				
Total Target		482.992.318.454,00	0,00	482.992.318.454,00
Total Realisasi		399.363.834.787,00	0,00	399.363.834.787,00
%		82,69	0.00	82,69

E. Dukungan Personil

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut rincian dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Kesehatan.

Tabel 2.98.

**Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Cirebon
Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	Rincian ASN		
			Struktural	Fungsional	Pelaksana
1	Dinas Kesehatan	2.892	9	2.851	32
TOTAL		2.892	9	2.851	32

F. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana terkait pelayanan SPM termasuk obat dan BMHP dan alat kesehatan dalam pelayanan SPM;
2. Jumlah dan kemampuan SDM masih sangat terbatas, bila melihat sasaran yang begitu banyak dan tersebar, sementara target yang harus dicapai 100%;
3. Diperlukan adanya penguatan secara konsisten dan berkesimbangan baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan SPM agar semua dapat memahami secara menyeluruh peran sertanya terhadap penerapan SPM sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Solusi :

1. Penguatan perencanaan obat dan BMHP, penguatan e-catalog, penjaminan ketersediaan obat esensial dan edukasi penggunaan obat rasional, terutama untuk pemenuhan pelayanan dasar (SPM);
2. Pemenuhan SDM melalui pengadaan ASN PPPK;
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola program di tingkat Puskesmas dalam upaya peningkatan pengetahuan melalui On the Job Training (OJT) dan pelatihan;
4. Koordinasi antar bidang di Dinas Kesehatan untuk pemenuhan Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Koordinasi

antar bidang di Dinas Kesehatan untuk pemenuhan Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dan antar Pengelola Program di tingkat Puskesmas.

2.1.5.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ialah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

B. Target dan Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut merupakan target dan indikator pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Tabel 2.99. Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100% (7624 Orang)	Tahun 2024	JARINGAN PERPIPAAN			100%	Tahun 2024	
					1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	1.906	Rumah Tangga			
					2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	1.906	Rumah Tangga			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					
					3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	0	Rumah Tangga			
					4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	0	Rumah Tangga			
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100% (6208 Orang)	Tahun 2024	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.552	Rumah Tangga	100%	Tahun 2024	
					2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air	1.552	Rumah Tangga			

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
					besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T					
					3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	1.552	Rumah Tangga			

C. Realisasi

Berikut merupakan hasil pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.100. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Targe t	Realisas i	Capaian (%)	Targe t	Realisas i	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kategori Indeks Pencapaian SPM								100	Tuntas Paripurna
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari								100	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	7.624	7.624	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							100		
	JARINGAN PERPIPAAN									

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				1.906	1.906	100		
	2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Rumah Tangga				1.906	1.906	100		
	menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau									
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN									
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				0	0	0.00		
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	Rumah Tangga				0	0	0.00		

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Targe t	Realisas i	Capaian (%)	Targe t	Realisas i	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau									
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik								100	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	6.208	6.208	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							100		
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				1.552	1.552	100		
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot	Rumah Tangga				1.552	1.552	100		
	secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T									

No.	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga				1.552	1.552	100		

D. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.101.

Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sumber Dana / OPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	APBD Kabupaten Cirebon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Target	3.480.676.000,00	0,00	3.480.676.000,00
	Realisasi	3.419.611.250,00	0,00	3.419.611.250,00
	%	98,25	0,00	98,25
2	APBD Provinsi			
	Target	4.000.000.000,00	0,00	4.000.000.000,00
	Realisasi	3.920.150.000,00	0,00	3.920.150.000,00
	%	98,00	0,00	98,00
3	APBN			
	Target	26.325.733.842,00	0,00	26.325.733.842,00
	Realisasi	25.722.307.300,00	0,00	25.722.307.300,00
	%	97,71	0,00	97,71
Jumlah Total (1+2+3)				
Total Target		33.806.409.842,00	0,00	33.806.409.842,00
Total Realisasi		33.062.068.550,00	0,00	33.062.068.550,00
%		97,80	0,00	97,80

E. Dukungan Personil

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 2.102.

Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	Rincian ASN		
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	7	1	5	1

F. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan :

1. Dalam penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dalam pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Cirebon kurang adanya dukungan penganggaran.

Solusi :

1. Alokasi anggaran pada program Kegiatan untuk pencapaian SPM Penyediaan Air Minum dan Sanitasi disesuaikan dengan target yang akan dicapai dalam setiap tahunnya.

2.1.5.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

B. Target dan Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut merupakan target dan indikator pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.103. Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyediaan dan rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 % (10 Orang)	Tahun 2024	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	10	Rumah	100 %	Tahun 2024	
					2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	Rumah			
					3. Pemukiman Kembali bagi korban bencana	0	Rumah			
					4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	Rumah			
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0 % (0 Orang)	Tahun 2024	Tidak ada relokasi program pemerintah	-	-	100 %	Tahun 2024	

C. Realisasi

Berikut merupakan hasil pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:

Tabel 2.104. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Targe t	Realisas i	Capaian (%)	Targe t	Realisas i	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kategori Indeks Pencapaian SPM								100.00	Tuntas Paripurna
1.	Penyediaan & Rehabitiati Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana								100.00	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Ruma h	10	10	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							100		
	1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				10	10	100		
	2. Pembangunan kembaliu rumah bagi korban bencana	Rumah				0	0	100		
	3. Pemukiman Kembali bagi korban bencana	Rumah				0	0	100		
	4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah				0	0	100		

No .	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Targe t	Realisas i	Capaian (%)	Targe t	Realisas i	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								100	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Ruma h	0	0	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM							100		

Keterangan :

- Di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2024 tidak ada Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga tidak ada pelaksanaan pelayanan dasar SPM tersebut.

D. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.105.
Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sumber Dana / OPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	APBD Kabupaten Cirebon Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
	Target	130.097.500,00	0,00	130.097.500,00
	Realisasi	78.507.290,00	0,00	78.507.290,00
	%	60,35	0,00	60,35
2	APBD Provinsi			
	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00
3	APBN			
	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00
Jumlah Total (1+2+3)				
Total Target		130.097.500,00	0,00	130.097.500,00
Total Realisasi		78.507.290,00	0,00	78.507.290,00
%		60,35	0,00	60,35

E. Dukungan Personil

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Tabel 2.106.

**Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Cirebon Tahun 2024**

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	Rincian ASN		
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	6	1	1	4
TOTAL		6	1	1	4

F. Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan :

- 1) Ketersediaan anggaran yang masih minim untuk Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat;
- 2) Keterbatasan lahan untuk pelaksanaan program relokasi;
- 3) Pelaksanaan program perumahan rakyat seringkali terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- 4) Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya standar perumahan yang layak, seperti sanitasi yang baik, akses air bersih dan ventilasi yang cukup;
- 5) Belum ada regulasi untuk kegiatan relokasi;
- 6) Kurangnya data dan informasi yang akurat dan terintegrasi mengenai kondisi perumahan rakyat dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif.

Solusi :

- 1) Mengkaji ulang Peraturan Tata Ruang untuk memungkinkan pemanfaatan lahan yang lebih optimal bagi perumahan rakyat;
- 2) Melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas dalam menyebarkan informasi dan menggerakkan partisipasi masyarakat;
- 3) Merumuskan regulasi dan kebijakan yang komprehensif tentang relokasi, yang mencakup aspek perencanaan, pendanaan, pelaksanaan dan pengawasan;

- 4) Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga melalui forum-forum diskusi, pertemuan rutin, dan sistem informasi yang terintegrasi;
- 5) Membentuk tim koordinasi antar lembaga yang bertugas untuk Menyusun rencana aksi, memantau pelaksanaan program dan menyelesaikan permasalahan yang muncul.

2.1.5.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ialah sebagai berikut:

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara.
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran.

B. Target dan Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut merupakan target dan indikator pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Tabel 2.107.
Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100% (137 Orang)	Tahun 2024	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	3	Unit	100%	Tahun 2024	
					2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*	12	Dokumen			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)					
					3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	115	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)					
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	Dokumen			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	137	Orang			
					6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	5	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100% (361 Orang)	Tahun 2024	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	1 0	Dokumen Orang	100%	Tahun 2024	
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) 4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	360 0	Orang Unit			
3.	Pelayanan pencegahan	Jumlah Warga Negara yang		Tahun 2024	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	15	Unit	100%	Tahun 2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100% (76 Orang)		(seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi dll)					
					2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	61	Orang			
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100% (190.279 Orang)	Tahun 2024	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	0	Posko	100%	Tahun 2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	190.275	Orang			
					3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	3	Dokumen			
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	Layanan			
					5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	Layanan			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100% (140 Orang)	Tahun 2024	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	140	Layanan	100%	Tahun 2024	
					2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	7	Dokumen			
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	40	Unit			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	206	Orang			
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	1	Layanan			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	1	Layanan			

C. Realisasi

Berikut merupakan hasil pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Tabel 2.108.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total Capaian Trantibumlinmas								96,36	Tuntas Utama
	Kategori Pencapaian Trantibum								100	Tuntas Paripurna
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)								100	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	137	137	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							100		

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit				3	3	100		
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen				12	12	100		
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	Orang				115	115	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)									
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	Dokumen				1	1	100		
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	Orang				137	137	100		
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan	Orang				5	5	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)									
	Kategori Pencapaian Kebencanaan								94	Tuntas Utama
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)								90	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	361	361	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							10		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							50		
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen				1	1	100		
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang				0	0	0		
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	Orang				360	360	100		

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit				0	0	0		
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)								100	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani		76	76	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							100		
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	Unit				15	15	100		
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	Orang				61	61	100		
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)								92	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					

No	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	190.279	190.279	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							12		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							60		
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	Posko				0	0	0		
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Orang				190.275	190,275	100		
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	Dokumen				3	3	100		
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil)	Layanan				0	0	0		
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	Layanan				1	1	100		
	Kategori Pencapaian Damkar								95,07	Tuntas Utama

No .	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)								95,07	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Layanan	140	140	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							15,07		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							75,36		
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	Layanan				140	128	91,43		
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	Dokumen				7	6	85,71		
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit				40	10	25		

No .	Jenis Pelayanan Dasar (Spm Kab/Kota)	Satuan	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian Spm (%)	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	9	4	5	6	7	8	9	10	11
	(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)									
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	Orang				206	103	50		
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	Layanan				1	1	100		
	6. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	Layanan				1	1	100		

D. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Tabel 2.109.
Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sumber Dana / OPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	APBD Kabupaten Cirebon Satpol PP			
	Target	8.610.818.000,00	0,00	8.610.818.000,00
	Realisasi	7.342.524.520,00	0,00	7.342.524.520,00
	%	85,27	0,00	85,27
2	APBD Kabupaten Cirebon Dinas BPBD			
	Target	2.288.598.500,00	0,00	2.288.598.500,00
	Realisasi	2.127.475.600,00	0,00	2.127.475.600,00
	%	92,96	0,00	92,96
3	APBD Kabupaten Cirebon Dinas Damkar			
	Target	4.939.834.000,00	0,00	4.939.834.000,00
	Realisasi	4.708.386.452,00	0,00	4.708.386.452,00
	%	95,31	0,00	95,31
Jumlah Total (1+2+3)				
Total Target		15.839.250.500,00	0,00	15.839.250.500,00
Total Realisasi		14.178.386.572,00	0,00	14.178.386.572,00
%		89,51	0,00	89,51

E. Dukungan Personil

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai standar pelayanan minimal urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Tabel 2.110.
Dukungan Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	Rincian ASN		
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan
1	Satuan Polisi Pamong Praja	52	12	29	11
2	BPBD	20	5	8	7
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	77	10	13	54
TOTAL		149	27	50	72

F. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan SPM Urusan Kebencanaan;
2. Minimnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang memadai (jenis, jumlah dan kondisi);
3. Minimnya jumlah aparaturnya pemadam kebakaran dan penyelamatan;
4. Keterbatasan personil dengan perbandingan luas wilayah dan volume permasalahan yang dihadapi.

Solusi :

- 1) Melakukan penambahan personil dalam pelaksanaan SPM Urusan Kebencanaan;
- 2) Mengoptimalkan penggunaan sarana prasarana yang ada karena kondisi dan

permasalahan di lapangan yang semakin bertambah;

- 3) Dukunga anggaran yang memadai;
- 4) Pelatihan Bimtek terkait tupoksi ;
- 5) Membagi aparatur dalam tiga regu yang masing-masing regu bertugas selama 24 Jam (jumlah anggota bervariasi setiap regu/ kurang ideal).

2.1.5.6. Urusan Sosial

A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada urusan sosial ialah sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti.
- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kabupaten Dengan indikator pencapaian Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

B. Target dan Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berikut merupakan target dan indikator pencapaian SPM sosial.

Tabel 2.111. Target dan Indikator Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	211	Orang	100%	Tahun 2024	
			(211 Orang)		2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	64	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	36	Orang			
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	35	Orang			
					5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	86	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	36	Orang			
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	136	Orang			
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian	80	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta					
					masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	4	Orang			
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	1	Orang			
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	32	Orang			
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga	24	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
					13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	8	Orang			
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% (56 Orang)	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	56	Orang	100%	Tahun 2024	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	6	Orang			
					3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	4	Orang			
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	53	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	4	Orang			
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	56	Orang			
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh	54	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	Orang			
					9. Akses ke layanan pendidikan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	4	Orang			
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	6	Orang			
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan	4	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
					12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	2	Orang			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100% (115 Orang)	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan	115	Orang	100%	Tahun 2024	
					menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan,dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanjar)	12	Orang			
					3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	112	Orang			
					4. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	9	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	2	Orang			
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	11	Orang			
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima	101	Orang			
					pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)					
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	10	Orang			
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	0	Orang			
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	10	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlanter untuk tujuan reunifikasi)	11	Orang			
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlanter dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	9	Orang			
					13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlanter yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	2	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100% (36 Orang)	Tahun 2024	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	36	Orang	100%	Tahun 2024	
					2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau	6	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	6	Orang			
					4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	6	Orang			
					5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang	6	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)					
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	6	Orang			
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan	5	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)					
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	Orang			
					9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	6	Orang			
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	6	Orang			
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan	5	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)					
					12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	1	Orang			
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100% (1.667 Orang)	Tahun 2024	1. Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	1.667	Orang	100%	Tahun 2024	
					2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa,	1.000	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)					
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	9	Unit			
					4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1.000	Orang			
					5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu,	0	Orang			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar					
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Jumlah	Satuan	Target	Batas Waktu Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)					

C. Realisasi

Berikut merupakan hasil pencapaian SPM Urusan Sosial.

Tabel 2.112. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kategori Indeks Pencapaian SPM								98,22	Tuntas Utama
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti								100	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	211	211	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							20		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM							100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang				211	211	100		
	2. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/ orang/hari)	Orang				64	64	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	Orang				36	36	100		
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				35	35	100		
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang				86	86	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				32	32	100		
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym ; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah	Orang				136	136	100		
	psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat									

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				80	80	100		
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				4	4	100		
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang				1	1	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)									
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang				32	32	100		
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang				24	24	100		
	13.Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				8	8	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti									
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	56	56	100					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							18,33		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							91,67		
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang				56	56	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	Orang				6	6	100		
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	Orang				4	4	100		
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang				53	53	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				4	4	100		
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan	Orang				56	56	100		
	meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/ gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)									

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang				54	54	100		
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				0	0	0		
	9. Akses ke layanan pendidikan Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				4	4	100		
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak)	Orang				6	6	100		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	terlantar untuk tujuan reunifikasi)									
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang				4	4	100.00		
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				0	0	0.00		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti								98.4	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80.00				6	
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	570	570	100.00					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							18.46		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							92.31		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang				570	570	100.00		
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar)	Orang				17	17	100.00		
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang	Orang				488	488	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permukiman/orang/hari)									
	4. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang				72	72	100.00		
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang				27	27	100.00		
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang				17	17	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	Orang				17	17	100.00		
	agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat									
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang				45	45	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di									
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang				0	0	0.00		
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	Orang				17	17	100.00		
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang				17	17	100.00		
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				15	15	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)									
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				2	2	100.00		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti								8 98.1	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80.00					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	59	59	100.00					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							18.18		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa /SDM							90.91		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang				59	59	100.00		
	2. Penyediaan sandang	Orang				29	29	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)									
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				29	29	100.00		
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang				29	29	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)									
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma	Orang				29	29	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym ; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang				59	59	100.00		
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang				28	28	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di dan/atau di									
	lingkungan keluarga/masyarakat) difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)									
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				0	0	0.00		
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang				29	29	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)									
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang				29	29	100.00		
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang				29	29	100.00		
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang				0	0	0.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan sosial								96.00	
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)				80.00					
	A. Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	1.930	1.930	100.00					
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)							16.00		
	B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM							80.00		
	1. Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang				1.930	1.930	100.00		
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa,	Orang				75	75	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)									
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur,	Unit				9	9	100.00		
	dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)									
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus	Orang				210	210	100.00		

No	Jenis Layanan Dasar	Satuan	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian Spm	Kategori
			Jumlah Klaim Luar Panti	Populasi Di Daerah Kabupaten Kota Yang Membutuhkan Rehabsos Luar Panti	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)									
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang				0	0	0.00		

D. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial tentu saja membutuhkan anggaran untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian anggaran yang dialokasikan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

Tabel 2.113.
Anggaran Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Sumber Dana / OPD	Anggaran (Rp)		Total
		Belanja Operasi	Belanja Modal	
1	APBD Kabupaten Cirebon Dinas Sosial			
	Target	1.254.666.900,00	0,00	1.254.666.900,00
	Realisasi	1.126.116.020,00	0,00	1.126.116.020,00
	%	89,75	0,00	89,75
2	APBD Provinsi			
	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00
3	APBN			
	Target	0,00	0,00	0,00
	Realisasi	0,00	0,00	0,00
	%	0,00	0,00	0,00
Jumlah Total (1+2+3)				
Total Target		1.254.666.900,00	0,00	1.254.666.900,00
Total Realisasi		1.126.116.020,00	0,00	1.126.116.020,00
%		89,75	0,00	89,75

E. Dukungan Personil

Untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial tentu saja membutuhkan dukungan personil untuk pelaksanaannya. Berikut merupakan rincian dukungan personil untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

Tabel 2.114.
Dukungan Personil Penunjang Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Jml ASN	Rincian ASN		
			Struktural	Fungsional	Pelaksanaan
1	Dinas Sosial	15	4	9	2
TOTAL		15	4	9	2

F. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala, permasalahan :

1. Tidak semua mutu layanan pada SPM dilaksanakan karena kurangnya perencanaan yang matang, keterbatasan anggaran, serta memang mutu layanan tersebut memang benar-benar tidak ada datanya;
2. Keterbatasan SDM terutama tenaga fungsional/ relawan yang terampil.

Solusi :

- 1) Membuat rencana kenaikan anggaran pagu kegiatan pelaksanaan SPM;
- 2) Adanya usulan/ masukan untuk pimpinan agar memfasilitasi rapat/ pembahasan kerjasama antara struktural dan fungsional sehingga keduanya bisa saling mengisi dan berkontribusi;
- 3) Adanya inovasi untuk mengambil sub kegiatan SPM yang lainnya sehingga bisa mengisi jenis layanan spm yang kosong.

2.1.5.7. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Tabel 2.115. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait Dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
A. URUSAN PENDIDIKAN					490.336.316.697,00	483.581.667.203,00	98,62
1	Pendidikan Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan			316.420.075.300,00	313.122.873.293,00	98,96
			1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	316.420.075.300,00	313.122.873.293,00	98,96
			1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.915.229.400,00	2.853.563.989,00	97,88
			1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.869.904.000,00	2.819.467.870,00	98,24
			1.3	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	17.519.748.200,00	17.145.227.075,00	97,86
			1.4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	871.231.000,00	859.618.771,00	98,67
			1.5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.188.202.000,00	1.171.453.,695,00	98,59
			1.6	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	7.599.210.900,00	7.404.626.100,00	97,44

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1.7	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	35.580.643.800,00	34.501.644.200,00	96,97
			1.8	Sub Kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	258.545.500,00	248.446.600,00	96,09
			1.9	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah https://spm.bangda.kemendagri.go.id/Menengah Pertama	1.055.356.000,00	698.557.920,00	66,19
			1.10	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	29.560.000,00	29.560.000,00	100
			1.11	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	191.344.776.000,00	191.344.776.000,00	100
			1.12	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	168.921.000,00	168.801.120,00	99,93
			1.13	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	92.883.400,00	92.773.240,00	99,88
			1.14	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	12.767.677.000,00	12.501.939.151,00	97,92
			1.15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	42.158.187.100,00	41.282.417.562,00	97,92

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			2	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	129.328.384.900,00	128.378.648.163,00	99,27
			2.1	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	302.220.945,00	292.173.596,00	96,68
			2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.110.209.200,00	1.094.835.180,00	98,62
			2.3	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	20.884.933.052,00	20.574.415.281,00	98,51
			2.4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	200.000.000,00	195.132.423,00	97,57
			2.5	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	800.000.000,00	788.867.179,00	98,61
			2.6	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	427.000.003,00	420.340.867,00	98,44
			2.7	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	800.706.300,00	718.797.600,00	89,77
			2.8	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	7.000.000.000,00	6.740.500.000,00	96,29
			2.9	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	396.993.000,00	286.718.000,00	72,22

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			2.9	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	141.849.000,00	128.838.840,00	90,83
			2.10	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	94.559.911.500,00	94.559.911.500,00	100
			2.11	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	89.346.000,00	88.955.760,00	99,56
			2.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	361.771.000,00	265.088.260,00	73,28
			2.13	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	940.000.000,00	924.898.271,00	98,39
			2.14	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	600.984.900,00	596.100.000,00	99,19
			2.15	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	712.460.000,00	703.075.406,00,00	98,68
2	Pendidikan Dasar Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan			26.357.026.800,00	24.348.497.162	92,38

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1	Kegiatan Pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26.357.026.800,00	24.348.497.162	92,38
			1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.856.756.000,00	1.851.584.175,00	99,72
			1.2	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	520.000.000,00	520.000.000,00	100
			1.3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	35.150.300,00	29.450.400,00	83,78
			1.4	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	94.721.700,00	88.782.000,00	93,73
			1.5	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	134.888.800,00	133.657.800,00	99,09
			1.6	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	22.850.710.000,00	20.863.174.274,00	91,3
			1.7	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	31.600.000,00	31.600.000,00	100

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1.8	Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	41.950.000,00	40.950.000,00	97,62
			1.9	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	620.000.000,00	618.574.673,00	99,77
			1.10	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	171.250.000,00	170.723.840,00	99,69
3	Pendidikan Kesetaraan	Program Pengelolaan Pendidikan			18.203.529.700,00	17.704.348.585,00	97,26
			1	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	18.203.529.700,00	17.704.348.585,00	97,26
			1.1	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	79.828.500,00	79.828.500,00	100
			1.2	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	512.802.600,00	512.802.600,00	100
			1.3	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	15.215.160.000,00	14.738.940.000,00	96,87

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1.4	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	562.537.000,00	547.457.220,00	97,32
			1.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.833.201.600,00	1.825.320.265,00	99,57
		Program Pengembangan Kurikulum			27.300.000,00	27.300.000,00	100
			1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	27.300.000,00	27.300.000,00	100
			1.1	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	27.300.000,00	27.300.000,00	100
B. URUSAN KESEHATAN					482.992.318.454,00	399.363.834.787,00	82,69
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	12.643.988.250,00	12.209.456.332,00	96,56
			1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.482.979.400,00	2.332.427.088,00	93,94

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		2.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	508.046.300,00	488.432.744,00	96,14
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		3.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	229.909.700,00	228.468.400,00	99,37
4	Pelayanan kesehatan balita		4.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	9.150.000,00	9.150.000,00	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		5.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	626.421.900,00	614.181.900,00	98,05
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		6.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	112.023.400,00	108.703.000,00	97,04
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		7.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	278.882.200,00	278.582.200,00	99,89

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		8.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	1.039.233.300,00	1.033.423.500,00	99,44
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		9.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.027.379.100,00	3.025.705.200,00	99,94
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		10.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	70.377.500,00	68.817.500,00	97,78
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		11.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.213.173.700,00	2.156.109.800,00	97,42
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia		12.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.046.411.750,00	1.865.455.000,00	91,16

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
12	(Human Immunodeficiency Virus)						
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	454.557.230.264,00	372.905.098.647,00	82,04
			1.1	Ub Kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	454.557.230.264,00	372.905.098.647,00	82,04
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	13.149.828.240,00	12.324.945.494,00	93,73

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1.1	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.149.828.240,00	12.324.945.494,00	93,73
			2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.641.271.700,00	1.924.334.314,00	72,86
			2.1	Sub Kegiatan Operasional Rumah Sakit	2.641.271.700,00	1.924.334.314,00	72,86
C. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					33.806.409.842,00	33.062.068.550,00	97,8
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			22.109.713.842,00	21.413.653.950,00	96,85
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/			

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1	Kota	22.109.713.842,00	21.413.653.950,00	96,85
			1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	209.848.000,00	207.016.190,00	98,65
			1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.179.696.000,00	2.175.443.580,00	99,8
			1.3	Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	77.696.000,00	74.483.880,00	95,87
			1.4	Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	19.642,473.842,00	18.956.710.300,00	96,51
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			11.696.696.000,00	11.648.414.600,00	99.59

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.696.696.000,00	11.648.414.600,00	99,59
			1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	11.437.152.000,00	11.410.736.320,00	99,77
			1.2	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	259.544.000,00	237.678.280,00	91,58
D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					130.097.500,00	78.507.290,00	60,34
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Program Pengembangan Perumahan			130.097.500,00	78.507.290,00	60,34

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		1	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	130.097.500,00	78.507.290,00	60,34
			1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	55.097.500,00	47.395.850,00	86,02
			1.2	Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	75.000.000,00	31.111.440,00	41,48
E. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT					15.839.250.500,00	14.178.386.572,00	89,51
E.1. SUB BIDANG TRANTIBUM					8.610.818.000,00	7.342.524.520,00	85,27
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			8.610.818.000,00	7.342.524.520,00	85,27
			1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenraman dan ketertiban Umum	7.016.041.600,00	5.837.519.590,00	83,2

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
				dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
			1.1	Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.618.283.900,00	945.384.200,00	58,42
			1.2	Sub Kegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	203.080.000,00	196.380.000,00	96,7
			1.3	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	111.478.400,00	111.478.400,00	100
			1.4	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	102.816.300,00	84.177.100,00	81,87
			1.5	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.207.509.700,00	2.993.509.470,00	93,33

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1.6	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	1.772.873.300,00	1.506.590.820,00	84,98
			2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota	1.594.776.400,00	1.505.004.930,00	94,37
			2.1	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	574.268.500,00	541.109.280,00	94,23
			2.2	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	1.020.507.900,00	963.895.650,00	94,45
E.2. SUB BIDANG KEBENCANAAN					2.288.598.500,00	2.127.475.600,00	92,96
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana			37.456.200,00	37.456.200,00	100
			1	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	37.456.200,00	37.456.200,00	100
			1.1	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	37.456.200,00	37.456.200,00	100

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana			1.787.165.600,00	1.629.382.100,00	91,17
			1	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.787.165.600,00	1.629.382.100,00	91,17
			1.1	Sub Kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	359.316.000,00	359.316.000,00	100
			1.2	Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	61.987.500,00	49.987.500,00	80,64
			1.3	Sub Kegiatan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	41.521.100,00	41.521.100,00	100
			1.4	Sub Kegiatan Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	100.000.000,00	97.735.500	97,74
			1.5	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	6.603.000,00	6.603.000,00	100
			1.6	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000,00	99.986.000,00	99,99

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			1.7	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.117.738.000,00	974.233.000,00	87,16
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program Penanggulangan Bencana			304.614.900,00	304.025.500,00	99,81
			1	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	304.614.900,00	304.025.500,00	99,81
			1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	304.614.900,00	304.025.500,00	99,81
			2	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	159.361.800,00	156.611.800,00	98,27
			2.1	Sub Kegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	90.290.000,00	90.290.000,00	100
			2.2	Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	69.071.800,00	66.321.800,00	96,02

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
E.2. SUB BIDANG DAMKAR					4.939.834.000,00	4.708.386.452,00	95,31
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			4.939.834.000,00	4.708.386.452,00	95,31
			1	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.263.729.800,00	4.044.727.252,00	94,86
			1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	689.728.900,00	666.711.300,00	99.66
			1.2	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.767.429.200,00	3.757.605.200,00	99.74
			1.3	Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	379.952.900,00	379.833.900,00	99.75
			1.4	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	200.000.000,00	198.468.000,00	99.23

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
			2	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	103.649.800,00	103.649.800,00	100
			2.1	Sub Kegiatan Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	69.749.900,00	69.749.900,00	100
			2.2	Sub Kegiatan Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	33.899.900,00	33.899.900,00	100
			3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	379.445.000,00	379.445.000,00	100
			3.1	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	58.882.000,00	58.882.000,00	100
			3.2	Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	320.563.000,00	320.563.000,00	100
			4	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	193.009.400,00	180.564.400,00	93,55
			4.1	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa,	97.524.900,00	97.524.900,00	100

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
				Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia			
			4.2	Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	95.484.500,00	83.039.500,00	86,97
F. URUSAN SOSIAL					1.254.666.900,00	1.126.116.020,00	89,75
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial			871.118.800,00	862.547.920,00	99,02
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	871.118.800,00	862.547.920,00	99,02
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti		1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	173.111.800,00	172.106.400,00	99,42
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna		1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	172.433.400,00	172.148.400,00	99,83

NO	URUSAN /JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN SPM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti						
			1.3	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	70.863.500,00	70.863.500,00	100
			1.4	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	73.338.400,00	72.058.400,00	98,25
			1.5	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	381.371.700,00	375.371.220,00	98,43
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Program Penanganan Bencana			383.548.100,00	263.568.100,00	68,72
			1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	383.548.100,00	263.568.100,00	68,72
			1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	383.548.100,00	263.568.100,00	68,72
TOTAL					1.024.359.059.893,00	931.390.580.422,00	90,92

Sumber : Perangkat Daerah Pengampu SPM pada Kabupaten Cirebon dan Aplikasi e SPM Bangda Kemendagri Tw 4 Tahun 2024.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai dengan Tahun 2025 dan dan Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2019-2024

Pada penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD periode sebelumnya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan sebagaimana format yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa RKPD Kabupaten Cirebon telah disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD.

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai dengan Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun kelima dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut tetap dapat memberikan informasi penting mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Triwulan II diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Tabel 2.116

Tingkat Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025
sampai dengan Triwulan II

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	DINAS PENDIDIKAN	4	15	151	1.621.089.765.119,00	346.016.510.355,00	21,34	Sangat Rendah	89,20	Tinggi	0,00	Sangat Rendah	4,14	Sangat Rendah
2	DINAS KESEHATAN	5	24	111	1.080.434.791.759,00	413.156.966.681,00	38,24	Sangat Rendah	79,75	Tinggi	4,12	Sangat Rendah	61,85	Rendah
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	11	24	73	267.459.485.137,00	39.811.991.637,00	14,89	Sangat Rendah	6,43	Sangat Rendah	15,61	Sangat Rendah	21,70	Sangat Rendah
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9	20	51	21.855.012.000,00	4.797.328.248,00	21,95	Sangat Rendah	14,28	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	25,51	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	9	35	16.475.768.600,00	7.418.539.865,00	45,03	Sangat Rendah	49,90	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	26,16	Sangat Rendah
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	11	39	21.230.697.590,00	7.711.600.647,00	36,32	Sangat Rendah	94,88	Sangat Tinggi	0,00	Sangat Rendah	35,74	Sangat Rendah
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	12	59	13.686.929.350,00	2.836.409.753,00	20,72	Sangat Rendah	49,98	Sangat Rendah	40,17	Sangat Rendah	21,31	Sangat Rendah
8	DINAS SOSIAL	6	16	55	16.076.594.834,00	4.744.898.560,00	29,51	Sangat Rendah	33,41	Sangat Rendah	35,63	Sangat Rendah	35,26	Sangat Rendah
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	20	55	46.002.029.740,00	15.711.495.263,00	34,15	Sangat Rendah	37,58	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	20,25	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	17	42	13.914.226.896,00	4.129.768.774,00	29,68	Sangat Rendah	93,37	Sangat Tinggi	9,53	Sangat Rendah	33,38	Sangat Rendah
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	12	70	15.702.483.762,00	6.527.586.857,00	41,57	Sangat Rendah	30,94	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	14,46	Sangat Rendah
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	30	98	45.674.835.400,00	13.508.150.011,00	29,57	Sangat Rendah	69,66	Sedang	27,03	Sangat Rendah	33,04	Sangat Rendah
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	23	112	71.971.354.070,00	34.403.147.880,00	47,80	Sangat Rendah	37,90	Sangat Rendah	28,91	Sangat Rendah	15,21	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	13	55	15.798.413.848,00	7.819.424.584,00	49,49	Sangat Rendah	83,01	Tinggi	18,59	Sangat Rendah	35,67	Sangat Rendah
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	16	62	6.007.275.552,00	1.855.401.698,00	30,89	Sangat Rendah	39,74	Sangat Rendah	9,67	Sangat Rendah	20,52	Sangat Rendah
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	14	44	8.611.083.518,00	4.180.870.007,00	48,55	Sangat Rendah	39,18	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	25,88	Sangat Rendah
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	4	15	49	20.075.979.200,00	7.198.395.790,00	35,86	Sangat Rendah	45,17	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	42,36	Sangat Rendah
18	DINAS KEBUDAYAAN	9	22	60	13.287.767.518,00	4.318.843.609,00	32,50	Sangat Rendah	22,22	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	34,28	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	DAN PARIWISATA													
19	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	17	45	14.852.707.018,00	6.620.290.086,00	44,57	Sangat Rendah	14,86	Sangat Rendah	14,19	Sangat Rendah	16,47	Sangat Rendah
20	DINAS KETENAGAKERJAAN	6	20	49	18.587.554.460,00	5.775.700.282,00	31,07	Sangat Rendah	37,06	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	32,17	Sangat Rendah
21	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	9	25	82	15.699.391.010,00	4.818.705.750,00	30,69	Sangat Rendah	14,07	Sangat Rendah	28,82	Sangat Rendah	22,54	Sangat Rendah
22	DINAS PERTANIAN	5	16	51	58.198.380.452,00	19.554.263.600,00	33,60	Sangat Rendah	41,16	Sangat Rendah	4,68	Sangat Rendah	35,08	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	21	54	24.086.646.648,00	8.826.255.534,00	36,64	Sangat Rendah	27,43	Sangat Rendah	16,35	Sangat Rendah	17,51	Sangat Rendah
24	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	71	96.017.472.923,00	40.352.552.845,00	42,03	Sangat Rendah	88,53	Tinggi	0,00	Sangat Rendah	38,67	Sangat Rendah
25	SEKRETARIAT DPRD	2	16	51	91.753.989.300,00	40.220.339.481,00	43,83	Sangat Rendah	47,02	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	41,64	Sangat Rendah
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	16	63	14.766.446.464,00	5.377.647.682,00	36,42	Sangat Rendah	38,49	Sangat Rendah	15,19	Sangat Rendah	41,45	Sangat Rendah
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	75	745.437.752.572,00	124.942.319.719,00	16,76	Sangat Rendah	35,03	Sangat Rendah	26,60	Sangat Rendah	36,40	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	9	49	35.643.493.140,00	12.752.221.263,00	35,78	Sangat Rendah	50,00	Sangat Rendah	13,56	Sangat Rendah	30,29	Sangat Rendah
29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	68	27.146.543.740,00	10.672.220.672,00	39,31	Sangat Rendah	86,77	Tinggi	0,00	Sangat Rendah	25,09	Sangat Rendah
30	INSPEKTORAT	3	12	45	41.064.986.800,00	18.300.940.738,00	44,57	Sangat Rendah	77,28	Tinggi	59,68	Rendah	52,84	Rendah
31	KECAMATAN WALED	6	16	43	2.712.663.800,00	1.217.530.563,00	44,88	Sangat Rendah	33,41	Sangat Rendah	32,83	Sangat Rendah	27,03	Sangat Rendah
32	KECAMATAN CILEDUG	6	16	43	2.878.524.420,00	1.202.651.559,00	41,78	Sangat Rendah	35,44	Sangat Rendah	55,51	Rendah	59,58	Rendah
33	KECAMATAN LOSARI	6	16	40	2.473.671.100,00	1.276.002.608,00	51,58	Rendah	50,29	Rendah	43,90	Sangat Rendah	35,13	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	KECAMATAN PABEDILAN	6	16	42	2.947.649.400,00	1.277.229.369,00	43,33	Sangat Rendah	38,56	Sangat Rendah	47,71	Sangat Rendah	21,99	Sangat Rendah
35	KECAMATAN BABAKAN	6	16	40	2.605.937.200,00	1.167.083.164,00	44,79	Sangat Rendah	46,13	Sangat Rendah	30,95	Sangat Rendah	30,73	Sangat Rendah
36	KECAMATAN GEBANG	6	16	40	2.732.932.460,00	1.329.504.738,00	48,65	Sangat Rendah	54,88	Rendah	62,50	Rendah	33,63	Sangat Rendah
37	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	6	16	41	2.378.495.600,00	1.047.468.790,00	44,04	Sangat Rendah	46,33	Sangat Rendah	43,65	Sangat Rendah	33,94	Sangat Rendah
38	KECAMATAN LEMAHABANG	6	16	45	2.599.691.800,00	1.097.210.968,00	42,21	Sangat Rendah	39,50	Sangat Rendah	48,10	Sangat Rendah	26,59	Sangat Rendah
39	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	6	16	40	2.542.575.500,00	1.097.542.263,00	43,17	Sangat Rendah	37,60	Sangat Rendah	45,76	Sangat Rendah	29,65	Sangat Rendah
40	KECAMATAN SEDONG	6	16	42	2.727.391.800,00	1.181.591.723,00	43,32	Sangat Rendah	50,76	Rendah	46,13	Sangat Rendah	31,63	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	KECAMATAN ASTANAJAPURA	6	16	43	2.717.648.700,00	1.121.235.087,00	41,26	Sangat Rendah	37,09	Sangat Rendah	35,64	Sangat Rendah	18,33	Sangat Rendah
42	KECAMATAN PANGENAN	6	16	41	2.375.806.000,00	1.033.635.462,00	43,51	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	13,00	Sangat Rendah	12,61	Sangat Rendah
43	KECAMATAN MUNDU	6	16	42	2.596.867.100,00	1.082.328.732,00	41,68	Sangat Rendah	64,83	Rendah	34,56	Sangat Rendah	24,01	Sangat Rendah
44	KECAMATAN BEBER	6	16	42	2.684.132.700,00	1.336.476.964,00	49,79	Sangat Rendah	68,25	Sedang	43,68	Sangat Rendah	31,35	Sangat Rendah
45	KECAMATAN TALUN	6	16	40	2.616.437.000,00	1.079.803.224,00	41,27	Sangat Rendah	37,64	Sangat Rendah	6,10	Sangat Rendah	11,38	Sangat Rendah
46	KECAMATAN SUMBER	6	18	57	25.962.679.570,00	9.078.592.075,00	34,97	Sangat Rendah	48,30	Sangat Rendah	6,02	Sangat Rendah	20,94	Sangat Rendah
47	KECAMATAN DUKUPUNTANG	6	16	42	2.475.493.520,00	1.179.154.960,00	47,63	Sangat Rendah	45,14	Sangat Rendah	47,73	Sangat Rendah	34,39	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
48	KECAMATAN PALIMANAN	6	16	42	2.466.127.300,00	1.132.236.884,00	45,91	Sangat Rendah	55,74	Rendah	18,01	Sangat Rendah	18,25	Sangat Rendah
49	KECAMATAN PLUMBON	6	16	41	2.470.599.220,00	1.098.499.537,00	44,46	Sangat Rendah	41,19	Sangat Rendah	13,02	Sangat Rendah	27,35	Sangat Rendah
50	KECAMATAN DEPOK	6	16	42	2.445.279.200,00	1.076.880.022,00	44,04	Sangat Rendah	46,31	Sangat Rendah	47,17	Sangat Rendah	30,56	Sangat Rendah
51	KECAMATAN WERU	6	16	40	2.451.299.100,00	1.219.676.807,00	49,76	Sangat Rendah	35,44	Sangat Rendah	36,46	Sangat Rendah	16,41	Sangat Rendah
52	KECAMATAN KEDAWUNG	6	16	41	2.146.603.700,00	944.114.812,00	43,98	Sangat Rendah	30,36	Sangat Rendah	26,49	Sangat Rendah	19,11	Sangat Rendah
53	KECAMATAN GUNUNGJATI	6	16	41	2.592.776.900,00	1.305.436.944,00	50,35	Rendah	45,60	Sangat Rendah	34,90	Sangat Rendah	31,46	Sangat Rendah
54	KECAMATAN KAPETAKAN	6	16	44	2.162.169.600,00	992.720.892,00	45,91	Sangat Rendah	46,90	Sangat Rendah	38,39	Sangat Rendah	9,52	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
55	KECAMATAN KLANGENAN	6	16	41	2.427.380.000,00	975.444.022,00	40,19	Sangat Rendah	79,55	Tinggi	55,78	Rendah	13,74	Sangat Rendah
56	KECAMATAN ARJAWINANGUN	6	16	41	2.981.609.600,00	1.457.140.017,00	48,87	Sangat Rendah	59,20	Rendah	52,83	Rendah	27,17	Sangat Rendah
57	KECAMATAN PANGURAGAN	6	16	40	2.144.224.500,00	1.033.574.497,00	48,20	Sangat Rendah	32,36	Sangat Rendah	68,75	Sedang	44,44	Sangat Rendah
58	KECAMATAN CIWARINGIN	6	16	42	2.552.981.000,00	1.156.855.732,00	45,31	Sangat Rendah	37,52	Sangat Rendah	24,26	Sangat Rendah	21,42	Sangat Rendah
59	KECAMATAN SUSUKAN	6	16	41	2.740.560.700,00	1.226.362.545,00	44,75	Sangat Rendah	26,82	Sangat Rendah	68,75	Sedang	49,11	Sangat Rendah
60	KECAMATAN GEGESIK	6	16	45	3.268.778.600,00	1.350.564.614,00	41,32	Sangat Rendah	50,00	Sangat Rendah	37,62	Sangat Rendah	25,00	Sangat Rendah
61	KECAMATAN KALIWEDI	6	15	40	2.572.154.800,00	1.090.520.815,00	42,40	Sangat Rendah	42,57	Sangat Rendah	18,00	Sangat Rendah	23,93	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	KECAMATAN KARANGWARENG	6	16	42	2.251.682.800,00	1.112.060.983,00	49,39	Sangat Rendah	50,05	Rendah	11,51	Sangat Rendah	18,41	Sangat Rendah
63	KECAMATAN TENGAH TANI	6	16	42	2.693.051.400,00	1.014.148.353,00	37,66	Sangat Rendah	32,46	Sangat Rendah	19,35	Sangat Rendah	21,23	Sangat Rendah
64	KECAMATAN GEMPOL	6	16	43	2.649.882.500,00	1.114.003.683,00	42,04	Sangat Rendah	40,18	Sangat Rendah	43,13	Sangat Rendah	27,85	Sangat Rendah
65	KECAMATAN PASALEMAN	6	16	42	2.806.354.400,00	1.272.321.072,00	45,34	Sangat Rendah	50,78	Rendah	54,84	Rendah	30,42	Sangat Rendah
66	KECAMATAN PLERED	6	16	42	2.668.438.996,00	1.282.868.634,00	48,08	Sangat Rendah	47,02	Sangat Rendah	39,88	Sangat Rendah	23,41	Sangat Rendah
67	KECAMATAN PABUARAN	6	16	41	2.216.327.200,00	943.527.899,00	42,57	Sangat Rendah	31,55	Sangat Rendah	28,13	Sangat Rendah	19,07	Sangat Rendah
68	KECAMATAN GREGED	6	16	36	2.516.061.200,00	1.108.966.264,00	44,08	Sangat Rendah	32,51	Sangat Rendah	14,58	Sangat Rendah	17,13	Sangat Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH			ANGGARAN				RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN KINERJA					
		PRG	KEG	SUBKEG	PAGU	REALISASI	(%)	Predikat	PRG		KEG		SUBKEG	
									(%)	Predikat	(%)	Predikat	(%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	KECAMATAN JAMBLANG	6	17	42	2.492.482.500,00	1.161.035.233,00	46,58	Sangat Rendah	46,91	Sangat Rendah	51,96	Rendah	31,80	Sangat Rendah
70	KECAMATAN SURANENGGA	6	16	42	2.938.081.800,00	1.231.968.746,00	41,93	Sangat Rendah	66,25	Sedang	38,44	Sangat Rendah	27,68	Sangat Rendah
71	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	82	19.119.691.200,00	6.521.875.673,00	34,11	Sangat Rendah	26,12	Sangat Rendah	0,00	Sangat Rendah	16,43	Sangat Rendah
TOTAL					4.644.413.054.306,00	1.284.988.634.800,00	40,26	Sangat Rendah	45,94	Sangat Rendah	26,12	Sangat Rendah	27,76	Sangat Rendah

Sumber: diolah dari Bappelitbangda-SIMONEK 2025

2.2.2. Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2019-2024

Pada perubahan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, terdapat indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mencerminkan komitmen untuk mewujudkan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Berikut disajikan realisasi capaian tujuan dan sasaran pada tahun 2019 data awal sampai dengan realisasi tahun 2022 serta target pada tahun 2023 dan 2024.

Tabel 2.117

Realisasi dan Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2019-2024

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan ketahanan budaya masyarakat Cirebon		Persentase penambahan budaya daerah yang dilestarikan	Persen	81	82	83	84	85	86	82	84	84,15	86
	1	Meningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebon	Jumlah kelompok/komunitas kebudayaan yang aktif	Kelompok	255	232	257	258	259	260	267	258	239	239
2	Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)	Poin	68,69	69,61	69,93	70,42	71,01	71,59	69,99	70,92	71,81	72,3
	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,71	6,92	7,05	7,18	7,31	7,44	7,10	7,40	7,64	7,65
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,24	12,25	12,34	12,44	12,53	12,63	12,27	12,28	12,41	12,42
	2	Meningkatnya derajat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Poin	71,82	73,97	72,11	72,24	72,36	72,48	74,16	74,43	74,71	74,98

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		kesehatan Masyarakat												
3	Mewujudkan Kesejahteraan Sosial		Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan	Prosen	9,94	11,24	11,14	11,04	10,94	10,84	12,3	12,01	11,20	11,00
			Tingkat pengangguran terbuka	Prosen	10,28	11,52	11,12	10,70	10,3	7,15	10,38	8,11	7,65	6,74
			PDRB Per Kapita ADHB	Juta Rp	22,41	22,43	23,25	24,95	26,78	28,74	22,83	24,47	25,97	28,14
	1	Menurunnya jumlah kelompok masyarakat yang mengalami disfungsi sosial	Persentase Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Kabupaten Cirebon	Persen	1,5	1,5	1,7	1,9	2,1	2,3	1,99	1,50	1,72	2,65
	2	Meningkatnya Daya Saing Angkatan Kerja	Rasio Kesempatan Kerja	Persen	89,72	88,48	57,22	58,03	58,83	62,37	89,62	91,89	92,35	93,26

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
4	Meningkatkan keshalehan sosial dalam kehidupan beragama		Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	75	78	81	84	87	90	80	81	87	88
	1	Meningkatnya penyelesaian pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama	Persentase Penyelesaian Friksi / Gesekan Antar Umat Beragama	Persen	78	80	80	81	82	83	100	81	82	83
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Prosen	4,86	-1,08	4,38	4,61	4,84	5,08	2,47	4,09	4,85	5,83
			Indeks Gini	Poin	0,344	0,338	0,336	0,33	0,330	0,339	0,355	0,361	0,374	0,374
			Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Kapita/Tahun	10.670	10.342	10.606	10.891	11.198	11.529	10.368	10.791	11.128	11.529
	1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Prosen	-1,03	1,74	1,86	2,08	2,31	2,54	-0,09	4,00	-2,13	0,12

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	sektor unggulan		Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Prosen	3,40	-1,15	3,08	3,74	4,41	5,07	2,56	4,69	5,38	5,87
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Prosen	4,62	-7,00	5	5,25	5,50	5,75	3,32	2,30	2,02	2,54
			Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Prosen	5,47	-9,54	4,33	4,63	4,93	5,23	-1,07	7,67	7,64	2,20
	2	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Prosen	89,9	91,5	93,30	93,90	94,40	95,00	94,80	96,3	94,8	95,5
			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Poin	71,17	71,44	71,73	72,01	72,30	72,59	73,32	75,54	72,32	72,64

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	3	Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah	Indeks pembangunan infrastruktur wilayah yang mantap (baik)	Poin	77,99	79,89	79,46	80,20	80,93	81,67	79,43	86,53	88,31	89,74
	4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	51,78	53,38	52,67	52,76	52,84	52,92	54,39	57,09	56,96	54,44
6	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan otonomi Desa		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,58	55	60	65	70	75	56,81	56,18	67,83	80,76
	1	Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Poin	3,25	3,27	3,3	3,35	3,4	3,50	3,33	3,34	3,37	3,418
			Indeks kemandirian fiskal daerah	Prosen	15,71	16,24	16,79	17,36	17,95	18,56	17,23	20,08	18,53	16,76
	2	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Poin	68	70	73	76	79	70	67,45	67,71	67,84	66,2

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
		akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP)	Poin	60	65	70	75	80	85	73	92	89	86
	3	Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Poin	2,63	2.78	2,93	3,08	3,23	3,38	1,91	2,66	3,07	3,61
	4	Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa	Jumlah desa mandiri	Desa	5	28	28	49	70	91	42	79	128	160
7	Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat		Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Prosen	n.a	53,05	56,09	64,12	70,59	77,50	56,09	64	70,41	52,19

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2019)	Realisasi (2020)	Target				Realisasi			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Jumlah pelanggaran Perda	Kasus (menurun)	n.a	403	398	393	388	383	389	388	378	257
	2	Menurunnya resiko bencana	Indeks resiko bencana	Poin (menurun)	165,44	160,08	154,72	149,36	144	138,64	147,51	156,58	144,56	133,04

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Substansi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang adalah memastikan berbagai persoalan dasar pembangunan dapat teridentifikasi dengan baik, dan *urgen* untuk ditangani selama periode RPJMD ke depan. Persoalan dasar sebagaimana dimaksud tidak hanya yang mengganggu pencapaian tujuan pembangunan saat ini, tetapi juga yang berpotensi menimbulkan permasalahan di waktu yang akan datang. Sedangkan perumusan isu strategis secara substansial bertujuan menghimpun berbagai hal penting, baik yang berupa permasalahan pembangunan, peluang dan tantangan masa depan menjadi rumusan kalimat yang jelas dan tegas, sehingga memastikan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Adapun rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang akan dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau adanya kesenjangan antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan pembangunan harus dapat menjelaskan permasalahan pokok yang dihadapi serta akar masalahnya. Hal ini menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Terdapat 4 (empat) aspek/kelompok permasalahan utama yang dibagi berdasarkan keempat aspek gambaran umum kondisi daerah, yaitu Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, dan Aspek Pelayanan Umum yang disajikan pada bagian berikutnya. Berbagai rumusan permasalahan pembangunan daerah tersebut dihasilkan dari Kertas Kerja Masalah-Akar Masalah sebagaimana disajikan berikut ini:

Tabel 2.118
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Aspek Geografi dan Demografi		
Belum Optimalnya Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkualitas	belum optimalnya kualitas lingkungan hidup	belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan
		Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan
		Masih tingginya pola BABS masyarakat melalui pemanfaatan sungai untuk kegiatan MCK
		Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair (IPAL) dan belum adanya IPLT
		Keterbatasan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah
		pengelolaan kawasan hutan belum optimal
ketahanan dan kemandirian pangan daerah belum terwujud	belum optimalnya penanganan ketahanan pangan	Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (Daya beli) dan Fisik
		Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen
		Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen
		Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
		Masih terdapat desa rentan rawan pangan
		Lahan pertanian yang sebelumnya seluas 51.000 Ha menjadi sekitar 48.000 Ha di dokumen RTRW tahun 2024-2044
Belum optimalnya mitigasi bencana	Tingginya risiko dan ancaman bencana	Kurangnya intensitas sosialisasi dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat, dunia usaha, maupun perangkat daerah.
		Persentase indeks risiko bencana meningkat di setiap tahun sehingga perlu adanya mitigasi bencana (SDG's)
		Peningkatan laju indeks risiko bencana daerah pada 5 tahun terakhir (SDG's)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	belum optimalnya penanganan bencana kebakaran	Belum terbangunya Gedung Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan yang Respresentatif
		Kurangnya Pos Sektor jaga cakupan ketersediaan Pos sektor jaga baru mencapai 25 %
		Belum Optimalnya sistem informasi dan komunikasi kebakaran (SKIK)
		Minimnya sarana dan prasarana pemadaman dan penanggulangan kebakaran
		terbatasnya personil pemadam kebakaran
Aspek Kesejahteraan Masyarakat		
Relatif tingginya kemiskinan	tidak mencukupinya kualitas sumber daya manusia	belum optimalnya akses terhadap pemenuhan layanan dasar, termasuk adanya keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan/atau pelayanan lainnya yang diselenggarakan pemerintah
		SDM Aparatur di perangkat Daerah sebagian belum profesional dalam merumuskan dan melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan
		Kurangnya keterampilan atau keahlian yang dimiliki oleh penduduk miskin untuk bersaing di peluang kerja di perusahaan atau di sektor formal
		Belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas yang miskin dan rentan dasarnya dan inklusivitas (SDG's)
	Data kemiskinan belum terpadu	Belum adanya data penduduk miskin dan miskin ekstrim yang valid dapat dipertanggungjawabkan by name by addres sebagai sasaran program penanggulangan kemiskinan
		Data penduduk miskin dan miskin ekstrim yang ada pada tiap dinas kadang berbeda datanya
	masih tingginya jumlah PPKS	belum optimalnya Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyerapan tenaga kerja	Belum efektifnya optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal	Belum optimalnya pengembangan kewirausahaan dan kompetensi/keterampilan angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar
		rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi
	belum optimalnya fasilitasi pemerintah daerah untuk menciptakan tenaga kerja terdidik dan terlatih	kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
		minimnya pelibatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
Kemandirian ekonomi daerah belum terwujud	Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian	sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja
		Belum optimalnya hilirisasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah
		Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah
		Masih rendahnya pengembangan kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditi pertanian
		Produksi ikan mengalami penurunan
		Kurangnya pemahaman terhadap teknologi perikanan
		Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung di sektor pertanian (SDG's)
	Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing	Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor pertanian (SDG's)
		Belum efektifnya pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Cirebon
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal
		Pengembangan destinasi unggulan daerah belum terarah, termasuk dukungan akses dan infrastruktur multi pihak dalam pengembangan destinasi wisata
		Kerjasama dan promosi wisata masih kurang
		Menurunnya jumlah wisatawan selama 5 tahun terakhir terutama pada tahun 2020 dan 2021 (SDG's)
		Kurangnya tingkat pembangunan pada wisata budaya, wisata alam, dan wisata kuliner (SDG's)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama	Kurangnya fasilitas penunjang wisata yang kurang memadai (akses jalan, kebersihan, penerangan jalan) (SDG's)
		Menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan
		Distribusi pangan ke masyarakat belum merata
		Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras.
	Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat	Masih banyak pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
		Belum optimalnya peningkatan kemantapan jalan
		Masih tingginya kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH)
		Cakupan pelayanan air yang belum optimal
	belum optimalnya pengembangan industri	Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan bahan baku
		Belum berkembangnya produk-produk olahan berbahan baku lokal
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri
		kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan standardisasi dan sertifikasi produk industri
		Kurangnya Komitmen Pelaku Usaha dalam Penerapan dan Keberlanjutan standardisasi dan sertifikasi produk industri
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industri
		Belum terintegrasinya data dan informasi industri
		Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan kegiatan industri
	belum optimalnya perkembangan UMKM	Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan industri
		Pelaku UMKM belum mampu mengikuti persaingan pasar global
		terbatasnya pada akses permodalan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat,	relatif rendahnya angka harapan hidup	belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan
		Keaktifan BPJS Kesehatan masih di angka sekitar 73% sedangkan UHC seharusnya diatas 90% sehingga belum UHC
		Keaktifan BPJS Kesehatan masih di angka sekitar 73% dengan Jumlah kepesertaan BPJS di Kab Cirebon sudah mencapai 99,60 % hingga sudah mencapai UHC, namun keaktifan peserta BPJS seharusnya diatas 80% kalau kurang dari itu akan mempengaruhi layanan UHC
		Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi (Jumlah kematian ibu sd bulan Desember 2024 adalah $36/38108 \times 100.000 \text{ KH} = 94,5/100.000 \text{ KH}$)
		Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Cirebon masih relatif tinggi (Angka kematian bayi sd Desember 2024 adalah $256/38108 \times 1000 \text{ KH} = 6,7/1000 \text{ KH}$)
		Adanya angka kematian dari beberapa kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dengan sumber daya manusia (tenaga Kesehatan) tidak seimbang (SDG's)
	belum optimalnya aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi	Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan UKP dan UKM yang berkualitas belum optimal
		Penyakit menular masih tinggi, penyakit tidak menular cenderung meningkat.
		Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama dan FKRTL untuk UKP dan UKM belum terpenuhi sarana prasarana serta penunjang sesuai standar.
		Kapasitas SDMK belum merata di FKTP dan FKRTL (jumlah, jenis dan kualitas, dan distribusi antar faskes dan antar wilayah).
		Status Gizi masyarakat belum optimal (Stunting, Anemia, KEK).
		Akses masyarakat terhadap lingkungan yang sehat dan sarana sanitasi dasar yang sehat belum merata/ kurang. (Air Bersih, Jamban sehat, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga	belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan KB	Budaya PHBS di masyarakat kurang
		Masih Banyaknya PUS yang Tidak Ingin Punya Tapi Tidak ber-KB
		Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang MKJP, serta Kurangnya Dukungan Internal Maupun Eksternal
		Kepesertaan KB Kabupaten Cirebon masih rendah karena fertility rate Kabupaten Cirebon sudah di angka 2,19 %
	belum optimalnya pemberdayaan keluarga	masih Banyaknya Kampung KB yang Stratanya Tingkat Dasar
		lemahnya upaya pembinaan dan kesejahteraan keluarga
Belum optimalnya kualitas hidup anak dan perempuan	belum optimalnya kualitas pembangunan keluarga	Masih Tingginya Angka Kemiskinan, Pernikahan Dini dan Rendahnya Akseptor KB
		Masih Rendahnya Tingkat Pendidikan, Usia, Status Pekerjaan dan Persetujuan dari Pasangan
	belum optimalnya perlindungan perempuan	meningkatnya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami oleh perempuan
		kurangnya pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan secara merata;
		belum adanya kesempatan yang sama untuk perempuan mendapatkan pekerjaan yang layak;
		masih terdapatnya pola pemikiran masyarakat yang membatasi jenjang pendidikan untuk perempuan;
	belum optimalnya pencapaian kabupaten ramah anak	belum adanya kebijakan yang menyeluruh untuk kesetaraan gender sampai tingkat Desa/Kelurahan.
		peringkat Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Cirebon baru memperoleh kategori Pratama namu belum semua sekolah dan pesantren menjadi Sekolah Ramah Anak (SRA)
		Rendahnya partisipasi pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya daya saing pemuda dan olahraga	Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam pembangunan dan olahraga	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Aspek Daya Saing Daerah		
Belum optimalnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia	belum optimalnya kualitas pendidikan	Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok
		masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan
		kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terakreditasi baik
		sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah
	rendahnya pencapaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Sedangkan masih belum meratanya rasio guru PNS di tingkat SD dan SMP, tidak berbanding lurus dengan jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahunnya sekitar 200 guru
		kurangnya motivasi peserta didik untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi
Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah	belum optimalnya pembangunan infrastruktur wilayah	adanya keterbatasan secara ekonomi
		masih tingginya angka pernikahan dini
		rendahnya minat baca masyarakat
		belum optimalnya layanan perpustakaan
		Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDA
		Terbatasnya pembangunan infrastruktur perdesaan
		Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
		Pengawasan dan penertiban bangunan
		Keterbatasan pelayanan informasi jasa konstruksi
		Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur (mis. uji konstruksi dalam penanganan jalan)
		Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon
		Belum optimalnya penanganan permukiman pada kawasan strategis

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Layanan Sarana Prasarana Dasar masyarakat.	Rendahnya akses masyarakat pelayanan air minum aman
		Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan dan sanitasi
	belum optimalnya infrastruktur perhubungan	Meningkatnya hambatan lalu lintas akibat aktivitas di pusat-pusat kegiatan (komersil)
		Perencanaan prasarana dan sarana jalan kurang berjalan
		Angkutan umum kalah bersaing dari angkutan online dan sepeda motor yang lebih praktis
		belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana lalu lintas
		belum optimalnya belum optimalnya penyediaan layanan uji kendaraan
	belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang layak dan berkualitas	Pendataan Belum Optimal dalam pengelolaan database Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Keterbatasan pembiayaan/anggaran penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
		Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan PSU
		Masih banyaknya RTLH yang belum teridentifikasi dan tertangani
		Belum tertibnya administrasi pertanahan
Adanya ancaman terhadap nilai-nilai budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan.	belum optimalnya pengembangan budaya	Pembangunan infrastruktur kesehatan terkendala oleh status kepemilikan tanah pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli Cirebon.
		Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah
		Kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat (ritus, adat istiadat, kesenian dan kesusastraan)
		Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya pengelolaan pariwisata daerah	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian daerah
		Belum optimalnya media promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan
		Masih rendahnya apresiasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terhadap kunjungan wisatawan
		Belum optimalnya pelaksanaan event rutin tingkat nasional
		Belum terbentuknya komite ekonomi kreatif
		Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		Belum ditetapkan rencana induk pembangunan pariwisata kab/kota
		Tidak adanya aset destinasi pariwisata pemerintah daerah untuk dikembangkan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana menuju destinasi wisata
		Masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan tempat wisata
Kehidupan beragama belum sepenuhnya menghadirkan keshalehan sosial	Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal	Belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat
		Kegiatan MTQ di kecamatan pelaksanaannya masih belum optimal, bentuknya masih seremonial.
		Kegiatan dan personil linmas masih terbatas
		Upaya penegakan Perda belum optimal
	Belum terciptanya kondusifitas wilayah	Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap Pancasila.
		Melemahnya Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya Akibat Pesatnya Pertumbuhan Perekonomian dan Industri
		Masih Belum Optimalnya Pemberdayaan/Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
		Masih Belum Optimalnya Partisipasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Parpol

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Urgensi Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Hal Yang Dapat Mengganggu Stabilitas Keamanan di Daerah
Belum optimalnya investasi di daerah	kurang terarahnya pembangunan investasi di daerah	Belum optimalnya promosi investasi dilakukan.
		Belum optimalnya regulasi kebijakan daerah dalam mendukung kemudahan penanaman modal.
		Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan.
		Investor tidak nyaman, pindah ke daerah lain sekitar Cirebon karena adanya demo dari tenaga kerja serta harga lahan melonjak.
Belum optimalnya inovasi daerah	Kinerja inovasi daerah yang belum Optimal	Kabupaten Cirebon memiliki indeks inovasi daerah sebesar 47,15 dan termasuk dalam kategori inovatif, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 69,15 dengan kategori sangat inovatif.
		Belum optimalnya sistem pelayanan dan administrasi pemerintahan
		Minimnya inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan Komunikasi untuk manajemen pemerintahan
Aspek Pelayanan Umum		
Tata kelola pemerintahan belum optimal menyelenggarakan pelayanan dan kebijakan publik yang berkualitas dan merata.	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal
		Belum optimalnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
		SDM (kuantitas dan kualitas sdm yang masih kurang) dan prasarana wajib ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
		Belum ada standar kompetensi jabatan untuk pengelompokan jabatan
	Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan
		Keselarasan/konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tupoksi perangkat daerah belum berjalan dengan baik
		Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Cirebon

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Penyelenggaraan pemerintah berbasis sistem informasi masih belum optimal	Belum optimalnya kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD
		Apabila dibandingkan dengan daerah lain, nilai SPBE Kabupaten Cirebon tahun 2023 cukup tertinggal dengan wilayah di sekitarnya. Wilayah yang mendapat predikat baik untuk nilai SPBE seperti Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan nilai SPBE masing-masing 2,89 dan 3,39, sedangkan Kota Cirebon (3,55) dan Kabupaten Indramayu (3,53) memperoleh predikat sangat baik.
	Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal	Pembangunan desa belum diselenggarakan secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
		Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal
		Pengembangan BUMDes belum optimal untuk mendukung prioritas daerah
		Peningkatan ADD tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja desa
	Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan	Rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa
		Terdapat 10 Kecamatan yang belum memiliki alat cetak pelayanan kependudukan
	Pendapatan daerah belum optimal	Lemahnya koordinasi antar-sektor (perangkat daerah) dalam pengembangan kawasan perdesaan
		pertumbuhan pendapatan asli daerah yang rendah
		rasio kemandirian daerah kemampuannya rendah sekali dan rasio ketergantungan daerah termasuk kedalam kategori tinggi

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (2024). Data yang dikelola dalam SIPD

2.3.2. Permasalahan Terkait Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada aspek ini merupakan permasalahan Pembangunan sesuai urusan pemerintah, yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permasalahan yang disajikan pada bagian ini merupakan hasil dari kajian masing-masing bidang/urusan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Cirebon terhadap kinerja capaian masing-masing urusan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, penyajian permasalahan dilakukan dengan memadukan dan mempertimbangkan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Adapun identifikasi permasalahan pembangunan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.119
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalah
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	PENDIDIKAN	Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik. Sedangkan masih belum meratanya rasio guru PNS di tingkat SD dan SMP, tidak berbanding lurus dengan jumlah guru PNS yang pensiun setiap tahunnya sekitar 200 guru
		Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok, masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terqualifikasi baik, sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah
		Aksesibilitas Pendidikan masih rendah

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Kompetensi dan profesionalisme Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan masih rendah
		Mutu dan jumlah sarana prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan masih kurang
		Tata Kelola Pendidikan
2	KESEHATAN	Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup (continuum of care)
		Masih tingginya persentase ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dengan risiko tinggi.
		Masih tingginya anemi pada remaja putri
		Masih tingginya prevalensi balita wasting (gizi kurang)
		Belum optimalnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar yang layak (sehat)
		Masih rendahnya PHBS masyarakat di semua tatanan
		Makin luasnya potensi bencana dan masalah/krisis kesehatan masyarakat
		Belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian penyakit dan Belum terpenuhinya SDM kesehatan baik kualitas, kuantitas maupun distribusinya di puskesmas dan Rumah sakit
		Belum optimalnya pengawasan terhadap sarana kesehatan
		Belum optimalnya pengawasan PIRT
		Masih terjadi keracunan makanan di masyarakat
		Masih rendahnya PHBS di semua tatanan
		Peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan masih rendah
		masih rendahnya pemanfaatan TT RSUD, capaian persentase penggunaan tempat tidur (BOR 65% - 85%)
		Kualitas pelayanan publik belum optimal
3	PEKERJAAN UMUM DAN	Keterbatasan sumber air baku termasuk sumber air permukaan (sungai) dan sumber mata air; Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah;

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
	PENATAAN RUANG	Tingginya kebocoran dan pendangkalan saluran irigasi
		Keterbatasan penyediaan infrastruktur pengelolaan SDA serta Keterbatasan cakupan pelayanan air bersih, terutama di musim kemarau di daerah yang tidak/kurang mempunyai potensi sumber air
		Tingginya potensi banjir di desa-desa/kawasan permukiman dan Potensi genangan pada titik-titik tertentu
		Meningkatnya intensitas kemacetan di Kecamatan Talun dan Kecamatan Kedawung
		Terbatasnya pembangunan infrastruktur perdesaan; Keterbatasan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan
		Masih tingginya pola BABS masyarakat melalui pemanfaatan sungai untuk kegiatan MCK
		Terbatasnya fasilitas pengolahan limbah cair (IPAL) dan belum adanya IPLT; Masih terbatasnya capaian pengurangan sampah; Keterbatasan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah
		Sosialisasi/edukasi terkait perizinan PBG; Pengawasan dan penertiban bangunan; Keterbatasan pelayanan informasi jasa konstruksi
		Kurang optimalnya kondisi peralatan pendukung pengelolaan infrastruktur (mis. uji konstruksi dalam penanganan jalan)
		Belum optimalnya kinerja penataan ruang Kabupaten Cirebon serta Belum optimalnya penanganan permukiman pada kawasan strategis
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pendataan Belum Optimal dalam pengelolaan database Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Keterbatasan pembiayaan/anggaran penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
		Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan PSU

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Masih banyaknya RTLH yang belum teridentifikasi dan tertangani
		Belum tertibnya administrasi pertanahan
5	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal, belum optimalnya penataan toleransi kehidupan beragama masyarakat, kegiatan dan personal linmas masih terbatas; dan upaya penegakan Perda belum optimal Koordinasi penanganan gangguan ketentraman masih rendah; kurangnya pemahaman SDM dan jabatan fungsional Satpol PP terhadap tugas dan fungsi; belum optimalnya penanganan bencana; dan masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan bencana
6	SOSIAL	Angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Cirebon mengakibatkan keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal Masih tingginya Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya belum optimal Belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial Rendahnya kesediaan masyarakat menjadi relawan sosial
2	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	
1	TENAGA KERJA	Perencanaan kebutuhan tenaga kerja mikro dan makro yang belum match dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja Kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja Minimnya pelibatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
		Sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja
		Rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi
		Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat bekerja di sektor formal
		Masih terdapat CPMI unprosedural
		Kondusifitas hubungan industrial
		Terbatasnya SDM Pegawai dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Kabupaten Cirebon, sehingga belum optimal dalam memberikan pelayanan/pembinaan sesuai dengan kewenangan
		Kompetensi SDM pegawai belum mampu mengimbangi dinamika peraturan perundang-undangan, dunia usaha, dunia kerja dan dunia industry
		Belum optimalnya penggunaan/pemanfaatan Tekhoologi Informasi (IT) berbasis Web/aplikasi untuk penyebaran informasi ketenagakerjaan, membangun database Ketenagakerjaan mandiri terutama menunjang Pelayanan publik bidang ketenagakerjaan
		Belum memadainya Sarana dan Prasarana penunjang pelayanan publik urusan Ketenagakerjaan maupun back office, baik Bangunan, hardware dan software penunjangnya
2	URUSAN PANGAN	Belum terbentuknya lembaga otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) Kab. Cirebon
		Masih terdapat heuleur yang belum maksimal sanitiasi hygiene sesuai standar kewanamanan pangan; Masih ditemukan bahan pangan segar dan jajanan yang tidak aman dikonsumsi; kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi makanan yang B2SA

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (Daya beli) dan Fisik; Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen
		Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkab biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen; Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; Masih terdapat desa rentan rawan pangan
		Pengembangan perikanan tangkap per kecamatan masih belum merata
		masih terbatasnya teknologi yang dihadapi oleh nelayan tangkap; masih terbatasnya pengembangan perikanan budidaya, termasuk ketersediaan lahan untuk budidaya; terbatasnya pemahaman pembudidaya ikan mengenai konsep-konsep produksi; kurang optimalnya penggunaan balai benih ikan
		kurang optimalnya kawasan khusus budidaya perikanan serta belum cukup tertatanya pasar dalam pengembangan perikanan budidaya; kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah; Sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal
		Pasar masih berkembang dengan jaringan yang bersifat individu masih bersifat konvensional memerlukan terobosan dengan sistem e-commerce dengan optimalisasi teknologi
		Perlunya penataan sistem pemasaran berbasis korporasi yang terintegrasi dengan para produsen yaitu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta faktor produksi lainnya; belum dapat dipenuhi secara optimal permintaan perikanan; masih tebatasnya jumlah usaha yang bergerak pada industri pengolahan perikanan
3	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP	Target pemantauan kualitas air cenderung fluktuatif karena masalah jumlah sumur pantau serta adanya pencemaran air baku pada lokasi sumur pantau

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Penurunan realisasi pemantauan kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis serta target IKU yang fluktuatif dan cenderung berkurang
		Pembangunan wilayah menyebabkan konversi lahan
		Adanya penurunan capaian akibat peningkatan pertambahan volume sampah yang tidak diimbangi kapasitas angkut dan pengelolaan di TPA; Adanya penurunan pengelolaan sampah karena unit pengelola yang tidak beroperasi maksimal akibat masalah anggaran pada masa pandemic
		Hanya penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang dimasukkan dalam kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan
		Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM serta penyiapan prasarana dan sarana dalam mendukung program KEHATI; Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas pengawas (PPLH); Tidak ada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi
		Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 tidak digunakan
		Kurangnya kegiatan pemberian informasi kepada masyarakat / stakeholder terkait peringatan pencemaran lingkungan hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan serta Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor dalam pengendalian pencemaran dirasa tidak optimal
		Peningkatan kapasitas dan kompetensi dilakukan melalui kegiatan pendampingan serta Gerakan Peduli Lingkungan Hidup menyebabkan perlunya perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih komprehensif, operasional, dan tepat sasaran
4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Belum optimalnya capaian kepemilikan Akta Kelahiran penduduk usia 18 Tahun Ke atas

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
	DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya capaian kepemilikan Akta Kematian dan kepemilikan Buku pokok pemakaman
		Masih terdapat masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan
		Proses pelayanan administrasi kependudukan memerlukan waktu yang lama
		Keterbatasan blanko KTP-el, sering terjadi gangguan jaringan serta ketersediaan peralatan pelayanan yang belum mencukupi
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum Optimalnya Penatausahaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan
		Belum Maksimal nya SDM Aparatur Pemerintahan Desa
		Masih banyak Bumdes Yang belum berbadan hukum
		Belum Optimalnya Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kerjasama antar Desa maupun Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
		Belum optimalnya peran Pemerintahan Desa dalam peningkatan sarpras desa
		Belum diberdayakan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
		Ekonomi Desa oleh Pemerintahan Desa dalam Proses pembangunan desa
		Terbatas nya jumlah sdm dinas PMD sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan desa dan masyarakat
6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rendahnya pengetahuan pasangan muda terhadap kesehatan reproduksi dan kurangnya akses terhadap informasi yang akurat; Masih tinggi angka unmetneed; Rendahnya pemahaman remaja dan calon pengantin terkait dengan kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga; Kurang pengetahuan Kader terkait dengan UPPKS; Kurang nya pemahaman orang tua mengenai pola asus yang baik dan menjaga kesehatan lingkungan
		Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		belum di-Perdakan yang terintegrasi pada Sisitem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk (SIPERINDU)
		Pentingnya masyarakat atau Kepala Keluarga terpapar isi pesan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) pada advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan
		Pentingnya stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam mendukung Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana)
		Perlunya peninjauan kembali terkait Tugas dan Fungsi pada Kegiatan Sub Advokasi, Penggerakan dan Penyuluhan pada Bidang Pengendalian Penduduk , Penyuluhan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022, BAB II; Bagian Kelima pasal 7 huruf c) dan Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.32-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 061.1/Kep.32-Org/2022 Nomor 2
		Belum maksimalnya kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan
		Pentingnya Data Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) untuk mendukung Data Total Fertility Rate (TFR); Pentingnya Data Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun untuk mendukung Data Total Fertility Rate (TFR); Belum Tersedianya secara

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		rutin Data Wanita Usia Subur yang melahirkan berdasarkan usia (15 Tahun - 49 tahun) untuk mendukung Data Angka Kelahiran Total (TFR) Belum Tersedianya secara rutin Data Laju pertumbuhan penduduk (LPP); Terbatasnya sarana dan prasarana ramah anak di Kabupaten Cirebon; belum bersinergi kerjasama unsur pemerintah dan dunia usah, lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam rangka Kabupaten Layak Anak; kurang optimalisasi kegiatan di Pemenuhan Hak Anak; Rendahnya pemahaman pemerintah, dunia usaha, media serta LSM terkait pemenuhan hak anak Keterbatasan jumlah SDM di Puspaga; masih kuatnya beberapa faktor yang mempengaruhi perkawinan anak seperti faktor budaya, faktor keluarga dan pergaulan bebas Kurangnya sinergitas antar OPD dalam menjalankan program pencegahan perkawinan anak; keterlibatan anak dan keluarga dalam pencegahan masih minim; Terbatasnya kemampuan kelembagaan (Satgas PPA tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa); kurangnya penguatan kelembagaan lintas sectoral; Belum optimalnya kerjasama jejaring antar unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media masa Belum optimalnya pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak; Rendahnya pemahaman tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah Masih tingginya Perceraian di Kabupaten Cirebon; Masih tingginya kemiskinan di Kabupaten Cirebon; Tingginya angka kelahiran; Prevalensi Stunting masih tinggi; Belum Optimalnya Perlindungan Perempuan dan Anak; Masih tingginya kemiskinan pada kaum perempuan (kepala keluarga perempuan) di Kabupaten Cirebon; Rendahnya ketahanan keluarga

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
7	PERHUBUNGAN	Meningkatnya hambatan lalu lintas akibat aktivitas di pusat-pusat kegiatan (komersil)
		Perencanaan prasarana dan sarana jalan kurang berjalan
		Keterbatasan anggaran untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan
		Kebutuhan SDM yang didukung kemampuan dan perangkat serta pelayanan masyarakat tidak optimal
		Adanya kontradiksi antara nomenklatur urusan dengan kebijakan terkait kewenangan urusan daerah
		Angkutan umum kalah bersaing dari angkutan online dan sepeda motor yang lebih praktis
8	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sekolah, UPT Puskesmas belum terkoneksi dengan jaringan Internet Pemerintah Kabupaten Cirebon
		Perangkat Jaringan TIK Pemerintah Kabupaten Cirebon masih ada yang menggunakan teknologi Wireless, belum sepenuhnya menggunakan Fiber Optic (FO)
		Belum terintegrasinya layanan kegawatdaruratan; Belum adanya Disaster Recovery Center (DRC) sebagai back up data; Sistem Keamanan Informasi belum terstandarisasi ISO; Kurang tertatanya kabel-kabel jaringan Fiber Optic beserta tiang penyangga
		Proses bisnis dan data yang belum terintegrasi antar OPD serta Penguataan Implementasi SPBE
		Transformasi Digital serta banyaknya berita bohong yang berkembang di Kabupaten Cirebon
		Kurangnya koordinasi dan integrasi informasi antar perangkat daerah
		Ketidakseragaman penyajian informasi yang dibutuhkan; Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam hal publikasi; Keterbatasan anggaran dalam hal publikasi; Kurangnya akses informasi public

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
9	STATISTIK	ketersediaan data sektoral belum optimal
		pemanfaatan data sektoral belum Maksimal
		SDM pengelola data statistik belum maksimal
		Pemanfaatan Data Geospasial
10	PERSANDIAN	Belum adanya Dasar Hukum yang mengatur tentang Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon
		Penggunaan jaringan sandi (email dinas cirebonkab) belum optimal digunakan di lingkungan pemerintah kabupaten cirebon dalam komunikasi antar perangkat daerah
		Belum semua ASN di pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki Sertifikat Elektronik (TTE)
		Belum dilaksanakannya sertifikasi ISO 27001 untuk mendukung keamanan informasi
		Masih belum terintegrasinya sistem yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Cirebon
		Standarisasi website dan aplikasi belum optimal
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Masih rendahnya daya saing koperasi
		Rendahnya daya saing usaha mikro
12	PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya promosi investasi dilakukan
		Belum optimalnya regulasi kebijakan daerah dalam mendukung kemudahan penanaman modal
		Kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kurangnya optimalisasi peran serta pemuda dalam pembangunan
		Kurangnya peningkatan sarana prasarana olahraga yang memadai
		Kurangnya jumlah atlet yang berprestasi
14	KEBUDAYAAN	Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah serta kurangnya perlindungan terhadap keberagaman ekspresi budaya dan hak berkebudayaan masyarakat (ritus, adat istiadat, kesenian dan kesusastaan)
		Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan melestarikan budaya daerah

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan kesenian daerah
		Belum optimalnya media promosi pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan; Masih rendahnya apresiasi masyarakat dan pelaku usaha pariwisata terhadap kunjungan wisatawan; Belum optimalnya pelaksanaan event rutin tingkat nasional
		Belum terbentuknya komite ekonomi kreatif serta belum optimalnya perlindungan dan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif
		Belum ditetapkannya rencana induk pembangunan pariwisata kab/kota serta tidak adanya aset destinasi pariwisata pemerintah daerah untuk dikembangkan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana menuju destinasi wisata serta masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan tempat wisata
		Masih kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara serta rendahnya kompetensi sumber daya aparatur
15	KEARSIPAN	Pengelolaan Arsip dinamis daerah kabupaten cirebon belum terkelola dengan tertib
		Perangkat daerah belum mengerti bahwa nilai pengelolaan arsip daerah merupakan salah satu indikator dalam penilaian SAKIP
		Arsip kesejarahan kabupaten cirebon belum diolah dan dipreservasi dengan baik
		Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon belum terkelola dengan baik
		Arsip akibat bencana belum terselamatkan
		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten tidak dapat dilakukan
		Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten belum terselenggara dengan baik
		Pembudayaan Gemar Membaca di masyarakat masih belum optimal
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
1	PERTANIAN	Sarana pendukung produksi belum memadai; Prasarana pendukung produksi belum memadai; Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian; Rendahnya inovasi di sektor pertanian
		Dampak perubahan iklim; Degradasi dan berkurangnya lahan pertanian; Belum terlaksananya konservasi terhadap lahan dan air
2	PERIKANAN DAN KELAUTAN	Belum optimalnya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
		Tingginya ketergantungan nelayan terhadap tengkulak sehingga nilai tawar nelayan rendah
		Kepatuhan nelayan dalam penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
		Masih rendahnya produksi dan produktivitas perikanan
		Tingginya harga pakan ikan
		Masih rendahnya penanganan olahan ikan yang berkualitas dan aman
		Minimnya pengetahuan masyarakat tentang olahan ikan yang aman dan berkualitas
		Cuaca ekstrim
3	PERDAGANGAN	Masih banyak ditemukan alat UTTP yang tidak bertanda sah serta rendahnya pengetahuan masyarakat/pemilik UTTP/Perusahaan tentang kewajiban tera/tera ulang alat UTTP nya
		Masih banyak perusahaan/IKM/UKM yang belum mengetahui peraturan mengenai pelabelan kemasan, penggunaan satuan ukuran, dll dalam hal BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang sesuai dengan UU Metrologi Legal No. 2 Tahun 1981
		Banyak Masyarakat umum/konsumen yang belum mengetahui tentang Metrologi Legal
		Minimnya fasilitas alat penunjang/SARPRAS/kendaraan untuk melaksanakan kegiatan Pengawasan/Penyuluhan serta pelayanan Tera/Tera Ulang Metrologi Legal
		Masih ada alat standar yang belum terkalibrasi/terverifikasi, sehingga legalitas alat

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		untuk pengujian BDKT dan Pelayanan Tera/tera Ulang UTTP kepada masyarakat belum maksimal
		Tidak adanya reward dan punishment kepada masyarakat/pemilik UTTP/Perusahaan serta tidak adanya Data Base untuk Data Potensi UTTP dan BDKT
		Banyak masyarakat umum/konsumen yang tidak yakin dengan hasil takaran/timbangan serta banyaknya aduan masyarakat yang merasa takaran PU BBM/SPBU tidak sesuai
		Terbatasnya kemampuan SDM kemetrolagian; Banyak UTTP yang belum bisa di tera/tera ulang; kurangnya Inovasi Pelayanan tera/tera ulang uttp
		Masih kurangnya pemahaman pemanfaatan bahan baku; belum berkembangnya produk-produk olahan berbahan baku local; Belum optimalnya pemanfaatan teknologi industri
		kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan standardisasi dan sertifikasi produk industry; Kurangnya Komitmen Pelaku Usaha dalam Penerapan dan Keberlanjutan standardisasi dan sertifikasi produk industry; Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk industry
		Belum terintegrasinya data dan informasi industri; Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan kegiatan industry; Belum lengkapnya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan industry
4	PERENCANAAN	Sinkronisasi dan konsistensi perencanaan pembangunan lintas sektor dan tingkat pemerintah masih perlu ditingkatkan
		Kompetensi SDM perencana yang proporsional sesuai kebutuhan yang ideal
		Belum teridentifikasinya permasalahan primer yang di-breakdown dalam skala prioritas pembangunan pada masing-masing perangkat daerah
5	KEUANGAN	Belum optimalnya pelaksanaan budaya kerja core values ASN “BERAKHLAK” dan employer

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		branding ASN “Bangga Melayani Bangsa” yang merupakan strategi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia
		Belum memadainya jumlah aparatur yang menangani pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
		Sinergi dan koordinasi antar unit kerja belum optimal
		Tingkat pemahaman SDM pengelolaan keuangan dan barang milik daerah terhadap regulasi belum memadai
		Kurang tertibnya pengelolaan barang milik daerah pada semua perangkat daerah
		Sistem pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum terintegrasi
		Penyerapan belanja pada Perangkat Daerah belum sesuai dengan alokasi yang telah diatur dalam anggaran kas, sehingga mengakibatkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun anggaran
		Digitalisasi laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah belum berjalan optimal
		Tingkat pemahaman alur proses penatausahaan keuangan dan barang milik daerah di masing-masing perangkat daerah masih rendah
		Verifikator di perangkat daerah belum optimal dalam pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
		Penggunaan aplikasi SIPD Kemendagri belum dapat berjalan secara optimal dan masih terdapat banyak permasalahan dalam proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban APBD
		Penggunaan aplikasi E-BMD Kemendagri belum dapat berjalan optimal dan masih menggunakan aplikasi tersendiri dalam proses pengelolaan barang milik daerah

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Pensertifikatan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Cirebon berupa tanah masih belum optimal
		Penyusunan RKBMD perangkat daerah baik pengadaan maupun pemeliharaan belum mengacu pada kartu inventaris barang sebagai dasar pengalokasian anggaran
		Terkait dengan bentuk pemanfaatan barang milik daerah yang optimal, permasalahan yang dihadapi adalah belum teridentifikasinya barang milik daerah yang tidak terpakai yang di perangkat daerah
		Penyesuaian kebijakan dan regulasi mengenai kebijakan Pengelolaan Pajak Daerah
		Ketersediaan data subjek dan objek pajak masih rendah
		Penggunaan sistem informasi dan teknologi pengelolaan pajak daerah masih rendah
		Ketersediaan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Pengelola Pajak Daerah masih kurang
		Kesadaran dan Kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan masih rendah
3	KEPEGAWAIAN	Adanya deviasi antara jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan jumlah pemenuhan pegawai menyebabkan ketidak seimbangan distribusi beban kerja. Hal tersebut dikarenakan jumlah ASN baru tidak seimbang dengan jumlah PNS yang pension
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis belum merata. Hal tersebut dikarenakan Target ASN mengikuti diklat sebanyak 20 JPL/ASN per tahun belum tercapai sesuai amanat UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		Belum optimalnya penggunaan sistem informasi dalam layanan kepegawaian dikarenakan masih terdapat beberapa proses layanan kepegawaian yang dilaksanakan secara manual
5	URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	

No	Nama Urusan	Identifikasi Permasalahan
		Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern Pemerintah masih belum optimal
		Adanya pelanggaran, penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan aparat pemerintah (ASN)
		Hasil temuan pemeriksaan BPK yang masih tinggi
		Standar kompetensi APIP secara kualitas/kuantitas belum sepenuhnya terpenuhi
6	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Belum optimalnya pemberdayaan Ormas sehingga tercapai Indeks Kinerja Ormas
		Belum optimalnya partisipasi Pendidikan Politik Masyarakat dan Pembinaan Parpol
		Belum optimal dalam Pencapaian Indeks Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya
		Belum optimal dalam Pencapaian Indeks Ketahanan Ideologi
		Belum optimal dalam Pencapaian Indeks Kewaspadaan Nasional

2.3.3. Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2024 Untuk Dasar Identifikasi Isu Strategis

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024, masih banyak permasalahan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan isu strategis guna menyelesaikan permasalahan utama pembangunan daerah secara bertahap dengan memperhatikan isu strategis pembangunan nasional dan isu strategis pembangunan provinsi. Berikut ini adalah penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan identifikasi isu strategis.

Tabel 2.120
Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023
dan Penjelasan sebagai Dasar Identifikasi
Isu Strategis

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
1	Lunturnya budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan	Cirebon tumbuh dan berkembang menjadi kabupaten penuh dengan warisan budaya dan sejarah yang menjadi bagian kebudayaan Cirebon, dimana telah menjadi bagian penting dari kehidupan bangsa Indonesia dan tercatat sebagai situs sejarah nasional. Dalam konteks lebih spesifik Kebudayaan yang melekat pada masyarakat Cirebon merupakan perpaduan berbagai budaya yang datang dan membentuk ciri khas tersendiri. Dalam kaitan dengan khasanah seni dan budaya dapat dilihat dari beberapa pertunjukan khas masyarakat Cirebon antara lain Tarling, Tari Topeng Cirebon, Wayang Kulit Cirebon, Sintren, Kesenian Gembyung, Sandiwara Cirebonan dan sebagainya; mencerminkan kearifan dan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh masyarakat asli Cirebon. Tentu saja, banyaknya potensi budaya yang ada di Cirebon, bukan hanya akan mendatangkan wisatawan, melainkan bisa terbukanya lapangan pekerjaan di bidang pariwisata. Dalam membangun, mengelola, hingga melestarikan budaya wisata di Cirebon, pihak pemerintah membutuhkan banyak orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan maupun pelestarian. Kemudian tumbuh tempat wisata budaya dan sejarah yang juga dukungan masyarakat setempat. Inilah sisi kebudayaan Cirebon sebagai	Kualitas Sumber Daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		warisan sejarah. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Cirebon terbentuk dari kondisi geografis (seperti obyek laut/bahari), sejarah (meliputi obyek wisata peninggalan-peninggalan sejarah) dan budaya yang dimiliki (meliputi keunikan masyarakat Kabupaten Cirebon dengan segala kebudayaannya. Masalah luntarnya budaya masyarakat yang selaras dengan tantangan pembangunan dan pengembangannya bagi pariwisata, disebabkan oleh permasalahan belum optimalnya pengembangan budaya dengan akar masalah yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta belum sinergis dan nyata dalam melestarikan dan memanfaatkan budaya asli cirebon.	
2	Rendahnya daya saing SDM	Salah satu isu penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cirebon dan daerah lain pada umumnya adalah menyangkut daya saing SDM. Kabupaten Cirebon memiliki keunggulan komparatif dengan melimpahnya kekayaan alam yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah. Namun demikian, jika melihat daya saing Kabupaten Cirebon dari sisi SDM, maka masih menyisakan banyak tantangan. Salah satu indikator yang menggambarkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data capaian IPM Kabupaten Cirebon, diketahui bahwa IPM Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 69,61 poin pada tahun 2020 dan terus	Pengangguran dan Kemiskinan

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		meningkat menjadi 71,81 poin pada tahun 2023. Meskipun terus mengalami peningkatan, namun angka IPM pada tahun 2023 masih lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 74,39 poin dan IPM Provinsi Jawa Barat yang mencapai 74,24 poin. Indikator lainnya yaitu persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon, dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 249,18 ribu jiwa atau 11,20 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Angka ini menurun dibanding dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 266,10 ribu jiwa atau sebesar 12,01 persen. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut tentu harus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Cirebon guna meningkatkan daya saing SDM di Kabupaten Cirebon. Selain IPM dan tingkat kemiskinan, indikator lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2018 angkanya mencapai 10,56 persen. Selanjutnya, pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 10,28 persen. TPT Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 11,52 persen	

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		namun di tahun 2021-2023 terus menurun masing-masing di angka 10,38 persen; 8,11 persen dan 7,65 persen. Lebih lanjut dan berdasarkan hasil rangkuman pada gambaran umum kondisi daerah, maka dapat dirangkum beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya daya saing SDM, diantaranya: • Layanan pendidikan belum berkualitas dan terakses hingga ke pelosok, dengan akar masalah yaitu Masih kurangnya sarana dan prasarana Pendidikan, Kualitas tenaga pendidik dan pendidikan belum sepenuhnya terqualifikasi baik, Sistem pelaporan dan manajemen pendidikan masih rendah. • Kualitas layanan kesehatan belum merata, khususnya bagi masyarakat tidak mampu, dengan akar masalah yaitu minimnya ketersediaan tenaga medis dan distribusi yang tidak merata serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit. • Penanganan kemiskinan dan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada umumnya belum optimal, dengan akar masalah yaitu belum optimalnya penanganan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi social serta Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal.	
3	Kemandirian ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon tahun 2018 sampai dengan	Perekonomian yang belum

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
	belum terwujud	tahun 2023 cenderung mengalami perlambatan, tahun 2018 mencapai angka 5,02 persen hingga pada tahun 2023 mencapai angka 4,85 persen. Bahkan pada tahun 2020 pandemi Covid-19 telah meluluhlantakan perekonomian yang berakibat pada ekonomi tumbuh minus tepatnya diangka -1,08 persen. Namun, seiring menurunnya tingkat fatalitas dari pandemic Covid-19 dan terus meningkatnya capaian vaksinasi di tahun 2021 dan 2022, maka perekonomian mengalami perbaikan pertumbuhan, di tandai dengan LPE tumbuh sebesar 2,47 persen di tahun 2021 dan 4,09 persen di tahun 2022 kemudian kembali mengalami pertumbuhan di tahun 2023 sebesar 4,85 persen. Angka pertumbuhan ekonomi ini berdampak cukup signifikan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon sehingga dimasa yang akan datang pemerintah perlu memperhatikan dan melakukan penanganan khusus terhadap fenomena pertumbuhan ekonomi ini. Harapannya skema pembangunan diarahkan untuk dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, maka LPE Kabupaten Cirebon pada kurun waktu tahun 2018-2023 selalu berada di bawah LPE Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Pembangunan bidang agama merupakan upaya untuk mewujudkan agenda meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama serta	tumbuh secara optimal

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		kehidupan beragama. Selain itu, pembangunan bidang agama juga mencakup dimensi peningkatan kerukunan hidup umat beragama yang mendukung peningkatan saling percaya dan harmonisasi antarkelompok masyarakat. Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalisme dan memahami makna kemajemukan sosial sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.	
		Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian, dengan akar masalah belum optimalnya hilirisasi dan pemasaran produk-produk unggulan daerah, belum optimalnya peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah, masih rendahnya pengembangan kemitraan pengelolaan dan penanganan pemasaran hasil komoditi pertanian, produksi ikan mengalami penurunan dan kurangnya pemahaman terhadap teknologi perikanan. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing, dengan akar masalah Belum efektifnya pemanfaatan potensi unggulan daerah Kabupaten Cirebon, Belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal, Pengembangan destinasi unggulan daerah belum terarah, termasuk dukungan akses dan infrastruktur multi pihak dalam pengembangan destinasi wisata dan Kerjasama dan	Komitmen Penyelenggaraan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		promosi wisata masih kurang. Belum optimalnya pengelolaan dan peningkatan produktivitas tanaman pangan utama, dengan akar masalah Menurunnya produktivitas tanaman per satuan luas, tantangan dan kebutuhan akan alih fungsi lahan, Distribusi pangan ke masyarakat belum merata dan Ketergantungan masyarakat pada jenis pangan beras dan kurangnya diversifikasi pangan terutama pangan non beras. Belum optimalnya upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, dengan akar masalah yaitu tingginya potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan dan Pengelolaan kawasan hutan belum optimal.	
		Belum optimalnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, dengan akar masalah yaitu masih belum optimalnya (kualitas) perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemanfaatan ruang, Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur jalan, belum optimalnya koordinasi dan penanganan kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH) dan cakupan pelayanan air yang belum optimal	Penyediaan dan Kemantapan Infrastruktur Wilayah
4	Tata kelola pemerintahan belum menghasilkan layanan dan kebijakan publik yang berorientasi pada masyarakat	Penataan birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon guna mewujudkan good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.	Tata kelola pemerintahan yang belum optimal

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		Namun, beberapa upaya masih harus dipacu efektivitas dan efisiensinya dalam mewujudkan good governance. Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik dapat diketahui dengan melihat beberapa ciri dan karakterisitiknya. Di tataran praktis, upaya perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik selama ini diarahkan pada: - Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosiol ekonomi; - Komunikasi, adanya jaringan multisistem (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas; - Proses penguatan diri sendiri (self enforcing process), ada upaya untuk mendirikan pemerintah (self governing) dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi; - Keseimbangan kekuatan (balance of force), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan dalam kompleksitas, harmoni, dan kerja sama; dan - Independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Tantangan ke depan birokrasi Kabupaten Cirebon adalah	

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		bagaimana perubahan-perubahan lingkungan eksternal, tuntutan masyarakat dan stakeholder pembangunan, termasuk aspirasi generasi milenial dapat dipenuhi dalam berbagai layanan. Kebutuhan atas pemanfaatan TIK di masyarakat harus diadaptasi sepadan dalam layanan publik dan dalam administrasi pemerintahan guna meningkatkan kinerja birokrasi, akuntabilitas, dan perbaikan kebijakan pembangunan di berbagai bidang termasuk kebijakan pengembangan wilayah. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah, dengan akar masalah antara lain Pengelolaan penyelenggaraan dan manajemen pemerintahan dalam mendukung pelayanan publik belum maksimal dan Belum optimalnya tingkat pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Belum optimalnya sistem akuntabilitas kinerja keuangan daerah, dengan akar masalah yaitu Pelayanan prima yang sesuai dengan SPM belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintahan, Keselarasan/konsistensi antara perencanaan program, kegiatan dan anggaran sesuai dengan tupoksi perangkat daerah belum berjalan dengan baik, Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Cirebon dan Belum optimalnya kinerja, peran, kapasitas, dan kapabilitas APIP/P2UPD. Tata kelola pemerintahan belum memanfaatkan TIK secara optimal guna mendukung pelayanan publik,	

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		dengan akar masalah antara lain Transformasi digital dalam rangka peningkatan efektivitas penerapan SPBE bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan belum optimal dan Rendahnya dukungan pengadaan sarana dan prasarana TIK. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa belum optimal, dengan akar masalah yaitu Pembangunan desa belum diselenggarakan secara efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, Pengembangan kawasan perdesaan belum optimal dan Pengembangan BUMDes belum optimal untuk mendukung prioritas daerah. Lemahnya koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan di tingkat kecamatan, dengan akar masalah yaitu Rendahnya kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan maupun desa dan Lemahnya koordinasi antar-sektor (perangkat daerah) dalam pengembangan kawasan perdesaan. Kurangnya pengembangan peran dan kreativitas dalam pembangunan dan olahraga, dengan akar masalah yaitu Rendahnya partisipasi pemuda dalam lapangan dan kesempatan kerja dan Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana olahraga.	
5	Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal	Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur.	Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat

No	Permasalahan	Penjelasan	Identifikasi
		Namun demikian, di Kabupaten Cirebon masih terdapat permasalahan yang dapat memicu Keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat belum optimal, yaitu Belum Optimalnya upaya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan beberapa akar masalah diantaranya: a. Koordinasi penanganan gangguan ketentraman masih rendah; b. Kurangnya pemahaman SDM dan jabatan fungsional Satpol PP terhadap tugas dan fungsi; c. Belum optimalnya penanganan bencana; dan Masih rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan bencana.	

2.4. Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals/MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, phylantrophy dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar. TPB berperan sebagai tolok ukur perumusan kebijakan, rencana, dan program (KRP) yang

memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Masing-masing tujuan pada TPB memiliki indicator yang berperan sebagai instrumen penilaian terhadap pencapaian target TPB.

Dalam mencapai tujuan pembangunan, ketergantungan antara manusia dan alam harus diperhatikan. Manusia hidup dan sangat bergantung pada sumber daya yang disediakan oleh alam dalam biosfer. Kondisi lingkungan dalam biosfer merupakan dasar untuk menopang kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta pencapaian kesejahteraan manusia. Kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, disertai dengan daya dukung lingkungan yang baik, akan mampu menciptakan masyarakat yang sehat dan bahagia. Kondisi masyarakat yang sehat dan bahagia akan mendukung aktivitas manusia, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendukung terciptanya kesejahteraan hidup manusia yang berkelanjutan.

Gambar 2.60
Kaitan Antara Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan dengan Pencapaian TPB



Sumber: Folke, dkk., 2016

Dalam analisis capaian indikator TPB, terdapat analisis kesenjangan (gap) antara kondisi eksisting Kabupaten Cirebon dengan target TPB yang relevan dan ingin dicapai. Hal inidilakukan sebagai bentuk integrasi penilaian pencapaian target TPB dalam perumusan KRP. Analisis kesenjangan ini diawali dengan proses identifikasi terhadap isu-isu strategis. Hal ini terdapat kaitannya dengan TPB yang memiliki empat pilar utama

dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar sosial, serta pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, sehingga identifikasi isu-isu strategis dalam perumusan KRP disesuaikan dengan empat pilar utama TPB tersebut.

TPB merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, yang mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

TPB terbagi menjadi 4 (empat) pilar yaitu: pilar sosial terdiri dari TPB 1, 2, 3, 4, dan 5; pilar ekonomi terdiri dari TPB 7, 8, 9, 10, dan 17; pilar lingkungan terdiri dari TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15; serta pilar hukum dan tata kelola kelembagaan terdiri dari TPB 16. Tidak semua indikator TPB menjadi kewenangan di tingkat kabupaten, seperti TPB 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau serta TPB 14 tentang Ekosistem Laut yang kewenangannya berada di tingkat provinsi. Maka, kedua TPB tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis capaian TPB di Kabupaten Cirebon.

2.4.1. Kondisi Umum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Metadata I Indonesia, terdapat 319 indikator dan 169 target untuk pencapaian 17 TPB. Upaya pencapaian indikator TPB tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kota berdasarkan pembagian kewenangan dan kekhususan indikator terkait kondisi geografis. Sedangkan metadata II terdapat 289 indikator tetapi belum ada pemilahan perkewenangan. Berdasarkan kesepakatan Tim Pokja KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon maka disepakati metadata yang dipergunakan adalah metadata I, karena sudah terdapat peraturan turunan dimana terdapat 214 indikator TPB yang relevan bagi Kabupaten Cirebon. Secara lebih lengkap, capaian setiap indikator TPB di Kabupaten Cirebon dan rekap capaian per target TPB disajikan pada Lampiran. Sedangkan rangkuman terkait capaian TPB Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121
Rangkuman Capaian TPB Kabupaten Cirebon

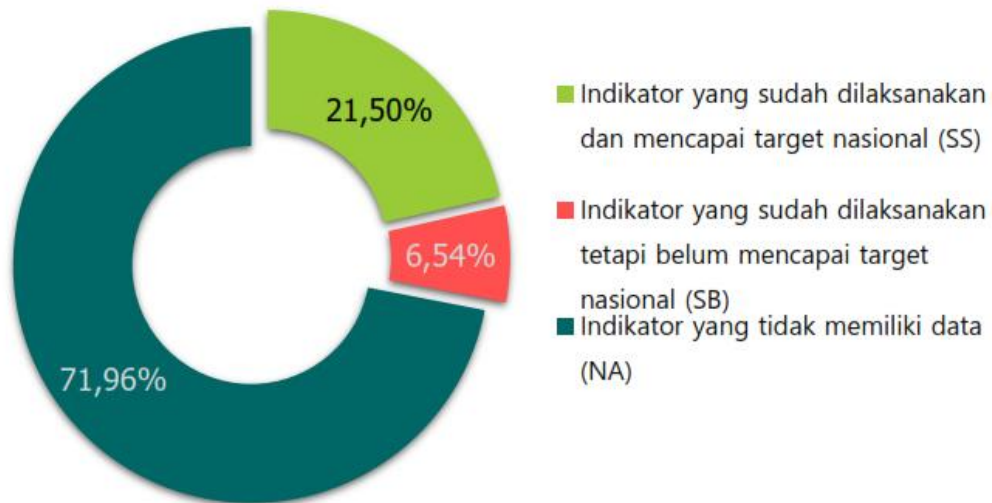
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional (SB)	Indikator yang tidak memiliki data (NA)	Jumlah Indikator
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	8	3	14	25
TPB 2	Tanpa Kelaparan	4	1	6	11
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8	1	25	34
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	3	0	10	13
TPB 5	Kesetaraan Gender	2	4	8	14
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1	0	17	18
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3	2	14	19
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	0	7	11
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	0	0	6	6
TPB 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3	2	13	18
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan	0	0	5	5
TPB 13	Mengatasi Perubahan Iklim	1	0	1	2

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target Nasional (SB)	Indikator yang tidak memiliki data (NA)	Jumlah Indikator
TPB 15	Menghentikan Kehilangan Kehati	0	0	4	4
TPB 16	Masyarakat Yang Inklusif dan Damai	6	1	12	19
TPB 17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	3	0	12	15
Jumlah		46	14	154	214

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

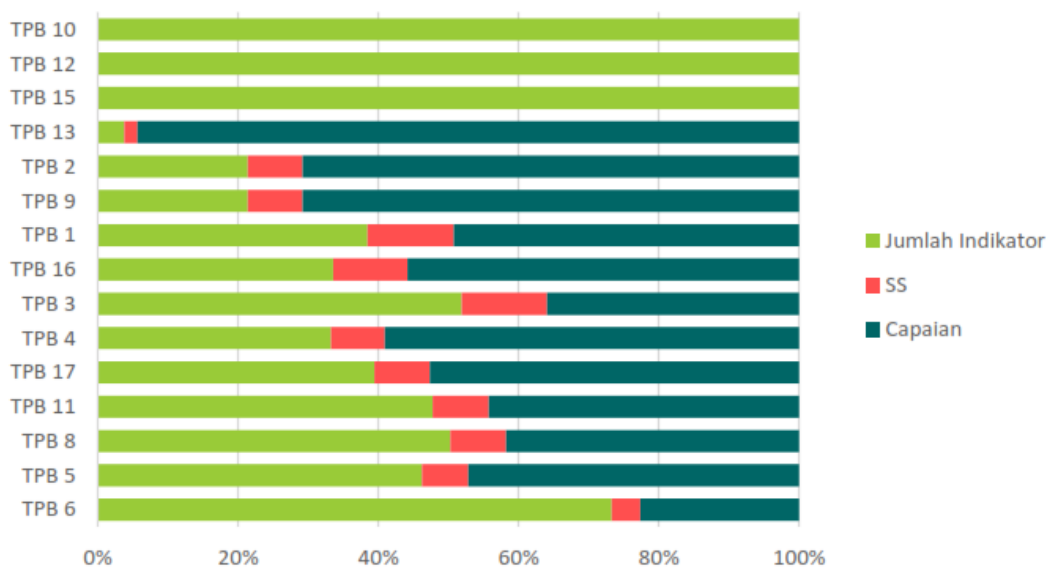
Dari 214 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, terdapat 21,50 % indikator yang diketahui capaiannya, sedangkan 6,54 % sisanya masih belum mencapai target, serta tidak tersedianya data sebesar 71,96%. Terdapat 3 (tiga) kategori capaian TPB untuk setiap indikator, yaitu “telah mencapai target”, “belum mencapai target”, dan “tidak ada data”. Pengkategorian tersebut didasarkan pada target nasional pada Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kategori “telah mencapai target” dan “belum mencapai target” diberikan pada indikator yang telah dilaksanakan dengan capaian yang dibandingkan dengan target nasional sebagaimana tercantum pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara kategori “tidak ada data” diberikan pada indikator yang tidak tersedia data. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2 dibawah ini.

Gambar 2.62
Persentase Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)



Terdapat 21,50 % dari 214 indikator TPB di Kabupaten Cirebon yang telah mencapai target nasional, 6,54 % dari 214 indikator TPB yang belum mencapai target nasional dan 71,96% dari 214 indikator yang tidak ada datanya. Secara lebih lengkap, persentase capaian indikator setiap TPB di Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.63
Persentase Capaian Indikator Setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Cirebon



A. Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional

Indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional di Kabupaten Cirebon sebanyak 46 indikator atau sebesar 21,50%. TPB 1 (Tanpa Kemiskinan) dan TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) memiliki indikator TPB paling banyak yang telah mencapai target nasional, yaitu sebanyak 8 dari 46 indikator yang terdapat pada TPB 1 dan TPB 3.

Sedangkan TPB 10 (Mengurangi Kesenjangan Antarnegara), TPB 12 (Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan), TPB 15 (Menghentikan Kehilangan Kehati) tidak memiliki indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.122
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional di Kabupaten Cirebon

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional (SS)
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	8
TPB 2	Tanpa Kelaparan	4
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	8
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	5
TPB 5	Kesetaraan Gender	2
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	1
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	3
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	0
TPB 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	3
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan	0
TPB 13	Mengatasi Perubahan Iklim	1
TPB 15	Menghentikan Kehilangan Kehati	0
TPB 16	Masyarakat Yang Inklusif dan Damai	6
TPB 17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	3
Jumlah		46

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

B. Indikator TPB Yang Sudah dilaksanakan dan Belum Mencapai Target Nasional

Ditinjau dari indikator yang belum mencapai target nasional, TPB 5 (Kesetaraan Gender) memiliki jumlah indikator TPB paling banyak, yaitu 4 indikator. Sedangkan TPB 4 (Pendidikan Berkualitas), TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan), TPB 9 (Infrastruktur, Industri dan Inovasi), TPB 10 (Mengurangi Kesenjangan Antarnegara), TPB 12 (Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan), TPB 13 (Mengatasi Perubahan Iklim),

TPB 15 (Menghentikan Kehilangan Kehati), TPB 17 (Sarana Revitalisasi Kemitraan Global) mempunyai indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.123
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional di Kabupaten Cirebon

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB)
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	3
TPB 2	Tanpa Kelaparan	1
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	1
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	0
TPB 5	Kesetaraan Gender	4
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	0
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	2
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	0
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	0
TPB 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	2
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan	0
TPB 13	Mengatasi Perubahan Iklim	0
TPB 15	Menghentikan Kehilangan Kehati	0
TPB 16	Masyarakat Yang Inklusif dan Damai	1
TPB 17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	0
Jumlah		14

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

C. Indikator TPB Yang Tidak/Belum Ada Data

Indikator yang tidak/belum ada data (NA) meliputi indikator yang tidak ada data, serta indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Seperti TPB 6 yang pernah dilaksanakan pada tahun 2019 dan belum mencapai target. Tetapi TPB 6 tersebut tidak dilaksanakan kembali sejak tahun 2020, sebagaimana disajikan pada Lampiran 1, sehingga dikategorikan menjadi TPB yang tidak ada data (NA).

Tidak tersedianya data yang tinggi di Kabupaten Cirebon dikarenakan:

- 1 Nomenklatur pendataan yang ada tidak sama dengan kebutuhan data yang diperlukan;
- 2 minimnya alokasi penganggaran; dan
- 3 masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM.

Ditinjau dari indikator yang tidak/belum ada data (NA) meliputi TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) memiliki jumlah indikator TPB paling banyak yaitu 25 indikator. Sedangkan TPB 13 (Mengatasi Perubahan Iklim) merupakan indikator yang tidak memiliki data (NA) terkecil yaitu sebanyak 1 indikator. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.124
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Tidak Memiliki Data (NA) di Kabupaten Cirebon

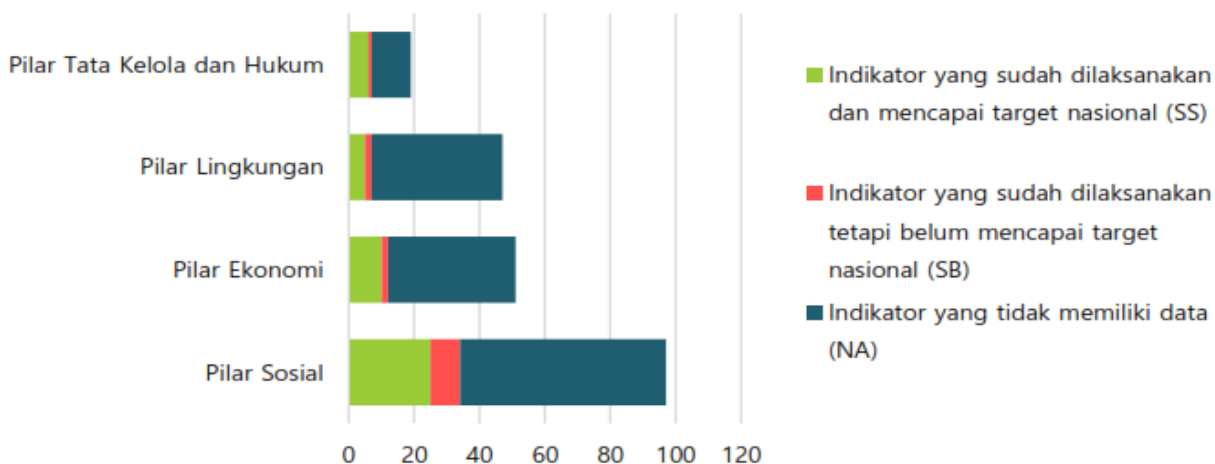
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan		Indikator yang tidak memiliki data (NA)
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	14
TPB 2	Tanpa Kelaparan	6
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	25
TPB 4	Pendidikan Berkualitas	10
TPB 5	Kesetaraan Gender	8
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	17
TPB 8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	14
TPB 9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	7
TPB 10	Berkurangnya Kesenjangan	6
TPB 11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	13
TPB 12	Pola Produksi dan Konsumen Berkelanjutan	5
TPB 13	Mengatasi Perubahan Iklim	1
TPB 15	Menghentikan Kehilangan Kehati	4
TPB 16	Masyarakat Yang Inklusif dan Damai	12
TPB 17	Sarana Revitalisasi Kemitraan Global	12
Jumlah		154

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

2.4.2. Capaian Target Indikator TPB Berdasarkan Pilar

Berdasarkan identifikasi, pengumpulan, dan analisis data terhadap 214 indikator TPB kewenangan Kabupaten Cirebon yang dibagi kedalam 4 Pilar Pembangunan yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Berikut hasil capaian target indikator TPB setiap Pilar di Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.64
Capaian Target indikator TPB Per Pilar di Kabupaten Cirebon



Sumber: hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Berdasarkan hasil capaian target indikator setiap pilar di Kabupaten Cirebon, terlihat bahwa capaian SS dan SB merupakan capaian paling besar, yang terdapat pada pilar sosial. Sedangkan data yang tidak tersedia atau NA paling besar terdapat pada pilar sosial dan pilar ekonomi.

A. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Pilar pembangunan sosial terdiri atas 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan

Bertujuan mengahiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan

Bertujuan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Bertujuan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas

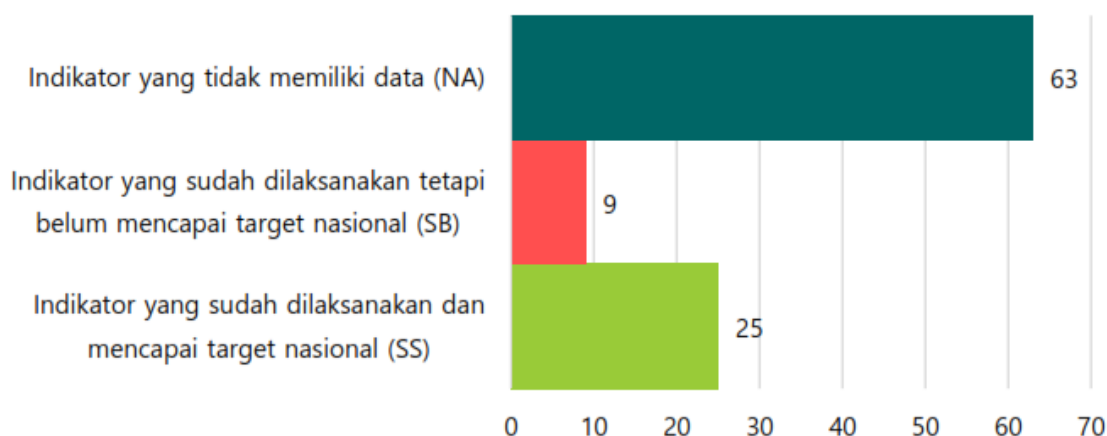
Bertujuan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Tujuan 5 : Kesenjangan Gender

Bertujuan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Kelima TPB dalam pilar sosial tersebut terdiri dari 97 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.65
Capaian Target Indikator TPB Pilar Sosial



Sumber: hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

TPB pilar sosial di Kabupaten Cirebon yang sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 25 indikator atau sebesar 25,77%. Terdapat 9 indikator atau sebesar 36% indikator TPB pilar sosial di Kabupaten Cirebon yang belum mencapai target nasional, serta 63 indikator atau sebesar 64,94% belum ada data atau NA. Indikator TPB pilar sosial yang belum mencapai target nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap atau permasalahan yang terdapat di Kabupaten Cirebon.

B. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Pilar pembangunan ekonomi terdiri dari 5 tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu:

Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau

Bertujuan menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua.

Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Bertujuan membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industry inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

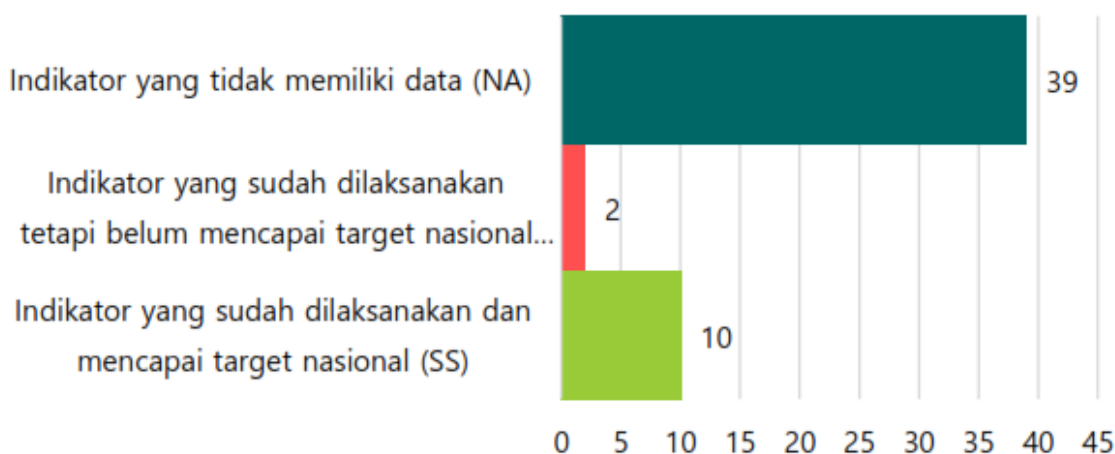
Bertujuan mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara.

Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Bertujuan menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Terdapat 5 TPB yang termasuk dalam pilar ekonomi. Namun TPB 7 tidak menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, melainkan kewenangan pemerintah provinsi sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Keempat TPB dalam pilar ekonomi tersebut terdiri dari 51 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon.

Gambar 2.66
Capaian Target indikator TPB Pilar Ekonomi



Sumber: hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Indikator TPB pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon yang sudah mencapai target nasional sebanyak 10 indikator atau sebesar 19,60%. Namun masih terdapat 2 indikator atau sebesar 3,92% indikator TPB pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon yang belum mencapai target nasional, serta 39 indikator atau sebesar 76,47% yang belum ada data atau NA.

Indikator TPB pilar ekonomi yang belum mencapai target nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Cirebon. Selain itu indikator TPB pilar ekonomi yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar, sehingga kondisi terkait pilar ekonomi di Kabupaten Cirebon tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

C. Capaian Target Indikator TPB dalam Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Pilar lingkungan terdiri atas 6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak

Bertujuan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.

Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Bertujuan menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.

Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Bertujuan menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Bertujuan mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Tujuan 14: Ekosistem Laut

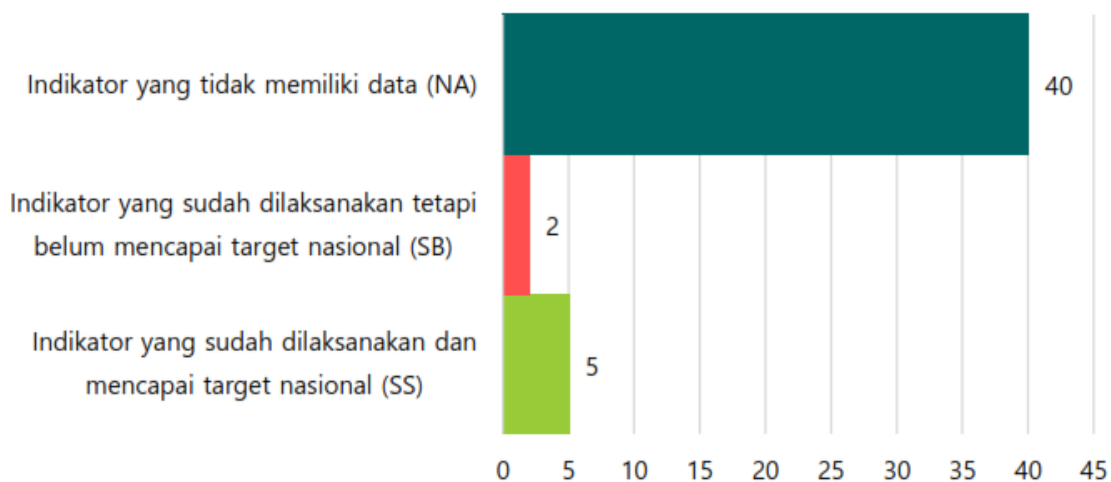
Bertujuan melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Tujuan 15: Ekosistem Darat

Bertujuan melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Namun TPB 14 tidak menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon, melainkan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, sehingga indikatornya tidak diperhitungkan dalam analisis ini. Kelima TPB dalam pilar lingkungan yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon terdiri dari 47 indikator.

Gambar 2.67
Capaian Target Indikator TPB Pilar Lingkungan



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Indikator TPB pilar lingkungan di Kabupaten Cirebon sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 5 indikator atau sebesar 10,63%. Terdapat 2 indikator atau sebesar 4,25% indikator TPB pilar lingkungan di Kabupaten Cirebon yang belum mencapai target nasional serta 40 indikator atau sebesar 85,10% yang belum ada data atau NA.

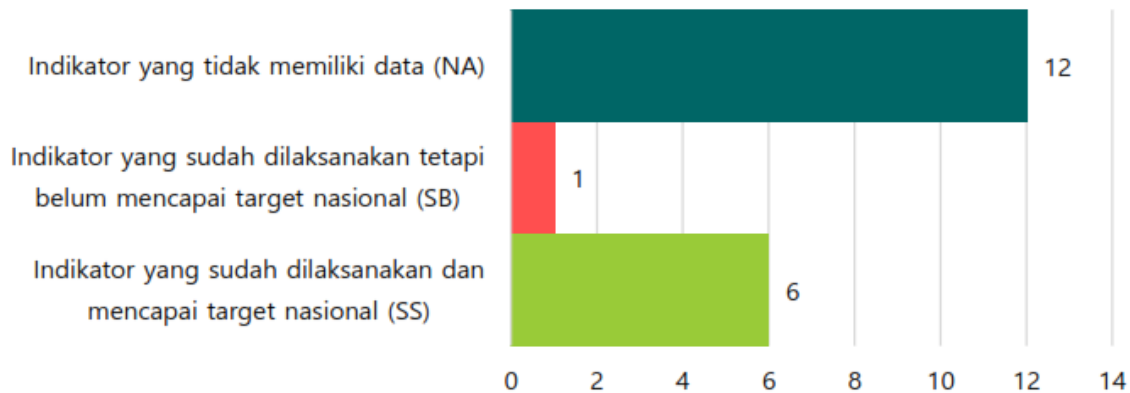
Indikator TPB pilar lingkungan yang belum mencapai target nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Cirebon. Selain itu indikator TPB pilar lingkungan yang tidak tersedia data capaiannya

perlu diperhatikan karena jumlahnya masih besar, sehingga kondisi terkait pilar lingkungan di Kabupaten Cirebon tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

D. Capaian Target Indikator TPB dalam Tata Kelola dan Hukum

Pilar pembangunan tata kelola dan hukum adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Pilar pembangunan tata kelola dan hukum terdiri atas 1 TPB yaitu tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh yang bertujuan menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. TPB dalam pilar tata kelola dan hukum yang menjadi kewenangan Kabupaten Cirebon terdiri dari 19 indikator.

Gambar 2.68
Capaian Target Indikator TPB Pilar Tata Kelola dan Hukum



Sumber: hasil analisis Tim KLHS RPJPD Kabupaten Cirebon, Tahun 2023

Indikator TPB pilar tata kelola dan hukum di Kabupaten Cirebon sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 6 indikator atau sebesar 31,57%. Namun masih terdapat 1 indikator atau sebesar 5,26% indikator TPB pilar tata kelola dan hukum di Kabupaten Cirebon yang belum mencapai target nasional, serta 12 indikator atau sebesar 63,15% yang belum ada data atau NA. Indikator TPB pilar lingkungan yang belum mencapai target nasional dan belum ada data perlu menjadi perhatian karena merupakan gap/permasalahan di Kabupaten Cirebon. Selain itu indikator TPB pilar tata kelola dan

hukum yang tidak tersedia data capaiannya perlu diperhatikan karena jumlahnya masih cukup besar sehingga kondisi terkait pilar tata kelola dan hukum di Kabupaten Cirebon tidak dapat diketahui secara utuh dan menyeluruh.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2024) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2025), yang antara lain mencakup indikator makro pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2026, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon tahun 2025-2029. Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

3.1.1. Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Tahun 2024

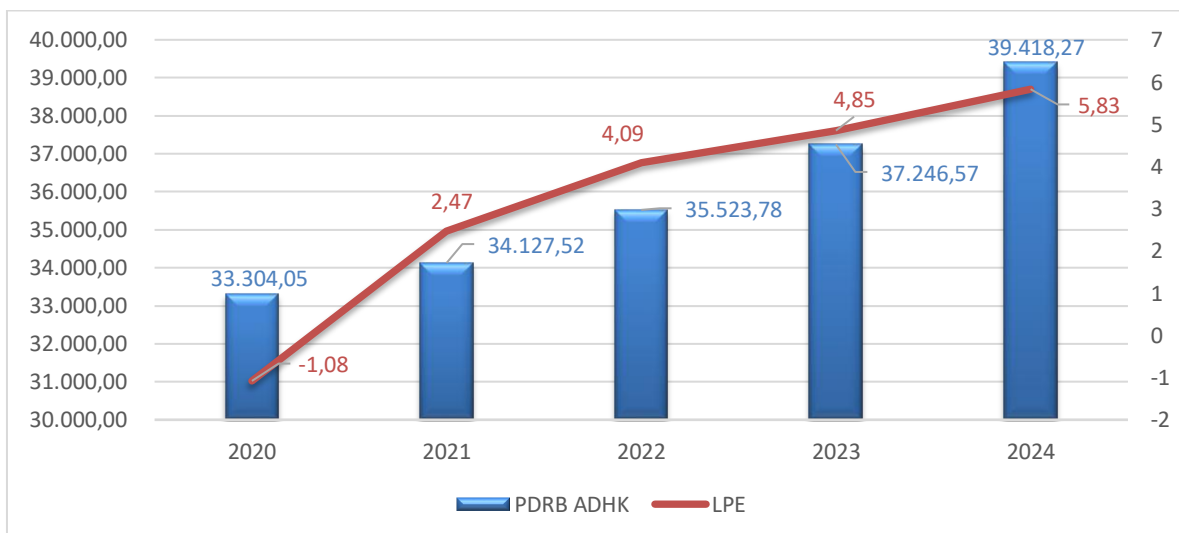
Kabupaten Cirebon merupakan wilayah yang cukup besar dengan luas wilayah sebesar 990,36 Km² secara administratif terbagi menjadi 40 kecamatan dengan 12

kelurahan dan 412 desa. Angka proyeksi penduduk Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebanyak 2.360.441 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen sebagai akibat dari tingkat urbanisasi. Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi dan peranannya dalam andil perekonomian Jawa Barat.

Kabupaten Cirebon memiliki berbagai potensi dan peranannya dalam andil perekonomian Jawa Barat. Nilai PDRB Kabupaten Cirebon sebesar 67,19 trilyun memberikan kontribusi sebesar 2,38 persen terhadap PDRB Jawa Barat tahun 2024 dan menempati peringkat 12 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sementara pada sektor lapangan usaha industri pengolahan, Kabupaten Cirebon menyumbang 1,86 persen terhadap PDRB ADHB sektor industri pengolahan Jawa Barat.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Cirebon, yang salah satunya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup memberikan harapan terhadap peluang berinvestasi maupun memberikan dampak nilai tambah ekonomi terhadap masyarakat. Hal ini terlihat dari PDRB ADHK dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon selama 5 tahun terakhir (2020-2024) yang juga menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi covid-19 dan kondisi terkini Kabupaten Cirebon sebagaimana pada gambar berikut ini:

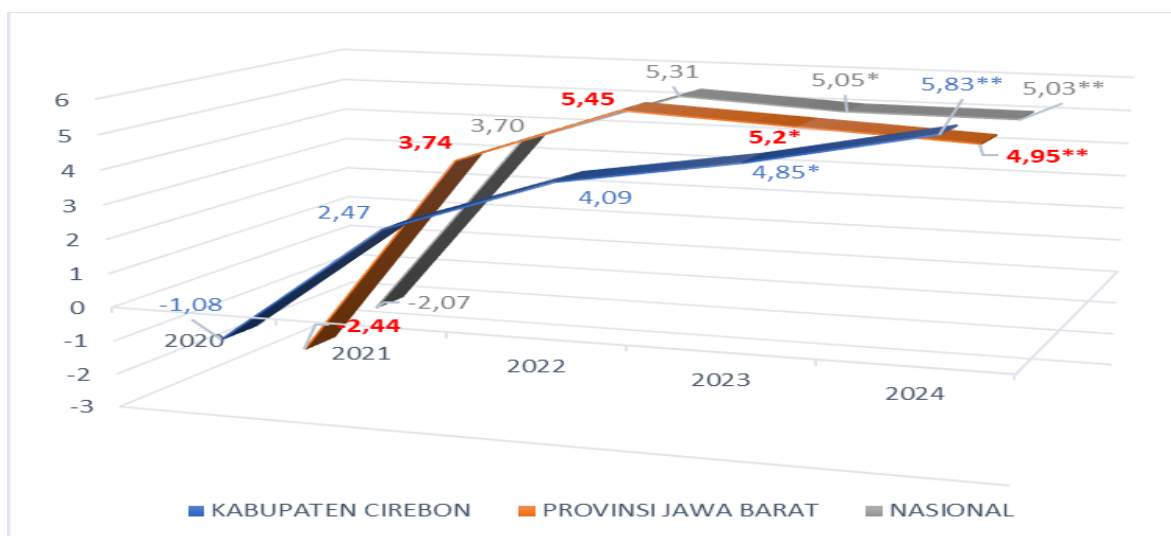
Gambar 3.1
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon, 2020-2024



Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025, diolah.

Hingga akhir tahun 2024 pemulihan ekonomi Kabupaten Cirebon semakin menguat, hal tersebut ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 5,83 persen. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan target daerah Kabupaten Cirebon tahun 2024 juga menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon **lebih baik** dari target daerah dalam RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 5,08 persen. Selain itu, LPE Kabupaten Cirebon pada hingga akhir tahun 2024 sebesar 5,83 persen menunjukkan jika tingkat perubahan pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini Kabupaten Cirebon **tumbuh diatas 0 (nol)** bahkan pertumbuhannya **melebihi angka sebelum pandemi Covid-19** yang hanya berada dikisaran angka 4,68 persen. Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dengan rata-rata capaian wilayah lain di Jawa Barat sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini menunjukkan jika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan yang **lebih baik**, dimana LPE Kabupaten Cirebon sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,68 persen tumbuh positif 1,15 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 5,83 persen sedangkan rata-rata LPE wilayah lain di Jawa Barat sebelum pandemi covid-19 sebesar 5,66 persen tumbuh negatif 0,70 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 4,97 persen. Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan capaian nasional dan Jawa Barat disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Cirebon dengan
Capaian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024



Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025, diolah

Perbandingan perubahan pertumbuhan ekonomi dengan capaian nasional dan Jawa Barat sebelum pandemi Covid-19 dan kondisi terkini juga menunjukkan jika Kabupaten Cirebon mengalami perubahan yang **lebih baik**, dimana LPE Kabupaten Cirebon sebelum pandemi covid-19 sebesar 4,68 persen tumbuh positif 1,15 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 5,83 persen sedangkan capaian LPE nasional sebelum pandemi covid-19 sebesar 5,02 persen juga tumbuh positif namun hanya sebesar 0,01 persen pada kondisi terkini (akhir tahun 2024) menjadi 5,03 persen.

3.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha menunjukkan pertumbuhan positif menuju tingkat keseimbangan pertumbuhan sebelum pandemi COVID-19 pada beberapa sektor lapangan usaha, yang didorong oleh penormalan konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat, terutama pada *peak season* hari besar keagamaan dan libur sekolah. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha 5 (*lima*) tahun terakhir disajikan pada table berikut ini:

Tabel 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.74	-0.09	4.00	-2.13	0.12
Pertambangan dan Penggalian	0.06	6.80	-0.05	-0.04	5.44
Industri Pengolahan	-1.15	2.56	4.69	5.38	5.87
Pengadaan Listrik dan Gas	-4.62	13.46	1.56	4.52	0.39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.03	8.98	2.46	6.96	5.68
Konstruksi	-4.39	3.86	-0.03	-0.03	4.60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-7.03	3.32	2.30	2.02	2.54
Transportasi dan Pergudangan	-3.73	0.43	9.60	16.88	14.91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-9.54	-1.07	7.67	7.64	2.20
Informasi dan Komunikasi	30.47	4.88	6.10	5.51	20.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.33	4.74	0.85	4.97	5.11
Real Estat	1.26	9.30	4.77	4.19	15.98
Jasa Perusahaan	-10.31	8.12	9.96	8.76	0.21

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-4.55	-0.92	-2.31	7.38	9.26
Jasa Pendidikan	7.59	0.08	2.95	9.85	2.75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-0.92	7.37	5.05	4.90	2.05
Jasa lainnya	-2.36	1.21	12.59	13.35	5.66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-1.08	2.47	4.09	4.85	5.83

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai bidang dan sektor. Masa pemulihan dampak pandemi Covid-19, berdasarkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha menggambarkan bahwa hingga akhir tahun 2024 semua kategori lapangan usaha tumbuh positif. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2024 menggambarkan seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif. PDRB dan LPE menurut Lapangan Usaha Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
PDRB dan LPE Kabupaten Cirebon Menurut Lapangan Usaha, 2023-2024

Lapangan Usaha	PDRB Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)					
	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2023*	2024**	LPE (%)	2023*	2024**	LPE (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.161,96	9.917,57	8,25	4.640,71	4.646,20	0,12
Pertambangan dan Penggalian	624,99	710,38	13,66	445,08	469,31	5,44
Industri Pengolahan	12.452,54	13.771,00	10,59	7.706,10	8.158,30	5,87
Pengadaan Listrik dan Gas	116,17	117,29	0,96	65,05	65,30	0,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	75,68	92,47	22,19	39,64	41,89	5,68
Konstruksi	6.551,08	7.051,00	7,63	4.015,83	4.200,44	4,60
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.333,98	8.774,19	5,28	5.256,04	5.389,80	2,54
Transportasi dan Pergudangan	6.257,44	7.631,90	21,97	3.312,59	3.806,34	14,91
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.078,30	2.191,56	5,45	1.269,89	1.297,80	2,20
Informasi dan Komunikasi	1.596,12	1.890,52	18,44	1.690,94	2.033,06	20,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.590,38	2.692,49	3,94	1.445,45	1.519,32	5,11
Real Estat	1.458,60	1.778,28	21,92	1.024,04	1.187,72	15,98
Jasa Perusahaan	586,82	595,47	1,47	373,06	373,84	0,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.667,37	1.755,76	5,30	896,17	979,15	9,26
Jasa Pendidikan	3.920,73	4.004,95	2,15	2.377,38	2.442,64	2,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.280,93	1.357,12	5,95	930,90	950,00	2,05
Jasa lainnya	2.556,68	2.864,09	12,02	1.757,71	1.857,14	5,66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	61.309,76	67.196,03	9,60	37.246,57	39.418,27	5,83

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Laju PDRB ADHB Kabupaten Cirebon tahun 2024 menggambarkan sektor yang tumbuh paling tinggi adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah

dan daur ulang yang tumbuh 22,19 persen. Dominannya sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang ini disebabkan adanya kenaikan tarif PDAM Kabupaten Cirebon sebesar 18 persen pada tahun 2023. Selain sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan adalah sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami kenaikan sebesar 21,97 persen. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan harga BBM pada tanggal 10 Agustus 2024 sehingga berdampak pada kenaikan tarif transportasi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang kuat ditunjukkan oleh berbagai sektor produksi terutama industri pengolahan, transportasi dan pergudangan serta perdagangan. Kinerja perekonomian Kabupaten Cirebon sangat dipengaruhi kinerja sektor industri karena sektor tersebut merupakan sektor dominan. Tahun 2023 sektor industri olahan nilainya sebesar 12,45 trilyun naik sebesar 10,59 persen menjadi sebesar 13,77 trilyun di tahun 2024. Pertumbuhan sektor industri di Kabupaten Cirebon memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai bahan baku industri dan memberikan efek domino terhadap sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Peningkatan percepatan kinerja ekonomi dapat ditentukan dengan melihat sektor unggulan disuatu wilayah berdasarkan struktur perekonomiannya. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase kontribusi suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Distribusi PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 dan atas dasar harga berlaku (ADHB) Kabupaten Cirebon menurut lapangan usaha, 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3.

Distribusi Persentase PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)									
	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022*	2023**	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,93	15,20	15,57	14,94	14,76	13,70	13,36	13,35	12,46	13,32
Pertambangan dan Penggalian	1,06	1,12	1,08	1,02	1,06	1,25	1,31	1,25	1,19	1,24
Industri Pengolahan	20,55	20,67	20,59	20,31	20,49	20,45	20,47	20,58	20,69	20,46
Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,21	0,20	0,19	0,17	0,16	0,18	0,18	0,17	0,17
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,12	0,11	0,12	0,14	0,10	0,11	0,10	0,11	0,08
Konstruksi	10,92	11,39	11,17	10,69	10,49	11,62	11,77	11,31	10,78	12,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,48	14,79	14,21	13,59	13,06	14,64	14,76	14,50	14,11	15,57
Transportasi dan Pergudangan	8,29	8,14	8,81	10,21	11,36	7,73	7,58	7,98	8,89	7,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,16	3,06	3,25	3,39	3,26	3,33	3,21	3,32	3,41	3,64
Informasi dan Komunikasi	2,96	2,76	2,67	2,60	2,81	4,32	4,43	4,51	4,54	3,28
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	4,07	4,15	4,23	4,01	3,91	4,00	3,88	3,88	3,82
Real Estat	2,39	2,48	2,44	2,38	2,65	2,58	2,75	2,77	2,75	2,52
Jasa Perusahaan	0,84	0,86	0,91	0,96	0,89	0,87	0,91	0,97	1,00	0,96
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,01	3,08	2,74	2,72	2,61	2,59	2,50	2,35	2,41	2,68
Jasa Pendidikan	6,49	6,41	6,20	6,39	5,96	6,31	6,16	6,09	6,38	5,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,06	2,14	2,08	2,09	2,02	2,36	2,48	2,50	2,50	2,36
Jasa lainnya	3,65	3,50	3,82	4,17	4,26	4,09	4,04	4,37	4,72	4,14
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

Struktur ekonomi Kabupaten Cirebon menggambarkan jika sektor industri pengolahan merupakan sektor penggerak perekonomian di Kabupaten Cirebon dari tahun ke tahun. Selain itu sektor pertanian, Kehutanan dan perikanan serta sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan pergerakan dan terus memberikan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Cirebon. Sektor industri pengolahan Kabupaten Cirebon merupakan salah satu barometer perekonomian Jawa Barat berada pada urutan ke-13. Hal tersebut terlihat dengan adanya kecenderungan arus migrasi untuk mencari pekerjaan khususnya di daerah industri seperti Kecamatan Plered, Plumbon, Depok, Arjawinangun, Astanajapura, Ciledug dan Losari. Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri terlihat dari kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Cirebon yang mencapai angka 20,49 persen di Tahun 2024.

Perkembangan suatu sektor dalam kurun waktu tertentu harus memperhatikan peranan sektor tersebut dalam PDRB secara keseluruhan dengan kurun waktu yang sama. Seluruh sektor dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer merupakan sektor yang mengandalkan sumber langsung dari alam terdiri dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder adalah sektor yang mengolah bahan baku dari sektor primer maupun sektor sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air serta sektor konstruksi. Sektor tersier dikenal sebagai sektor jasa atau industri jasa adalah sektor ekonomi yang bergerak dalam kegiatan menghasilkan suatu jasa, termasuk dalam sektor tersier diantaranya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib, sektor jasa pendidikan, sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, serta sektor jasa lainnya. PDRB ADHK dan peranannya menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Cirebon, 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
PDRB ADHK (Milyar Rupiah) dan Peranannya (Persen) Menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Sektor	2020	2021	2022	2023*	2024**
Primer	8.419,50	8.540,05	9.431,51	9.786,95	10.627,95
	16,99	16,33	16,65	15,96	15,82
Sekunder	15.750,55	16.936,41	18.168,72	19.195,46	21.031,76
	31,78	32,38	32,07	31,31	31,30
Tersier	25.391,25	26.833,48	29.053,41	32.327,36	35.536,33
	51,23	51,30	51,28	52,73	52,88
PDRB	49.561,30	52.309,94	56.653,64	61.309,77	67.196,04
	100	100	100	100	100

Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Sektor primer atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dari 15,96 persen di tahun 2023 menjadi 15,82 persen di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan adanya penurunan laju pertumbuhan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dominan pada sektor primer. Kontribusi sektor

sekunder juga mengalami penurunan, hingga mencapai 31,30 persen pada tahun 2024 seiring dengan sektor lapangan usaha konstruksi yang mengalami pertumbuhan negatif

3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Sisi Pengeluaran

Pertumbuhan PDRB baik dari sisi lapangan usaha maupun sisi pengeluaran merupakan instrumen yang digunakan sebagai evaluasi terhadap keberhasilan program pembangunan ekonomi suatu Pemerintah Daerah. PDRB menurut lapangan usaha menjabarkan perekonomian dalam hal penciptaan nilai tambah atas produksi barang dan jasa secara agregat oleh seluruh lapangan usaha, sedangkan PDRB menurut pengeluaran menjabarkan bagaimana seluruh produk barang dan jasa tersebut digunakan. Lebih spesifik PDRB menurut pengeluaran menjabarkan perilaku sektor pelaku ekonomi dalam melakukan pengeluaran konsumsi akhir, investasi dan perdagangan antar wilayah serta antar negara. Pengeluaran konsumsi akhir dilakukan oleh rumah tangga, Lembaga nonprofit yang Melayani Rumah tangga (LNPR) serta Pemerintah. Konsumsi yang dilakukan oleh korporasi dalam rangka proses produksi disebut konsumsi antara dan bukan merupakan komponen PDRB menurut pengeluaran. Investasi dalam hal ini PMTB yang dilakukan oleh seluruh sektor pelaku ekonomi yaitu rumah tangga, LNPR, pemerintah, korporasi baik swasta maupun BUMN dan BUMD juga menggambarkan agregat perubahan inventori, serta perdagangan luar wilayah baik antar provinsi maupun antar negara.

Tabel 3.5.
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	44.189,19	46.548,04	50.703,32	55.199,53	60.439,48
Pengeluaran Konsumsi LNPR	945,04	979,65	1.045,53	1.232,25	1.373,53
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.527,80	3.716,91	3.734,37	3.880,57	3.824,95
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	14.704,55	15.531,32	16.430,18	17.130,00	17.324,56
Perubahan Inventori	829,66	- 477,19	117,08	96,46	376,82

Komponen Pengeluaran	PDRB Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)				
	Atas Dasar Harga Berlaku				
	2020	2021	2022	2023	2024
Net (Ekspor-Impor)	- 14.634,67	-13.988,80	10.722.041,39	-16.229,04	-16.143,32
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	49.561,56	52.309,94	56.653,64	61.309,76	67.196,03

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Nilai PDRB Kabupaten Cirebon (ADHB) selama periode tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar nasional dan internasional. Hingga akhir tahun 2024 nilai PDRB Kabupaten Cirebon 67,196 triliun rupiah secara nilai berlaku. Komponen inventori mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 0,28 triliun rupiah, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang bertambah secara total sebesar 5,24 triliun rupiah dan pengeluaran konsumsi pemerintah yang menurun secara total sebesar 0,06 triliun rupiah.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga berbagai produk dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Sementara selama kurun waktu 2020–2024, beberapa komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK menunjukkan peningkatan hingga tahun 2024. Akibat pandemi, nilai PDRB ADHK pada tahun 2020 mengalami pengurangan yang cukup berarti. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, tahun 2024 PDRB ADHK menunjukkan kenaikan 17.634,47 miliar rupiah secara total, peningkatan nilai terjadi di seluruh komponen kecuali komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Net (Ekspor-Impor).

Tabel 3.6.
Perbandingan Indikator Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Kabupaten Cirebon Tahun 2024

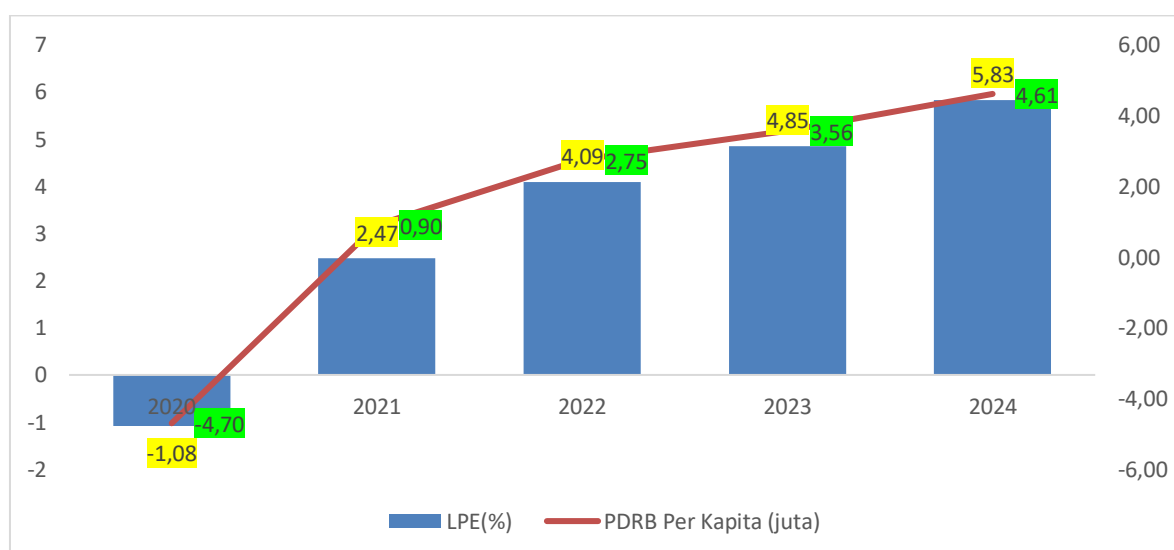
Komponen Pengeluaran	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (Persen)	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (Persen)
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	89.95	4.45
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.04	6.95
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5.69	-4.24
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	25.78	1.93
Perubahan Inventori	0.56	-
Net (Ekspor-Impor)	-24.02	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	5.83

Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025

3.1.2. PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Struktur ekonomi Kabupaten Cirebon di dominasi oleh sektor industri pengolahan. Peningkatan sektor industri pengolahan Kabupaten Cirebon pada tahun 2024, selain berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, juga menyebabkan beberapa indikator ekonomi yang lain ikut meningkat seperti laju PDRB per kapita. Gambar berikut menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Cirebon bergerak searah dengan Laju PDRB Per Kapita.

Gambar 3.3.
LPE dan Laju PDRB Per Kapita Kabupaten Cirebon, 2020-2024



Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Pendapatan perkapita merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima masyarakat suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut dapat dikatakan bertambah baik. PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini.

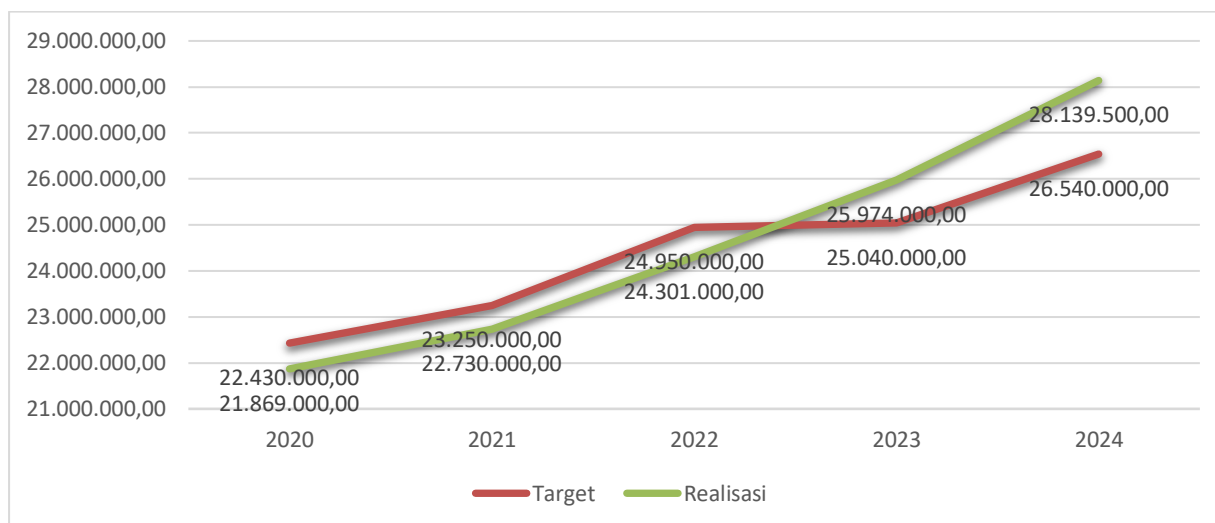
Tabel 3.7.
PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita ADHB	Perubahan	PDRB Per Kapita ADHK 2010	Perubahan
	(Jiwa)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
2020	2.270.610	21.869.000,00	-2,83	14.696.000,00	-4,70
2021	2.291.000	22.730.000,00	3,94	14.829.000,00	0,90
2022	2.315.417	24.301.000,00	6,91	15.237.000,00	2,75
2023	2.360.441	25.974.000,00	6,88	15.779.000,00	3,56
2024	2.387.961	28.139.500,00	8,33	16.507.000,00	4,61

Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

PDRB per kapita Kabupaten Cirebon rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.387.919 jiwa, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 28.140.000,00. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 8,34 persen dibandingkan tahun 2023. Secara riil tingginya nilai PDRB per kapita ADHB Kabupaten Cirebon disebabkan oleh peranan sektor industri pengolahan, hal ini tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Cirebon karena Sebagian dari hasil industri pengolahan yang di ekspor sehingga *multiplier effect* dari adanya industri belum cukup memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. Perbandingan PDRB per kapita (ADHB) dengan target daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.4.
Perbandingan PDRB Per Kapita (ADHB) dengan Target Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024



Sumber Data : 1. BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025
 2. Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Sejalan dengan peningkatan PDRB per kapita secara nominal, hasil pemantauan perkembangan daya beli masyarakat secara riil dengan menggunakan PDRB per kapita ADHK Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 16.507.000,00 atau meningkat sebesar 4,61 persen dibandingkan tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya beli Masyarakat yang cukup berarti pada tahun 2024.

3.1.3. Ekspor dan Impor Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8.
Perkembangan Net Ekspor Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Milliar Rp)	-14634,7	-13988,8	-15376,9	-16.229,0	-16.143,32
b. ADHK 2010 (Milliar Rp)	- 8.409,14	- 7.650,36	- 7.706,87	- 7.284,45	-6.804,98
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB)	-29,53	-26,74	-27,14	-26,44	-24,02

Sumber Data : BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Tahun 2024 ini nilai nominal net ekspor Kabupaten Cirebon sama seperti tahun-tahun sebelumnya masih bernilai negatif, yang artinya neraca antar daerah di Kabupaten Cirebon mengalami defisit, nilai ekspor Kabupaten Cirebon lebih rendah

dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2024, nilai net ekspor Kabupaten Cirebon adalah negatif 16.143,32 miliar rupiah. Bila dihitung berdasarkan harga konstan 2010 nilai net ekspor Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah sebesar negatif 6.804,98 miliar rupiah. Baik berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun konstan, nilai net ekspor Kabupaten Cirebon menunjukkan nilai yang menurun setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir nilai ekspor Kabupaten Cirebon relatif meningkat jika dibandingkan dengan nilai impornya. Sepanjang tahun 2020 perekonomian global terdampak pandemi Covid-19 implikasinya terhadap transaksi perdagangan antar negara terjadi penurunan kinerja. Perekonomian di negara tujuan ekspor Kabupaten Cirebon yaitu Amerika Serikat, Eropa dan Asia mengalami kontraksi sehingga penghematan anggaran belanja merupakan jalan keluar untuk penanganan pandemi Covid-19. Selain itu secara global penurunan permintaan terhadap barang dan jasa juga karena daya beli masyarakat turut melemah karena pendapatan secara agregat mengalami penurunan. Hal ini secara langsung berdampak terhadap permintaan ekspor Kabupaten Cirebon sehingga kinerja positif tidak dapat dipertahankan.

3.1.4. Investasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024

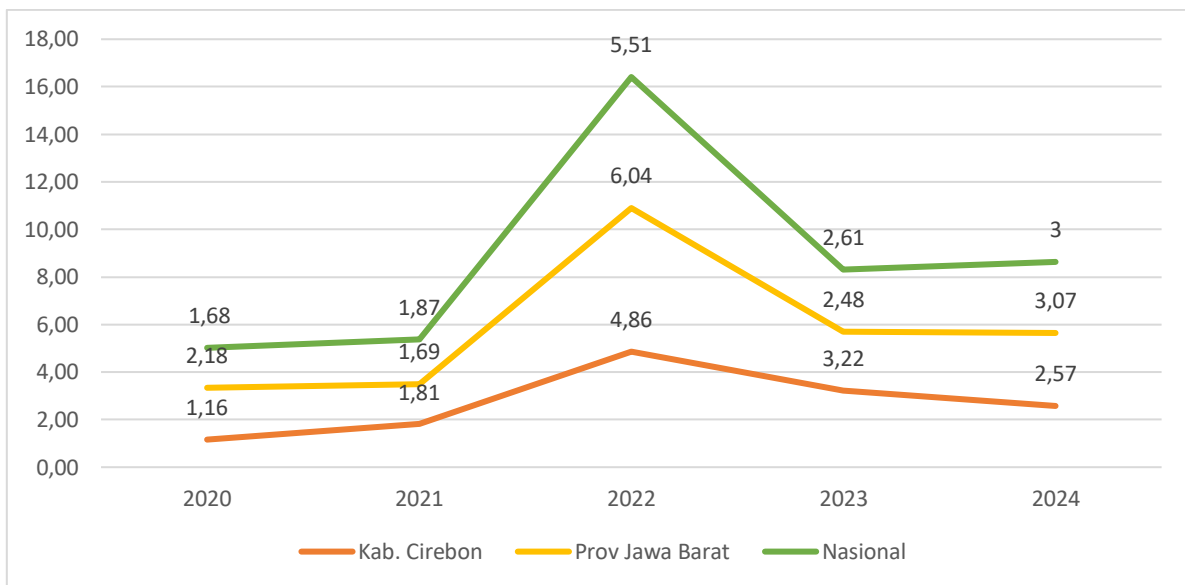
Periode tahun 2024 realisasi investasi Kabupaten Cirebon adalah sebesar Rp 3,116 triliun, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebesar 3,1 persen, di mana realisasi investasi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 3,022 triliun. Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi salah satu bagian pencaangan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui investasi di beberapa kawasan terpilih oleh Provinsi Jawa Barat melalui percepatan pembangunan di kawasan Rebana. Kawasan Rebana di Jawa Barat memiliki proporsi investasi yang rendah dibandingkan dengan total investasi di seluruh provinsi. Realisasi investasi di Kawasan Rebana hanya mencapai Rp17,83 Triliun atau sekitar 8,4 persen dari gabungan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Jawa Barat.

3.1.5. Inflasi Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang disertai dengan peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus (*continue*). Dalam aplikasinya, inflasi dapat menjadi indikator langsung untuk melihat tingkat perubahan

atau proses kenaikan/penurunan harga yang berlangsung secara terus-menerus dan saling memengaruhi. Laju inflasi yang cukup fluktuatif dalam kegiatan perekonomian di Kabupaten Cirebon masih tergolong terkendali yang merupakan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi. Perbandingan perkembangan inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional 5 (*lima*) tahun terakhir disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.5.
Perkembangan Inflasi Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Persen)



Sumber: Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, Tahun 2025.

Laju inflasi di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi, dimana Laju Inflasi pada tahun 2020 mencapai 1,16 persen dan mulai mengalami penurunan sampai pada tahun 2021 menjadi 1,81 persen. Selanjutnya pada tahun berikutnya laju inflasi terus mengalami kenaikan menjadi 4,86 persen di tahun 2022 kemudian berangsur-angsur turun kembali di 2 tahun kemudian menjadi 2,57 persen di tahun 2024. Angka laju inflasi Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2024 selalu berada di bawah laju inflasi Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal ini menandakan ketersediaan pasokan dan distribusi komoditas barang-barang yang terkait langsung dengan masyarakat dalam keadaan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon.

3.1.6. Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

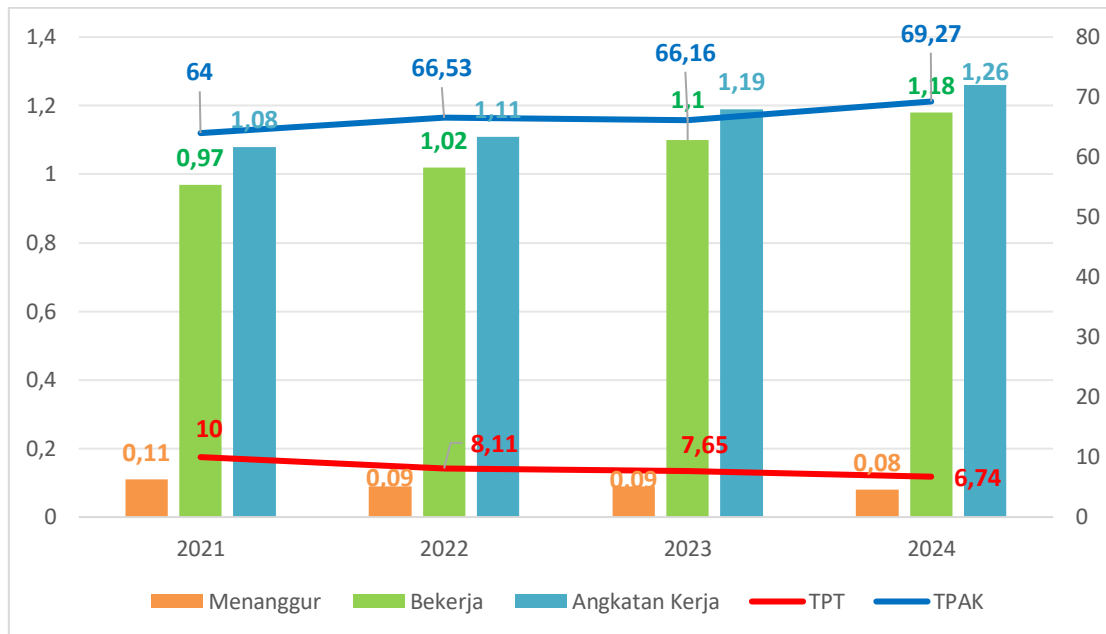
Keadaan ketenagakerjaan pada umumnya dapat diamati dari 2 (*dua*) aspek, yaitu aspek ketersediaan (*supply*) dan aspek kebutuhan/permintaan (*demand*). Idealnya kedua aspek tersebut berada pada posisi yang seimbang, yang berarti bahwa jumlah penduduk yang mencari pekerjaan terpenuhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Apabila kondisi tersebut belum dapat tercapai, maka akan terjadi pengangguran. Persoalan menjadi lebih kompleks karena bukan hanya terjadinya ketidakseimbangan dari sisi jumlah, namun mencakup karakteristik ketenagakerjaan lainnya seperti perubahan struktur umur, penduduk usia kerja, tingkat pendidikan, distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan dan sebagainya.

3.1.6.1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tahun 2024, penduduk usia kerja Kabupaten Cirebon mencapai 1,8 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar, yakni 1,18 juta aktif dalam pasar kerja, sedangkan yang lainnya, berjumlah 0,56 juta jiwa, tidak tergabung dalam angkatan kerja. Struktur pasar kerja tahun 2024 menunjukkan bahwa terdapat 1,18 juta jiwa yang telah mendapat pekerjaan dan 0,08 juta jiwa yang menganggur. Secara tahunan, terjadi peningkatan angkatan kerja sekitar 0,16 juta jiwa dari tahun 2023. Jumlah individu yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 0,08 juta jiwa dari tahun 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 2024, TPAK berada pada angka 69,27 persen, meningkat signifikan sejumlah 3,11 persen dari tahun 2023. TPAK merupakan proporsi dari angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah keseluruhan individu dalam usia produktif, mencerminkan proporsi dari populasi yang aktif berkontribusi dalam ekonomi suatu negara atau wilayah.

Gambar 3.6.

Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, 2021-2024



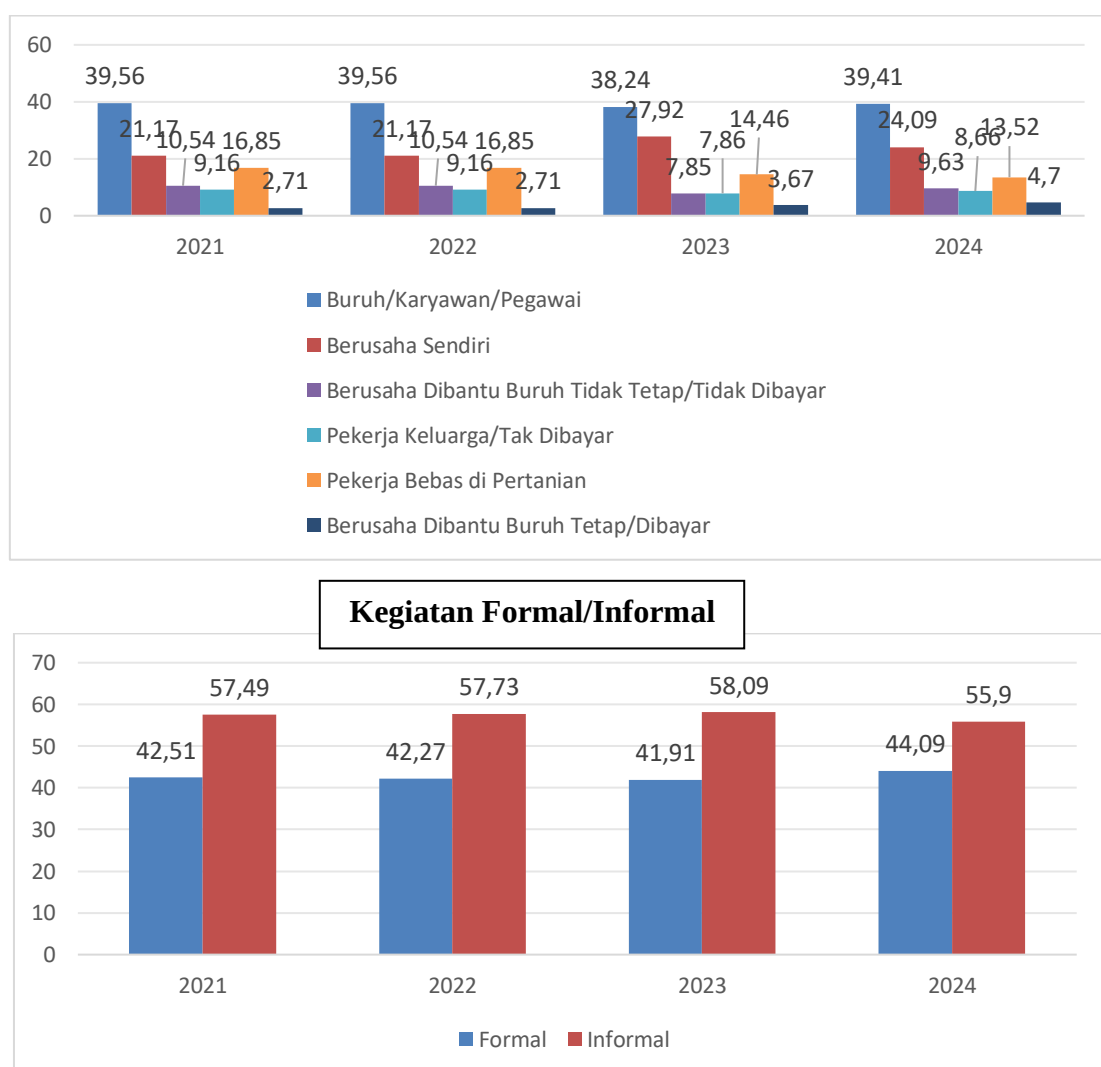
Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

3.1.6.2 Karakteristik Penduduk Bekerja di Kabupaten Cirebon

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dengan lama bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi). Struktur pekerjaan utama penduduk bekerja di Kabupaten Cirebon menggambarkan distribusi angkatan kerja dalam berbagai sektor ekonomi. Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada tahun 2023 menunjukkan sektor yang paling banyak menyerap pekerja adalah sektor jasa, dengan proporsi sebesar 57,99 persen, dengan pola distribusi tenaga kerja ini tetap konsisten dengan data pada tahun 2022. Sementara itu dalam daya serap tenaga kerja, sektor jasa adalah yang tertinggi dengan peningkatan sebanyak 0,09 juta jiwa dari tahun 2022. Struktur penduduk bekerja Kabupaten Cirebon jika dilihat dari status pekerjaan, menggambarkan lebih setengah dari total pekerja di Kabupaten Cirebon terlibat dalam kegiatan informal yakni sekitar 55,9 persen. Ini menunjukkan bahwa ekonomi informal memainkan peran penting dalam menyediakan mata pencaharian bagi penduduk Kabupaten Cirebon.

Walaupun begitu, tahun 2024 terdapat pergeseran jumlah pekerja dari sektor informal menuju sektor formal dengan kenaikan 2,18 persen dibandingkan pada tahun 2023. Kenaikan pekerja sektor formal ini sejalan dengan kenaikan jumlah pekerja dan penurunan tingkat pengangguran menandakan banyak lapangan pekerjaan formal yang menyerap pekerja di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 menjadi hal yang baik bagi Kabupaten Cirebon untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dalam penyerapan tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Cirebon.

Gambar 3.7.
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kegiatan Formal/Informal di Kabupaten Cirebon (persen), 2021 - 2024

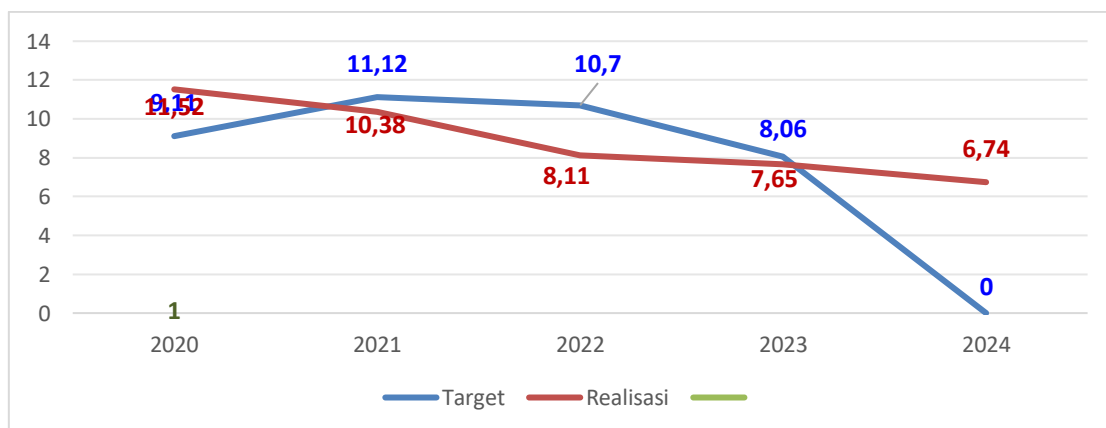


Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

3.1.6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Cirebon

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja sedangkan pengangguran terbuka sendiri didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran. Perbandingan TPT dengan target daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.8.
Perbandingan TPT dengan Target Daerah Kabupaten Cirebon, 2020-2024



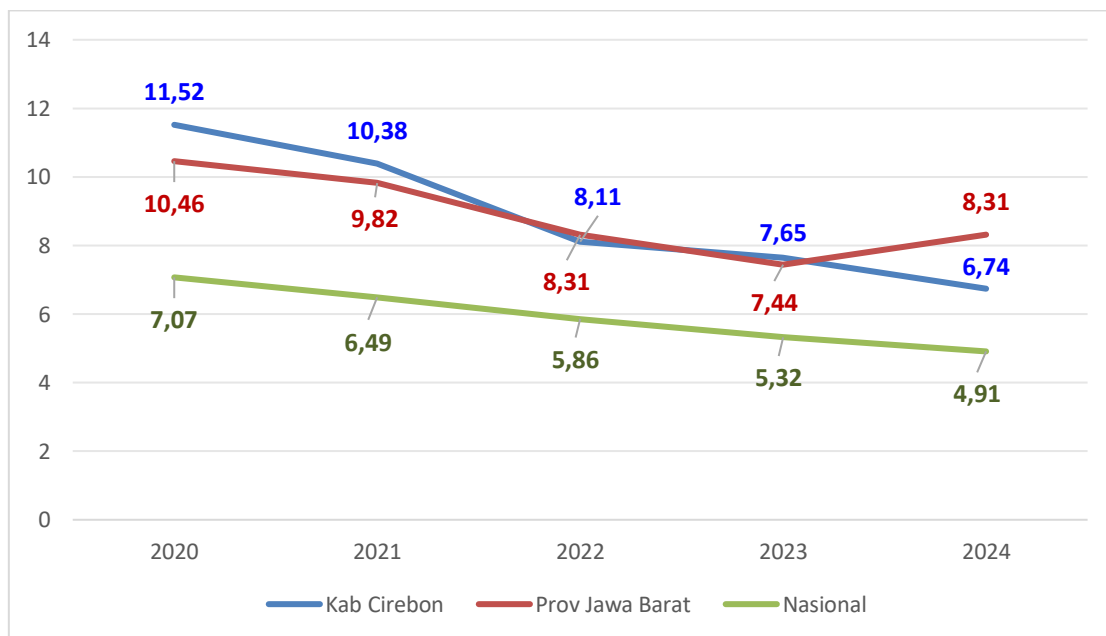
Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, 2025, diolah.

Pada tahun 2021-2023 pencapaian indikator TPT Kabupaten Cirebon melebihi target, di mana pada tahun 2021 target TPT Kabupaten Cirebon yaitu sebesar 11,12 persen tercapai dengan penurunan TPT hingga di angka 10,38 persen. Pada tahun 2022, TPT tercapai sangat signifikan jauh melebihi target, di mana target TPT pada tahun 2022 yaitu sebesar 10,7 persen tercapai dengan terjadi penurunan angka TPT hingga diangka 8,11 persen. Setelah itu, pada tahun 2023 angka TPT Kabupaten Cirebon juga tercapai melebihi target di mana TPT pada tahun 2023 adalah sebesar 8,06 persen menurun hingga di angka 7,65 persen. Pencapaian ini disebabkan ada intervensi program pemerintah melalui pelaksanaan Kegiatan *job fair* dan pelatihan

vokasi berbasis penempatan yang dapat menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Selain itu, sektor industri olahan yang berkembang di Kabupaten Cirebon juga mampu menyerap tenaga kerja cukup signifikan. Kenaikan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil juga mempengaruhi pencapaian TPT Kabupaten Cirebon, di mana pada tahun 2021 jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dan kecil Kabupaten Cirebon sebanyak 49.490 pelaku usaha mikro (*sumber: BPS Jawa Barat, 2023*) meningkat di tahun 2022 menjadi 200.083 pelaku usaha mikro dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 202.017 pelaku usaha mikro (*sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, 2024*).

Pada tahun 2024, realisasi angka TPT Kabupaten Cirebon menurun secara konsisten yaitu 6,74 dengan target yang ditetapkan yaitu 9,9. Perbandingan perubahan pencapaian TPT daerah Kabupaten Cirebon dengan pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.9. berikut ini:

Gambar 3.9.
Perbandingan Perubahan Pencapaian TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Pencapaian TPT Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon, 2025, diolah
2. BPS Jawa Barat dalam Angka Tahun 2025
3. Statistik Indonesia, 2025

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa TPT di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Setelah tahun 2020 terdapat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan angka TPT, angka TPT Kabupaten Cirebon mengalami penurunan dari tahun ke tahun secara konsisten sejalan dengan penurunan angka TPT nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020-2021 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Barat, selalu berada diatas TPT Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi di tahun 2022 berada di bawah TPT Provinsi Jawa Barat namun masih diatas TPT Nasional, dimana pada tahun 2022 TPT Provinsi Jawa Barat sebesar 8,31 persen dan TPT Indonesia sebesar 5,86 persen, sedangkan Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya mencapai 8,11 persen. Akan tetapi tahun 2023, TPT Kabupaten Cirebon kembali berada di atas TPT Provinsi Jawa Barat dan Nasional dimana TPT Jawa Barat sebesar 7,44 persen dan TPT Nasional sebesar 5,32 persen sedangkan TPT Kabupaten Cirebon pada tahun yang sama angkanya hanya sebesar 7,65 persen.

Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Cirebon kembali mengalami penurunan yaitu di angka 6,74 sedangkan angka TPT Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan di angka 8,31 sehingga dapat disimpulkan bahwa di tengah kenaikan angka TPT di banyak kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Cirebon justru mengalami penurunan secara konsisten dengan penurunan angka TPT nasional yaitu 4,91. Oleh karena itu, hal ini merupakan pencapaian yang sangat bagus bagi Kabupaten Cirebon dan harus dipertahankan serta ditingkatkan lagi.

Tabel 3.9.
Perbandingan Perubahan TPT Daerah Kabupaten Cirebon dengan Rata-rata Capaian Wilayah yang Setara atau Wilayah Sekitar, 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	14,29	12,22	10,64	8,47	7,34
2.	Kabupaten Sukabumi	9,60	9,51	7,77	7,32	7,11
3.	Kabupaten Cianjur	11,05	9,32	8,41	7,71	5,99
4.	Kabupaten Bandung	8,58	8,32	6,98	6,52	6,36

No.	Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
5.	Kabupaten Garut	8,95	8,68	7,60	7,33	6,96
6.	Kabupaten Tasikmalaya	7,12	6,16	4,17	3,89	3,74
7.	Kabupaten Ciamis	5,66	5,06	3,75	3,52	3,37
8.	Kabupaten Kuningan	11,22	11,68	9,81	9,49	7,78
9.	Kabupaten Cirebon	11,52	10,38	8,11	7,65	6,74
10.	Kabupaten Majalengka	5,84	5,71	4,16	4,12	4,01
11.	Kabupaten Sumedang	9,89	9,18	7,72	6,94	6,16
12.	Kabupaten Indramayu	9,21	8,30	6,49	6,46	6,25
13.	Kabupaten Subang	9,48	9,77	7,77	7,65	6,73
14.	Kabupaten Purwakarta	11,07	10,70	8,75	7,72	7,34
15.	Kabupaten Karawang	11,52	11,83	9,87	8,95	8,04
16.	Kabupaten Bekasi	11,54	10,09	10,31	8,87	8,82
17.	Kabupaten Bandung Barat	12,25	11,65	9,63	8,11	6,7
18.	Kabupaten Pangandaran	5,08	3,25	1,56	1,52	1,58
19.	Kota Bogor	12,68	11,79	10,78	9,39	8,13
20.	Kota Sukabumi	12,17	10,78	8,83	8,53	8,34
21.	Kota Bandung	11,19	11,46	9,55	8,83	7,4
22.	Kota Cirebon	10,97	10,53	8,42	7,66	6,29
23.	Kota Bekasi	10,68	10,88	8,81	7,90	7,82
24.	Kota Depok	9,87	9,76	7,82	6,97	6,27
25.	Kota Cimahi	13,30	13,07	10,77	10,52	8,97
26.	Kota Tasikmalaya	7,99	7,66	6,62	6,55	6,49
27.	Kota Banjar	6,73	6,09	5,53	5,43	5,44
	Provinsi Jawa Barat	10,46	9,82	8,31	7,44	6,75

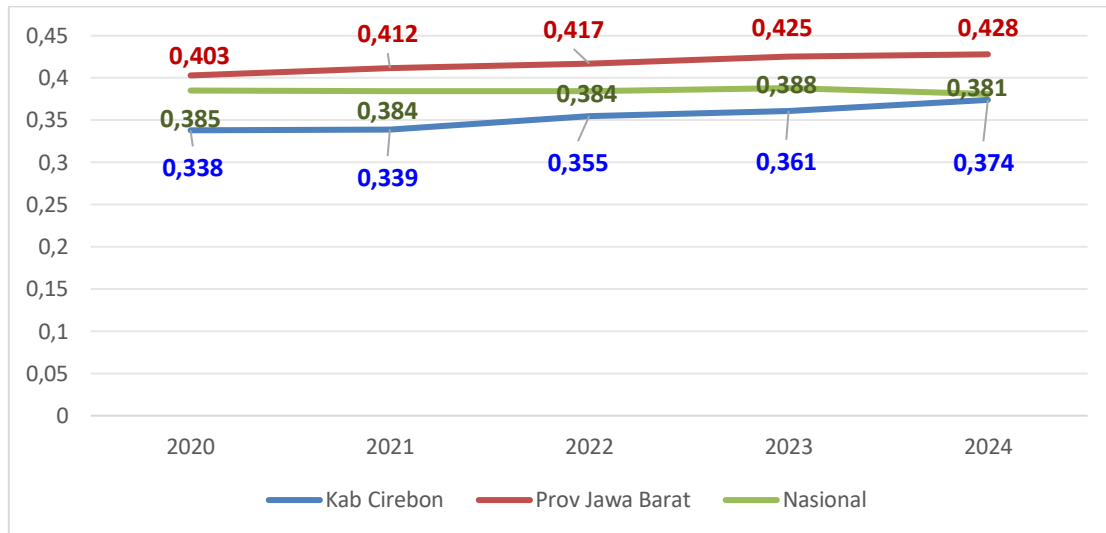
Sumber: BPS Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2024.

3.1.7. Indeks Gini

Distribusi pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan pada bagian ini dijelaskan dengan melihat ketimpangan pendapatan menggunakan indeks gini. Perbandingan perubahan rasio gini daerah Kabupaten Cirebon, dengan

rasio gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.10. berikut ini :

Gambar 3.10.
Perbandingan Perubahan Rasio Gini Daerah Kabupaten Cirebon, dengan Rasio Gini Nasional dan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024



Sumber :
1. BPS Kabupaten Cirebon, 2021-2025, diolah.
2. RKP Tahun 2025, Bappenas RI, 2025, diolah.
3. BPS Jawa Barat, 2025.

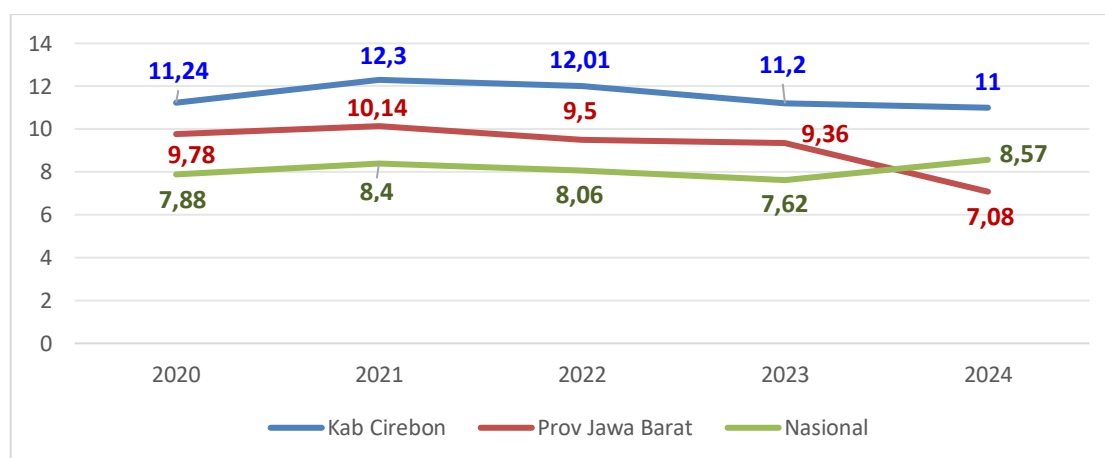
Indeks gini Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 dengan realisasi sebesar 0,374 poin mengalami kenaikan dari tahun lalu yang masih di angka 0,361 poin sehingga disimpulkan ketimpangan di Kabupaten Cirebon semakin tinggi. Adapun jika dibandingkan terhadap target indeks gini pada Perubahan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2024 memang belum tercapai yaitu 0,339 poin. Namun jika dibandingkan dengan realisasi indeks gini secara regional maupun nasional, realisasi indeks gini Kabupaten Cirebon tahun 2024 jauh lebih baik. Ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Cirebon tidak setinggi ketimpangan pendapatan pada skala regional maupun nasional.

3.1.8. Kemiskinan Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Kemiskinan digambarkan dengan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin dibandingkan terhadap jumlah total penduduk dikali seratus persen. Pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 245,9 ribu jiwa atau 11 persen dari total penduduk Kabupaten Cirebon. Realisasi tersebut memenuhi target yang ditetapkan didalam P-RKPD Tahun 2024 yakni persentase penduduk miskin di angka 11,00 persen. Jika

dibandingkan dengan tahun 2023, angka ini menunjukkan capaian yang lebih baik karena terjadi penurunan kembali, pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin sebanyak 249,18 ribu jiwa atau 11,2 persen. Namun, persentase penduduk miskin di Kabupaten Cirebon selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.11.
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024



Sumber : 1. BPS Kabupaten Cirebon, 2020-2024, diolah.
2. RKP Tahun 2025, Bappenas RI (2025).
3. RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, Bappeda Provinsi Jabar (2025).

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat, persentase penduduk miskin Kabupaten Cirebon berada diposisi ke-24 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat sehingga cukup terendah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat termasuk Kabupaten Cirebon mengalami penurunan persentase penduduk miskin dari tahun lalu. Data persentase penduduk miskin kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dari Tahun 2020-2024 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 3.10.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kabupaten Bogor	7,69	8,13	7,73	7,27	7,05
2.	Kabupaten Sukabumi	7,09	7,70	7,34	7,01	6,87
3.	Kabupaten Cianjur	10,36	11,18	10,55	10,22	10,14

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.	Kabupaten. Bandung	6,91	7,15	6,80	6,40	6,19
5.	Kabupaten Garut	9,98	10,65	10,42	9,77	9,68
6.	Kabupaten Tasikmalaya	10,34	11,15	10,73	10,28	10,23
7.	Kabupaten Ciamis	7,62	7,97	7,72	7,42	7,39
8.	Kabupaten Kuningan	12,82	13,10	12,76	12,12	11,88
9.	Kabupaten Cirebon	11,24	12,30	12,01	11,20	11,00
10.	Kabupaten Majalengka	11,43	12,33	11,94	11,21	10,82
11.	Kabupaten Sumedang	10,26	10,71	10,14	9,36	9,10
12.	Kabupaten Indramayu	12,70	13,04	12,77	12,13	11,93
13.	Kabupaten Subang	9,31	10,03	9,75	9,52	9,49
14.	Kabupaten Purwakarta	8,27	8,83	8,70	8,46	8,41
15.	Kabupaten Karawang	8,26	8,95	8,44	7,87	7,86
16.	Kabupaten Bekasi	4,82	5,21	5,01	4,93	4,80
17.	Kabupaten Bandung Barat	10,49	11,30	10,82	10,52	10,49
18.	Kabupaten Pangandaran	8,99	9,65	9,32	8,98	8,75
19.	Kota Bogor	6,68	7,24	7,10	6,67	6,53
20.	Kota Sukabumi	7,70	8,25	8,02	7,50	7,20
21.	Kota Bandung	3,99	4,37	4,25	3,96	3,87
22.	Kota Cirebon	9,52	10,03	9,82	9,16	9,02
23.	Kota Bekasi	4,38	4,74	4,43	4,10	4,01
24.	Kota Depok	2,45	2,58	2,53	2,38	2,34
25.	Kota Cimahi	5,11	5,35	5,11	4,66	4,39
26.	Kota Tasikmalaya	12,97	13,13	12,72	11,53	11,10
27.	Kota Banjar	6,09	7,11	6,73	6,14	5,85
	Provinsi Jawa Barat	7,88	8,40	8,06	7,62	7,46

Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Barat, Tahun 2025

Penurunan persentase kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 disebabkan ada peningkatan pengeluaran penduduk miskin untuk makanan dan non makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) di atas garis kemiskinan pada sejumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon. Garis kemiskinan Kabupaten Cirebon tahun 2024 adalah sebesar Rp. 475.046,00/kapita/bulan.

Tabel 3.11.

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten Cirebon, 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Total (Ribuan)	Presentase
2020	393.452	247,94	11,24
2021	404.635	271,02	12,30
2022	416.914	266,10	12,01
2023	451.853	249,18	11,20
2024	475.046	245,90	11,00

Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kedalaman atau intensitas kemiskinan dalam suatu populasi. Indeks ini menggambarkan rata-rata kesenjangan antara pendapatan (atau konsumsi) penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Cirebon menurun pada tahun 2024 yaitu 1,69 dibandingkan tahun 2023 yaitu 1,98 sehingga dapat disimpulkan bahwa penduduk miskin di Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sudah mengalami kondisi yang lebih baik dari tahun lalu dan jarak pendapatan penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin dekat sehingga mendekati ambang batas keluar dari kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) merupakan indikator yang mengukur tingkat keparahan atau ketimpangan kemiskinan di antara penduduk miskin. Indeks ini mempertimbangkan variasi (ketimpangan) dalam jarak pendapatan masing-masing individu miskin dari garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Cirebon menurun cukup signifikan pada tahun 2024 yaitu 0,36 dari tahun 2023 yaitu 0,53 sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di antara penduduk miskin menurun atau kemiskinan di Kabupaten Cirebon menjadi lebih merata dan tidak jauh tertinggal antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan data penurunan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Cirebon tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa pendapatan rata-rata naik dan kesenjangan penduduk miskin menurun sehingga kondisi kemiskinan membaik dan mencerminkan distribusi kesejahteraan membaik di Kabupaten Cirebon. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Cirebon seperti kebijakan pembangunan yang lebih merata, perbaikan

akses terhadap pekerjaan atau pendapatan, serta program bantuan sosial yang lebih efektif. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12.
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon, 2020–2024

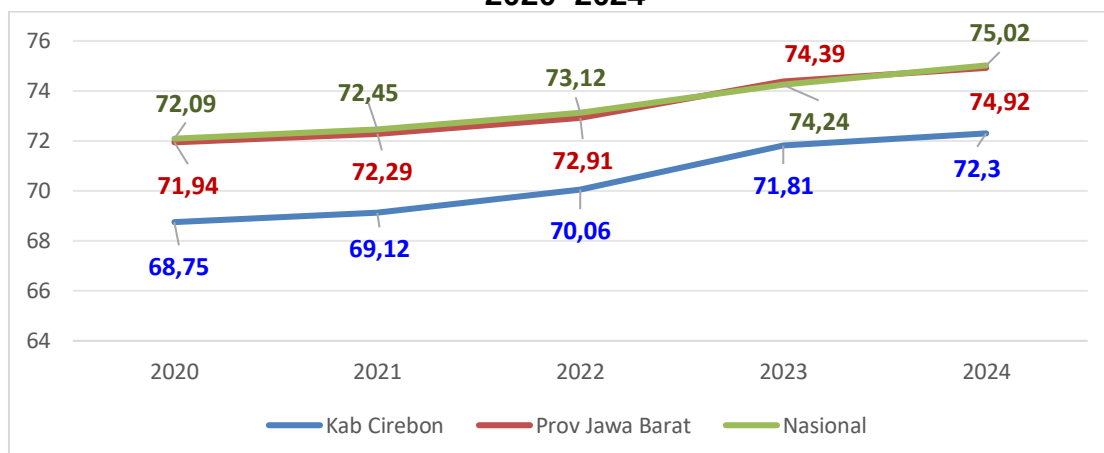
Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
2020	1,30	0,24
2021	1,94	0,47
2022	2,27	0,59
2023	1,98	0,53
2024	1,69	0,36

Sumber Data: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan adalah dengan cara berkoordinasi dan melakukan penanganan langsung. Adapun koordinasi dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cirebon. Upaya penanganan kemiskinan dilakukan mulai dari penanggulangan kemiskinan secara mikro (substantif) maupun secara makro (preventif).

3.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) maupun horizontal (kehidupan lebih baik di segala bidang). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan metode penghitungan terbaru, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup angka harapan hidup (kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (pendidikan) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan (standar hidup layak/ekonomi).

Gambar 3.12.**Capaian IPM Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020–2024**

Sumber: BPS Kabupaten Cirebon, Tahun 2025.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 dengan angka 72,3 poin mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun yang lalu meskipun masih di bawah angka regional dan nasional. Realisasi IPM Kabupaten Cirebon sebesar 72,3 poin tersebut jika dibandingkan dengan target IPM Kabupaten Cirebon Tahun 2024 yakni sebesar 72,06 poin sudah memenuhi bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, data 5 (lima) tahun terakhir peringkat IPM Kabupaten Cirebon yaitu tahun 2020 - 2024 terus meningkat yaitu peringkat 19 pada tahun 2020 terus meningkat menjadi peringkat 17 di tahun 2024, sebagaimana data tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.13.**Capaian IPM Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten-Kabupaten di Sekitarnya, 2020–2024**

No.	Kab/Kota	IPM				
		2020	2021	2022*	2023	2024
NASIONAL		72,81	73,16	73,77	74,39	75,02
JAWA BARAT		72,61	72,96	73,63	74,24	74,92
1.	Kabupaten Bogor	71,63	71,83	72,45	73,02	73,63
2.	Kabupaten Sukabumi	68,14	68,33	68,87	69,71	70,18
3.	Kabupaten Cianjur	66,96	67,16	67,55	68,18	68,89
4.	Kabupaten Bandung	72,69	73,03	73,46	74,03	74,59
5.	Kabupaten Garut	67,20	67,53	68,51	69,22	69,91
6.	Kabupaten Tasikmalaya	67,22	67,43	68,45	69,38	69,98

No.	Kab/Kota	IPM				
		2020	2021	2022*	2023	2024
7.	Kabupaten Ciamis	71,57	72,00	72,52	73,12	73,64
8.	Kabupaten Kuningan	69,66	69,99	70,44	70,99	71,56
9.	Kabupaten Cirebon	69,61	69,99	70,92	71,81	72,3
10.	Kabupaten Majalengka	69,20	69,42	70,18	70,76	71,37
11.	Kabupaten Sumedang	72,48	72,64	73,53	74,02	74,57
12.	Kabupaten Indramayu	68,25	68,60	69,52	70,19	70,72
13.	Kabupaten Subang	69,66	69,84	70,54	71,42	72,05
14.	Kabupaten Purwakarta	72,15	72,31	72,89	73,43	73,99
15.	Kabupaten Karawang	71,56	71,84	72,64	73,25	73,82
16.	Kabupaten Bekasi	74,47	74,84	75,60	76,13	76,8
17.	Kabupaten Bandung Barat	68,81	69,03	69,82	70,33	70,77
18.	Kabupaten Pangandaran	69,24	69,46	70,21	70,57	71,03
19.	Kota Bogor	76,63	77,11	77,68	78,36	79,03
20.	Kota Sukabumi	75,06	75,44	76,24	77,16	77,69
21.	Kota Bandung	81,78	82,23	82,75	83,29	83,75
22.	Kota Cirebon	75,91	76,26	76,89	77,45	78,09
23.	Kota Bekasi	81,50	81,99	82,52	83,06	83,55
24.	Kota Depok	81,14	81,54	82,02	82,53	83,05
25.	Kota Cimahi	78,09	78,31	79,01	79,69	80,3
26.	Kota Tasikmalaya	74,04	74,31	74,84	75,47	76,3
27.	Kota Banjar	73,08	73,30	73,93	74,45	75,01

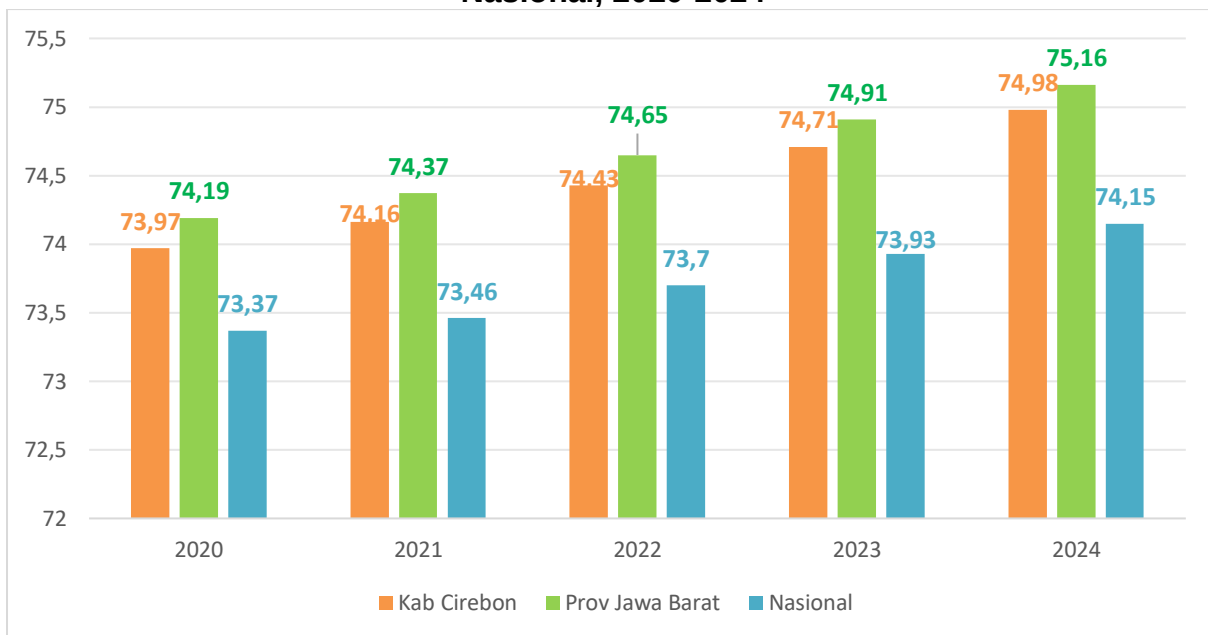
Sumber: 1. Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2025
2. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok (BPS Jabar, 2023). Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Empat kelompok tersebut adalah:

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Berdasarkan klasifikasi tersebut maka capaian IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 termasuk dalam kategori kelompok “TINGGI”. Kenaikan IPM Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 disebabkan oleh peningkatan angka komponen pembentuk IPM yang cukup signifikan, antarlain angka usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan daya beli atau pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Komponen usia harapan hidup meningkat cukup signifikan yakni 74,71 tahun di Tahun 2023 meningkat menjadi 74,98 tahun di Tahun 2024.

Gambar 3.13.
Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024

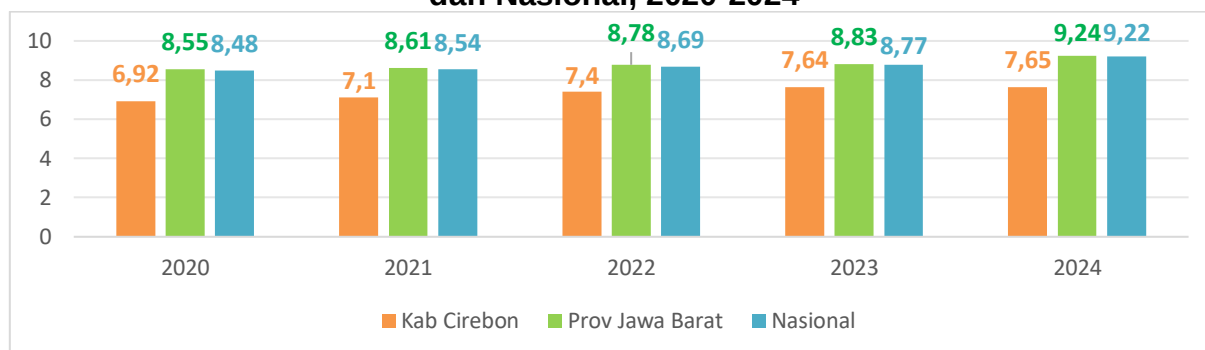


Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS
2. BPS Provinsi Jabar, 2025.
3. Statistik Indonesia, 2025.

Kenaikan IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 juga dipengaruhi kenaikan komponen rata-rata lama sekolah yang meningkat sebesar 3,24 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, di mana pada tahun 2023 angka komponen rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon adalah sebesar 7,64 tahun meningkat menjadi 7,65 tahun di tahun 2024. Walaupun terdapat kenaikan, tetapi kenaikan realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon cukup jauh dengan kenaikan di Provinsi Jawa Barat dan nasional. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi realisasi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Cirebon dengan akses kepada pendidikan yang terjangkau.

Gambar 3.14.

Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024

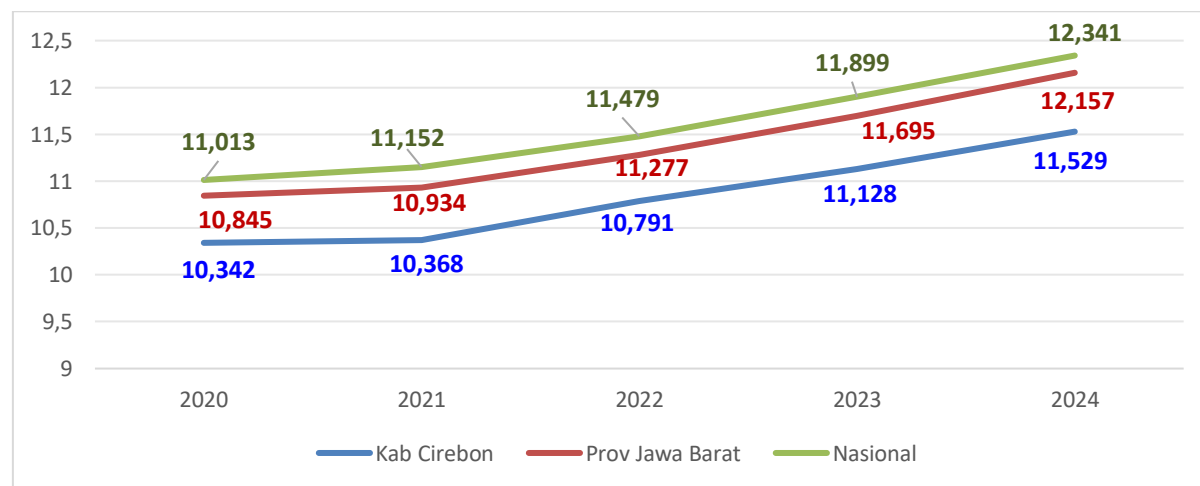


Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS
 2. BPS Provinsi Jabar, 2025.
 3. Statistik Indonesia, 2025.

Komponen lain pembentuk IPM yang meningkat pada tahun 2024 dan mempengaruhi pencapaian IPM Kabupaten Cirebon tahun 2024 yaitu komponen pengeluaran per kapita riil disesuaikan. Pada tahun 2024 pengeluaran per kapita riil disesuaikan Kabupaten Cirebon meningkat sebesar Rp. 401.000,00/kapita/tahun dari Rp. 11.128.000,00 /kapita/tahun di tahun 2023 menjadi Rp. 11.529.000,00 /kapita/tahun di tahun 2024.

Gambar 3.15.

Realisasi Pengeluaran Per Kapita Riil Disesuaikan Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat dan Nasional, 2020-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : 1. Kabupaten Cirebon Dalam Angka 2025, BPS.
 2. BPS Provinsi Jabar, 2025.
 3. Statistik Indonesia, 2025.

3.1.10. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dan Tahun 2026

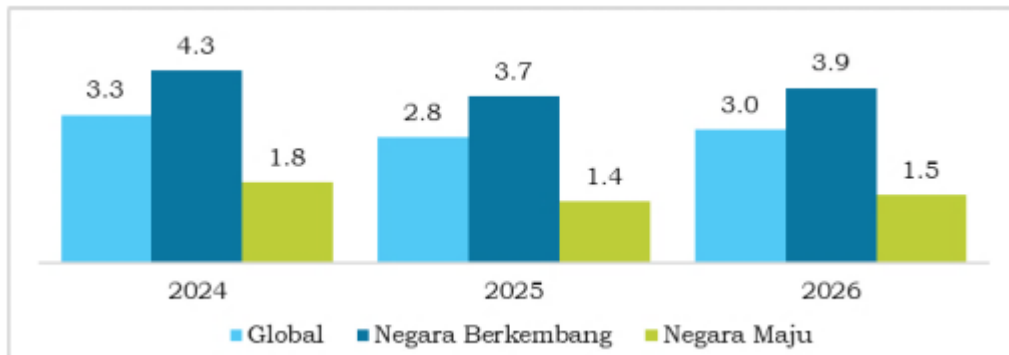
Tantangan dan prospek perekonomian daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025 dan tahun 2026 tentu akan banyak dipengaruhi oleh tantangan, prospek dan arah kebijakan perekonomian baik pada tataran global, nasional maupun regional.

3.1.10.1. Tantangan Ekonomi Global

Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Tren perlambatan perekonomian global diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025, terutama disebabkan oleh risiko perang dagang seiring kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Di tengah perlambatan ekonomi global tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tangguh di atas 5%. Namun demikian, ke depan perlu diantisipasi risiko ke bawah dari perang dagang terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan 2026. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 terutama masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan terutama berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.

Gambar 3.16.
Pertumbuhan Ekonomi Global (Persen)



Sumber: *World Economic Outlook Update, April 2025 dalam RKP 2026.*

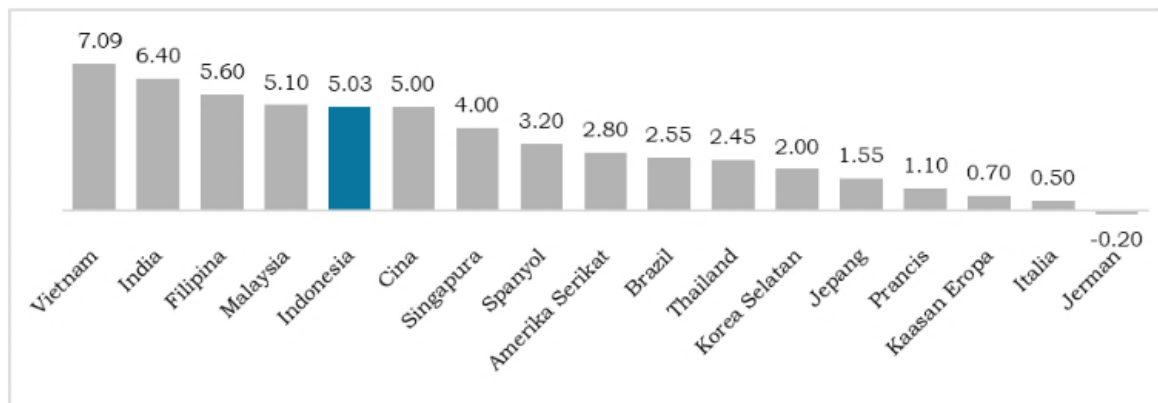
Secara regional, pertumbuhan ekonomi global tetap menghadapi tekanan, dengan pelemahan masih terjadi di negara-negara maju seperti Eropa Barat dan Amerika Utara, yang terus bergulat dengan stagnasi ekonomi dan tekanan biaya hidup. Sementara itu, pertumbuhan di Asia diproyeksikan tetap positif namun melambat, sebagian disebabkan oleh ketidakpastian pemulihan ekonomi Tiongkok yang belum stabil dan efek lanjutan dari kebijakan dalam negeri yang konservatif. Bank Dunia mencatat bahwa negara-negara berkembang di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tetap menghadapi risiko menengah hingga tinggi akibat pelemahan permintaan global dan potensi arus keluar modal dari pasar negara berkembang.

Di sisi lain, Indonesia memiliki momentum untuk mengambil manfaat dari potensi peningkatan investasi, terutama yang berkaitan dengan transisi energi dan pengembangan industri hijau. Jika dikelola dengan tepat, pemasukan investasi dalam sektor energi terbarukan, manufaktur berkelanjutan, dan digitalisasi dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan jangka panjang yang inklusif dan berdaya saing. Dengan demikian, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kebijakan fiskal yang hati-hati, penguatan sektor domestik, dan strategi diplomasi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan global. Kesiapsiagaan dalam menghadapi guncangan global, serta komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan, energi, dan kesehatan, akan menjadi kunci dalam menavigasi tantangan ekonomi global tahun 2025.

3.1.10.2. Tantangan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US\$4.810 pada tahun 2023 menjadi US\$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country).

Gambar 3.17.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Beberapa Negara Lain Tahun 2024 (Persen)



Sumber: BPS dan CEIC, 2025, dalam RKP 2026.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRRT) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring peningkatan belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial.

Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tahun 2024 mencapai 4,61 persen. Pertumbuhan investasi ini didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp1.714,24 triliun atau tumbuh hingga 20,80 persen. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 21,00 persen didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi

utamanya untuk subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 20,60 persen didorong oleh peningkatan investasi untuk subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi.

Wilayah Jawa sebagai sumber pertumbuhan utama Indonesia dan KBI tumbuh 4,92 persen, melambat dari tahun 2023 yang tumbuh 4,96 persen. Perekonomian Wilayah Jawa pada tahun 2024 juga ditopang sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 7,09 persen, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 yang tumbuh 4,28 persen seiring dengan pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan berbagai proyek multiyears, seperti Pembangunan Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Jakarta–Cikampek II Sisi Selatan, Jalan Tol Jogja–Solo, serta pembangunan MRT dan LRT.

Melalui berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi, ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan akan bertahan pada kisaran 5,20 persen di tengah dinamika global. Dari sisi eksternal yang menghadapi tantangan risiko perang dagang secara langsung, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang tangguh. Pada awal tahun 2025, perekonomian Indonesia menghadapi berbagai dinamika, seperti melambatnya pengeluaran masyarakat; meningkatnya risiko pengangguran akibat penutupan perusahaan padat karya; serta penurunan signifikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat, melemahnya permintaan global, serta disrupsi rantai pasok Tiongkok. Dengan mempertimbangkan perkembangan perekonomian global dan domestik serta kebijakan pendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,20 persen.

Dengan pertumbuhan tersebut, GNI per kapita Indonesia diharapkan meningkat ke level US\$5.230. Peningkatan pertumbuhan dari baseline dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dari sisi pengeluaran dan sisi produksi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh meningkat menjadi 4,97 persen pada tahun 2025. Pertumbuhan konsumsi masyarakat didukung oleh inflasi yang terkendali, program bantuan sosial, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara itu, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 4,91 persen, seiring percepatan pelaksanaan belanja prioritas. PMTB atau investasi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 4,96 persen, didukung oleh kebijakan optimalisasi pengelolaan aset BUMN; pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); peningkatan kredit investasi untuk industri padat karya, tax holiday dan

tax allowance; dan penghapusan buku atau tagih utang macet bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kinerja ekspor Indonesia diperkirakan menghadapi tantangan signifikan akibat kebijakan tarif resiprokal AS dan kebijakan lanjutan lainnya, serta beragam respons dari negara mitra dagang. Risiko penurunan ekspor baik secara langsung ke pasar AS maupun secara tidak langsung akibat melemahnya permintaan global dan disrupsi rantai pasok Tiongkok perlu diantisipasi. Meski demikian, ekspor barang dan jasa pada tahun 2025 tetap didorong tumbuh melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain diversifikasi produk dan pasar ekspor, reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, serta penguatan sektor-sektor yang terdampak tarif. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat untuk mendukung kebutuhan sektor industri dalam negeri yang terus berkembang.

Tabel 3.14.
Outlook Produk Domestik Bruto Tahun 2025 Sisi Pengeluaran (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi 2024	Outlook 2025
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,11	4,97
2	Konsumsi Pemerintah	6,61	4,91
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	4,61	4,96
4	Ekspor Barang dan Jasa	6,51	5,72
5	Impor Barang dan Jasa	7,95	5,90
Pertumbuhan PDB		5,03	5,20

Sumber: BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah), dalam RKP 2026.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2025, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sebesar 5,05 persen, dengan kontribusi PDB industri pengolahan yang mencapai 20,80 persen dari total PDB nasional. Peningkatan kinerja industri pengolahan pada tahun 2025 utamanya didukung oleh keberlanjutan proyek hilirisasi mineral, terutama di wilayah timur Indonesia, yang dipercepat melalui penanaman modal negara; inisiasi program MBG bagi anak sekolah dan ibu hamil yang mendorong permintaan pada subsektor industri makanan dan minuman; peningkatan penggunaan teknologi Generative AI (Artificial Intelligence) yang mendorong permintaan pada subsektor industri elektronik; serta peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui keberlanjutan penerapan industri 4.0, penerapan standardisasi, dan akselerasi transisi menuju industri hijau.

Tabel 3.15.

Outlook Produk Domestik Bruto Tahun 2025 Sisi Lapangan Usaha (Persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Realisasi 2024	Outlook 2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	3,16
2	Pertambangan dan Penggalian	4,90	0,80
3	Industri Pengolahan	4,43	5,05
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	4,77	5,76
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,56	2,54
6	Konstruksi	7,02	7,44
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,86	5,43
8	Transportasi dan Pergudangan	8,69	8,91
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	8,80
10	Informasi dan Komunikasi	7,57	8,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,74	5,05
12	Real Estate	2,50	2,94
13	Jasa Perusahaan	8,38	5,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,40	0,71
15	Jasa Pendidikan	3,75	4,66
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,11	8,47
17	Jasa Lainnya	9,80	8,67
Pertumbuhan PDB		5,03	5,20

Sumber: BPS dan Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah), dalam RKP 2026.

Memasuki tahun 2025, tantangan ekonomi nasional Indonesia bersumber dari dua aspek utama, yaitu inflasi dan sektor eksternal yang mencakup perdagangan serta investasi. Meskipun perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang cukup baik di tengah tekanan global, dinamika domestik dan internasional tetap menjadi faktor penentu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini diproyeksikan semakin bergantung pada kekuatan permintaan domestik, mengingat prospek perlambatan ekonomi global dan tren suku bunga tinggi yang berkepanjangan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada tahun 2025 dan 2026, seiring dengan pelemahan perdagangan internasional dan peningkatan tekanan geopolitik global.

Stabilitas inflasi domestik menjadi penopang utama, terutama setelah Bank Indonesia berhasil menjaga tingkat inflasi inti tetap terkendali sepanjang tahun 2024. Namun demikian, kebijakan moneter nasional tetap menghadapi tantangan besar. Ketidakpastian arah suku bunga global, terutama dari Federal Reserve, masih membatasi ruang pelanggaran kebijakan moneter di dalam negeri. Bank Indonesia

diperkirakan akan mempertahankan BI Rate di 5,75% sepanjang Semester I 2025 . Namun, terdapat kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada paruh kedua 2025, tergantung pada stabilitas nilai tukar rupiah dan arah kebijakan moneter global, terutama dari The Federal Reserve Amerika Serikat. Bank Indonesia diperkirakan akan bersikap hati-hati dalam menurunkan suku bunga acuan, meskipun terdapat tekanan untuk mendukung pertumbuhan domestik di tengah penurunan aktivitas ekspor.

Dari sisi perdagangan dan investasi, Indonesia masih dihadapkan pada kondisi eksternal yang kurang mendukung. Meskipun neraca perdagangan tetap mencatatkan surplus, tekanan pada harga komoditas global dan penurunan permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok membuat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan melambat. Diperkirakan, neraca transaksi berjalan akan tetap mengalami defisit moderat di kisaran 0,8 persen dari PDB pada 2025, sejalan dengan peningkatan impor barang modal dan konsumsi. Investasi domestik dan asing juga menghadapi tekanan akibat ketidakpastian regulasi global, peningkatan risiko geopolitik, dan tren deglobalisasi. Kendati demikian, prospek investasi tetap menjanjikan pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi mineral, transisi energi, dan digitalisasi ekonomi. Pemerintah perlu memperkuat iklim usaha dan memberikan kepastian hukum agar daya saing investasi tetap terjaga.

Konsumsi domestik tetap menjadi motor utama pertumbuhan, meskipun menghadapi tantangan daya beli yang tertekan oleh inflasi pangan dan energi. Stabilitas harga menjadi kunci dalam menjaga pemulihan konsumsi rumah tangga yang mulai pulih sejak pertengahan 2023. Impor barang konsumsi dari Tiongkok tetap tinggi, menunjukkan adanya permintaan domestik yang cukup kuat, namun hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri terhadap industri dalam negeri. Salah satu tantangan struktural yang kembali mencuat adalah ketergantungan pada ekspor komoditas. Penurunan harga batu bara, CPO, dan nikel mengurangi nilai ekspor dan memperburuk *terms of trade* Indonesia. Oleh karena itu, diversifikasi ekspor menjadi strategi prioritas, termasuk dengan mendorong ekspor manufaktur bernilai tambah dan memperluas pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah. Tantangan lain termasuk tekanan sosial akibat kenaikan biaya hidup, terutama di wilayah urban dan pedesaan terpencil, yang memerlukan respons kebijakan sosial yang lebih inklusif dan tepat sasaran.

Tabel 3.16.
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%yoy): Akhir Periode	2,5 ± 1,0
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500-16.900
3	Cadangan Devisa (miliar US\$)	171,01-171,42
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2-6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,90)-(1,04)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18-21,20
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6-4,7
8	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00-24,70
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22-13,35
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45-11,40
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)-(0,40)
12	Surplus/ Defisit APBN (% PDB)	(2,53)-(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8-39,9
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17-7,18
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.903,3-2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4-1.006,5

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Mei 2025 (diolah), dalam RKP 2026.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Secara keseluruhan, tahun 2025 menuntut penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, serta konsistensi reformasi struktural di sektor industri, ketenagakerjaan, dan investasi. Dengan arah kebijakan yang adaptif, transparan, dan berbasis data, Indonesia memiliki peluang untuk menjaga ketahanan ekonomi dan meningkatkan daya saing di tengah guncangan global yang terus berkembang.

3.1.10.3. Tantangan dan Prospek Ekonomi Regional Jawa Barat

Tantangan ekonomi Jawa Barat bersumber dari belum meratanya investasi yang masuk ke Jawa Barat, karena masih terkonsentrasi di Jawa Barat bagian utara. Kemudian mayoritas kabupaten/kota di Jawa Barat terkategori memiliki kapasitas fiskal yang rendah, dimana porsi realisasi belanja yang bersifat produktif masih

rendah, sehingga perlu kerangka kebijakan untuk mendorong produktivitas kabupaten/kota.

Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan membebani aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Jawa Barat, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri manufaktur, sebagaimana diketahui bahwa industri manufaktur adalah penyumbang terbesar PDRB Jawa Barat.

Perubahan iklim juga ikut andil dalam yang membuat sulit memprediksi cuaca ekstrem di beberapa wilayah Jawa Barat, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan. Perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Jawa Barat dan penyerapan tenaga kerja.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2025 meliputi:

1. Memelihara stabilitas kinerja perekonomian di tengah ketidakpastian perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Optimalisasi ekonomi digital dan industri yang berbasis high tech;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, diversifikasi ekonomi khususnya UMKM, IKM serta pariwisata;
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan di tengah perubahan iklim; dan
6. Tenaga kerja yang terampil sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSSRBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, business matching, market sounding, link and match investor industri kecil dan industri besar; dan
 - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);

2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - b. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - c. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - d. Substitusi bahan baku impor;
 - e. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - f. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - b. Pengembangan Desa Wisata;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan
 - d. Percepatan Sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE).
 - e. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antarprovinsi;
 - b. Pasar rakyat yang memenuhi SNI;
 - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
 - d. Market intelligence untuk penetrasi pasar regional dan ekspor;
 - e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan:
 - a. Penyediaan pangan yang berkualitas dan terjangkau;
 - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
 - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan
 - d. Peningkatan produktivitas bahan pangan; dan

- e. Peningkatan produksi pertanian potensi ekspor.
- 7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
 - a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
 - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
 - e. Penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026.

Tabel 3.17.
Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026

No.	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
1	LPE (% c-to-c)	4,95	4,96-5,37	5,16-6,20
2	Laju Inflasi (% y-o-y)	1,67	2,5 ± 1	2,5 ± 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	41,39	41,15-41,38	40,10-42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,07	2,88	3,21-3,46
5	PMTB (% PDRB)	24,70	23,60	23,82-23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,53	26,3	20,50-20,54

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat, 2026.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026 yang didukung oleh stabilitas perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global. Terkendalnya perekonomian ditunjukkan oleh terkendalnya inflasi pada tingkat 2,5 + 1 persen yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan

jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang masih tumbuh lebih lambat juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peranan industri pengolahan yang signifikan. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8 persen pada tahun 2024, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045. Pada tahun 2026, industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Pertumbuhan yang solid di sektor lapangan usaha pada tahun 2026 didukung oleh tingginya pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,30 - 7,58 persen (c-to-c), dengan nilai ADHB sebesar Rp 793,36 - 804,52 T. Sementara itu nilai realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 342 T, atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi green economy dan blue economy, ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jabar Selatan. Pengembangan ekonomi di Jabar Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan yang akan dihadapi ke depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari pertumbuhan 4,95 persen (c-to-c) pada tahun 2024 menjadi 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini tidak terlepas dari trayektori ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada akhir periode RPJMN 2025-2029, tetapi tetap memperhatikan fenomena perlambatan pertumbuhan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat yang masih terbilang tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi global, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan

dalam melakukan perluasan pasar ekspor, peningkatan produksi sektor industri pengolahan, serta percepatan pembangunan yang melibatkan investasi dalam dan luar negeri.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Pemantapan ekonomi tersebut diterjemahkan ke dalam komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor.

Fokus pembangunan provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dan 2026 yang berfokus pada peningkatan layanan infrastruktur transportasi, serta pembangunan kawasan industri di Subang Smartpolitan dapat meningkatkan pertumbuhan sektor konstruksi. Pada tahun 2026, sektor Konstruksi ditargetkan tumbuh pada rentang 6,66 -8,02 persen.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional, dan global. Resiliensi pertumbuhan global diharapkan dapat membuka peluang pertumbuhan yang lebih tinggi bagi Jawa Barat. Selain itu, pertumbuhan nasional yang ditargetkan lebih tinggi selama periode RPJMN Tahun 2025-2029 didorong oleh peningkatan pembangunan infrastruktur, serta eksplorasi yang lebih luas dalam mengembangkan komoditas unggulan di Jawa Barat. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah terkait peningkatan pembangunan infrastruktur dan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2026.

Tabel 3.18.
Proyeksi Pertumbuhan Komponen PDRB Tahun 2025-2026 (Persen)

Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi	
	2024	2024	2025	2026
Pengeluaran				
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	66,20	5,01	3,94	5,03-6,06
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,68	7,89	3,34	0,94-1,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,89	1,39	2,46	6,56-7,85
Pembentukan Modal Tetap Bruto	24,70	6,96	4,10	6,30-7,58
Ekspor Barang dan Jasa	60,62	12,09	5,52	7,21-8,18

Komponen PDRB	Share	Realisasi	Proyeksi	
	2024	2024	2025	2026
Impor Barang dan Jasa	57,14	15,07	5,07	0,32-1,32
Produksi				
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,42	1,59	4,54	2,16-2,60
Pertambangan dan Penggalian	0,97	-0,28	-0,08	0,66-0,79
Industri Pengolahan	41,39	3,52	5,84	4,69-5,65
Pengadaan Listrik dan Gas	0,43	-0,60	3,86	4,63-5,58
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	5,48	4,90	2,75-3,32
Konstruksi	8,45	7,09	5,91	6,66-8,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,46	4,85	4,85	4,57-5,51
Transportasi dan Pergudangan	6,24	12,34	6,78	8,58-10,33
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,07	6,43	12,85	7,97-9,59
Informasi dan Komunikasi	3,83	8,20	8,64	6,27-7,54
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,78	4,20	4,01	5,45-6,56
Real Estate	1,16	6,64	5,34	6,90-8,31
Jasa Perusahaan	0,46	2,49	7,28	6,01-7,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Wajib Sosial	1,79	8,73	2,00	2,99-3,56
Jasa Pendidikan	3,27	5,95	6,18	5,65-6,80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,81	5,98	7,60	6,44-7,75

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat, 2026.

Tabel 3.19.
Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,51-6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30-6,65
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,15-6,20
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah/Kapita)	64,60
6	Gini Ratio (Poin)	0,420-0,425
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2,62

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat, 2026.

Kerangka ekonomi daerah yang kokoh dan resilien terhadap berbagai guncangan diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi aktivitas perekonomian dan membawa pertumbuhan pada tingkat yang lebih tinggi, inklusif dan berkelanjutan,

kondisi tersebut juga dapat memberikan dampak terhadap semakin membaiknya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan membaiknya Indeks Modal Manusia, menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataannya.

Dalam rangka peningkatan Indeks Modal Manusia, Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sejumlah beasiswa.

Selain itu, juga memperkuat sektor kesehatan dengan memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan gizi masyarakat. Program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi juga terus digencarkan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat yang merata. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan IMM sebesar 0,56 poin di tahun 2026. Pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Jawa Barat dijalankan melalui strategi kebijakan yang mencakup:

1. Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan masyarakat miskin, terutama yang berada dalam kategori miskin ekstrem, mendapatkan perlindungan sosial, bantuan, dan jaminan sosial. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Beberapa strategi yang dilakukan di antaranya adalah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, Memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran, seperti untuk biaya mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar lainnya.

2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upaya dilakukan dengan mempermudah akses masyarakat miskin terhadap permodalan dan izin usaha. Hal ini mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga masyarakat tidak tergantung pada lembaga keuangan informal dengan bunga tinggi.

3. Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan

Program seperti "Kampung Anti Miskin" difokuskan pada penurunan kemiskinan ekstrem di wilayah-wilayah tertentu di Jawa Barat. Mengurangi jumlah kemiskinan dengan meminimalkan ketimpangan antar wilayah sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara keseluruhan. Meningkatkan akses masyarakat miskin di wilayah dengan kantong kemiskinan tinggi terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Kolaborasi dengan perguruan tinggi juga dilakukan untuk menjalankan program-program pengentasan kemiskinan, termasuk pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menyusun, menjalankan serta mengelola program/kegiatan serta melakukan kolaborasi dengan semua unsur terkait. Pengelola program/kegiatan untuk penanggulangan kemiskinan diperlukan Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas tinggi. Peningkatan Komitmen semua pihak dan unsur stakeholder menjadi model penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat.

Dalam implementasinya, Jawa Barat menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk menentukan sasaran program secara tepat. Data ini membantu dalam mengidentifikasi wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, termasuk dalam pelaksanaan program seperti Sekolah Rakyat yang berkaitan dengan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan.

Secara statistik, penduduk miskin di Jawa Barat menurun dari 3,85 juta pada Maret 2024 menjadi 3,67 juta pada September 2024, atau menurun sebesar 0,38 persen. Meskipun persentase kemiskinan di Jawa Barat (7,08 persen) lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (8,57 persen), jumlah absolutnya terhitung masih tinggi karena populasi Jawa Barat yang mencapai 50 juta jiwa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen secepat-cepatnya pada tahun 2025, dan selambatnya pada tahun 2026. Untuk mencapai target ini, penguatan kelembagaan dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) menjadi langkah strategis yang diambil. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, diharapkan program-program

pengentasan kemiskinan di Jawa Barat dapat berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat mandiri dan sejahtera.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta perluasan kesempatan kerja, kebijakan diarahkan dengan mendorong investasi, khususnya investasi padat karya serta pemberdayaan usaha mandiri melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas. Dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, dilaksanakan berbagai pelatihan keterampilan kerja baik keterampilan kompetensi industri maupun usaha mandiri, serta sertifikasi keahlian. Untuk memperkuat akses ke pasar kerja, difasilitasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri (migran), pelaksanaan job fair dan platform informasi lowongan kerja.

Di sektor perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perluasan akses pekerjaan yang berfokus pada pemberdayaan kelompok masyarakat miskin akan memberikan andil dalam menurunkan tingkat kemiskinan daerah pada level 6,35 - 6,87 persen pada tahun 2026. Upaya mempersempit ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat antara lain dilakukan melalui pengembangan aktivitas perekonomian yang bertumpu pada kelompok masyarakat kelas bawah dan menengah seperti UMKM, IKM dan Ekonomi kreatif, serta mendorong aktivitas perekonomian berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dan investasi di wilayah afirmasi Jawa Barat Bagian Selatan.

Langkah-langkah untuk memitigasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian juga diagendakan melalui pengarusutamaan penerapan ekonomi hijau serta penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca pada berbagai sektor-sektor pembangunan. Penurunan intensitas emisi GRK pada tahun 2026 ditargetkan pada angka 2,62 persen melalui 4 sektor utama yaitu sektor berbasis lahan (kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, lahan mangrove), sektor energi dan transportasi, serta sektor limbah dan persampahan terhadap PDRB.

3.1.10.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Kabupaten Cirebon

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, hingga mencapai angka minus akibat dampak pandemi COVID-19. Kondisi ini menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, dan jasa. Namun, mulai tahun 2021, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren positif dengan pemulihan yang bertahap seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat dan berbagai stimulus

ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah.

Tantangan ekonomi Kabupaten Cirebon yang struktur ekonominya di dominasi oleh sektor industri pengolahan adalah bagaimana merumuskan kebijakan dan strategi yang berpengaruh pada akselerasi pertumbuhan ekonomi khususnya investasi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Selain itu beberapa tantangan lain diantaranya :

1. Tekanan inflasi di negara maju yang masih berlanjut, dan kebijakan moneter ketat diproyeksikan akan berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi di beberapa negara mitra dagang Kabupaten Cirebon, sehingga akan menurunkan permintaan luar negeri atas produk Industri Pengolahan Kabupaten Cirebon dan berpengaruh terhadap *share* sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Cirebon;
2. Perubahan iklim juga memberikan andil terhadap sulitnya memprediksi cuaca ekstrem di Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi penyebab utama inflasi pada komoditas pangan, selain itu perubahan iklim juga menjadi tantangan bagi sektor pertanian sebagai salah satu penyumbang PDRB Kabupaten Cirebon dan penyerapan tenaga kerja.
3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon belum berada pada level semestinya, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun regional Jawa Barat;
4. Pendapatan perkapita masyarakat yang relatif rendah;
5. Ketimpangan Pendapatan dan ketimpangan ekonomi yang relatif tinggi;
6. Daya saing tenaga kerja masih rendah;
7. Kualitas SDM belum optimal; dan
8. Masih ada kelompok masyarakat yang rentan miskin, sehingga memberikan kontribusi terhadap *share* ekonomi dari sisi pengeluaran;
9. Mengoptimalkan peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian;
10. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing;
11. Meningkatkan pengelolaan dan produktivitas tanaman pangan utama;
12. Penyediaan dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi Masyarakat;
13. Mengoptimalkan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi
 - a. Pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif dengan menyediakan

RUPM, peta potensi dan peluang investasi digital, kebijakan penanaman modal yang memberi kemudahan bagi investor, fasilitasi kemudahan pelayanan perizinan berbasis *online* dan penyelesaian kasus antara pekerja dan perusahaan.

- b. Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - c. Mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - d. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching*, *market sounding*, *link and match investor* industri kecil dan industri besar; dan
 - e. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Industri Kecil Menengah (IKM) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada Sektor Industri dan Perdagangan
- a. Meningkatkan nilai ekspor melalui fasilitasi produk-produk unggulan berorientasi ekspor dan memperluas pameran dagang internasional
 - b. Penyusunan RPIK, dan Penumbuhan *cluster* industri
 - c. Fasilitasi perizinan bagi IKM dan sertifikasi produk IKM
 - d. Penerapan Teknologi Industri
 - e. Penyediaan sarana distribusi perdagangan yang sesuai SNI (Pasar Pemda)
 - f. Pencapaian Stabilitas harga 9 komoditas kebutuhan pokok masyarakat
 - g. Penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri berteknologi tinggi;
 - h. Hilirisasi industri yang terdiversifikasi;
 - i. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - j. Substitusi bahan baku impor;
 - k. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - l. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada Sektor Koperasi dan UMKM
- a. Meningkatkan kualitas lembaga koperasi
 - b. Fasilitasi perizinan usaha simpan pinjam
 - c. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Kabupaten Cirebon melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
 - d. Meningkatkan usaha mikro yang menjadi wirausaha dan meningkatkan *omzet* para pelaku usaha mikro melalui fasilitasi akses permodalan, peningkatan kualitas dan pengembangan pelaku usaha mikro (keterampilan teknis dan manajerial), fasilitasi perizinan usaha mikro (kemudahan proses layanan

perizinan, pembebasan biaya perizinan dan fasilitasi HAKI usaha), fasilitasi peningkatan kualitas, sertifikasi dan diversifikasi produk usaha mikro, fasilitasi pemasaran produk pelaku usaha mikro (segmentasi dan positioning produk, perluasan cakupan promosi, perluasan informasi pasar, *branding*, optimalisasi *e-commerce*), tata kelola data UMKM (pendataan dan *update* data UMKM), kemitraan (kemitraan antar UMKM dan kemitraan UMKM dan usaha besar), serta penyediaan sarana prasarana UMKM (pembangunan sentra UMKM, bantuan sarana prasarana dan keringanan biaya sarana dan prasarana); dan

e. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir;

4. Tantangan pada Sektor Pertanian

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas sektor pertanian melalui pengembangan *green economy*;
- b. Sarana pendukung produksi belum memadai;
- c. Prasarana pendukung produksi belum memadai;
- d. Berkurangnya tenaga kerja di sektor pertanian;
- e. Rendahnya inovasi di sektor pertanian
- f. Dampak perubahan iklim;
- g. Degradasi dan berkurangnya lahan pertanian; dan
- h. Belum terlaksananya konservasi terhadap lahan dan air

5. Tantangan pada Sektor Ketahanan Pangan dan Perikanan

- a. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah komoditas sektor perikanan melalui pengembangan *blue economy*;
- b. Belum terbentuknya lembaga otoritas kompeten keamanan pangan daerah (OKKPD) Kab. Cirebon;
- c. Masih terdapat heuleur yang belum maksimal sanitiasi *hygiene* sesuai standar kewanamanan pangan;
- d. Masih ditemukan bahan pangan segar dan jajanan yang tidak aman dikonsumsi;
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi makanan yang B2SA;
- f. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (daya beli) dan fisik;
- g. Sebaran wilayah produksi hanya di daerah - daerah tertentu dimana arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen
- h. Rantai Distribusi yang panjang yang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen;

- i. Belum tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - j. Masih terdapat desa rentan rawan pangan
 - k. Pengembangan perikanan tangkap per kecamatan masih belum merata
 - l. Masih terbatasnya teknologi yang dihadapi oleh nelayan tangkap;
 - m. Masih terbatasnya pengembangan perikanan budidaya, termasuk ketersediaan lahan untuk budidaya;
 - n. Terbatasnya pemahaman pembudidaya ikan mengenai konsep-konsep produksi;
 - o. Kurang optimalnya penggunaan balai benih ikan
 - p. Kurang optimalnya kawasan khusus budidaya perikanan serta belum cukup tertatanya pasar dalam pengembangan perikanan budidaya;
 - q. Kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha kelautan dan perikanan yang masih rendah;
 - r. Sarana dan prasarana sektor kelautan dan perikanan yang belum optimal
 - s. Pasar masih berkembang dengan jaringan yang bersifat individu masih bersifat konvensional memerlukan terobosan dengan sistem *e-commerce* dengan optimalisasi teknologi
 - t. Perlunya penataan sistem pemasaran berbasis korporasi yang terintegrasi dengan para produsen yaitu nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam serta faktor produksi lainnya;
 - u. Belum dapat dipenuhi secara optimal permintaan perikanan;
 - v. Masih terbatasnya jumlah usaha yang bergerak pada industri pengolahan perikanan;
 - w. Optimalisasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - x. Cuaca ekstrim;
 - y. Tingginya harga pakan ikan.
6. Tantangan pada Sektor Pariwisata
- a. Pengembangan *orange economy*;
 - b. Fasilitasi HKI ekonomi kreatif;
 - c. Fasilitasi sertifikasi/standarisasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Meningkatkan jumlah kunjungan pariwisata Kabupaten Cirebon melalui pengembangan atraksi, amenities dan aksesibilitas (kemudahan akses, pergerakan dan kenyamanan wisatawan) destinasi pariwisata Kabupaten Cirebon, pemasaran pariwisata (promosi, pengembangan citra pariwisata, dan pengembangan pariwisata Kabupaten Cirebon), penguatan kelembagaan

pariwisata (penguatan tata kelola usaha kepariwisataan, penyediaan SDM pariwisata, dan penguatan strategi kepariwisataan) serta pertumbuhan industri pariwisata (melalui kemudahan investasi dan keterlibatan UMKM bidang pariwisata);

- e. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
- f. Pengembangan Desa Wisata;
- g. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional;
- h. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE); dan
- i. Pengembangan SDM pelaku ekonomi kreatif.

7. Tantangan pada Sektor Ketenagakerjaan

- a. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja mikro dan makro yang belum *match* dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
- b. Kompetensi tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja
- c. Penguatan balai latihan kerja pemerintah, swasta maupun komunitas dan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
- d. Sarana dan prasarana pelatihan kerja yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelatihan kerja
- e. Rendahnya penyerapan angkatan kerja terutama yang memiliki kompetensi
- f. Perluasan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tidak dapat bekerja di sektor formal
- g. CPMI *unprocedural*
- h. Kondusifitas hubungan industrial

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan menuju penormalan ekonomi. Tiga sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Cirebon yaitu Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum akan didorong untuk tetap tumbuh positif seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi nasional. Realisasi dan Proyeksi pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha tahun 2026 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.20

Realisasi Tahun 2023-2024 dan Proyeksi Pertumbuhan PDRB Sisi Lapangan Usaha untuk 4 (*Empat*) Sektor Dominan Kabupaten Cirebon, 2025-2026

Kategori Lapangan Usaha		Realisasi 2023	2024			2025		2026	
			Perubahan RPJMD	Target Penyesuaian	Realisasi	RPD	Target P-RKPD	RPD	Target RPJMD
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-2,13	2,54	2,31	0,12	4,63	4,63	4,86	0,25
B	Industri Pengolahan	5,38	5,07	5,07	5,87	5,43	5,43	5,7	12,25
C	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,02	5,75	3,05	2,54	2,66	2,66	2,8	5,30
D	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,64	5,23	7,77	2,20	8,88	8,88	9,32	4,59

Sumber: Data Diolah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2025.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Cirebon didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2025. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen makro pembangunan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan Kabupaten Cirebon dengan proyeksi sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.21

Proyeksi Indikator Makro Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

No.	Indikator Makro Pembangunan	Kabupaten Cirebon		
		Realisasi 2024	Target 2025 (RPJMD Kab. Cirebon 2025-2029)	Target 2026 (RPJMD Kab. Cirebon 2025-2029)
1	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,30	72,57	73,29
2	Persentase Penduduk Miskin (Persen)	11,00	10,16	10,10

No.	Indikator Makro Pembangunan	Kabupaten Cirebon		
		Realisasi 2024	Target 2025 (RPJMD Kab. Cirebon 2025-2029)	Target 2026 (RPJMD Kab. Cirebon 2025-2029)
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	6,74	6,73	5,74
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	5,83	5,32	6,37
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	28,14	28,11	31,92
6	Indeks Gini (Poin)	0,374	0,355	0,354
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TonCo2eq/miliar)	-	5,37	5.80

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kab. Cirebon Tahun 2025-2029.

3.1.11. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi

3.1.11.1. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional mengacu pada arah kebijakan Pembangunan ekonomi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Adapun sasaran ekonomi makro nasional Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22.
Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2026

No.	Indikator	Sasaran 2026
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%yoy): Akhir Periode	2,5±1,0
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	16.500 - 16.900
3	Cadangan Devisa (miliar US\$)	171,01–171,42
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,2–6,4
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,90)–(1,04)
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	21,18–21,20
7	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6–4,7
8	Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,00–24,70
9	Pendapatan Negara (% PDB)	12,22–13,35
10	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,45–11,40
11	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,22)–(0,40)
12	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,53)–(2,70)
13	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,8–39,9
14	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,17–7,18

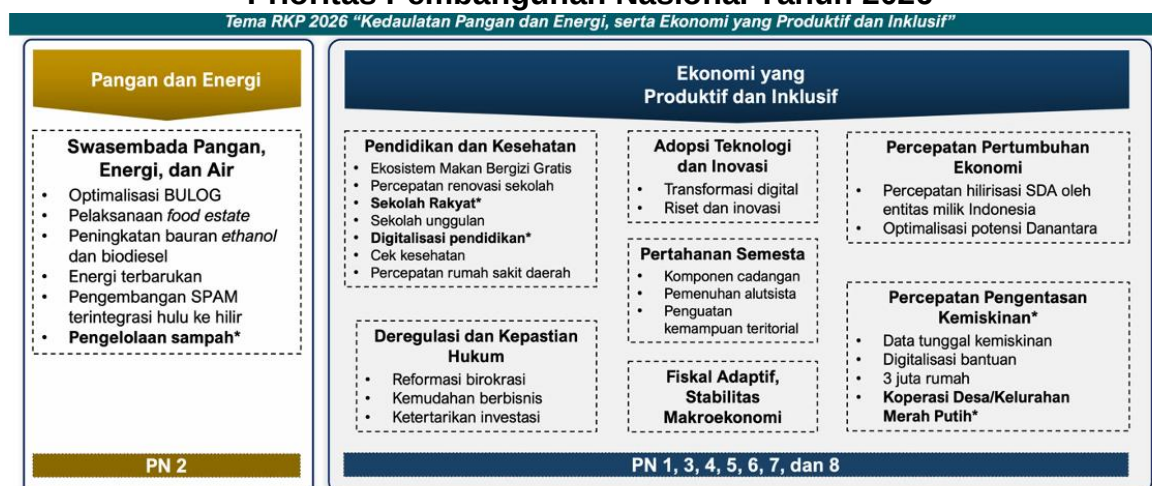
No.	Indikator	Sasaran 2026
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	2.093,3–2.175,3
16	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	915,4–1.006,5

Sumber : RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2025.

Catatan : Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Gambar 3.18.
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026



Sumber : RKP Tahun 2026

Arah kebijakan tahun 2026 difokuskan pada “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” dengan didukung oleh Prioritas Nasional spesifik sebagaimana Gambar 3.16. Arah kebijakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045. Adapun Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2026, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi tahun 2026 sebesar 5,8–6,3 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2026 ditargetkan mampu tumbuh, dengan sasaran pertumbuhan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23
Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran Tahun 2026 (Persen)

Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
Pertumbuhan PDB	5,80–6,30
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53–5,83
Konsumsi Pemerintah	6,85–6,96
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17–7,18
Ekspor Barang dan Jasa	7,05–7,17
Impor Barang dan Jasa	7,34–7,50

Sumber : RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2025.

Catatan : Angka dalam kurung (x,x) bernilai negatif.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur. PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi

domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun. Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tercermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30–6,00.

Upaya strategis dan mendesak untuk meningkatkan investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang kondusif dan kepastian berusaha guna memperkuat transformasi ekonomi, yang mencakup (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maupun di antara kementerian/lembaga; (ii) penyelesaian hambatan pada aspek hukum, peraturan, prosedur, dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan efektivitas pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada pelaku usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor dan wilayah. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global yang didukung oleh ekspansi pasar ekspor, peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global, serta memanfaatkan peluang di tengah ketidakpastian geopolitik global melalui strategi (i) sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan perdagangan tarif dan nontarif untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (ii) pengembangan pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, serta optimalisasi *market intelligence*, *business matching* dan pengamanan pasar ekspor; (iii) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan mendorong penguatan tatanan perdagangan global serta meningkatkan efektivitas implementasi *Free Trade Agreement* (FTA) dan/atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA); (iv) peningkatan kapasitas eksportir untuk meningkatkan diversifikasi produk ekspor, termasuk pelatihan ekspor dan bisnis *e-commerce* bagi pelaku UMKM, pengembangan *exporter tools* untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (v) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan *buyer* secara *real-time*; serta (vi) penguatan koordinasi kebijakan dan penyediaan data perdagangan jasa dan produk kreatif.

Sedangkan dari sisi lapangan usaha, perekonomian Tahun 2026 ditargetkan tumbuh dengan sasaran pertumbuhan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.24

Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2026 (Persen)

Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
Pertumbuhan PDB	5,80–6,30
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
Industri Pengolahan	5,85–6,38
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,68–6,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,22–2,38
Konstruksi	7,80–7,91
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
Real Estate	2,78–2,98
Jasa Perusahaan	8,57–9,20
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
Jasa Pendidikan	4,07–4,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
Jasa Lainnya	7,24–7,76

Sumber: RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2025.

Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Industrial Process and Production Use* (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun. Selain itu, beberapa faktor *demand side* pun diperkirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring

dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh dengan didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Pertumbuhan sektor dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor. Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat melalui kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan *event*

berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (*Tourism 5.0*).

2. Arah Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal tahun 2026 diarahkan pada pendekatan kebijakan yang adaptif dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan melalui percepatan peningkatan pendapatan dan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), serta menjaga keseimbangan primer, defisit anggaran, dan tingkat utang yang lebih sehat untuk menjamin stabilitas (*pro-stability*) dan keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*). Sasaran fiskal Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.25
Rincian Sasaran Fiskal Tahun 2026

Uraian	Realisasi 2024	APBN 2025	Sasaran 2026
Pendapatan Negara	12,84	12,36	12,22-13,35
Penerimaan Perpajakan	10,08	10,24	10,45-11,40
PNBP	2,62	2,11	1,76-1,94
Belanja Negara	15,13	14,89	14,75-16,05
Belanja Pemerintah Pusat	11,23	11,11	11,86-12,69
Transfer ke Daerah	3,90	3,78	2,89-3,37
Keseimbangan Primer	-0,09	-0,26	(0,22)-(0,40)
Surplus/Defisit	-2,29	-2,53	(2,53)-(2,70)
Stok Utang Pemerintah	39,36	39,15	39,8-39,9

Sumber: RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025.

Optimalisasi pendapatan negara diarahkan pada upaya perbaikan administrasi dan pemungutan perpajakan yang lebih efektif sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan tetap menjaga kualitas layanan publik dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan perpajakan difokuskan pada percepatan implementasi *core tax system* secara menyeluruh, simplifikasi proses bisnis dan pembenahan tata kelola kelembagaan, penegakan hukum untuk peningkatan kepatuhan pajak (*tax compliance*), perluasan basis pajak dan mendorong sektor informal menjadi formal, intensifikasi kebijakan dan ekstensifikasi objek cukai, penguatan perpajakan sejalan dengan struktur ekonomi yang lebih produktif,

perbaikan data basis pajak dengan penguatan *cashless economy*, percepatan digitalisasi perpajakan secara efektif, serta penajaman efektivitas insentif perpajakan untuk mendorong sektor prioritas. Dari sisi PNBPN, kebijakan difokuskan pada perbaikan tata kelola pendapatan negara dari Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (SDA Migas), optimalisasi PNBPN SDA Nonmigas melalui peningkatan efektivitas Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) antar-Kementerian/Lembaga (K/L), peningkatan potensi pendapatan SDA Nonmigas (Kehutanan, Perikanan, Panas Bumi), peningkatan inovasi layanan dengan optimalisasi teknologi pada K/L pengelola PNBPN, optimalisasi pemanfaatan aset/Barang Milik Negara (BMN), serta integrasi dan sinergi sumber daya antar-Badan Layanan Umum (BLU) untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas. Selain itu, upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah difokuskan pada percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah, diagnostik potensi ekonomi daerah, serta kerjasama pertukaran data antara instansi pusat dan daerah. Selain upaya tersebut, strategi pemberian insentif pajak dan retribusi daerah akan dimanfaatkan untuk meningkatkan daya tarik investasi yang akan berdampak pada perekonomian lokal.

Kebijakan Belanja Negara, baik Belanja Kementerian/ Lembaga, Belanja Non-Kementerian/Lembaga, dan Belanja Transfer ke Daerah diarahkan pada upaya peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*) melalui penguatan belanja produktif dan bersifat *countercyclical*. Pengalokasian belanja negara diutamakan pada pertahanan, percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, swasembada pangan, energi, dan air, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan. Kebijakan belanja negara juga diarahkan untuk bersifat afirmatif dengan cara memberikan perhatian khusus dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, baik antarkelompok masyarakat maupun antardaerah.

Fokus pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain untuk (i) mendukung proyek prioritas yang menghasilkan imbal hasil serta memberikan efek pengganda terhadap perekonomian; (ii) optimalisasi peran *Special Mission Vehicle* (SMV), BLU, dan Danantara untuk mendukung sasaran pembangunan; (iii) peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM, dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi); serta (iv) optimalisasi Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, kapasitas fiskal Pemerintah Daerah, selain didorong dari sisi penerimaannya, juga diarahkan mengoptimalkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan. Pemanfaatan instrumen

pembiayaan utang diarahkan untuk dapat disinergikan dengan pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, untuk meningkatkan efektivitas pembangunan dan ketuntasan. Pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah difokuskan untuk pembangunan infrastruktur daerah. Selain itu, strategi pembiayaan melalui pengelolaan dana abadi daerah didorong untuk dilaksanakan bagi Pemerintah Daerah dengan kapasitas fiskal yang memadai.

3. Stabilitas Eksternal

Neraca perdagangan barang ditargetkan surplus dengan mendorong kebijakan pemerintah yang berorientasi pada peningkatan ekspor melalui upaya reformasi untuk menurunkan hambatan perdagangan, diversifikasi perdagangan, optimalisasi kerjasama bilateral dan multilateral, serta mempersiapkan sektor yang terdampak dari penerapan tarif resiprokal. Sasaran postur NPI tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Sasaran Postur Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2026

Uraian (Miliar USD)	Sasaran 2026
Transaksi Berjalan	(14,52)–(17,02)
dalam persen PDB	(0,90)–(1,04)
Barang	33,13–34,81
Ekspor	294,90–300,42
Impor	260,09–267,30
Jasa-Jasa	(18,54)–(19,23)
Ekspor	42,57–45,34
Impor	61,11–64,57
Pendapatan Primer	(38,25)–(39,01)
Pendapatan Sekunder	7,46–8,10
Transaksi Modal dan Finansial	21,45–24,02
Investasi Langsung	17,73–20,19
Investasi Portofolio	12,40–12,73
Investasi Lainnya	(8,76)–(8,95)
Neraca Keseluruhan	5,69–5,75
Cadangan Devisa	171,01–171,42
dalam bulan impor	6,2–6,4

Sumber: RKP Tahun 2026, Kementerian PPN/Bappenas, 2025.

Pada tahun 2026, defisit neraca jasa-jasa ditargetkan terkendali sebesar US\$18,54–19,23 miliar yang akan diarahkan melalui kebijakan peningkatan surplus neraca jasa perjalanan melalui peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional dan optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI sehingga jumlah kunjungan dan belanja wisatawan mancanegara di Indonesia meningkat. Di sisi lain,

defisit neraca jasa transportasi diperkirakan akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan aktivitas ekspor dan impor barang. Defisit neraca pendapatan primer ditargetkan sebesar US\$38,25–39,01 miliar, meningkat secara terkendali untuk membiayai imbal hasil investasi asing, sejalan dengan kebutuhan investasi asing di Indonesia yang masih tinggi untuk mendanai proyek-proyek. Sementara itu, neraca pendapatan sekunder ditargetkan kembali mencatatkan surplus yang tinggi menjadi sebesar US\$7,46–8,10 miliar, yang akan diarahkan melalui kebijakan perluasan negara tempat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), perluasan penyaluran PMI pada sektor lapangan kerja baru salah satunya pada sektor kesehatan, serta peningkatan PMI dengan keterampilan menengah-tinggi.

Selanjutnya, neraca transaksi modal dan finansial ditargetkan terus mengalami perkembangan yang baik sehingga dapat mencatatkan surplus sebesar US\$21,45–24,02 miliar. Perkembangan tersebut dikontribusikan oleh peningkatan investasi langsung luar negeri (FDI) menjadi sebesar US\$17,73–20,19 miliar, sejalan dengan berjalannya proyek strategis pemerintah dan iklim dunia usaha yang semakin kondusif. Investasi portofolio juga ditargetkan dapat terus berkembang dan mencatatkan surplus sebesar US\$12,40–12,73 miliar sehingga dapat membuat pasar keuangan dan likuiditas tetap terjaga dalam mendorong akselerasi sektor riil. Pada akhir tahun 2026, neraca keseluruhan ditargetkan membukukan surplus sebesar US\$5,69–5,75 miliar, disertai dengan peningkatan cadangan devisa mencapai US\$171,01–171,42 miliar atau setara dengan pembiayaan 6,2–6,4 bulan impor dan berada di atas kecukupan standar internasional.

4. Stabilitas Moneter

Pada tahun 2026, kebijakan moneter diarahkan untuk menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi dan nilai tukar di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global. Tingkat inflasi dijaga pada rentang sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen (yoy), serta nilai tukar rupiah pada rentang Rp16.500–Rp16.900 per US\$. Untuk memitigasi dampak negatif rambatan global dan mendorong penguatan ekonomi nasional, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan lainnya (fiskal, makroprudensial, sektor riil, sektor keuangan, dan sistem pembayaran).

Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2026 diarahkan melalui kerangka 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi. Upaya tersebut meliputi (i) stabilisasi harga melalui penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM); (ii) peningkatan produksi dalam negeri melalui: pengembangan

kawasan pangan dan hortikultura; optimalisasi bantuan sarana produksi dan infrastuktur pertanian; penguatan sarana dan prasarana pengolahan dan penyimpanan produk pangan; penerapan praktik budidaya sesuai *Good Agricultural Practices* (GAP), *Good Handling Practices* (GHP); serta penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Daerah (CPP dan CPPD); (iii) penguatan kelancaran distribusi melalui: peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antarwilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan) serta penguatan dan perluasan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD); serta (iv) perbaikan kualitas data pangan, penguatan koordinasi sejak proses perencanaan, serta koordinasi perumusan kebijakan harga diatur pemerintah baik dari sisi *timing* maupun *sequencing* sehingga dapat meminimalkan dampaknya terhadap kenaikan inflasi.

Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah diarahkan untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya melalui (i) strategi operasi moneter *pro-market* untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, masuknya aliran modal asing, serta pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing; (ii) menetapkan tingkat suku bunga BI-Rate yang optimal untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan; (iii) mendorong penerapan kebijakan nilai tukar rupiah yang sejalan dengan pencapaian target inflasi dan mendukung stabilitas eksternal; (iv) menjaga ketersediaan cadangan devisa untuk mendukung stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri (ULN) Pemerintah; serta (v) optimalisasi implementasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026, kebijakan moneter disinergikan dengan bauran kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan untuk mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor prioritas dan UMKM serta diselaraskan dengan kebijakan sektor keuangan untuk menyediakan likuiditas yang memadai dalam rangka mendorong intermediasi keuangan, pertumbuhan ekonomi inklusif dan keuangan hijau. Kebijakan sistem pembayaran dilaksanakan mengacu pada *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dengan fokus 4I-RD (Infrastruktur, Industri, Inovasi, Internasional dan Rupiah Digital). Kebijakan sistem pembayaran terus

didorong dan diperluas melalui (i) perluasan digitalisasi sistem pembayaran; (ii) akselerasi transformasi digital Pemerintah; (iii) perluasan kerja sama sistem pembayaran antarnegara; serta (iv) eksperimentasi lanjutan rupiah digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital sah di Indonesia. Koordinasi antara Pemerintah dan BI terus diperkuat untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat dinamika perekonomian global sehingga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan tetap terjaga.

5. Stabilitas Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2026, kebijakan sektor keuangan tidak hanya diarahkan pada upaya menjaga stabilitas, namun juga pendalaman sektor keuangan, melalui penguatan peran sektor keuangan, khususnya pada sektor yang mendukung program prioritas pembangunan (termasuk UMKM). Stabilitas sektor keuangan tahun 2026 akan ditopang oleh ketahanan sektor perbankan dengan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang terjaga pada level tinggi berkisar pada level 28,5 persen, serta risiko kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang terkendali rendah berkisar pada 2,0-2,5 persen. Sejalan dengan itu, upaya pendalaman sektor keuangan akan terus ditingkatkan, baik perbankan maupun nonbank seperti dana pensiun, asuransi, dan pasar modal, yang diiringi dengan peningkatan fungsi intermediasi, peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen sektor keuangan. Pada tahun 2026, semakin membaiknya pendalaman sektor keuangan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5-14,0 persen, disertai peningkatan rasio jumlah uang beredar/PDB (M2/PDB) menjadi 42,3-43,0 persen.

Peningkatan peran baik perbankan maupun nonbank akan difokuskan pada diversifikasi produk, peningkatan inovasi, perbaikan tata kelola, peningkatan efisiensi, perluasan jangkauan atau akses layanan keuangan ke seluruh segmen masyarakat termasuk masyarakat termarjinalkan, penguatan dukungan sektor keuangan pada program-program prioritas pemerintah, serta peningkatan peran tim percepatan akses keuangan daerah.

6. Pemerataan Ekonomi Wilayah

Sebagai upaya untuk mencapai pertumbuhan tinggi hingga delapan persen, pertumbuhan wilayah pada tahun 2026 ditargetkan untuk tumbuh lebih tinggi, dengan akselerasi KTI dan momentum pertumbuhan KBI yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi

wilayah KBI ditargetkan sebesar 5,6–6,0 persen, sedangkan KTI sebesar 6,5–7,3 persen.

Perekonomian Wilayah Papua akan didorong oleh sektor pertanian, pertambangan, dan industri pengolahan. Wilayah Papua berperan besar mendukung swasembada pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Papua Selatan serta pangan berbasis perikanan. Swasembada energi juga didukung oleh aktivitas industri migas di Teluk Bintuni dengan operasionalisasi LNG Train III serta ekspansi fasilitas lapangan gas. Selain itu, industri diarahkan pada industri kimia berbasis petrokimia dan komoditas perkebunan. Pertambangan diarahkan pada peningkatan produktivitas tambang emas dan tembaga serta logistik menuju KI pengolahnya. Selain itu, Wilayah Papua juga diharapkan tumbuh seiring dengan aktivitas pariwisata unggulan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Raja Ampat serta pariwisata berbasis taman nasional. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Wilayah Papua ditargetkan mencapai 6,7–7,6 persen pada tahun 2026.

Aktivitas industri logam dasar, aktivitas pariwisata, perkebunan dan perikanan diharapkan mendorong Wilayah Maluku untuk tumbuh mencapai 9,8–11,0 persen pada tahun 2026. Berlanjutnya produksi serta realisasi investasi baru di KI Teluk Weda di Halmahera Tengah serta KI Pulau Obi di Halmahera Selatan diharapkan meningkatkan produksi olahan nikel dan logam lainnya. Pengembangan pariwisata diharapkan juga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah dengan pusat pertumbuhan di DPP Morotai dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Banda Neira. Selain itu, komoditas pertanian difokuskan pada pengembangan kawasan komoditas unggulan kelapa dan pala. Sementara itu, sektor perikanan akan difokuskan pada pengembangan komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang dan lobster.

Wilayah Sulawesi merupakan salah satu sumber utama penggerak ekonomi di KTI yang ditargetkan tumbuh 6,9–7,8 persen pada tahun 2026. Wilayah Sulawesi diarahkan untuk pengembangan industri berbasis pertambangan nikel, perkebunan kelapa dan kakao, perikanan tangkap, dan rumput laut. Optimalisasi industri, utamanya pada aktivitas smelter logam dasar khususnya nikel di Morowali, Morowali Utara, dan Konawe, diharapkan meningkatkan kinerja industri pengolahan. Pariwisata di Wilayah Sulawesi diharapkan dapat meningkat dengan pengembangan DPP Manado-Likupang dan DPP Wakatobi yang didukung oleh dibukanya rute-rute baru penerbangan langsung internasional. Sektor logistik dan transportasi diharapkan

dapat meningkat didorong oleh optimalisasi kereta api Makassar-Parepare, jalan tol, serta pengembangan pelabuhan perdagangan besar.

Berlanjutnya pembangunan *superhub* ekonomi IKN serta daerah sekitarnya diharapkan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Wilayah Kalimantan sehingga dapat tumbuh 6,0–6,7 persen pada tahun 2026. Pengembangan pusat industri berbasis mineral, sumber daya hayati, dan industri padat karya melalui Kawasan Pengembangan Pelabuhan Kijing, KI Ketapang, Kawasan Perindustrian Hijau Tanah Kuning, Kawasan Agroindustri, dan Kawasan Pertumbuhan Industri Baru juga diharapkan dapat mendorong perekonomian Kalimantan. Selain itu, pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi kawasan pariwisata Sambas-Singawang dan kawasan pariwisata petualangan Derawan-Berau, pengembangan Wilayah Metropolitan (WM) di Banjarmasin, pengembangan komoditas unggulan (rumput laut, kelapa sawit, dan perikanan) diharapkan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian di Wilayah Kalimantan

Perekonomian di Wilayah Bali–Nusa Tenggara ditargetkan tumbuh 5,8–6,4 persen pada tahun 2026, terutama didorong oleh pengembangan KEK seperti KEK Sanur, KEK Kura-kura Bali, KI Sumbawa Barat dan KI Candikusuma, sehingga dapat menciptakan aglomerasi industri yang kuat. Selain itu, penguatan ekosistem pariwisata yang berbasis budaya, bahari, petualangan dan minat khusus yang berkelanjutan seperti DPP Lombok-Gili Tramena, DPP Labuan Bajo, dan kawasan destinasi pariwisata regeneratif Bali juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Wilayah Bali-Nusa Tenggara. Pengembangan WM Denpasar, pengembangan Kawasan Perkotaan Pariwisata Singaraja, Kawasan Perkotaan Sedang Kota Mataram, Kawasan Perkotaan Pariwisata Labuan Bajo mendorong aktivitas jasa khususnya pariwisata dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Sektor pertanian sebagai sektor hulu dan industri sebagai sektor hilir juga terus didorong melalui penyiapan dan pengembangan sentra industri/produksi berbasis komoditas unggulan.

Wilayah Sumatera ditargetkan tumbuh 5,2–5,7 persen pada tahun 2026 sebagai pusat pertumbuhan dalam hilirisasi komoditas primer unggulan serta lumbung pangan nasional. Pengembangan industri di Wilayah Sumatera difokuskan pada hilirisasi produk perkebunan (sawit, karet, kopi, kelapa), pertambangan (bauksit dan timah), hasil perikanan, industri logam dasar, kimia dan migas, serta peningkatan produksi dan investasi di kawasan pertumbuhan seperti KEK Sei Mangkei, KEK Arun Lhokseumawe, dan KEK Galang Batang. Wilayah Sumatera juga menjadi kontributor

besar dalam swasembada pangan, air dan energi dengan dikembangkannya KSPS Sumatera Selatan serta pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan. Di sisi logistik dan transportasi, berlanjutnya pembangunan dan operasionalisasi JTTS yang direncanakan terintegrasi dengan utilitas, serta pengembangan kereta api diharapkan turut mendorong pertumbuhan. Aktivitas jasa didorong oleh pariwisata dengan berlanjutnya pengembangan DPP Danau Toba serta pariwisata regeneratif Kepulauan Riau yang turut mendorong sektor transportasi sebagai penunjang mobilitas.

Wilayah Jawa salah satunya akan fokus pada pengembangan kawasan swasembada pangan, air, energi, serta kawasan komoditas unggulan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan tersebut diantaranya komoditas tebu yang berlokasi di Cirebon-Majalengka, Pegunungan Kendeng, Lingkar Kelud-Kawi-Arjuna-Welirang, serta Tapal Kuda. Ekonomi biru di Kawasan Indramayu-Cirebon, Pati-Rembang, Pacitan-Trenggalek Tulungagung, Lamongan, serta Sumenep. Kawasan pengembangan industri seperti Cilegon-Serang-Tangerang, Bogor-Bekasi-Karawang-Purwakarta Subang-Patimban, Cirebon-Kertajati, Cekungan Bandung, Batang, Kendal Semarang-Demak-Kudus, dan lain-lain diperkirakan mendorong perekonomian Wilayah Jawa. Pengembangan kawasan metropolitan seperti kawasan aglomerasi Jakarta, WM Bandung, Semarang, dan Surabaya juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Wilayah Jawa. Selain itu, terdapat pengembangan kawasan perkotaan Non-WM serta pengembangan kawasan pariwisata ekonomi kreatif yang dapat mendorong sektor jasa serta konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, Wilayah Jawa ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,7–6,1 persen pada tahun 2026.

3.1.11.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/ global;
2. penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;

3. penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
4. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
7. penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen;
8. penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif;
9. penyiapan dan penataan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya *demand*;
10. pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global;
11. penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas *researcher*, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;
12. penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
13. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
14. penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*;

15. penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
16. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
17. peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM;
18. penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
19. industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
20. penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, *offsetting* dan pajak karbon, serta pembayarar berbasis kinerja (*result base payment*);
21. pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
22. Penataan dan restrukturisasi BUMD.

3.1.11.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Cirebon

Tema Pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2026 adalah “Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik”.

Arah pembangunan ekonomi Kabupaten Cirebon tahun 2026 tersebut dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemantapan manajemen organisasi pemerintahan, kompetensi dan kinerja ASN.
2. Pemantapan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel.
3. Penguatan akses dan kualitas data, informasi dan keterbukaan informasi public yang didukung oleh peningkatan informasi digital.
4. Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja di berbagai bidang pembangunan serta kualitas kompetensi tenaga kerja dengan pemberdayaan angkatan kerja,

- pelatihan canaker dan instruktur, serta kompensasi yang layak termasuk bagi penyandang disabilitas.
5. Peningkatan kualitas produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata dan mendorong akses pemasaran yang lebih luas.
 6. Penguatan kelembagaan mendukung industri yang berbasis teknologi, inovasi; menguatkan kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM berbasis sektor unggulan; penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam mendorong penanaman modal yang berkelanjutan; peningkatan pelayanan dan pemberian kemudahan/insentif penanaman modal di daerah.
 7. Pemantapan kapasitas dan kualitas SDM masyarakat miskin yang mendorong kemandirian yang didukung oleh pemantapan kualitas layanan dasar bagi masyarakat miskin.
 8. Peningkatan sinergi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan.
 9. Peningkatan pelayanan kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi.
 10. Peningkatan keberdayaan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan lapangan kerja formal, termasuk bagi kelompok rentan.
 11. Penguatan koordinasi antar stakeholder dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelompok rentan, serta implementasi pembangunan rendah karbon berketahanan iklim.
 12. Pemantapan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, kesetaraan dalam berdemokrasi, dan kapasitas lembaga demokrasi.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Cirebon berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan

prinsip- prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

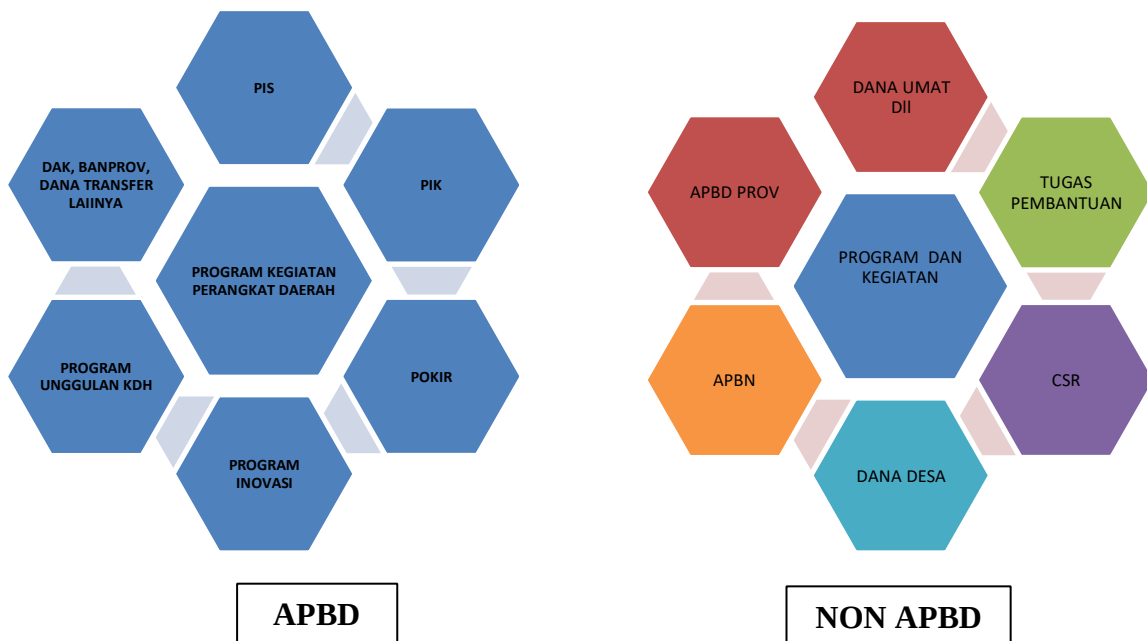
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanahkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

1. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
2. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
3. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, memiliki rasio kapasitas fiskal daerah sebesar 1,006 termasuk dalam kategori kapasitas fiskal daerah rendah. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas jika dilihat dari penerimaan fiskal daerah, Kabupaten Cirebon telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD Kabupaten Cirebon juga melalui optimalisasi pendanaan non APBD. Kebijakan kolaborasi pendanaan Pembangunan daerah Kabupaten Cirebon disajikan pada gambar berikut ini :

Gambar 3.19.

Kebijakan Kolaborasi Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon



Sumber : P-RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Berdasarkan pada hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah seperti diuraikan pada subbab terdahulu dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang telah direncanakan di dalam dokumen RKP tahun 2026 serta kebijakan pemerintah Provinsi

Jawa Barat yang direncanakan dalam RKPD tahun 2026. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026, baik pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.2.1. Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang baik, akan memiliki kemampuan yang lebih baik di dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan realisasi pendapatan tahun 2023 dan 2024, proyeksi/target pendapatan tahun 2025-2027.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berfungsi melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang pendapatan daerah, otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah, sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap terus dilakukan upaya meningkatkan kemandirian pendapatan daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimiliki. Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

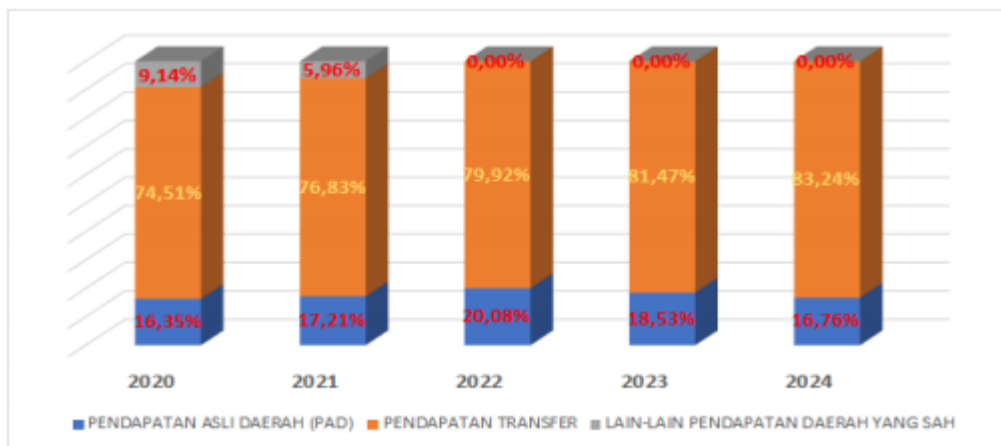
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer yang meliputi:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - b. Transfer antar Daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
 - a. Hibah

- b. Dana Darurat dan/ atau
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2026, turut dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, baik itu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sumber dana pembangunan APBD Kabupaten Cirebon secara umum masih didominasi oleh sumber dana transfer, sementara kemampuan PAD hanya memberikan kontribusi yang tidak terlalu signifikan terhadap pendapatan. Perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Cirebon 5 (*lima*) tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.20.

Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, 2020-2024



Sumber Data : - LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2020-2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon.
 - LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (unaudited), BKAD Kabupaten Cirebon.

Untuk tahun 2026, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp.4.222.054.773.385,00 meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1.044.230.524.628,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.171.263.288.757,00. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menambahkan pungutan tambahan

atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau yang disebut sebagai opsen di dalam struktur pendapatan asli daerahnya.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah ditargetkan mengalami kenaikan. Perkembangan realisasi pendapatan tahun 2023-2024, dan proyeksi / target pendapatan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2025– 2027 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2027

No	Uraian	Jumlah (Rp.)					
		Realisasi Tahun 2023 (APBD) ¹⁾	Realisasi Tahun 2024 (APBD) ²⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 Berdasarkan RPJMD ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 Berdasarkan RKPD ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2027 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan asli daerah	744.524.538.980,82	771.993.183.583,28	1.067.915.168.215,00	1.201.933.890.059,45	1.044.230.524.628,00	1.273.844.031.008,21
4.1.01.	Pajak daerah	328.734.776.136,00	348.566.584.116,00	587.949.082.583,00	624.316.255.052,33	598.786.678.745,00	686.747.880.557,56
4.1.02.	Retribusi daerah	32.401.830.073,00	385.446.568.081,28	455.372.410.642,00	516.465.036.553,17	420.850.170.893,00	516.465.036.553,17
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	14.458.949.796,00	14.683.818.841,00	15.853.360.903,00	18.294.195.793,42	15.853.360.903,00	19.382.859.648,75
4.1.04.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	368.928.982.975,82	23.296.212.545,00	8.740.314.087,00	42.858.402.660,53	8.740.314.087,00	43.501.278.700,44
4.2.	Pendapatan Transfer	3.187.538.480.521,00	3.692.146.542.020,00	3.546.737.384.157,00	3.593.709.056.052,58	3.171.263.288.757,00	3.684.994.250.491,73
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.796.514.952.898,00	3.142.049.119.624,00	3.286.947.759.000,00	3.074.087.879.856,21	2.886.597.786.000,00	3.136.390.943.000,83
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	391.023.527.623,00	550.097.422.396,00	259.789.625.157,00	519.621.176.196,37	284.665.502.757,00	548.603.307.490,90
4.3.	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	13.439.040.000,00	-	6.560.960.000,00	-
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	-	13.439.040.000,00	-	6.560.960.000,00	-
4.3.02.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp.)					
		Realisasi Tahun 2023 (APBD) ¹⁾	Realisasi Tahun 2024 (APBD) ²⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2025 (APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 Berdasarkan RPJMD ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2026 Berdasarkan RKPD ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2027 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (4.1+4.2+4.3)		3.960.950.401.341,52	4.464.139.725.603,28	4.628.091.592.372,00	4.795.642.946.112,03	4.222.054.773.385,00	4.958.838.281.499,95

Sumber: - ¹⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ²⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
- ³⁾ Perda APBD TA. 2023, BKAD Kabupaten Cirebon
- ⁴⁾ Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029
- ⁵⁾ Penetapan RKPD Kabupaten Cirebon 2026
- ⁶⁾ Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali timbul permasalahan dengan masyarakat khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan dan akan menghambat pertumbuhan sektor riil. Di samping itu, retribusi daerah dan penetapan tarif seharusnya tidak membebani masyarakat secara berlebihan dan sesuai dengan kualitas layanan publik yang diberikan. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan:

- 1) Perbaikan Manajemen. Setiap potensi pendapatan daerah diharapkan dapat direalisasikan melalui perbaikan manajemen. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur (biaya dan waktu).
- 2) Peningkatan Investasi. Peningkatan investasi daerah dapat didorong dengan membangun iklim usaha dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dengan:
 - a. Menjaga stabilitas ekonomi daerah;
 - b. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi;
 - c. Menyederhanakan prosedur perizinan;
 - d. Mempertegas peraturan/kebijakan agar tidak tumpang tindih;
 - e. Meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha;
 - f. Menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja;
 - g. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
 - h. Meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.
- 3) Optimalisasi Aset Daerah. Penggunaan aset daerah ditingkatkan untuk menambah PAD dengan perbaikan administrasi aset, peningkatan perputaran (turn over), dan bekerjasama dengan swasta. Perbaikan manajemen BUMD dan rencana pembentukan badan usaha baru diperlukan dalam rangka optimalisasi aset daerah.

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer baik pendapatan transfer pemerintah pusat maupun pendapatan transfer antar daerah ditargetkan tidak mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada kebijakan keuangan

pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun demikian upaya untuk peningkatan pendapatan dari pendapatan transfer tetap dilakukan melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Bantuan Keuangan Provinsi. Pendapatan dari dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan dana transfer umum maupun pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Peningkatan aktivitas ekonomi daerah akan berkorelasi positif dengan pendapatan yang berasal dari bagi hasil.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan harus terus dilakukan baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan yang bersumber dari dana transfer baik pusat maupun transfer antar daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat. Sumber pendapatan dari PAD sampai saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan dana transfer, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya dengan kebijakan yang tidak membebani masyarakat, terutama masyarakat miskin.

Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, menghendaki adanya penyesuaian ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (*satu*) Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap target PAD untuk tahun anggaran 2024 maupun 2025. Penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang telah dilakukan pada tahun 2023 dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut beberapa peraturan antara lain :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak

- Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Cirebon;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 7. Ketentuan mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Retribusi

Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peningkatan PAD juga diupayakan dengan meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dengan menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi, menyederhanakan prosedur perizinan, menyehatkan iklim ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedur, memperkuat peran dan komitmen pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, layanan perizinan dilakukan secara daring untuk memudahkan jangkauan Masyarakat dalam mengurus perizinan berusaha serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Cirebon. Upaya tersebut diharapkan dapat terwujud dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang mencabut beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Peternakan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemberian Fatwa Rencana Pengarahan Lokasi
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penataan, Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal.

Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam optimalisasi PAD dilakukan dengan inovasi-inovasi di sektor pajak dan retribusi sebagai berikut :

1. Pemberlakuan e-retribusi;
2. Reklame dengan pola zonasi;
3. PBB dan PHTB dilakukan dengan penilaian objek dan subjek pajak;
4. Pajak restoran akan didorong melalui system report pajak secara *online*; dan
5. Peningkatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan akan didorong melalui perluasan MoU dengan desa-desa dalam pelayanan pengelolaan sampah.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer dalam APBD ditujukan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah serta mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Berlandaskan pada kondisi pembangunan dan masyarakat Kabupaten Cirebon saat ini, serta belajar dari dampak pandemi COVID-19, maka Kabupaten Cirebon harus fokus pada penyeimbangan struktur fundamental perekonomian Kabupaten Cirebon antara sektor industri pengolahan; sektor pertanian, perikanan, kelautan; sektor perdagangan dan pariwisata. Arah pembangunan yang berfokus pada penyeimbangan antar sektor ini membutuhkan penyeimbangan kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran dalam implementasi Belanja Daerah serta penjabarannya secara terintegrasi serta mampu mempertajam penjabaran visi misi daerah ke dalam perumusan program pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terpadu berdasarkan skala prioritas dengan sasaran dan *outcome* yang jelas serta terukur dan dalam implementasinya benar-benar menyentuh serta memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Cirebon. Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan,

tidak berbanding lurus dengan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026.

Arah kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Sumber-sumber pendapatan daerah yang tersedia dan terbatas harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja daerah harus tepat sasaran dan diupayakan untuk dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang infrastruktur, peningkatan daya beli, kesehatan, dan pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi Kabupaten Cirebon.

c) Tolok Ukur dan Target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja utama (key performance indicators) yang meliputi masukan, keluaran, hasil, dan dampak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

d) Optimalisasi Belanja Langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Belanja langsung difokuskan pada belanja modal daripada belanja pegawai.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja daerah ditatausahakan, dipublikasikan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Publikasi dilaksanakan agar masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja daerah. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran, dan hasilnya.

Indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah Kabupaten Cirebon menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya terutama pada komponen pajak daerah

yang meningkat cukup signifikan dengan adanya opsen PKB dan BBNKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah tahun 2026, belanja diproyeksikan mencapai Rp.4.395.572.573.717,00 meliputi komponen Belanja Operasi sebesar Rp.3.268.161.702.684,00; Belanja Modal sebesar Rp.362.587.567.233,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 35.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp. 729.823.303.800,00. Guna mengatasi keterbatasan sumber pembiayaan APBD Kabupaten Cirebon tahun 2026 dalam pembangunan daerah, maka pendanaan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2026, dilakukan sinergi dan kolaborasi pembiayaan pembangunan antara APBD Kabupaten Cirebon, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Secara rinci, daftar rencana belanja daerah untuk rencana program dan kegiatan seluruh Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran Buku RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2026. Sedangkan Realisasi Belanja tahun 2023 - 2024, dan proyeksi/target belanja Kabupaten Cirebon tahun 2025-2027 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.28.
Realisasi Belanja Tahun 2023 - 2024, dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2025-2027

No	Uraian	Jumlah (Rp.)					
		Realisasi Tahun 2023 (APBD) ¹⁾	Reaalisasi Tahun 2024 (APBD) ²⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2025 (APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RPJMD ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RKPD ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2027 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	BELANJA	4.132.750.422.628,47	4.608.578.576.981,00	4.293.068.870.144,00	4.955.027.358.658,54	4.395.572.573.717,00	5.151.430.877.110,07
5.1.	BELANJA OPERASI	3.039.524.743.697,47	3.410.581.851.952,00	3.144.134.219.063,00	3.729.416.173.854,60	3.268.161.702.684,00	3.787.095.745.467,39
5.1.01.	Belanja pegawai	1.609.712.189.701,00	1.849.384.071.806,00	2.096.433.802.746,00	2.117.942.266.515,00	2.213.517.008.262,00	2.128.531.977.847,57
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.266.210.801.307,47	1.331.202.948.343,00	976.054.435.717,00	1.418.401.617.789,37	985.098.565.622,00	1.439.926.762.653,31
5.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
5.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5.1.05.	Belanja Hibah	139.814.249.339,00	218.601.651.803,00	63.175.423.600,00	168.859.642.394,17	58.164.110.000,00	194.551.001.257,30
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	23.787.503.350,00	11.393.180.000,00	8.470.557.000,00	24.212.647.156,06	11.382.018.800,00	24.086.003.709,20
5.2.	BELANJA MODAL	373.623.487.361,00	478.767.157.553,00	376.858.814.483,00	472.387.312.375,50	362.587.567.233,00	542.559.867.179,05
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	250.600.000,00	0,00	55.000.000.000,00	-	50.637.262.500,00	30.000.000.000,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.514.929.375,00	148.888.092.294,00	88.676.522.565,00	79.419.648.691,43	58.917.927.954,00	83.390.631.126,00
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.348.808.375,00	115.833.547.378,00	70.365.977.318,00	41.015.829.144,97	82.250.395.053,00	42.041.224.873,59
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.083.760.411,00	213.012.113.581,00	161.765.794.600,00	351.635.054.313,21	170.441.993.126,00	386.798.559.744,53
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.425.389.200,00	1.033.404.300,00	333.806.000,00	316.780.225,89	339.988.600,00	329.451.434,93
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00	25.000.000.000,00	82.364.220.147,94	35.000.000.000,00	108.611.799.393,59
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	24.313.927.365,00	9.344.507.869,00	25.000.000.000,00	82.364.220.147,94	35.000.000.000,00	108.611.799.393,59
5.4.	BELANJA TRANSFER	695.288.264.205,00	709.885.059.607,00	747.075.836.598,00	670.859.652.280,50	729.823.303.800,00	713.163.465.070,05
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	28.784.091.205,00	34.252.775.007,00	40.145.604.098,00	60.279.169.887,57	62.441.246.500,00	72.053.958.557,47
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	666.504.173.000,00	675.632.284.600,00	706.930.232.500,00	610.580.482.392,93	667.382.057.300,00	641.109.506.512,58

No	Uraian	Jumlah (Rp.)					
		Realisasi Tahun 2023 (APBD) ¹⁾	Reaalisasi Tahun 2024 (APBD) ²⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2025 (APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RPJMD ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RKPD ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2027 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	JUMLAH BELANJA DAERAH (5.1+5.2+5.3+5.4)	3.988.922.622.626,00	4.608.578.576.981,00	4.293.068.870.144,00	4.955.027.358.658,54	4.395.572.573.717,00	4.955.027.358.658,54
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.972.221.284,48)	(144.438.851.377,72)	(125.222.669.000,00)	(159.384.412.546,51)	(173.517.800.332,00)	(192.592.595.610,13)

- Sumber:-
- ¹⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
 - ²⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
 - ³⁾ Perda APBD TA. 2023, BKAD Kabupaten Cirebon
 - ⁴⁾ Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029
 - ⁵⁾ Penetapan RKPD Kabupaten Cirebon 2026
 - ⁶⁾ Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa. ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kabupaten Cirebon sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan dimulai sejak tahun 2015. e-ASB yang dikembangkan tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten Cirebon yang sudah berjalan yaitu e-perencanaan. Pada tahun 2021 Kabupaten Cirebon menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan perencanaan tahunan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis elektronik. Adapun ruang lingkup SIPD meliputi: a) Informasi Pembangunan Daerah;

b) Informasi Keuangan Daerah; dan c) Informasi Pemerintahan Daerah lainnya. Semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku untuk diintegrasikan ke SIPD paling lama 1 (*satu*) tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Ini berarti bahwa sistem yang dikembangkan oleh pemerintah pusat sudah terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan serta penatausahaan keuangan. Sehingga diharapkan dapat mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan belanja kegiatan di Kabupaten Cirebon.

Dalam proses belanja pengadaan barang/jasa pemerintah, Kabupaten Cirebon juga telah menggunakan *e-procurement* sejak tahun 2011. *e-procurement* yang digunakan diantaranya Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) yang beralamat di <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/> dan LPSE yang beralamat di <http://lpse.cirebonkab.go.id/eproc4>.

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah memiliki peran strategis dalam sistem penganggaran daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan pada prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dapat digali dari pinjaman daerah tetapi jumlah defisit diupayakan tidak melampaui 4,5% dari pendapatan daerah dan Program Kepedulian Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Program Kepedulian Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial

sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Atau secara ringkas adalah merupakan komitmen perusahaan dan BUMN untuk berperan serta dalam pembangunan daerah berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat. Di mana program tersebut dibiayai oleh perusahaan yang beroperasi di lingkungan Kabupaten Cirebon.

Pembiayaan Program Kepedulian Perusahaan adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaannya program ini di bagi menjadi 1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan, dimana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan 2. Program Bina Lingkungan atau Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN

Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah: a. mensinergikan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon; b. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon; c. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang: a. Pendidikan, b. Kesehatan, c. Bina lingkungan, d. Peningkatan daya beli, e. Sosial, f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, g. Sarana dan prasarana keagamaan; dan h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Realisasi pembiayaan tahun 2023 - 2024, dan proyeksi/target pembiayaan Kabupaten Cirebon tahun 2025-2027 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.29
Realisasi Pembiayaan Tahun 2023-2024, dan Proyeksi/Target Pembiayaan Tahun 2025-2027

No	Uraian	Jumlah (Rp.)					
		Realisasi Tahun 2023 (APBD) ¹⁾	Reaalisasi Tahun 2024 (APBD) ²⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2025 (APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RPJMD ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RKPD ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2027 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	299.957.927.771,86	224.475.499.831,21	125.222.669.000,00	159.384.412.546,51	173.517.800.332,00	192.592.595.610,13
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	344.957.927.434,86	224.475.499.831,21	131.222.669.000,00	165.384.412.546,51	179.517.800.332,00	232.592.595.610,13
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	344.957.927.434,86	184.475.499.831,21	131.222.669.000,00	165.384.412.546,51	179.517.800.332,00	232.592.595.610,13
6.1.02.	Pencairan Dana Cadangan	-	40.000.000.000,00	-	-	-	-
6.1.03.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.05.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6.1.06.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		344.957.927.434,86	224.475.499.831,21	131.222.669.000,00	165.384.412.546,51	179.517.800.332,00	232.592.595.610,13
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	44.999.999.663,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	40.000.000.000,00
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	0,00	-	-	-	30.000.000.000,00
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	4.999.999.663,00	0,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
6.2.04.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah (Rp.)					
		Realisasi Tahun 2023 (APBD) ¹⁾	Reaalisasi Tahun 2024 (APBD) ²⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2025 (APBD) ³⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RPJMD ⁴⁾	Proyeksi / Target pada Tahun Rencana 2026 Berdasarkan RKPD ⁵⁾	Proyeksi / Target pada Tahun 2027 ⁶⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
6.2.05.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		44.999.999.663,00	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	40.000.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (6.1-6.2)		299.957.927.771,86	224.475.499.831,21	125.222.669.000,00	159.384.412.546,51	173.517.800.332,00	192.592.595.610,13
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)		184.475.499.831,21	80.036.648.453,49	-	-	-	-

Sumber: - ¹⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
 - ²⁾ LRA Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (audited), BKAD Kabupaten Cirebon
 - ³⁾ Perda APBD TA. 2023, BKAD Kabupaten Cirebon
 - ⁴⁾ Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029
 - ⁵⁾ Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Cirebon 2026
 - ⁶⁾ Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029

3.3. Alternatif Pendanaan Pembangunan Daerah di Luar APBD

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kabupaten Cirebon dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kabupaten Cirebon. Sumber-sumber pendanaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) Dana Masyarakat/Umat; 3) *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)). Adapun penjelasan alternatif pembiayaan pembangunan adalah sebagai berikut:

3.3.1. APBN

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Kabupaten Cirebon selain bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kolaborasi pendanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci menghadapi keterbatasan fiskal dalam APBD baik pada masa maupun pasca pandemi COVID-19. Sumber pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten.

Tabel 3.30
Alokasi APBN-TP Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2024

No	Dana APBN-TP	Kementerian	2023	2024
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2.179.365.000	-
2.	Pengembangan sarana perdagangan dan kapasitas logistik	Kementerian Perdagangan	3.000.000.000	-
3.	Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	1.400.000.000
Jumlah			5.179.365.000	1.400.000.000

Sumber Data : Laporan Konsolidasi Kegiatan APBN/PHLN Tugas Pembantuan, 2023-2024, data diolah.

3.3.2. Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon adalah melalui dana masyarakat/umat mengingat jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang sangat besar, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar, tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kabupaten Cirebon secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.3.3. *Corporate Social Responsibility* (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Program Kepedulian Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah konsep dengan nama perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong perusahaan mengakui prinsip bertanggung jawab sosial dan lingkungan secara terprogram dengan merujuk tanggung jawab sosial sebagai bagian dari identitas perusahaan mereka. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas disebutkan Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan bahwa Perum dan Persero BUMN wajib melaksanakan

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN. Agar pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan perlu ada sinkronisasi perencanaan pembangunan dan harus bersinergi dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Untuk itu telah diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kabupaten Cirebon.

Alternatif pembiayaan yang bersumber dari dana CSR adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Cirebon. Selanjutnya strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Strategi di dalam penguatan peran CSR dalam pembiayaan pembangunan daerah melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Peningkatan efektivitas CSR dapat dicapai melalui penguatan kelembagaan, komunikasi yang baik, pelibatan pemangku kepentingan, serta sinkronisasi program CSR dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun beberapa strategi yang akan diterapkan, antara lain:

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola CSR:

- Membentuk Forum CSR Daerah:
Forum ini dapat menjadi wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi program CSR dengan prioritas pembangunan daerah.
- Meningkatkan Kapasitas SDM:
Memberikan pelatihan dan pendidikan terkait CSR kepada aparatur pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan.
- Menyusun Pedoman Teknis CSR:
Pedoman ini dapat memberikan panduan bagi perusahaan dalam menjalankan program CSR yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Menerapkan Standar ISO 26000:
Standar ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial.

2. Peningkatan Komunikasi dan Keterlibatan Stakeholder:

- Sosialisasi Program CSR:

Mensosialisasikan program CSR kepada masyarakat agar lebih memahami manfaat dan dampak positifnya.

- **Membangun Kemitraan:**
Membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR.
- **Pelibatan Masyarakat:**
Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program CSR.

3. Sinkronisasi Program CSR dengan RPJMD:

- **Identifikasi Prioritas Pembangunan:**
Berdasarkan RPJMD, identifikasi sektor-sektor prioritas yang membutuhkan dukungan CSR.
- **Penyelarasan Program:**
Memastikan program CSR yang dijalankan oleh perusahaan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
- **Evaluasi dan Pelaporan:**
Melakukan evaluasi berkala terhadap program CSR dan melaporkan hasilnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi:

- **Pengembangan Platform Digital:**
Membangun platform digital untuk memfasilitasi komunikasi, pelaporan, dan monitoring program CSR.
- **Pemanfaatan Media Sosial:**
Menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang program CSR dan membangun kesadaran masyarakat.

5. Penguatan Peran Pemerintah Daerah:

- **Penyediaan Insentif:** Memberikan insentif kepada perusahaan yang menjalankan program CSR yang efektif.
- **Penyederhanaan Regulasi:** Mempermudah proses perizinan dan birokrasi terkait pelaksanaan CSR.
- **Pengawasan dan Evaluasi:** Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR.

6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- Kampanye Publik: Melakukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya CSR.
- Pendidikan Karakter: Memasukkan materi tentang CSR dalam kurikulum pendidikan.

Dalam pelaksanaannya program ini di bagi menjadi:

1. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil atau Program Kemitraan, dimana program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri; dan
2. Program Bina Lingkungan atau Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.

Maksud Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, adalah:

1. mensinergiskan penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Kabupaten Cirebon;
2. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di daerah Kabupaten Cirebon;
3. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam menyiapkan diri memenuhi standar nasional dan internasional.

Program pembangunan di Daerah yang dapat dibiayai melalui dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan meliputi bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Bina lingkungan;
4. Peningkatan daya beli;
5. Sosial;
6. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan;
7. Sarana dan prasarana keagamaan; dan
8. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon.

Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel. 3.31
Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Realisasi CSR (Juta Rupiah)	8.623,07	13.952,29	13.777	92,98

Bagian Perekonomian dan SDA-Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2021-2024, data diolah

Adapun Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 lebih banyak diadakan oleh Alfamart sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bergerak pada sektor kesehatan dan sosial. Program CSR belum menjangkau semua wilayah kecamatan tetapi sudah dilaksanakan di Kecamatan Sumber, Dukupuntang, Weru, Plumbon, Plered, Arjawinangun, dan Susukan Lebak dengan total realisasi anggaran yaitu 92 juta rupiah. Adapun realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

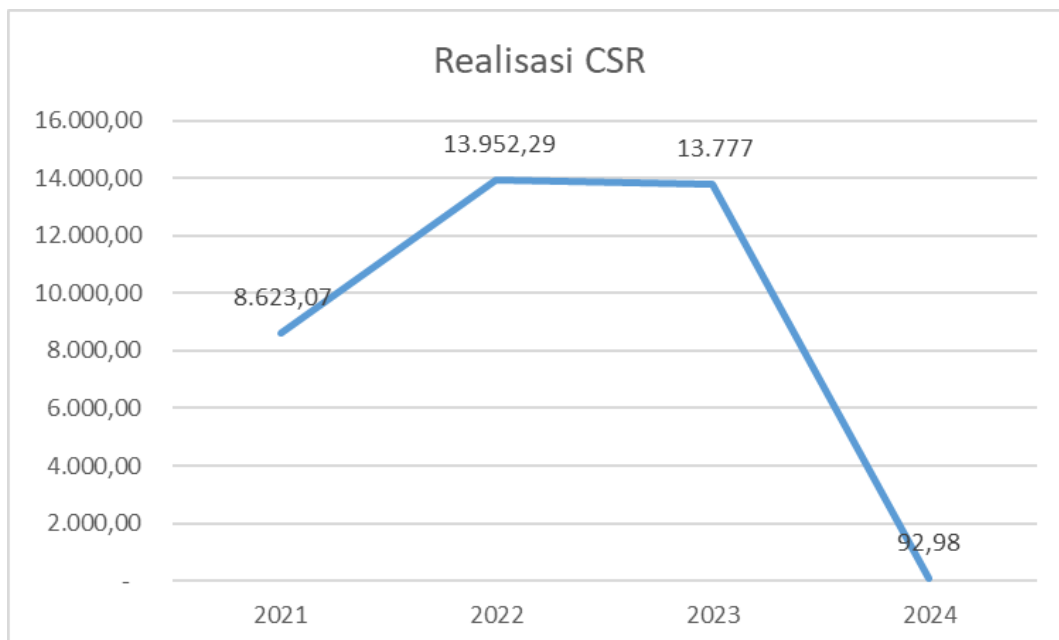
Tabel 3.32
Laporan Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2024

No	Judul Laporan	Sektor	Lokasi	Realisasi	Tanggal Realisasi
1	Alfamart Sahabat Posyandu Kel. Babakan	Kesehatan	Sumber	Rp5.455.000	02-Jul-2024
2	Posyandu Binaan Alfamart, Posyandu Wanajaya Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon	Kesehatan	Sumber	Rp15.791.500	01-Jul-2024
3	Program Satu Telur Satu Hari untuk Balita Stunting	Kesehatan	Sumber	Rp9.000.000	31-Jul-2024
4	Alfamart Sahabat Posyandu Desa Sindangjawa	Kesehatan	Dukupuntang	Rp3.811.900	09-Jul-2024
5	Alfamart Sahabat Posyandu Desa Mandala	Kesehatan	Dukupuntang	Rp3.354.000	12-Sep-2024
6	Alfamart Sahabat Posyandu Kel. Kubangdeleg	Kesehatan	Karangwareng	Rp3.813.000	09-Oct-2024
7	Edukasi Nutrisi Balita Alfamart Nyi Mas Wanawati Desa Tegalwati	Kesehatan	Weru	Rp4.500.000	10-Oct-2024

No	Judul Laporan	Sektor	Lokasi	Realisasi	Tanggal Realisasi
8	Alfamart Sahabat Pisyandu Desa Cempaka Plumbon	Kesehatan	Plumbon	Rp4.300.000	05-Dec-2024
9	Alfamart Sahabat Generasi Maju Kelurahan Tukmudal	Kesehatan	Sumber	Rp10.559.500	12-Dec-2024
10	Donor Darah dalam Rangka Menyambut Semarak Ulang Tahun Alfamart ke-25	Sosial	Plered	Rp9.361.500	01-Jul-2024
11	Program Ramadhan 2024 (Warteg Gratis)	Sosial	Arjawinangun	Rp21.000.000	11-Mar-2024
12	Donor Darah Desa Susukan Lebak	Sosial	Susukan Lebak	Rp2.040.000	24-Jan-2024
	TOTAL			Rp92.986.400	

Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA-Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2024, data diolah

Gambar 3.21.
Realisasi Program CSR di Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024



Sumber Data : Bagian Perekonomian dan SDA-Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon, 2021-2024, data diolah

Berdasarkan laporan realisasi CSR/TJSL Kabupaten Cirebon Tahun 2021-2024 mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan masih lemahnya sistem pelaporan realisasi CSR/TJSL di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, direncanakan akan ditetapkan Peraturan Daerah terkait CSR/TJSL untuk mendukung terwujudnya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta terciptanya sinergitas antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH



Bab ini memuat arah strategis tahunan pembangunan Kabupaten Cirebon yang dituangkan dalam bentuk sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Sebagai dokumen pelaksanaan tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029, penyusunan sasaran dan prioritas ini menjadi instrumen kunci dalam menjembatani antara rencana jangka menengah dengan implementasi program dan kegiatan tahunan secara terukur, terarah, dan terintegrasi.

Penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2026 dilakukan dengan memperhatikan berbagai instrumen perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berlaku, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah. Hal ini mencakup penjabaran arah kebijakan RPJMN Tahun 2025–2029, RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2045, serta RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029. Selain itu, perumusan ini juga mempertimbangkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta berbagai isu strategis dan tantangan aktual daerah yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Secara substansi, sasaran pembangunan tahun 2026 disusun dengan berlandaskan pada pendekatan tematik-holistis-integratif-spasial dan berbasis bukti (*evidence-based planning*), yang difokuskan pada pencapaian target-target indikator makro pembangunan serta indikator kinerja utama daerah. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sasaran pembangunan yang bersifat lintas sektor dan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta perwujudan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Adapun prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dirumuskan sebagai bentuk respons terhadap dinamika pembangunan daerah yang mencakup upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi, percepatan penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas pelayanan dasar, serta transformasi ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah. Penetapan prioritas ini juga mengacu

pada arahan pembangunan kewilayahan, transformasi digital pemerintahan, serta penguatan kolaborasi pentahelix dalam penyelenggaraan pembangunan.

Dengan demikian, Bab IV ini menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah dan pengalokasian sumber daya pembangunan, agar selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan target indikator makro pembangunan yang diselaraskan dengan target pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional sebagai acuan evaluatif dan arah kebijakan. Berikut ini disajikan target indikator makro pembangunan tahun 2026:

Tabel 4.1
Target Indikator Makro Pembangunan Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Nasional	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Cirebon
1	Indeks Modal Manusia	Poin	0,57	0,58	-
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	-	-	73,29
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	6,5–7,5	5,51- 6,02	10,10
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,4 – 5,0	6,31-6,66	5,74
4	Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,80 – 6,30	5,15-6,20	6,37
5	Pendapatan Per Kapita (ADHB)	Juta Rupiah	>80	63,65-66,0	32,37
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	Poin	0,377–0,380	0,381-0,420	0,354
7	Penurunan Emisi GRK	%	37,14	2,62	-
		Ton CO ₂ Eq/ Miliar	-	-	5.80

Sumber : Rancangan RKP 2026, Rancangan RPJMD 2025-2029 Jawa Barat, Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten CirebonTahun 2025-2029

Target indikator makro pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun sebagai arah capaian pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan RPJMD Tahun 2025–2029 serta konsisten dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 73,29 poin, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan,

kesehatan, serta daya beli masyarakat. Percepatan pencapaian IPM akan difokuskan pada perluasan pendidikan menengah, penurunan angka stunting, dan penguatan jaminan sosial dasar. Persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 10,10 persen, sebagai hasil dari intervensi sistematis terhadap kelompok rentan, optimalisasi program perlindungan sosial, serta pengembangan ekonomi lokal yang inklusif. Strategi pengurangan kemiskinan juga akan didukung melalui penguatan kelembagaan desa, pemberdayaan UMKM, serta integrasi data sasaran bansos dan ketenagakerjaan.

Pada aspek ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan berada di angka 5,74 persen. Target ini menggambarkan upaya penciptaan lapangan kerja baru melalui pertumbuhan sektor industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta pertanian modern. Program pelatihan vokasi, penempatan tenaga kerja, serta dukungan kewirausahaan akan menjadi pilar penting dalam pencapaian target ini.

Dari sisi ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) ditargetkan tumbuh sebesar 6,37 persen, menunjukkan proyeksi optimis atas dinamika investasi daerah, ekspansi industri kecil dan menengah, serta peningkatan produktivitas sektor unggulan. Peningkatan ini juga akan didorong oleh akselerasi proyek strategis daerah dan peningkatan konektivitas wilayah. Selanjutnya, Pendapatan Per Kapita (ADHB) Kabupaten Cirebon ditargetkan sebesar Rp32,37 juta, mencerminkan proyeksi peningkatan nilai tambah ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini akan dicapai melalui peningkatan efisiensi sektor produksi, peningkatan keterampilan angkatan kerja, serta penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil.

Adapun Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) ditargetkan tetap terkendali pada kisaran 0,354. Target ini menunjukkan komitmen daerah dalam menjaga kesetaraan hasil pembangunan dan mencegah kesenjangan sosial melalui pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur dasar. Seluruh target ini disusun secara realistis dan berbasis data, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cirebon.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Arah operasional pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta tata kelola pemerintahan yang responsif. Sasaran pembangunan disusun berdasarkan visi dan misi dalam RPJMD 2025–2029 serta selaras dengan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, dengan fokus pada pencapaian indikator makro pembangunan seperti peningkatan IPM, penurunan kemiskinan dan

pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antarpenduduk.

4.1.1. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Serta Kebijakan Strategis Lainnya

Penelaahan terhadap tujuan dan sasaran pembangunan nasional menjadi fondasi penting dalam memastikan keselarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon dengan agenda nasional. Visi besar Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 adalah "Bersama Indonesia Maju Menuju Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Visi ini dijabarkan ke dalam lima sasaran utama, yakni peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan daya saing SDM, kepemimpinan global Indonesia, dan transisi menuju emisi nol bersih.

Sebagai turunan lima tahunan dari RPJPN, RPJMN 2025–2029 menetapkan delapan misi pembangunan yang meliputi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan penguatan ketahanan nasional. RKP Tahun 2026 kemudian memformulasikan prioritas pembangunan nasional yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi inklusif, penguatan daya saing wilayah, serta transformasi digital dan transisi energi.

Dalam konteks ini, target pembangunan nasional tahun 2026 menjadi rujukan utama dalam penetapan sasaran pembangunan daerah. Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari sistem kewilayahan nasional turut diarahkan untuk mendorong pencapaian indikator makro nasional melalui sinergi kebijakan daerah. Oleh karena itu, indikator makro pembangunan nasional digunakan sebagai benchmark dalam menetapkan target daerah, terutama untuk indikator seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, rasio gini, pendapatan per kapita, dan indeks modal manusia.

Kabupaten Cirebon merespons hal tersebut dengan menyusun target pembangunan daerah yang adaptif terhadap kondisi lokal namun tetap ambisius. Misalnya, target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon yang ditetapkan sebesar 6,37% melebihi target nasional, didorong oleh potensi industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata. Demikian pula dengan target pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang selaras dengan pendekatan pemberdayaan dan perlindungan sosial inklusif. Dalam jangka menengah, penurunan ketimpangan diupayakan melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang berkualitas.

Berikut adalah Tabel 4.2 yang menggambarkan target sasaran pembangunan nasional tahun 2026:

Tabel 4.2
Target Sasaran Pembangunan Nasional

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2024	Target 2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,00	5,80 – 6,30
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,40 – 5,00
3	Penduduk Miskin (%)	8,57	6,50 – 7,50
4	Rasio Gini (nilai)	0,381	0,377 – 0,380
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,54	0,57
6	Pendapatan Per Kapita harga berlaku (juta rupiah)	78,60	>80

Sumber: Statistik Indonesia 2025, Rancangan RKP 2026

Sinkronisasi antara target nasional dan target Kabupaten Cirebon tidak hanya menciptakan konsistensi dalam perencanaan lintas wilayah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan integrasi kebijakan pusat dan daerah. Melalui strategi yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika lokal, Pemerintah Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menjadikan tahun 2026 sebagai momentum akselerasi pencapaian pembangunan yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.

4.1.2. Penelaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Dalam kerangka pembangunan nasional yang terdesentralisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan arah pembangunan jangka menengah melalui dokumen RPJMD Tahun 2025–2029, yang memuat 5 tujuan dan 14 sasaran pembangunan. Tujuan dan sasaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif wilayah, proyeksi tantangan global dan nasional, serta aspirasi pembangunan berkelanjutan. Penjabaran tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat ini juga memperhatikan visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 serta arah kebijakan RPJMN dan RKP tahunan. Kelima tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang **Cageur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer**,
2. Terwujudnya **Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan** yang berdaulat dan berdaya saing;
3. Terwujudnya **Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi**;
4. Terwujudnya **Masyarakat Mandiri dan Adaptif terhadap Perubahan Sosial dan Teknologi**,
5. Terwujudnya **Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan**.

Kelima tujuan tersebut dijabarkan dalam 14 sasaran pembangunan yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, budaya, etika publik, daya saing ekonomi, ketahanan sosial, inovasi, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan. Sasaran-

sasaran ini menjadi kompas strategis bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Cirebon, dalam merancang program dan kegiatan daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan provinsi.

Dalam konteks Kabupaten Cirebon, terdapat keterkaitan erat dan harmonis antara 5 tujuan dan 7 sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2025–2029 dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat. Misalnya, tujuan Provinsi Jawa Barat untuk membentuk SDM yang sehat, berkarakter, dan berpengetahuan sejalan dengan tujuan Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera, dan berkualitas, dengan sasaran peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta budaya dan ketahanan keluarga. Hubungan antara tujuan dan sasaran Provinsi Jawa Barat dengan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon dituangkan dalam Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Keselarasan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

No	Provinsi Jawa Barat		Kabupaten Cirebon
	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Cagur, Bageur, Bener, Pinter, dan Singer	1) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, budaya, dan pembangunan keluarga
		2) Terbentuknya individu beretika dan berbudaya	5) Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan Masyarakat
		3) Terbentuknya individu berintegritas dan taat hukum	7) Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat
		4) Terbentuknya individu berpengetahuan dan berwawasan	4) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, budaya, dan pembangunan keluarga
		5) Terbentuknya individu kreatif dan inovatif	2) Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi	6) Meningkatnya produktivitas sektor industri pengolahan	3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif
		7) Meningkatnya kinerja perdagangan yang berkualitas	3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif

No	Provinsi Jawa Barat		Kabupaten Cirebon
	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan	Sasaran Pembangunan
		8) Meningkatnya produksi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berbasis teknologi untuk swasembada pangan	3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif
		9) Meningkatnya nilai investasi dan aktivitas usaha ekonomi kerakyatan serta tenaga kerja kompeten	2) Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi
3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang Berbasis Lingkungan	10) Meningkatnya layanan infrastruktur kewilayahan dan penataan perkotaan berbasis lingkungan	3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif
		11) Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	6) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah
4	Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi	12) Meningkatnya penerapan lptek, riset dan inovasi	2) Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi
		13) Meningkatnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan	1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan transparan
5	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan	14) Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan inovatif	1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan transparan

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD Jawa Barat 2025-2029, RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029

Pada aspek ekonomi, Provinsi Jawa Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis sumber daya lokal. Hal ini sejalan dengan sasaran Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan, industrialisasi kawasan timur, serta revitalisasi sektor pertanian, perikanan, dan UMKM. Keduanya juga menekankan pentingnya inovasi dan penguasaan teknologi dalam meningkatkan produktivitas.

Selanjutnya, sasaran provinsi dalam membangun infrastruktur yang merata dan memperkuat ketahanan sosial selaras dengan tujuan Kabupaten Cirebon untuk mewujudkan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman, serta peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Penguatan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan usaha tani, dan penanganan kawasan kumuh menjadi titik temu dalam perencanaan pembangunan kedua belah pihak.

Di bidang tata kelola pemerintahan, baik Provinsi Jawa Barat maupun Kabupaten Cirebon menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap reformasi birokrasi, digitalisasi layanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat. Tujuan Provinsi untuk mewujudkan birokrasi yang gesit dan adaptif selaras dengan tujuan Kabupaten untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Keselarasan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon tidak hanya menjalankan otonomi daerah, tetapi juga berfungsi sebagai simpul penting dalam menjabarkan visi pembangunan Provinsi Jawa Barat di tingkat lokal. Oleh karena itu, integrasi perencanaan antara kabupaten dan provinsi menjadi kunci keberhasilan pencapaian target-target pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon

Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab permasalahan strategis daerah sekaligus mendukung visi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, dan Aman.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan daerah yang selanjutnya dielaborasi menjadi 5 tujuan dan 7 sasaran strategis. Formulasi ini didasarkan pada pendekatan teknokratik yang mempertimbangkan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Cirebon 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta hasil identifikasi 8 isu strategis yang bersumber dari kajian KLHS, evaluasi kinerja pembangunan, dan dinamika sosial-ekonomi wilayah.

Delapan isu strategis tersebut antara lain:

1. Perekonomian yang belum tumbuh optimal,
2. Pengangguran dan kemiskinan,
3. Kualitas sumber daya manusia dan nilai kehidupan masyarakat,
4. Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat,
5. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal,
6. Infrastruktur wilayah yang belum merata,
7. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, dan
8. Ketahanan pangan dan energi masyarakat.

Menanggapi isu-isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan arah pembangunan melalui tujuan dan sasaran berikut:

Tabel 4.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cirebon 2025–2029

No	Tujuan Pembangunan	Sasaran Pembangunan
1	Mewujudkan pemerintahan yang bersih	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan transparan
2	Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi	2. Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi
3	Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas	3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif
		4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, budaya, dan kualitas keluarga
4	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius	5. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat
5	Mewujudkan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman	6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah
		7. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Sumber : RPJMD 2025-2029 Kabupaten Cirebon

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran pembangunan ini menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Cirebon yang terstruktur dan responsif terhadap tantangan lintas sektor. Setiap sasaran dirancang untuk dapat diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), sehingga mampu menjadi alat navigasi bagi perangkat daerah dalam merancang program-program prioritas. Misalnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor unggulan diarahkan untuk menjawab tantangan isu pengangguran dan stagnasi produktivitas, sedangkan sasaran peningkatan kualitas SDM diharapkan menjadi pilar dalam mengurangi kemiskinan struktural dan memperkuat daya saing lokal.

Dengan pendekatan sistematis dan berbasis data tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan bahwa pada akhir periode RPJMD 2029 akan terjadi peningkatan signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, efisiensi layanan publik, serta resiliensi sosial dan lingkungan. Penyelarasan tujuan dan sasaran daerah ini juga telah dirancang agar sinkron dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, sehingga menciptakan sinergi lintas level pemerintahan yang lebih optimal dalam pelaksanaan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat diimplementasikan secara terukur dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan sejumlah indikator kinerja yang melekat pada masing-masing tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Indikator ini disusun dengan mempertimbangkan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), serta mengacu pada indikator makro pembangunan, indikator kinerja utama (IKU), dan indikator kinerja daerah (IKD) yang relevan. Berikut disajikan tabel indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai acuan evaluasi capaian pembangunan lima tahunan.

Tabel 4.5
Indikator Tujuan dan Sasaran dan Target 2025-2029

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional	1.1	Mewujudkan pemerintahan Bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	81,14	82,31	83,48	84,66	85,83	87,00	88,17	88,17		
		1.1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel dan transparan	Penyelenggara n pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan	Nilai SAKIP	Nilai	66,20	68,50	69,20	69,50	70,00	70,50	71,00	71,00	• Sekretariat Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembanga n Daerah; • Inspektorat	• Dinas Komunikasi dan Informatika, • Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Indeks Pelayanan Publik	Poin	4,24	4,30	4,35	4,41	4,46	4,52	4,58	4,58	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
					Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Inspektorat
					Indeks SPBE	Poin	3,61	3,71	3,81	3,91	4,00	4,10	4,20	4,20	Dinas Komunikasi dan Informatika	• Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi); • Seluruh Perangkat daerah
					Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	16,76	17,51	18,26	19,00	19,75	20,50	21,25	21,25	Badan Pendapatan Daerah	• Badan Keuangan dan Aset Daerah, • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
																• Dinas Kesehatan, • Dinas Lingkungan Hidup, • Dinas Perhubungan, • Dinas Perdagangan dan Perindustrian, • Dinas Ketenagakerjaan, • Dinas Pertanian, • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, • Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat	2.1	Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi,		Indeks Daya Saing Daerah	Poin	3,80	3,94	4,08	4,22	4,36	4,50	4,65	4,65		
		2.1.1	Meningkatnya pilar pendorong daya saing daerah dari sisi faktor SDM, Faktor Pasar, dan Ekosistem Inovasi	Daya saing daerah berbasis kualitas SDM, inovasi, dan produktivitas	Indeks Inovasi Daerah	Poin	53,91	62,00	62,57	63,14	63,70	64,27	66,66	66,66	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah,	• Sekretariat Daerah; • Seluruh perangkat Daerah

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-							Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang	
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
3	Menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya	3.1	Mewujudkan masyarakat yang maju, modern, sejahtera dan berkualitas		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,83	5,32	6,37	7,68	7,83	8,16	5,46	5,46		
					PDRB Perkapita ADHB	Rp Juta	28,14	29,25	31,92	35,06	38,74	42,99	48,40	48,40		
					Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,30	72,57	73,29	73,59	73,95	74,33	74,66	74,66		
		3.1.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang inklusif	Kesejahteraan masyarakat dan pemerataan akses layanan dasar serta infrastruktur	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	3,79	3,84	4,06	4,28	4,49	4,71	4,92	4,92	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	• Dinas Perdagangan dan Perindustrian; • Dinas Pertanian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
					Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,74	6,65	5,74	5,48	5,43	5,37	5,29	5,29	Dinas Ketenagakerjaan	• Dinas Pemuda dan Olahraga; • Seluruh dinas Ekonomi; • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
																Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Tingkat Kemiskinan	Persen	11,00	10,70	10,10	9,80	9,20	8,60	8,10	8,10	Dinas Sosial	• Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; • Dinas Kesehatan; • Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
					Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah	Persen	2,68	4,48	5,60	6,67	6,68	7,04	7,88	7,88	• Dinas Pertanian; • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; • Dinas Perdagangan dan Perindustrian;	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; • Sekretariat Daerah(Perekonomian) • Dinas Ketenagakerjaan

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
															- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Poin	88,93	89,23	89,81	90,22	90,62	91,03	91,46	91,46	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, - Dinas Perhubungan	- Dinas Komunikasi dan Informatika; - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
					Indeks Desa	Poin	N/A	69,35	71,92	74,49	77,06	79,63	82,43	82,43	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	- Kecamatan; - Sekretariat Daerah (bagian pemerintahan) - Dinas Sosial
	3.1.2	Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan,	Kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan,	Indeks Pendidikan	Poin	0,600	0,675	0,678	0,681	0,684	0,702	0,709	0,709	Dinas Pendidikan	- Dinas Perpustakaan; - Dinas Pemuda dan Olahraga	

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
			kesehatan, budaya dan kualitas keluarga	berbudaya, dan berdaya saing	Indeks Kesehatan	Poin	0,846	0,836	0,840	0,845	0,850	0,853	0,858	0,858	Dinas Kesehatan	- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; - Dinas Pemuda dan Olahraga
					Indeks Kebudayaan daerah	Poin	45,67	46,87	47,76	48,66	49,56	50,45	51,35	51,35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	Sekretariat Daerah (perekonomian)
					Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	62,2	63,5	64,8	66,1	67,2	68,3	69,4	69,4	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Pendidikan, - Dinas Sosial - Sekretariat Daerah - Dinas Ketenagakerjaan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, - Dinas Kesehatan, - Sekretariat Dewan - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, - Dinas Komunikasi dan Informatika;
4	Menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai	4.1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan religius		Indeks Kesalihan Sosial	Poin	N/A	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,03	84,03		

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
								2024	2025	2026	2027	2028	2029			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
	dengan keyakinan para pemeluknya	4.1.1	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	74,79	74,95	75,10	75,26	75,42	75,57	75,57	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	• Sekretariat Daerah • Kecamatan
5	Menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman	5.1	Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan		Indeks Resiko Bencana	Poin	133,04	129,72	126,39	123,07	119,74	116,42	113,09	113,09		
		5.1.1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Terpeliharanya ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat dari gangguan sosial dan kriminalitas	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	52,19	53,00	54,00	55,00	56,00	57,00	58,01	58,01	Satuan Polisi Pamong Praja	• Kecamatan, • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		5.1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah	kualitas lingkungan hidup yang terjaga, berkelanjutan, serta meningkatnya ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Poin	54,55	63,08	63,33	63,59	63,84	64,09	66,30	66,30	Dinas Lingkungan Hidup	• Sekretariat Daerah (Perekonomian dan SDA); • Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
					Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,55	0,55	0,56	0,57	0,59	0,60	0,61	0,61	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	• Dinas Sosial, • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan,

Misi		Tujuan/Sasaran		Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-						Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang
							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
					Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,65	5,48	5,31	5,14	4,97	4,80	4,63	4,63	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	• Dinas Pertanian; • Sekretariat Daerah • Dinas Perdagangan dan Perindustrian; • Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; • Dinas Kesehatan, • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Sosial, • Badan Penanggulangan Bencana Daerah • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, • Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, • Dinas Pendidikan, • Dinas Komunikasi dan Informatika; • Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa • Dinas Perhubungan

Misi	Tujuan/Sasaran	Outcome	IKU/IKD	Satuan	Base Line	Target Tahun ke-							Kondisi Akhir	PD Penanggung Jawab	PD Penunjang	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman																
																• Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, • Kecamatan

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Indikator-indikator yang tercantum pada tabel di atas menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang relevan, sekaligus menjadi instrumen utama dalam proses pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah. Penetapan indikator ini juga memperkuat integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan yang berorientasi pada hasil (*result-based planning*). Diharapkan, melalui pengukuran kinerja yang konsisten terhadap indikator tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat menjamin pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam periode RPJMD 2025–2029.

4.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Cirebon

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dirumuskan sebagai instrumen pengarah dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah ke dalam langkah-langkah implementatif yang terukur, integratif, dan berorientasi pada hasil. Penyusunan strategi ini dilandaskan pada dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan berbagai pendekatan perencanaan seperti teknokratik, partisipatif, top-down dan bottom-up, serta politis.

Pembangunan daerah pada tahun 2026 diarahkan untuk menjawab beragam tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Cirebon, termasuk permasalahan kemiskinan dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang belum optimal dan merata, kualitas sumber daya manusia yang masih harus ditingkatkan, belum optimalnya pelayanan publik, serta ancaman perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Isu-isu tersebut telah didefinisikan secara sistematis dalam 8 isu strategis daerah, yang menjadi pijakan utama dalam merancang strategi pembangunan.

Untuk merespons isu strategis tersebut, telah ditetapkan lima tujuan utama pembangunan, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuh sasaran, serta diformulasikan ke dalam arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tematik dan lintas sektor. Strategi pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 juga memperhatikan integrasi dan keselarasan dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi, serta mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Secara garis besar, strategi pembangunan Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 difokuskan pada lima pilar pengungkit pembangunan daerah:

1. **Penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel**, dengan strategi pengembangan kapasitas aparatur, reformasi kelembagaan, serta digitalisasi layanan publik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

2. **Peningkatan daya saing daerah berbasis inovasi dan teknologi**, melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, serta kolaborasi multipihak dalam mendukung pelaku usaha lokal.
3. **Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi inklusif dan infrastruktur dasar**, yang mencakup pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, serta pembangunan jalan, irigasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan.
4. **Peningkatan kualitas sumber daya manusia**, melalui akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan gizi masyarakat, dan penguatan ketahanan keluarga berbasis budaya lokal.
5. **Penguatan ketahanan lingkungan dan sistem mitigasi bencana**, melalui pengendalian pencemaran, konservasi sumber daya alam, penataan ruang berkelanjutan, serta pembangunan kesiapsiagaan masyarakat terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.

Arah kebijakan pembangunan tahun 2026 kemudian dirinci secara sektoral. Pada bidang pemerintahan, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan integritas birokrasi, penguatan akuntabilitas, serta percepatan transformasi digital. Di sektor ekonomi, arah kebijakan mencakup fasilitasi UMKM, pemberdayaan ekonomi desa, penguatan kelembagaan koperasi, serta mendorong investasi pada sektor-sektor strategis.

Di bidang sosial, arah kebijakan diarahkan pada peningkatan cakupan dan kualitas layanan pendidikan, pengurangan stunting, peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak, serta penguatan sistem jaminan sosial dan perlindungan kelompok rentan. Sementara itu, pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup, kebijakan pembangunan menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif dan berwawasan lingkungan, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta revitalisasi ruang terbuka hijau dan konservasi kawasan lindung.

Selain itu, strategi pembangunan tahun 2026 juga memprioritaskan peningkatan harmoni sosial dan penguatan nilai-nilai religius melalui pengembangan kehidupan masyarakat yang toleran, berbudaya, dan aman. Penguatan kelembagaan keagamaan dan sosial kemasyarakatan menjadi bagian integral dari kebijakan ini.

Pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2026 dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), serta mengedepankan prinsip partisipatif dan kolaboratif lintas sektor dan wilayah. Semua kebijakan dan strategi yang ditetapkan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu

memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

Untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029 dengan pelaksanaan tahunan pada RKPD Tahun 2026, diperlukan penjabaran yang sistematis terhadap tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan dijadikan sebagai pijakan dalam merumuskan strategi pencapaian yang realistis dan arah kebijakan yang operasional. Pendekatan ini bertujuan agar seluruh perangkat daerah memiliki acuan yang seragam dalam merancang program dan kegiatan pembangunan yang terukur, sinergis, serta berorientasi pada penyelesaian isu strategis daerah. Berikut disajikan Tabel 4.6 yang memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

Tabel 4.6.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
1	Mewujudkan pemerintahan Bersih					
1.1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel dan transparan	Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif dan efektif	1	Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (<i>Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance</i>)	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			2	Penataan peraturan perundang undangan	Sekretariat Daerah	Diskominfo
			3	Pengembangan <i>smart governance</i> yang unggul	Sekretariat Daerah	Diskominfo
			4	penguatan dan penataan organisasi	Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
			5	Penerapan sistem merit secara konsisten	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah
			6	peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan <i>Corporate university</i>	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
			7	Penguatan pemahaman kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah
			8	penguatan budaya kerja pemerintahan menjadi basis utama perubahan kinerja pemerintahan	Sekretariat Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			9	perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi	Bappeda, BKAD, Diskominfo, dan Inspektorat	Seluruh Perangkat Daerah
			10	Penataan proses bisnis SOP pelayanan publik, serta peningkatan keterbukaan informasi	Diskominfo	Sekretariat Daerah, DPMPTSP dan Disdukcapil
			11	peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Seluruh Kecamatan
			12	peningkatan layanan dan kemudahan perijinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			13	peningkatan layanan fasilitas tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			14	Peningkatan pelayanan publik di wilayah kecamatan	Seluruh Kecamatan	Diskominfo
			15	Digitalisasi pemerintahan dalam pelayanan publik	Diskominfo	Seluruh Perangkat Daerah
			16	Monitoring dan pengendalian dalam rangka pengambilan kebijakan (<i>evidence based policy</i>)	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Seluruh Perangkat Daerah
			17	Pemutakhiran data wajib pajak daerah dan penggalian potensi jenis jenis pajak daerah yang belum tergali secara optimal;	Badan Pendapatan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pemuda dan Olahraga
2	Meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi					
2.1	Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi	Peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan SDM berkualitas, penguatan pasar yang kompetitif, serta pembangunan ekosistem inovasi berbasis teknologi dan kolaborasi	1	Implementasi penataan kawasan kecamatan berdasarkan analisis perekonomian kawasan dan pasar, sosial budaya dan kependudukan, tata bangunan dan lingkungan dan citra kawasan.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;	Sekretariat Daerah
	2		Peningkatan kualitas daya tarik produk unggulan daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian,	
	3		Peningkatan promosi dan investasi produk unggulan daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	4		Peningkatan kerjasama	Sekretariat Daerah	Seluruh perangkat Daerah	
	5		Peningkatan peran serta masyarakat dan peningkatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			6	Pengembangan aplikasi terkait kepegawaian (SIPEKA, ELMU, SIMPEG, Manajemen talenta) dalam rangka meningkatkan kompetensi dan pengembangan karir ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Diskominfo
3	Mewujudkan masyarakat yang maju, modem, sejahtera dan berkualitas					
3.1	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial, ekonomi dan infrastruktur yang inklusif	Akselerasi penurunan angka kemiskinan melalui peningkatan jaring sosial serta pemberdayaan kesejahteraan masyarakat	1	Mengintervensi kemiskinan ekstrim di Kabupaten Cirebon	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			2	Memberikan bantuan tunai dan sosial kepada kelompok sasaran secara berkesinambungan hingga graduasi	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan
			3	Melakukan updating data dan verifikasi secara kontinu dan pelaporan rutin per semester	Dinas Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan
			4	penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Pemuda dan Olahraga; Seluruh dinas Ekonomi; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			5	peningkatan fasilitas olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
			6	pemenuhan hak dan perlindungan hukum penyandang disabilitas	Dinas Sosial	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Perlindungan Anak; Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Ketenagakerjaan
			7	peningkatan akses terhadap rumah layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
			8	pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			9	mewujudkan kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan desa (desa inklusif)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Sosial; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan
	Peningkatan infrastruktur pendukung potensi unggulan ekonomi dalam rangka menunjang iklim investasi dan kemajuan ekonomi daerah	1	Peningkatan pemanfaatan ruang dan perencanaan sesuai dengan rencana Tata ruang wilayah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Lingkungan Hidup	
		2	Peningkatan kualitas proyek infrastruktur serta perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan yang tepat sasaran	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perhubungan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; DPMPTSP	

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			3	Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan	Dinas Perhubungan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Kecamatan
			4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan air bersih. limbah domestik dan perumahan layak huni	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup
			5	Peningkatan pengelolaan administrasi dan keuangan desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Keuangan dan Aset Daerah; Inspektorat
			6	Pengembangan dan pengelolaan sistem pengairan dan irigasi yang berkualitas	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pertanian
			7	Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas Perhubungan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
			8	Peningkatan nilai tambah petani melalui hilirisasi produk unggulan pertanian berupa dukungan sarpras pasar	Dinas Pertanian	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			9	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian secara berkelanjutan	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			10	Peningkatan pengendalian dan pencegahan OPT	Dinas Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			11	Peningkatan cakupan binaan kelompok kelautan dan perikanan dalam rangka diversifikasi produk produk perikanan menuju agroindustri perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			12	peningkatan ilmu dan teknologi perikanan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pendidikan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			13	Pengembangan ekonomi hijau	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi,

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			14	pengembangan ekonomi biru	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Usaha Kecil dan Menengah;
			15	peningkatan skala ekonomi dan kemitraan strategis dengan sektor swasta untuk pengembangan ekonomi lokal menuju peningkatan ekspor	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perhubungan
			16	meningkatkan kemitraan strategis dengan sektor swasta (<i>public private partnership</i>) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; DPMPTSP; Sekretariat Daerah(Perekonomian); Dinas Ketenagakerjaan
			17	pengembangan ekonomi Orange	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			18	peningkatan nilai investasi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.2	Meningkatnya Kualitas manusia dari sisi pendidikan, kesehatan, budaya dan kualitas keluarga	Akselerasi kolaborasi Pentahelix dalam peningkatan pemerataan pembangunan	1	Perluasan jaminan akses dan infrastruktur pendidikan hingga ke pelosok	Dinas Pendidikan	Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
		Pendidikan, Kesehatan dan kualitas keluarga				Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			2	Peningkatan ketersediaan dan kualitas SDM bidang pendidikan, termasuk kemampuan mengajar secara online	Dinas Pendidikan	Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			3	peningkatan kualitas penyelenggaraan dan manajemen pendidikan berbasis online	Dinas Pendidikan	Diskominfo; Dinas Sosial; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			4	pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu (berintegrasi dengan kartu PEPEK)	Dinas Kesehatan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Sosial; Diskominfo; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			5	Peningkatan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); Peningkatan fungsi UKBM (posyandu, Posbindu)	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial; DP2KBP3A
			6	peningkatan cakupan SPM bidang kesehatan melalui berbagai sumber biaya	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial;
			7	percepatan penurunan angka stunting melalui berbagai program dan regulasi	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial;
			8	penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur kesehatan	Dinas Kesehatan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Sosial;
			9	peningkatan kualitas dan kelas layanan puskesmas/RSUD	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
			10	perberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga	DP2KBP3A	Dinas Sosial
			11	pemenuhan hak dan perlindungan anak	DP2KBP3A	Dinas Sosial
			12	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	DP2KBP3A	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Ketenagakerjaan
			13	penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Penguatan karakter wisata berbasis kearifan budaya dan berkelanjutan	1	percepatan rintisan desa/ kampung budaya dan dukungan akses infrastruktur dan sarana pendukung lainnya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Diskominfo

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			2	Peningkatan pariwisata berwawasan kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Diskominfo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			3	peningkatan sinergitas pembangunan kepariwisataan khususnya koordinasi, kerjasama dan promosi (paket dan event) wisata berbasis budaya (unggulan) asli Cirebon	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Diskominfo; Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
			4	peningkatan kapasitas pendidik di bidang pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan; Diskominfo; Dinas Ketenagakerjaan
			5	peningkatan kapasitas pendidik di bidang budaya	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pendidikan; Diskominfo; Dinas Ketenagakerjaan
			6	peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar kawasan pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perhubungan; DPMPTSP; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
			7	peningkatan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengembangan Daerah Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Diskominfo; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
4	Mewujudkan masyarakat yang religius dan berakhlak mulia dan kesetaraan					
4.1	Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat	Peningkatan keimanan dan ketakwaan aparatur serta masyarakat melalui integrasi nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahan, pemberdayaan keagamaan di masyarakat yang integratif dan menyeluruh	1	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum berbasis masyarakat	Sekretariat Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Bakesbangpol; Diskominfo
			2	Menguatkan forum antar umat beragama dan sistem sosial, forum antara tokoh lintas agama dengan pemerintah	Sekretariat Daerah	Bakesbangpol; DP2KBP3A; Diskominfo
			3	Meningkatkan kesetaraan dalam berdemokrasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Pendidikan; DP2KBP3A; Diskominfo; Sekretariat DPRD; Dinas Sosial
5	Mewujudkan lingkungan aman, nyaman dan berkelanjutan					
5.1	Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Peningkatan kualitas pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman	1	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Satpol PP; BPBD; Dinas Sosial; Diskominfo
			2	Pencegahan dan penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP	Bakesbangpol; Dinas Perhubungan; Diskominfo; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
5.2	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan dan ketahanan daerah	Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan	3	Peningkatan penegakan perda dan perkara	Satpol PP	Sekretariat Daerah; Diskominfo; Bakesbangpol; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			4	Peningkatan SDM Satpol PP dan Pemberdayaan Satlinmas	Satpol PP	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; BPBD; Dinas Sosial
			5	Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Satpol PP	Bakesbangpol; Sekretariat Daerah; Diskominfo
			1	peningkatan kualitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Diskominfo
			2	peningkatan produksi, pemulihan dan pengelolaan kawasan hutan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Perhubungan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
			3	penataan alun alun kecamatan sebagai RTH dan ruang Interaksi ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
	Mitigasi bencana serta penanggulangan bencana dan penanganan pasca bencana alarm dan non alam					Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		1	pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	BPBD	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Satpol PP; Dinas Sosial; Diskominfo	
		2	peningkatan upaya pencegahan penanggulangan dan penyelamatan korban bencana	BPBD	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		3	peningkatan respon penanganan bencana dan penyelamatan korban bencana	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	BPBD; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Dinas Sosial	
		4	pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Dinas Sosial	BPBD; Dinas Kesehatan;	
		5	rehabilitasi rumah dan bangunan akibat bencana	Dinas Sosial	BPBD; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		6	pengembangan skema pelaporan mitigasi bencana Geo-tagging untuk memberikan informasi bencana yang lebih akurat dan presisi	BPBD	Diskominfo; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Dinas Sosial	
	Peningkatan kualitas dan produktivitas pangan lokal	1	peningkatan ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan Dan	

TUJUAN & SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN		PERANGKAT DAERAH	
					UTAMA	PENDUKUNG
						Perindustrian; Dinas Sosial; Dinas Koperasi Dan Umkm
			2	peningkatan distribusi dan stabilitas harga pangan yang terjangkau	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Pertanian; Dinas Perdagangan Dan Perindustrian; Dinas Sosial; Dinas Koperasi Dan Umkm; Diskominfo
			3	peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Dinas Pertanian
			4	Implementasi LP2B secara konsisten dalam bentuk insentif kepada pemilik lahan berupa pembebasan PBB dan Bantuan Saprodi setiap tahun	Dinas Pertanian	Badan Pendapatan Daerah; Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Sumber : RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Tabel 4.6 di atas menggambarkan keterhubungan yang erat antara arah kebijakan dan strategi pembangunan dengan sasaran yang ingin dicapai, sebagai bentuk konkretisasi dari visi dan misi pembangunan daerah. Keterpaduan ini memungkinkan perumusan program dan kegiatan yang lebih fokus, tidak tumpang tindih, serta mampu menjawab permasalahan nyata masyarakat. Penjabaran tersebut juga menjadi alat kontrol dan pengendalian pembangunan yang efektif, karena setiap strategi dan arah kebijakan telah dikaitkan langsung dengan sasaran dan tujuan yang terukur. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 diharapkan dapat berjalan secara efisien, berdampak langsung terhadap masyarakat, dan sejalan dengan prioritas pembangunan jangka menengah maupun nasional.

4.2. Prioritas Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ditetapkan sebagai upaya untuk mengakselerasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, sekaligus menjawab isu-isu strategis yang berkembang. Penetapan prioritas didasarkan pada pertimbangan urgensi, dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, sinergi antar sektor, serta keterpaduan dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Prioritas ini menjadi arah utama bagi perangkat daerah dalam merancang program dan kegiatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, guna mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon.

4.2.1. Isu Strategis dan Tema Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Perencanaan pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan tantangan dan permasalahan aktual yang memiliki dampak signifikan terhadap capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis yang diangkat merupakan hasil dari proses evaluasi terhadap kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya, identifikasi akar permasalahan lintas sektor, serta masukan dari pemangku kepentingan melalui forum Musrenbang dan konsultasi publik. Penetapan isu strategis ini juga mempertimbangkan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta proyeksi kebutuhan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil penelaahan, telah ditetapkan delapan isu strategis utama pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagai berikut:

1. **Penguatan nilai budaya masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal**, untuk memperkuat identitas daerah dan memperkuat ketahanan sosial berbasis budaya;

2. **Peningkatan daya saing sumber daya manusia**, melalui perbaikan kualitas pendidikan, kompetensi tenaga kerja, dan penguatan karakter generasi muda;
3. **Percepatan penanggulangan kemiskinan**, dengan pendekatan konvergensi program berbasis rumah tangga miskin dan percepatan eliminasi kemiskinan ekstrem;
4. **Penguatan kehidupan beragama dalam praktik kesalehan sosial dan kerukunan umat beragama**, guna menjaga harmoni sosial dan memperkuat jejaring keagamaan yang inklusif;
5. **Penguatan kemandirian ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan**, dengan mendorong pemberdayaan UMKM, koperasi, ekonomi desa, dan sektor pertanian yang berkelanjutan;
6. **Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik**, guna menciptakan birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien;
7. **Peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat terhadap berbagai risiko**, baik sosial, lingkungan, maupun keamanan wilayah;
8. **Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan**, untuk mendukung konektivitas antarwilayah, akses layanan dasar, serta pertumbuhan ekonomi.

Menanggapi berbagai isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan tema pembangunan Tahun 2026, yaitu:

“Pondasi Inovasi dan Tata Kelola Efektif untuk Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Pelayanan Publik”

Tema ini menegaskan fokus pemerintah daerah dalam memperkuat pondasi pelayanan publik yang berkualitas dan merata, sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai pengungkit utama produktivitas wilayah dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan tata kelola diarahkan pada peningkatan kualitas birokrasi, akselerasi digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam perumusan dan pengawasan pembangunan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur difokuskan pada pemerataan akses jalan, air bersih, sanitasi, jaringan irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ketahanan wilayah terhadap bencana. Keduanya saling menguatkan sebagai pendekatan komprehensif untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat dan mempercepat pencapaian sasaran RPJMD.

Tema ini juga mencerminkan kesinambungan arah pembangunan jangka panjang sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Cirebon 2025–2045, serta mendukung agenda prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Dengan mengedepankan tata

kelola yang baik dan pembangunan infrastruktur yang merata, Pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dapat meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 ditetapkan sebagai respons terhadap isu-isu strategis daerah dan sebagai penjabaran operasional dari tema pembangunan tahun berjalan. Penetapan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan, potensi dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan antar program, serta sinergi dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Prioritas pembangunan tahun 2026 difokuskan pada penguatan tata kelola pelayanan publik, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur dasar yang merata, serta penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan sosial masyarakat. Adapun detail Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim;
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial
4. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur

4.2.2.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Permasalahan, Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan hasil dari proses perencanaan yang komprehensif dan berbasis bukti, yang mempertimbangkan kondisi riil daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, serta keselarasan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang. Prioritas ini tidak ditetapkan secara terpisah, melainkan merupakan penjabaran operasional dari isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan yang telah

teridentifikasi sebelumnya, serta menjadi instrumen utama untuk mengarahkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang lebih fokus, efektif, dan berorientasi pada hasil.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2026 masih berkutat pada isu-isu mendasar yang bersifat struktural dan memerlukan pendekatan lintas sektor, seperti ketimpangan akses layanan dasar, tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, rendahnya produktivitas tenaga kerja, terbatasnya kapasitas aparatur pemerintah, dan kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Berbagai permasalahan ini mengemuka dari hasil evaluasi indikator makro pembangunan daerah serta capaian sasaran RPJMD Tahun 2025–2029 yang belum sepenuhnya optimal.

Sejalan dengan hal tersebut, delapan isu strategis telah dirumuskan sebagai hasil identifikasi tantangan utama pembangunan daerah, yaitu: penguatan nilai budaya dan kearifan lokal, peningkatan daya saing SDM, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kehidupan beragama, penguatan ekonomi kerakyatan, pemantapan tata kelola pemerintahan melalui transformasi digital, peningkatan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. Isu-isu ini menjadi dasar penetapan tema pembangunan Tahun 2026, yaitu: “Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik dan Infrastruktur Dasar.”

Dengan mengacu pada tema tersebut, prioritas pembangunan daerah disusun untuk menjawab permasalahan yang paling krusial dan berdampak luas, serta diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Prioritas pembangunan mencakup upaya:

- Meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan publik dengan memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital;
- Mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung akses pendidikan, kesehatan, konektivitas antarwilayah, dan produktivitas ekonomi;
- Menurunkan angka kemiskinan melalui penguatan jaring pengaman sosial, integrasi program berbasis rumah tangga miskin, dan penciptaan lapangan kerja baru;
- Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguatan ketahanan keluarga;
- Mendorong ekonomi lokal yang berbasis potensi desa dan UMKM serta memperkuat koperasi dan industri rumah tangga;
- Menumbuhkan kehidupan sosial yang harmonis dan religius melalui penguatan nilai budaya, kelembagaan keagamaan, dan ruang ekspresi publik;
- Meningkatkan ketahanan sosial dan keamanan lingkungan untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan tangguh terhadap berbagai risiko.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan permasalahan dan isu strategis tersebut memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tidak bersifat parsial atau sektoral semata, tetapi menyeluruh dan saling mendukung. Arah kebijakan yang diturunkan dari prioritas ini akan menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2026 yang terukur dan selaras dengan target sasaran RPJMD dan indikator kinerja utama daerah.

Dengan demikian, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 memainkan peran sentral dalam mengonsolidasikan langkah-langkah pembangunan ke arah yang lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini menjadi dasar penting bagi terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.7.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Permasalahan Daerah

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah
Belum optimalnya pengembangan budaya	IS 1 Penguatan nilai budaya masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal	Penataan kelembagaan dan regulasi berdasarkan riset dan inovasi daerah; Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	PK 1 Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi
Penyelenggaraan pelayanan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal	IS 4 Penguatan kehidupan beragama dalam praktik-praktik kesalehan sosial dan kerukunan umat beragama	Peningkatan tata kelola kelembagaan, perangkat daerah penyelenggara Keamanan, ketertiban, Penegakan Perda dan Kondusifitas wilayah	
Masih rendahnya penanganan persampahan dan pengelolaan lingkungan Tingginya risiko bencana dan rendahnya mitigasi bencana	IS 7 Peningkatan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat terhadap berbagai risiko	Meningkatkan peran struktur dan kultur lembaga dalam merespon dinamika lingkungan; Percepatan operasionalisasi pengelolaan sampah di hilir	PK 2 Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan energi, air dan pangan
Belum optimalnya kualitas pendidikan	IS 2 Peningkatan daya saing SDM	penguatan kapasitas SDM Kabupaten Cirebon	PK 3 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah
			serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial
Tingginya angka kemiskinan	IS 3 Percepatan penanggulangan kemiskinan	Penataan dan penguatan sistem penyediaan bantuan sosial	PK 4 Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja
Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum dikembangkan secara optimal dalam menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing	IS 5 Penguatan kemandirian ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif	PK 5 Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya
Terbatasnya infrastruktur	IS 8 Peningkatan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan	PK 6 Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Pembangunan	Arah Kebijakan	Prioritas Pembangunan Daerah
		pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi);	
Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	IS 6 Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui akselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	PK 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur

Sumber : Data diolah Bapperida, 2025.

4.2.2.2. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 tidak hanya mengacu pada arah kebijakan teknokratik yang tertuang dalam RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, tetapi juga memperhatikan secara serius aspirasi dan masukan dari DPRD Kabupaten Cirebon melalui dokumen Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Tahun 2026. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh para anggota dewan melalui kegiatan reses, dengar pendapat, maupun forum-forum konstituen lainnya. Oleh karena itu, keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan Pokir DPRD menjadi sangat penting sebagai wujud sinergi antara perencanaan teknokratik dan aspiratif.

Secara garis besar, pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 memuat lima agenda strategis utama yang memiliki kesesuaian tinggi dengan prioritas pembangunan daerah. Pertama, Penyempurnaan Pembangunan Infrastruktur, yang menekankan pada target seluruh ruas jalan kabupaten dalam kondisi mulus, tersedianya infrastruktur pendukung pertanian yang subur, pengelolaan sampah yang terpadu, serta tersedianya sarana prasarana pendidikan yang nyaman dan aman. Hal ini sejalan dengan prioritas daerah dalam penguatan pelayanan dasar dan pemerataan infrastruktur, serta mendukung isu strategis tentang pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Kedua, Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar, yang mencakup pendidikan dasar 9 tahun berbasis teknologi dan budaya lokal, cakupan jaminan kesehatan semesta (UHC) 100%, tersedianya fasilitas kesehatan yang layak serta ambulance desa, hingga program pencegahan dan pengurangan stunting. Pokir ini beririsan langsung dengan prioritas pembangunan yang menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan layanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta percepatan penurunan angka stunting yang menjadi indikator kunci nasional dan daerah.

Ketiga, Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan target penurunan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan masing-masing menjadi 5%. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja produktif, serta konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang berbasis rumah tangga miskin.

Keempat, Pembangunan Berbasis Kawasan, mencakup pengembangan kawasan perbatasan, kawasan industri di wilayah timur, revitalisasi kawasan pusat pemerintahan di Kota Sumber, serta pengembangan kawasan pariwisata. Agenda ini sejalan dengan pendekatan spasial pembangunan daerah yang menekankan pada optimalisasi potensi

kewilayahan dan penguatan konektivitas antarwilayah sebagai instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah.

Kelima, Pertumbuhan Ekonomi dan Tata Kelola Keuangan Daerah, yang mencantumkan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahun serta proyeksi PDRB Kabupaten Cirebon hingga mencapai Rp100 triliun (ADHB) per tahun. Pokir ini sangat relevan dengan arah kebijakan fiskal daerah, reformasi pengelolaan pendapatan, serta penguatan sektor-sektor strategis daerah yang menjadi sumber utama pembentuk PDRB.

Dengan demikian, prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pokok-pokok pikiran DPRD, baik dari sisi substansi maupun arah kebijakan. Keterpaduan ini mencerminkan harmonisasi antara rencana eksekutif dan aspirasi legislatif yang bertumpu pada kebutuhan riil masyarakat dan memperkuat legitimasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah secara lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Tabel 4.8.

Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026
PK 1 - Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi	Pembangunan Kawasan Wisata, yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan
PK 2 - Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan energi, air dan pangan	Pengelolaan sampah terpadu dan infrastruktur lingkungan
PK 3 - Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial	Peningkatan kualitas pelayanan dasar (wajib sekolah 9 tahun, UHC 100%, penurunan stunting)
PK 4 - Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran (target pengangguran 5%, kemiskinan 5%)
PK 5 - Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Pertumbuhan ekonomi dan tata kelola keuangan daerah (PAD, PDRB ADHB 100 Triliun)

Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)	Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026
PK 6 - Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	Penyempurnaan pembangunan infrastruktur (jalan mulus, infrastruktur pertanian, pendidikan, kawasan)
PK 7 - Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas aparatur

Sumber : Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cirebon Tahun 2026

4.2.2.3. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional pada RKP 2026

Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 secara konsisten mengintegrasikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi dan konsistensi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan bahwa pembangunan daerah mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

RKP Tahun 2026 menetapkan tema: **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif.”** Tema ini dijabarkan ke dalam delapan Prioritas Nasional, yang meliputi dimensi ideologi, ketahanan nasional, ekonomi, sumber daya manusia, pemerintahan, lingkungan hidup, dan pembangunan desa. Seluruh prioritas ini saling terkait dan mendukung arah transformasi ekonomi Indonesia ke depan yang berbasis keadilan sosial dan kemandirian bangsa.

Sejalan dengan hal tersebut, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD 2025–2029 dan diturunkan ke dalam RKPD, juga memuat tujuh agenda strategis pembangunan yang menunjukkan keselarasan langsung dengan delapan prioritas nasional. Adapun keterkaitan substansial tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Keterkaitan dengan **PK 1** Kabupaten Cirebon tentang penguatan kehidupan beragama dan ketertiban sosial, melalui pengembangan harmoni sosial, penguatan moderasi beragama, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari kearifan lokal.

Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Mendapat penguatan melalui **PK 2 dan PK 5**, yaitu pembangunan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan sektor pertanian, kelautan, dan industri berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan.

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta agromaritim industri di sentra produksi melalui koperasi Sejalan dengan **PK 5 dan PK 6**, melalui strategi penguatan ekonomi kerakyatan, koperasi dan UMKM, pembangunan sentra produksi pertanian dan perikanan, serta perluasan lapangan kerja melalui kewirausahaan berbasis desa dan digitalisasi ekonomi.

Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas Terintegrasi dengan **PK 3**, melalui program peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pengurangan stunting, pengembangan talenta muda, serta penguatan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan.

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Beririsan langsung dengan **PK 5**, khususnya dalam hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan pengolahan komoditas lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan Sangat selaras dengan **PK 4 dan PK 6**, melalui strategi pembangunan kawasan perdesaan, revitalisasi potensi ekonomi desa, peningkatan akses layanan dasar, dan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga miskin ekstrem.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Diakomodasi melalui **PK 7**, yang mendorong transformasi birokrasi daerah, digitalisasi layanan publik, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan sistem integritas dan pelayanan publik yang transparan.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur Selaras dengan **PK 1 dan PK 2**, melalui pendekatan berbasis budaya lokal, pelestarian lingkungan hidup, pengembangan wisata berbasis kearifan lokal, serta fasilitasi ruang sosial yang inklusif dan toleran.

Tabel 4.9
Dukungan Program Prioritas Daerah Kabupaten Cirebon Terhadap
Program Prioritas Nasional

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
PN 1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Intervensi kebijakan program: - Kolaborasi aktif antara pemerintah Pusat dan Daerah dengan perusahaan media. - Menyiarkan informasi publik dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.	PK 1: Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Intervensi kebijakan program: - Membangun infrastruktur pertanian - Melaksanakan pelatihan petani dan penguatan kelembagaan petani - Menyediakan input dan alat mesin produksi pertanian - Melaksanakan pengawalan produksi dan pengendalian OPT/DPI - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi	PK 2: Penguatan sistem pangan daerah dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
PN 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim	PK 6: Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Intervensi kebijakan program: 1. Portal Pelayanan Publik 2. Pembangunan Jalan Perkotaan 3. Pembangunan Preservasi Jalan Daerah 4. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan 5. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
	Program Penataan Bangunan Gedung
	Program Penyelenggaraan Jalan
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
	Program Pengembangan Perumahan
	Program Kawasan Permukiman
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
	Program Penatagunaan Tanah
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
	Program Pengembangan Umkm
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
	Program Promosi Penanaman Modal
	Program Pelayanan Penanaman Modal
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
PN 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Intervensi kebijakan program: 1. Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun 2. Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul 3. Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 4. Penurunan Stunting 5. Pemeriksaan Kesehatan Gratis 6. Pemberian Makan Bergizi Gratis 7. Pengendalian Penyakit 8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan tata Kelola 9. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif Peningkatan Ketangguhan Keluarga 10. Perlindungan Anak 11. Peningkatan Kualitas Pemuda	PK 3: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pendidikan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
12. Penjaminan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan dari Kekerasan 13. Perwujudan Masyarakat Inklusif 14. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Tenaga Kerja 15. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Produktivitas Tenaga Kerja 16. Pengembangan Manajemen Talenta Nasional 17. Peningkatan Prestasi Olahraga	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
	Program Pembinaan Perpustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
PN 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Intervensi kebijakan program: 1. Fasilitasi Potensi Usaha Koperasi Sektor Agromaritim 2. Kekayaan intelektual Hasil Riset dan Inovasi Teknologi Energi Berkelanjutan 3. Pendampingan Penerapan Industri 4.0 di sektor industry kemurgi, oleokimia dan pakan	PK 5: Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalian (garam). Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
PN 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Intervensi kebijakan program: 1. Bantuan Sosial yang Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran 2. Reformasi Jaminan Sosial 3. Penumbuhan Usaha Berkelanjutan 4. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 5. Peningkatan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 6. Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan	PK 4: Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Intervensi kebijakan program: 1. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 2. Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas : Pengembangan dan keterpaduan portal layanan administrasi 3. Tata Kelola Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan 4. Peningkatan Kepatuhan Perpajakan	PK 7: Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penanggulangan Bencana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
	Program Pendaftaran Penduduk
	Program Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik
	Program Aplikasi Informatika
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
	Program Pengelolaan Arsip
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Program Kepegawaian Daerah
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Program Riset Dan Inovasi Daerah
	Program Penyelenggaraan Pengawasan
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
PN 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Intervensi kebijakan program: 1. Melestarikan cagar budaya, ODCB dan OPK 2. Menyelenggarakan event film, music dan seni	PK 2: Penguatan sistem pangan daerah dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Prioritas Nasional (ASTA CITA) (PN)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK) / Program Prioritas Daerah
3. Menyelenggarakan kegiatan terkait giat warisan budaya 4. Meningkatkan kompetensi SDM Kebudayaan 5. Mengembangkan pariwisata berbasis cagar budaya 6. Memperkuat industri kreatif berbasis seni dan budaya 7. Pencegahan dan Mitigasi Bencana 8. Layanan Peringatan Dini dan Keandalan Respon 9. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan
	Program Pengembangan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Sumber: Diolah Bapperida, 2025

Keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menyusun arah pembangunan Tahun 2026 secara integratif dan responsif terhadap agenda nasional. Hal ini juga menjadi dasar untuk penguatan koordinasi lintas pemerintah serta penajaman program-program daerah yang berpeluang mendapatkan dukungan dari kementerian/lembaga maupun melalui pendanaan sinergis lainnya seperti DAK tematik dan program prioritas pusat.

Melalui keterkaitan yang erat ini, pelaksanaan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 tidak hanya berorientasi pada capaian lokal, tetapi juga memberikan kontribusi strategis terhadap tujuan nasional, khususnya dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang berdaulat, adil, dan berkelanjutan.

Tabel 4.10
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan
Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		PK1: Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi.	
S1. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	- Indeks Demokrasi Indonesia - Indeks Hak Asasi Manusia	S7. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.		PK2: Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan energi, air dan pangan	
S2. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan S3. Terbangunnya Eco-region Sistem Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal S4. Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan, serta pemanfaatan energi bersih S5. Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi S6. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB S7. Meningkatnya Indeks Ekonomi Hijau untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi S8. Pengembangan Ekonomi Biru sebagai sumber Pertumbuhan Baru	- Indeks Ketahanan Pangan - Prevalensi Ketidacukupan Pangan - Meningkatkan Produksi Pangan - Nilai Tukar Petani Indeks Kesejahteraan Petani - Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Air Minum Aman - Menurunnya luas lahan kritis - Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani Akses Sanitasi Aman - Mengentaskan perilaku BABS di tempat terbuka - Indeks Ekonomi Hijau - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) - Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	S6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	- Indeks kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Ketahanan Daerah - Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi		PK 6: Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien.	
S9. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan S10. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB S11. Meningkatnya nilai tambah pariwisata S12. Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas S13. Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB	- Stok Infrastruktur terhadap PDB (%) - Konsumsi Listrik per Kapita (kwh) - Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%) - Rasio PDB Pariwisata (%) - Devisa Pariwisata (Miliar USD) - Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) - Rasio Volume usaha Koperasi terhadap PDB (%) - Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%) - Rasio Kewirausahaan (%) - Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	S3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif	- Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah - Tingkat Pengangguran Terbuka - Tingkat Kemiskinan - Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah - Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur - Indeks Desa

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		PK 3: Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial.	
S14. Pendidikan Berkualitas yang Merata S15. Kesehatan untuk Semua S16. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif S17. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi S18. Peningkatan Prestasi dan Pembudayaan Olahraga	- Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahu keatas (tahun) - Harapan Lama Sekolah (tahun) - Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional 17.03 (Literasi Membaca dan Numerasi) - Usia Harapan Hidup (tahun) - Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun) - Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) - Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) - Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga - Indeks Perlindungan Anak - Indeks Pembangunan Pemuda - Indeks Ketimpangan Gender - Indeks Pembangunan Gender - Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%) - Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%) - Tingkat Pengangguran Terbuka (%) - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	S4. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan, kesehatan, budaya, dan kualitas keluarga	- Indeks Pendidikan - Indeks Kesehatan - Indeks Kebudayaan daerah - Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		PK 5: Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan, pariwisata, transportasi dan pergudangan, pertambangan dan penggalan (garam).	
S19. Meningkatnya Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan S20. Menguatnya Kinerja layanan konektivitas backbone dan Sistem Logistik Nasional untuk Mendukung Integrasi Ekonomi Domestik dan Global S21. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	- Rasio PDB Industri Pengolahan (%) - Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%) - Nilai Tambah Industri Pengolahan (MVA) per Kapita (Rp Juta) - Rasio PDRB Industri Pengolahan di Provinsi KI/KEK Prioritas terhadap PDB Industri Pengolahan (%) - Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB) - Ekspor Barang dan Jasa (%PDB) - Nilai PMA dan PMDN (Rp. Triliun)	S3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif S2. Meningkatnya daya saing daerah melalui inovasi	- Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah - Tingkat Pengangguran Terbuka - Tingkat Kemiskinan - Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah - Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur - Indeks Desa - Indeks Inovasi Daerah - Laju Pertumbuhan Ekonomi - PDRB Perkapita ADHB - Indeks Pembangunan Manusia
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		PK 4: Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dengan peningkatan lapangan pekerjaan dan daya saing tenaga kerja.	
S22. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan S23. Meningkatnya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan S24. Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan S25. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	- Tingkat Kemiskinan - Proporsi penduduk kelas menengah - Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal - Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%) - Persentase desa mandiri (%)	S3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang inklusif	- Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah - Tingkat Pengangguran Terbuka - Tingkat Kemiskinan - Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah - Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur - Indeks Desa - Indeks Inovasi Daerah - Laju Pertumbuhan

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
			Ekonomi - PDRB Perkapita ADHB - Indeks Pembangunan Manusia - Indeks Desa
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		PK 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur.	
S26. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem antikorupsi S27. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani S28. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba S29. Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan S30. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan S31. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi S32. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	- Indeks Pelayanan Publik - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik - Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri - Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika - Clearance rate tindak pidana judi - Clearance rate tindak pidana penyelundupan	S1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, akuntabel, dan transparan	- Nilai SAKIP - Indeks Pelayanan Publik - Opini BPK - Indeks SPBE - Rasio Kemandirian Fiskal

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PK 2: Penguatan sistem pangan daerah dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim.	
S33. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju S34. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	- Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) - Indeks Layanan Keagamaan - Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) - Nilai Dimensi Kohesi Sosial IPMas - Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB - Penurunan Nilai Indeks Risiko Bencana	S5. Meningkatnya keimanan dan ketakwaan aparatur dan masyarakat S6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah	- Indeks Kerukunan Umat Beragama - Indeks kualitas Lingkungan Hidup - Indeks Ketahanan Daerah

Sumber: Analisis Bapperida Kabupaten Cirebon, 2025

Ket. Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah menggunakan data RPJMD Tahun 2025-2029

4.2.2.4. Program Prioritas Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025–2029, serta menjawab isu-isu strategis daerah, Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan tujuh prioritas pembangunan yang menjadi arah utama dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2026. Penjabaran program prioritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memberikan manfaat langsung dan nyata kepada masyarakat, serta berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja daerah yang terukur dan berkelanjutan.

Prioritas Pembangunan Utama dalam penjabaran 7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai amanat RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029, dengan uraian di bawah ini yang menjadi fokus utama menu usulan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang menjadi dasar dalam penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan menu usulan pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

Prioritas 1. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi

1. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (hanya pada 10 Kecamatan dengan kejadian kebakaran tertinggi)
2. Dukungan Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana (Tabung APAR)
3. Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Sarprasnya
4. Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sarprasnya

Prioritas 2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim

1. Pemberdayaan pengelolaan persampahan di Kecamatan
2. Penyediaan sarana dan prasarana persampahan
3. Pembangunan sumur resapan atau Lubang Biopori

Prioritas 3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial

1. Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru Pada Tingkat PAUD, SD, dan SMP)
2. Pembangunan dan atau Rehabilitasi Toilet pada Tingkat PAUD, SD dan SMP
3. Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B dan C), Wajib Berkelanjutan Sampai Tuntas
4. Pengadaan Mebeuler pada Tingkat PAUD, SD dan SMP

5. IPTEK Marketing Digital
6. Sentra Pemberdayaan Pemuda (1 desa/kecamatan)
7. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus (indeks BB/TB < -3 SD) di wilayah dengan resiko prevalensi stunting > 14%)
8. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm di wilayah dengan resiko presentasi ibu hamil KEK >= 10%
9. Pelayanan Operasi Katarak
10. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
11. Kompetisi Sepakbola U-12 (Mandatory Kecamatan)
12. Peningkatan prestasi atletik (invitasi atletik tingkat kecamatan)
13. Kejuaraan Olah Raga Prestasi
14. Gebyar Senam Massal Tingkat Kecamatan
15. Bimtek dan Tera Ulang Alat Antropometri Mendukung Pencegahan Stunting
16. Pembangunan Gedung Serba Guna

Prioritas 4. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja

1. Penguatan Kelembagaan dan SDM Puskesmas dan Karang Taruna
2. Kreasi Anak Cirebon
3. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga (20 jt maksimal/kecamatan atau 1,5 juta perdesa), bukan untuk honor pengurus PKK (Mandatory Kecamatan)

Prioritas 5. Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya

1. Gerakan Pangan Murah, Gemar Makan Ikan
2. Festival tematik desa dan pentas seni budaya pertunjukan tradisional Cirebonan
3. Pelatihan Kewirausahaan Caruban Milenial
4. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (A. Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan: Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan jalan usaha tani (JUT) syarat: harus masuk LSD)
5. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Pedesaan (PAKASEP): Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana

6. Pelatihan vokasional berbasis penempatan (Pelaksanaan Di BLK atau di LPK/BLK komunitas), boleh di Kecamatan (SKB: untuk kecamatan yang lokasinya jauh dari BLK atau LPK/BLK komunitas)
7. Festival Tematik, Sholawatan dan Pentas Seni Pertunjukan Tradisional Cirebonan

Prioritas 6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien

1. Pembangunan / Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan (min 750 juta)
2. Rehabilitasi Jalan (pemeliharaan berkala) (min 500 juta)
3. Rehabilitasi Jembatan
4. Rehabilitasi Drainase jalan (Pembuatan saluran yang tersambung ke pembuangan, pembuatan gorong-gorong)
5. Pembuatan Trotoar (khusus di 5 Kecamatan PKL)
6. Normalisasi Bendung
7. Normalisasi Sungai pada daerah banjir dan di wilayah pesisir/muara (alur nelayan)
8. Pemasangan PJU dan Smart PJU di ruas jalan kabupaten
9. Pemasangan PJU Tematik pada Kecamatan PKL
10. Pemasangan Rambu Lalu Lintas
11. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
12. Pemeliharaan PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan dan PSU di wilayah Kelurahan

Prioritas 7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur

1. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana layanan Publik (Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri)
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) - > (Mandatory Kecamatan)
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan (35-50 juta) (Mandatory Kecamatan)
4. Kegiatan PHBN Kecamatan (Mandatory Kecamatan) (maks 50 juta)
5. Pengelolaan Arsip Dinamis

Untuk pemerataan dan percepatan pencapaian target pembangunan daerah, sebagian diberikan kepada kecamatan untuk menentukan prioritas wilayah masing-masing melalui musrenbang kecamatan. Prioritas tersebut diberikan pagu indikatif yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan beberapa indikator (Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Indeks Kesulitan Geografis (IKG) dan Rumah Tangga Miskin). Sedangkan Program prioritas daerah yang dalam implementasi kegiatan sudah menjadi

Kewenangan Desa akan dialokasikan dalam program keuangan desa khusus yang akan di atur dalam peraturan daerah tersendiri.

Keterkaitan antara prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2026 dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 merupakan wujud sinergi perencanaan lintas pemerintahan. Kesesuaian ini mencerminkan upaya harmonisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan provinsi, terutama dalam mendukung transformasi ekonomi berbasis kawasan, peningkatan kualitas layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah timur Jawa Barat, termasuk kawasan strategis Cirebon dan Rebana.

Tabel 4.11
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 Dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon Tahun 2026	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026
1. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketenteraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi	4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim	2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, taraf hidup masyarakat, dan perlindungan sosial	1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul
4. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya	2. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan	3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip Good and Clean Governance

Sumber: Diolah Bapperida, 2025

Keterpaduan antara prioritas pembangunan daerah, sasaran pembangunan, dan indikator kinerja utama Kabupaten Cirebon tahun 2026. Penyusunan tabel ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prioritas yang ditetapkan memiliki arah capaian yang jelas dan terukur, serta selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Indikator yang digunakan merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program prioritas dan menjadi dasar dalam evaluasi pencapaian pembangunan tahunan secara kuantitatif.

Tabel 4.12
Keterkaitan Antara Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan dan Indikator Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
1. Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketenteraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi	Meningkatnya keamanan dan ketenteraman masyarakat	Persentase kejadian konflik sosial yang tertangani (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama	Indeks kerukunan umat beragama	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda/Perkada Yang ditegakan
			Program Penanggulangan Bencana	Prosentase Capaian layanan penanggulangan bencana
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase layanan kebakaran dan nonkebakaran yang dilayani secara response time 15 menit
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah pelanggaran Perda yang didata dan dilaporkan/dikoordinasi ke Satpol PP
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Prosentase lembaga/organisasi terkait yang bermitra dalam pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan	Persentase Peningkatan Kapasitas Kinerja Partai Politik dan Lembaga Penyelenggara Pemilihan/Pemilihan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Umum, Lembaga Pendidikan dalam Pendidikan Politik
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dari basic data Ormas pada bulan february 2025 sebanyak 278
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase lembaga/organisasi terkait yang bermitra di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Prosentase Jumlah pencegahan konflik (Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama) yang terjadi di Wilayah Kabupaten Cirebon
2. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan energi, air dan pangan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Persentase pengurangan timbulan sampah rumah tangga (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Terlindunginya kawasan rawan bencana	Jumlah sumur resapan dan biopori terbangun	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang telah disusun dan ditetapkan
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Pencemar kurang dari 10
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten yang ditangani
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terolah
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, taraf hidup dan perlindungan sosial	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	APK SD/SMP, Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Menurunnya prevalensi stunting dan gizi buruk	Persentase balita stunting; persentase ibu hamil KEK	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang TK / PAUD
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat
				Persentase penduduk yang melanjutkan pendidikan pada program Kesetaraan Kejar Paket A/B/C sampai tamat
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Presentase Guru layak mengajar pada jenjang pendidikan dasar
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Jumlah Satuan Pendidikan yang memiliki izin kelayakan penyelenggaraan pendidikan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)
				Insidens TB per 100.000 penduduk
				Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi (0-11 bulan)
				Prevalensi obesitas >= 18 tahun
				Persentase Universal Health Coverage (UHC)
				Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial
				Persentase Fasilitas Kesehatan yang melakukan pengukuran Indikator Mutu
				Persentase Capaian SPM RSUD Arjawinangun
				Persentase Capaian SPM RSUD Waled
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM yang mendapatkan peningkatan kapasitas
				Prosentasi SDM yang bekerja di unit unit layanan khusus yang memiliki sertifikasi
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmalkes dan UMOT mendapat pembinaan
				Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dilakukan pembinaan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga berPHBS
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada setiap lembaga pemerintah
			Program Perlindungan Perempuan	Perlindungan korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi terhadap perempuan
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perempuan yang terlatih pemberdayaan perempuan
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Elemen Data Gender Dan Anak Yang Valid Dan Disajikan
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentasi Jumlah lembaga layanan anak yang telah mendapat pelatihan dalam pemenuhan konvensi hak anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten
			Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
				Presentase kehamilan tidak direncanakan
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kenaikan strata Kampung Keluarga Berkualitas
				Meningkatnya fasilitator sebaya bagi poktan khususnya remaja

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase pemuda yang memiliki daya saing
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet yang dibina
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase partisipasi pemuda yang aktif dalam kepramukaan
			Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
			Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat
				Persentase perpustakaan pada tingkat SMP yang ber SNP
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno yang dilestarikan
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
4. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin (%)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif berperan dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial
				Persentase Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial
	Meningkatnya kompetensi dan kemandirian tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja tersertifikasi	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Program Rehabilitasi Sosial
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem menerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Persentase DTSEN Bagi Keluarga Miskin dan Miskin Ekstrem yang tervalidasi
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
				Persentase Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dasar dalam penanganan bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase Kegiatan RTKD yang dilaksanakan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.
			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS
			Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan wilayah transmigrasi lokal
5. Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor unggulan	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan daerah terhadap PDRB	Pertumbuhan sektor pertanian/perdagangan/pariwisata (%)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Meningkatnya jumlah wirausaha dan pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM baru dan aktif	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Presentase jumlah cadangan pangan
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Coefisien Variasi (CV) harga beras medium di tingkat Konsumen
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Presentase daerah rentan rawan pangan
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Rata-rata Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tepat waktu
			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi
			Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Sehat
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang di berikan Dukungan fasilitasi Pelatihan
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
		Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pertumbuhan Wirausaha
		Jumlah jembatan, drainase, dan trotoar yang dibangun	Program Pengembangan Umkm	Persentase Pelaku Usaha Mikro yang Terfasilitasi pengembangan UMKM
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi terhadap Target Investasi
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan	Presentase Laju pertumbuhan pelaku usaha yang taat pada aturan
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah produksi gabah kering giling
				Jumlah produksi mangga
				Jumlah kelahiran ternak sapi potong hasil Inseminasi Buatan (IB)
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas tanam padi
				Jumlah pemotongan ternak ruminansia di Rumah Potong Hewan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular dan/atau zoonosis
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase keberhasilan panen padi
			Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani Kelas Madya
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase Sarana Distribusi Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Presentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/dilaksanakan
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Pertumbuhan Jumlah Industri Kecil dan Menengah
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Industri yang Terawasi di SIINAS
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Perusahaan Industri yang Terdaftar di SIINAS
			Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil inovasi yang didiseminasikan
6. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur dasar		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Tersedianya infrastruktur pendukung layanan dasar		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Prosentase Kondisi Infrastruktur Sumber Daya Air yang Baik
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Prosentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Prosentase bangunan Penampung Sampah Yang Terbangun
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh Sambungan pengolahan air limbah
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Penataan Bangunan Gedung	Prosentase Peningkatan PBG
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Prosentase dokumen kebijakan Tata Bangunan dan Lingkungan yang ditetapkan
			Program Penyelenggaraan Jalan	Prosentase kondisi Jalan Baik
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Prosentase dokumen kebijakan RDTR yang ditetapkan
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemukiman yang tertata
			Program Kawasan Permukiman	Prosentase meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase meningkatnya jumlah unit Rumah Layak Huni yang layak dan sehat
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yg didukung dengan PSU
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	prosentase fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Cirebon
			Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase data objek penanganan reforma agraria yang ditindaklanjuti
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Persentase surat keterangan penetapan lokasi yang terbit
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase penggunaan tanah dalam satu wilayah kabupaten

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Program Penataan Desa	Persentase Jumlah Desa yang di Fasilitas tentang Penyelenggaraan Penataan Desa
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Peningkatan Persentase Desa yang melaksanakan Kerjasama Desa
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Rata-rata Desa yang sudah menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa yang tepat waktu
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan jumlah desa yang lembaga Kemasyarakatannya dibina
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)
				Prosentase Pemasangan Perlengkapan Jalan
				Prosentase kepemilikan KIR / Wajib Uji
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberday akan di Tiap Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDes Tepat Waktu di Tiap Kecamatan
7. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis digital	Indeks SPBE Kabupaten Cirebon	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
	Tersedianya data perencanaan pembangunan yang akurat dan terkini	Persentase kecamatan dengan data pembangunan terverifikasi	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
				dan setelah tanggap darurat bencana
				Persentase Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang memiliki Pengetahuan dan Keterampilan dasar dalam penanganan bencana
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada setiap lembaga pemerintah
			Program Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan Kartu Identitas Anak / KIA
				Persentase jumlah penduduk di Kabupaten Cirebon yang sudah melaksanakan perekaman KTP El"
				Prosentase aktifasi layanan IKD
			Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0 - 18 tahun
				Rata-rata prosentase relisasi akta aktapenacatatan sipil yang diterbitkan (akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan, pengsahan dan pengangkatan anak)
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
				Prosentase Jaringan SIAK di Kabupaten Cirebon berfungsi dengan baik dan menghasilkan pengolahana dan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
				penyajian data kependudukan yang akurat
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase elemen Data Profil Kependudukan yang disajikan secara valid dan dapat dipertanggungjawabkan
			Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Persentase Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
				Presentase kehamilan tidak direncanakan
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
			Program Aplikasi Informatika	Nilai Penyelenggaraan TIK
				Nilai Penyelenggara SPBE
				Nilai Pelayanan Publik Berbasis Elektronik
				Nilai Penerapan Manajemen SPBE
				Nilai Perencanaan Strategis SPBE
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Prosentase Perangkat daerah yang memiliki ketersediaan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip aktif dan in- aktif

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
				yang telah dibuatkan daftar arsip
				Persentase OPD yang nilai Audit Sistem Kearsipan Internal minimal baik
				Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana temu balik kemudian, dialihmediakan, diautentifikasi dan ditetapkan hasil alih medianya
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
				Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan
				Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
				Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan
				Tingkat Kematangan UKPBJ
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Ketercapaian Raperda yang Dibahas
				Persentase Ketercapaian Publikasi Kegiatan DPRD di Masyarakat
				Persentase Ketercapaian Pengawasan Urusan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
				Pemerintahan, Pengawasan DPRD dan Pembahasan Kebijakan Anggaran
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
				Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD
				Indeks Penyerapan Anggaran dalam APBD
				Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah
			Program Kepegawaian Daerah	Nilai aspek perencanaan kebutuhan, pengadaan dan sistem informasi pada Penerapan sistem merit
				Nilai aspek promosi dan mutasi pada penerapan sistem merit
				Nilai aspek manajemen kinerja, penghargaan dan disiplin, serta

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
				perlindungan dan pelayanan pada penerapan sistem merit
				Nilai aspek pengembangan karir pada penerapan sistem merit
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Nilai dimensi pengembangan karir pada penerapan sistem merit
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian yang dihasilkan
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Capaian Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan di Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dilakukan pembinaan/diberdayakan di Tiap Kecamatan
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan di Tiap Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase jumlah desa yang penetapan RKPDDes Tepat Waktu di Tiap Kecamatan
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Prosentase lembaga/organisasi terkait yang bermitra di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan	Prosentase Jumlah pencegahan konflik (Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama)

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran	Prioritas Program Daerah	Indikator Program Prioritas Daerah
			Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	yang terjadi di Wilayah Kabupaten Cirebon

Sumber : Diolah Bapperida, 2025

Dengan mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 maka prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2026 dilaksanakan melalui program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah yang tersusun pada tabel berikut ini.

Tabel 4.13
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Tahun Anggaran 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	PENINGKATAN DUKUNGAN KEHIDUPAN BERAGAMA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA POLITIK DAN DEMOKRASI	
01.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
01.1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
01.1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
01.7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	KECAMATAN ARJAWINANGUN; KECAMATAN ASTANAJAPURA; KECAMATAN BABAKAN; KECAMATAN BEBER; KECAMATAN CILEDUG; KECAMATAN CIWARINGIN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN DUKUPUNTANG; KECAMATAN GEBANG; KECAMATAN GEGESIK; KECAMATAN GEMPOL; KECAMATAN GREGED; KECAMATAN GUNUNGJATI; KECAMATAN JAMBLANG; KECAMATAN KALIWEDI; KECAMATAN KAPETAKAN; KECAMATAN KARANGSEMBUNG; KECAMATAN KARANGWARENG; KECAMATAN KEDAWUNG; KECAMATAN KLANGENAN; KECAMATAN LEMAHABANG; KECAMATAN LOSARI; KECAMATAN MUNDU; KECAMATAN PABEDILAN; KECAMATAN PABUARAN; KECAMATAN PALIMANAN; KECAMATAN PANGENAN; KECAMATAN PANGURAGAN; KECAMATAN PASALEMAN; KECAMATAN PLERED; KECAMATAN PLUMBON; KECAMATAN SEDONG; KECAMATAN SUMBER; KECAMATAN SURANENGGALA; KECAMATAN SUSUKAN; KECAMATAN SUSUKANLEBAK; KECAMATAN TALUN; KECAMATAN TENGAH TANI; KECAMATAN WALED; KECAMATAN WERU;

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
01.8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01.8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01.8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
01.8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
01.8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
2	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN MENGANTISIPASI RISIKO PERUBAHAN IKLIM	
02.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
02.2.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
02.2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
02.2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP;
02.2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN UNIVERSAL SERTA TARAF HIDUP MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	
03.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KESEHATAN; DINAS PENDIDIKAN
03.1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN;
03.1.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	DINAS PENDIDIKAN;

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
03.1.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN
03.1.01.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN;
03.1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	DINAS KESEHATAN;
03.1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
03.1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	DINAS KESEHATAN
03.1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
03.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
03.2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
03.2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
03.2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.2.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
03.2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
03.3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA;
03.3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
03.3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
4	PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA	
04.1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
04.1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	DINAS SOSIAL
04.1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL
04.1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
04.1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
04.2.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DINAS KETENAGAKERJAAN
04.2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DINAS KETENAGAKERJAAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
04.2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DINAS KETENAGAKERJAAN
04.2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KETENAGAKERJAAN
04.3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DINAS KETENAGAKERJAAN
5	PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI HILIRISASI SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA	
05.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN; DINAS KETENAGAKERJAAN; DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN; DINAS PERTANIAN
05.2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DINAS KETENAGAKERJAAN
05.2.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
05.2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN;
05.2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
05.2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
05.2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
05.2.17.02.	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
05.2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05.2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05.2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05.2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
05.2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
05.3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
05.3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN;
05.3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
05.3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN;
05.3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
05.3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
05.3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	DINAS PERTANIAN
05.3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
05.3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN
05.3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
05.3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
05.5.05.03.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN KONEKTIVITAS SERTA PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN YANG BELUM EFISIEN	
06.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG; DINAS PERHUBUNGAN; DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
06.1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
06.1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN;

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
06.2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.2.10.06.	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
06.2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
06.2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
06.2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;
06.2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
06.2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	DINAS PERHUBUNGAN;

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
06.7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN ARJAWINANGUN; KECAMATAN ASTANAJAPURA; KECAMATAN BABAKAN; KECAMATAN BEBER; KECAMATAN CILEDUG; KECAMATAN CIWARINGIN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN DUKUPUNTANG; KECAMATAN GEBANG; KECAMATAN GEGESIK; KECAMATAN GEMPOL; KECAMATAN GREGED; KECAMATAN GUNUNGJATI; KECAMATAN JAMBLANG; KECAMATAN KALIWEDI; KECAMATAN KAPETAKAN; KECAMATAN KARANGSEMBUNG; KECAMATAN KARANGWARENG; KECAMATAN KEDAWUNG; KECAMATAN KLANGENAN; KECAMATAN LEMAHABANG; KECAMATAN LOSARI; KECAMATAN MUNDU; KECAMATAN PABEDILAN; KECAMATAN PABUARAN; KECAMATAN PALIMANAN; KECAMATAN PANGENAN; KECAMATAN PANGURAGAN; KECAMATAN PASALEMAN; KECAMATAN PLERED; KECAMATAN PLUMBON; KECAMATAN SEDONG; KECAMATAN SUMBER; KECAMATAN SURANENGGA; KECAMATAN SUSUKAN; KECAMATAN SUSUKANLEBAK; KECAMATAN TALUN; KECAMATAN TENGAH TANI; KECAMATAN WALED; KECAMATAN WERU;
06.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN ARJAWINANGUN; KECAMATAN ASTANAJAPURA; KECAMATAN BEBER; KECAMATAN CILEDUG; KECAMATAN CIWARINGIN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN DUKUPUNTANG; KECAMATAN GEBANG; KECAMATAN GEGESIK; KECAMATAN GEMPOL; KECAMATAN GREGED; KECAMATAN GUNUNGJATI; KECAMATAN JAMBLANG; KECAMATAN KALIWEDI; KECAMATAN KAPETAKAN; KECAMATAN KARANGWARENG; KECAMATAN KEDAWUNG; KECAMATAN KLANGENAN; KECAMATAN LOSARI; KECAMATAN MUNDU; KECAMATAN PABEDILAN; KECAMATAN PABUARAN; KECAMATAN PALIMANAN; KECAMATAN PANGENAN; KECAMATAN PANGURAGAN; KECAMATAN PASALEMAN; KECAMATAN PLERED; KECAMATAN PLUMBON; KECAMATAN SEDONG; KECAMATAN SUMBER; KECAMATAN SURANENGGA; KECAMATAN SUSUKAN; KECAMATAN TALUN; KECAMATAN TENGAH TANI; KECAMATAN WALED; KECAMATAN WERU;
7	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA APARATUR	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
07.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA; BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK; BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH; BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH; BADAN PENDAPATAN DAERAH; BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH; DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN; DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA; DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL; DINAS KESEHATAN; DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN; DINAS KETENAGAKERJAAN; DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA; DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH; DINAS LINGKUNGAN HIDUP; DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG; DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN; DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA; DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA; DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU; DINAS PENDIDIKAN; DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN; DINAS PERHUBUNGAN; DINAS PERTANIAN; DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN; DINAS SOSIAL; INSPEKTORAT; KECAMATAN ARJAWINANGUN; KECAMATAN ASTANAJAPURA; KECAMATAN BABAKAN; KECAMATAN BEBER; KECAMATAN CILEDUG; KECAMATAN CIWARINGIN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN DUKUPUNTANG; KECAMATAN GEBANG; KECAMATAN GEGESIK; KECAMATAN GEMPOL; KECAMATAN GREDED; KECAMATAN GUNUNGJATI; KECAMATAN JAMBLANG; KECAMATAN KALIWEDI; KECAMATAN KAPETAKAN; KECAMATAN KARANGSEMBUNG; KECAMATAN KARANGWARENG; KECAMATAN KEDAWUNG; KECAMATAN KLANGENAN; KECAMATAN LEMAHABANG; KECAMATAN LOSARI; KECAMATAN MUNDU; KECAMATAN PABEDILAN; KECAMATAN PABUARAN; KECAMATAN PALIMANAN; KECAMATAN PANGENAN; KECAMATAN PANGURAGAN; KECAMATAN PASALEMAN; KECAMATAN PLERED; KECAMATAN PLUMBON; KECAMATAN SEDONG; KECAMATAN SUMBER; KECAMATAN SURANENGGALA; KECAMATAN SUSUKAN; KECAMATAN SUSUKANLEBAK; KECAMATAN TALUN; KECAMATAN TENGAH TANI; KECAMATAN WALED; KECAMATAN WERU; ; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA; SEKRETARIAT DAERAH; SEKRETARIAT DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
07.1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	DINAS SOSIAL
07.1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	DINAS SOSIAL
07.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
07.2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
07.2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
07.2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
07.2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
07.2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
07.2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
07.2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
07.2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
07.4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIAT DAERAH
07.4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIAT DAERAH
07.4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	SEKRETARIAT DPRD
07.5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
07.5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
07.5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
07.5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
07.5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	BADAN PENDAPATAN DAERAH;
07.5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
07.5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
07.5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
07.6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	INSPEKTORAT
07.6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	INSPEKTORAT
07.7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	KECAMATAN ARJAWINANGUN; KECAMATAN ASTANAJAPURA; KECAMATAN BABAKAN; KECAMATAN BEBER; KECAMATAN CILEDUG; KECAMATAN CIWARINGIN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN DUKUPUNTANG; KECAMATAN GEBANG; KECAMATAN GEGESIK; KECAMATAN GEMPOL; KECAMATAN GREDED; KECAMATAN GUNUNGJATI; KECAMATAN JAMBLANG; KECAMATAN KALIWEDI; KECAMATAN KAPETAKAN; KECAMATAN KARANGSEMBUNG; KECAMATAN KARANGWARENG; KECAMATAN KEDAWUNG; KECAMATAN KLANGENAN; KECAMATAN LEMAHABANG; KECAMATAN LOSARI; KECAMATAN MUNDU; KECAMATAN PABEDILAN; KECAMATAN PABUARAN; KECAMATAN PALIMANAN; KECAMATAN PANGENAN; KECAMATAN PANGURAGAN; KECAMATAN PASALEMAN; KECAMATAN PLERED; KECAMATAN PLUMBON; KECAMATAN SEDONG; KECAMATAN SUMBER; KECAMATAN SURANENGGALA; KECAMATAN SUSUKAN; KECAMATAN SUSUKANLEBAK; KECAMATAN TALUN; KECAMATAN TENGAH TANI; KECAMATAN WALED; KECAMATAN WERU;
07.7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	KECAMATAN SUMBER

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
07.7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	KECAMATAN ARJAWINANGUN; KECAMATAN ASTANAJAPURA; KECAMATAN BABAKAN; KECAMATAN BEBER; KECAMATAN CILEDUG; KECAMATAN CIWARINGIN; KECAMATAN DEPOK; KECAMATAN DUKUPUNTANG; KECAMATAN GEBANG; KECAMATAN GEGESIK; KECAMATAN GEMPOL; KECAMATAN GREGED; KECAMATAN GUNUNGJATI; KECAMATAN JAMBLANG; KECAMATAN KALIWEDI; KECAMATAN KAPETAKAN; KECAMATAN KARANGSEMBUNG; KECAMATAN KARANGWARENG; KECAMATAN KEDAWUNG; KECAMATAN KLANGENAN; KECAMATAN LEMAHABANG; KECAMATAN LOSARI; KECAMATAN MUNDU; KECAMATAN PABEDILAN; KECAMATAN PABUARAN; KECAMATAN PALIMANAN; KECAMATAN PANGENAN; KECAMATAN PANGURAGAN; KECAMATAN PASALEMAN; KECAMATAN PLERED; KECAMATAN PLUMBON; KECAMATAN SEDONG; KECAMATAN SUMBER; KECAMATAN SURANENGGALA; KECAMATAN SUSUKAN; KECAMATAN SUSUKANLEBAK; KECAMATAN TALUN; KECAMATAN TENGAH TANI; KECAMATAN WALED; KECAMATAN WERU;
07.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	KECAMATAN KARANGSEMBUNG; KECAMATAN PLUMBON
07.8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
07.8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Tabel 4.14.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM	PP 4: Tata kelola dan pelayanan publik	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketenteraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi
PN 2: Swasembada pangan, energi, air; ekonomi hijau dan biru	PP 2: Ekonomi kerakyatan & kearifan lingkungan	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim
Program Makan Bergizi Gratis	Pembangunan Ekosistem pertanian organik pangan bergizi dan nutrisi tinggi	Festival Olahan Perikanan,
PN 3: Infrastruktur, lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif	PP 3: Pemerataan pembangunan & pengurangan kemiskinan	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial
PN 4: Pembangunan SDM, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender	PP 1: SDM unggul dan berdaya saing	Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja
PN 5: Hilirisasi dan nilai tambah SDA	PP 2: Ekonomi kerakyatan & kearifan lingkungan	Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya

Prioritas Pembangunan Nasional (PN)	Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat (PP)	Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon (PK)
PN 6: Pembangunan dari desa dan pengentasan kemiskinan	PP 3: Pemerataan pembangunan & pengurangan kemiskinan	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien
PN 7: Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi	PP 4: Tata kelola dan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur
PN 8: Harmoni lingkungan dan budaya, toleransi antarumat	PP 4: Tata kelola dan pelayanan publik	Penguatan nilai-nilai budaya lokal dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan

Sumber : Rekap Prioritas e-Perencanaan RPD 2025-2026, Bapperida, 2025

4.3. Inovasi yang Mendukung Penyelesaian Permasalahan dan Isu Strategis

Inovasi daerah merupakan sarana pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendorong inovasi daerah tercermin dalam pemberian Pagu indikatif inovasi daerah kepada perangkat daerah yang memiliki berbagai inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon. Pemberian pagu indikatif inovasi daerah ini sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengusulan Inisiatif, Penilaian, Dan Pemberian Insentif Inovasi Daerah Di Kabupaten Cirebon yang salah satu tujuannya adalah :

- a. memacu dan memotivasi daerah untuk meningkatkan Inovasi dan kreativitas sesuai dengan bentuk Inovasi;
- b. mendorong arah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon agar sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional yang selaras dengan penerapan good governance;
- c. memberikan penghargaan kepada seluruh pemangku kepentingan yang melakukan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Isu dan permasalahan utama pembangunan daerah yang coba untuk diselesaikan melalui inovasi-inovasi dalam Pagu Indikatif Inovasi Daerah ini adalah:

1. Isu lingkungan hidup,

Isu lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon meliputi pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih dan pembuangan sampah liar. Untuk memberi solusi atas isu tersebut perlu adanya gerakan dan kerjasama seluruh masyarakat karena permasalahan utamanya adalah tingkah laku manusia yang kurang menghargai lingkungan dan alam, sehingga perlu sejak dini ditanamkan kepada anak-anak kesadaran untuk menjaga lingkungan hidup. Perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sekolah-sekolah untuk mengintegrasikan edukasi lingkungan ke dalam kurikulum serta mengubah pola pikir seluruh warga agar menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan. Inovasi yang coba

dilaksanakan adalah dari Dinas Pendidikan dengan nama Inovasi “Peran Pendidikan Perubahan Iklim Dalam Meningkatkan PRLH Siswa”.

2. Isu pelayanan kesehatan yang masih kurang optimal, inovasi yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD yaitu dengan proses perencanaan dan evaluasi di rumah sakit menggunakan aplikasi mobile, dan pelayanan farmasi yang merubah Pelayanan Farmasi Konvensional ke Digital-Logistik, Inovasi ini mengubah sistem pengambilan obat yang sebelumnya harus dilakukan langsung di Instalasi Farmasi menjadi layanan berbasis request dan tracking pengiriman ke rumah pasien.
3. Isu pelayanan untuk masyarakat miskin yang belum optimal, inovasi yang akan dilakukan adalah peningkatan pelayanan sosial bagi masyarakat kurang mampu dengan perluasan jenis layanan menjadi 12 (dua belas) pemerlu atensi sosial dari Dinas Sosial dengan inovasi Sistem Pelayanan Pemerlu Atensi Sosial (SIMPLE PAS). Adapun jenis layanan diberikan berupa bantuan :
 - a. Kesehatan;
 - b. Listrik;
 - c. Kesejahteraan Sosial (12 Pemerlu Atensi Sosial);
 - d. Pendidikan
 - e. Perlindungan Jaminan Sosial
4. Isu pengembangan destinasi wisata yang kurang optimal, ada beberapa lokasi wisata perlu diberikan perhatian diantaranya Festival Layang-Layang Bersama Wisata Muara Mundu, Wisata Kubang River Tubing dan Desa Wisata Gegesik Kulon. Destinasi wisata ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah agar semakin berkembang dari atraksi wisata yang ditawarkan maupun sarana prasarana wisata yang memadai sehingga meningkatkan kunjungan wisata. Selain itu, adapula satu destinasi lagi yaitu Kantor Kecamatan Gempol yang memiliki inovasi Kantor Ku, Kebun Ku, Wisata Ku yang memiliki konsep selain sebagai tempat kerja, kantor juga dapat menjadi kebun sayuran dan destinasi wisata untuk warga setempat.
5. Isu rendahnya peran serta pemerintah daerah dalam mendorong industri dan usaha kecil menengah (UKM), inovasi yang akan dilakukan adalah dengan menginisiasi pengembangan klaster industri di Kecamatan/Desa melalui hilirisasi dan pemanfaatan sumber daya alam lokal. Menciptakan, mengajarkan dan mengembangkan diversifikasi produk dari sumber daya alam lokal dan Pendampingan produksi dan akses pemasaran yang lebih luas (retail/pasar modern/pusat perbelanjaan) oleh Dinas Perdagangan. Selain itu, ada juga inovasi untuk mentransformasikan Usaha Mikro agar UM dapat mampu bertransformasi dari pelaku usaha mikro menjadi wirausaha yang berdaya saing dan dapat meningkatkan omsetnya dengan adanya konsultasi Bisnis, pemasaran digital, legalisasi dan display Produk dari Dinkop UMKM.

6. Isu tata kelola pemerintahan daerah yang kurang optimal, inovasi yang akan dikembangkan adalah Sistem Informasi Geographis Pajak Bumi Dan Bangunan (SIGAP) dari Bappenda untuk mempermudah proses pengumpulan pajak bumi dan bangunan, inovasi Indikator Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (ISUN KATON) dari BKAD untuk perbaikan sistem informasi keuangan daerah, Platform Pembelajaran Ebangkom Elmu untuk perbaikan tata kelola pendidikan dan pelatihan di BKPSDM. Selain itu, adapula inovasi Satpol PP Goes To School untuk memfasilitasi gerakan penyuluhan/sosialisasi dalam bentuk presentasi interaktif dari anggota Satpol PP ke Sekolah-Sekolah di Kabupaten Cirebon
7. Isu masih rendahnya kesadaran penduduk dalam Kependudukan dan Keluarga Berencana, inovasi yang akan dilaksanakan adalah inovasi Kelingan Adminduk menuju Desa REMPEG SAWIJI (Desa Sadar Adminduk) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Sekolah Siaga Kependudukan Jadikan Anak Mampu Berencana, BerkeLanjutan dan Berkembang (SEGA JAMBLANG) Dengan Pendekatan Sedulur Sinau Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan (SDSK) di DPPKBP3A.
8. Isu lemahnya data dan informasi di Perangkat Daerah, inovasi yang akan dilaksanakan adalah inovasi Pengembangan Pertanian Berbasis Simtani Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Optimalisasi Luas Tanam, Hasil Panen Dan Sumber Air (Irigasi Dan Tadah Hujan) di Dinas Pertanian, dan Pengembangan Geospatial Decision Support System (DSS), Pengembangan Internet of Things (IoT) untuk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perhubungan untuk pengambilan kebijakan berbasis data di Bapperida Kab. Cirebon.

Isu lemahnya data dan informasi di Perangkat Daerah, inovasi yang akan dilaksanakan adalah inovasi Pengembangan Pertanian Berbasis Simtani Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Optimalisasi Luas Tanam, Hasil Panen Dan Sumber Air (Irigasi Dan Tadah Hujan) di Dinas Pertanian, dan Pengembangan Geospatial Decision Support System (DSS), Pengembangan Internet of Things (IoT) untuk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perhubungan untuk pengambilan kebijakan berbasis data di Bapperida Kab. Cirebon.

4.4. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Cirebon Tahun 2026 difokuskan pada penguatan peran kawasan strategis seperti wilayah perbatasan, kawasan industri timur, pusat pemerintahan Sumber, dan destinasi pariwisata. Pembangunan dilakukan berbasis potensi lokal guna mendorong pertumbuhan wilayah yang merata dan berkelanjutan.

Tabel 4.15.
Indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Proyek Strategis Nasional	Lokasi / Wilayah Terdampak	Sektor / Fokus	Keterangan Penting
1	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Subang – Patimban – Cirebon	Infrastruktur & Logistik	Mendukung akses industri dan pelabuhan ekspor nasional
2	Pelabuhan Patimban (lanjutan & optimalisasi)	Subang	Transportasi Maritim	Hub logistik utama nasional bersama Tj. Priok & Perak
3	Pengembangan Bandara Internasional Kertajati	Majalengka – Cirebon Raya	Transportasi Udara & Pariwisata	Mendukung konektivitas wilayah Rebana
4	Pembangunan Transmisi Pipa Gas Cirebon–Semarang	Cirebon – Brebes – Semarang	Energi & Ketenagalistrikan	Dukungan energi untuk kawasan industri timur Jawa Barat
5	SPAM Regional Jatigede	Sumedang – Cirebon – Indramayu	Infrastruktur Air Minum	Penyediaan air baku regional untuk kawasan Rebana
6	Kawasan Rebana (Rebana Metropolitan Development)	Cirebon, Majalengka, Subang	Kawasan Ekonomi Terpadu	Kawasan prioritas nasional berdasarkan Perpres No. 87/2021
7	Kampus ITB Cirebon	Kabupaten Cirebon	Pendidikan Tinggi & Riset	Mendukung riset dan inovasi wilayah timur Jabar
8	Proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional	Jawa Barat (termasuk Cirebon Raya)	Perumahan & Pemukiman	Dukungan rumah MBR dan urbanisasi terkendali

Sumber : RPJMN 2025-2029

4.4.1. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon di dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Dalam kerangka perencanaan pembangunan provinsi yang mengedepankan prinsip pemerataan dan keadilan antarwilayah, Kabupaten Cirebon memiliki posisi strategis dalam kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Sebagai bagian dari wilayah Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan), Kabupaten Cirebon menjadi simpul pertumbuhan ekonomi kawasan timur Jawa Barat dan sekaligus sebagai koridor utama penghubung wilayah utara–selatan serta barat–timur provinsi.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 menetapkan penguatan pembangunan kewilayahan melalui pengembangan wilayah berdasarkan potensi unggulan dan karakteristik spasial masing-masing daerah. Dalam konteks ini, Kabupaten Cirebon diarahkan untuk memperkuat fungsinya sebagai pusat layanan kawasan, penggerak pertumbuhan industri dan perdagangan, serta pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya dan pesisir. Hal ini tercermin dalam penempatan Kabupaten Cirebon sebagai wilayah prioritas dalam klaster pengembangan kawasan industri timur, revitalisasi kawasan kota lama, serta pembangunan infrastruktur penunjang pusat pertumbuhan.

Kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Barat juga menempatkan Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari kawasan strategis nasional (KSN) dan kawasan strategis provinsi (KSP), terutama dalam mendukung fungsi-fungsi ketahanan pangan, penyediaan air baku, dan penguatan ekonomi kerakyatan. Program pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan kolektor dan konektivitas antarwilayah, serta sistem drainase terpadu, menjadi perhatian utama provinsi dalam memperkuat keterhubungan kawasan Kabupaten Cirebon dengan daerah hinterland maupun pusat-pusat logistik regional.

Lebih lanjut, Kabupaten Cirebon juga masuk dalam peta prioritas pembangunan wilayah perbatasan dan penataan ruang kawasan agropolitan. Ini memberikan peluang percepatan pembangunan di wilayah selatan dan timur Kabupaten Cirebon, yang selama ini relatif tertinggal dari sisi aksesibilitas dan layanan publik. Dalam hal ini, dukungan Provinsi Jawa Barat terhadap pengembangan kawasan Cirebon Timur sebagai kawasan industri dan logistik akan diintegrasikan dengan program pemerintah kabupaten, terutama melalui pembangunan kawasan industri Terpadu (KIT) dan revitalisasi jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Dengan demikian, sinergi kebijakan pembangunan kewilayahan antara RKPD Kabupaten Cirebon dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berimbang, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta memastikan pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh kawasan Kabupaten Cirebon. Pendekatan berbasis kewilayahan ini juga menjadi dasar dalam pengalokasian sumber daya pembangunan secara lebih efektif dan adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Tabel. 4.16.
Indikasi Proyek Strategis Kewilayahan Jawa Barat di Kabupaten Cirebon
Tahun 2026

No.	Nama Proyek Strategis Kewilayahan	Lokasi / Wilayah	Sektor / Fokus	Keterangan
1	Peningkatan Konektivitas Jalan Strategis Ciayumajakuning	Jalur penghubung Cirebon - Majalengka - Kuningan	Infrastruktur & Transportasi	Meningkatkan akses logistik dan mobilitas antarwilayah Rebana
2	Pengembangan Kawasan Industri Cirebon Timur	Kecamatan Gebang dan sekitarnya	Industri & Kawasan Ekonomi	Bagian dari kawasan strategis Rebana Metropolitan
3	Revitalisasi Kawasan Kota Lama Cirebon	Kecamatan Lemahwungkuk dan sekitarnya	Pariwisata dan Warisan Budaya	Penataan kawasan heritage untuk mendukung ekonomi pariwisata
4	Penataan dan Pengembangan Wilayah Perbatasan Jabar–Jateng	Kecamatan Losari – Ciledug	Infrastruktur & Pemerataan Wilayah	Penguatan peran Cirebon sebagai gerbang ekonomi lintas provinsi
5	Integrasi Sistem Transportasi Regional Rebana	Cirebon Raya – Kertajati – Patimban	Transportasi & Mobilitas	Integrasi sistem bus antarkota, jalan kolektor, dan akses tol
6	Penguatan Infrastruktur Perdesaan dan Urban Fringe	Kecamatan Tengah Tani, Klangeran, Arjawinangun	Infrastruktur & Pemukiman	Dukungan akses jalan, air bersih, dan sanitasi di wilayah suburban
7	Pengembangan Infrastruktur Digital Kecamatan	Seluruh kecamatan (tahap bertahap)	Digitalisasi Pemerintahan	Bagian dari program transformasi layanan publik berbasis digital
8	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional	Wilayah Cirebon Barat & Selatan	Air Minum & Permukiman	Kolaborasi antar kabupaten untuk akses air baku dan bersih

Sumber : Diolah Bapperida, 2025

Tabel 4.17

Dukungan Proyek Strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten Cirebon

No	Proyek Strategis Nasional	Dukungan Proyek Strategis Provinsi Jawa Barat	Dukungan Proyek Strategis Kabupaten Cirebon (PK)
1	Program Makan Bergizi Gratis	Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik Pangan Bergizi	Festival Olahan Perikanan Penyediaan Cadangan Pangan Daerah Mitigasi Dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Bagi Pertanian
2	Revitalisasi Sarpras Sekolah Madrasah Yang Berkualitas	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru Dan Toilet SD, SMP
3	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas Di Kab / Kota	Pembangunan Rsud Kab/Kota Dengan Layanan Khusus	Penyediaan Sarpras Rumah Sakit
4	Peningkatan Produksi Daging Sapi Dan Susu Sapi	Pembangunan Ekosistem Pertanian Organik Pangan Bergizi Dan Nutrisi Tinggi Program Peningkatan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Menuju Sentra Produksi	Pembangunan Rumah Potong Hewan (Rph) Pengolahan Pupuk Organik Dari Sampah Bankuedes Jalan Usaha Tani Dan Jaringan Irigasi Desa
5	Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa	Dukungan Untuk Normalisasi Sungai Dan Dan Muara Pada Wilayah Sungai Kewenangan Pusat Dan Normalisasi Sungai Dan Muara Di Ws Provinsi	Normalisasi Sungai Dan Muara
6	Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Transformasi Birokrasi	Program Digitalisasi Pemerintahan
7	Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban	Program Peningkatan Dan Rehabilitasi Infrastruktur Jalan (Jalan Leucir)	Betonisasi Jalan Strategis
8	Pembangunan 3 Juta Rumah	Pembangunan Rumah Rakyat Miskin	Pembangunan Rutilahu
9	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan	Pembangunan Tppas Regional Cirebon Raya	Modernisasi Persampahan, Penyiapan Sarpras Tpa

Sumber : Diolah Bapperida, Tahun 2025

4.4.2. Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Cirebon

Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 diarahkan untuk mewujudkan struktur ruang wilayah yang efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam rangka mengakselerasi transformasi wilayah menjadi simpul pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini sesuai dengan visi penataan ruang Kabupaten Cirebon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon Tahun 2024–2044. Penataan ruang diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah industri, perdagangan, jasa, dan pariwisata bertaraf nasional yang didukung oleh pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pemanfaatan ruang yang terkendali serta adaptif terhadap risiko perubahan iklim dan bencana.

Strategi pembangunan kewilayahan mencakup lima pendekatan utama. Pertama, pengembangan sistem pelayanan perkotaan untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di wilayah Sumber serta penguatan pusat pelayanan regional dan lokal di kawasan Cirebon Raya. Kedua, pemanfaatan peran kecamatan sebagai simpul pengembangan wilayah berdasarkan hierarki pusat kegiatan seperti PKL (Pusat Kegiatan Lokal) dan PPK (Pusat Pelayanan Kecamatan). Ketiga, peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan prasarana dan infrastruktur wilayah secara terpadu guna mempercepat konektivitas antarkawasan, mendukung kegiatan ekonomi, dan memperluas akses pelayanan dasar. Keempat, pengembangan struktur ruang antarwilayah untuk mendorong keterpaduan pembangunan lintas batas administratif, khususnya dengan kawasan penyangga seperti Majalengka dan Indramayu. Kelima, penguatan kawasan lindung dan budidaya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan konservasi sumber daya alam, sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Secara spesifik, wilayah Kabupaten Cirebon terbagi menjadi beberapa zona strategis yang memiliki prioritas pengembangan tersendiri, antara lain: (1) kawasan pesisir utara yang difungsikan sebagai pusat industri kelautan dan logistik; (2) kawasan selatan yang difokuskan pada pertanian produktif dan pelestarian lingkungan; (3) kawasan tengah sebagai koridor perdagangan, jasa dan pusat pemerintahan; serta (4) kawasan timur yang diarahkan menjadi wilayah pertumbuhan industri dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya lokal.

Penerapan kebijakan pembangunan kewilayahan ini juga mendukung integrasi Kabupaten Cirebon dalam pengembangan kawasan strategis Rebana Metropolitan, sesuai dengan perencanaan nasional dan provinsi. Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (WP Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) didorong untuk menjadi gerbang timur pertumbuhan Jawa Barat, dengan

sektor unggulan meliputi pertanian hortikultura, perikanan, agroindustri, pariwisata, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal seperti Batik Trusmi. Dengan demikian, arah pembangunan kewilayahan tahun 2026 diharapkan mampu mendorong sinergi pertumbuhan antarwilayah dan memastikan keterpaduan pembangunan sektoral, spasial, dan temporal secara berkelanjutan..

Secara ringkas Isu, Strategi dan Kebijakan Pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 disajikan pada berikut ini:

Tabel 4.18.
Isu, Strategi dan Kebijakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044

Isu	Kebijakan	Strategi
Sentra Pertanian	a. Pengembangan kawasan pertanian untuk meningkatkan produktivitas Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;	1. Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan regional 2. Mengembangkan jaringan irigasi dan pengembangan lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas pertanian; 3. Merevitalisasi dan merehabilitasi jaringan irigasi teknis dan non teknis yang tidak berfungsi optimal untuk menjaga keberlangsungan pasokan air bagi lahan sawah 4. Meningkatkan aksesibilitas kawasan sentra produksi pertanian terhadap sentra pemasaran pertanian sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian
Sentra Industri	1. Pengembangan kawasan peruntukan industri untuk meningkatkan daya saing kawasan	1. Mendorong penyediaan Kawasan industry secara terpadu dan terintegrasi yang didukung logistik 2. Mengembangkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri 3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat 4. Pengembangan industri secara tematik berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia; 5. Menyediakan sistem transportasi regional yang mendukung Kawasan peruntukkan industri yang handal dan aksesibilitas baik untuk menekan biaya logistik 6. Penataan lokasi kegiatan industri di dalam Kawasan peruntukkan industri untuk meningkatkan minat investasi dan daya saing industri 7. Mengembangkan dan menata sentra industri;kecil dan menengah melalui pembangunan infrastruktur dan distribusi

Isu	Kebijakan	Strategi
		pemasaran yang memadai sesuai dengan rencana pola ruang yang dikembangkan; 8. Mengendalikan perkembangan kegiatan industry yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan mengganggu Kawasan resapan air; 9. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.
Sentra Pariwisata	1. Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata untuk meningkatkan keterpaduan antar pusat aktivitas pariwisata	1. Merehabilitasi kawasan pariwisata yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya; 2. Mengembangkan wisata religi dan wisata bahari; dan 3. Mengembangkan pusat jasa dan promosi pariwisata di kawasan perkotaan 4. Memantapkan akses prasarana dan sarana untuk meningkatkan keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan-kawasan pariwisata dan 5. Meningkatkan keterkaitan kegiatan pariwisata. Lain di provinsi dalam kesatuan tujuan pariwisata

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044

4.5. Program Kolaborasi

Program kolaborasi pembangunan daerah adalah program prioritas yang akan dilaksanakan selama satu periode oleh organisasi perangkat daerah tertentu yang lintas sektor yang diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah dan isu strategis tertentu yang dianggap penting untuk diselesaikan secara komprehensif dan memenuhi berbagai kebutuhan yang dirasakan dan lebih mendayagunakan pemanfaatan potensi daerah yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk pencapaian tujuan dan sasaran daerah.

4.5.1. Program Kolaborasi Ketahanan Pangan

Pemerintah Kabupaten Cirebon menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pendekatan kolaboratif, terintegrasi, dan berbasis kawasan. Program kolaborasi ketahanan pangan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan akses pangan, tetapi juga untuk memperkuat kemandirian dan ketangguhan sistem pangan lokal dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, gejolak harga, dan tekanan sosial-ekonomi.

Melalui Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), Kabupaten Cirebon mengimplementasikan sejumlah strategi yang bersifat lintas sektor dan lintas pelaku,

yang disusun dalam bentuk matriks aksi program kolaboratif tahun 2025–2029. Pada tahun 2026, strategi utama difokuskan pada peningkatan produksi pangan lokal yang beragam dan berkelanjutan, serta penguatan sentra produksi pangan melalui pengembangan kawasan.

Beberapa aksi nyata yang menjadi prioritas meliputi: pengembangan kawasan sentra produksi padi, hortikultura, dan peternakan, revitalisasi budidaya perikanan air tawar, serta optimasi pelelangan ikan (TPI). Dari sisi indikator, target produksi padi meningkat dari 561.634 ton menjadi 576.537 ton, sementara produksi jagung juga didorong naik dari 2.525 ton menjadi 2.550 ton. Adapun indikator fisik seperti jumlah unit kawasan yang direvitalisasi turut menjadi perhatian.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, serta OPD teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon menjadi pilar pelaksana dalam skema kolaborasi ini. Salah satu contoh konkret adalah program penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam bentuk revitalisasi unit budidaya, dengan dukungan anggaran sebesar Rp275 juta, yang bersumber dari dukungan kementerian/lembaga dan disinergikan dengan program daerah.

Kolaborasi ini juga didasarkan pada regulasi dan rujukan teknis nasional, antara lain Kepmentan No. 02/Kpts/RG.040/M/01/2025 tentang Penetapan Kawasan Sentra Produksi Pangan Lokal, serta Permendagri terkait penyusunan RADPG daerah. Selain mendukung capaian indikator ketahanan pangan, program kolaborasi ini juga memperkuat dimensi kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku UMKM pangan melalui pelatihan, pemberdayaan, dan fasilitasi akses pasar.

Dengan pelibatan banyak aktor—termasuk perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat sipil—pemerintah daerah berharap bahwa program kolaborasi ketahanan pangan tahun 2026 akan menciptakan ekosistem pangan daerah yang adil, efisien, dan berdaya tahan tinggi. Pembangunan pertanian dan perikanan secara terpadu ini juga diharapkan menjadi katalisator pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan Kabupaten Cirebon. Adapun detil program kolaborasi ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 4.16 berikut:

Tabel. 4.19
Program Kolaborasi Ketahanan Pangan

No .	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim						
1.1	Peningkatan produksi pangan lokal yang beragam dan berketahanan iklim	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal yang beragam untuk mendukung kemandirian pangan	Jumlah sentra kawasan produksi padi	Unit	1	Dinas Pertanian
			Jumlah sentra kawasan produksi tanaman hortikultura	Unit	15	Dinas Pertanian (Bidang Hortikultura dan Perkebunan)
			Jumlah sentra kawasan peternakan	Unit	1	Dinas Pertanian
			Jumlah unit perikanan budidaya yang direvitalisasi	Unit	2	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan produksi pangan akuatik	Jumlah produksi perikanan budidaya	ton	54.680 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatkan pengembangan bibit / benih pangan unggul bersertifikat	Jumlah benih hortikultura bersertifikat yang dihasilkan	batang	6000	Dinas Pertanian (Bidang Hortikultura dan Perkebunan)

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
		Mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan, berketahanan iklim, termasuk <i>smart farming</i>	Jumlah embung yang direhabilitasi untuk irigasi pertanian	unit	3	Dinas PUTR
1.2	Penyediaan pangan yang aman, bermutu, dan halal	Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pre dan post market	Peraturan Bupati tentang Pembentukan OKKPD	dokumen	1	DKPP
			Pendampingan sertifikasi dan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan yang diterbitkan	unit	10	DKPP
		Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan	Pelatihan GMP dan SSOP kepada UMKM pengolahan hasil perikanan	kegiatan	3	DKPP
		Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan halal	Jumlah dokumen yang memuat data/informasi mengenai skor PPH ketersediaan	Dokumen	1	DKPP
1.3	Penanganan kerusakan dan kehilangan hasil panen (food	Meningkatkan kapasitas pekerja pangan untuk meminimalkan kehilangan hasil panen	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang mendapatkan pelatihan/pendampingan mengenai GHP	Kelompok	2	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
	loss/susut pangan)	Meningkatkan penggunaan teknologi di sektor pertanian/perikanan/peternakan untuk menekan food loss pada proses produksi hingga pengemasan	Jumlah sarana prasarana pertanian yang dimanfaatkan untuk mengurangi susut pangan	unit	5	Dinas Pertanian (Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian)
			Jumlah sarana prasarana perikanan yang dimanfaatkan untuk mengurangi susut pangan	unit	2	DKPP
			Jumlah sarana prasarana pengolahan ikan	unit	4 unit/tahun (Sumber Dana DAK-APBN)	KKP
		Mengembangkan pangkalan data untuk memantau proses produksi, distribusi, dan penyimpanan dalam mengendalikan food loss	Tersedianya data food loss pada komoditas beras	data	1	Dinas Pertanian (Bidang Sarana dan Prasarana)
1.4	Pengayaan nilai gizi mikro pada sumber pangan melalui biofortifikasi	Mengembangkan kawasan padi biofortifikasi untuk peningkatan nilai gizi pangan dan aksi iklim	Luas kawasan padi biofortifikasi untuk peningkatan nilai gizi mikro	Ha	Anggaran APBN	Dinas Pertanian
Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim						
2.1	Penguatan sistem informasi	Memanfaatkan harga pangan sebagai early warning system	Tersedianya data harga pangan Bapok	Laporan		DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
	pasar dan data harga pangan	(EWS) tetap aktif terpantau dan dilaporkan	Tersedianya data harga pangan di 7 Pasar Pemda	Laporan	12	Disperdagin
			Tersedianya prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan melalui neraca pangan	Laporan	1	DKPP
2.2	Peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	Meningkatkan mekanisme distribusi pangan yang mencakup pangan komoditas unggulan daerah dan pangan lokal	Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah	Kali	10	DKPP
2.3	Meningkatkan kemandirian pangan untuk masyarakat di daerah rentan rawan pangan dan terdampak bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengolahan dan diversifikasi pangan lokal untuk adaptasi terhadap perubahan iklim serta mitigasi risiko gagal panen akibat bencana.	Persentase desa rawan pangan yang mendapat sosialisasi pengendalian kerawanan pangan	%	100	DKPP
		Mengembangkan skema perlindungan bagi petani, peternak dan nelayan melalui layanan campuran, seperti konsultasi teknis, skema pinjaman, dan asuransi pertanian, peternakan dan perikanan.	Jumlah luas lahan yang terdaftar program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Ha		Dinas Pertanian (Bidang Prasana dan Sarana Pertanian)
		Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana	Satuan Pendidikan Aman Bencana	sekolah	12	BPBD
			Desa Tangguh Bencana	Desa	62	BPBD

No .	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggun g Jawab
					2026	
2.4	Penguatan distribusi dan sistem logistik pangan	Menyediakan sarana prasarana mendukung distribusi dan logistik pangan serta stabilitas harga pangan	Jumlah pasar rakyat yang direvitalisasi	pasar	1 (Pasar Ciledug)	Disperdagin
			Jumlah pasar rakyat yang memiliki SNI	pasar		Disperdagin
			Analisis rantai pasok/alur distribusi pangan (beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan jagung)	komoditas	2	Disperdagin
			Tersedianya gudang penyimpanan beras	unit	1	DKPP
			Panjang jalan kondisi baik yang dapat dilalui oleh angkutan bahan pangan	km	790,32	Dinas PUTR
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial						
3.1	Penguatan Data Sistem Pangan dan Gizi	Menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan dan mendorong pemanfaatannya hingga tingkat desa/kelurahan	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan/ FSVA setiap tahun dan digunakan untuk menyusun program/kegiatan intervensi kerawanan pangan	laporan	1	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
		Menyusun peta situasi kewaspadaan pangan hingga tingkat desa/kelurahan	Tersedianya situasi kewaspadaan pangan dan gizi dan dimanfaatkan untuk deteksi dini terhadap kerawanan pangan dan gizi	laporan (tingkat Kecamatan)	12	DKPP
		Menyusun data situasi konsumsi pangan tingkat kabupaten	Direktori konsumsi pangan sebagai acuan perbaikan konsumsi pangan untuk pencegahan masalah gizi	laporan	1	DKPP
3.2	Edukasi pola konsumsi pangan lokal beragam, bergizi seimbang, aman, dan halal serta berkelanjutan sejak usia dini	Meningkatkan komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan pesan kunci gizi seimbang berbasis pangan lokal (PGS-PL) ke dalam kurikulum pendidikan dini, dasar, dan menengah	Tersedianya dokumen kurikulum yang mengadopsi pesan kunci PGS-PL untuk jenjang pendidikan dini, dasar dan menengah	dokumen	1	Dinas Pendidikan, Kantor Kemenag
		Melakukan penguatan kampanye gerakan makan ikan (gemarikan)	Jumlah kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) di desa lokus stunting	Kegiatan	3	DKPP
		Kampanye isi piringku berbahan baku lokal yang aman dan halal	Kegiatan Aksi Bergizi di tingkat SMP sederajat, SMA sederajat	kegiatan	3	Dinkes

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
		melalui berbagai kanal komunikasi sejak usia dini	Sosialisasi/pelatihan penganekaragaman pangan bergizi seimbang, aman berbasis sumber daya lokal, ramah lingkungan di desa lokus stunting	kegiatan	1	DKPP
		Melibatkan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi pangan lokal bergizi seimbang yang adaptif perubahan iklim.	Jumlah kampanye digital yang dilakukan influencer/tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal untuk perubahan perilaku konsumsi pangan lokal bergizi seimbang yang adaptif perubahan iklim.	kegiatan	1	DKPP
3.3	Peningkatan frekuensi kegiatan sosialisasi dan edukasi keamanan dan mutu pangan;	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi keamanan pangan segar pre dan post market	Sosialisasi keamanan pangan segar pre dan post market	kegiatan	1	DKPP
3.4	Peningkatan konsumsi protein (hewani dan nabati), vitamin, dan mineral bersumber sayur dan	Meningkatkan konsumsi pangan nabati, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan	Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian	%	2	DKPP

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
	buah untuk mengatasi masalah gizi pada sasaran siklus hidup, terutama untuk ibu hamil dan anak balita (di bawah lima tahun) dan kelompok rentan rawan pangan					
3.5	Pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif serta penyediaan dan pemanfaatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP- ASI) berbasis pangan lokal	Menetapkan regulasi mengenai ASI eksklusif	Persentase bayi usia 0-5 bulan mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	%	76	Dinas Kesehatan

No	Strategi	Aksi	Indikator	Satuan	Target	OPD Penanggung Jawab
					2026	
3.6	Penguatan Akses Air Bersih, Sanitasi, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk Mendukung Ketahanan Gizi yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim		Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	persentase	22,8	DPUTR
3.7	Pengendalian pemborosan pangan (food waste/sisa pangan)	Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect	Tersedianya inisiatif untuk membantu distribusi pangan berlebih/ugly food/sisa makanan dalam mencegah terjadinya food waste	kegiatan	1	DKPP

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

4.5.2. Program Kolaborasi Penurunan Stunting

Upaya penurunan stunting di Kabupaten Cirebon pada Tahun 2026 dilaksanakan secara kolaboratif melalui integrasi intervensi spesifik dan sensitif yang melibatkan berbagai sektor terkait. Program kolaborasi ini didesain sebagai respons terhadap prevalensi stunting yang masih signifikan di beberapa wilayah kecamatan, serta komitmen nasional dan provinsi untuk mencapai target prevalensi stunting di bawah 14 persen.

Pemerintah Kabupaten Cirebon mengintegrasikan program lintas sektor dengan fokus pada pencegahan sejak dini, perbaikan gizi, serta pemenuhan layanan dasar kesehatan dan pangan. Strategi kolaboratif tersebut diwujudkan melalui kegiatan yang terangkum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Stunting, yang menyatukan dukungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, serta pemangku kepentingan lainnya, baik dari pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, maupun mitra pembangunan.

Beberapa program prioritas yang menjadi bagian dari kolaborasi tahun 2026 mencakup:

- **Pemeriksaan Ibu Hamil dan Calon Pengantin**, melalui skrining kesehatan reproduksi dan penanganan kasus risiko tinggi bersalin dan nifas.
- **Pemeriksaan Kesehatan Balita**, termasuk penanganan kasus balita gizi buruk dan kecacingan.
- **Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pemulihan** bagi ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan balita dengan status gizi sangat kurus.
- **Pemantauan Pola Makan dan Gizi**, termasuk kegiatan edukasi gizi dan pemantauan konsumsi.
- **Intervensi Sensitif**, seperti penyediaan benih kacang-kacangan dan umbi-umbian, sebagai upaya penguatan ketahanan pangan keluarga.

Program ini secara substantif bersumber dari program “Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat” serta “Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian”, dengan pengampu utama Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian. Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan bentuk konkret pendekatan integratif dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, dengan dukungan data yang lebih tajam, pelibatan masyarakat dan lembaga desa, serta sinergi kelembagaan di tingkat kecamatan.

Dengan implementasi program kolaborasi yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Cirebon optimis bahwa pada tahun 2026

prevalensi stunting dapat ditekan secara signifikan. Keberhasilan program ini juga akan turut mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam penghapusan kelaparan dan peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Adapun detil program kolaborasi penurunan stunting dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut:

Tabel 4.20
Tagging Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kolaborasi Penurunan Stunting Tahun 2026

NO	INTERVENSI	DESKRIPSI KEGIATAN	INDIKATOR PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Intervensi Spesifik					
	Spesifik	- Skrinning layak hamil pada catin	Pemeriksaan Ibu Hamil	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan
	Spesifik	- Skrinning Kasus Ibu Hamil bersalin/nifas risiko tinggi pada puskesmas dan rujukan ke faskes sekunder. Serta penanganan kasus Bumil KEK/Anemia		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Dinas Kesehatan
	Spesifik	- Penanganan kasus Balita Gizi Buruk	Pemeriksaan Kesehatan Bayi	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Spesifik	- Penanganan kasus kecacingan pada balita dan bumil		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Spesifik	- Pemberian PMT Pemulihan pada Bumil KEK	Konsumsi Pola Makan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Spesifik	- Pemantauan Pemberian PMT Pemulihan pada Bumil KEK		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan

NO	INTERVENSI	DESKRIPSI KEGIATAN	INDIKATOR PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Spesifik	Edukasi dan Sosialisasi serta pemantauan dan evaluasi cakupan pemberian ASI Eksklusif pada Bayi 0-<6 bulan	Gizi Bumil dan Bayi	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Spesifik	Edukasi, pemantauan dan evaluasi cakupan pemberian MP-ASI pada Baduta		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Spesifik	- Pemberian PMT Balita Gizi Kurang		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Spesifik	Pemantauan pemberian PMT Pemulihan Balita Gizi kurang		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
2	Intervensi Sensitif					
	Sensitif	Sosialisasi dan distribusi benih kacang/umbi melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L)		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan SDG hewan/tanaman	Dinas Pertanian
	Sensitif	- Pelatihan dan Pemberdayaan Latar Pangan Lestari (Kampung) Beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Ketahanan Pangan
	Sensitif	- Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Peredaran (<i>Post Market</i>)		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Ketahanan Pangan

NO	INTERVENSI	DESKRIPSI KEGIATAN	INDIKATOR PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Sensitif	- Pemeriksaan pangan produksi IRTP (Industri Rumah Tangga Pangan)		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Disperdagin
5	Sensitif	Pendataan Rumah tangga 1000 HPK	Kondisi Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	DPPKBP3A
	Sensitif	- Pemantauan pelaksanaan BPNT		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dinas Sosial
	Sensitif	- Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan bidang boga (PEKKA-PRIMA)		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A
	Sensitif	- Bantuan pemberdayaan sosial untuk PMKS Produktif (PERJAKA)		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
	Sensitif	- Sosialisasi Gizi Seimbang, ASI, Pembatasan GGL, Kesehatan Reproduksi, dan Bahaya merokok bagi anak dan keluarga				Dinas Kesehatan

NO	INTERVENSI	DESKRIPSI KEGIATAN	INDIKATOR PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
	Sensitif	Fasilitasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah pada catin (Monev ke beberapa KUA)		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A
	Sensitif	- Pelatihan Hak-Hak Anak (Rebon)		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	DPPKBP3A
	Sensitif	- Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pendampingan pemberian ASI, Pembuatan MPASI, dan gizi untuk Bumil dan balita (kader pada 5 kecamatan kasus stunting tertinggi)		Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
	Sensitif	Sosialisasi dan edukasi terhadap orang tua peserta didik dalam pencegahan anak stunting		Program Pengelolaan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan

NO	INTERVENSI	DESKRIPSI KEGIATAN	INDIKATOR PRIORITAS	PROGRAM	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
6	Sensitif	- Pembinaan Tim Pembina Posyandu	Infrastruktur Kesehatan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD
7	Sensitif	- Pembangunan STBM bagi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak	Lingkungan RUTILAHU dan Air Bersih	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	DPUTR
	Sensitif	- Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni di 5 kecamatan dengan kasus stunting tertinggi		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	DPKPP

Sumber : Diolah Bapperida, 2025

4.5.3. Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 diarahkan untuk menysasar akar permasalahan melalui strategi kolaboratif dan konvergen yang melibatkan berbagai perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pusat, serta mitra non-pemerintah. Strategi kolaborasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat miskin, tetapi juga pada pengurangan beban pengeluaran dan pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan.

Sebagaimana dirangkum dalam matriks Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, terdapat tiga pendekatan strategis utama: (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan (3) meminimalkan kantong-kantong kemiskinan kronis melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan komunitas. Pendekatan ini diterjemahkan dalam puluhan sub-kegiatan dan rencana aksi yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran OPD, serta dikawal melalui sistem tagging SIPD dan Klarifikasi Rencana Aksi Nasional.

Salah satu pilar utama dari strategi pengurangan beban pengeluaran adalah pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di sektor kesehatan, khususnya bagi kelompok rentan. Kegiatan yang telah dialokasikan mencakup pengelolaan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan balita. Sebagai contoh, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon menargetkan sebanyak 39.583 ibu hamil, 39.450 ibu bersalin, 37.937 bayi baru lahir, dan 154.658 balita memperoleh akses layanan kesehatan dasar secara optimal pada tahun 2026. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung layanan ini mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Selain sektor kesehatan, program kolaborasi ini juga menjangkau intervensi multisektor seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, dan perlindungan sosial. Setiap kegiatan dirancang dengan pendekatan yang menysasar langsung rumah tangga miskin atau kelompok rentan di wilayah-wilayah dengan prevalensi kemiskinan tinggi. Kegiatan tersebut di antaranya mencakup pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja miskin, penyediaan bantuan usaha mikro bagi perempuan kepala keluarga, serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni berbasis padat karya.

Program kolaborasi ini dikawal oleh OPD teknis seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi lainnya. Selain itu, kolaborasi juga diperkuat melalui dukungan dari BAZNAS, Rumah Zakat, dan komunitas filantropi lokal sebagai pelengkap sumber daya pembangunan.

Melalui pendekatan yang sinergis, berbasis data, dan terintegrasi antarprogram, Pemerintah Kabupaten Cirebon optimistis bahwa laju penurunan angka kemiskinan dapat ditingkatkan secara signifikan. Program kolaborasi ini menjadi tulang punggung dalam mendukung sasaran nasional penghapusan kemiskinan ekstrem dan pengurangan ketimpangan sosial secara berkelanjutan. Secara detil program kolaborasi penanggulangan kemiskinan dapat di lihat pada Tabel 4.21 berikut:

Tabel 4.21
Program Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan ibu Hamil.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	39.583 orang	Dinas Kesehatan
2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin.	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	39.450 orang	Dinas Kesehatan
3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	37.937 orang	Dinas Kesehatan
4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	154.658 orang	Dinas Kesehatan
5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	323.701 orang	Dinas Kesehatan

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pemenuhan pelayanan SPM Kesehatan dengan menyediakan barang dan jasa untuk pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	253.093 orang	Dinas Kesehatan
7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi mencakup deteksi dini, edukasi, pengobatan, dan pemantauan. Dengan tujuan ntuk meningkatkan kualitas hidup penderita Hipertensi, mencegah komplikasi, dan memastikan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	Dinas Kesehatan
8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Melaksanakan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus mencakup deteksi dini, edukasi, pengobatan, dan pemantauan. Dengan tujuan ntuk meningkatkan kualitas hidup penderita Diabetes Melitus, mencegah komplikasi, dan memastikan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	Persentase penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	Dinas Kesehatan

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi: pemeriksaan kesehatan jiwa; edukasi; dan tata laksana.	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	100%	Dinas Kesehatan
			a) Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi: pemeriksaan status mental dan wawancara			
			b) Edukasi meliputi kepatuhan minum obat kepada pasien dan keluargacaregiver.			
			c) Melakukan penatalaksanaan awal dan melakukan rujukan sesuai indikasi. Tindak lanjut rujuk balik dan pemantauan minum obat.			
10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi: pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda; pemeriksaan penunjang; dan edukasi	Jumlah orang terduga TBC yang dilayani sesuai standar	43134 Orang	Dinas Kesehatan
			dengan kegiatan:			
			1. Active case finding			
			2. Passive case Finding			

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
			3. Pertemuan Jejaring internal dan eksternal			
			4. Validasi data			
			5. Monitoring dan evaluasi			
11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayan Kesehatan Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar melalui kegiatan	Jumlah orang terduga menderita HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	64300 Orang	Dinas Kesehatan
			1. pertemuan cluster HIV			
			2. pertemuan koordinasi program HIV dengan LSM			
			3. kegiatan MVCT			
			4. pertemuan validasi data SIHA			
			5. pertemuan validasi data TB-HIV			
			6. bimbingan teknis program HIV ke layanan			
12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah pelaksanaan kegiatan penanganan masyarakat terdampak bencana melalui penyelenggaraan Pos Kesehatan	60 Orang	Dinas Kesehatan

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemenuhan pelayanan kesehatan gizi pada remaja putri, ibu hamil, bayi dan balita dengan sistem surveilans dari deteksi dini, penemuan kasus hingga intervensi permasalahan gizi	Jumlah balita yang dilakukan pemantauan status gizi	162532 balita	Dinas Kesehatan
14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terkelolanya pelayanan kesehatan lingkungan melalui kegiatan Pertemuan perencanaan dan evaluasi kesling, monitoring kegiatan STBM dan Inspeksi Kesehatan lingkungan (IKL) rumah	Jumlah data KK miskin yang memiliki akses jamban, air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah cair rumah tangga, data pengukuran kualitas lingkungan	262675 kk	Dinas Kesehatan
15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) ; Skizofrenia, Psikotik Akut, Ggn Waham Menetap, Ggn Skizoafektif, Ggn Depresi, Ggn cemas, Ggn Campuran Cemas & Depresi yang memperoleh layanan di Fasyankes	21535 orang	Dinas Kesehatan
16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA yaitu Penyalahguna NAPZA mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Fasyankes	60 orang	Dinas Kesehatan

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
17		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksanannya pelayanan kesehatan penyakit menular, dengan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Jumlah dokumen pencegahan dan pengendalian penyakit menular	50 dokumen	Dinas Kesehatan
18		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksanannya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jumlah penduduk miskin yang diberikan PBI daerah)	365.610 jiwa	Dinas Kesehatan
19	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksanannya pendataan PHBS Tatanan Keluarga	Jumlah Rumah Tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	32.525 RT	Dinas Kesehatan
20		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Melaksanakan penanganan bendung melalui Rehabilitasi	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	20 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21		Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Melaksanakan Pemeliharaan pada Bangunan penampungan Air	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	85 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22		Pembangunan Tanggul Sungai	Melaksanakan Pembangunan pada tanggul sungai dan saluran Pembuang	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	8,5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23		Rehabilitasi Tanggul Sungai	Melaksanakan Rehabilitasi pada tanggul sungai dan saluran Pembuang	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	1,2 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
24		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Penanganan Jaringan Irigasi melalui Rehabilitasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	15,5 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Melaksanakan Pemeliharaan pada Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	35 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Melaksanakan Pembangunan dan Peningkatan Penyediaan Air Minum Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Air Minum yang dibangun dan ditingkatkan	1.500 SR	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Melaksanakan Penyediaan Air Minum melalui Pembangunan Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	13,46 Liter/Detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Pengelolaan dan Pengambangan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah yang memiliki akses pengolahan Air Limbah di tahun Eksisting	1.000 RT	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	10 Dokumen	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
30		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki di Kawasan Permukiman Kumuh	50 unit rumah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO	STRATEGI	NAMA SUB KEGIATAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA RENCANA AKSI	TARGET KINERJA	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
31		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2 unit rumah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
32		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman Kumuh yang Dipugar Diremajakan/ Dipugar	5 ha	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
33		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	300 unit rumah	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				
34	Mengurangi Beban Pengeluaran	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Verifikasi, Validasi, dan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	Jumlah DTSEN terverifikasi, validasi, dan pemutakhiran	244.446 orang	Dinas Sosial
35		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi untuk Verifikasi Usulan, Pendampingan, Pemberdayaan, dan Monitoring Evaluasi bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat	terlaksananya verifikasi Usulan, Pendampingan, Pemberdayaan, dan Monitoring Evaluasi bagi Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Barat		Dinas Sosial

Sumber : Diolah Bapperida, 2025

4.6 Program Prioritas Kepala Daerah

Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji-janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, atau kedalam Strategi. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.

Penentuan program prioritas juga memperhatikan poin-poin penting janji politik kepala daerah terpilih. Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 menerjemahkan Visi dan Misinya melalui program dan janji politiknya sebagai berikut:

❖ CIREBON BERSIH

1. Penyelenggaraan semua sistem pelayanan pemerintahan berbasis digital (*smart government*)
2. Peningkatan alokasi dana pembangunan desa dan kelurahan (desa & Kelurahan)
3. Peningkatan kapasitas fiskal daerah (pendapatan asli daerah)
4. Mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan publik basis digital/teknologi Informasi

❖ CIREBON INOVATIF

1. Penyelenggaraan forum ilmiah/event/gelar karya/Festival Inovasi, riset unggulan, lomba inovasi
2. Kampung pintar dan inovatif

❖ CIREBON MAJU

1. Kampung Sehat
2. Kampung literasi
3. Penyelenggaraan forum investasi dan kewirausahaan tingkat nasional (seminar, temu bisnis, pameran produk, dll)
4. Penataan dan Pengembangan infrastruktur dasar kawasan peruntukan industri
5. Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon produk kreatif skala Regional dan nasional (Kemilau Batik Trusmi, Gerabah, Rotan, dll)
6. Pengembangan kawasan wisata tematik
7. Penataan infrastruktur pertanian (saluran irigasi dan jalan usaha tani)
8. Pengembangan sentra produksi garam dan produk turunan garam
9. Betonisasi jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten)
10. Pengembangan PJU Pintar (smart PJU) basis digital/teknologi informasi penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED, Meterisasi Smart Kwh
11. Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan)
12. Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani
13. Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan

- 14. Akselerasi Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan
- 15. Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD)
- 16. Cirebon Investment Summit
- 17. Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional
- 18. Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus(BKK) dan pola magang ketenagakerjaan
- 19. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan
- 20. Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru
- 21. Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri)
- 22. Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas

❖ CIREBON AGAMIS

- 1. Penyelenggaraan forum dialog ulama, umaroh dan masyarakat
- 2. Penyelenggaraan kecamatan bersholawat

❖ CIREBON AMAN

- 1. Kampung bersih
- 2. Modernisasi pengolahan sampah
- 3. Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir
- 4. Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air
- 5. Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah
- 6. Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal
- 7. Pengembangan sistem informasi manajemen mitigasi kebencanaan, keselamatan dan Lingkungan Hidup basis IT
- 8. Cirebon Bebas Banjir: Sumur Resapan, kolam retensi/embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana

Tabel 4.22
Integrasi Program Prioritas Kepala Daerah dengan Program Nomenklatur dan Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Sinkronisasi Program KEPMEN 900	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
VISI 1 : CIREBON BERSIH				
1	Penyelenggaraan Semua Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital (Smart Government)	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Arsip		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi		Dinas Komunikasi Dan Informatika

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Sinkronisasi Program KEPMEN 900	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
2	Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan)	Program Administrasi Pemerintahan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Kecamatan
		Program Penataan Desa		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (Pendapatan Asli Daerah)	Program Kerja Sama Penanaman Modal		DPMPTSP
		Program Pengembangan UMKM		Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
4	Mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Layanan Publik Basis Digital/Teknologi Informasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		Dinas Komunikasi Dan Informatika
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Kecamatan
VISI 2 : CIREBON INOVATIF				
1	Penyelenggaraan Forum Ilmiah/Event/Gelar Karya/Festival Inovasi, Riset Unggulan dan Lomba Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
2	Kampung Pintar Dan Inovatif	Program Penataan Desa	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
VISI 3 : CIREBON MAJU				
1	Kampung Sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber		Dinas Kesehatan

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Sinkronisasi Program KEPMEN 900	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
		Daya Manusia Kesehatan		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		Dinas Kesehatan
2	Kampung Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
3	Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional Dan Nasional (Pameran Kemilau Batik Trusmi Dan Ciwaringin, Gerabah, Rotan, Dll)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	• Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya; • Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
4	Penyelenggaran Forum Investasi Dan Kewirausahaan Tingkat Nasional (Seminar, Temu Bisnis, Pameran Produk, Dll)	Program Pengembangan Umkm		Dinas Koperasi Dan Umkm
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5	Pengembangan Kawasan Wisata Tematik	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
6	Pengembangan Sentra Produksi Garam Dan Produk Turunan Garam	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Kelautan Dan Perikanan
7	Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan)	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Kelautan Dan Perikanan
8	Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan	Program Penyuluhan Pertanian		Dinas Pertanian

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Sinkronisasi Program KEPMEN 900	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	kelembagaan kelompok tani			
9	Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Dinas Pertanian
10	Akselerasi Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan	Program Perekonomian dan Pembangunan		Sekretariat Daerah
11	Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		Dinas Pertanian
12	Cirebon Investment Summit	Program Pemngembangan Iklim Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13	Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional	Program Pengembangan UMKM		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
14	Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus (BKK) dan pola magang ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Ketenagakerjaan
15	Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja		Dinas Ketenagakerjaan
16	Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
17	Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat		Sekretariat Daerah
18	Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas	Program Perekonomian dan Pembangunan		Sekretariat Daerah

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Sinkronisasi Program KEPMEN 900	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
19	Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien	Dinas Pertanian
20	Penataan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Kawasan Peruntukan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
21	Betonisasi Jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten)	Program Penyelenggaraan Jalan		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
22	Pengembangan PJU Pintar (Smart PJU) Basis Digital/Teknologi Informasi, Penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED Meterisasi Smart Kwh	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Dinas Perhubungan
VISI 4 : CIREBON AGAMIS				
1	Penyelenggaraan Forum Dialog Ulama, Umaroh Dan Masyarakat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;	Sekretariat Daerah
2	Penyelenggaraan Kecamatan Bersholawat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Sekretariat Daerah
VISI 5 : CIREBON AMAN				
1	Kampung Bersih (Pesona Kasih = Pengelolaan Sampah Organik-Anorganik Kampung Bersih)	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim serta meningkatkan ketahanan energi, air dan pangan	Dinas Lingkungan Hidup
2	Modernisasi Pengolahan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan		Dinas Lingkungan Hidup
3	Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Dinas Lingkungan Hidup
4	Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal	Program Pengelolaan		Dinas Lingkungan Hidup

No	Program Prioritas Kepala Daerah	Sinkronisasi Program KEPMEN 900	Prioritas Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah
	lindung dan resapan air	Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		
5	Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Dinas Pertanian
6	Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal	Program Pengawasan Keamanan Pangan		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
7	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Kebencanaan Dan Keselamatan Basis IT	Program Penanggulangan Bencana	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi;	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Aplikasi Informatika		Dinas Komunikasi Dan Informatika
8	Cirebon Bebas Banjir: Sumur Resapan, kolam retensi/ embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Kecamatan

Tabel 4.23
Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026

Program Prioritas Kepala Daerah	Tahun 2026
VISI 1 : CIREBON BERSIH	
Penyelenggaraan Semua Sistem Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital (<i>Smart Government</i>)	2 aplikasi
Peningkatan Alokasi Dana Pembangunan Desa Dan Kelurahan (Desa dan Kelurahan)	424
Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah (Pendapatan Asli Daerah)	7%
Mewujudkan Kecamatan Sebagai Pusat Layanan Publik Basis Digital/Teknologi Informasi	40 Kec
VISI 2 : CIREBON INOVATIF	
Penyelenggaraan Forum Ilmiah/Event/Gelar Karya/Festival Inovasi, Riset Unggulan dan Lomba Inovasi	1 event
Kampung Pintar Dan Inovatif	5 Desa
VISI 3 : CIREBON MAJU	
Kampung Sehat	7 Desa
Kampung Literasi	3 Desa
Penyelenggaraan Pekan Raya Cirebon Produk Kreatif Skala Regional Dan Nasional (Pameran Kemilau Batik Trusmi Dan Ciwaringin, Gerabah, Rotan, Dll)	1 event

Program Prioritas Kepala Daerah	Tahun 2026
Penyelenggaraan Forum Investasi Dan Kewirausahaan Tingkat Nasional (Seminar, Temu Bisnis, Pameran Produk, Dll)	1 event
Pengembangan Kawasan Wisata Tematik	5 kawasan
Pengembangan Sentra Produksi Garam Dan Produk Turunan Garam	3 lokasi
Gelaran Kuliner Berbahan Dasar Ikan dan Hasil Laut Skala Regional dan Nasional (Pengembangan produk olahan hasil perikanan kelautan)	1 lokasi
Modernisasi alat produksi pertanian (alsintan) dan kelembagaan kelompok tani	1 jenis alsintan, 424 gapoktan
Pengembangan kawasan pertanian ramah lingkungan	1 kawasan
Akselerasi Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) pangan	0
Pengembangan insentif bagi lahan sawah abadi (LSD)	2 jenis insentif
Cirebon Investment Summit	1 kali
Pengembangan ekonomi digital di pasar tradisional	9 pasar
Memperbanyak job fair, job canvassing, bursa kerja khusus (BKK) dan pola magang ketenagakerjaan	2 paket
Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan	1 SIM
Pengembangan pasar produk kreatif Cirebon – Redesain manajemen pasar batik Weru	1 lokasi
Pengembangan kerja sama dengan daerah maju (dalam negeri dan luar negeri)	1 kali
Penguatan kolaborasi program pembangunan daerah dengan dunia usaha, media, perguruan tinggi, dan komunitas	1 kali
Penataan Infrastruktur Pertanian (Saluran Irigasi Dan Jalan Usaha Tani)	11 lokasi
Penataan Dan Pengembangan Infrastruktur Dasar Kawasan Peruntukan Industri	88%
Betonisasi Jalan (Kemantapan jalan pada jalur jalan strategis (JJS) Kabupaten)	88%
Pengembangan PJU Pintar (Smart PJU) Basis Digital/Teknologi Informasi, Penambahan PJU Baru, Penggantian lampu ke LED Meterisasi Smart Kwh	500 titik 1000 Lampu 100 Kwh
VISI 4 : CIREBON AGAMIS	
Penyelenggaraan forum ilmiah, dialog, kebangsaan, teknologi, ilmu pengetahuan dan agama dengan para tokoh agama dan masyarakat	1 FUU
Pembangunan dan penyediaan bantuan sarana dan prasarana tempat peribadatan serta pengembangan gedung untuk penguatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) sebagai tempat kajian keilmuan Alquran dan alhadist	40 Kec
Penyelenggaraan festival seni budaya religi/pesantren dan kecamatan bersholawat	40 Kec
Penyelenggaraan kegiatan Kampung Mengaji dan pengajian ASN, perangkat desa, organisasi wanita, PKK dan dharma wanita	40 Kec
Program beasiswa pendidikan dan perlengkapan sekolah untuk anak yatim serta penghafal Quran, disertai jaminan kesejahteraan dan kesehatan bagi guru ngaji, imam masjid, dan imam mushola.	40 Kec
Penguatan ekonomi jamaah masjid melalui pengembangan wakaf serta optimalisasi Zakat Mal, Infaq, dan Sedekah (ZIS) untuk pemberdayaan ekonomi produktif umat	-
VISI 5 : CIREBON AMAN	
Kampung Bersih (Pesona Kasih = Pengelolaan Sampah Organik-Anorganik Kampung Bersih)	40 Desa
Modernisasi Pengolahan Sampah	1 lokasi
Pengembangan perlindungan pesisir – penanaman mangrove di pesisir	1 lokasi
Penghijauan lahan kritis/lahan tidak produktif/areal lindung dan resapan air	1 lokasi
Bantuan pupuk organik bagi petani/penggarap sawah	100 ton
Ketersediaan bahan pangan yang terjangkau, sehat, aman dan halal	11 jenis kepokmas
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Mitigasi Kebencanaan Dan Keselamatan Basis IT	-
Cirebon Bebas Banjir:	50 Titik

Program Prioritas Kepala Daerah	Tahun 2026
Sumur Resapan, kolam retensi/ embung dan biopori; Normalisasi sungai/saluran pada kejadian banjir; Kampung tangguh bencana	✓ 2 Desa

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH



Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2026 disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon tahun 2026, disusun dalam rangka memenuhi sasaran tahun pertama RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Rencana kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, dipisahkan antara (1) rencana kerja yang bersifat strategis guna menjawab permasalahan dan isu strategis daerah dan (2) rencana kerja yang merupakan representasi dari prioritas sektoral yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Pembangunan diselenggarakan secara menyeluruh pada semua sektor guna menjamin pelayanan yang menjangkau ke berbagai kalangan dan kebutuhan masyarakat.

Adapun, kerangka pendanaan pembangunan dipisahkan antara (1) gambaran makro sumber penerimaan dan alokasi belanja atau pengeluarannya dan (2) pendanaan indikatif yang dialokasikan kepada program dan kegiatan perangkat daerah sesuai kerangka perencanaan. Suatu kerangka pendanaan harus dapat menjamin terdananya kebutuhan program dan kegiatan yang paling prioritas dan mendesak dari sisi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, sesi pendanaan merupakan prasyarat mutlak agar suatu rencana strategis memiliki peluang yang besar untuk mewujudkan sasarannya.

Rencana program dan kegiatan tahun 2026 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial.

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2026 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan dari proses penyusunan Rancangan Awal RKPD sampai dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan pada tahun 2025 untuk RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026. Musrenbang menjadi salah satu media untuk

membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Cirebon.

Penentuan program dan kegiatan daerah tahun 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan.

Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten, APBD provinsi, dan APBN) juga memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, serta sumber pendanaan lainnya.

5.1. Sinkronisasi Dan Keterkaitan Antara Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Dengan Provinsi Jawa Barat Dan Nasional Pada RKPD 2026

Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD 2026 merupakan salah satu acuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. Keterkaitan program prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.1

Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam RKPD 2026 dan Dukungan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Tahun 2026

RKPD PROVINSI JAWA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPP	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
1	01	MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKARAKTER UNGGUL			1.983.646.053.769,00
			01.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.763.978.384.069,00
			01.1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.157.838.600,00
			01.1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	146.575.549.000,00
			01.1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	293.598.800,00
			01.1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	40.997.900,00
			01.1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.521.000,00
			01.2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.201.426.500,00
			01.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	314.139.500,00
			01.2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.819.100,00
			01.2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	238.492.800,00
			01.2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	26.202.400,00
			01.2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	535.728.600,00
			01.2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	275.062.800,00
			01.2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	913.399.900,00
			01.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	222.462.700,00
			01.2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	379.137.000,00
			01.2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	684.608.400,00
			01.2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN	19.313.543.700,00
			01.2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00
			01.2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	260.317.500,00
			01.2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.344.549.500,00
			01.2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	69.911.800,00

RKPD PROVINSI JAWA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPP	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			01.2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.206.647.800,00
			01.2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.820.100,00
			01.2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	391.529.400,00
			01.2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	259.364.900,00
2	02	MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN DAN INVESTASI BERBASIS KEARIFAN LINGKUNGAN YANG TIDAK EKSPLOITATIF			161.114.748.087,00
			02.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	80.162.434.017,00
			02.1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.520.076.200,00
			02.2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.908.177.900,00
			02.2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	85.344.800,00
			02.2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	245.808.600,00
			02.2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	311.648.500,00
			02.2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.852.488.700,00
			02.2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.314.446.600,00
			02.2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	284.949.500,00
			02.2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	83.521.900,00
			02.2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	124.238.600,00
			02.2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	167.546.100,00
			02.2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.871.717.590,00
			02.2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	22.830.000,00
			02.2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	162.391.000,00
			02.2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	303.323.000,00
			02.2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	119.380.000,00
			02.2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	733.487.100,00
			02.2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	677.509.800,00

RKPD PROVINSI JAWA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPP	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			02.2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	370.000.000,00
			02.2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.100.108.500,00
			02.2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	420.005.300,00
			02.2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130.000.000,00
			02.2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	235.000.000,00
			02.3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.643.948.100,00
			02.3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.670.585.200,00
			02.3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	155.284.600,00
			02.3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.921.548.000,00
			02.3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.347.372.400,00
			02.3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.384.802.100,00
			02.3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	45.000.000,00
			02.3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70.258.000,00
			02.3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.871.232.700,00
			02.3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.868.583.000,00
			02.3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	180.352.800,00
			02.3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.043.249.000,00
			02.3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	74.943.600,00
			02.3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	21.617.800,00
			02.3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	204.021.400,00
			02.3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	496.207.180,00
			02.3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	435.404.800,00
			02.3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	659.995.000,00
			02.3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.423.913.800,00
			02.3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.280.291.900,00

RKPD PROVINSI JAWA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPP	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			02.3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	13.881.400,00
			02.3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	95.821.600,00
3	03	MENGURANGI DISPARITAS PEMBANGUNAN DAERAH PERKOTAAN PEDESAAN, SERTA MISKIN DAN KAYA			427.262.121.610,00
			03.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.238.034.012,00
			03.1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.791.999.800,00
			03.1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.300.000.000,00
			03.1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.400.000.000,00
			03.1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.000.000.000,00
			03.1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.373.372.300,00
			03.1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.250.000.000,00
			03.1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	181.176.515.800,00
			03.1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00
			03.1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.443.000.000,00
			03.1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	469.883.900,00
			03.1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.646.416.000,00
			03.1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.060.082.900,00
			03.1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.162.839.700,00
			03.1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.664.096.800,00
			03.1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.435.633.600,00
			03.1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	859.593.900,00
			03.1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	399.794.500,00
			03.1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	56.720.000,00
			03.2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	487.979.400,00
			03.2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	366.262.600,00
			03.2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	152.289.700,00
			03.2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	84.484.900,00

RKPD PROVINSI JAWA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPP	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			03.2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	191.773.400,00
			03.2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	104.999.700,00
			03.2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	434.999.900,00
			03.2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.307.537.500,00
			03.2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.105.796.900,00
			03.2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.903.448.298,00
			03.3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	111.775.700,00
			03.7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.692.908.900,00
			03.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	39.881.500,00
4	04	MEWUJUDKAN MASYARAKAT DAN BIROKRASI YANG ADAPTIF, BERORIENTASI PELAYANAN, SESUAI DENGAN PRINSIP GOOD AND CLEAN GOVERNANCE			1.823.549.650.251,00
			04.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	928.460.328.356,00
			04.1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.325.947.400,00
			04.1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.995.297.400,00
			04.2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	936.886.200,00
			04.2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	144.880.900,00
			04.2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	476.160.800,00
			04.2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.069.000,00
			04.2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.794.689.800,00
			04.2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.233.209.400,00
			04.2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	438.133.800,00
			04.2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	167.772.000,00
			04.4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.921.298.680,00
			04.4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.263.000.000,00
			04.4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.097.774.200,00
			04.5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.943.201.570,00

RKPD PROVINSI JAWA TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPP	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			04.5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.106.834.400,00
			04.5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	768.518.250.000,00
			04.5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.245.459.000,00
			04.5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.008.555.100,00
			04.5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.255.007.350,00
			04.5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.035.652.600,00
			04.5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	701.950.000,00
			04.5.05.03.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	869.552.800,00
			04.6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.369.764.900,00
			04.6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.036.279.900,00
			04.7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.542.767.095,00
			04.7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	421.738.400,00
			04.7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.258.836.300,00
			04.8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.816.693.900,00
			04.8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.894.653.000,00
			04.8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	130.000.000,00
			04.8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	983.306.000,00
			04.8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.106.700.000,00
			JUMLAH PAGU PRIORITAS PROVINSI		4.395.572.573.717,00
			TOTAL BELANJA PPAS HANTARAN		4.395.572.573.717,00

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Tabel 5.2

Keselarasan Program Perangkat Daerah dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026 dan Dukungan Pendanaan pada RKPD Kabupaten Tahun 2026

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
1	01	MEMPERKOKOH IDEOLOGI PANCASILA, DEMOKRASI, DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)			21.161.447.890,00
			01.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.213.400.990,00
			01.8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.816.693.900,00
			01.8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.894.653.000,00
			01.8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.106.700.000,00
2	02	MEMANTAPKAN SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA DAN MENDORONG KEMANDIRIAN BANGSA MELALUI SWASEMBADA PANGAN, ENERGI, AIR, EKONOMI SYARIAH, EKONOMI DIGITAL, EKONOMI HIJAU, DAN EKONOMI BIRU			82.340.886.615,00
			02.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	55.611.547.815,00
			02.2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.908.177.900,00
			02.2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	85.344.800,00
			02.2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	245.808.600,00
			02.3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.643.948.100,00
			02.3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.670.585.200,00
			02.3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	155.284.600,00
			02.3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.871.232.700,00
			02.3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.868.583.000,00
			02.3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	180.352.800,00
			02.3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.043.249.000,00
			02.3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	74.943.600,00
			02.3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	16.878.500,00
			02.4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.263.000.000,00

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			02.5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	701.950.000,00
3	03	MELANJUTKAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN MENINGKATKAN LAPANGAN KERJA YANG BERKUALITAS, MENDORONG KEWIRAUSAHAAN, MENGEMBANGKAN INDUSTRI KREATIF SERTA MENGEMBANGKAN AGROMARITIM INDUSTRI DI SENTRA PRODUKSI MELALUI PERAN AKTIF KOPERASI			446.718.929.117,00
			03.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	93.473.911.019,00
			03.1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.791.999.800,00
			03.1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.300.000.000,00
			03.1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.400.000.000,00
			03.1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.000.000.000,00
			03.1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.373.372.300,00
			03.1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.250.000.000,00
			03.1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	181.176.515.800,00
			03.1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00
			03.1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.443.000.000,00
			03.1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	469.883.900,00
			03.1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.646.416.000,00
			03.1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.060.082.900,00
			03.1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.162.839.700,00
			03.2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.201.426.500,00
			03.2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	487.979.400,00
			03.2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	366.262.600,00
			03.2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	152.289.700,00
			03.2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	84.484.900,00
			03.2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	191.773.400,00
			03.2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.903.448.298,00
			03.2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	22.830.000,00
			03.2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	162.391.000,00

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			03.2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	303.323.000,00
			03.2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	119.380.000,00
			03.2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	733.487.100,00
			03.2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	677.509.800,00
			03.2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	370.000.000,00
			03.2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.100.108.500,00
			03.2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	420.005.300,00
			03.2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130.000.000,00
			03.2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	235.000.000,00
			03.3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.347.372.400,00
			03.3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.384.802.100,00
			03.3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	45.000.000,00
			03.3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70.258.000,00
			03.3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	111.775.700,00
4	04	MEMPERKUAT PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), SAINS, TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PRESTASI OLAHRAGA, KESETARAAN GENDER, SERTA PENGUATAN PERAN PEREMPUAN, PEMUDA (GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z), DAN PENYANDANG DISABILITAS			2.400.372.179.767,00
			04.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.166.365.999.687,00
			04.1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.157.838.600,00
			04.1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	146.575.549.000,00
			04.1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	293.598.800,00
			04.1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	40.997.900,00
			04.1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.521.000,00
			04.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	282.182.300,00
			04.2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.819.100,00

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			04.2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	238.492.800,00
			04.2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	26.202.400,00
			04.2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	535.728.600,00
			04.2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	275.062.800,00
			04.2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	913.399.900,00
			04.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	198.731.200,00
			04.2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	379.137.000,00
			04.2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	684.608.400,00
			04.2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.313.543.700,00
			04.2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00
			04.2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.206.647.800,00
			04.2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.820.100,00
			04.4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.921.298.680,00
5	05	MELANJUTKAN HILIRISASI DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM UNTUK MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DI DALAM NEGERI			32.192.950.799,00
			05.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.657.126.419,00
			05.3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.921.548.000,00
			05.3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	4.739.300,00
			05.3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	204.021.400,00
			05.3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	496.207.180,00
			05.3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	435.404.800,00
			05.3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	659.995.000,00
			05.3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.423.913.800,00
			05.3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.280.291.900,00
			05.3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	13.881.400,00
			05.3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	95.821.600,00

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
6	06	MEMBANGUN DARI DESA DAN DARI BAWAH UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI, PEMERATAAN EKONOMI, DAN PEMBERANTASAN KEMISKINAN			782.028.316.949,00
			06.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.161.029.949,00
			06.1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.664.096.800,00
			06.1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.435.633.600,00
			06.1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	859.593.900,00
			06.1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	399.794.500,00
			06.2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	104.999.700,00
			06.2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	434.999.900,00
			06.2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.307.537.500,00
			06.2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.105.796.900,00
			06.5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	729.823.303.800,00
			06.7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.692.908.900,00
			06.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38.621.500,00
7	07	MEMPERKUAT REFORMASI POLITIK, HUKUM, DAN BIROKRASI, SERTA MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, NARKOBA, JUDI, DAN PENYELUNDUPAN			568.939.398.086,00
			07.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	438.206.342.371,00
			07.1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.325.947.400,00
			07.1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.520.076.200,00
			07.1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.995.297.400,00
			07.1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	56.720.000,00
			07.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	31.957.200,00
			07.2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	936.886.200,00
			07.2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	144.880.900,00
			07.2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	476.160.800,00
			07.2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.069.000,00
			07.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	23.731.500,00

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			07.2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.794.689.800,00
			07.2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.233.209.400,00
			07.2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	438.133.800,00
			07.2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	167.772.000,00
			07.2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	391.529.400,00
			07.2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	259.364.900,00
			07.4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.097.774.200,00
			07.5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.943.201.570,00
			07.5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.106.834.400,00
			07.5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	38.694.946.200,00
			07.5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.245.459.000,00
			07.5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.008.555.100,00
			07.5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.255.007.350,00
			07.5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.035.652.600,00
			07.5.05.03.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	869.552.800,00
			07.6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.369.764.900,00
			07.6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.036.279.900,00
			07.7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.542.767.095,00
			07.7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	421.738.400,00
			07.7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.258.836.300,00
			07.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.260.000,00
8	08	MEMPERKUAT PENYELARASAN KEHIDUPAN YANG HARMONIS DENGAN LINGKUNGAN, ALAM DAN BUDAYA, SERTA PENINGKATAN TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA UNTUK MENCAPAI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR			61.818.464.494,00
			08.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.149.822.204,00
			08.2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	311.648.500,00
			08.2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.852.488.700,00

RKP NASIONAL TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026		PAGU ANGGARAN
NO	KODE PPN	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	KODE PPD	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	
			08.2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.314.446.600,00
			08.2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	284.949.500,00
			08.2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	83.521.900,00
			08.2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	124.238.600,00
			08.2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	167.546.100,00
			08.2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.871.717.590,00
			08.2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	260.317.500,00
			08.2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.344.549.500,00
			08.2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	69.911.800,00
			08.8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	983.306.000,00
			JUMLAH PAGU PRIORITAS NASIONAL		4.395.572.573.717,00
			TOTAL BELANJA PPAS HANTARAN		4.395.572.573.717,00

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

5.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026

Rencana program dan kegiatan Tahun 2026 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2026 ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun rencana Kerangka Anggaran RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3
Ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026

KODE REKENIN G	URAIAN	JUMLAH
4.	PENDAPATAN DAERAH	4.222.054.773.385,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.044.230.524.628,00
4.1.01.	PAJAK DAERAH	598.786.678.745,00
4.1.02.	RETRIBUSI DAERAH	420.850.170.893,00
4.1.03.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	15.853.360.903,00
4.1.04.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	8.740.314.087,00
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	3.171.263.288.757,00
4.2.01.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.886.597.786.000,00
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	284.665.502.757,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.960.000,00
4.3.01.	PENDAPATAN HIBAH	6.560.960.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	4.222.054.773.385,00
5.	BELANJA DAERAH	4.395.572.573.717,00
5.1.	BELANJA OPERASI	3.268.161.702.684,00
5.1.01.	BELANJA PEGAWAI	2.213.517.008.262,00
5.1.02.	BELANJA BARANG DAN JASA	985.098.565.622,00
5.1.05.	BELANJA HIBAH	58.164.110.000,00
5.1.06.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	11.382.018.800,00
5.2.	BELANJA MODAL	362.587.567.233,00
5.2.01.	BELANJA MODAL TANAH	50.637.262.500,00
5.2.02.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	58.917.927.954,00
5.2.03.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	82.250.395.053,00
5.2.04.	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	170.441.993.126,00
5.2.05.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	339.988.600,00
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000,00
5.3.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	35.000.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	729.823.303.800,00
5.4.01.	BELANJA BAGI HASIL	62.441.246.500,00
5.4.02.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	667.382.057.300,00

KODE REKENIN G	URAIAN	JUMLAH
	JUMLAH BELANJA	4.395.572.573.717,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-173.517.800.332,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	173.517.800.332,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	179.517.800.332,00
6.1.01.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	179.517.800.332,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	179.517.800.332,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
6.2.02.	PENYERTAAN MODAL DAERAH	6.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETO	173.517.800.332,00
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

5.2.1 Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Selanjutnya, secara rekapitulasi anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN
01	PENINGKATAN DUKUNGAN KEHIDUPAN BERAGAMA, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN SERTA POLITIK DAN DEMOKRASI	52.681.087.710,00
01.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.576.681.410,00
01.1.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.325.947.400,00
01.1.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.520.076.200,00
01.1.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	5.995.297.400,00
01.7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	421.738.400,00
01.8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.816.693.900,00
01.8.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	5.894.653.000,00
01.8.01.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	130.000.000,00
01.8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
01.8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
02	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim	50.173.996.973,00
02.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.163.439.483,00
02.2.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	311.648.500,00
02.2.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.852.488.700,00

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN
02.2.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	3.314.446.600,00
02.2.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	284.949.500,00
02.2.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	83.521.900,00
02.2.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	124.238.600,00
02.2.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	167.546.100,00
02.2.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	24.871.717.590,00
03	PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN UNIVERSAL SERTA TARAF HIDUP MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN SOSIAL	1.958.226.441.878,00
03.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.737.619.349.178,00
03.1.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	41.157.838.600,00
03.1.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	146.575.549.000,00
03.1.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	293.598.800,00
03.1.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	40.997.900,00
03.1.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	244.521.000,00
03.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	282.182.300,00
03.2.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	187.819.100,00
03.2.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	238.492.800,00
03.2.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	26.202.400,00
03.2.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	535.728.600,00
03.2.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	275.062.800,00
03.2.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	913.399.900,00
03.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	198.731.200,00
03.2.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	379.137.000,00
03.2.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	684.608.400,00
03.2.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	19.313.543.700,00
03.2.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	500.000.000,00
03.2.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	260.317.500,00
03.2.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	2.344.549.500,00
03.2.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	69.911.800,00
03.2.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.206.647.800,00
03.2.23.03.	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	30.820.100,00
03.3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.347.372.400,00
03.3.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.384.802.100,00
03.3.26.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	45.000.000,00
03.3.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	70.258.000,00
04	PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING TENAGA KERJA	8.443.563.000,00
04.1.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.664.096.800,00
04.1.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.435.633.600,00
04.1.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	859.593.900,00
04.1.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	399.794.500,00
04.2.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	3.201.426.500,00
04.2.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	487.979.400,00
04.2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	283.262.600,00
04.3.32.03.	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	111.775.700,00

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN
05	PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI DAERAH MELALUI HILIRISASI SEKTOR PERTANIAN, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PARIWISATA DAN JASA PRODUKTIF LAINNYA	132.198.881.330,00
05.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.672.080.650,00
05.2.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	83.000.000,00
05.2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.908.177.900,00
05.2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	85.344.800,00
05.2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	245.808.600,00
05.2.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	22.830.000,00
05.2.17.04.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	162.391.000,00
05.2.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	303.323.000,00
05.2.17.06.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	119.380.000,00
05.2.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	733.487.100,00
05.2.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	677.509.800,00
05.2.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	370.000.000,00
05.2.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1.100.108.500,00
05.2.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	420.005.300,00
05.2.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	130.000.000,00
05.2.18.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	235.000.000,00
05.3.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.643.948.100,00
05.3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.670.585.200,00
05.3.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	155.284.600,00
05.3.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.921.548.000,00
05.3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.871.232.700,00
05.3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.868.583.000,00
05.3.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	180.352.800,00
05.3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.043.249.000,00
05.3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	74.943.600,00
05.3.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	21.617.800,00
05.3.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	204.021.400,00
05.3.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	496.207.180,00
05.3.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	435.404.800,00
05.3.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	659.995.000,00
05.3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.423.913.800,00
05.3.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.280.291.900,00
05.3.31.03.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	13.881.400,00
05.3.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	95.821.600,00
05.5.05.03.	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	869.552.800,00
06	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR DAN KONEKTIVITAS SERTA PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN YANG BELUM EFISIEN	421.873.905.110,00
06.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	54.238.034.012,00
06.1.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.791.999.800,00
06.1.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.300.000.000,00

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN
06.1.03.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	7.400.000.000,00
06.1.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.000.000.000,00
06.1.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	15.373.372.300,00
06.1.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	20.250.000.000,00
06.1.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	181.176.515.800,00
06.1.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	550.000.000,00
06.1.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.443.000.000,00
06.1.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	469.883.900,00
06.1.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	16.646.416.000,00
06.1.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	9.060.082.900,00
06.1.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	2.162.839.700,00
06.2.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	152.289.700,00
06.2.10.09.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	84.484.900,00
06.2.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	191.773.400,00
06.2.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	104.999.700,00
06.2.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	434.999.900,00
06.2.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.307.537.500,00
06.2.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.105.796.900,00
06.2.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	55.903.448.298,00
06.7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.692.908.900,00
06.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	33.521.500,00
07	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DAN KINERJA APARATUR	1.771.974.697.716,00
07.0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	892.569.595.721,00
07.1.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	56.720.000,00
07.2.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	31.957.200,00
07.2.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	936.886.200,00
07.2.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	144.880.900,00
07.2.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	476.160.800,00
07.2.12.05.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	49.069.000,00
07.2.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	23.731.500,00
07.2.16.02.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.794.689.800,00
07.2.16.03.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	6.233.209.400,00
07.2.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	438.133.800,00
07.2.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	167.772.000,00
07.2.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	391.529.400,00
07.2.24.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	259.364.900,00
07.4.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	20.921.298.680,00
07.4.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.263.000.000,00
07.4.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	27.097.774.200,00
07.5.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.943.201.570,00
07.5.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.106.834.400,00
07.5.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	768.518.250.000,00
07.5.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	2.245.459.000,00
07.5.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	8.008.555.100,00
07.5.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.255.007.350,00
07.5.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.035.652.600,00

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH / PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PAGU ANGGARAN
07.5.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	701.950.000,00
07.6.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	11.369.764.900,00
07.6.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	2.036.279.900,00
07.7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	6.542.767.095,00
07.7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.258.836.300,00
07.7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.360.000,00
07.8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	983.306.000,00
07.8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.106.700.000,00
JUMLAH PAGU PRIORITAS DAERAH		4.395.572.573.717,00

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Selanjutnya rincian pagu pendanaan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah, pemenuhan pelayanan minimal, serta pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah daerah untuk mewujudkan terwujudnya capaian tujuan dan sasaran daerah sesuai dengan RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5
Rekapitulasi Alokasi Pagu Indikatif Perangkat Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2026

No	SKPD	JUMLAH			PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
		PR G	KE G	SUB KEG	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.719.829.464.823
1-1.0-0.0-0.01.	DINAS PENDIDIKAN	5	17	139	1.387.017.903.845
1-2.0-0.0-0.01.	DINAS KESEHATAN	5	24	108	926.423.828.157
1-3.0-0.0-0.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	11	24	77	293.276.938.814
1-4.2-10.0-0.01.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9	20	47	39.211.390.132
1-5.0-0.0-0.01.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	9	34	18.927.914.977
1-5.0-0.0-0.02.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	12	48	21.629.543.161
1-5.0-0.0-0.03.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	12	64	16.171.528.632
1-6.0-0.0-0.01.	DINAS SOSIAL	6	14	60	17.170.417.105
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				323.115.790.790
2-7.3-32.0-0.01.	DINAS KETENAGAKERJAAN	6	19	46	17.391.275.133
2-9.3-25.0-0.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	9	25	89	30.935.792.171
2-11.0-0.0-0.01.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	9	19	54	51.688.075.073
2-12.0-0.0-0.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	16	43	15.693.566.617
2-13.0-0.0-0.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	12	65	18.570.980.644
2-14.2-8.0-0.01.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	29	105	23.963.192.761
2-15.0-0.0-0.01.	DINAS PERHUBUNGAN	2	21	77	69.657.348.676

No	SKPD	JUMLAH			PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
		PR G	KE G	SUB KEG	
2-16.2-20.2-21.01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	12	56	16.133.960.608
2-17.0-0.0-0.01.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	8	16	55	11.482.419.053
2-18.0-0.0-0.01.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	14	39	10.852.124.809
2-19.0-0.0-0.01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	15	51	26.513.838.680
2-22.3-26.0-0.01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	9	20	54	13.994.515.921
2-24.2-23.0-0.01.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	17	47	16.238.700.644
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				80.633.095.243
3-27.0-0.0-0.01.	DINAS PERTANIAN	6	17	52	56.344.813.944
3-30.3-31.0-0.01.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	10	23	54	24.288.281.299
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				203.136.998.441
4-1.0-0.0-0.01.	SEKRETARIAT DAERAH	3	19	71	108.556.827.257
4-2.0-0.0-0.01.	SEKRETARIAT DPRD	2	16	53	94.580.171.184
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-	-	-	865.665.621.843
5-1.5-5.0-0.02.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	5	18	62	18.519.017.924
5-2.0-0.0-0.01.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	12	61	783.244.191.650
5-2.0-0.0-0.02.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2	9	61	38.502.224.872
5-3.5-4.0-0.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	68	25.400.187.397
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				38.998.008.356
6-1.0-0.0-0.01.	INSPEKTORAT	3	12	43	38.998.008.356
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				142.048.840.331
7-1.0-0.0-0.01.	KECAMATAN WALED	6	16	34	2.999.296.896
7-1.0-0.0-0.02.	KECAMATAN CILEDUG	6	14	24	3.191.630.882
7-1.0-0.0-0.03.	KECAMATAN LOSARI	6	15	35	2.771.449.696
7-1.0-0.0-0.04.	KECAMATAN PABEDILAN	6	16	36	3.194.740.296
7-1.0-0.0-0.05.	KECAMATAN BABAKAN	6	16	34	2.845.237.096
7-1.0-0.0-0.06.	KECAMATAN GEBANG	6	17	35	3.031.865.794
7-1.0-0.0-0.07.	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	6	16	36	2.483.144.096
7-1.0-0.0-0.08.	KECAMATAN LEMAHABANG	5	15	29	2.812.103.996
7-1.0-0.0-0.09.	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	5	16	31	2.895.337.992
7-1.0-0.0-0.10.	KECAMATAN SEDONG	6	16	35	3.113.314.650
7-1.0-0.0-0.11.	KECAMATAN ASTANAJAPURA	6	16	35	2.945.348.992
7-1.0-0.0-0.12.	KECAMATAN PANGENAN	6	16	35	2.816.237.194
7-1.0-0.0-0.13.	KECAMATAN MUNDU	6	16	35	2.849.190.194
7-1.0-0.0-0.14.	KECAMATAN BEBER	5	13	24	3.055.296.294
7-1.0-0.0-0.15.	KECAMATAN TALUN	4	13	27	2.981.670.484
7-1.0-0.0-0.16.	KECAMATAN SUMBER	6	17	36	28.550.857.148
7-1.0-0.0-0.17.	KECAMATAN DUKUPUNTANG	6	17	36	2.878.013.756
7-1.0-0.0-0.18.	KECAMATAN PALIMANAN	6	16	39	2.907.028.090
7-1.0-0.0-0.19.	KECAMATAN PLUMBON	6	16	38	2.864.004.892
7-1.0-0.0-0.20.	KECAMATAN DEPOK	6	16	36	2.920.108.290
7-1.0-0.0-0.21.	KECAMATAN WERU	6	16	34	2.893.232.992
7-1.0-0.0-0.22.	KECAMATAN KEDAWUNG	6	16	36	2.635.375.892
7-1.0-0.0-0.23.	KECAMATAN GUNUNGJATI	6	16	36	3.051.663.594
7-1.0-0.0-0.24.	KECAMATAN KAPETAKAN	6	16	34	2.917.569.892
7-1.0-0.0-0.25.	KECAMATAN KLANGENAN	6	16	36	2.745.182.892
7-1.0-0.0-0.26.	KECAMATAN ARJAWINANGUN	6	16	38	3.356.418.390
7-1.0-0.0-0.27.	KECAMATAN PANGURAGAN	6	16	29	2.397.635.294

No	SKPD	JUMLAH			PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
		PR G	KE G	SUB KEG	
7-1.0-0.0-0.28.	KECAMATAN CIWARINGIN	6	16	35	2.784.372.192
7-1.0-0.0-0.29.	KECAMATAN SUSUKAN	6	16	36	2.923.025.394
7-1.0-0.0-0.30.	KECAMATAN GEGESIK	6	16	44	3.747.608.283
7-1.0-0.0-0.31.	KECAMATAN KALIWEDI	6	16	35	2.795.559.994
7-1.0-0.0-0.32.	KECAMATAN KARANGWARENG	6	16	37	2.616.176.192
7-1.0-0.0-0.33.	KECAMATAN TENGAH TANI	6	16	37	2.431.276.996
7-1.0-0.0-0.34.	KECAMATAN GEMPOL	5	14	26	3.182.169.492
7-1.0-0.0-0.35.	KECAMATAN PASALEMAN	6	14	25	3.150.740.442
7-1.0-0.0-0.36.	KECAMATAN PLERED	6	16	37	3.129.550.594
7-1.0-0.0-0.37.	KECAMATAN PABUARAN	6	16	35	2.326.354.996
7-1.0-0.0-0.38.	KECAMATAN GREGED	6	14	29	2.922.369.596
7-1.0-0.0-0.39.	KECAMATAN JAMBLANG	6	16	37	2.847.686.294
7-1.0-0.0-0.40.	KECAMATAN SURANENGGALA	5	15	34	3.088.994.192
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	22.144.753.890
8-1.0-0.0-0.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	75	22.144.753.890
J U M L A H		143	304	1155	4.395.572.573.717

Sumber: diolah Bapperida Kabupaten Cirebon, 2025
(aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Rancangan pagu alokasi perangkat daerah di atas telah memuat belanja pegawai, belanja fixed cost, prioritas perangkat daerah, belanja hibah dan bantuan social (masih sementara), belanja bantuan keuangan dan belanja prioritas lainnya. Secara detail, Rencana program dan kegiatan tahun 2026 tersaji di dalam **Dokumen Buku II Lampiran Ranhir RKPD Tahun 2026**.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan dinamika terakhir lingkungan perencanaan. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2026, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Cirebon. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Cirebon Tahun 2026, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Lebih lanjut, agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan dapat menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon harus memberikan *advice* program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak

memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran terutama dalam pencapaian strategis berupa sasaran pokok daerah yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) daerah yang telah di jabarkan dalam sasaran strategis Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja: program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta Perangkat Daerah penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas pembangunan menitikberatkan pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melakukan pengelompokkan pemberian kode, dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah kedalam suatu klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Mengacu pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) di atas serta berdasarkan bidang urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah, maka rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon beserta pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2026 dirumuskan sebagaimana terlampir pada lampiran Dokumen Lampiran Ranhir RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2026.

5.2.2. Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) (Usulan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan) dan Hasil Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Utama dalam penjabaran 7 Prioritas Pembangunan Kabupaten Cirebon sebagai amanat RPJMD Kabupaten Cirebon 2025-2029, menjadi fokus utama menu usulan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan yang menjadi dasar dalam penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dan menu usulan pokok-pokok pikiran DPRD. Alokasi PIK setiap kecamatan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pagu Indikatif Kewilayahan. Adapun rincian alokasi anggaran setiap kecamatan tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.6 berikut:

Tabel 5.6
Alokasi Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) Kecamatan Tahun 2026

NO.	NAMA	PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN (PIK)
1	KECAMATAN WALED	2.628.500.000
2	KECAMATAN CILEDUG	3.352.700.000
3	KECAMATAN LOSARI	2.289.100.000
4	KECAMATAN PABEDILAN	2.120.400.000
5	KECAMATAN BABAKAN	1.996.700.000
6	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	1.206.100.000
7	KECAMATAN LEMAHABANG	2.023.500.000
8	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	1.229.400.000
9	KECAMATAN SEDONG	1.574.300.000
10	KECAMATAN ASTANAJAPURA	1.421.000.000
11	KECAMATAN PANGENAN	1.353.400.000
12	KECAMATAN MUNDU	2.160.400.000
13	KECAMATAN BEBER	1.804.200.000
14	KECAMATAN TALUN	3.011.600.000
15	KECAMATAN SUMBER	3.457.100.000
16	KECAMATAN DUKUPUNTANG	2.272.000.000
17	KECAMATAN PALIMANAN	2.740.700.000
18	KECAMATAN PLUMBON	1.821.800.000
19	KECAMATAN WERU	1.351.600.000
20	KECAMATAN KEDAWUNG	2.546.900.000
21	KECAMATAN GUNUNGJATI	1.752.100.000
22	KECAMATAN KAPETAKAN	2.561.100.000
23	KECAMATAN KLANGENAN	2.062.800.000
24	KECAMATAN ARJAWINANGUN	3.041.200.000
25	KECAMATAN PANGURAGAN	1.845.700.000
26	KECAMATAN CIWARINGIN	1.331.700.000
27	KECAMATAN SUSUKAN	2.207.100.000
28	KECAMATAN GEGESIK	2.602.700.000
29	KECAMATAN KALIWEDI	2.699.400.000
30	KECAMATAN GEBANG	2.099.500.000
31	KECAMATAN DEPOK	1.229.600.000
32	KECAMATAN PASALEMAN	2.169.600.000
33	KECAMATAN PABUARAN	1.495.000.000
34	KECAMATAN KARANGWARENG	1.777.900.000
35	KECAMATAN TENGAH TANI	1.200.000.000
36	KECAMATAN PLERED	1.378.600.000
37	KECAMATAN GEMPOL	1.571.400.000
38	KECAMATAN GREGED	1.644.900.000
39	KECAMATAN SURANENGGALA	1.706.600.000
40	KECAMATAN JAMBLANG	1.815.200.000
JUMLAH		80.553.500.000

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Adapun realisasi alokasi pagu PIK yang diwujudkan melalui pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026 berdasarkan menu usulan PIK secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.7 berikut:

Tabel 5.7
Rincian Pelaksanaan Hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026

No.	Urut	Prioritas Pembangunan / Menu Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
				Usulan	SKPD	TAPD
1	1.	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi	38	0	1.363.672.777	1.363.672.777
2	1.01.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (hanya pada 10 Kecamatan dengan kejadian kebakaran tertinggi)	11	0	497.414.785	497.414.785
3	1.02.	Dukungan Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana (Tabung APAR)	18	0	398.112.000	398.112.000
4	1.03.	Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Sarprasnya	6	0	272.569.992	272.569.992
5	1.04.	Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) dan Sarprasnya	3	0	195.576.000	195.576.000
6	2.	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	69	0	3.950.447.800	3.950.447.800
7	2.01.	Pemberdayaan pengelolaan persampahan di Kecamatan	2	0	39.269.800	39.269.800
8	2.02.	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	30	0	3.181.178.000	3.181.178.000
9	2.04.	Pembangunan sumur resapan atau Lubang Biopori	37	0	730.000.000	730.000.000
10	3.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial	255	0	11.204.351.600	11.192.971.700
11	3.01.	Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru Pada Tingkat PAUD, SD, dan SMP)	11	0	1.425.000.000	1.425.000.000
12	3.02.	Pembangunan dan atau Rehabilitasi Toilet pada Tingkat PAUD, SD dan SMP	27	0	1.815.155.800	1.820.000.000
13	3.03.	Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B dan C), Wajib Berkelanjutan Sampai Tuntas	28	0	700.970.000	700.970.000
14	3.05.	Pengadaan Mebeuler pada Tingkat PAUD, SD dan SMP	6	0	335.840.000	335.840.000
15	3.06.	IPTEK Marketing Digital	1	0	6.300.000	6.300.000
16	3.07.	Sentra Pemberdayaan Pemuda (1 desa/kecamatan	2	0	60.000.000	60.000.000
17	3.08.	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus (indeks BB/TB < -3 SD) di wilayah dengan resiko prevalensi stunting > 14%)	44	0	1.343.380.000	1.343.380.000
18	3.09.	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm di wilayah dengan resiko presentasi ibu hamil KEK >= 10%	40	0	1.561.000.000	1.561.000.000

No.	Urut	Prioritas Pembangunan / Menu Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
				Usulan	SKPD	TAPD
19	3.10.	Pelayanan Operasi Katarak	4	0	126.000.000	126.000.000
20	3.11.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4	0	366.400.000	366.400.000
21	3.12.	Kompetisi Sepakbola U-12 (Mandatory Kecamatan)	38	0	1.151.881.400	1.149.843.400
22	3.13.	Peningkatan prestasi atletik (invitasi atletik tingkat kecamatan)	6	0	227.056.100	214.112.200
23	3.14.	Kejuaraan Olah Raga Prestasi	11	0	701.778.900	701.778.900
24	3.15.	Gebyar Senam Massal Tingkat Kecamatan	14	0	532.189.400	530.947.200
25	3.16.	Bimtek dan Tera Ulang Alat Antropometri Mendukung Pencegahan Stunting	18	0	450.000.000	450.000.000
26	3.17.	Pembangunan Gedung Serba Guna	1	0	401.400.000	401.400.000
27	4.	Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	133	0	1.994.319.700	1.994.319.700
28	4.01.	Penguatan Kelembagaan dan SDM Puskesmas dan Karang Taruna	91	0	1.196.319.700	1.196.319.700
29	4.02.	Kreasi Anak Cirebon	2	0	70.000.000	70.000.000
30	4.03.	Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga (20 jt maksimal/kecamatan atau 1,5 juta perdesa), bukan untuk honor pengurus PKK (Mandatory Kecamatan)	40	0	728.000.000	728.000.000
31	5.	Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	208	0	16.742.899.455	16.742.899.455
32	5.02.	Gerakan Pangan Murah, Gemar Makan Ikan	14	0	264.620.000	264.620.000
33	5.04.	Festival tematik desa dan pentas seni budaya pertunjukan tradisional Cirebonan	30	0	2.400.195.755	2.400.195.755
34	5.05.	Pelatihan Kewirausahaan Caruban Milenial	15	0	371.520.000	371.520.000
35	5.07.	Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (A. Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan: Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan jalan usaha tani (JUT) syarat: harus masuk LSD)	91	0	9.575.000.000	9.575.000.000
36	5.08.	Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP): Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana	12	0	2.012.809.600	2.012.809.600

No.	Urut	Prioritas Pembangunan / Menu Usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
				Usulan	SKPD	TAPD
37	5.09.	Pelatihan vokasional berbasis penempatan (Pelaksanaan Di BLK atau di LPK/BLK komunitas), boleh di Kecamatan (SKB: untuk kecamatan yang lokasinya jauh dari BLK atau LPK/BLK komunitas)	3	0	177.780.000	177.780.000
38	5.12.	Festival Tematik, Sholawatan dan Pentas Seni Pertunjukan Tradisional Cirebonan	43	0	1.940.974.100	1.940.974.100
39	6.	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien	151	0	38.303.937.600	38.303.937.600
40	6.01.	Pembangunan / Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan (min 750 juta)	18	0	13.586.067.300	13.586.067.300
41	6.02.	Rehabilitasi Jalan (pemeliharaan berkala) (min 500 juta)	20	0	9.651.326.000	9.651.326.000
42	6.03.	Rehabilitasi Jembatan	1	0	350.000.000	350.000.000
43	6.04.	Rehabilitasi Drainase jalan (Pembuatan saluran yang tersambung ke pembuangan, pembuatan gorong-gorong)	20	0	3.686.494.800	3.686.494.800
44	6.05.	Pembuatan Trotoar (khusus di 5 Kecamatan PKL)	1	0	300.000.000	300.000.000
45	6.06.	Normalisasi Bendung	2	0	225.000.000	225.000.000
46	6.07.	Normalisasi Sungai pada daerah banjir dan di wilayah pesisir/muara (alur nelayan)	5	0	570.000.000	570.000.000
47	6.11.	Pemasangan PJU dan Smart PJU di ruas jalan kabupaten	43	0	4.795.600.000	4.795.600.000
48	6.12.	Pemasangan PJU Tematik pada Kecamatan PKL	7	0	996.000.000	996.000.000
49	6.13.	Pemasangan Rambu Lalu Lintas	2	0	24.200.000	24.200.000
50	6.14.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	28	0	3.460.000.000	3.460.000.000
51	6.15.	Pemeliharaan PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan dan PSU di wilayah Kelurahan	4	0	659.249.500	659.249.500
52	7.	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur	158	0	6.975.824.260	6.972.054.360
53	7.01.	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana layanan Publik (Kecamatan Penerima Insentif Desa Mandiri)	36	0	2.711.963.300	2.705.715.800
54	7.02.	Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) -> (Mandatory Kecamatan)	39	0	573.327.000	572.004.600
55	7.03.	Pembiayaan MTQ Kecamatan (35-50 juta) (Mandatory Kecamatan)	40	0	1.951.738.000	1.951.738.000
56	7.04.	Kegiatan PHBN Kecamatan (Mandatory Kecamatan) (maks 50 juta)	33	0	1.536.745.960	1.536.745.960
57	7.05.	Pengelolaan Arsip Dinamis	10	0	202.050.000	205.850.000
JUMLAH			1.012	0	80.535.453.192	80.520.303.392

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Dari Tabel 5.7 di atas terlihat terdapat 1011 dari 1.012 usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026 yang hampir seluruhnya terkomodir di dalam proses perencanaan. Hal ini sangat efektif di dalam mewadahi keinginan masyarakat sesuai dan sejalan dengan prioritas permasalahan daerah. Terlihat bahwa masyarakat Kabupaten Cirebon sebagian besar masih membutuhkan intervensi pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien sebesar 45,57%. Secara pelaksanaan hasil usulan musrenbang tingkat kecamatan ini akan masuk ke Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Bantuan Keuangan Desa khususnya menu usulan terkait tentang Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan: Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES), jalan usaha tani (JUT) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP): Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana). Secara rinci rekapitulasi alokasi pagu PIK per perangkat daerah atas hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini:

Tabel 5.8
Rekapitulasi Rincian Pagu PIK Per Perangkat Daerah Terhadap Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2026

No.	SKPD Penanggung Jawab	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
			Usulan	SKPD	TAPD
1	DINAS PENDIDIKAN	72	0	4.276.965.800	4.281.810.000
2	DINAS KESEHATAN	92	0	3.396.780.000	3.396.780.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	67	0	28.368.888.100	28.368.888.100
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	32	0	4.119.249.500	4.119.249.500
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	30	0	928.846.777	928.846.777
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	8	0	434.826.000	434.826.000
7	DINAS SOSIAL	51	0	793.315.100	793.315.100
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	69	0	3.950.447.800	3.950.447.800
9	DINAS PERHUBUNGAN	52	0	5.815.800.000	5.815.800.000
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	15	0	371.520.000	371.520.000
11	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	25	0	1.702.424.400	1.688.238.300
12	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	12	0	2.012.809.600	2.012.809.600
13	DINAS KETENAGAKERJAAN	3	0	177.780.000	177.780.000
14	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	14	0	264.620.000	264.620.000
15	DINAS PERTANIAN	91	0	9.575.000.000	9.575.000.000
16	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	18	0	450.000.000	450.000.000
17	KECAMATAN WALED	9	0	559.002.200	559.002.200
18	KECAMATAN CILEDUG	9	0	422.333.400	422.333.400
19	KECAMATAN LOSARI	9	0	319.834.900	319.834.900
20	KECAMATAN PABEDILAN	9	0	304.300.000	304.300.000

No.	SKPD Penanggung Jawab	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
			Usulan	SKPD	TAPD
21	KECAMATAN BABAKAN	8	0	256.880.300	256.880.300
22	KECAMATAN GEBANG	9	0	294.818.000	294.818.000
23	KECAMATAN KARANGSEMBUNG	7	0	210.227.100	210.227.100
24	KECAMATAN LEMAHABANG	9	0	316.000.000	316.000.000
25	KECAMATAN SUSUKANLEBAK	10	0	315.555.860	315.555.860
26	KECAMATAN SEDONG	9	0	350.422.000	350.422.000
27	KECAMATAN ASTANAJAPURA	9	0	243.830.000	241.057.200
28	KECAMATAN PANGENAN	9	0	293.006.700	293.006.700
29	KECAMATAN MUNDU	9	0	301.586.000	301.586.000
30	KECAMATAN BEBER	8	0	402.600.000	402.600.000
31	KECAMATAN TALUN	8	0	404.682.000	404.682.000
32	KECAMATAN SUMBER	5	0	141.887.300	141.887.300
33	KECAMATAN DUKUPUNTANG	10	0	395.844.000	395.844.000
34	KECAMATAN PALIMANAN	8	0	317.952.600	317.952.600
35	KECAMATAN PLUMBON	9	0	262.873.000	263.288.000
36	KECAMATAN DEPOK	10	0	396.295.100	396.295.100
37	KECAMATAN WERU	9	0	298.311.000	298.311.000
38	KECAMATAN KEDAWUNG	10	0	438.431.900	438.431.900
39	KECAMATAN GUNUNGJATI	9	0	337.664.000	337.664.000
40	KECAMATAN KAPETAKAN	10	0	592.740.200	592.740.200
41	KECAMATAN KLANGENAN	10	0	338.169.000	338.169.000
42	KECAMATAN ARJAWINANGUN	8	0	342.507.200	342.507.200
43	KECAMATAN PANGURAGAN	9	0	228.700.000	228.700.000
44	KECAMATAN CIWARINGIN	7	0	206.700.000	206.700.000
45	KECAMATAN SUSUKAN	8	0	388.863.000	388.863.000
46	KECAMATAN GEGESIK	14	0	861.627.195	861.627.195
47	KECAMATAN KALIWEDI	8	0	389.760.000	389.760.000
48	KECAMATAN KARANGWARENG	8	0	213.692.000	213.692.000
49	KECAMATAN TENGAH TANI	11	0	345.680.000	342.229.900
50	KECAMATAN GEMPOL	11	0	404.518.400	404.518.400
51	KECAMATAN PASALEMAN	9	0	262.060.000	262.060.000
52	KECAMATAN PLERED	10	0	357.066.860	357.066.860
53	KECAMATAN PABUARAN	8	0	182.038.000	182.038.000
54	KECAMATAN GREGED	9	0	443.300.000	443.300.000
55	KECAMATAN JAMBLANG	9	0	347.227.100	347.227.100
56	KECAMATAN SURANENGGALA	11	0	407.193.800	407.193.800
JUMLAH		1.012	0	80.535.453.192	80.520.303.392

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Sementara itu, hasil usulan aspirasi melalui pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.9 berikut:

Tabel 5.9
Hasil Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No.	Urut	Prioritas	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
				Usulan	SKPD	TAPD
1	1.	Peningkatan dukungan kehidupan beragama, ketentraman dan ketertiban serta politik dan demokrasi	5	0	277.152.840	277.152.840
2	1.01.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (hanya pada 10 Kecamatan dengan kejadian kebakaran tertinggi)	2	0	137.396.540	137.396.540
3	1.02.	Dukungan Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana (Tabung APAR)	1	0	78.508.300	78.508.300
4	1.03.	Pembentukan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) dan Sarprasnya	2	0	61.248.000	61.248.000
5	2.	Pengendalian pencemaran lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi risiko perubahan iklim	35	0	2.724.000.000	2.724.000.000
6	2.02.	Penyediaan sarana dan prasarana persampahan	30	0	1.984.000.000	1.984.000.000
7	2.03.	Pembangunan daerah konservasi (Dengan Syarat ketentuan berlaku) diperuntukan untuk kawasan mangrove, kawasan sumber daya air	5	0	740.000.000	740.000.000
8	3.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan universal serta taraf hidup masyarakat dan perlindungan sosial	157	0	20.552.875.000	20.347.875.000
9	3.01.	Rehabilitasi Ruang Kelas, Ruang Guru Pada Tingkat PAUD, SD, dan SMP)	80	0	11.684.700.000	11.684.700.000
10	3.02.	Pembangunan dan atau Rehabilitasi Toilet pada Tingkat PAUD, SD dan SMP	20	0	2.352.400.000	2.342.400.000
11	3.03.	Pendidikan Paket Kesetaraan (Paket B dan C), Wajib Berkelanjutan Sampai Tuntas	2	0	0	0
12	3.05.	Pengadaan Mebeuler pada Tingkat PAUD, SD dan SMP	6	0	650.000.000	455.000.000
13	3.09.	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita dengan status gizi sangat kurus (indeks BB/TB < -3 SD) di wilayah dengan resiko prevalensi stunting > 14%)	1	0	30.800.000	30.800.000
14	3.10.	Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dengan LILA < 23,5 cm di wilayah dengan resiko presentasi ibu hamil KEK >= 10%	1	0	60.000.000	60.000.000
15	3.12.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	5	0	991.675.000	991.675.000
16	3.13.	Kompetisi Sepakbola U-12 (Mandatory Kecamatan)	1	0	100.000.000	100.000.000
17	3.15.	Kejuaraan Olah Raga Prestasi	21	0	1.708.000.000	1.708.000.000
18	3.16.	Gebyar Senam Massal Tingkat Kecamatan	18	0	1.225.300.000	1.225.300.000
19	3.17.	Pembangunan Gedung Serba Guna	2	0	1.750.000.000	1.750.000.000
20	4.	Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan daya saing tenaga kerja	2	0	260.479.800	260.479.800
21	4.01.	Penguatan Kelembagaan dan SDM Puskesmas dan Karang Taruna	2	0	260.479.800	260.479.800

No.	Urut	Prioritas	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
				Usulan	SKPD	TAPD
22	5.	Peningkatan nilai tambah ekonomi daerah melalui hilirisasi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya	73	0	8.413.540.000	8.313.540.000
23	5.04.	Festival tematik desa dan pentas seni budaya pertunjukan tradisional Cirebonan	11	0	925.000.000	925.000.000
24	5.05.	Pelatihan Kewirausahaan Caruban Milenial	4	0	200.000.000	200.000.000
25	5.07.	Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (A. Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan: Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES); dan jalan usaha tani (JUT) syarat: harus masuk LSD)	42	0	5.800.000.000	5.700.000.000
26	5.08.	Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (BankeuDesus) (APBD : APBDes = 80%: min 20%) Maks 200 juta (B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP): Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana	4	0	535.500.000	535.500.000
27	5.09.	Pelatihan vokasional berbasis penempatan (Pelaksanaan Di BLK atau di LPK/BLK komunitas), boleh di Kecamatan (SKB: untuk kecamatan yang lokasinya jauh dari BLK atau LPK/BLK komunitas)	9	0	453.040.000	453.040.000
28	5.12.	Festival Tematik, Sholawatan dan Pentas Seni Pertunjukan Tradisional Cirebonan	3	0	500.000.000	500.000.000
29	6.	Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien	282	0	66.275.800.000	59.225.800.000
30	6.01.	Pembangunan / Peningkatan (Rekonstruksi) Jalan (min 750 juta)	32	0	19.500.000.000	15.750.000.000
31	6.02.	Rehabilitasi Jalan (pemeliharaan berkala) (min 500 juta)	38	0	17.497.000.000	14.497.000.000
32	6.03.	Rehabilitasi Jembatan	4	0	1.000.000.000	1.000.000.000
33	6.04.	Rehabilitasi Drainase jalan (Pembuatan saluran yang tersambung ke pembuangan, pembuatan gorong-gorong)	33	0	6.729.000.000	6.529.000.000
34	6.06.	Normalisasi Bendung	1	0	150.000.000	150.000.000
35	6.07.	Normalisasi Sungai pada daerah banjir dan di wilayah pesisir/muara (alur nelayan)	25	0	3.747.000.000	3.747.000.000
36	6.09.	Pembangunan Sanitasi Air Minum (perluasan jaringan khusus yang memiliki idle capacity)	2	0	700.000.000	700.000.000
37	6.10.	Pembangunan Hanggar TPS3R	1	0	300.000.000	300.000.000
38	6.11.	Pemasangan PJU dan Smart PJU di ruas jalan kabupaten	19	0	1.443.100.000	1.443.100.000
39	6.12.	Pemasangan PJU Tematik pada Kecamatan PKL	2	0	179.200.000	179.200.000
40	6.14.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	47	0	2.300.500.000	2.300.500.000
41	6.15.	Pemeliharaan PSU Perumahan yang sudah diserahkan dan PSU di wilayah Kelurahan	78	0	12.730.000.000	12.630.000.000
JUMLAH			554	0	98.503.847.640	91.148.847.640

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Dari Tabel 5.7 di atas, usulan aspirasi melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil kunjungan reses dan musrenbang tingkat kecamatan terdapat 505 usulan yang divalidasi dari 554 oleh Perangkat Daerah Teknis dan TAPD dan telah masuk ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026. Hasil rekapitulasi usulan menunjukkan hal yang serupa dengan hasil usulan Musrenbang Tingkat Kecamatan, yaitu masyarakat Kabupaten Cirebon masih sangat membutuhkan layanan pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang belum efisien sebesar 64,97%. Hasil usulan aspirasi melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD akan masuk ke Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Bantuan Keuangan Desa khususnya menu usulan terkait tentang Revitalisasi Pembangunan Prasarana Agribisnis Pedesaan: Pembangunan jaringan irigasi desa (JIDES), jalan usaha tani (JUT) dan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Produktif Perdesaan (PAKASEP): Pembentukan/pengembangan destinasi wisata lokal (termasuk pembangunan sarana). Adapun rekapitulasi per perangkat daerah terhadap usulan aspirasi pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10
Rekapitulasi Per Perangkat Daerah Terhadap Usulan Aspirasi
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026

No.	SKPD Penanggung Jawab	Jml Usulan	Pagu Anggaran		
			Usulan	SKPD	TAPD
1	DINAS PENDIDIKAN	108	0	14.687.100.000	14.482.100.000
2	DINAS KESEHATAN	7	0	1.082.475.000	1.082.475.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	138	0	49.623.000.000	42.673.000.000
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	125	0	15.030.500.000	14.930.500.000
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	5	0	277.152.840	277.152.840
6	DINAS SOSIAL	2	0	260.479.800	260.479.800
7	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35	0	2.724.000.000	2.724.000.000
8	DINAS PERHUBUNGAN	21	0	1.622.300.000	1.622.300.000
9	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	4	0	200.000.000	200.000.000
10	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	42	0	4.783.300.000	4.783.300.000
11	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	16	0	1.860.500.000	1.860.500.000
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	9	0	453.040.000	453.040.000
13	DINAS PERTANIAN	41	0	5.800.000.000	5.700.000.000
14	KECAMATAN SUMBER	1	0	100.000.000	100.000.000
JUMLAH		554	0	98.503.847.640	91.148.847.640

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

5.2.3 Pagu Indikatif Hibah Bansos Tahun 2026

Sedangkan terkait belanja hibah dan bantuan sosial, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menghimpun, memverifikasi, memvalidasi melalui hasi DNC Perangkat Daerah dan telah dilakukan pembahasan persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Pagu Anggaran Indikatif Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PAGU				TOTAL PAGU PD	KET
	HIBAH		BANSOS			
	UANG	BARANG	UANG	BARANG		
SEKRETARIAT DAERAH	.590.200.000	-	1.942.160.000	-	11.532.360.000	-
BAKESBANGPOL	5.240.000.000	-	-	-	5.240.000.000	DI LUAR PARPOL
DINAS KESEHATAN	5.300.000.000	-	-	-	5.300.000.000	-
DISPORA	11.200.000.000	-	-	-	11.200.000.000	-
DPUTR	760.000.000	11.400.000.000	-	-	12.160.000.000	-
DINSOS	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-
DPKPP	-	-	-	-	-	PIS, PIK DAN POKIR
DISHUB	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-
TOTAL	32.120.200.000	11.400.000.000	1.942.160.000	-	45.462.360.000	

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Data Tabel 5.11 diatas terdapat pagu indikatif untuk alokasi Hibah Bansos Tahun 2026 di luar rencana indikatif belanja Hibah Bansos yang masuk ke Perangkat Daerah sebesar Rp. 45.462.360.000

5.2.4 Pagu Indikatif Proyek Strategis / Program Prioritas Kepala Daerah Tahun 2026

Selanjutnya pada Tabel 5.12 tentang Proyek Strategis Kabupaten Cirebon tahun 2026, ditetapkan beberapa Proyek Strategis Kabupaten/ Program Prioritas Kepala Daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 beserta anggaran yang dibutuhkan. Daftar proyek ini disusun sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang diharapkan manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Proyek Strategis Kabupaten Cirebon Tahun 2026

PERANGKAT DAERAH	PROYEK STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
Dinas Lingkungan Hidup	Pembangunan alat pengeloh sampah "MOTAH"	1.500.000.000	APBD II
	Lanjutan Pembangunan Taman Hutan Kota	1.500.000.000	APBD II
	Penataan Kawasan Tuparev	500.000.000	APBD II

PERANGKAT DAERAH	PROYEK STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
	Pendampingan dan Pelatihan Program Kampung Bersih	406.000.000	APBD II
	Pembangunan Sumur Resapan	500.000.000	APBD II
Dinas Pertanian	Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)	10.900.000.000	APBD II
	Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim bagi pertanian	1.200.000.000	APBD II
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Gelaran Tari Nusantara	1.000.000.000	APBD II
	Gelaran Produk Kreatif (Creative Center)	300.000.000	APBD II
	Cirebon Katon Festival	700.000.000	APBD II
Dinas Perdagangan dan Pariwisata	Gelaran Batik Nusantara (KENTARA=Kemilau Nusantara Batik Cirebonan)	2.000.000.000	APBD II
	Gelaran Furniture Nusantara (CIFEX=Cirebon Indonesia Furniture Expo)	2.000.000.000	APBD II
	Fasilitasi SNI untuk IKM Garam untuk mendukung hilirasi garam	500.000.000	APBD II
	Kajian Pra FS Industri Garam untuk mendukung Hilirisasi garam	300.000.000	APBD II
Dinas Pemuda dan Olahraga	Liga Sepak Bola Anak Tingkat Kabupaten	300.000.000	APBD II
	Penataan Stadion Ranggajati dan GOR Ranggajati	2.000.000.000	APBD II
	Invitasi Atletik	200.000.000	APBD II
	Pekan Olahraga Pelajar	1.000.000.000	APBD II
	Pekan Olahraga dan Seni	300.000.000	APBD II
	Pekan Olahraga Pemerintah Daerah	300.000.000	APBD II
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penataan Kawasan Tuparev (Trotoar dan Trotoar Disabilitas)	5.000.000.000	APBD II
	Betonisasi, Pemeliharaan Jalan dan jembatan	60.500.000.000	APBD II
	Pembangunan IPLT	9.000.000.000	APBD II
	Revitalisasi Saluran Irigasi, Sungai dll	10.000.000.000	APBD II
	Pengadaan Lahan Talun Junction (Wr.Asem)	6.000.000.000	APBD II

PERANGKAT DAERAH	PROYEK STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
	Pembangunan Akses Jalan Kubag Deleg	2.500.000.000	APBD II
	Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Sumber	40.000.000.000	APBD II
	Pengadaan Lahan TPA Gempol	5.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Jalan Pendukung Sekolah Rakyat	6.000.000.000	APBD II
	Pembangunan SPAL	3.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Gedung Dharma Wanita	2.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Kecamatan Waled	2.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Kecamatan Kapetakan	2.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Kecamatan Weru	2.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Kecamatan Kedawung Terintegrasi	3.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Embung Slendra	500.000.000	APBD II
	Penyusunan RDTR Pabedilan dan Ciledug	1.300.000.000	APBD II
Dinas Kesehatan	DED Puskesmas Winong dan Puskesmas Losari	400.000.000	APBD II
	Program Kampung Sehat	700.000.000	APBD II
	Bantuan Layanan Kesehatan BPJS untuk Imam Masjid Mushola dan Guru Ngaji	386.688.000	APBD II
	Pengadaan Obat	1.000.000.000	APBD II
	Pengadaan BMHP dan Penunjang Medis	500.000.000	APBD II
Dinas Ketenagakerjaan	- Modernisasi BLK	1.600.000.000	APBD II
	- Rehab Ruang Kadis, Sekretariat, Ruang layanan AK1	2.000.000.000	APBD II
	- Program Pelatihan Khusus ke Luar Negeri (Jepang)	1.300.000.000	APBD II
Dinas Arsip dan Perpustakaan	Program Kampung Literasi	500.000.000	APBD II
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Rutilahu	4.000.000.000	APBD II
	Pemeliharaan PSU yang Sudah Diserahterimakan	1.000.000.000	APBD II
	Penataan Kawasan Kumuh	2.000.000.000	APBD II
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pembangunan Pipanisasi di Balai Benih Ikan	780.000.000	APBD II
	Festival Olahan Perikanan	2.000.000.000	APBD II

PERANGKAT DAERAH	PROYEK STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
	Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	2.380.000.000	APBD II
	Renovasi Gedung Kantor	3.600.000.000	APBD II
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembangunan Gedung Kantor	7.500.000.000	APBD II
	Penyusunan Dokumen Kebencanaan	500.000.000	APBD II
Dinas Komunikasi dan Informasi	Pembuatan Video Tematik Pembangunan	200.000.000	APBD II
	Penguatan SPBE Daerah : Super Apps, Keamanan Informasi, dan Smart City	900.000.000	APBD II
	Penguatan Satu Data Desa (OpenSID)	200.000.000	APBD II
	Penguatan Smart PJU di Kompleks Pemda dan Sekitar Sumber (Server dan Aplikasi Monitor)	428.000.000	APBD II
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Penguatan APD Petugas Damkar	600.000.000	APBD II
	Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	2.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Aplikasi Smoke Detector	300.000.000	APBD II
Dinas Perhubungan	Meterisasi PJU (Smart Kwh meter)	1.700.000.000	APBD II
	Perambuan Lalu Lintas (Perlindungan Sebidang 3 Lokasi)	300.000.000	APBD II
	Rambu lalu lintas (Marka Rambu RPPJ)	300.000.000	APBD II
	Penataan PJU Tematik (Program Kolaborasi Penataan Kawasan Tuparev dan Trusmi)	1.000.000.000	APBD II
	Program Penggantian LED PJU	2.000.000.000	APBD II
	Smart PJU di Kompleks Pemda dan Sekitar Sumber (Master Point PJU dan End Point PJU)	312.500.000	APBD II
Dinas Sosial	Pembangunan Gedung SLRT	4.500.000.000	APBD II
	Penguatan Verval DTSEN	300.000.000	APBD II
Dinas Koperasi dan UKM	Pembangunan gedung	5.000.000.000	APBD II
Dinas Pendidikan	Pembangunan / Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP	12.000.000.000	APBD II
	Pembangunan / Rehabilitasi Toilet SD dan SMP	5.000.000.000	APBD II

PERANGKAT DAERAH	PROYEK STRATEGIS/PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
	Bantuan Insentif Guru Paud	1.230.000.000	APBD II
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekolah Kependudukan	300.000.000	APBD II
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pembangunan Genset	950.000.000	APBD II
	Penguatan Layanan Kependudukan	4.104.934.000	APBD II
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sistem informasi manajemen investasi terpadu	200.000.000	APBD II
	Cirebon Investment Summit	1.000.000.000	APBD II
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penguatan Forum Ulama Umara dan Masyarakat (FUU) dan Forum Kerukunan Umat Beragama	1.000.000.000	APBD II
	Pembangunan Gedung Aula	2.000.000.000	APBD II

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

5.2.5 Pagu Indikatif Program Kolaborasi Tahun 2026

Selanjutnya, sejalan dengan fokus utama program kolaboratif yang diarahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Cirebon telah menetapkan Program Kolaboratif di Tahun 2026 akan difokuskan 4 hal, yaitu: 1. Pengentasan Kemiskinan, Penanganan Stunting, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Kampung Literasi, dan Program Kampung Sehat. Adapun Rincian detail program dan indikatif pendanaanya akan dijelaskan pada Tabel 5.13 sampai dengan Tabel 5.18 berikut:

Tabel 5.13
Program Kolaboratif Pengentasan Kemiskinan

No	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) Tahun 2026
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	276.555.000
2		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	592.639.000
3		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	76.988.000
4		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	80.299.000

No	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) Tahun 2026
5		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	115.370.000
6		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	402.311.000
7		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	170.195.000
8		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	135.204.000
9		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	171.250.000
10		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	150.000.000
11		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	250.000.000
12		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	920.000.000
13		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.029.381.000
14		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.548.000
15		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	80.000.000
16		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	63.750.000,00
17		Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	450.000.000
18		Dinas Kesehatan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	169.483.273.000
19	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Dinas Kesehatan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	727.842.260
20		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	5.200.000.000
21		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	17.000.000.000

No	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) Tahun 2026
22		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai	19.002.403.000
23		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehabilitasi Tanggul Sungai	3.753.284.000
24		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	53.100.000.000
25		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.000.000.000
26		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	20.000.000.000
27		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	20.000.000.000
28		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.059.796.000
29		Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.059.796.000
30		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.000.000.000
31		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	250.000.000
32		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	6.000.000.000
33		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	7.200.000.000
34	Mengurangi Beban Pengeluaran	Dinas Sosial	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	914.920.100

No	Strategi	Perangkat Daerah Pengampu	Nama Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp) Tahun 2026
35		Dinas Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	9.000.000
Total Alokasi Anggaran Tahun 2026 (Rp)				342.751.804.360

Sumber: diolah Bapperida, 2025

Tabel 5.14
Program Kolaboratif Penurunan Stunting Tahun 2026

No	Intervensi	Perangkat Daerah	Program	Sub kegiatan	Anggaran
1	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	500.000.000
2	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	100.000.000
3	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.550.000
4	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30.000.000
5	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.216.800.000
6	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	23.280.000
7	Sensitif	Dinas Pertanian	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan SDG Hewan/Tanaman	10.000.000
8	Sensitif	Dinas Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.000.000

No	Intervensi	Perangkat Daerah	Program	Sub kegiatan	Anggaran
9	Sensitif	Dinas Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	28.099.500
10	Sensitif	Disperdagin	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	10.000.000
11	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000
12	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.000.000
13	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.158.080.000
14	Spesifik	Dinas Kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	24.900.000
15	Sensitif	DPPKBP3A	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	10.000.000
16	Sensitif	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.000.000

No	Intervensi	Perangkat Daerah	Program	Sub kegiatan	Anggaran
17	Sensitif	DPPKBP3A	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pendampingan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	30.000.000
18	Sensitif	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	50.000.000
19	Sensitif	Dinas Kesehatan			30.000.000
20	Sensitif	DPPKBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3.000.000
21	Sensitif	DPPKBP3A	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000
22	Sensitif	Dinas Kesehatan	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.400.000
23	Sensitif	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	50.000.000
24	Sensitif	DPMD	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	35.000.000

No	Intervensi	Perangkat Daerah	Program	Sub kegiatan	Anggaran
25	Sensitif	DPUTR	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	14.370.000.000
26	Sensitif	DPKPP	Program Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	215.000.000
Total Anggaran					8.022.109.500

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Tabel 5.15
Program Kolaboratif Pengendalian Inflasi Tahun 2026

No	NAMA OPD/ Nama Program	Sub Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)
	# Keterjangkauan Harga		
	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	50.000.000
2		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	91.160.000
3		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	200.000.000
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan		
4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	20.000.000
5		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	25.000.000
6		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000
7		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	50.000.000

No	NAMA OPD/ Nama Program	Sub Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)
8		Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000
#Ketersediaan Pasokan			
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
9	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000
	Diseminasi Teknologi Pertanian		
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
10	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100.000.000
11		Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	25.000.000
12		Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	25.000.000
13		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	50.000.000
14		Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000
#Ketersediaan Pasokan			
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
15	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	300.000.000
16	Diseminasi Teknologi Pertanian		
#Kelancaran Distribusi			
Dinas Pertanian			
17	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000
DISPERDAGIN			
18	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	600.000.000
#Komunikasi Efektif			
19	Bagian Perekonomian dan SDA Setda		
20	Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000
21		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100.000.000

No	NAMA OPD/ Nama Program	Sub Kegiatan	Nilai Anggaran (Rp)
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
22	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.000.000
23		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	25.000.000
24	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	25.000.000
Dinas Pertanian			
25	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.000.000
Dinas Pertanian			
26	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.000.000.000
#Komunikasi Efektif			
Bagian Perekonomian dan SDA SETDA			
27	Program Perekonomian dan Pembangunan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100.000.000
28		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100.000.000
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			
29	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	25.000.000
30		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	25.000.000
31	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	25.000.000
Dinas Pertanian			
32	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	50.000.000
Total Anggaran (Rp)			2.311.160.000

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Tabel 5.16
Program Kolaborasi Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2026

No	Aksi	OPD Penanggung Jawab	Sub Kegiatan Tahun 2026	Pagu Indikatif (Rp)
	Tujuan Strategis 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim			
1	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan lokal yang beragam untuk mendukung kemandirian pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Penyediaan Parasarana Pembudidaya Ikan dalam satu daerah kabupaten Ikan	275.000.000,00
	Meningkatkan produksi pangan akuatik	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat	140.000.000,00
		Dinas PUTR	Rehabilitasi Embung	500.000.000,00
2	Meningkatkan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pre dan post market	DKPP	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5.000.000,00
		DKPP	Rekomendasi Keamanan pangan segar asal tumbuhan	5.000.000,00
		DKPP	Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolah dan pemasar	10.000.000,00
	Meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan pangan yang cukup, aman, bermutu dan halal	DKPP	Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan perkapita/tahun	100.000.000,00
3	Meningkatkan kapasitas pekerja pangan untuk meminimalkan kehilangan hasil panen	DKPP	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	48.000.000,00
	Meningkatkan penggunaan teknologi di sektor pertanian/perikanan/peternakan untuk menekan food loss pada proses produksi hingga pengemasan	Dinas Pertanian (Bidang Prasana dan Sarana Pertanian)	pengendalian dan Pemanfaatan kawasan (Pengadaan Combine 1 unit)	400.000.000,00
		DKPP	Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro kecil (Rehab UPI dan Sarpras 2 Unit)	400.000.000,00
	Tujuan Strategis 2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, Aman, dan Berketahanan Iklim			
1	Meningkatkan mekanisme distribusi pangan yang mencakup pangan komoditas unggulan daerah dan pangan lokal	DKPP	Stabilitas Pasok dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen (dari 10 baru ada 5, diusulkan 5 lagi)	125.000.000,00

No	Aksi	OPD Penanggung Jawab	Sub Kegiatan Tahun 2026	Pagu Indikatif (Rp)
2	Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengolahan dan diversifikasi pangan lokal untuk adaptasi terhadap perubahan iklim serta mitigasi risiko gagal panen akibat bencana.	DKPP	Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi (sosialisasi pengendalian desa rawan pangan	25.000.000,00
	Mengembangkan skema perlindungan bagi petani, peternak dan nelayan melalui layanan campuran, seperti konsultasi teknis, skema pinjaman, dan asuransi pertanian, peternakan dan perikanan.	Dinas Pertanian (Bidang Prasana dan Sarana Pertanian)	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	540.000.000,00
Tujuan Strategis 3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi Esensial				
1	Kampanye isi piringku berbahan baku lokal yang aman dan halal melalui berbagai kanal komunikasi sejak usia dini	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	65.000.000,00
		DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	65.000.000,00
	Melibatkan influencer, tokoh masyarakat/agama/politik/selebgram lokal dalam kampanye perubahan perilaku konsumsi pangan lokal bergizi seimbang yang adaptif perubahan iklim.	DKPP	Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	30.000.000,00
2	Meningkatkan edukasi dan sosialisasi keamanan pangan segar pre dan post market	DKPP	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan	30.000.000,00
3	Meningkatkan konsumsi pangan nabati, seperti umbi-umbian dan kacang-kacangan	DKPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan Per Kapita	65.000.000,00
4	Menetapkan regulasi mengenai ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat : Orientasi Konselor ASI bagi Kader Posyandu : (60 kader posyandu) : Rp. 40juta (belum ada, usulan)	50.380.000,00
5	Meningkatkan akses air bersih dan sanitasi layak di fasilitas kesehatan, sekolah, dan komunitas rentan terhadap perubahan iklim.	DPUTR	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan perpipaan (400 titik x 500ribu = 200juta) dari 773.700 SR (sambungan rumah) yang sudah di cek baru 23,11 % x 773.700	200.000.000,00

No	Aksi	OPD Penanggung Jawab	Sub Kegiatan Tahun 2026	Pagu Indikatif (Rp)
6	Mengembangkan sistem jual beli atau jaringan pasar produk pangan imperfect	DKPP	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Pangan	25.000.000,00

Sumber: Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Tabel 5.17
Program Kolaborasi Kampung Sehat Tahun 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
1	Intervensi Gizi/ PMT Balita Tidak Naik Berat Badan (Weight Faltering)	46.550.000	Dinas Kesehatan
	Penguatan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Sebagai Knci Pencegahan Stunting	35.700.000	
	Pengkajian dan Pembinaan PHBS (Transport Kader)	26.250.000	
	Penggandaan Format PHBS	1.050.000	
	Cetak leaflet PHBS	52.500.000	
	Penguatan kader dalam pengolahan data PHBS (snack dan makan)	17.500.000	
	Penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat (snack)	15.750.000	
	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan PHBS oleh tim Kabupaten (perjalanan dinas)	2.325.000	
2	Penguatan desa dan kader, fasilitasi partisipasi Masyarakat	30.390.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Kampanye Informasi dan Digitalisasi Data Kesehatan	80.000.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
4	Bantuan sosial, intervensi kelompok rentan	175.000.000	Dinas Sosial
5	Pembangunan Rumah Sehat dan Sanitasi	150.500.000	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Intervensi pengelolaan sampah (pembelian gerobak sampah)	49.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU
7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (termasuk survey awal dan akhir)	17.485.000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Total Anggaran yang dibutuhkan		700.000.000	

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Tabel 5.18
Program Kolaborasi Kampung Literasi Tahun 2026

NO	URAIAN	SASARA N (DESA)	PAGU INDIKATIF (RP)	PERANGKAT DAERAH
1	Pengadaan Buku	5	134.900.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial		118.750.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3	Gebyar Literasi	5	150.000.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4	Literasi Digital		33.750.000	Dinas Komunikasi dan Informasi
5	Pelatihan Tutor dalam meningkatkan kualitas pembelajaran literasi dan numerasi		63.266.700	Disdik (bid PNF)
			500.666.700	

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Program Strategis / Program Kolaboratif dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk tahun 2026.

5.2.6 Pagu Indikatif Inovasi Daerah (PIID) Tahun 2026

Inovasi daerah merupakan sarana pemerintah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang lebih produktif, efisien dan efektif. Hal tersebut sebagai upaya mempercepat terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah sebagai mana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah melalui pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Upaya pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mendorong inovasi daerah tercermin dalam pemberian Pagu indikatif inovasi daerah kepada perangkat daerah yang memiliki berbagai inovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon. Pemberian pagu indikatif inovasi daerah ini sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengusulan Inisiatif, Penilaian, Dan Pemberian Insentif Inovasi Daerah Di Kabupaten Cirebon. Adapun rincian Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.19 berikut:

Tabel 5.19
Pagu Indikatif Inovasi Daerah Tahun 2026

NO	NAMA INOVASI	OPD	PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH
1	Peran Pendidikan Perubahan Iklim Dalam Meningkatkan PRLH Siswa	Dinas Pendidikan	200.000.000
2	E-Perencanaan RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon	RSUD Arjawinangun	70.000.000
3	Pelayanan Delivery Obat Langsung Ke Rumah Pasien RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon	RSUD Arjawinangun	70.000.000
4	Sistem Pelayanan Pemerlu Atensi Sosial (SIMPLE PAS)	Dinas Sosial	150.000.000
5	Satpol PP Goes To School	Satpol PP	130.000.000
6	Sistem Informasi Geographis Pajak Bumi Dan Bangunan (SIGAP)	Bapenda	200.000.000
7	Festival Layang-Layang Bersama Wisata Muara Mundu	Disbudpar	100.000.000
8	Wisata Kubang River Tubing	Disbudpar	100.000.000
9	Desa Wisata Gegesik Kulon	Disbudpar	100.000.000
10	Industrial Cluster Development (INCLUDE)	Disperdagin	200.000.000
11	Indikator Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cirebon (ISUN KATON)	BKAD	100.000.000
12	Platform Pembelajaran Ebangkom Elmu	BKPSDM	200.000.000
13	Pengembangan Pertanian Berbasis Simtani Dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Pertanian Melalui Optimalisasi Luas Tanam, Hasil Panen Dan Sumber Air (Irigasi Dan Tadah Hujan)	Dinas Pertanian	150.000.000
14	Sekolah Siaga Kependudukan Jadikan Anak Mampu Berencana, BerkeLanjutan dan Berkembang (SEGA JAMBLANG) Dengan Pendekatan Sedulur Sinau Kependudukan Sekolah Siaga Kependudukan (SDSK)	DPPKBP3A	200.000.000
15	Transformasi Formal Usaha Mikro Melalui Bds "TRANSFUMI-BDS"	Dinkop UMKM	200.000.000

NO	NAMA INOVASI	OPD	PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH
16	Administrasi Kependudukan melalui Program Kelingan Adminduk menuju Desa REMPEG SAWIJI (Desa Sadar Adminduk)	Disdukcapil	200.000.000
17	Kantor Ku, Kebun Ku, Wisata Ku	Kecamatan Gempol	100.000.000
18	Pengembangan Geospatial <i>Decision Support System</i> (DSS) untuk pengambilan kebijakan berbasis data	Bapperida	100.000.000
19	Pengembangan <i>Internet of Things</i> (IoT) untuk Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perhubungan	Bapperida	100.000.000
TOTAL PAGU INDIKATIF INOVASI DAERAH TAHUN 2026			2.670.000.000

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

5.3. Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang dimuat pada dalam dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan pada saat perumusan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar. SPM didasarkan pada pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Adapun mengenai ketentuan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Secara detil informasi rencana pendanaan pelaksanaan SPM Tahun 2025 berdasarkan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM di Kabupaten Cirebon Tahun 2023-2027 dapat dilihat pada Tabel 5.20 sebagai berikut:

Tabel 5.20
Alokasi Rencana Pendanaan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026

NO	SPM	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
1.	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	265.005.500,00
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	265.005.500,00
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	265.005.500,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	116.462.377.400,00

NO	SPM	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	74.626.442.100,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14.947.200.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	780.000.000,00
		Pengadaan Mebel Sekolah	3.347.520.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	369.212.100,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	150.576.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	40.035.000,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	116.553.700,00
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	68.814.800,00
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	32.302.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	441.018.000,00
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.910.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	830.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	60.000.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	2.544.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	41.889.209.700,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30.130.647.000,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.095.850.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.360.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.877.600.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	279.431.800,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	89.750.000,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	352.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	275.408.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.800.607.200,00
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.527.099.600,00
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.300.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.915.000.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	149.400.000,00
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	58.800.000,00
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	50.300.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	30.000.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	423.600.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	599.999.600,00

NO	SPM	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.178.188.700,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	181.052.400,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	195.113.400,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	63.202.600,00
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	2.738.820.300,00
Sub Total SPM Bidang Pendidikan			116.727.382.900,00
Total belanja SKPD			1.387.017.903.845,00
Rasio belanja SPM			8,42
2.	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.184.985.000,00
		Peningkatan Pelayanan BLUD	153.184.985.000,00
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	153.184.985.000,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.949.225.000,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.949.225.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	190.274.700,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.361.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	71.379.300,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	74.450.700,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	106.964.700,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	521.334.600,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	201.608.700,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	157.797.000,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	125.357.400,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	158.834.100,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	139.073.700,00
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.131.788.700,00
Sub Total SPM Bidang Kesehatan			156.134.210.000,00
Total belanja SKPD			926.423.828.157,00
Rasio belanja SPM			16,85
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.900.000.000,00
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.900.000.000,00
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	600.000.000,00
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.700.000.000,00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600.000.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	20.000.000.000,00

NO	SPM	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000.000,00
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	6.000.000.000,00
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	14.000.000.000,00
Sub Total SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			23.900.000.000,00
Total belanja SKPD			293.276.938.814,00
Rasio belanja SPM			8,15
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	399.099.800,00
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	119.999.800,00
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	69.999.800,00
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	50.000.000,00
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	279.100.000,00
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	279.100.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8.957.682.900,00
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	8.957.682.900,00
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8.957.682.900,00
Sub Total SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			9.356.782.700,00
Total belanja SKPD			39.211.390.132,00
Rasio belanja SPM			23,86
5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.183.560,00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.183.560,00
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.183.560,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.298.597.700,00
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.998.597.700,00
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.394.922.000,00
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	527.301.000,00
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	4.000.000,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	72.374.700,00
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300.000.000,00

NO	SPM	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	300.000.000,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4.791.414.200,00
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.611.679.800,00
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	911.679.800,00
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	700.000.000,00
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.579.838.000,00
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	674.388.000,00
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	148.486.400,00
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	600.000.000,00
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	956.963.600,00
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	599.896.400,00
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	599.896.400,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	12.557.800.700,00
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	9.264.344.300,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	310.211.400,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.391.406.300,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	649.506.000,00
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	600.000.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.236.506.600,00
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	21.671.200,00
		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	55.042.800,00
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	219.171.800,00
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	139.022.200,00
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	80.149.600,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	2.524.493.600,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	112.494.800,00
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	1.494.666.800,00

NO	SPM	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	917.332.000,00
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	549.791.000,00
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	140.842.000,00
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	6.760.000,00
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	402.189.000,00
Sub Total SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			19.681.996.160,00
Total belanja SKPD			56.728.986.770,00
Rasio belanja SPM			34,69
6.	Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.000.000,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.676.754.000,00
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.676.754.000,00
		Penyediaan Permakanan	1.300.729.800,00
		Penyediaan Alat Bantu	1.049.999.400,00
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	49.991.700,00
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	213.028.500,00
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	227.656.800,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	49.998.600,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	249.358.600,00
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	510.996.200,00
		Pemberian Layanan Rujukan	24.994.400,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	849.616.000,00
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	849.616.000,00
		Penyediaan Makanan	749.796.000,00
		Penyediaan Sandang	39.860.000,00
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.960.000,00
		Pelayanan Dukungan Psikososial	50.000.000,00
Sub Total SPM Bidang Sosial			4.541.370.000,00
Total belanja SKPD			56.728.986.770,00
Rasio belanja SPM			8,01

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

5.4. Rencana Pendukung Alternatif Pendanaan Pembangunan Tahun 2026

5.4.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN Tahun 2026

Dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, dan otonomi desa, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, Pemerintah mengalokasikan Transfer ke Daerah (TKD), yang sumber pendanaannya sepenuhnya

berasal APBN. Kebijakan terkait TKD diperbaharui dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). TKD terdiri atas: (1) Dana Bagi Hasil (DBH); (2) Dana Alokasi Umum (DAU); (3) Dana Alokasi Khusus (DAK); (4) Dana Otonomi Khusus (Otsus); (5) Dana Keistimewaan; dan (6) Dana Desa.

A. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain non-penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

B. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. Kebijakan pengelolaan DAU mengalami perubahan sejak diterbitkannya PMK No. 211/PMK.07/2022 dan PMK No.212/PMK.07/2022 yang mengatur tentang pengelolaan DAU yang dilaksanakan untuk tahun anggaran 2023. Alokasi DAU TA 2023 terbagi atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU yang ditentukan penggunaannya.

DAU yang tidak ditentukan penggunaannya diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai dengan prioritas daerah. Sementara DAU yang ditentukan penggunaannya disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah antara lain untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, dan bidang layanan umum.

Penggunaan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang pekerjaan umum. Sementara untuk penggunaan DAU bidang layanan umum dialokasikan untuk dukungan pendanaan kelurahan dan dukungan penggajian PPPK.

C. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan: (a.) mencapai prioritas nasional; (b.) mempercepat pembangunan Daerah; (c.) mengurangi kesenjangan layanan publik; (d.) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau (e.) mendukung

operasionalisasi layanan publik.

DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK non-fisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- c. Hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Usulan kegiatan DAK Fisik Tahun 2026 dikelola melalui aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) DAK, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh provinsi dan penilaian kelayakan teknis oleh Kementerian/ Lembaga teknis terkait, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Adapun pagu anggaran indikatif DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2025 Untuk mendukung Prioritas Nasional Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.21 sebagai berikut:

Tabel 5.21
Pagu Anggaran Indikatif DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif DAK Tahun 2025	
		DAK Fisik (Rp)	DAK Non Fisik (Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	386.113.984.000
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.902.797.000	-
	TOTAL	10.902.797.000	386.113.984.000

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

Tabel 5.22
Rencana Dukungan APBD Terhadap Pembiayaan Bersumber Pada DAK

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
1.	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah		265.005.500,00	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14.947.200.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100.000.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	780.000.000,00		
		Pengadaan Mebel Sekolah	3.347.520.000,00		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		369.212.100,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			150.576.800,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		40.035.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		116.553.700,00	
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	68.814.800,00		
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		32.302.000,00	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		441.018.000,00	
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	8.910.000.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	830.000.000,00		
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		60.000.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik			2.544.000.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	41.889.209.700,00		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.095.850.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	21.360.000.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.877.600.000,00		
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		279.431.800,00	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		89.750.000,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			352.000.000,00
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		275.408.000,00	

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	1.800.607.200,00		
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.300.000.000,00		
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	3.915.000.000,00		
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		149.400.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		58.800.000,00	
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik		50.300.000,00	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		30.000.000,00	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	423.600.000,00		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	599.999.600,00		
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		181.052.400,00	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		195.113.400,00	
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		63.202.600,00	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			2.738.820.300,00
2.	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Peningkatan Pelayanan BLUD			
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		153.184.985.000,00	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	190.274.700,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	70.361.400,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	71.379.300,00		

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	74.450.700,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	106.964.700,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	521.334.600,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	201.608.700,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	157.797.000,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	125.357.400,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	158.834.100,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	139.073.700,00		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.131.788.700,00		
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		600.000.000,00	
		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.700.000.000,00		
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600.000.000,00		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	6.000.000.000,00		
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)			14.000.000.000,00
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani		69.999.800,00	
		Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		50.000.000,00	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		279.100.000,00	
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		8.957.682.900,00	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		34.183.560,00	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		1.394.922.000,00	
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa		527.301.000,00	
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah		4.000.000,00	

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja		72.374.700,00	
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah		300.000.000,00	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)		911.679.800,00	
		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		700.000.000,00	
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		674.388.000,00	
		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota		148.486.400,00	
		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota		600.000.000,00	
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		956.963.600,00	
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		200.000.000,00	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		599.896.400,00	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		310.211.400,00	

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.391.406.300,00	
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		649.506.000,00	
		Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)		600.000.000,00	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri		6.236.506.600,00	
		Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		21.671.200,00	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		55.042.800,00	
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		139.022.200,00	
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		80.149.600,00	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat		112.494.800,00	
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran		1.494.666.800,00	
		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		917.332.000,00	
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia		140.842.000,00	
		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		6.760.000,00	

NO	SPM	URAIAN	RENCANA ALOKASI ANGGARAN DAK (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI APBD II (Rp)	RENCANA ALOKASI ANGGARAN PENUNJANG DAK YANG BERSUMBER DARI BANPROV (Rp)
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi		402.189.000,00	
6.	Sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
		Penyediaan Permakanan			
		Penyediaan Alat Bantu			
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			
		Pemberian Layanan Kedaruratan			
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
		Pemberian Layanan Rujukan			
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Makanan			
		Penyediaan Sandang			
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			
		Pelayanan Dukungan Psikososial			

Sumber: diolah Bapperida, 2025 (aplikasi e-perencanaan.cirebonkab.go.id)

D. Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan

yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.

5.4.2 Rencana Usulan Kegiatan Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator makro Kabupaten/Kota yang menunjang pencapaian target indikator makro provinsi dan prioritas provinsi, percepatan pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Barat, program-program strategis Provinsi Jawa Barat dan kebijakan kewilayahan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggulirkan Bantuan Keuangan dan Hibah kepada kabupaten dan kota dengan skema pendanaan kompetitif.

Rekapitulasi usulan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang telah diiput pada SIPD sebanyak 240 usulan kegiatan pada sebanyak urusan pemerintahan, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.22 berikut:

Tabel 5.23
Usulan Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

NO	USULAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT	JUMLAH USULAN
DINAS PENDIDIKAN		
1	#BK Bantuan Keuangan bagi Guru Bantu Non PNS Daerah Terpencil (SD/MI)	2
DINAS KESEHATAN		
1	#BK Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	1
2	#BK Pengembangan Rumah Sakit	5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG		
1	#BK Rekonstruksi Jalan	85
2	#BK Rehabilitasi Jalan Kabupaten/Kota	8
3	#BK Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65
4	#BK Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Sungai/Drainase	8
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN		
1	#BK Pembangunan Toilet dan Tangki Septik Individual	26
2	#BK Penataan Kawasan Kumuh Kewenangan Kab/Kota	2
3	#BK Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah	6
4	#BK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diluar Kawasan Kumuh	3
5	#BK Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Lokasi Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten/Kota	1
6.	#BK Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau	1

NO	USULAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA BARAT	JUMLAH USULAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
1	#BK Bantuan Keuangan Khusus Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1
2	#BK Dana Operasional Posyandu Kelurahan dan TP Posyandu Kab/Kota, Kecamatan dan Kelurahan	1
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
1	#BK Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Olahraga	1
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN		
1	#BK Pengembangan Budidaya Perikanan	2
DINAS PERTANIAN		
1	#BK Pengadaan Alat Mesin Pertanian	1
DINAS PERHUBUNGAN		
1	#BK Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	20
DINAS KETENAGAKERJAAN		
1	#BK Peningkatan Sarana dan Prasarana Latihan Kerja	1
TOTAL USULAN		240

Sumber: Hasil Pengolahan Data Input SIPD, tahun 2025

5.4.3 Rencana Usulan Kegiatan yang Bersumber dari Corporate Social Responsibility (Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)) Tahun 2026

Corporate Social Responsibility (CSR) atau juga dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya perencanaan dan pelaksanaan secara tepat sasaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mensinergikan dengan program pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memiliki komitmen untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat. Setiap pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diharapkan memperoleh hasil yang maksimal, maka kegiatan yang dilaksanakan harus selaras dengan kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Dalam mendukung program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026, Program pembangunan yang dapat dibiayai melalui dana TJSLP, meliputi:

- a. pendidikan, diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal, dan informal;

- b. kesehatan, diarahkan agar seluruh wilayah di Daerah dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, obat-obatan, fasilitas dan alat kesehatan, makanan, serta pemberdayaan masyarakat;
- c. kesejahteraan sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. olah raga, seni, budaya, dan pariwisata diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kegiatan olah raga, seni, moral, adat istiadat, hukum, pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan olah pikir yang didapat dari masyarakat;
- e. kewirausahaan, diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha koperasi dan usaha mikro, agrobisnis, pertanian, peternakan, perikanan, dan pasar rakyat baik melalui pembiayaan, pelatihan, dan bantuan teknis;
- f. perlindungan dan pengelolaan lingkungan, diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi, dan pemulihan terhadap lingkungan;
- g. infrastruktur dan sanitasi lingkungan, diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan;
- h. sarana dan prasarana keagamaan; dan
- i. program pembangunan lainnya yang disepakati oleh Perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

RKPD adalah instrumen kebijakan untuk merencanakan capaian kinerja pembangunan sebagaimana direncanakan dalam RPJMD/RPD dari tahun ke tahun. Apa yang direncanakan pada suatu periode RKPD, hasilnya akan menjadi salah satu masukan berharga bagi perumusan kebijakan RKPD pada periode berikutnya, guna terus memperbaiki efektivitas, efisiensi, dan keekonomian kebijakan pembangunan dari waktu ke waktu.

Dalam rangka mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maka diterjemahkanlah berbagai kebijakan pembangunan ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing. Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah maka dirumuskan berbagai tolok ukur atau indikator pembangunan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dari suatu proses pembangunan. Secara teknis, kinerja diartikan sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dengan ditetapkannya berbagai indikator kinerja maka pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cirebon dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. Dalam hal ini, penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menggambarkan potret keberhasilan pembangunan Kabupaten Cirebon masa kini dan mendatang.

6.1. Penetapan Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 sebagaimana dituangkan pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Kabupaten Cirebon Tahun 2026

Indikator Makro	Target Provinsi Pada RKP 2026	Target Kabupaten/Kota berdasarkan RKPD Provinsi Jawa Barat	Target Kabupaten Cirebon	Hasil Kesepakatan
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,7 – 6,2	4,64 - 6,37	6,37	6,37
PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	63,9 – 65,6	30,95 - 33,32	31,92	32,37
Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	12,8	2,33	2,33	2,33
Tingkat Kemiskinan (%)	5,50 – 6,00	9,24 - 10,1	10,10	10,10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,30 – 6,65	6,02 - 6,35	5,74	5,74
Rasio Gini (Poin)	0,381 – 0,410	0,332 - 0,368	0,354	0,354
Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	0,57	73,29	73,29	73,29
Penurunan Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq/Miliar)	6,97	5,80	5,80	5,80
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	64,31	63,33	63,33	63,33
Prevalensi Stunting (%)	-	18,69	18,69	18,69

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

6.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan. Indikator kinerja daerah dibagi menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029, penetapan IKU bertujuan memberikan gambaran keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah yang disajikan pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Cirebon Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,48
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	4,08
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,37
4	PDRB Perkapita ADHB	%	32,37
5	Tingkat Kemiskinan	%	10,10
6	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	%	4,06
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,74
8	Indeks Pembangunan Manusia	%	73,62
9	Indeks Kesalehan Sosial	Angka	80,00
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	126,39

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

6.3 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator program pembangunan daerah setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja yang dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Adapun capaian indikator Kinerja Kunci Kabupaten Cirebon Tahun 2024 serta pentahapan target indikator Kinerja Kunci Kabupaten Cirebon Tahun 2026 berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (Indikator Kinerja Kunci) Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Cirebon Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	Persen	5,57
2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	26,95
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	63,33
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	21,33
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	3,77
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	75,5
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (Kumulatif)	Ton Co2eg	754,272.25
8	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,56
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Indeks Gini	Angka	0,354
2	Indeks Kesehatan	Angka	0,853
3	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,46
4	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	105,41
5	Prevalensi Stunting	Persen	16,22
6	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	91
7	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	91,35
8	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	98,64
9	Indeks Pendidikan	Angka	0,615
10	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,97
11	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten	Persen	35,6
13	Indeks Kebudayaan daerah	Angka	47,76
14	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,95
15	Indeks Pembangunan Keluarga	Angka	64,8
16	Indeks Zakat Nasional	Angka	0,54
III	ASPEK DAYA SAING		
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	20,43
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	3,39
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	1.517.668
4	Pertumbuhan PDRB sektor Unggulan Daerah	Persen	5,6
5	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,73
6	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Persen	6,84
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	4,06
8	Pertumbuhan PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	6,88
9	Pertumbuhan PDRB Sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen	7.13

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian (garam)	Persen	0,41
11	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. Juta	17,98
12	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kabupaten	Persen	85,11
13	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	3,25
14	Indeks Inovasi Daerah	Angka	62,57
15	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	67,53
16	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	48,76
17	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	Persen	4,06
18	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	28,31
19	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	-18,07
20	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	89,81
21	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persen	84,99
22	Persentase Desa Mandiri	Persen	52,91
23	Indeks Desa	Persen	81,39
24	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	0,75
25	Tingkat Inflasi	Persen	2,95
26	Jumlah Kerjasama Regional dan Internasional	Kerjasama	3
27	Rasio Kemandirian Fiskal	Persen	18,26
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM		
1	Nilai SAKIP	Angka	69,2
2	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,35
3	Opini BPK	Opini	WTP
4	Indeks SPBE	Angka	3,81
5	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	54
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI		
1.	PENDIDIKAN		
1	Skor Kemampuan Literasi SD	Angka	66,03
2	Skor Kemampuan Literasi SMP	Angka	70,42
3	Skor Kemampuan Numerasi SD	Angka	60,82
4	Skor Kemampuan Numerasi SMP	Angka	63,87
5	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	Persen	83,69
6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12	Persen	99,77
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15	Persen	99,68
8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Persen	30,94
9	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	65,81
10	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Persen	74,48
11	Iklim Inkulisivitas SD	Angka	63,66
12	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	60,16
13	Iklim Keamanan SD	Angka	75,15
14	Iklim Keamanan SMP	Angka	70,95
15	Iklim Kebinekaan SD	Angka	74,25
16	Iklim Kebhinekaan SMP	Angka	71,16
2.	KESEHATAN		
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	1,08
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi	Persen	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	97,33
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	95,13
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	97,17
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	95,87
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai Standar	Persen	59,35
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	95,17
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	78,72
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	99,66
3.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	3,48
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	24,92
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Persen	93,55
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	91,38
6	Mengukur Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	Persen	98,39
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	63,72
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	29,58
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100
4.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Persen	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	1,56
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	Persen	68,64
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,04
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	81,25
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	0,75
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100
6	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan di luar panti (indikator SPM)	Persen	91,98
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	12
6.	SOSIAL		
1	Tingkat persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	0,98
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Persen	100
7.	TENAGA KERJA		
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	80
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Persen	1,6
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persen	34,84
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100
5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Persen	73
8.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	14,73

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	82
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	5,21
9.	PANGAN		
1	Persentase cadangan pangan	Persen	60
10.	PERTANAHAN		
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	0,38
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100
3	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100
11.	LINGKUNGAN HIDUP		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Angka	63,33
2	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Persen	0,08
12.	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
1	Persentase penduduk usia 17 tahun ke atas yang telah melakukan Perekaman dan memiliki KTP Elektronik	Persen	99,75
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60
3	Persentase Kepemilikan akta kelahiran	Persen	98
4	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	35
14.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Anak	2,12
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	65
3	Persentase Kebutuhan ber - KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	7,37
15.	PERHUBUNGAN		
1	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Persen	0,75
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C	0,18
16.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	80%
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik,Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	88%
17.	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH		
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	15,40
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,2

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
18.	PENANAMAN MODAL		
1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Persen	4,06
19.	KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA		
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	1,47
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	24,06
20.	STATISTIK		
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100
21.	PERSANDIAN		
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	75
22.	KEBUDAYAAN		
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100
23.	PERPUSTAKAAN		
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	73,17
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	59,23
24.	KEARSIPAN		
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasiona (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Persen	98,48
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	85
25.	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
1	Persentase Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota	Persen	100
26.	PARIWISATA		
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	2,21
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kab/Kota	Persen	15,25
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	33,75
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	4,9
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	7,8
27.	PERTANIAN		
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Hektar	94,735
2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	10
30.	PERDAGANGAN		
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	84,91

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2026
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	63,04
31.	PERINDUSTRIAN		
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	1,72
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	3,36
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	3,14
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	Persen	3,14

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

BAB VII

PENUTUP



RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yaitu pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 atau pada tahapan pertama (I) RPJPD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2045. Penyusunan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan tujuan pembangunan terutama tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan perencanaan pembangunan daerah setelah ditetapkannya pimpinan daerah terpilih di tahun 2025 yang akan melaksanakan janji politiknya yang tertuang di dalam dokumen RPJMD yang baru (RPJMD Tahun 2025-2039). Oleh karena itu, perencanaan di tahun 2026 telah membawa visi-misi dan program-program kepala daerah sehingga harus berdasarkan rancangan program dan kegiatan yang telah tertuang di RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029 khususnya di tahun pertama di tahun 2026.

RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 disusun bersamaan dan sekaligus akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan pada bidang urusan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, penyusunan RKPD ini melibatkan dan utamanya koordinasi horisontal dengan setiap Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis pembangunan daerah. Poin penting berikutnya dalam dokumen ini adalah adanya integrasi antara program dan kegiatan serta pendanaan/penganggaran yang menjadi salah satu titik vital dalam merealisasikan optimalisasi rencana pembangunan daerah. Pendanaan pagu indikatif akan berfokus pada program-program prioritas pembangunan daerah yang bertujuan mengefektifkan dan mengefisiensikan setiap tahapan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Melalui kebijakan pembangunan sebagaimana diuraikan dalam RKPD ini, diharapkan dapat:

1. Penguatan dan percepatan pembangunan daerah melalui beberapa program kolaboratif meliputi: penanganan stunting, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui sector pariwisata, peningkatan ketahanan pangan
2. Meningkatkan koordinasi dan fokus penyelenggaraan pembangunan antar instansi pemerintah, antara pelaku pemerintah dan non pemerintah (swasta, NGO, dll) serta pelibatan masyarakat di berbagai tingkatan kehidupan sosial; dan
3. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keekonomian penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Cirebon sebagai motor penggerak utama pembangunan daerah dan pelayanan publik, yang antara lain makin intensifnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mekanisme kerja birokrasi dan pelayanan masyarakat berbasis smart government.

Penyusunan dokumen perencanaan ini diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan Kabupaten Cirebon ini diasumsikan berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholders* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi. Dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh *stakeholders* dan masyarakat, diharapkan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Cirebon dapat terlaksana secara optimal.

7.1. Kaidah Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), mempersyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram, dalam satu Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah.

RKPD Tahun 2026 merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 yang

harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan di Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan berbagai prioritas dan kebijakan strategis yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga daerah, RKPD Tahun 2026 merupakan langkah awal penyusunan R-APBD sehingga RKPD ini menjadi pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tahun 2026 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Tahun 2026.
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranhir Renja PD) Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2026.
4. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 melalui pengendalian dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.
6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2026 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.
7. Bupati, melalui Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2026.
8. Kepala Bappelitbangda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan

menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Cirebon tahun berikutnya.

9. RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Cirebon tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon.

7.2. Kaidah Pendanaan

Aspek pendanaan dalam RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 tidak hanya bersumber dari dana pemerintah, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara mandiri maupun dalam skema kemitraan. Secara umum prinsip-prinsip aspek pendanaan pada RKPD Tahun 2026 ini yaitu:

1. Pendanaan program dan kegiatan seluruh sektor yang dilakukan di Kabupaten Cirebon mengikuti prinsip “money follow programme” sehingga penekanan pada kinerja outcome yang dirasakan masyarakat banyak bukan pada input program dan kegiatan.
2. Peningkatan atau sekurang-kurangnya dapat dipertahankan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah baik melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan, maupun yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
3. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan swadaya masyarakat dan investasi swasta.
4. Pembinaan untuk mewujudkan iklim yang semakin kondusif bagi peningkatan pembiayaan melalui skema/pola kemitraan, baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, antara masyarakat dengan swasta atau ketiganya.

Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip di atas, diperlukan upaya peningkatan kemampuan pendanaan dan pengelolaan sumber keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan berkesinambungan.

7.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam implementasi setiap tujuan dan sasaran pokok pada RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2026 terdapat beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RKPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen

dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setekah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi *Impact* atau *probability* atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dilaksanakan sebelum penyusunan RKPD Tahun 2026, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

BUPATI CIREBON,

TTD

Drs. H. IMRON, M.Ag